

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH

4.1 Urusan Wajib

4.1.1 Pendidikan

Pendidikan diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan bersekolah, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

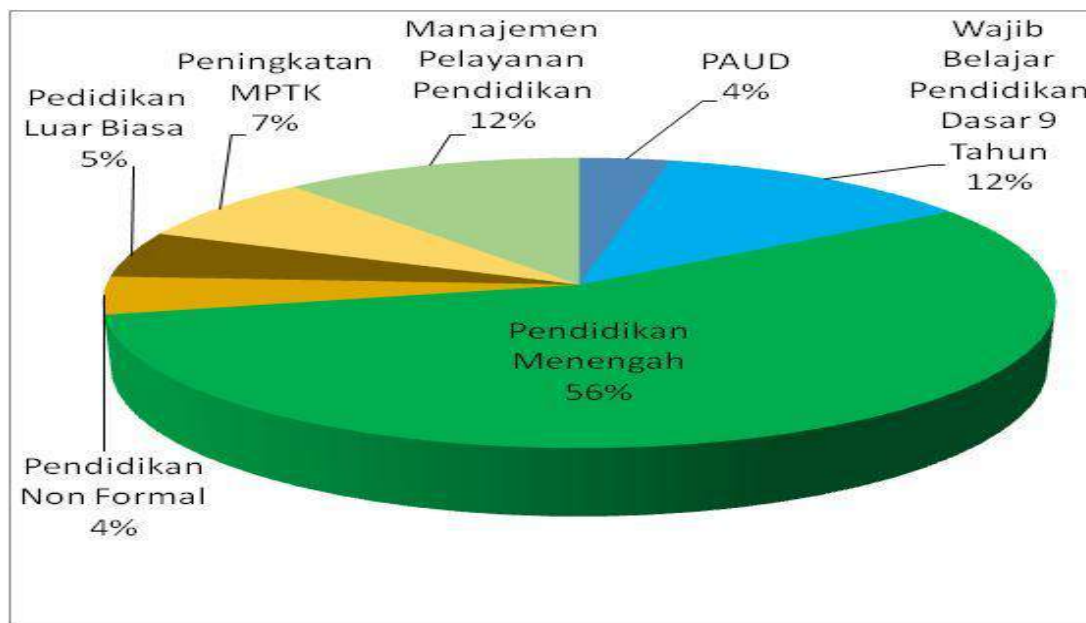
Anggaran belanja langsung untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui APBD Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 247.386.566.435,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.228.361.527.254,00 sisa anggaran sebesar Rp. 19.025.039.181,00 atau 92,31 %. Penyerapan anggaran ini meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya 85,26 %, seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini



Sumber: TAPD Provinsi Jambi

Gambar 4.1Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta
Realisasinya pada tahun 2013 -2015

Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan mempunyai 11 program dan 109 kegiatan, Porsi dana terbesar ada pada Program Pendidikan menengah sebesar 56% atau meningkat jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 51% dan yang terendah adalah Program Anak Usia Dini sebesar 4%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Sumber : TAPD

Gambar 4.2 Proporsi Belanja Langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2014 berdasarkan Program

Peningkatan Program Pendidikan menengah ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA dan sederajat dan meningkatkan Rasio SMK terhadap SMA. Sedangkan Alokasi Dana untuk Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Pelaksanaan dan Program Belanja Langsung Dinas pendidikan pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Usia Dini adalah salah satu hal penting untuk membekali anak menghadapi perkembangan masa depan. Untuk itu proses stimulasi atau pembelajaran yang bermakna sangat menentukan terwujudnya manusia

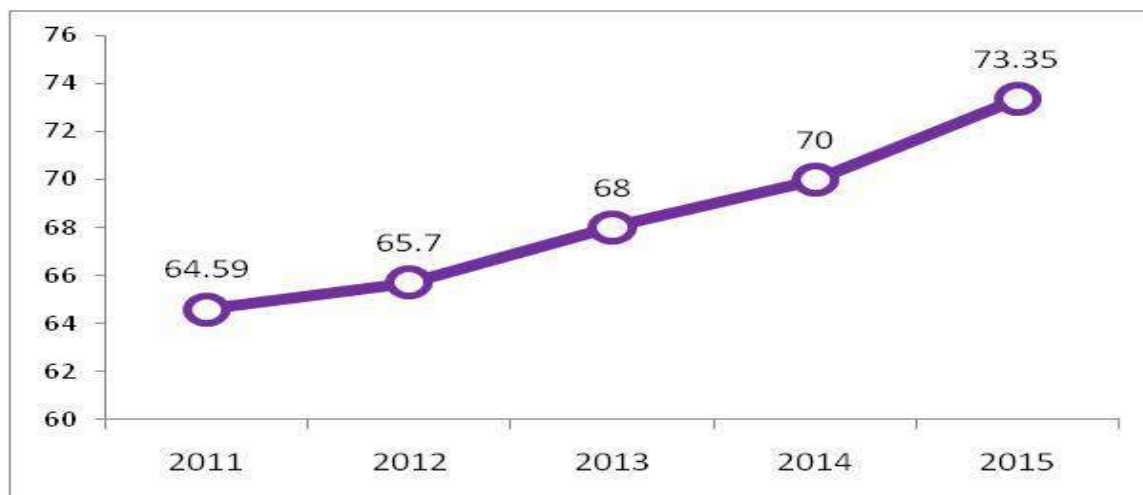
yang berkualitas. Anak perlu mendapatkan stimulasi atau pembelajaran pengamatan serta pengetahuan tentang hal-hal yang akan diperlukan dalam kehidupannya. Tuntutan zaman yang semakin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi, membuat Pendidikan Anak Usia Dini tidak mungkin hanya didapat dari keluarga saja, selain tuntutan tersebut masyarakat menginginkan kebutuhan akan informasi perkembangan anak terutama perkembangan sosialnya terhadap teman-teman sebayanya. Dimana informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Target Nasional bagi pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 adalah 75% anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan pendidikan. Di Provinsi Jambi terdapat peningkatan angka partisipasi dari Tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya dalam akses layanan PAUD.

Adapun anggaran untuk Program PAUD Tahun 2015 sebesar Rp.8.231.605.000 dengan realisasi Rp. 6.934.391.400,00 (84%) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Lomba kreasi seni Anak PAUD
- 2) Workshop pengembangan bahan ajar PAUD
- 3) Sosialisasi Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar keamanan bagi anak
- 4) Lomba peserta didik PAUD tingkat Provinsi
- 5) Lomba pembuatan APE dari bahan ajar
- 6) Rakor Penguatan kerjasama Organisasi dan kemitraan PAUD tingkat Kabupaten
- 7) Rapat Koordinasi 132 Kepala desa bagi Desa yang belum ada PAUD

Adapun capaian Angka partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia dini dari Tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Gambar 4.3 capaian Angka partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia dini dari Tahun 2011- 2015

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan meningkat dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015, kenaikan tersebut tentunya tidak lepas dari kesadaran orang tua tentang pentingnya Pendidikan sejak dini dan mempercayakan anak anak mereka untuk dititipkan pada lembaga PAUD.

Untuk mendukung kegiatan PAUD telah dilakukan Pembangunan Rumah Pintar 1 Unit di Kota Sungai Penuh dan dibangun PAUD Percontohan.

Jumlah lembaga menurut jenis satuan PAUD 2012-2015 terdiri dari :

Tabel 4.1
Jumlah lembaga PAUD tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Lembaga				
	TK	KB	TPA	SPS	Total
2012	1.170	1.303	48	333	2.854
2013	933	1.466	79	414	2.892
2014	1.007	1.792	51	214	3.064
2015	1.085	1.947	118	280	3.430

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Jumlah Peserta Didik PAUD berdasarkan jenis satuan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Jumlah Peserta Didik PAUD berdasarkan jenis satuan

No	KABUPATEN/ KOTA	TK	KB	TPA	SPS
1.	Kota Jambi	1.164	708	79	74
2.	Muaro Jambi				
3.	Batang Hari	3.156	2.008	45	122
4.	Tanjung Jabung Timur	1.529	5.922	16	622
5.	Tanjung Jabung Barat	1.553	2.599	61	600
6.	Tebo	2.253	2.338	136	649
7.	Bungo	1.623	3.290	37	114
8.	Sarolangun	522	1.850	0	29
9.	Merangin	3.278	3.046	59	550
10.	Kerinci	1.731	6.024	34	850
11.	Sungai Penuh	1.259	1.286	4	520
	Jumlah	18.068	29.155	256	4.130

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Secara umum program pendidikan dasar bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, disamping itu program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 dari dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp **29,411,162,000,00** dengan relisasi sebesar Rp. 25.861.333.606 (87,93%).

1) Rincian Program dan Kegiatan Tahun 2015 :

.Tabel 4.3

Program wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun

No	Uraian Program Dan Kegiatan	Jumlah anggaran
		(Rp)
1.	Penyusunan soal UASBN	2.466.250.000
2.	Kegiatan rakor BOS SD, SMP dan bidang dikdas	2.307.242.500
3.	Kegiatan O2SN SD	3.251.642.500
4.	Kegiatan O2SN SMP	3.038.415.000
5.	Kegiatan Pembinaan OSN SMP ke tingkat Nasional dan Pengurus OSIS	1.495.975.000
6.	Kegiatan lomba klub Olah Raga SD dan lomba gugus SD	881.782.000
7.	Kegiatan FLS2N SD	168.775.000
8.	Kegiatan pembinaan OSN, O2SN dan FL2SN PKPLK dikdas dan workshop Guru PKPLK dikdas	1.391.955.000
9.	Kegiatan BOS Diniyah Takmiliyah	133,895,000
10.	Pengelolaan SD SMP satu atap	250.775.000
11.	Kegiatan Bintek pengembangan Kurikulum jenjang SD dan SMP	10.485.700
12.	Bimbingan teknis Pengembangan kurikulum jenjang SD dan SMP	10.485.700.000
13.	Kegiatan FLS2N SMP	1.846.215.000
14.	Kegiatan Pembinaan OSN SD ke tingkat Nasional	562.540.000

2) Prestasi/ penghargaan yang diperoleh Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2015 :

a) OSN SD Tk. Nasional

- (1) Mata pelajaran IPA Juara II (Medali Perak) a.n. Albert Nicholas SD Bina Kasih Kota Jambi
- (2) Mata pelajaran IPA Juara III (Perunggu) a.n. Alif Rahmat SD islam AL Falah
- (3) Mata pelajaran MATEMATIKA Juara III (Perunggu) a.n. Steve Marcello SD Xaverius Kota Jambi

b) O2SN SMP tingkat Nasional

- (1) Karate Juara 1 Medali Emas a.n. M. Ridho Kurnia SMP 7 Kota Jambi
- (2) Lempar Lembing Juara 1 Medali Emas a.n. Didik Yulianda SMP 4 rantau Pandan Bungo
- (3) Renang Juara II Perak a.n. Ahmad sri Kaspur Jafar SMPN 2 Kota Jambi
- (4) Bulu Tangkis Juara III Perunggu a.n. Nurani Ratu Azzahra SMPN 7 Kota Jambi

c) FLSN SD Tk Nasional

- (1) Kreasi baru juara 1 Medali emas di Palembang
- (2) Kejuaran Karate The 29th coupe Internasional De Kayl, Luxemburg Juara 1 Medali Emas a.n. M. Ridho SMPN 7 Kota Jambi

Pada tahun 2015, jumlah SD di Provinsi Jambi sebanyak 2500 unit dan SMP sebanyak 123.780 unit. Jumlah SD yang terbanyak adalah Kabupaten Merangin (309 unit), begitu pula Jumlah SMP sebanyak 89 unit. Secara rinci jumlah SD dan SMP di Kabupaten/kota se Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang SD dan SMP tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah SD		Jumlah SMP	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Kota Jambi	219	64,224	62	25,192
2	Kota Sungai Penuh	73	10,096	13	4.424
3	Kab. Batanghari	211	32,33	51	9,075
4	Kab. Bungo	230	41.982	60	13.066
5	Kab. Kerinci	228	25.756	55	9,093
6	Kab. Tanjab Barat	209	37.885	60	9,692
7	Kab Merangin	309	47.883	89	11,956
8	Kab. Sarolangun	230	35.717	67	9.404
9	Kab. Tebo	239	41,302	56	11,558
10	Kab. Muaro Jambi	246	42.508	76	13.174
11	Kab. Tanjab Timur	206	24.824	46	7.125
	JUMLAH	2.400	404.507	633	123.780

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Rasio Guru SD terhadap Jumlah siswa di Provinsi Jambi yang tertinggi adalah di Kota Sungai penuh yaitu 11,27% dan yang terendah adalah di Kota Jambi. Sedangkan untuk jenjang SMP, rasio guru tertinggi ada di Kabupaten Kerinci dan terendah di Kota Jambi. Baik Rasio Guru SD ataupun SMP terhadap siswa di Provinsi Jambi masih terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar secara relatif sudah memadai, walau malah harus diakui ada indikasi bahwa di wilayah tertentu seorang guru SD hanya melayani siswa kurang dari 10. Akan tetapi guru-guru ini hanya terkonsentrasi di ibu kota Kabupaten/Kota dan kecamatan. Masih banyak desa-desa yang kekurangan guru. Kedepan tentunya harus ada upaya khusus untuk mendistribusikan guru secara merata. Disisi lain, dalam waktu 3 tahun kedepan ini di kabupaten/Kota Provinsi Jambi akan mengalami kekurangan guru secara serentak karena akan meningkatnya jumlah guru yang akan pensiun, sedangkan kebijakan pemerintah pusat untuk memoratorium Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam beberapa tahun kedepan akan menghambat daerah untuk penerimaan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di daerah.

Tabel 4.5
Jumlah guru SD berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Guru PNS		Jumlah Guru Non PNS		Jumlah guru Provinsi
	LK	PR	LK	PR	
Kota Jambi	317	1684	303	855	3,159
Kota S.Penuh	197	538	90	313	1,138
Kab. Batanghari	684	1151	224	467	2,526
Kab. Bungo	822	1122	176	436	2,556
Kab. Kerinci	733	896	332	680	2,641
Kab. Tanjab Barat	591	888	335	619	2,433
Kab Merangin	886	1389	427	810	3,512
Kab. Sarolangun	571	917	276	583	2,347
Kab. Tebo	690	985	304	701	2,68
Kab. Muaro Jambi	744	1407	175	448	2,774
Kab. Tanjab Timur	699	812	174	311	1,996
JUMLAH	6,93	11,79	2816	6223	27,762

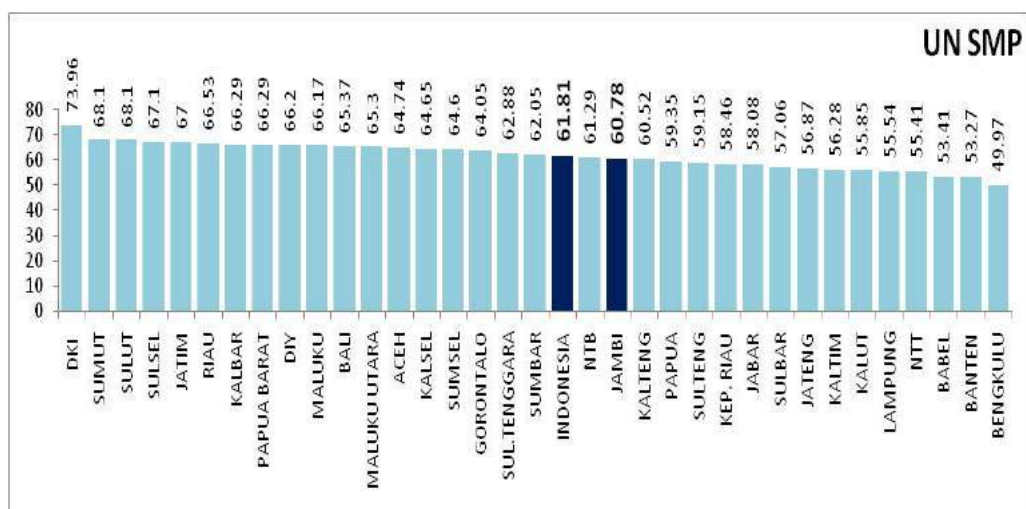
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Tabel 4.6
Jumlah guru SMP berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi
Jambi tahun 2015.

Kabupaten/Kota	Jumlah Guru PNS		Jumlah Guru Non PNS		Jumlah guru Provinsi
	LK	PR	LK	PR	
Kota Jambi	264	764	108	202	1,338
Kota Sungai Penuh	154	247	30	57	488
Kab. Batanghari	198	276	75	102	651
Kab. Bungo	226	357	89	156	828
Kab. Kerinci	423	345	170	193	1,131
Kab. Tanjab Barat	162	271	97	120	650
Kab Merangin	212	281	176	214	883
Kab. Sarolangun	212	232	132	181	757
Kab. Tebo	208	255	105	176	744
Kab. Muaro Jambi	308	473	218	352	1,133
Kab. Tanjab Timur	185	279	40	47	551
JUMLAH	2,55	3,8	1,67	2,82	9,154

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

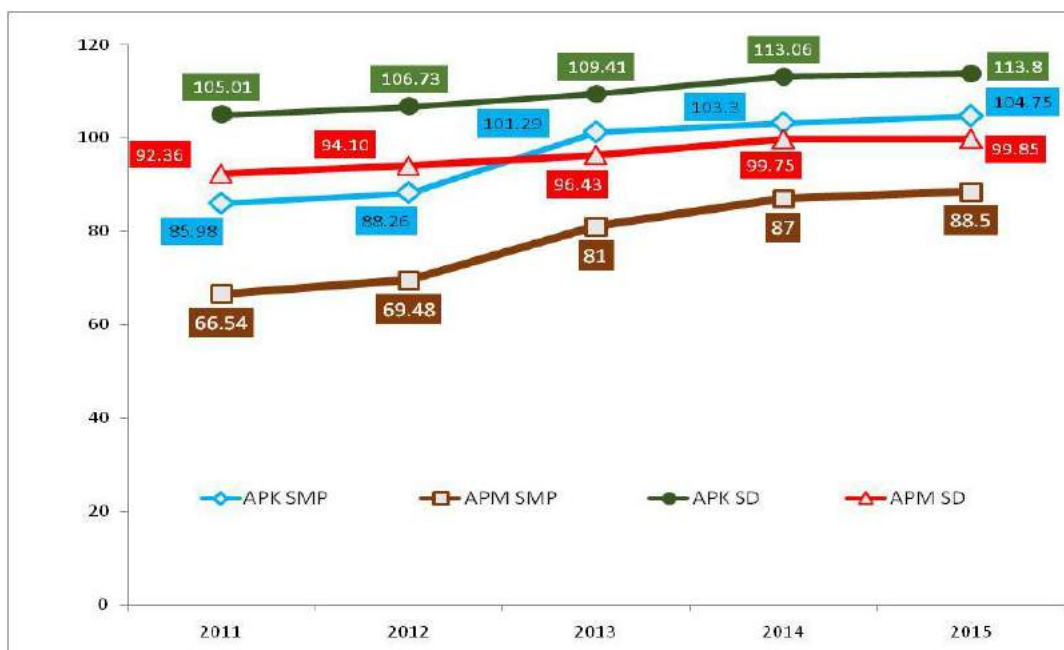
Untuk Pencapaian hasil Ujian Nasional jenjang SMP, provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional, yaitu ranking 20 dengan angka 60,78 sedangkan rata-rata nasional sebesar 61,81. Seperti yang tertera pada grafik dibawah ini:



Sumber: Kementerian DIKBUD

Gambar 4.4 Nilai UN SMP Provinsi di Indonesia

Pada pencapaian APM dan APK terdapat sedikit perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan dinas pendidikan. Untuk data APK dan APM tahun 2011-2015 dipakai data BPS, sedangkan untuk data APK dan APM tahun 2015 memakai data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan mengingat BPS belum mengeluarkan data untuk tahun 2015. Dari gambar 4.1.4 dibawah ini terlihat peningkatan APK dan APM SD sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan APK SD mencapai 113,8 ini turut di dorong oleh meningkatnya kejar paket A. Sedangkan peningkatan APM SD yang mencapai 99,85% harus tetap ditingkatkan dengan memastikan tidak ada anak di jenjang SD yang putus sekolah, diantaranya dengan memberikan beasiswa bagi anak dari keluarga yang tidak mampu. Sedangkan APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan mencapai sebesar 104,75 begitu juga APM meningkat dari 66,54% tahun 2010 menjadi 88,5% pada tahun 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Pendidikan Prov Jambi

Gambar 4.5 APK dan APM jenjang SD dan SMP tahun 2010-2015

Adanya Peningkatan dari Angka Partisipasi Kasar APK dan Angka Partisipasi murni tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung :

- a) Lancarnya penyaluran dana BOS ke SD sehingga mendapatkan penghargaan di bidang percepatan penyaluran dana BOS
- b) Kegiatan Rakor BOS SD dan SMP
- c) Adanya peningkatan sarana belajar SD dan SMP berupa kegiatan Rehap Gedung SMP, Penambahan Ruang Kelas Baru dan Sarana lainnya oleh Kabupaten/Kota .
- d) Kegiatan Bintek Pengembangan Kurikulum jenjang SD dan SMP
- e) Adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Dikdas sehingga Pihak Dinas Pendidikan kabupaten/ kota mengetahui informasi termuktahir mengenai kebijakan dan
- f) program-program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

c. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka upaya perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK).

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010-2015 telah di bangun Unit Sekolah Baru SMK dan penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk menampung siswa yang melanjutkan ke SMK. Peningkatan SMK ini telah mendorong peningkatan Rasio Sekolah SMK terhadap SMA, jika pada tahun 2010 Rasio Sekolah SMA dan SMK 65 : 35 pada tahun 2015 telah bergeser menjadi 57 : 43. Peningkatan sarana SMK

ini ternyata belum mendorong Rasio Jumlah siswa SMA dan SMK yang pada tahun 2015 sebesar 64 : 36.

Untuk mendorong minat siswa mengikuti SMK maka diadakan kegiatan sosialisasi program kejuruan wajar 12 tahun dari pusat sampai daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Pencitraan SMK sehingga dapat meningkatkan animo dari siswa tamatan SMP/MTs untuk masuk kejenjang SMK. Begitu pula dengan program Sosialisasi dan Publikasi SMK keahlian SMK Negeri/ Swasta dalam Provinsi Jambi Kepada Kepala Sekolah SMP/MTs. Kedepan perlu didorong juga meningkatkan jumlah guru kejuruan dengan perekrutan baru atau menjadikan guru biasa menjadi guru keahlian khusus melalui pendidikan dan pelatihan.

Berikut, pada Tabel 4.4 dibawah ini dapat dilihat bahwa Kabupaten yang rasio SMK terhadap SMA diatas 50 adalah Kabupaten Sarolangun, sedangkan Rasio jumlah siswa SMK dengan SMA yang lebih dari 50 adalah Kota Sungai Penuh.

Tabel 4.7

Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah serta Rasio SMA terhadap SMK dan Rasio Jumlah Siswa SMA terhadap SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Jumlah SMA		Jumlah SMK		Rasio	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	SMA terhadap SMK	Siswa SMA terhadap SMK
Kota Jambi	41	15554	33	13562	55:45:00	53:47:00
Kota Sungai Penuh	7	3995	5	4949	58:42:00	45:55:00
Kab. Batanghari	12	5256	9	2388	57:43:00	69:31:00
Kab. Bungo	20	6814	18	3566	53:47:00	66:33:00
Kab. Kerinci	13	4947	8	1252	62:38:00	80:20:00
Kab. Tanjab Barat	23	5057	8	2320	74:26:00	69:31:00
Kab Merangin	20	6439	15	225	57:43:00	97:03:00
Kab. Sarolangun	21	4550	22	2208	49:51:00	67:33:00
Kab. Tebo	18	5152	16	2861	53:47:00	64:36:00
Kab. Muaro Jambi	22	6421	16	3465	58:42:00	65:35:00
Kab. Tanjab Timur	12	3925	7	1273	63:37:00	76:24:00
Provinsi Jambi	209	68110	157	38069	57:43:00	64:36:00

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan data diolah Bappeda

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.133.066.369.550,00 dengan serapan anggaran Rp. 125.035.838.158 (93,97%). anggaran tersebut dialokasikan untuk :

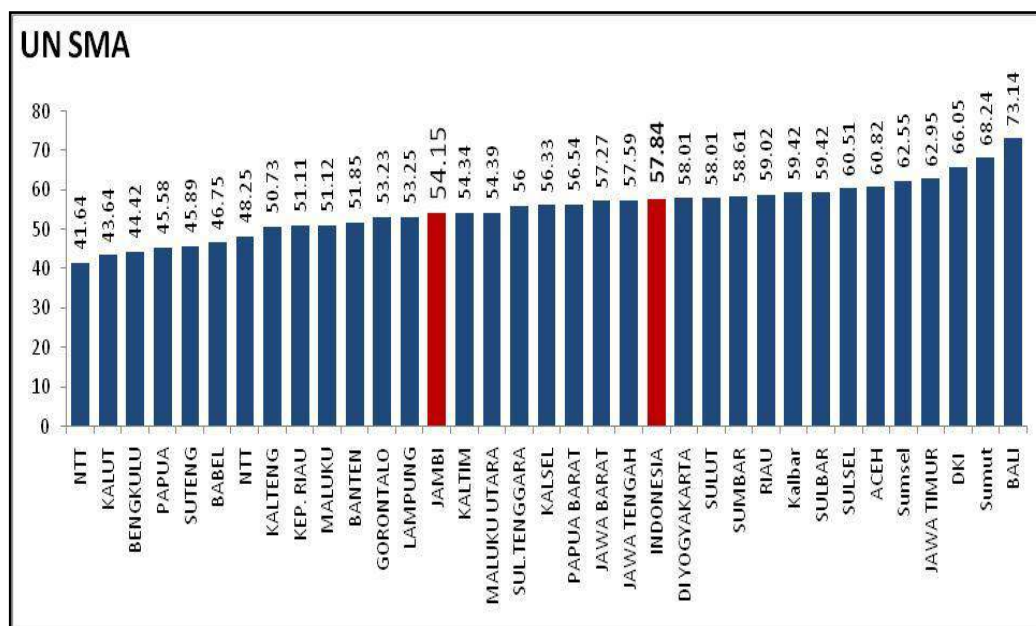
- 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK , Pengadaan Meubeller SMK dan Pembangunan Unit Sekolah Baru sebanyak 3 Unit dan RKB sebanyak 23unit dan rehab SMK .
- 2) Pengadaan Peralatan SMA TT, kegiatan pembangunan ruang penunjang dan Pembangunan RKB SMA.
- 3) Kegiatan SIM SMKN dan Rakor Kepala SMK

Kegiatan Lomba Lomba tingkat Nasional dengan prestasi Tahun 2015 sebagai berikut :

1) Prestasi yang diraih Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2015 adalah :

- a) Juara 2 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) , SMA 5 Kota Jambi
- b) Juara 1 Olimpiade Sain Nasional Bidang Ekonomi , SMAN 3 Kota Jambi
- c) Juara 3 Olimpiade sain Nasional Bidang Matematika SMAN 3 Kota Jambi
- d) Juara 3 Olimpiade sain Nasional Bidang Komputer SMAS Xaverius 1 Jambi
- e) Juara 2 Olimpiade Olah raga Siswa Nasional tingkat Nasional bidang kata perorangan putri SMAN 5 Kota Jambi .
- f) Juara 3 Olimpiade Oleh Raga Siswa Nasional SMA tingkat Nasional Bidang pencak silat SMAN 2 sungai Penuh .

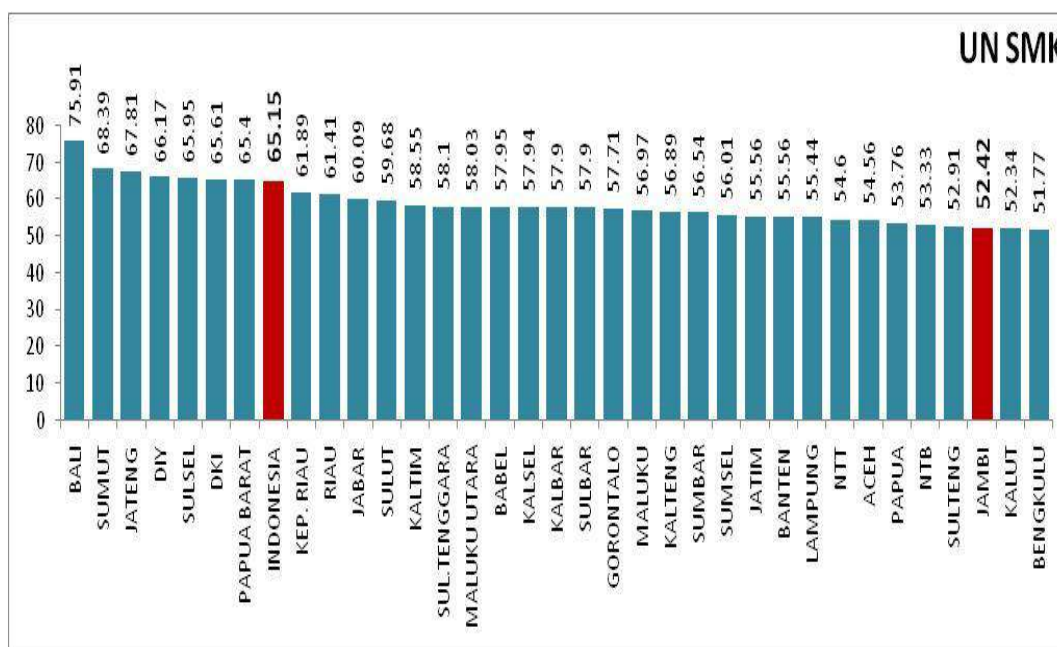
Nilai Ujian Nasional Provinsi Jambi walaupun mengalami kenaikan, tetapi peringkatnya menurun menjadi peringkat 21 nasional seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Kementerian DIKBUD

Gambar 4.6 Nilai UN SMA Provinsi di Indonesia

Begitu juga Nilai Ujian nasional Provinsi Jambi lebih memprihatinkan, pada tahun 2015, provinsi Jambi berada pada peringkat 3 terendah di Indonesia seperti terlihat pada gambar 4.. dibawah ini :



Sumber: Kementerian DIKBUD

Gambar 4.7 Nilai UN jenjang SMK tahun 2015 Provinsi di Indonesia

Pencapaian APK SMA /MA/SMK sebesar 85% dan pencapaian APM SMA/MA /SMK serbesar 71,25. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100%. Pada Gambar 4.9 dibawah ini dapat dilihat pencapaian APK dan APM SMA tahun 2011 sampai tahun 2015



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Gambar 4.8 APK SMA dan APM SMA Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

d. Program Pendidikan Luar Biasa

Pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya fokus pada pendidikan bagi siswa normal saja, namun upaya pembangunan dan pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus juga mendapat perhatian yang proporsional. Secara umum penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus/Pendidikan Layanan Khusus merupakan layanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kekhususan baik dari segi fisik maupun kecerdasan, pada jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Inklusi, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) .

Peningkatan Sarana dan prasarana Pendidikan Luar Biasa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 5.662.162.760,00 dan realisasi anggaran Rp. 5.529.250.246,00 *output* kegiatan adalah Pembangunan RKB SLB,

Pembuatan Pagar SLB, Pembuatan Sumur Bor dan Pengadaan perlengkapan asrama SLB , pengadaan alat peraga. Disamping itu juga dianggarkan Penyelenggaraan event-event untuk Anak anak SLB output kekikutsertaan pada event event tingkat Nasional dan Gebyar .

Permasalahan adalah masih ada anak berkelaianan usia sekolah belum masuk SLB , jumlah Guru masih kurang, Jumlah SLB masih kurang dan persebarannya belum merata.

Solusi adalah memperluas kesempatan Belajar melalui: Membangun USB, rehabilitasi Gedung, pemerataan dan pengangkatan Guru baru, penyuluhan kepada Masyarakat tentang pentingnya SLB.

e. Program Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal merupakan upaya layanan Pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan Pendidikan Masyarakat. Pengembangan program Pendidikan Nonformal diharapkan mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian permasalahan Pendidikan yang dihadapi Masyarakat, selain itu diharapkan Program Pendidikan Nonformal dapat memberikan kesempatan Belajar kepada Masyarakat terutama mereka yang belum terlayani kebutuhan Pendidikannya pada jalur Pendidikan Formal

Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal (PNF) dan Informal Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Anggaran sebesar Rp. 10.008.932.000 dengan kegiatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan
- 2) Kegiatan Pembinaan Kursus dan kelembagaan sebesar
- 3) Rakor PTK PAUDNI
- 4) Pembinaan dan pengembangan rumah pintar
- 5) Pembinaan dan pengembangan PKBM/TBM/KBU
- 6) Pendidikan dan pelatihan tenaga PTK PAUDNI
- 7) Kegiatan workshop/ orientasi tutor penyelenggaraan keaksaraan
- 8) Pembangunan BAN PNF

9) Bintel tata rias

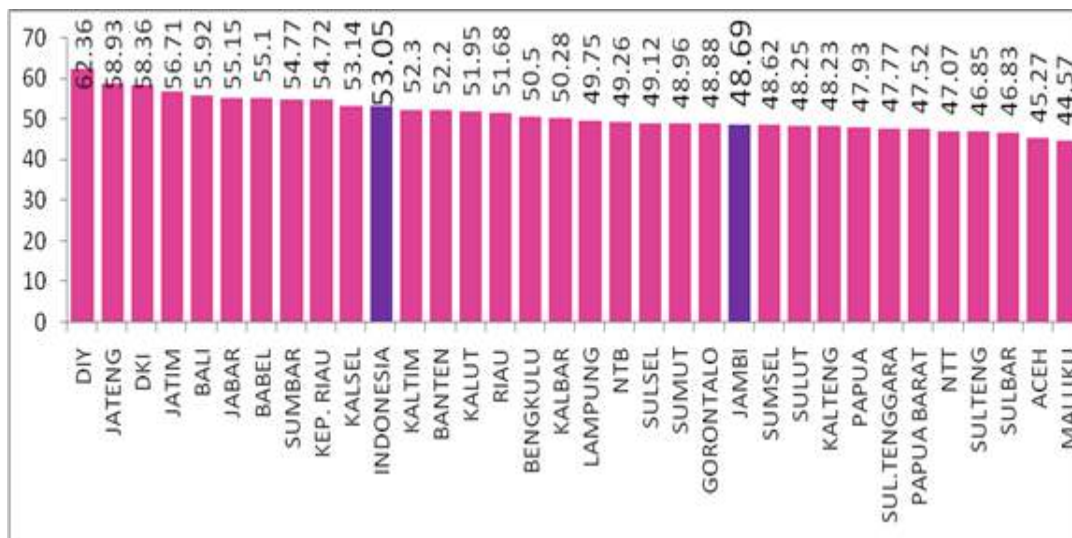
10) Kegiatan Diklat berjenjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD PAUDNI

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan Program pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Manusia dengan kegiatan antara lain : Kegiatan Pelatihan Kompetensi sumber daya Pendidikan Tahun 2015 sebanyak 1.847 orang , kegiatan Peningkatan Kepala sekolah pengawas Sekolah sebanyak 453 orang, pelatihan Laboran sekolah sebanyak 351 orang .

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2015 diperoleh Nilai Rata rata dengan presentase 48 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2013 dimana Nilai rata rata dengan yang diperoleh 43.

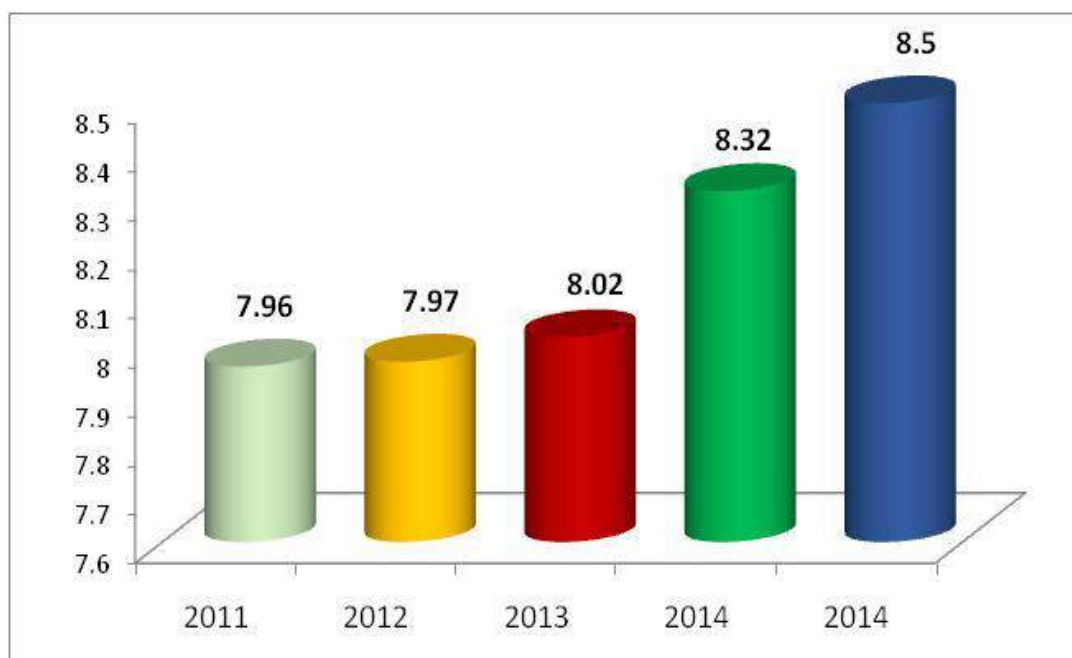
Pada pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi seluruh guru se Indonesia pada tahun 2015, untuk kompetensi Pedagogik dan Profesional hasilnya belum memuaskan. Dari segi nilai perolehan nilai terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 40,82 menjadi 48,69, namun dari segi peringkat provinsi Jambi menurun dari peringkat 21 menjadi peringkat 22 dari 34 Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Gambar 4.9 Hasil uji Kompetensi guru Nasional tahun 2015

Sejalan dengan peningkatan APK dan APM, maka Angka Rata-rata Lama sekolah Provinsi Jambi mengalami peningkatan juga, yaitu menjadi 8,5 tahun pada tahun 2015 seperti yang dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPS

Gambar 4.10 Angka Rata rata lama Sekolah Provinsi Jambi 2011-2015

Tantangan Untuk Memecah Masalah Di Sektor Pendidikan Sebagai Berikut :

- 1) Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten, dan kota.
- 3) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
- 6) Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal
- 7) Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.

4.1.2 Kesehatan

4.1.2.1 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Pembangunan Kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen Internasional yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs) dimana dalam pencapaian MDGs tersebut sektor kesehatan tercantum Indikator tujuan MDGs yaitu : Penurunan Prevalensi kekurangan gizi pada Balita, Menurunkan kematian Ibu dan Anak, Meningkatkan Kesehatan Ibu , Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit Menular lainnya serta akses terhadap ketersediaan air

minum yang layak dan sanitasi dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan berbagai upaya berupa program –program pembangunan kesehatan didukung oleh berbagai sumber daya kesehatan, pembiayaan yang berkesinambungan yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaat secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

Untuk mewujudkan Program Pembangunan tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.819.022.536. Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain :

1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.200.114.367
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.233.274.765
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	146.000.000
4	Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan	2.335.479.600
5	Prog peningk. Penge. sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	43.000.000
6	Program Upaya Kesehatan Perorangan	250.842.000
7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.634.059.225
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	725.240.900
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	904.923.000
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	543.631.800
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	366.600.000
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.004.681.000
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	681.916.400
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Provinsi	150.830.000
15	Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan	200.000.000
16	Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi	2.025.629.900
17	Program Akademik Farmasi Provinsi Jambi	2.663.300.000
18	Program Akademik Analis Kesehatan Provinsi Jambi	5.610.699.579
19	Program Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi	2.098.800.000
	JUMLAH	25.819.022.536

a. Program Promosi Kesehatan

1) Cakupan Perkembangan Tahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Jambi Tahun 2015

Tabel 4.8
Perkembangan Tahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Jambi Tahun 2015

N0	KAB/KOTA	JUMLAH PUSEKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	TAHAPAN DESA/ KELURAHAN SIAGA AKTIF				JUMLAH I	
				PRATAMA	MADYA	PUKNAMA	MANDIRI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kerinci	18	287	19	82	25	0	126	44%
2	Kota Sungai Penuh	9	69	36	27	4	2	69	100%
3	Merangin	23	215	115	27	14	57	213	99%
4	Tebo	17	113	54	33	17	9	113	100%
5	Bungo	18	153	65	22	1	0	88	58%
6	Sarolangun	15	158	142	0	0	0	142	90%
7	Tanjab Barat	16	134	53	36	18	10	117	87%
8	Tanjab Timur	17	93	25	0	16	0	31	33%
9	Batanghari	17	113	18	61	21	13	113	100%
10	Muara Jambi	19	155	86	61	7	1	155	100%
11	Kota Jambi	20	62	40	8	0	0	48	77%
TOTAL		189	1552	653	357	123	92	1225	79%

Sumber data : Laporan Seksi Data Kab/Kota Tahun 2015

Capaian Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2015, secara kuantitatif jumlah desa mengalami peningkatan yaitu dari 1550 desa menjadi 1552 desa tentunya desa tambahan belum masuk pada terbentuknya Forum desa sehingga mengurangi persentase capaian forum desa di tahun 2015

- Capaian di tahun 2014 sebanyak 1550 desa/kelurahan 1324 (85,4 %)
- Sedangkan di tahun 2015 sebanyak 1552 desa/kelurahan 1225 (79%)
- Menurunnya capaian desa/kelurahan siaga aktif hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan dari tingkat kabupaten/kota ke puskesmas dilihat dari pencapaian stratanya yang bermutu.
- Karena itu melalui 5 indikator kebijakan akan memacu pencapaian program promkes di tahun 2016 mendatang

Pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif masih tinggi pada strata Pratama 653 (53,31 %) pencapaian mengalami penurunan 6,4 %, hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dari 11 kab/kota ke tingkat puskesmas dan desa.

a) Hambatan / Kendala

(1) MANAJEMEN

Dari data hasil cakupan Kegiatan / Program data penggunaan dana APBD dan APBN tahun 2015 Program Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan di Provinsi Jambi, ditemukan berbagai kesenjangan / masalah, menjadi penghambat dalam mencapai target Program / kegiatan, hambatan tersebut adalah :

- (a) Kurangnya tenaga promkes yang ada di kab/kota maupun di Puskesmas yang sesuai dengan tingkat pendidikannya atau jurusan Promkes
- (b) Petugas promkes sering terjadi pindah tugas atau bergantian pengaruh kebijakan era otonomi
- (c) Pendanaan atau dukungan dana APBN dari promkes pusat masih terlihat masih cukup rendah, karena bidang promkes adalah pusat penyampaian pesan semua program kesehatan di berbagai bidang. Bahkan pada tahun 2015 dana APBN disaat

anggaran berproses terjadi efisiensi dan baru turun DIPnya di bulan Agustus sehingga berpengaruh terhadap pencapaian program

- (d) User / Operator SMS sehat belum disediakan Laptop + modem serta insentif yang memadai sehingga dapat mempengaruhi gairah kerja
- (e) Pada program pengembangan media Semua Mengejar Sehat (SMS Sehat) masih cukup besar hambatannya karena kemampuan masyarakat untuk menyerap informasi SMS Sehat tersebut belum menjadi kebutuhan, pada hal suatu pendidikan bidang kesehatan dengan memanfaatkan media komunikasi yang cukup canggih saat ini, hampir 95 % masyarakat (orang dewasa, Remaja) menggunakan Handphone (HP)

(2) KELEMBAGAAN

- (a) Secara kelembagaan di era otonomi banyak terjadi perbedaan, serta permasalahan yang terjadi karena menyangkut kepentingan dan selera para kepemimpinan wilayah daerah kabupaten/ kota, seperti struktur organisasi dinas kesehatan kabupaten/kota dalam pembentuk bidang-bidang (eselon III) atau penetapan seksi-seksi (eselon IV), hal ini tergantung penentuan bidang yang ditetapkan seperti Bidang P2PL terdiri dari seksinya promkes, dan kesehatan lingkungan dan surveilant. Kesemuanya berpengaruh kepada kelembagaan diberbagai tumbuh kembangnya program yang akan diimplementasikan dilapangan diantaranya :
- (b) Kelembagaan dibidang UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) dalam pemberdayaan masyarakat, Posyandu telah terintegrasi dengan program-program lain yaitu PAUD dan BKB
- (c) Pengaruh kebijakan di era otonomi petugas promkes sering terjadi pindah tugas atau bergantian tempat tugas, padahal petugas bersangkutan sudah cukup mampu dan terlatih untuk melaksanakan tugas dibidang promkes, namun tanpa

mengindahkan potensi yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan dimaksud langsung mengganti atau memindahkan tenaga tersebut, hal ini agar jangan terjadi lagi dimasa mendatang.

- (d) Secara kelembagaan tenaga promkes yang sudah ada bahkan akan dilakukan komitmen kontrak kerja, supaya implementasi program akan lebih besar harapan keberhasilan yang akan dicapai
- (e) Sampai pada kelembagaan berbagai bidang program promkes yang sudah terbentuk agar tidak dirobah lagi kecuali untuk peningkatan kepada dorongan pencapaian target program yang lebih baik.
- (f) Kelembagaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif telah terbentuk mulai di tahun 2006, sampai sekarang masih ada kabupaten/kota yang belum bentuk POKJANAL Desa/Kelurahan Siaga Aktif baik POKJANAL Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan dimaksud dan bahkan ada forum yang ada juga tidak berfungsi

(3) SUMBERDAYA

Dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi atau program promkes ditentukan oleh salah satu sumber Daya manusia (SDM), Pada pengelola program promkes baik ditingkat kabupaten/kota maupun ditingkat puskesmas dikelola oleh tenaga kesehatan berlatar belakang pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, hal ini juga membuat ketajaman pencapaian target program promosi kesehatan masih lemah, bahkan ditentukan oleh tak terbatas ruang dan waktu melalui kebijakan dieraotonomi terjadi pergantian petugas promosi kesehatan atau pindah tempat tugas cukup deras dan cepat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan program promkes yang dimaksud. Untuk mencapai tujuan secara maksimal perlu dipertimbangkan melalui kebutuhan SDM promosi kesehatan yang mencukupi dengan harapan sebagai berikut;

- (a) Kebutuhan saat ini untuk pemegang program promosi kesehatan di tingkat kabupaten/kota berlatar belakang pendidikan S1 promosi kesehatan
- (b) Kebutuhan saat ini untuk pemegang program promosi kesehatan di tingkat Puskesmas berlatar belakang pendidikan S1 atau D III Promosi kesehatan
- (c) Sedangkan tenaga promosi kesehatan saat ini yang dimiliki oleh kabupaten/kota dalam provinsi Jambi berbagai latarbelakang pendidikan yaitu ada dari D III Perawat, D III Kebidanan, D III Kesling, D III gizi dan sebagainya.
- 2) Hasil Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS di Provinsi Jambi Tahun 2015.

Tabel 4.9
Hasil Cakupan Rumah Tangga ber PHBS di Provinsi Jambi Sampai dengan akhir Desember 2015

N0	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA YG DIPANTAU	RUMAH TANGGA BER- PHBS	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kerinci	18	65.128	32.621	23.172	71%
2	Kota Sungai Penuh	9	22.274	11.885	8.986	76%
3	Merangin	23	22.274	7.391	11.871	161%
4	Tebo	17	126.018	28.244	18.989	67%
5	Bungo	18	77.737	56.158	41.072	73%
6	Sarolangun	15	65.950	38.087	34.421	90%
7	Tanjab Barat	16	77.668	22.413	12.317	55%
8	Tanjab Timur	17	51.198	23.621	12.082	51%
9	Batanghari	17	61.220	16.234	11.342	70%
10	Muara Jambi	19	83.708	13.634	10.093	74%
11	Kota Jambi	20	115.324	13.018	7.167	55%
TOTAL		189	768.499	263.306	191.512	73%

Sumber data : Laporan Seksi Data Kab/Kota Tahun 2015

Berdasarkan hasil pertemuan evaluasi Program Promosi kesehatan tahun 2015, 11 Kabupaten / Kota bahwa dari jumlah Rumah Tangga

yang di Pantau 263306 (25,52 %) capaian Rumah Tangga ber-PHBS berjumlah di tahun 2014 187364 (69,7 %), capaian Rumah Tangga ber-PHBS tahun 2015 berjumlah 191512 (73 %) mengalami peningkatan sejumlah 4158 (3,3%) namun pencapaiannya cukup memuaskan.

- 3) Hasil Cakupan Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2015.

Tabel 4.10
Hasil Cakupan Sekolah Dasar Yang Mempromosikan Kesehatan diProvinsi Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	JUMLAH SEKOLAH DASAR			JUMLAH SMP/SEDERAJAT			JUMLAH SMA/SEDERAJAT			JUMLAH SEKOLAH SD/SMP /SMA	%
		NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kerinci	231	38	269	59	11	70	16	7	23	173	5,73%
2	Kota Sungai Penuh	79	5	84	15	1	16	11	2	13	54	1,97%
3	Merangin	331	38	369	92	0	92	42	0	42	503	15,18%
4	Tebo	272	0	272	0	0	0	0	0	0	102	3,10%
5	Bungo	59	7	66	13	3	16	7	3	10	92	2,86%
6	Sarolangun	215	4	219	36	19	55	22	18	38	283	6,51%
7	Tanjab Barat	180	17	197	40	32	72	20	17	37	175	5,28%
8	Tanjab Timur	207	22	229	45	31	76	46	0	46	351	10,61%
9	Batanghari	212	12	224	46	6	52	11	1	12	64	1,93%
10	Muara Jambi	249	4	253	62	6	68	32	0	32	353	10,65%
11	Kota Jambi	226	12	238	30	32	62	14	46	60	298	8,99%
TOTAL		2261	159	2420	438	141	579	221	94	315	3314	9,50%

Sumber : Laporan Seksi Data Kab/Kota Tahun 2015

Berdasarkan hasil pertemuan monitoringg dan evaluasi Program Promosi kesehatan tahun 2015, 11 Kabupaten / Kota bahwa dari jumlah Sekolah yang ada 3314 sekolah,

(a) untuk sekolah Dasar Negeri 2261 (93 %) dan Swasta 159 (6,55 %) jumlah 2420 buah,

(b) untuk sekolah SMP Negeri 438 (76 %) dan SMP swasta 141 (24 %) jumlah 579 buah,

(c) untuk SMA Negeri 221 (70 %) buah dan SMA Swasta 94 (30 %) jumlah 315 buah dari tigga jenis sekolah tersebut diatas ternyata Sekolah Dasar Negeri yang paling tinggi porsentasenya, Sekolah Menengah Pertama mencapai peringkat ke dua yang tertinggi capaian sedangkan Sekolah SMAN peringkat ke tiga tertinggi porsentase pencapaiannya, kalau dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2014 ternyata mengalami peningkatan sebanyak 205 (8 %) sekolah dasar yang mempromosikan kesehatann serta ditambah SMP dan SMA yang telah terjarinng di tahunn 2015 cukup meninngkat, berarti cukup memuaskan

(d) Sedangkan di tahun 2014 sekolah Dasar (SD) yang mempromosikan kesehatan 2056 (85 %) dan SMP serta SMA belum di dapat data hasil rekapan dari kabupaten/kota yang melaporkannya

4) Hasil Cakupan data Kualifikasi Posyandu di Provinsi Jambi Tahun 2015.

Tabel 4.11
Data Kualifikasi Posyandu Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	TINGKATAN POSYANDU				JUMLAH POSYNADU AKTIF	% POSYANDU AKTIF
		PRATAMA	Madya	PURNAMA	MANDIRI		
1	Kerinci	21	165	100	0	286	9%
2	Kota Sungai Penuh	22	51	3	1	77	2%
3	Merangin	104	123	114	63	404	12%
4	Tebo	25	123	103	54	305	9%
5	Bungo	198	62	11	7	278	8%
6	Sarolangun	0	169	147	22	338	10%
7	Tanjab Barat	29	85	117	29	260	8%
8	Tanjab Timur	47	96	109	22	274	8%
9	Batanghari	2	92	125	75	294	9%
10	Muara Jambi	13	152	154	31	350	11%
11	Kota Jambi	13	225	186	36	460	14%
	TOTAL	474	1343	1169	340	3326	100%

Sumber data : Laporan Seksi Data Kabupaten/Kota Tahun 2015

Berdasarkan pertemuan hasil Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan tahun 2015, 11 kabupaten/kota bahwa dari jumlah Posyandu yang ada 3326 ternyata strata Madya mengalami peningkatan yaitu 1343 (40,37%), sedangkan strata Purnama 1169 (35,15 %), Pencapai Posyaandu di Tahun 2015 baik secara kuantitatif maupun persentasenya mengalami peningkatan dibandingkan pada pencapaian di tahun 2014 yaitu $(3326 \text{ Tahun } 2015 - 3233 \text{ tahun } 2014) = 93$ (2,86 %), strata Posyandu yang paling tinggi Madya dan yang kedua purnama, pencapaiannya cukup memuaskan

1. Kegiatan Semua Mengejar Sehat (SMS) sehat

Kegiatan SMS Sehat adalah merupakan pengembangan Media Informasi berbasis elektronik yang menggunakan Handpone (HP) yang dikembangkan dengan bermitra dengan Telkomcel mulai dari tahun 2012 dan sampai tahun 2014 yang masih berlangsung sampai triwulan ke III tahun 2014, dan hal ini belum dapat kami tunjukkan secara akurat dan optimal hasilnya karena belum melaksanakan evaluasi dengan secara seksama dan dukungan dana untuk itu belum tersedia.

Walaupun demikian, dari anggaran yang sangat terbatas ini kami tetap berupaya agar program SMS Sehat ini tetap berproses terus menerus dan sampai saat ini, media yang terpersi ini telah merambah pengetahuan dan pengalaman para kader kesehatan, kader PKK dan Tokoh masyarakat serta para kepala desa dan masyarakat umum se provinsi Jambi, pada tahun 2012 sebanyak 940 orang dan meningkat menjadi 2000 orang di tahun 2013 dan di tahun 2014 meningkat lebih dari 2000 orang, hal ini sebagai kelanjutan meneruskan program tersebut dengan menggunakan sistem yang sudah dibangun yang sudah ada dan ditambah dengan pengembangan kartu pribadi yang dimiliki oleh masing-masing kader dan masyarakat lainnya.

b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 -2014 telah menetapkan 4 sasaran pembangunan kesehatan yaitu 1). Meningkatkan umur harapan hidup, 2). Menurunkan angka kematian bayi, 3). Menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan prevalensi gizi kurang sebesar 15% pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas, 2010) dimana diperoleh besaran masalah gizi masyarakat di Provinsi Jambi untuk prevalensi gizi kurang indeks (BB/U) sebesar 19,6%, prevalensi kurus indeks (BB/TB) sebesar 20% dan prevalensi pendek (TB/U) sebesar 30,2%.

Tabel 4.12

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010 di Provinsi Jambi

NO	TAHUN/INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TARGET CAPAIAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Gizi Kurang (Berat badan kurang menurut umur)	19.6	18.5	18	17	16	15
2	Kurus (Berat badan kurang menurut tinggi badan) = Akut	20.0	19	18	17	16	15
3	Pendek (Tinggi Badan Rendah menurut umur) = Kronis	30.2	30	29	28	27	26

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Untuk menurunkan masalah tersebut diatas telah dibuat RPJMD dan Renstra 2011- 2015 yaitu :

Tabel 4.13
Indikator Renstra Dinas Kesehatan tahun 2011 - 2015

NO	INDIKATOR	TARGET (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100
2	Persentase bayi usia 0-6 bulanmendapat asi eksklusif	57	58	59	60	61
3	Cakupan rumah tangga yangmengkonsumsi garam beryodium					
		91	92	93	94	95
4	Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin a					
		84	85	86	87	88
5	Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet	71	72	73	74	75
6	Persentase kab/kota yang melaksanakan survailans gizi	100	100	100	100	100
7	Persentase balita yang ditimbang berat badannya	65	66	67	68	69
8	Persentase penyediaan bufferstok Maknan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	6	7	8	9	10

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dasar pelaksanaan pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dituangkan di dalam Perda : Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Pergub Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi termasuk salah satunya Seksi Gizi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

1) Kegiatan APBD dan APBN 2015

Dibawah ini disajikan beberapa kegiatan sumber dana dekosentrasi (APBN) dan APBD Provinsi Jambi tahun 2015 dengan jumlah dana APBN sebesar Rp. 2.457.679.000,- dan APBD sebesar Rp. 543.631.800,-

(a) Kegiatan APBN Provinsi Jambi Tahun 2015

Tabel 4.14
Kegiatan APBN Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Nama Kegiatan
1	Pelaksanaan Surveilans Gizi Kabupaten / Kota
2	Peningkatan Kapasitas Konseling Menyusui Bagi Petugas
3	Peningkatan Kapasitas Konseling MP-ASI Bagi Petugas
4	Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penilaian Pertumbuhan Balita
5	Pelatihan Pemantauan Status Gizi
6	Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
7	Sosialisasi Terpadu Pembinaan Gizi Masyarakat Di Provinsi
8	Diseminasi Hasil Pemantauan Status Gizi Di Provinsi
9	Pedoman Gerakan Nasional Sadar Gizi
10	Pengadaan Media KIE Gerakan Nasional Sadar Gizi
11	Bimbingan Teknis Kegiatan Pembinaan Gizi
12	Pertemuan Penyusunan Laporan Tahunan Program Gizi
13	Distribusi Sarana dan Prasarana Program Perbaikan Gizi

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

(b) Kegiatan APBD Provinsi Tahun 2015

Tabel 4.15
Kegiatan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Nama Kegiatan
1	Peningkatan Pemantauan Pertumbuhan Balita
2	Peningkatan penggunaan ASI secara Eksklusif di Masyarakat
3	Penanganan Gizi Buruk sesuai standar
4	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
5	Penyediaan Bufferstock MP ASI dan Obat Program Gizi

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

(c) Capaian Program/Kegiatan Tahun 2015

Di bawah ini disajikan beberapa hasil cakupan program perbaikan gizi masyarakat dari bulan Januari – Oktober 2015 dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

2) Cakupan Penimbangan Anak 0 – 23 Bulan

Tabel 4.16
Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi
Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	S	K	D	N	T	O	B
1	KERINCI	25,191	23,43	18,884	16,167	664	1,353	699
2	SEI. PENUH	7,509	7,509	6,59	5,91	92	177	138
3	MERANGIN	37,719	35,969	26,192	21,763	1,755	1,464	898
4	SAROLANGUN	21,796	21,76	20,617	17,858	1,36	840	560
5	BATANG HARI	23,969	23,604	20,209	16,988	850	1,61	542
6	MA JAMBI	32,847	32,846	26,54	23,846	499	1,222	725
7	TJ. TIMUR	18,943	17,68	14,783	13,056	819	775	348
8	TJ BARAT	22,924	22,294	19,523	17,562	516	953	493
9	TEBO	30,982	30,982	19,87	16,077	1,207	1,778	797
10	BUNGO	28,86	28,399	24,112	20,618	1,314	1,445	599
11	JAMBI	47,611	47,349	29,939	23,272	2,647	3,056	602
PROVINSI		298,348	291,823	227,26	193,116	11,722	14,673	6,402

Sumber : Lap Bulanan Gizi Jan – Okt Kabupaten/Kota Tahun 2015

Tabel 4.17
Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Provinsi
Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	D'	2T	BGM	D/S	N/D'	N/S	K/S	BGM/D
1	KERINCI	16,832	69	44	74.96	96.05	64.18	93.01	0.23
2	SEI. PENUH	6,274	14	9	87.76	94.19	78.71	100.00	0.14
3	MERANGIN	23,83	240	50	69.44	91.33	57.70	95.36	0.19
4	SAROLANGUN	19,218	88	77	94.59	92.92	81.94	99.84	0.37
5	BATANG HARI	18,056	220	67	84.31	94.08	70.87	98.48	0.33
6	MA JAMBI	24,593	170	76	80.80	96.96	72.60	100.00	0.29
7	TJ. TIMUR	13,66	106	72	78.04	95.57	68.92	93.34	0.48
8	TJ. BARAT	18,077	132	53	85.16	97.15	76.61	97.25	0.27
9	TEBO	17,295	110	30	64.14	92.96	51.89	100.00	0.15
10	BUNGO	22,069	94	8	83.55	93.43	71.44	98.41	0.03
11	JAMBI	26,281	225	127	62.88	88.55	48.88	99.45	0.42
PROVINSI		206,186	1,47	612	76.17	93.66	64.73	97.81	0.27

Sumber : Lap Bulanan Gizi Jan – Okt Kabupaten/Kota Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat hasil pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Provinsi Jambi dimana diperoleh hasil untuk

cakupan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 76,17%, sudah mencapai target Provinsi Jambi sebesar 69%.

(a) Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jambi Tahun 2015

Pada tabel di bawah ini disajikan hasil pelacakan kasus gizi buruk di Provinsi Jambi tahun 2015, yang diukur berdasarkan indeks BB/TB (Tinggi Badan/Berat Badan)

Tabel 4.18
Jumlah Kasus Gizi Buruk Berdasarkan Hasil laporan Kasusdi
Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus		Jenis Kelamin		Jumlah Meninggal		Pindah	
				Lk	Pr				
1	Kerinci	3	Org	2	1	1	Org	0	Org
2	Kota Sungai Penuh	4	Org	3	1	1	Org	0	Org
3	Merangin	16	Org	7	9	1	Org	0	Org
4	Sarolangun	7	Org	2	5	0	Org	0	Org
5	Bungo	4	Org	2	2	0	Org	0	Org
6	Tebo	13	Org	4	9	0	Org	1	Org
7	Batanghari	14	Org	8	6	0	Org	0	Org
8	Tanjab Timur	3	Org	3	0	0	Org	0	Org
9	Tanjab Barat	4	Org	1	3	0	Org	0	Org
10	Kota Jambi	11	Org	4	7	0	Org	0	Org
11	Muaro Jambi	9	Org	7	2	1	Org	0	Org
	Jumlah	88	Org	43	45	4	Org	1	Org

Sumber : Lap Bulanan Gizi Jan – Okt Kabupaten/Kota Tahun 2015

Pada tabel di atas dari hasil laporan bulanan kasus gizi buruk di Provinsi Jambi dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi sebesar 88 Kasus pada tahun 2015 sebanyak 4 orang meninggal. Jumlah penderita gizi buruk (sangat kurus) berdasarkan laporan yang diterima cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita di Provinsi Jambi pada Tahun 2015 disebabkan oleh pola asuh, pneumoni, kelainan syarat, TB paru, BBLR hidrocephalus, brain atropi, microcephalus,

kelainan jantung dan down sindrom sedang meninggal disebabkan karena BBLR, Pneumonia, Jantung.

3) Cakupan Pemberian Tablet Besi Kepada Ibu Hamil di Provinsi Jambi Tahun 2015

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat cakupan pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, tujuan pemberian tablet tambah darah adalah untuk mencegah terjadinya Anemia Gizi Besi (AGB) pada ibu hamil, selain itu juga bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKB pada saat persalinan.

Tabel 4.19
Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe) Kepada Ibu Hamil Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET BESI PADA IBU HAMIL			
			Fe1		Fe3	
			N	%	n	%
1	KERINCI	5.104	4.399	86,19	3.889	76,2
2	KOTA SEI. PENUH	1.702	1.434	84,25	1.364	80,14
3	MERANGIN	10.395	7.549	72,62	7.090	68,21
4	SAROLANGUN	6.571	5.428	82,61	4.760	72,44
5	BATANG HARI	5.900	4.562	77,32	4.440	75,25
6	MUARO JAMBI	9.812	7.363	75,04	6.638	67,65
7	TANJAB TIMUR	4.180	2.927	70,02	3.265	78,11
8	TANJAB BARAT	7.837	4.646	59,28	4.316	55,07
9	TEBO	7.594	6.237	82,13	5.476	72,11
10	BUNGO	8.154	6.385	78,31	5.848	71,72
11	KOTA JAMBI	14.680	11.284	76,87	10.650	72,55
	PROVINSI	81.929	62.214	75,94	57.736	70,47

Sumber : Lap Bulanan Gizi Jan – Okt Kabupaten/Kota Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil untuk Fe 1 sebesar 75,94 % dan Fe3 sebesar 70,47 %, cakupan ini masih jauh dibawah target indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 75% karena laporan masih sampai bulan oktober 2015 .

4) Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Kepada Bayi, Balita dan Ibu Nifas di Provinsi Jambi

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi umur 6 – 11 bulan, pemberian vitamin A pada bayi bertujuan untuk mencegah buta senja, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dll.

Tabel 4.20
Cakupan Pemberian Kap. Vit. A pada Bayi Usia (6 -11 Bulan)
Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	SASARAN BAYI 6 -11 Bln	Cakupan Bulan Februari		SASARAN BAYI 6 -11 Bln	Cakupan Bulan Agustus	
			n	%		n	%
1	KERINCI	2.314	2.084	90,1	2.471	2.166	87,7
2	SEI. PENUH	884	799	90,4	884	799	90,4
3	MERANGIN	4.252	3.821	89,9	4.894	4.250	86,8
4	SAROLANGUN	2.487	2.416	97,1	3.052	2.786	91,3
5	BATANG HARI	7.829	7.811	99,8	2.627	2.563	97,6
6	MUARO JAMBI	4.773	4.854	101,7	4.547	4.129	90,8
7	TJ TIMUR	1.913	1.743	91,1	1.924	1.785	92,8
8	TJ BARAT	2.768	2.655	95,9	3.058	2.893	94,6
9	TEBO	3.429	3.104	90,5	3.880	3.632	93,6
10	BUNGO	3.383	3.244	95,9	3.463	3.351	96,8
11	KOTA JAMBI	6.428	6.125	95,3	6.224	5.838	93,8
	PROVINSI	40.460	38.656	95,5	37.024	34.192	92,4

Sumber : Lap. 6 Bulan Gizi bulan Feb dan Agustus 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan pemberian kapsul vitamin A kepada bayi umur 6 – 11 bulan, dimana untuk Provinsi Jambi cakupan bulan februari sebesar 95,5 %, dan Agustus 92,4%.

Tabel 4.21
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Anak Balita (12 - 59
Bulan) Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	SASARAN ANAK BALITA 12 – 59 BLN	Cakupan Bulan Februari		SASARAN ANAK BALITA 12 – 59 BLN	Cakupan Bulan Agustus	
			n	%		n	%
1	KERINCI	22.965	17.080	74,4	22.432	17.620	78,55
2	SEI PENUH	6.021	5.228	86,8	6.021	5.228	86,83
3	MERANGIN	29.690	24.964	84,1	34.583	27.754	80,25
4	SAROLANGUN	15.704	15.415	98,2	18.925	17.671	93,37
5	BATANG HARI	20.713	20.694	99,9	20.713	20.447	98,72
6	MUARO JAMBI	29.226	28.533	97,6	26.682	25.122	94,15
7	TJ TIMUR	16.545	13.818	83,5	16.098	14.079	87,46
8	TJ BARAT	22.792	21.088	92,5	21.805	19.366	88,81
9	TEBO	23.829	20.523	86,1	25.087	23.274	92,77
10	BUNGO	22.506	21.330	94,8	22.386	21.323	95,25
11	KOTA JAMBI	38.619	36.274	93,9	38.608	35.870	92,91
	PROVINSI	248.610	224.947	90,5	253.340	227.754	89,9

Sumber : Lap. 6 Bulanan Gizi bulan Feb dan Agustus 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan pemberian kapsul vitamin A kepada anak balita umur 12 – 59 bulan, dimana cakupan pada bulan februari sebesar 90,48 % dan bulan agustus 89,90 %.

Tabel 4.22
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Anak Balita (6 - 59 Bulan)
Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	SASARAN ANAK BALITA 12 – 59 BLN	Cakupan Bulan Februari		SASARAN ANAK BALITA 12 – 59 BLN	Cakupan Bulan Agustus	
			n	%		n	%
1	KERINCI	22.965	17.080	74,4	22.432	17.620	78,55
2	SEI PENUH	6.021	5.228	86,8	6.021	5.228	86,83
3	MERANGIN	29.690	24.964	84,1	34.583	27.754	80,25
4	SAROLANGUN	15.704	15.415	98,2	18.925	17.671	93,37
5	BATANG HARI	20.713	20.694	99,9	20.713	20.447	98,72
6	MUARO JAMBI	29.226	28.533	97,6	26.682	25.122	94,15
7	TJ TIMUR	16.545	13.818	83,5	16.098	14.079	87,46
8	TJ BARAT	22.792	21.088	92,5	21.805	19.366	88,81
9	TEBO	23.829	20.523	86,1	25.087	23.274	92,77
10	BUNGO	22.506	21.330	94,8	22.386	21.323	95,25
11	KOTA JAMBI	38.619	36.274	93,9	38.608	35.870	92,91
	PROVINSI	248.610	224.947	90,5	253.340	227.754	89,9

Sumber : Lap. Bulan vitamin tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan pemberian kapsul vitamin A pada anak balita usia 6 – 59 bulan sebesar 90,86 % target indikator pembinaan gizi masyarakat tahun 2015 sebesar 88% sudah tercapai.

5) Pemberian Vitamin A pada Ibu Nifas

Vitamin A pada ibu nifas diberikan sebanyak 2 (dua) kapsul, kapsul pertama diberikan segera pada hari pertama setelah melahirkan dan kapsul kedua diberikan pada hari kedua setelah melahirkan.

Tabel 4.23

Cakupan ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A Tahun 2015

No.	Kab/Kota	JUMLAH IBU NIFAS YANG MENDAPATKAN KAPSUL VITAMIN A		
		Saran	n	%
1	KERINCI	4.872	3.614	100
2	SEI PENUH	1.065	1.295	100
3	MERANGIN	9.928	7.845	100
4	SAROLANGUN	5.958	4.778	99,77
5	BATANG HARI	5.649	4.122	99,76
6	MUARO JAMBI	9.364	6.378	100
7	TJ TIMUR	3.989	3.157	100
8	TJ BARAT	6.313	4.286	100
9	TEBO	6.922	5.381	97,69
10	BUNGO	3.229	5.637	97,61
11	KOTA JAMBI	10.822	7.223	80,87
	PROVINSI	68.111	53.716	96,42

Sumber : Lap. Bulan Jan – Okt vitamin tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas, dimana cakupan ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A sebesar 96,42%.

6) Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan

Pada tabel di bawah ini disajikan jumlah ibu yang memberikan ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan, definisi pemberian ASI secara eksklusif adalah memberikan ASI saja kepada bayi usia 0-6 bulan tanpa makanan lain.

Tabel 4.24
Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan
Tahun 2015

NO	KABUPATEN/ KOTA	V (Asi saja)	X (sudah diberi MPASI)	A (tidak dating)	V/V+X) x 100%
1	KERINCI	1.623	403	191	80,11
2	SEI. PENUH	297	201	85	59,64
3	MERANGIN	2.060	769	153	72,81
4	SAROLANGUN	1.838	448	374	80,42
5	BATANG HARI	1.806	546	1.155	76,8
6	MA. JAMBI	2.073	1.406	297	59,58
7	TJB TIMUR	825	498	245	62,36
8	TJB BARAT	1.487	363	133	80,39
9	TEBO	1.697	782	379	68,47
10	BUNGO	1.378	894	146	60,66
11	JAMBI	2.668	1.442	799	64,91
	PROVINSI	17.749	7.750	3.954	69,61

Sumber : Lap 6 bulanan gizi Feb dan Agt Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Jambi dimana cakupan ASI Eksklusif usia 0 – 6 bulan sebesar 69,61 %, target cakupan indikator pembinaan gizi masyarakat tahun 2015 sebesar 60 % sudah tercapai.

7) Cakupan Pemberian Garam Beryodium Tahun 2015 di Provinsi Jambi

Pada tabel di bawah ini disajikan hasil pemantauan garam beryodium di 11 Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Pemantauan garam beriodium bertujuan untuk melihat konsumsi garam beriodium di tingkat rumah tangga.

Tabel 4.25

Hasil Pemantauan Garam Beryodium tahun 2015 di Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Jumlah RT yg Diperiksa	Putih	Ungu Pucat	Ungu Pekat	% RT mengkonsumsi Garam Beryodium
1	KERINCI	3.036	11	206	2.820	99,65
2	SUNGAI PENUH	2.777	26	134	2.618	99,08
3	MERANGIN	786	6	36	744	99,24
4	SAROLANGUN	1.854	23	83	1.743	98,49
5	BATANG HARI	2.956	-	1.434	1.468	98,17
6	MUARO JAMBI	1.744	-	29	1.715	100
7	TANJAB TIMUR	2.372	4	57	2.313	99,89
8	TANJAB BARAT	4.485	11	13	4.463	99,81
9	TEBO	1.924	20	123	1.737	96,67
10	BUNGO	1.718	36	140	1.536	97,55
11	KOTA JAMBI	1.591	1	14	1.437	91,2
	PROVINSI	25.240	136	2.268	22.591	98,49

Sumber : Lap 6 bulanan gizi Feb dan Agt Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam baik dan tidak baik, garam yang berwarna putih hasil tes sebanyak 136 rumah tangga, ungu pucat 2.268 rumah tangga, ungu pekat 22.591 rumah tangga, sedangkan persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium sebesar 98,49%, sudah mencapai target sebesar 94 %.

c. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jaminan Kesehatan)

Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Tupoksi Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat menangani pembiayaan dan jaminan kesehatan. Mempunyai Indikator terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat di 11 Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi, dan tersedianya Dokumen DHA di 11 Kabupaten/Kota. Sumber Dana berasal dari Dana APBD dan Dana APBN 2015. Dana Dekonsentrasi (APBN) mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan yaitu cakupan kepesertaan universal (kepesertaan 100 % pada tahun 2019) yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS).

Tabel 4.26
Cakupan Kepesertaan JKN Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBN &				NON PBI			JUMLAH	TOTAL
		PBI-APBN	Provinsi	Jamkesda kab/Kota	JUMLAH	PENERIMA UPAH	BUKAN PENERIMA	BUKAN PEKERJA		
1	BATANGHARI	69,405	-	-	69,405	30,168	8,822	1,951	40,941	110,346
2	MUARO JAMBI	88,982	670	10,317	99,969	47,490	18,903	1,269	67,662	167,631
3	TANJAB BARAT	78,754	-	-	78,754	33,849	8,472	1,415	43,736	122,490
4	TANJAB TIMUR	54,836	-	-	54,836	14,801	5,697	516	21,014	75,850
5	KOTA JAMBI	141,012	4,168	19,727	164,907	173,185	64,189	31,837	269,211	434,118
6	BUNGO	61,408	-	1,000	62,408	38,672	10,741	3,695	53,108	115,516
7	TEBO	62,257	5,022	4,675	71,954	17,392	6,487	1,417	25,296	97,250
8	MERANGIN	72,897	4,530	4,530	81,957	26,749	7,717	3,121	37,587	119,544
9	SAROLANGUN	93,119	6,149	13,909	113,177	30,178	7,401	1,836	39,415	152,592
10	KERINCI	81,424	-	8,783	90,207	25,368	5,020	4,613	35,001	125,208
11	SUNGAI PENUH	17,838	1,725	9,111	28,674	5,624	3,697	2,778	12,099	40,773
	JUMLAH	821,932	22,264	72,052	916,248	443,476	147,146	54,448	645,070	1,561,318

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2015

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Provinsi Jambi sebesar 46,68 % dari jumlah penduduk 3,344,421 Jiwa.

Sementara Dana APBD mendukung pelaksanaan Jamkesda. Kabupaten yang Jaminan Kesehatan belum terintergrasi dengan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci dengan mekanisme SKTM.

d. Program Kesehatan Masyarakat

Tabel 4.27
Capaian Program/ Kegiatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012- oktober 2015

Indikator		Target				Capaian			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Persentase Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan (PN)		88,5	89	90	90	90,05	92,5	91,9	75,29
1.	% Pelayanan Antenatal (ANC) K4	93	94	95	95	93,51	93,61	93,39	75,06
2.	% Pelayanan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK)	63	68	80	80	64,62	76,74	84,55	66,92
3.	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Ibu Nifas (KF1)	88,5	89	90	90	89,09	91,23	92,61	74,74
% Kunjungan Bayi		80	85	90	90	89,63	82,68	93,8	
1.	Persentase Pelayanan Kunjungan Neonatal (KN1)	93	94	95	95	94,27	98,3	96,5	79,52
2.	Persentase Penanganan Komplikasi pada Neonatal (PK)	42	50	75	80	45,58	58,69	75,58	55,46
Persentase Penjaringan Kesehatan Siswa SD Kelas 1 dan Setingkat		70	80	100	100	86	88	100	100
1.	Persentase SD dan Setingkat Melaksanakan Penjaringan Kesehatan	70	80	100	100	86,46	88	100	100
2.	Jumlah kab./kota yang mempunyai 50% puskesmas menerapkan 9 program pengembangan	4 Kab	6 Kab	11 Kab	11 Kab/Kota	2 Kab	6 Kab	11 Kab/ kota	11 kab/kota
3.	Jumlah kab./kota yang mempunyai 75% puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas (P1,P2,P3).	6	8 Kab	11 Kab	11 Kab/Kota	8 Kab	8 Kab	11 Kab/kota	11 kab/kota

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2015

Tabel 4.28
Cakupan Program Ibu K4,PN,KF Dan PK S.D Oktober 2015

NO	KABUPATE/KOTA	CAKUPAN			
		K4	PN	KF	PK
1	KERINCI	81,37	79	78,95	52,69
2	MERANGIN	73,33	73,35	75,17	79,08
3	SAROLANGUN	65,7	65,1	64,92	52,74
4	BT.HARI	77,15	79,02	79,25	74,02
5	MUARO JAMBI	76,88	76,71	76,68	62,95
6	TANJAB TIMUR	77,64	76,78	79,5	71,97
7	TANJAB BARAT	75,33	75,77	73,04	59,69
8	TEBO	65,94	67,79	66,91	93,29
9	BUNGO	77,07	80,18	75,23	65,1
10	KOTA JAMBI	79,69	78,62	78,6	61,67
11	KOTA SEI PENUH	80,14	79,74	75	41,72
PROPINSI		75,06	75,29	74,74	66,92
TARGET SD OKTOBER		79,16	75	75,6	66,6
TARGET , 2015		95	90	90	80

Sumber: lap Pencapaian Indikator 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa

- 1) Cakupan Pelayanan ibu hamil (K4) adalah cakupan pelayanan antenatal secara lengkap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah disamping menggambarkan kemampuan manajemen atau pun kelangsungan Kesehatan Ibu dan Anak. Cakupan kunjungan K4 sampai bulan Oktober Kabupaten/Kota sebagian besar sudah mencapai target. Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Kerinci (81,37%), terendah Kabupaten Sarolangun (65,70 %).
- 2) Cakupan Persalinan oleh tenaga Kesehatan adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan kemampuan manajemen program Kesehatan ibu dan anak dalam pertolongan persalinan secara profesional, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sampai bulan Oktober ini sebagian besar Kabupaten/Kota sudah.

Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Bungo (80,18%),terendah Kabupaten Sarolangun (65,10 %).

- 3) Cakupan Penanganan Komplikasi obstetri adalah kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri pada ibu bersalin kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya atau dapat dirujuk ketingkat pelayanan yang lebih tinggi. Cakupan Penanganan Komplikasi obstetri sampai bulan Oktober ini sebagian besar Kabupaten/Kota sudah mencapai target. Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Tebo (93,29%),terendah Kota Sungai Penuh (41,72 %)
- 4) Cakupan Pelayanan Nifas (KF1) indikator ini untuk mengetahui jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas cakupan KF1 sebagian besar Kabupaten/Kota sudah mencapai target. Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Tanjab. Timur (79,50%), terendah Kabupaten Sarolangun (64,72 %)

Tabel 4.29
Cakupan Program Kunjungan Bayi, KN1,PK S.dOktober 2015

NO	KABUPATE/KOTA	CAKUPAN		
		KUNJUNGAN BAYI	KN1	PK Neo
1	KERINCI	74,75	82,7	29,78
2	MERANGIN	83,22	76,1	57,72
3	SAROLANGUN	63,55	65,3	45,28
4	BT.HARI	72,14	80,8	77,98
5	MUARO JAMBI	71,99	80,6	70,79
6	TANJAB TIMUR	85,24	83,9	72,23
7	TANJAB BARAT	78,39	86,5	44,03
8	TEBO	81,17	81,3	69,2
9	BUNGO	79,13	84,3	52,34
10	KOTA JAMBI	76,2	78,8	47,34
11	KOTA SEI PENUH	79,51	87,7	24,59
PROPINSI		76,34	79,5	55,46
TARGET S.OKTO 2015		75	79,2	66,66
TARGET (2014)		90	95	80

Sumber: lap Pencapaian Indikator 2015

Dari Tabel 4.29 dapat dilihat bahwa:

- 1) Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang mendapat pelayanan minimal empat kali yaitu pada umur :

Tabel 4.30
Cakupan kunjungan bayi

Jumlah Kunjungan Bayi	Umur
Satu (1) Kali	28 hari – 2 bulan
Satu (1) Kali	3 – 5 bulan
Satu (1) Kali	6 - 8 bulan
Satu (1) Kali	9 - 11 bulan

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dengan indikator ini dapat diketahui efektifitas *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

cakupan kunjungan Bayi sampai bulan Oktober ini sebagian besar Kabupaten/Kota sudah mencapai target. Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Tanjab. Timur (85,24%), terendah Kabupaten Sarolangun(63,55%)

- 2) Cakupan Kunjungan Neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal dua kali. Kunjungan pertama sejak 6 jam setelah lahir sampai 7 hari, kunjungan kedua 8 – 28 hari. Indikator ini dapat diketahui jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Cakupan KN1 sampai bulan Oktober ini sebagian besar kabupaten/Kota sudah mencapai target. Cakupan tertinggi adalah Kota Sungai Penuh (87,70%), terendah Kabupaten Sarolangun (65,29%),
- 3) Cakupan Komplikasi Neonatal menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan neonatal yang kemudian di tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat di rujuk ketingkat pelayanan yang lebih tinggi,

- 4) Cakupan PK sampai bulan Oktober ini sebagian besar kabupaten/Kota belum mencapai target. Cakupan tertinggi adalah Kabupaten Batanghari (77,98%), terendah Kota Sungai Penuh (24,59%).

Tabel 4.31
Cakupan Penjaringan Kesehatan Anak SDs.d Oktober 2015

No.	KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENJARINGAN
1	KERINCI	69,89
2	MERANGIN	76,29
3	SAROLANGUN	94,21
4	BT.HARI	98,17
5	MUARO JAMBI	95,85
6	TANJAB TIMUR	60
7	TANJAB BARAT	66,24
8	TEBO	63,53
9	BUNGO	96,4
10	KOTA JAMBI	100
11	KOTA SEI PENUH	98,8
PROPINSI		89,49
TARGET (2015)		100

Sumber: lap Pencapaian Indikator 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan penjaringan anak sekolah secara umum belum mencapai target tetapi ada empat (4) kabupaten yang sudah mencapai target yaitu kabupaten Batang Hari,Sarolangun,Kota Jambi,Kota Sei Penuh, Bungo.

Cakupan tertinggi adalah Kota Jambi (100 %) terendah Kabupaten Sarolangun, Merangin (0 %) ada dua kabupaten yang belum mengirim laporan kabupaten Merangin dan Sarolangun). Masih rendahnya cakupan penjaringan kesehatan siswa SD kelas 1 dan setingkat disebabkan penjaringan dilakukan pada saat anak SD/MI mulai masuk sekolah.

Tabel 4.32
Data 10 Penyakit Terbesar Tahun 2015

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH KASUS
1.	Infeksi Akut Lain Saluran PernafasanBagian Atas	288.772
2.	Penyakit Lain padaSaluranPernafasanAtas	71.298
3.	PenyakitpadaSistimOtotdanJaringanPengikaT	79.115
4.	PenyakitTekananDarahTinggi	102.895
5.	Diare (termasuk tersangka kolera)	63.964
6.	Gastritis	96.161
7.	PenyakitKulitAlergi	69.493
8.	PenyakitKulitInfeksi	24.582
9.	Demam tak tau sebab	29.153
10.	influenza	20.537

Sumber: lap Pencapaian Indikator 2015

Tabel 4.33
Pemenang Penilaian Tenaga Kesehatan Medis, Paramedis
Teladan Di Puskesmas Tahun 2015

N O	NAMA / JENIS TELADAN	PUSKESMAS/ALAM AT	PEMENAN G
<u>MEDIS</u>			
1	Dr. Hj. Putri Andayani Syam	Tanjab. Barat	Juara 1
2	Dr.Elizabeth Intan Budi P	Kota Sungai Penuh	Juara II
3	Dr. Rudi M.H. Pardede	Kota Jambi	Juara III
<u>PARAMEDIS</u>			
1	Hartati Sandora, AMK	Sarolangun	Juara I
2	Lilis Juniati, Am.Kep	TANJAB BARAT	Juara II
3	Hairunisah, Am.Keb	Batanghari	JUARA III

Sumber: lap Pencapaian Indikator 2015

Tabel 4.34
Pemenang Penilaian Tenaga Kesmas, Gizi Teladan Puskesmas
Tahun 2015

NAMA/JENIS TELADAN		PKM /ALAMAT	PEMENANG
<u>KESEHATAN MASYARAKAT</u>			
1	Emiliya, AMKL	Kerinci	JUARA I
2	Abdul Latif, SKM	Merangin	JUARA II
3	Yuni Winarti	TANJAB BARAT	JUARA III
<u>G I Z I</u>			
1	Azmalinda, S.Gz	KOTA JAMBI	PRESTASI I
2	NILVA ELVIA, AMG	KERINCI	PRESTASI II
3	Lili Marlina, Am.Keb	MUARA JAMBI	PRESTASI III

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.35
Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Manajemen Puskesmas
2015

NO	KABUPATEN/ KOTA	JLH PUSK	PELAKS PERENC TK.PUSK	PELAKS. LOKMIN TRIW		PELAKS.P ENILAIAN KINERJA PUSK.
				LP	LS	
1	KOTA JAMBI	20	20	20	0	20
2	MUARA JAMBI	19	19	18	0	19
3	TANJAB BARAT	16	16	16	0	16
4	TANJAB TIMUR	17	17	17	0	17
5	BATANG HARI	17	17	17	6	17
6	TEBO	17	16	16	0	17
7	BUNGO	18	18	18	15	18
8	SAROLANGUN	15	13	13	0	15
9	MERANGIN	22	20	20	0	22
10	KERINCI	18	18	18	0	18
11	KOTA SEI.PENUH	7	6	6	0	7
	TOTAL	186	180	179	21	186

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.36
Jumlah Puskesmas Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Mutu Tahun
2015

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH PUSK	PENERAPAN MUTU		
			QA	ISO	LAINNYA
1	KOTA JAMBI	20	20		
2	MUARA JAMBI	19	19		
3	TANJAB BARAT	16	16		
4	TANJAB TIMUR	17	17	-	
5	BATANG HARI	17	17	1	
6	TEBO	17	12		
7	BUNGO	18	18	-	
8	SAROLANGUN	15	13	-	-
9	MERANGIN	22	21	-	-
10	KERINCI	18	16	2	
11	KOTA SEI.PENUH	7	5	-	1
	TOTAL	186	174	2	1

Sumber : Bidang Yankes Kab/Kota

Cakupan puskesmas dengan kinerja yang baik dengan menilai pukesmas yang melaksanakan manajemen pukesmas. Adapun manajemen pukesmas terbagi atas 3 bagian yaitu P1 (perencanaan), P2 (lokakarya mini/ lokmin dan P3 (evaluasi kinerja pukesmas). Pada tahun 2015 ada sebanyak 6 Kabupaten/ Kota yang memiliki pukesmas dengan kinerja yang baik yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 4.37
Jumlah Dan Sumber Dana Dari APBD Seksi
Yankesmas Tahun 2015

No	Program	Jumlah Dana APBD		%
		Alokasi	Realisasi	
1	UKM	725.240.900	691.461.824	95

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Kegiatan-Kegiatan yang bersumber dari dana APBD tahun 2015.

- 1) Perluasan pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan P3K
 - 2) Kegiatan peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan kesehatan ibu nifas dan neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi
 - 3) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan kapasitas puskesmas dalam pelaksanaan manajemen puskesmas dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan program pelayanan dasar
 - 4) Peningkatan Mutu pelaksanaan UKS dalam lomba Dokter Kecil, Penilaian Sekolah Sehat, Mengikuti Rakernas UKS dan Jambore UKS
 - 5) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan penilaian puskesmas Berprestasi dan pemilihan Tenaga Teladan di Puskesmas
 - 6) Peningkatan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan antenatal terpadu, manajemen aktif kala III, asuhan persalinan normal dan pelaksanaan kelas ibu.
 - 7) Peningkatan manajemen pengelola program KIA dalam dalam PWS KIA dalam mendukung Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak
- e. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Tabel 4.38

Capaian Program /Kegiatan SIE Pelayanan Kesehatan Perorangan Tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD

No	Kegiatan APBD	Sasaran	Indikator	Prosentase/Jumlah
1	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) melalui Penilaian RS Sayang Ibu dan Bayi	13 RS Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan Program PONEK melalui Kegiatan RSSIB	100%
2	Pembinaan Akreditasi RS	13 Rumah Sakit	Jumlah RS yang terakreditasi dengan versi baru 2012	3 RS

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.39
Capaian Program /Kegiatan SIE Pelayanan Kesehatan Perorangan
Tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN

No	Kegiatan APBN	Sasaran	Indikator	Prosentase
1	Pertemuan Penyusunan e-Planning BUK oleh Diskes Prov.kepada Diskes Kab/Kota, RS Prov/Kab/Kota dan satker lainnya di wilayah binaan	14 RS dan 11 Diskes Kab/Kota	Adanya dokumen perencanaan RS dan Diskes Kab/Kota untuk perencanaan tahun 2015	100%
2	Peningkatan Keterampilan Asesment dan Rencana Terapi terkait wajib lapor Pecandu Narkotika	RS Jiwa Jambi, Diskes Prov, 11 Diskes Kab/Kota	Terlaksananya keterampilan Asesment dan Rencana Terapi terkait wajib lapor Pecandu Narkotika	100%
3	Pertemuan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen RS	33 RS Kab/Kota dan Prov	Jumlah RS yang mengirimkan Lap.Bulanan dan Lap.Tahunan serta terkoneksi dgn SIRS Online	100%
4	Workshop Keselamatan Pasien Rumah Sakit	14 RS Pemerintah Kab/Kota	Jumlah petugas yang memahami kasus patient safety di RS.	100%
5	Workshop Standar Akreditasi Baru versi 2012 tahun 2015	33 RS Kab/Kota	Jumlah RS yang memahami Akreditasi dgn instrument baru.	100%
6	Pertemuan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (lanjutan) tahun 2015	33 RS Kab/kota	Jumlah RS yang melaksanakan PPI lanjutan	100%
7	Monitoring dan Evaluasi Program Bina Upaya Kesehatan	12 RSUD Kab/Kota	Jumlah RS yang melaksanakan SPM, Akreditasi RS, Program PONEK 24 Jam	100%
8	Pertemuan Konsultasi Perencanaan dan Monev Program BUK antara Ditjen BUK dgn Diskes Provinsi.	Kemenkes RI (Perencanaan, BUK Rujukan, Keteknisian Medik, keperawatan)	Jumlah dokumen RKAKL yang tersusun thn 2015, jumlah perawat berdasarkan klasifikasi RS)	100%
9	Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Akreditasi RS	Tim Pembina Akreditasi Provinsi	Jumlah anggota Tim Pembina Akreditasi Provinsi yang telah mengikuti pelatihan	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.40
Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Program Tahun 2015

No	Keg.Prog	Indikator			Kendala/hambatan	Rekomendasi
		Input	Output	Outcome		
1	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) melalui Penilaian RS Sayang Ibu dan Bayi	SDM, dana, RS Kab/Kota,	Terpilihnya juara I, II dan III Lomba RSSIB	Terbentuknya Tim PONEK di 13 RS Kab/Kota	Kurangnya dana untuk kegiatan RSSIB RS Swasta	Penambahan anggaran untuk pembinaan dan penilaian RSSIB RS swasta
2	Pembinaan Akreditasi RS	SDM, dana, RS, Diskes Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akreditasi di 13 RS	13 RS terakreditasi	Adanya perubahan elemen penilaian akreditasi dari versi 2007 ke versi 2012	Peningkatan kapasitas tim akreditasi melalui workshop dengan KARS
3	Pertemuan Penyusunan e-Planning BUK oleh Diskes Prov.kepada Diskes Kab/Kota, RS Prov/Kab/Kota dan satker lainnya di wilayah binaan	SDM, dana, RS, Diskes Kab/Kota	Terlaksananya verifikasi dokumen RKAKL	Tersusunnya dokumen RKAKL	Kegiatan sering tidak tepat waktu karena menyesuaikan dengan jadwal narasumber pusat	Perlu sinkronisasi jadwal antara dinkes Provinsi dengan Perencanaan dan Informasi Ditjen BUK Kemenkes RI

No	Keg.Prog	Indikator			Kendala/hambatan	Rekomendasi
		Input	Output	Outcome		
4	Peningkatan Keterampilan Asesment dan rencana terapi terkait wajib lapor pecandu narkotika	SDM, dana, Diskes Kab/Kota	Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Kesehatan Jiwa Bagi Petugas Kesehatan di 23 Puskesmas	Terlatihnya tenaga kesehatan jiwa di 23 Puskesmas	Belum semua tenaga kesehatan jiwa di puskesmas terlatih program kesehatan jiwa karena kurangnya anggaran	Perlunya anggaran untuk peningkatan keterampilan kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan di Puskesmas
5	Pertemuan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen RS	SDM, dana, RS Kab/Kota	Terlatihnya petugas SIRS di RS Provinsi dan Kab/Kota	Terkirimnya laporan SIRS online dan off line	-Sering tidak tersedia jaringan internet yang memadai untuk mengirim laporan SIRS online dari RS Kab	Perlunya disediakan jaringan internet yang memadai untuk kelancaran pengiriman SIRS Online
6	Peningkatan Program Patient Safety di RS	SDM, dana,	Terlatihnya petugas RS tentang patient safety	Terbentuknya Tim patient safety di RS	Belum semua RS membentuk tim patient safety	Perlu adanya anggaran dan membentuk tim patient safety di RS
7	Workshop Akreditasi RS dengan Instrumen Baru	SDM, dana,	Terlaksananya sosialisasi Akreditasi dengan instrument baru	Jumlah RS yang tersosialisasi dengan instrument baru	Perubahan instrument dan elemen penilaian akreditasi	Peningkatan pembinaan akreditasi melalui anggaran APBD dan APBD

No	Keg.Prog	Indikator			Kendala/hambatan	Rekomendasi
		Input	Output	Outcome		
8	Monitoring dan Evaluasi Program Bina Upaya Kesehatan	SDM, dana, data RS, Diskes Kab/Kota ,	Terlaksananya program UKP	Jumlah RS yang melaksanakan SPM, Akreditasi RS, Program PONEK 24 Jam	Belum adanya penanggung jawab program RS di Diskes Kab/Kota	Perlu dibentuknya penanggung jawab program RS di Diskes Kab.kota
9	Pertemuan Konsultasi Perencanaan dan Monev Program BUK antara Ditjen BUK dgn Diskes Provinsi.	SDM, dana, data	Terlaksananya perencanaan dan konsultasi program BUK	Jumlah dokumen RKAKL yang tersusun tahun 2016, jumlah perawat berdasarkan klasifikasi RS)	Jadwal konsultasi tidak sinkron dengan Kemenkes RI	Perencanaan awal program konsultasi dengan Kemenkes RI
10	Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Akreditasi RS	SDM, dana, data , RSU/	Terlatihnya Tim Pembina Akreditasi provinsi dengan instrument baru	Jumlah anggota Tim Pembina Akreditasi Provinsi yang telah mengikuti pelatihan	Perubahan anggota Tim yang pindah tugas	Pembentukan Tim Akreditasi Baru dan perlu mengikuti pelatihan dengan KARS
		RSJ, Diskes Kab/Kota				

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Berdasarkan kepada kewenangan yang ada, telah disusun Program baik yang merupakan kewenangan daerah melalui Tugas Pokok dan Fungsi maupun kewenangan yang dilakukan bersama melalui tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Berdasarkan Sasaran Program yang tercatat dalam Renstra Dinas Kesehatan yaitu Meningkatnya ketersediaan Obat esensial Generik di sarana Pelayanan Kesehatan dasar, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Kegiatan beserta target dan pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 4.41
Indikator Kegiatan dan Target Program obat dan Perbekalan

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Capaian 2015
Sasaran :			
Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan			
Indikator Kinerja Utama :			
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin			
Indikator Kinerja Kegiatan :			
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90	90
2	Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Provinsi Jambi yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100	100
3	Persentase kabupaten/kota melaksanakan program kefarmasian dan alat kesehatan.	100	100
4	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memilih obat melalui metode CBIA	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.42

Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana dan sumber anggaran tahun 2015 seksi Farmasi dan Perbekkes. Anggaran APBD

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	JUMLAH DANA		Ket
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Kegiatan pengandaan obat, perbekalan kesehatan, obat anti tuberkolosis (OAT), obat abti retroviral (ART) , obat Perbaikan Gizi dan Buffer stock	Terckupinya kebutuhan obat di 11 Kab/Kota	Rp.1.177.824.775,-	Rp.993.941.700,-	APBD
2	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi program kefarmasian dan alat kesehatan ke 11 Kab/Kota	Termonitoringnya pelaksanaan program kefarmasian di 11 Kab/Kota	Rp. 117.460.000,-	Rp.110.018.400,-	APBD
3.	Kegiatan Instalasi Farmasi	Terlaksananya semua kegiatan di Instalasi Farmasi dgn baik	Rp. 6.472.700,-	Rp. 6.472.700,-	APBD
4.	Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan ke Kab/Kota dan sarana produksi dan distribusi	Termonitoringnya kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan ke Kab/Kota dan sarana produksi dan distribusi	Rp. 44.733.000,-	Rp. 44.041.000,-	APBD
5.	Kegiatan DAK (Rehap gedung,gudang farmasi)	Terbangunya gedung gudang farmasi sesuai standar	Rp.1.233.568.750,-	Rp.190.000.000,-	APBD
J U M L A H			Rp.2.580.059.225,-	Rp.1.344.473.800	52,11%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.43

Rincian Kegiatan, keluaran, jumlah dana dan sumber anggaran tahun 2015 seksi Farmasi dan Perbekkes. Anggaran APBN

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	JUMLAH DANA		Ket
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
A	PROGRAM PRODIS KEFARMASIAN				
1	Penerapan pengembanagn Software SIPNAP untuk unit layanan	Meningkatnya kemampuan penanggung jawab pengelola Sipnap	54.585.000,-	50.865.300.-	APBN
2	Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Kab/Kota	Meningkatnya kemampuan peserta mengenai Makanan jajanan Anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi	Rp. 63.686.000,-	Rp. 50.460.000.-	APBN
3	Sosialisasi E_Licencing Bagi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, PBF, Industri Kosmeti/Makanan.	Tersosialisasinya aplikasi E-Licensing sehingga menjamin keberlangsungan pelayanan perizinan bidang prodis kefarmasiann secara elektronik.	Rp. 55.230.000,-	Rp. 49.980.000,-	APBN
B	PROGRAM SEKRETARIAT				
1	Advokasi pelaksanaan SAI Program Kefarmasian dan Alkes	Diperolehnya gambaran data cara penyusunan laporan keuangan dan barang Milik negara utnuk periode tahun 2014	Rp. 16.140.000	Rp. 15.121.800,-	APBN
2	Pemutakhiran data Kefarmasian dan Alkes Tk. Provinsi-Profil Kefarmasian	Tersedianya data Kefarmasian yang mutakhir dari Seluruh Kabupaten/Kota	62.796.000	53.844.040	APBN
3	Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alkes	Tersusunnya suatu rumusan komitmen dan rekomendasi dalam upaya peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menuju suksesnya pelaksanaan RPJMN 2010-2014 serta tercapainya strategi serta 9 fokus kegiatan di Ditjen Binfar dan Alkes	Rp.37.477.000	Rp. 34.423.600,-	APBN
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terlaksananya kegiatan kefarmasian dan Alat kesehatan	Rp. 164.880.000	Rp. 66.051.400,-	APBN
C	PRODIS ALKES DAN PKRT				
1	Sampling Alkes dan PKRT	Diketahuinya hasil uji Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat	Rp. 43.075.000	Rp. 39.461.854,-	APBN

NO	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	JUMLAH DANA		Ket
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
2	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Distribusi Alkes	Tersedianya data sarana distribusi alkes memenuhi cara produksi dan/atau distribusi alkes yang sudah memenuhi cara produksi dan/atau distribusi alkes yang baik	Rp. 3.887.000	Rp. 0 ,-	APBN
3	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Implementasi Elektronik Pada Binwasdal, Alkes dn PKRT		Rp. 58.684.000	46.858.900,-	APBN
D	PROGRAM OBLIK				
1	Biaya Pengelolaan dan Pengemasan Kembali Obat	Terlaksananya kegiatan operasional di Instalasi Farmasi di pelayanan Kesehatan dasar.	44.000.000	22.000.000	APBN
2	Biaya distribusi obat dan Vaksin Propinsi Kab/Kota	Terdistribusinya Obat Program di 11 Kab/Kota	192.016.000	190.235.200	APBN
3	Harmonisasi dan Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan Implementasi Pengelolaan Satu Pintu	Men ingkatnya penggunaan obat esensial generik dipelayanan kesehatan dasar	110.794.000	87.956.300	APBN
E	PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN				
1	Pemantauan Penggunaan Obat Dalam Pelaksanaan JKN Di Puskesmas Dan RS.	Tercapainya Kesesuaian penggunaan Obat di Puskesmas dan Rumah Sakit di 11 Kab/Kota dengan FORNAS	88.069.000	62.124.000	APBN
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Era JKN.	Meningkatnya Pemahaman Penanggung Jawab Program dalam menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasilitas kesehatan pemerintah pada ERA JKN terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit	65.897.000	52.922.300	APBN

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

1) Kendala Dan Hambatan Program Obat Dan Perbekalan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari pencapaian indikator kegiatan yang dapat dilihat dari target dan sasaran setiap kegiatan khususnya yang tercantum dalam menu kegiatan yang bersifat wajib dan pilihan yang diturunkan dari kebijakan hasil Rakontek Ditjen Binfar dan kewenangan menurut PP nomor 38 tahun 2007. Belum semua kegiatan yang dapat diakomodasi dari dana dekon sehingga perlu adanya dukungan penuh oleh pemerintah daerah melalui dana APBD baik berupa pertemuan, Bimtek, Monev, maupun Supervisi ke sarana-sarana pelayanan kesehatan sampai ke tingkat sarana penyedia alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Perlu adanya peningkatan koordinasi baik dari lintas sektor maupun lintas program terkait dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian indikator di masing-masing program baik itu dalam bentuk advokasi, sosialisasi (Norma Standar Peraturan dan Kriteria/ NSPK) yang berkaitan dengan indikator program. Kebijakan pusat diharapkan tidak mengikat sehingga dapat memberikan keleluasaan provinsi maupunkab/kota untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan keadaan otonomi daerah masing-masing (sesuai dengan PP 38 tahun 2009)

2) Capaian Program /Kegiatan Farmasi Tahun 2015

g. Program dan Sasaran Bidang farmasi

Tabel 4.44
Program dan Sasaran Bidang Farmasi Tahun 2015

No	Program/Sasaran	Target 2015	CAPAIAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan Pelayanan kefarmasian sesuai standar dalam melaksanakan pelayanan Informasi Obat di sarana :						
	a. Puskesmas	30	57	92,54	44,7	32.64	36,81
	b. Rumah Sakit	50	65	83,33	18,06	19.87	19,64
2	Jumlah sarana Yankes yang Melaksanakan Penggunaan Obat Rasional di sarana :						
	- Puskesmas	70%	80	100	62,88	75	78
3	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan 11 kab/kota mengalokasikan dana obat melalui APBD sehingga tercapai tingkat ketersediaan obat sesuai target :						
	a. Dana obat/kapita (Rp)	18.000	7.287	7.287	9.076	8.209	8.092
	b. Tingkat ketersediaan %	100	75	84	77,92	86,93	88,01
4	Peningkatan Produksi dan distribusi alat kesehatan						
	a. Sarana distribusi alkes dan	70%	45%	56%	65%	74%	43,75
	Perbekalan kesehatan rumah tangga yang memenuhi persyaratan distribusi						
	b. Alkesdan PKRT yang memenuhi syarat (diuji)	100%	90%	75%	90%	100%	86,49
5	Peningkatan Produksi dan Distribusi kefarmasian:						
	a. Jumlah sarana melaporkan Sistem Informasi Psikotropika Narkotika	95%	23,43%	54,75%	39%	18.94 %	53.03 %
	b. Jumlah Pedagang Besar Farmasi melaporkan dinamika obat	100%	2,35%	89,71%	85,71%	85.71%	87.10%
	c. Jumlah Kab/Kota yang terpantau melaksanakan HACCP	11 KAB/KOTA	11 KAB/KOTA	11 KAB/KOTA	11 KAB/KOTA	11 KAB/KOTA	11 KAB/KOTA

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

1) Permasalahan:

- (a) Persentase pelayanan kefarmasian yang sesuai standar di sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit pada Tahun 2015 belum mencapai target yaitu 19.64% dari target 2015 sebesar 50% dilihat data per Oktober 2015. Masih rendahnya capaian untuk kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit disebabkan antara lain :
 - (b) lemahnya advokasi ke Pihak RS terutama IFRS dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
 - (c) Kurang aktifnya kepala instalasi dalam mengimplementasikan pelayanan kefarmasian walaupun masih sebatas bentuk laporan
 - (d) Laporan pelayanan kefarmasian tidak dikirim secara rutin (jemput bola)
 - (e) Terjadinya perubahan penanggung jawab program pelayanan kefarmasian di RSUD sehingga beban kerja menjadi tidak jelas.

2) Kendala yang dihadapi dalam pengadaan obat menggunakan E-catalog Tahun 2015, untuk pengadaan obat buffer stok dan obat program di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi :

- (a) Vaksin Rabies, untuk manusia serbuk injeksi s.k/i.k + booster (Verorab) kemasan dus,vial@1 dosis + 1 syringe @ 0,5 ml Nacl 4%. Penyedia PT. Bio Farma.
- (b) Penyedia tidak dapat memnuhi kebutuhan VAR sampai akhir tahun, dikarenakan keterbatasan kapasitas produksi VAR (Verorab).
- (c) Lansoprazol kapsul/kaplet 30 mg. Penyedia Pt. Indofarma
- (d) Tidak dilayani dikarenakan sudah over kuota secara nasional.
- (e) Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg, Karbamazepin tablet 200 mg, Fenobarbital tablet/kapsul/kaplet 100 mg. Penyedia PT. Indofarma.
- (f) Produk belum tersedia/belum produksi dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku aktif akibat kenaikan kurs dolar.
- (g) Simvastatin tablet 20 mg, Metil Prednisolon tablet 4 mg. Penyedia PT. Natura Laboratoria prima.
- (h) Setelah proses e-purchasing menyatakan sanggup untuk menyediakan obat ke Dinas Kesehatan provinsi, tetapi Distributornya yaitu PT. Metro Druug Indonesia tidak mau menandatangani kontrak dikarenakan barang yang di e-purchasing tidak tersedia pada Distributor.

- (i) Parasetamol tablet 500 mg, Loratadin tablet 10 mg. Penyedia PT. Promedrahardjo Farmasi Industri.
 - (j) Dinas Kesehatan provinsi sudah melakukan e-purchasing, tetapi ketika dihubungi untuk penandatanganan kontrak tidak pernah dijawab oleh penyedia.
 - (k) PT. Kimia Farma tidak dapat memenuhi kebutuhan beberapa item obat, seperti Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCL), Retinol (Vitamin A) 200.000 IU, retinol (vitamin A), dikarenakan sudah over kuota secara nasional.
- 3) Peningkatan persentase produksi dan distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang memenuhi syarat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sudah mengalami peningkatan, artinya sesuai dengan hasil pemetaan sarana yang dilakukan sarana distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sudah memenuhi persyaratan distribusi sesuai dengan Permenkes nomor. 1191 / Menkes / Per/VIII/2010. Jumlah sarana penyalur alkes yang dilakukan pemetaan tahun 2015 ada 25 sarana, yang terdiri dari cabang penyalur alat kesehatan 8 sarana, PAK 17 sarana , Sedangkan untuk persentase alat kesehatan dan pebekalan kesehatan rumah tangga yang memenuhi syarat uji sampling juga mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dari 8 sample uji sebanyak 7 sampel telah memenuhi syarat, tahun 2012 dari 26 sample sebanyak 19 sample memenuhi syarat, tahun 2013 dari 25 sample hasilnya 24 sampel telah memenuhi syarat dan pada tahun 2014 dari 25 sampel Alkes dan PKRT yang diuji semuanya memenuhi syarat atau 100% MS,dan ditahun 2015 dari 37 sample yang diuji yang memenuhi syarat 32 sample atau 86,49 % MS.
- 4) Persentase pelaporan SIPNAP di sarana unit layanan di 11 Kabupaten/Kota (Instalasi Farmasi Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Klinik) dari pantauan Dinas Kesehatan Provinsi unit layanan yang telah melaporkan terjadi peningkatan dari tahun 2014 yaitu 53.03% per Oktober 2015.
- 5) Masih rendahnya capaian untuk kegiatan SIPNAP antara lain :
- (a) Petugas SIPNAP di Kab/Kota merangkap dengan pekerjaan lain (belum ada petugas khusus)

- (b) Fasilitas laptop/jaringan/modem di Kab/Kota dan unit layanan yang masih kurang
 - (c) Petugas unit layanan masih “gaptek” (belum menguasai peralatan komputer dan teknologinya)
 - (d) Kesulitan akses internet (di daerah tertentu)
 - (e) Kendala teknis software
- 6) Persentase Pedagang Besar Farmasi yang melaporkan kegiatan pengelolaan obat (Dinamika Obat) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 87,10%. Pengiriman laporan dinamika obat dilakukan masih menggunakan aplikasi software sistem pelaporan Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau E-Report PBF yang dikirim ke alamat website atau email Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan RI www/binfar.depkes.go.id/pbf. Jumlah PBF di provinsi jambi tahun 2015 berjumlah 31 PBF terdiri dari 23 PBF cabang dan 8 PBF Pusat. PBF yang melapor tahun 2015 berjumlah 27 PBF (87.09 %) dan sebanyak 4 PBF (12,90 %) belum melapor. Laporan pengelolaan obat (Dinamika Obat) dari tahun 2013 sampai tahun 2015 belum mengalami peningkatan karena adanya penggantian petugas atau penanggung jawab PBF dan penyempurnaan software.
- 7) Dari hasil kegiatan monitoring kesarana makanan jajanan anak sekolah yang ada di 11 kab/kota tahun 2015 di dapat data sebagai berikut;

Tabel 4.45
Data Hasil Pembinaan Dan Monitoring Ke Sarana Mjas Ke 11
Kab/Kota Tahun 2015

NO	ITEM	TAHUN 2015				KET
		TK	SD	SMP	SMA	
1	JML Sarana MJAS	6	11	11	11	
2	Sarana YMS	90%	40%	35%	40%	
3	Sarana TMS	10%	60%	65%	60%	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari hasil monev juga didapat data dari 11 kab/kota yang melaksanakan program MJAS (makanan jajanan anak sekolah) 77% (Batanghari, Tanjab Barat, Kerinci, Bungo, Muaro Jambi, Merangin, Tebo) dan yang belum melaksanakan ada 4 kab/kota yaitu Kota Jambi, Sarolangun, Tanjab Timur, Sungai Penuh.

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1) Program Penyakit DBD

Di Provinsi Jambi, kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2015 terdistribusi di 10 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo serta Kerinci).

Dari 10 Kabupaten/Kota tersebut, Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi (s/d Desember = 794 kasus, dengan 08 kematian), kondisi ini sesuai dengan pattern of disease dari penyakit DBD, yaitu Urban Disease. Selanjutnya Kabupaten lainnya yang juga terjadi peningkatan kasus adalah Kota Jambi, Batang Hari dan Bungo, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Distribusi penderita dan kematian DBD menurut Kab/Kota
diProvinsi Jambi Tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	TOTAL		IR per 100 ribu pddk	CFR (%)
	P	M		
KOTA JAMBI	430	8	73,2	1,9
BATANG HARI	77	0	28,9	0
MUARO JAMBI	48	0	12,7	0
TANJAB BARAT	54	0	17,6	0
TANJAB TIMUR	30	0	13,2	0
B U N G O	70	0	20,9	0
T E B O	0	0	0	0
SAROLANGUN	32	0	11,8	0
MERANGIN	33	0	9	0
KERINCI	9	0	3,6	0
KOTA SUNGAI PENUH	11	0	12,16	0
PROV TAHUN 2014	794	14	23,3	1

S
Sumberr : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Keterangan :

P = Penderita;

IR = Incidence Rate per 100.000 penduduk

M = Kematian

CFR = Case Fatality Rate (%)

Kejadian kasus DBD yang cukup tinggi dan masih terjadi kematian akibat DBD merupakan permasalahan yang masih kita hadapi, hal ini cukup memprihatinkan semua pihak. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas beberapa hal yang telah dilakukan tahun 2015, yaitu :

- 2) Rapat koordinasi Tim Pokjanal DBD di Provinsi dalam upaya penggerakan masyarakat dalam pemberantasan jentik nyamuk

penular DBD di tatanan rumah tangga, institusi dan tempat-tempat umum.

2) Program Peningkatan Pengendalian Malaria

Secara nasional tujuan pengendalian malaria untuk wilayah Sumatera ditargetkan menuju eliminasi pada tahun 2020. Catatan penting terkait tahapan menuju eliminasi malaria adalah bahwa yang menjadi salah satu indikator bebas malaria adalah angka kejadian kasus malaria positif tahunan per 1000 penduduk beresiko (Annual Parasite Incidence/API).

Pada tahun 2015 Di Provinsi Jambi, cakupan Annual Parasite Incidence (API) sebesar 0,44 per 1000 penduduk, dan 3 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan RI. Secara bertahap seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi sampai akhir 2019 ditargetkan akan eliminasi. Capaian kinerja pengendalian malaria per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.47

Capaian kinerja Program Pengendalian Malaria menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015

Kabupaten/Kota	% kasus diobati ACT	% kasus klinis dikonfirmasi Lab	A P I (per 1000 penduduk)	Slide Positivity Rate (Proporsi slide +)
Kota Jambi	100.00	100.00	0,47	3,9
Batang Hari	98.00	94	0,71	3,75
Muaro Jambi	100.00	100	0,23	1,34
Tanjab Barat	100	91	0,27	11,55
Tanjab Timur	57,00	76	0,03	9,86
Merangin	98	92	0,94	6,69
Sarolangun	100	55	0,46	12,09
Bungo	98	69	0,25	5,31
Tebo	100	87	0,92	16,13
Kota Sei.Penuh	0	0	0	0
Kerinci	0	0	0	0
JAMBI	99	91	0,44	5,15

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa permasalahan bahwa belum semua kunjungan klinis malaria di fasilitas pelayanan kesehatan dikonfirmasi secara laboratorium (91%) dan dari sediaan darah yang diperiksa 5,15% positif malaria (target SPR = <5%) dan belum semua (99,00%) kasus malaria positif diberikan obat anti malaria ACT.

Kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan dalam peningkatan kegiatan tahun 2015, yaitu :

- a. Peningkatan Kapasitas Mikroskopis Malaria
 - b. Pembinaan Tehnis Program Malaria ke 11 Kabupaten/ Kota
 - c. Pengadaan Logistik Operasional Program Malaria
- 3) Program Eliminasi Filariasis dan Kecacingan.

Di Provinsi Jambi saat ini terdapat 4 kabupaten yang termasuk daerah endemis Filaria yaitu daerah dengan angka Mikrofilaria diatas 1%, yaitu Kab. Ma. Jambi, Tanjab Timur, Batanghari dan Merangin. Pengobatan Massal Filariasis ini dimulai tahun 2012 dan berlangsung selama 5 tahun berturut-turut dan akan berakhir tahun 2016 yang akan datang.

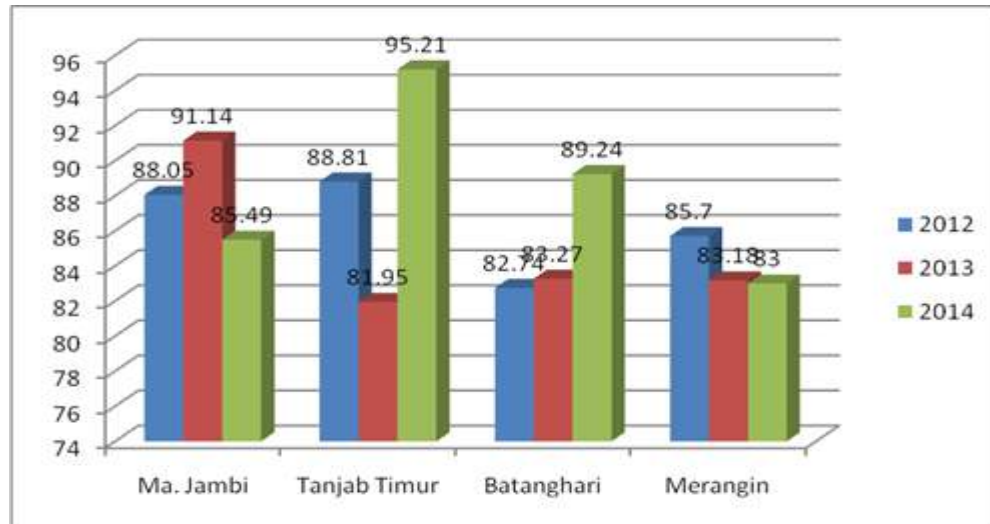
Target pengobatan massal Filariasis ini adalah 65% dari jumlah penduduk selama 5 tahun berturut-turut, dimana setelah selesai pengobatan massal akan dilakukan survei kembali untuk melihat apakah masih ada penularan baru dari Filariasis tersebut. Dalam dua kali pengobatan massal yang dilakukan, target sasaran pengobatan massal Filariasis jauh melampaui target (65% dari jumlah penduduk), lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.48
Cakupan Pengobatan Massal Filaria Tahun 2012-2013

No	Kabupaten	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Ma. Jambi	88.05	91.14	85.49
2	Tanjab Timur	88.81	81.95	95.21
3	Batanghari	82.74	83.27	89.24
4	Merangin	85.7	83.18	83.00
Rata-rata		83.33	84.88	85.65

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan cakupan pengobatan massal Filariasis dari tahun 2012 sampai dengan 2014, namun secara umum semua kabupaten yang melakukan pengobatan massal Filariasis melebihi target (65%). Dalam grafik berikut dapat dilihat cakupan pengobatan massal Filariasis tahun 2012-2014.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.11 Cakupan Pengobatan Massal Filaria Tahun 2012-2014

Sampai saat ini pelaksanaan pengobatan massal Filariasis belum menemukan kendala, karena sebagian besar dana pelaksanaan ditanggung oleh Donor (RTI/USAID).

(a) Kegiatan Pengendalian Zoonosis

Program Zoonosis di Provinsi Jambi sampai saat ini yang ada kasus hanya penyakit Rabies. Penyakit Rabies ini bermula dari adanya kasus Gigitan dari Hewan Penular Rabies seperti anjing, kucing, kera dll. Selama tahun 2015, di Provinsi Jambi sampai bulan November terjadi kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) sebanyak 681 kasus, kasus GHPR yang mengakibatkan kematian

selama tahun 2015 ada 1 (satu) kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.49
Kasus GHPR Di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kab / Kota	KG	PET	L	SP
1	Kota Jambi	74	67	0	0
2	Batang Hari	27	27	0	0
3	Muaro Jambi	110	107	0	4
4	Bungo	60	60	0	0
5	Tebo	66	65	0	0
6	Merangin	53	45	0	0
7	Sarolangun	64	57	0	0
8	Kab. Kerinci	80	80	1	0
9	K.Sei Penuh	31	31	0	0
10	Tanjab Barat	68	66	0	0
11	Tanjab Timur	48	48	0	0
JAMBI		681	653	1	4

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Selama tahun 2015 ini, kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan penyakit Rabies adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam rangka meminimalisir kasus GHPR. Kegiatan Dinas Peternakan Kab/Kota dalam meminimalisir kasus GHPR diantaranya eliminasi/peracunan hewan liar di daerah masing-masing. Untuk mencegah kasus GHPR menjadi Rabies Positif, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan Vaksinasi terhadap manusia yang kena gigitan hewan penular rabies.

Kendala yang dihadapi dalam penaggulangan kasus Rabies di Provinsi Jambi adalah masih terbatasnya ketersediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) di Kab/Kota. Penyakit Rabies ini termasuk penyakit yang harus ditangani dalam 24 jam, artinya ketersediaan VAR tidak boleh kosong di Kab/Kota.

Solusi yang disarankan dalam rangka penanggulangan penyakit Rabies adalah pengadaan VAR di tiap kab/kota dengan anggaran APBD masing-masing sesuai kebutuhan.

4) Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV/AIDS

Pelayanan pencegahan penyakit HIV/AIDS di Provinsi Jambi selama tahun 2015, telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan Konseling dan Tes (KT) terdiri dari 33 orang dari 11 Kabupaten/ Kota (Dokter, Perawat dan Petugas Laboratorium).

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 secara kumulatif jumlah pengidap HIV/AIDS yang tercatat/dilaporkan sebanyak 1.349 kasus, seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.50
Kasus HIV/AIDS Di Provinsi Jambi

No	Tahun	HIV Pos	AIDS	Total
1	1999-2004	80	14	94
2	2005	42	16	58
3	2006	26	34	60
4	2007	28	21	49
5	2008	18	53	71
6	2009	24	71	95
7	2010	32	45	77
8	2011	48	49	97
9	2012	128	57	185
10	2013	137	90	227
11	2014	56	63	119
12	2015	80	52	132
Jumlah		788	561	1349

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Jambi tahun 2015 saja sebanyak 132 orang dengan berbagai faktor risiko penularan, untuk lebih jelasnya gambaran kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.51
Penderita HIV/AIDS Berdasarkan Faktor Risiko Di Provinsi Jambi
Tahun 2015

No	Faktor Risiko	HIV	%	AIDS	%	Meninggal	%
1	Heteroseksual	56	70	36	69,23	12	85,7
2	IDU	4	5	3	5,77	1	7,1
3	Homoseksual	12	15	10	19,23	1	7,1
4	Biseksual	5	6,25	3	5,77	0	
5	Perinatal	2	2,5	0	0	0	
6	Transfusi	0	0	0	0	0	
7	Tidak di ketahui	1	1,25	0	0	0	
Jumlah		80	100	52	100	14	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk kasus HIV faktor risiko tertinggi masih berasal dari heteroseksual, sedangkan kasus AIDS faktor risiko yang dominan disebabkan penggunaan jarum suntik.

Kasus HIV/AIDS tahun 2015 sampai triwulan IV sebanyak 132 orang dengan sebaran kasus terbanyak di Kota Jambi, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.52
Kasus HIV/AIDS Per Kab/Kota Tahun 2015

No	Kab/Kota	HIV	AIDS	Meninggal
1	Kota Jambi	68	43	9
2	Batanghari	0	0	0
3	Muaro Jambi	7	0	0
4	Bungo	0	0	0
5	Tebo	0	2	1
6	Merangin	0	3	2
7	Sarolangun	0	0	0
8	Kerinci	0	0	0
9	Sungai Penuh	0	0	0
10	Tanjab Barat	4	3	2
11	Tanjab Timur	1	1	0
Jumlah		80	52	14

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Beberapa hal permasalahan yang masih dihadapi :

1. Belum meratanya layanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan terkait HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
2. Terbatasnya ketersediaan kondom dilayanan kesehatan.
3. Masih adanya ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang lolos follow up pengobatan ARV

Upaya pemecahan masalah :

1. Diharapkan layanan kesehatan melengkapi SDM sesuai dengan standart yang ada dalam program pengendalian HIV/AIDS.
 - a) Layanan IMS diperlukan tenaga dokter, bidan, laboratorium dan RR
 - b) Layanan Konseling dan Tes HIV diperlukan tenaga medis dan paramedis, laboratorium.
 - c) Layanan PDP diperlukan tenaga dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, perawat, farmasi dan RR.
 - d) Layanan PPIA diperlukan dokter spesialis obgins dan anak, bidan dan RR.
2. Setiap kabupaten/kota diharapkan menyediakan kondom di layanan kesehatan terkait HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
3. Kerjasama lintas sektor (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB) dalam upaya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli AIDS (LSM) sebagai pendamping ODHA untuk mencegah lolos follow up pengobatan ARV.

5) Program Pengendalian Tuberkulosis

Implementasi strategi DOTS di Provinsi Jambi saat ini telah dilakukan secara ekspansif dengan hasil cukup baik. Pada tahun 2015, CDR Provinsi Jambi s/d TW III 2015 adalah 42.89%, dan angka Kesembuhan tahun 2014 sampai dengan TW III 2015 adalah 86.58% dan untuk capaian cakupan penemuan kasus baru TB Paru BTA Positif dan Cakupan Kesembuhannya per Kabupaten/ Kota tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.53
Cakupan Penemuan Pasien Baru TB Paru BTA Positif dan Cakupan
Kesembuhan Kabupaten/ Kota Tahun 2015

NO	Kabupaten/ Kota	Angka Penemuan Pasien Baru TB Paru BTA Positif (CDR) (%)	Angka Kesembuhan (Cure Rate)
1.	Kerinci	23,85	66,67
2.	Merangin	21,82	60,38
3.	Sarolangun	63,35	97,99
4.	Batang Hari	41,17	88,17
5.	Muaro Jambi	44,57	100
6.	Tanjab Timur	40,05	90,78
7.	Tanjab Barat	37,41	81,51
8.	Tebo	52,24	87,97
9.	Bungo	62,02	96,08
10.	Kota Jambi	43,95	80,53
11.	Kota Sungai Penuh	25,82	73,68
Provinsi Jambi		42,89	86,58

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Keterangan: Data TB bersifat Kohort sehingga data yang didapat s/d TW III
2015

CDR = Case Detection Rate

Cure Rate = Pasien TB paru BTA Positif yang berobat tahun 2014

Tahun 2015, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Pengendalian Tuberkulosis adalah :

1. Pembinaan Tehnis Program Pengendalian Kusta dan Frambusia
2. Belanja Bahan Penunjang Operasional .

6) Program Penanggulangan Penyakit Kusta

Provinsi Jambi untuk penyakit Kusta pada tahun 2015 termasuk Provinsi yang Low Eendemic dengan prevalensi < 1 per 10.000 penduduk, yaitu sebesar 0,3 per 10.000 penduduk Namun apabila kita perhatikan dari tiap-tiap Kabupaten/Kota masih ada Kabupaten yang prevalensinya >1 per 10.000 penduduk yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan prevalensi 2,00 per 10.000 penduduk. Secara spesifik penyakit kusta di

Provinsi Jambi masih merupakan masalah Kesehatan masyarakat yang perlu menjadi perhatian; karena setiap triwulan masih ditemukan penderita baru di beberapa Kabupaten/Kota, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masih ditemukan penderita anak umur dibawah 15 tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.54
Kasus Baru Penyakit Kusta Di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kasus Baru			CDR/ 100.000 Pddk	Prevalensi (PR) per 10.000 pddk
		PB	MB	TOTAL		
1	2	4	5	6	7	8
1	Kota Jambi	0	5	5	0,88	0,07
2	Batang Hari	0	0	0	0	0,27
3	Muaro Jambi	0	6	6	1,55	0,75
4	Bungo	0	3	3	0,91	0,21
5	Tebo	1	3	4	1,22	0,15
6	Merangin	0	2	2	0,59	0,06
7	Kerinci	0	0	0	0	0,09
8	Sarolangun	0	0	0	0	0
9	Tj.Barat	1	4	5	1,61	0,32
10	Tj.Timur	3	12	15	7,07	5,37
11	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0
Provinsi		5	35	40	1,2	0,54

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Penyakit Kusta sampai saat ini masih ada stigma negatif dimasyarakat sehingga untuk penemuan dini penderita baru mengalami kesulitan, biasanya penderita kusta ditemukan dalam keadaan sudah cacat atau secara tidak disengaja berobat ke pelayanan kesehatan, disamping itu juga kendala geografis dimana pemukiman penduduk tersebut susah dijangkau oleh tenaga medis sehingga penemuannya selalu terlambat.

Tahun 2015, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penanggulangan penyakit Kusta adalah :

1. Review Pertemuan Kusta dan Frambusia
2. Pembinaan Tehnis Program Pengendalian Kusta dan Frambusia

7) Program Penanggulangan Penyakit ISPA

Dari hasil Riskesdas tahun 2007 penyakit Pneumonia balita merupakan penyakit penyebab kematian kedua terbesar setelah penyakit Diare. Di Propinsi Jambi penemuan penderita Pneumonia balita masih rendah, tahun 2014 cakupan mencapai 17%, sedangkan tahun 2015 sampai bulan November baru mencapai 14,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.55
Kasus Pneumonia Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jml. Penddk Usia Balita (10% pddk)	Perkiraan Pnemonia Balita	Pneumonia				Batuk Bukan Pneumonia	
				<1 th	1-<5 th	Jumlah	%	<1 th	1-4 th
1	Jambi	57.607	1.815	466	1.568	2.034	112,09	14215	39411
2	Batang Hari	26.063	821	98	252	350	43	1.126	4.062
3	Muaro Jambi	39.916	1.257	158	893	1.051	84	2.562	10.041
4	Bungo	34.410	1.084	176	422	598	55	2.085	4.874
5	Tebo	33.096	1.043	150	342	492	47	3.284	6.712
6	Kerinci	23.488	740	-	-	-	-	1.714	3.999
7	T.J. Barat	31.091	979	-	2	2	0	1.945	3.831
8	T.J. Timur	21.367	673	1	-	1	0	983	2.689
9	Merangin	36.632	1.154	159	503	662	57	3.826	9.159
10	Sarolangun	27.822	876	64	119	183	21	4.109	7.496
11	Sungai Penuh	87.713	274	16	34	50	18	609	4.897
Provinsi		340.205	10.716	1.288	4.135	5.423	51	36.541	94.387

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel di atas terlihat sebagian besar kabupaten/ Kota cakupan penemuan penderita pneumonia balita masih rendah, sedangkan cakupan penemuan penderita pneumonia balita tertinggi ada di Kota Jambi 112,09% sementara target Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar 50,60%.

Adapun kendala dalam pencapaian cakupan penemuan dini penderita Pneumonia adalah

1. Belum semua puskesmas melaksanakan MTBS dalam menegakkan diagnosa balita.
 2. Petugas tidak menghitung napas penderita balita dengan batuk pilek
- (a) Kegiatan Penanggulangan Penyakit Diare dan Hepatitis

Penyakit Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Cakupan penemuan penderita Diare di Provinsi Jambi tahun 2015, hampir semua kabupaten/kota dapat mencapai target yang di harapkan seperti tergambar pada table berikut:

Tabel 4.56
Cakupan penemuan penderita Diare di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Target	Penderita	Cakupan
1	Kota Jambi	12.258	11.803	96,29
2	Merangin	6.510	9.825	150,93
3	Kerinci	4.869	2.962	60,84
4	Bungo	7.030	4.711	67,01
5	Tebo	6.389	8.260	129,29
6	Sarolangun	5.680	7.618	134,12
7	Bt. Hari	5.188	4.190	80,77
8	Ma. Jambi	7.503	6.993	93,2
9	Tj. Timur	4.731	4.708	99,52
10	Tj. Barat	6.247	5.131	82,14
11	Kota Sungai Penuh	1.897	1.535	80,93
Provinsi		68.300	67.736	99,17

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tahun 2015 Provinsi Jambi melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi penyakit Hepatitis untuk Kabupaten Muaro Jambi.

(b) Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Upaya pengendalian PTM harus dilakukan mulai dari upaya promotif, pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitatif. Untuk mengembangkan upaya pengendalian PTM di Indonesia. Penyakit tidak menular terutama penyakit jantung, kanker, penyakit pernapasan kronis dan diabetes, adalah pembunuh terbesar di dunia dengan 35 juta kematian setiap tahun, penyebab dari sekitar 60% kematian global.

Sampai saat ini sudah 8 kabupaten/kota yang merealisasikan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan menerbitkan SE, SK, Perbup/Perwali atau perda, seperti yang terlihat dalam table berikut.

Tabel 4.57
Kabupaten/Kota yang telah memiliki SE/PERBUP/SK/PERWALI
tentang KTR

NO	KAB/KOTA	SE/PERBUP/SK/PERWALI	KET
1	Kota Jambi	SK Walikota No 189 th 2011	
2	Batanghari	Surat Keputusan Bupati No.277 th 2014	
3	Muaro Jambi	Perbup No. 55 th 2013	
4	Tanjab Timur	Surat Keputusan Bupati No. 397 th 2011	
5	Tanjab Barat	-	
6	Tebo	PERDA No. 10 th 2010	
7	Bungo	Pebup No. 58 th 2014	
8	Merangin	Perbup No. 31 th 2013	
9	Sarolangun	-	
10	Kerinci	-	
11	Sungai Penuh	Perda No. 1 Tahun 2015	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Diantara kegiatan PPTM pada tahun 2015, termasuk pelatihan petugas di daerah, mulai dari petugas kader, petugas teknis sampai petugas pemeriksaan dini kanker rahim. Pada tabel berikut merupakan gambaran hasil pelatihan terhadap ketenagaan di daerah tahun 2015.

Tabel 4.58
Kabupaten/Kota yang telah dilatih Petugas Kanker, Petugas Teknis
dan Kader Posbindu Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	Pelatihan yang dilaksanakan		
		Kanker	Teknis	Kader
1	Kota Jambi	40 org (20 pkm)	10 org	-
2	Batanghari	34 org (17 Pkm)	2 org (2 pkm)	-
3	Muaro Jambi	8 org (4 pkm)	38 org (19 pkm)	70 org
4	Tanjab Timur	2 org (1 pkm)	34 org (17 pkm)	-
5	Tanjab Barat	2 org (1 pkm)	32 org (16 pkm)	-
6	Tebo	34 org (17 pkm)	34 org (17 pkm)	60 org
7	Bungo	36 org (18 pkm)	36 org (18 pkm)	65 org
8	Merangin	2 org (1 pkm)	46 org (23 pkm)	105 org
9	Sarolangun	8 org (4 pkm)	30 org (15 pkm)	75 org
10	Kerinci	2 org (1 pkm)	2 org (2 pkm)	90 org
11	Sungai Penuh	12 org (6 pkm)	12 org (6 pkm)	45 org

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Provinsi Jambi mulai dilaksanakan pada tahun 2012 , tahun 2015 program penyakit tidak menular memperoleh dana APBD.

(c) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit

Hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit di Provinsi Jambi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

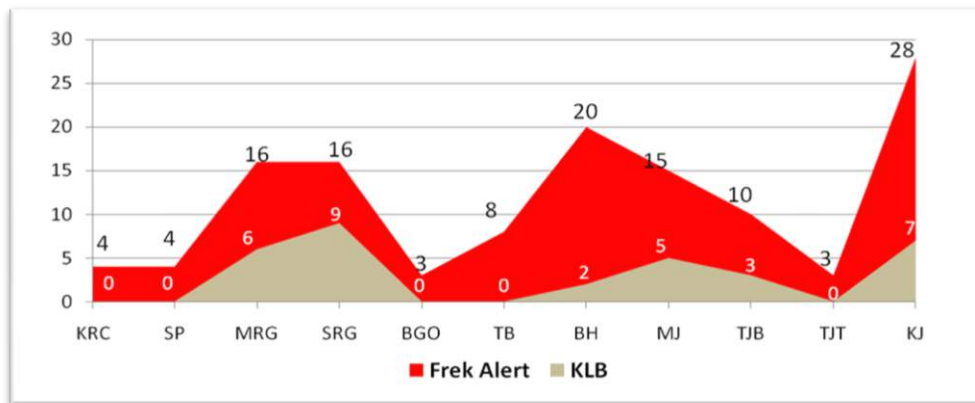
8) Program Surveilans

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan program surveians epidemiologi selama tahun 2014 adalah :

a) Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

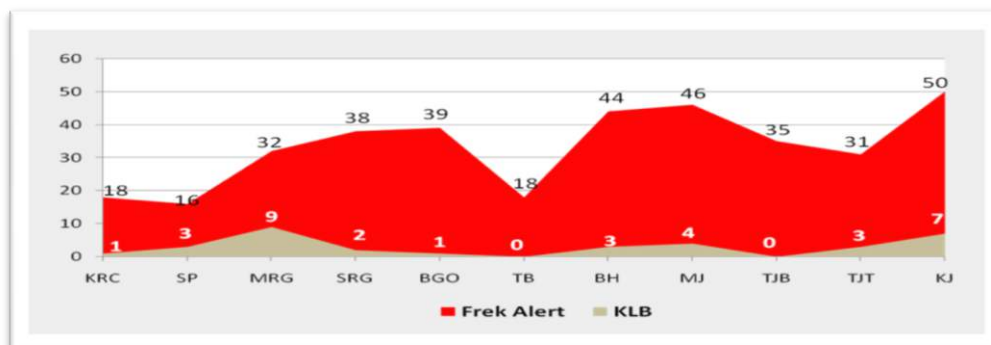
Total alerts yang muncul pada tahun 2015 sebanyak 367 alerts, angka ini hampir tiga kali lebih banyak dibanding tahun 2014 yang hanya sebanyak 127 alerts. Meningkatnya jumlah alerts sebagai perbaikan kinerja petugas surveillans Puskesmas terhadap 23 penyakit yang berpotensi wabah serta semakin baiknya kepekaan petugas terhadap gejala yang muncul pada masyarakat yang berobat di Fasyankes.

Jumlah KLB yang muncul dalam SKDR akan lebih rendah dibandingkan dengan program surveilans KLB, karena pada SKDR kondisi keracunan makanan tidak termasuk dalam penyakit berpotensi wabah



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.12 Jumlah Kasus Alert dan Alert yang Menjadi KLB per Kabupaten/Kota yang Memiliki KLB di Provinsi Jambi Tahun 2014



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.13 Jumlah Kasus Alert dan Alert yang Menjadi KLB per Kabupaten/Kota yang Memiliki KLB di Provinsi Jambi Tahun 2015

Sebanyak 13 gejala/penyakit dalam SKDR memiliki alerts selama tahun 2015, sedangkan 10 gejala/penyakit lain tidak menimbulkan alerts, dan terjadi 8 jenis KLB dengan frekuensi sebanyak 26 alerts (7 merupakan KLB Keracunan Makanan).

Tabel 4.59
Jumlah Respon Dini (Alerts) dan Alerts yang Jadi KLB Tahun 2015

NO	JENIS PENYAKIT	ALERTS DINI	ALERTS DIRESPON	ALERT JD KLB
1	Acute Flacid Paralysis (AFP)	3	3	3
2	Diare Akut	2	2	2
3	Diare Berdarah/ Disentri	0	0	0
4	Gigitan Hewan Penular Rabies	177	177	1
5	ILI (Penyakit Serupa Influenza)	4	4	0
6	Kluster Penyakit yang tidak diketahui	0	0	0
7	Malaria Konfirmasi	18	18	0
8	Pertussis	0	0	0
9	Pneumonia	0	0	0
10	Sindrom Jaundice Akut	2	2	0
11	Suspek Antrax	0	0	0
12	Suspek Campak	125	125	13
13	Suspek Chikungunya	7	7	1
14	Suspek Demam Tifoid	19	19	0
15	Suspek Dengue	3	3	1
16	Suspek Difteri	2	2	2
17	Suspek Flu Burung Pada Manusia	0	0	0
18	Suspek HFMD/ Flu Singapur	0	0	0
19	Suspek Kolera	0	0	0
20	Suspek Leptospirosis	0	0	0
21	Suspek Meningitis/Encephalitis	0	0	0
22	Suspek Tetanus	2	2	0
23	Suspek Tetanus Neonatorum	3	3	3
Total		367	367	26

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.60
Frekuensi dan CFR KLB pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
Tahun 2014-2015

No	Kab/ Kota	2014				2015			
		Frek	Jml kasus	Jml Kematian	CFR (%)	Frek	Jml kasus	Jml Kematian	CFR (%)
1	Kerinci	0	0	0	0,00	1	1	1	100
2	Kt Sei. Penuh	0	0	0	0,00	3	21	0	0,00
3	Merangin	8	61	1	3,03	9	70	0	0,00
4	Sarolangun	12	210	3	2,16	2	4	1	25
5	Bungo	2	26	0	0	0	0	0	0,00
6	Tebo	1	51	0	0	0	0	0	0,00
7	Batang Hari	2	36	0	0	3	52	0	0,00
8	Ma. Jambi	7	52	0	0	4	247	0	0,00
9	Tanjab Barat	3	30	0	0	0	0	0	0,00
10	Tanjab Timur	4	172	0	0	2	8	1	100
11	Kota Jambi	9	166	1	0	6	97	0	0,00
Total		48	804	5	0,62	30	500	3	0,60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat walau jumlah KLB yang terjadi pada tahun 2015 menurun jika dibanding dengan tahun 2014, begitu juga dengan case fatality rate. Peningkatan jumlah KLB yang terjadi bukanlah suatu pertanda buruknya kinerja suatu program, namun diartikan sebagai peningkatan kewaspadaan petugas surveillans di

Puskesmas terhadap munculnya suatu kasus penyakit yang masuk dalam kriteria KLB.

Hanya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang belum pernah melaporkan sama sekali KLB, sementara kabupaten/kota lain terlihat terjadi peningkatan kewaspadaan petugas surveillans terhadap kondisi berpotensi KLB. Ada delapan jenis KLB di Provinsi Jambi selama tahun 2014, dimana dua jenis KLB yang semestinya dapat dicegah muncul yaitu Rabies memiliki angka CFR 100%, diikuti diare dengan CFR sebesar 50% (Tabel 3).

b) Surveilans Kejadian Luar Biasa (KLB)

Selama tahun 2015 jumlah KLB yang muncul menurun menjadi 33 KLB dari 48 KLB tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang meninggal juga menurun seiring dengan menurunnya jumlah kasus. CFR tahun 2015 sebesar 0,60%.

Tabel 4.61
Kejadian Luar Biasa Berdasarkan Jenis Penyakit Di Provinsi Jambi
Tahun 2014-2015

No	Jenis Penyakit	Frekuensi	Jumlah Kasus	Meninggal Dunia	CFR
1	Suspek Campak	13	140	0	0,00
2	Keracunan Pangan	7	334	0	0,00
3	Suspek Diphteri	2	2	0	0,00
4	Tetanus Neonatorum	3	3	0	0,00
5	Rabies	1	1	1	100,00
6	DBD	1	1	0	0,00
7	Chikungunya	1	15	0	0,00
8	Diare	2	4	2	50,00
Jumlah		30	500	3	0,60

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

c) Surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

(a) Surveilans Campak

Program imunisasi campak di Indonesia dimulai pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1991 berhasil dicapai status imunisasi dasar lengkap atau Universal Child Immunization (UCI) secara nasional. Sejak tahun 2000 imunisasi campak kesempatan kedua diberikan kepada anak sekolah kelas I–VI (*catch up campaign*) secara bertahap yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian

imunisasi campak secara rutin kepada anak sekolah dasar kelas I SD (BIAS). Sejak tahun 2005 sampai Agustus 2007 juga dilakukan kegiatan *crash program* campak terhadap anak usia 6 – 59 bulan dan anak usia sekolah dasar di seluruh provinsi dalam 5 fase dan dilakukan follow up secara bertahap sejak tahun 2009 – 2011. Sedangkan untuk tahun 2016, direncanakan sat kabupaten yang akan mengikuti crash program campak yaitu kabupaten Bungo.

Dalam rangka eliminasi campak pada tahun 2018, maka salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Case Base Measles Surveilans (CBMS) dengan serologi yaitu pengambilan spesimen terhadap kasus campak klinis untuk memastikan apakah kasus tersebut campak pasti atau bukan. Spesimen diperiksa di Laboratorium Campak Nasional Jakarta.

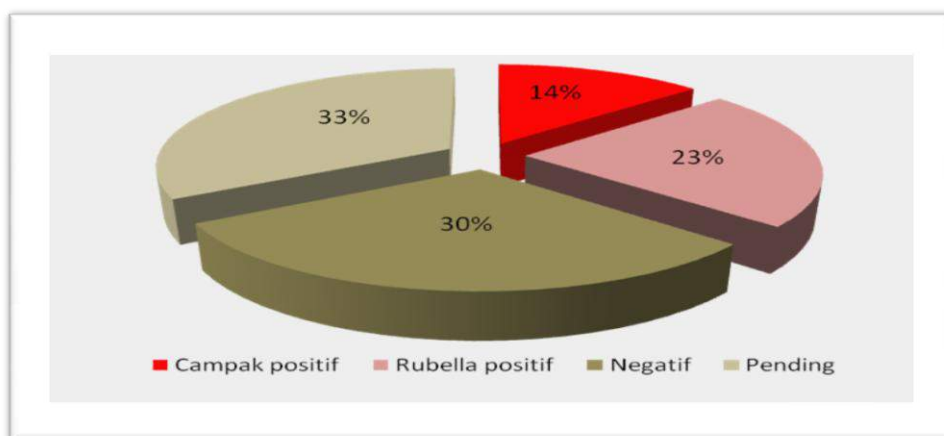
Tabel 4.62
Incidence Rate (IR) Suspek Campak Penduduk Usia < 15 ThPer
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kab / Kota	Jumlah Kasus	IR (Per 100.000)	Ket
1	Kota Jambi	247	42,88	
2	Batang Hari	2	0,77	
3	Bungo	76	22,09	
4	Kerinci	0	0,00	
5	Tanjab Barat	4	1,29	
6	Sarolangun	10	3,59	
7	Muaro Jambi	89	22,30	
8	Merangin	24	6,55	
9	Tanjab Timur	23	10,76	
10	Tebo	0	0,00	
11	Sungai Penuh	28	32,14	
	Tahun 2015	503	14,79	
	Tahun 2014	589	17,30	
	Tahun 2013	379	11,38	
	Tahun 2012	373	11,86	
	Tahun 2011	314	10,0	
	Tahun 2010	270	8,5	
	Tahun 2009	751	26,4	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

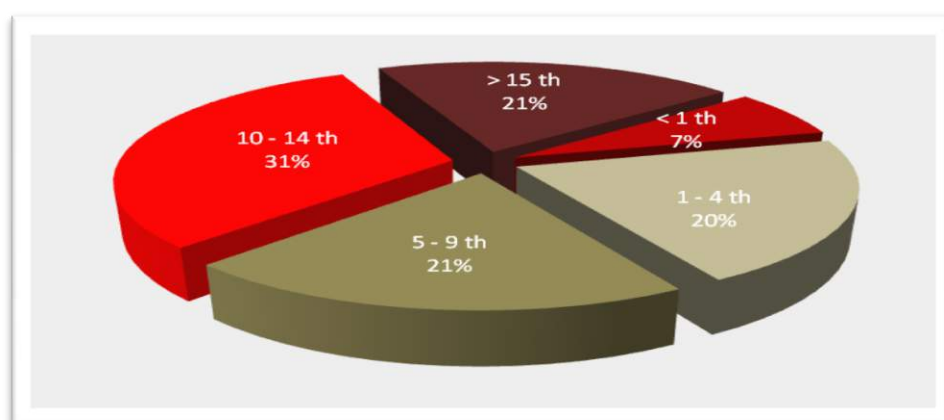
Kota Jambi memiliki IR tertinggi dengan nilai 42,88 per 100.000 penduduk, diikuti Kota Sungai Penuh sebesar 32,14 per 100.000 penduduk. Indikator untuk campak adalah >10 per 100.000 penduduk. 6 kabupaten belum mampu mencapai target pada tahun 2015, bahkan dua kabupaten yaitu Kerinci dan Tebo belum mampu menemukan kasus.

IR Campak Provinsi tahun 2015 14,79 per 100.000 yang artinya masih >10 per 100.000. Gambaran kasus campak berdasarkan pemeriksaan laboratorium, golongan umur, status imunisasi dan asal kabupaten/kota dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



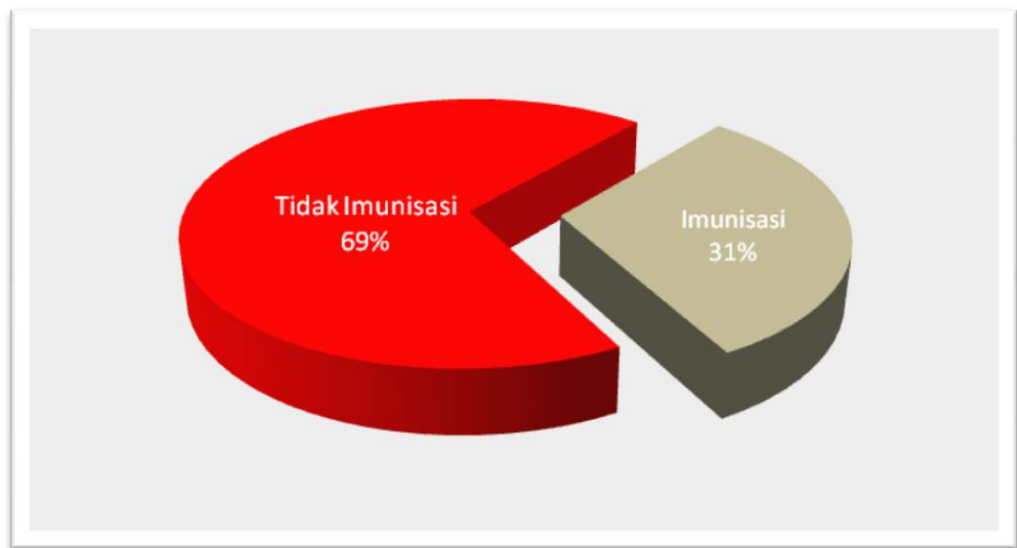
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.14 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Campak Klinisdi Provinsi Jambi Tahun 2015

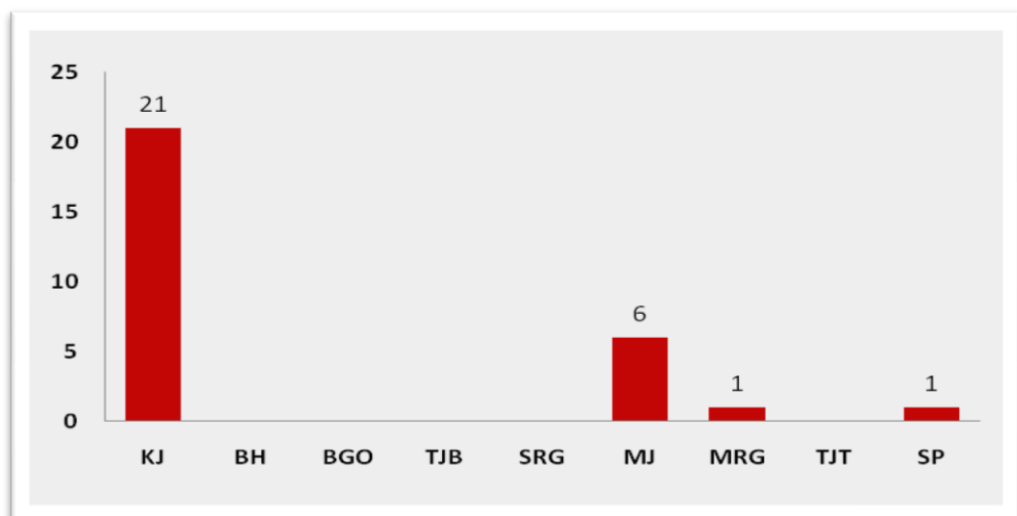


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.15 Golongan Umur Penderita Campak Klinisdi Provinsi Jambi Tahun 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 Gambar 4.16 Penderita Campak Klinis Berdasarkan Status Imunisasi di Provinsi Jambi Tahun 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 Gambar 4.17 Kasus Campak Klinis Berdasarkan Asal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015

(b) Surveilans Acut Flaccyd Paralysis (AFP)

Surveilans *Acut Flaccyd Paralysis* (AFP) dilaksanakan dalam rangka mempercepat eradikasi polio memiliki tujuan untuk :

1. Mengidentifikasi daerah resiko tinggi, untuk mendapatkan informasi tentang adanya transmisi Virus Polio Liar, *Vaccine Deprived Polio Virus (VDPV)*, dan daerah dengan kinerja surveilans AFP yang tidak memenuhi standar.
2. Membuktikan Indonesia bebas Polio.

Penemuan kasus AFP di Provinsi Jambi sampai dengan Minggu 51 tahun 2015 sebanyak 21 kasus artinya melebihi dari target penemuan kasus AFP yang telah ditetapkan.

Tabel 4.63
Target dan Penemuan Kasus AFP per Kabupaten/Kota sampai
Minggu 51 dalam Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	Jumlah Pddk < 15 th	Target penemuan	Jumlah Kasus	AFP Rate
1	Kota Jambi	148.672	3	2	1,36
2	Batang Hari	75.349	2	0	0,00
3	Bungo	102.229	2	6	6,12
4	Kerinci	58.955	1	1	2,04
5	Tanjab Barat	91.658	2	4	4,08
6	Sarolangun	84.995	2	0	0,00
7	Muaro Jambi	112.782	2	4	4,08
8	Merangin	107.663	2	1	1,02
9	Tanjab Timur	57.334	1	1	2,04
10	Tebo	96.727	2	0	0,00
11	Kota Sungai Penuh	23.317	1	2	4,08
Provinsi		959.681	20	21	2,14

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 di Provinsi Jambi AFP Rate tertinggi dari Kabupaten Bungo (6,12/100.000 penduduk < 15 tahun) disusul Kabupaten Tanjab Barat dan Kota Sungai Penuh (4,08 per 100 000 penduduk < 15 th), sedangkan Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Tebo tidak bisa menemukan kasus AF

d) Capaian Kegiatan Program Surveilans

Program surveilans epidemiologi baik SKDR atau surveilans PD3I tidak akan berjalan bila tidak dilakukan peningkatan kapasitas ataupun *refreshing* pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan

investigasi dan pelacakan di lapangan yang didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang standard.

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petugas dalam bentuk pertemuan yang melibatkan petugas surveillans kabupaten/kota (termasuk Puskesmas terpilih) dalam bentuk pertemuan ataupun asistensi dan pembinaan di lapangan. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Surveillans dan KLB Dinas Kesehatan selama tahun 2015.

e) Permasalahan dan Solusi

Secara umum, penatalaksanaan program surveillans sudah berjalan dengan baik, namun beberapa hal menjadi perhatian dalam program surveilans, yaitu:

1. Kemampuan petugas surveilans bervariasi dalam menangani KLB

Kemampuan seorang petugas bukan hanya ditentukan dari pertemuan yang dihadiri atau pembinaan yang dilakukan. Pelatihan terhadap penanganan langsung menjadi kata kunci keberhasilan program ini, dengan didukung oleh keterampilan yang memadai. Keterampilan biasanya didapatkan bila petugas mengalami sendiri KLB di wilayah kerjanya, namun dengan pelatihan dan pembinaan yang teratur, bervariasi kemampuan petugas surveillan pada tingkat kabupaten/kota dapat diminimalkan.

2. Keterbatasan dana kabupaten/kota dalam investigasi kasus di lapangan

Kabupaten/kota sangat minim dalam melakukan penganggaran, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi mengalokasikan pendanaan melalui APBN agar petugas surveillans kabupaten/kota dapat turun bila terjadi KLB. Advokasi sudah dilakukan sehingga kabupaten/kota juga menyiapkan dana untuk melakukan investigasi kasus.

3. Mutasi petugas PKM cukup tinggi.

i. Program Imunisasi

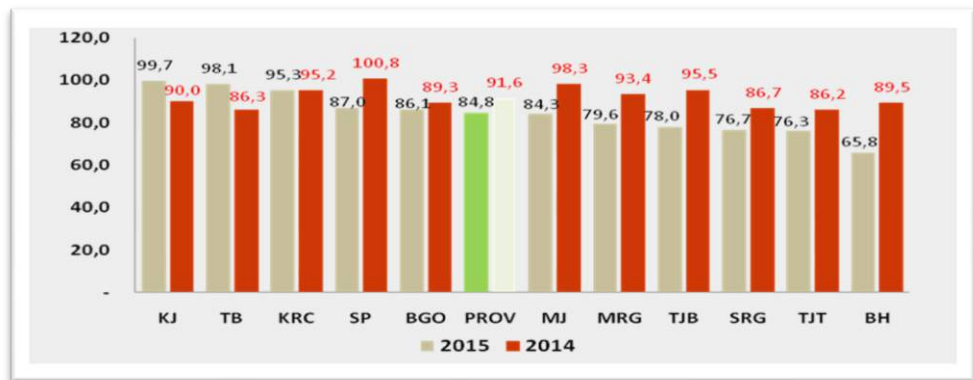
Program imunisasi sudah menjadi kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin (sasaran bayi, ibu hamil dan anak sekolah) dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketingkat desa/kelurahan. Persentase desa UCI 2014 sebesar 94,6% (Target 95%). Sedangkan data UCI tahun 2015 baru akan di dapat pada awal tahun 2016.

Tabel 4.64

Distribusi Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
per kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2011-2014

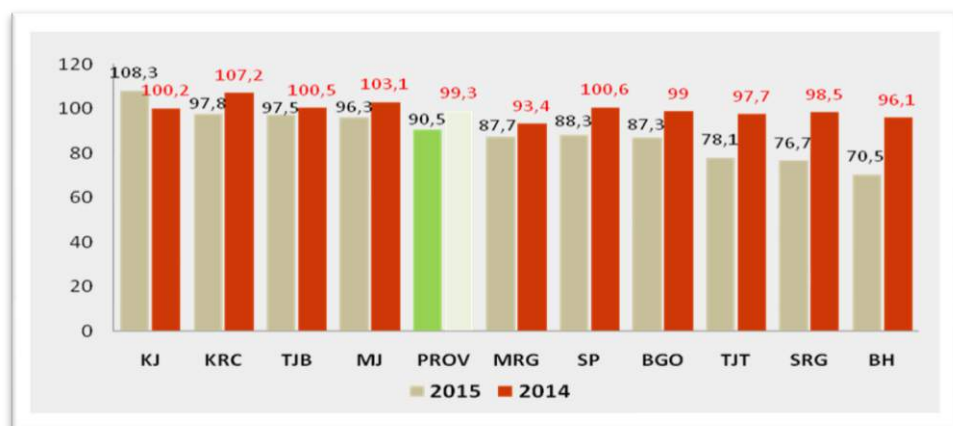
No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan UCI	% Desa/Kel UCI
1	Batanghari	17	113	113	100,0
2	Kota Jambi	20	62	62	100,0
3	Kota Sungai Penuh	6	69	68	98,6
4	Muaro Jambi	19	155	153	98,7
5	Bungo	19	153	150	98,0
6	Tanjab Barat	16	134	131	97,8
7	Tanjab Timur	17	93	89	95,7
8	Sarolangun	13	152	145	95,4
9	Kerinci	18	286	271	94,8
10	Merangin	21	215	194	90,2
11	Tebo	16	112	85	75,9
PROV 2014		182	1544	1461	94,6
PROV 2013		180	1538	1416	92,1
PROV 2012		177	1393	1264	90,7
PROV 2011		172	1373	1303	94,9

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.18 Capaian Cakupan Imunisasi Campak Provinsi Jambi Tahun 2014- November 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.19 Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Jambi Tahun 2014-November 2015

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa cakupan imunisasi campak dan imunisasi dasar lengkap sampai dengan November 2015 masih di bawah tahun 2014 (Data bulan Oktober-November 2015). Diharapkan dengan dilakukannya sweeping pada akhir tahun maka angka cakupan imunisasi campak dan imunisasi dasar lengkap 2015 minimal sama dengan tahun 2015. Pada tahun 2015, antigen HB0 dimasukkan sebagai dasar perhitungan untuk IDL.

1) Capaian Kegiatan Program Imunisasi

Capaian hasil kegiatan program imunisasi Provinsi Jambi yang sudah dilakukan sehingga memberikan hasil seperti cakupan campak yang baik, dapat dilihat dari Tabel di bawah ini.

Tabel 4.65
Hasil Capaian Kegiatan Program Imunisasi Tahun 2014 di Provinsi
Jambi

No	Uraian	Target	Capaian
1	IDL	Target: 90%	Capaian 2015 sebesar 91,6%, untuk tahun 2015 baru didapat pada awal 2016
2	Desa UCI	Target:90%	Capaian 2014 sebesar 94,6%; untuk 2015 akan didapatkan pada awal 2016
3	Dana	169.750.000	167.518.000
4	% Serapan	98,69%	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

2) Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan indikator yang ada, maka program imunisasi berjalan dengan cukup baik, namun demikian dengan meningkatnya KLB campak, patut menjadi perhatian bahwa ada yang salah dengan penatalaksanaan program. Banyak penatalaksanaan program yang patut dibenahi antara lain:

1. Mutasi petugas imunisasi fasyankes yang tinggi
2. Keterbatasan dana operasional pada pelayanan primer. Kondisi menyebabkan petugas imunisasi jarang melakukan pengecekan kondisi cold chain dalam pelaksanaan Posyandu (vaccine carrier)
3. Terdapat kondisi cold chain tidak standar pada fasyankes akan mengakibatkan pemberian vaksinasi menjadi tidak efektif.

Beberapa hal yang dilakukan pada tahun 2015 adalah pembinaan petugas imunisasi kabupaten/kota terpilih, pelatihan bagi petugas imunisasi Puskesmas termasuk bidan desa sebagai penyelenggara imunisasi. Pengawasan program melalui buku desa yang sudah dimulai

pada pertengahan tahun 2014, akan terus ditingkatkan jangkauan penggunaannya oleh bidan desa, sehingga bayi yang tidak mendapat imunisasi atau imunisasi tidak lengkap akan segera dilakukan sweeping dan drop out to follow up.

j. Program Kesehatan Haji

Pelaksanaan ibadah haji merupakan kegiatan yang sarat dengan olah fisik. Banyak faktor penyulit yang akan terjadi pada jemaah haji, karena kurangnya persiapan ditanah air baik dari jemaah haji itu sendiri maupun dari sistim manajemen penyelenggara haji, sehingga resultante dari berbagai penyulit itu selama operasional haji belum dapat menurunkan indikator penting dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

Pada tahun 2015, program kesehatan haji di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sudah mampu memenuhi target dalam kegiatan maupun pendanaan yang diajukan pada APBD Provinsi Jambi (100% kegiatan dapat dilaksanakan). Adapun rincian jemaah dan TKHI yang diberangkatkan berikut logistik yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.66
Jumlah Jemaah Haji dan Logistik yang Digunakan Di Provinsi Jambi
Tahun 2014

No	Kabupaten / Kota	Kuota Jemaah Haji Reguler	BKJH yang diDistribusikan	Distribusian Vaksin Meningitis		Total vaksin dipakai	Ket.
				Reguler	ONH +		
1	Kota Jambi	637		637	100	637	
2	Muaro Jambi	99				99	
3	Tanjab Barat	278				278	
4	Tanjab Timur	94		94	0	94	
5	Batang Hari	111		111	0	111	
6	Tebo	54		54	0	54	
7	Bungo	147		147	74	147	
8	Sarolangun	73		73	0	73	
9	Merangin	159		159	0	159	
10	Kerinci	311		311	0	311	
11	Kota Sungai Penuh	118		118	0	118	
12	Petugas TKHI& TKHD	22		22	0	22	
	Jumlah	2.118		2118	174	2.118	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

1) Hasil Capaian Kegiatan Program Kesehatan Haji

Adapun hasil capaian kegiatan program haji melalui dana APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.67
Hasil Capaian Kegiatan Program Kesehatan Haji Tahun 2014 di
Provinsi Jambi

No	Target	Jemaah Haji yang diperiksa 100%	Capaian: 100% jemaah haji diperiksa sebelum keberangkatan
1	Dana	118.000.000	111.586.700
2	Serapan APBD	94,57%	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Beberapa kegiatan lain yang juga dilakukan oleh program haji, selain yang tercantum pada tabel diatas adalah:

1. Rekrutmen calon petugas TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia).
2. Pelaksanaan Test Psikometri bagi calon TKHI di RSJ. Provinsi Jambi.
3. Pelatihan kompetensi dan integrasi calon petugas TKHI di provinsi Embarkasi.
4. Distribusi Vaksin Meningitis ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi
5. Pemantauan Kondisi Jemaah Haji selama 14 hari pasca kembali ke Provinsi Jambi
6. Koordinasi dengan program surveilans epidemiologi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan KLB pasca kepulangan jemaah (Mers-CoV dan EBOLA)
7. Pengumpulan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH).

2) Permasalahan dan Solusi

Beberapa catatan yang menjadi perhatian program Kesehatan Haji tahun 2015, yaitu:

1. Kemampuan petugas haji dalam pelaksanaan siskohatkes di kab/kota bervariasi; ditambah lagi dengan penggunaan software

generasi tiga yang sosialisasinya terlalu berdekatan dengan pelaksanaan pengisian e-BKJH.

2. Adanya kab/kota yang tidak mengisi data kesehatan calon jemaah haji secara lengkap

Berdasarkan masalah yang ditemukan maka beberapa solusi yang akan dilaksanakan adalah dengan tetap melakukan pelatihan siskohatkes dan supervisi bagi petugas kabupaten/kota sehingga petugas mampu melakukan pengisian siskohatkes dengan benar dan lengkap.

k. Program Krisis Kesehatan

Jambi, seperti wilayah Indonesia lainnya merupakan daerah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun karena ulah manusia hingga kedaruratan kompleks. Semua hal tersebut jika terjadi akan menimbulkan krisis kesehatan antar lain timbulnya korban massal, konsentrasi massa/pengungsian, masalah pangan dan gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, terganggunya pengawasan vektor, penyakit menular, lumpuhnya pelayanan kesehatan, serta kelangkaan tenaga kesehatan dan diskoordinasi.

Berdasarkan data kejadian bencana yang ada di Provinsi Jambi sejak tahun 2015, terdapat enam jenis bencana yaitu:

1. Kebakaran Rumah
2. Banjir
3. Longsor
4. Kerusuhan
5. Puting Beliung
6. Banjir Bandang

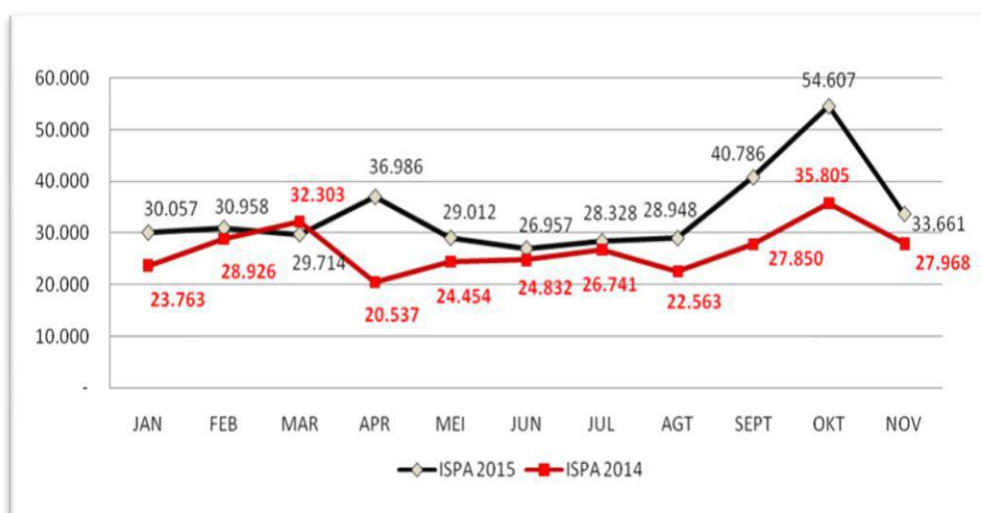
Persentase masing-masing kejadian bencana yang menimbulkan krisis kesehatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

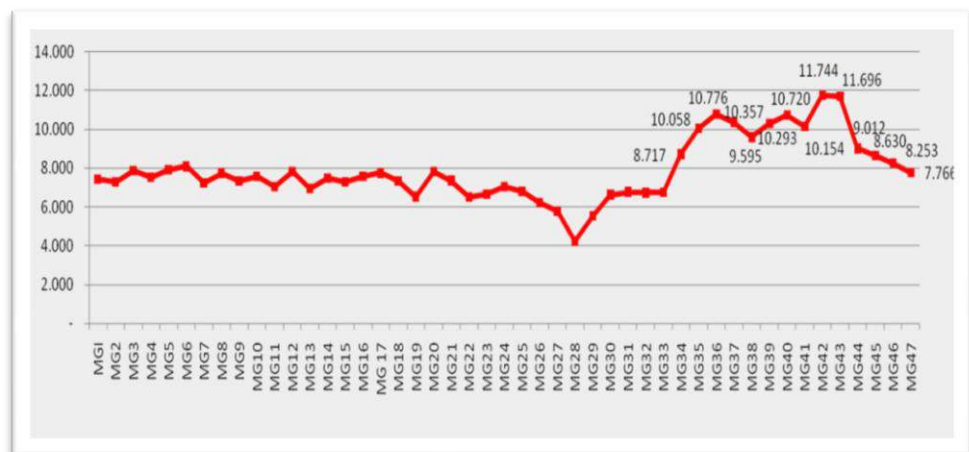
Gambar 4.20 Persentase Kejadian Bencana Berdampak Krisis Kesehatan Tahun 2015

Krisis kesehatan yang cukup dominan terjadi di Provinsi Jambi adalah Kabut Asap, dimana Jambi dinyatakan memasuki tahapan Siaga Bencana pada tanggal 27 Agustus 2015, dan memasuki tahapan Tanggap Darurat pada dua minggu setelah masa siaga darurat dinyatakan. Masa transisi berakhir awal November 2015, dimana nilai ISPU sudah kembali normal, begitu juga kasus ISPA yang secara perlahan kembali mendekati nilai standar.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.21 Jumlah Kasus ISPA per Bulan Provinsi Jambi Tahun 2014-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.22 Jumlah Kasus ISPA per Minggu Provinsi Jambi Tahun 2015

1) Hasil Capaian Kegiatan Krisis Kesehatan

Semua kegiatan yang direncanakan oleh Program Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi berjalan seperti yang direncanakan, semua kegiatan terealisasi 100%, walau ada satu kegiatan yang dilakukan sebatas sosialisasi (untuk pemadaman kebakaran kantor). Capaian hasil kegiatan program krisis kesehatan yang didanai oleh APBD Provinsi Jambi terlihat dalam Tabel .

Tabel 4.68
Hasil Capaian Kegiatan Program Krisis Kesehatan
Tahun 2015 di Provinsi Jambi

No	Kegiatan Krisis Kesehatan	
1	Target	Krisis Kesehatan dapat ditanggulangi secara berjenjang baik oleh PKM/Dinkes Kab/Kota/Dinkes Provinsi 100%
2	Dana	252.739.500 244.330.308
3	% Serapan	96,67%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

2) Permasalahan dan Solusi

Program krisis kesehatan pada tahun 2015 dapat dikatakan berjalan lancar, semua yang direncanakan terealisasi dengan baik, namun ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara paripurna yaitu

simulasi pemadaman kebakaran di gedung perkantoran karena keterbatasan pendanaan APBD 2015. Adapun kendala lain yang masih ditemukan di lapangan bila terjadi krisis kesehatan adalah:

1. Pendanaan pertemuan dengan tim krisis kesehatan kabupaten/kota belum ada, sehingga untuk koordinasi belum berjalan optimal ditambah lagi posisi program krisis kesehatan masih bervariasi antar kabupaten/kota.
2. Terbatasnya kemampuan petugas satgaskes dalam penanggulangan krisis, hal ini dimaklumi karena program ini sampai sekarang masih belum jelas keberadaannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti kondisi diatas maka diharapkan terjadi perbaikan pendanaan dengan meningkatkan usulan kegiatan baik dalam bentuk pertemuan, pelatihan, simulasi, ataupun refreshing. Satgaskes dan Tim BSB Provinsi harus tetap menambah pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti beberapa kegiatan dari luar instansi kesehatan misalnya keterlibatan dengan Tim BPBD Provinsi Jambi dan BASARNAS Provinsi Jambi.

I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Lingkungan Bersih dan Sehat

Kegiatan Pemberdayaan Desa Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) ini dimulai tahun 2010 dengan menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan kegiatan sbb :

1. Terlatihnya kader kesehatan lingkungan desa LBS sebanyak 15 orang per desa.
2. Desa melaksanakan pemberdayaan bidang sanitasi (STBM).
3. Tersedianya alat untuk mendukung pemberdayaan desa LBS sebanyak 1 paket (cetakan FRP).

Tahun 2015 ini dilaksanakan di 7 Desa di 7 Kabupaten Kota, dimana Desa Mekarjaya Kecamatan Tanah Kampung menjadi peringkat satu (Juara pertama) Tingkat Nasional.

2) Kabupaten Kota Sehat

Penilaian Kabupaten Kota Sehat dilaksanakan pada tahun ganjil yang diawali tahun 2005 dengan nama penghargaan adalah SWASTI SABA dan dengan tiga kriteria yaitu Padapa, Wiwerda dan Wistara. Kabupaten Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan kota sehat sesuai standard mulai tahun 2005 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2005 dan 2007 Kabupaten Kerinci telah mendapatkan penghargaan berupa Klasifikasi Wiwerda, dikarenakan terjadi pemekaran maka kabupaten Kerinci memulai dari awal kembali pada tahun 2013.
2. Kabupaten Merangin sampai kegiatan pembentukan form kabupaten pada tahun 2007, akan tetapi sampai saat ini belum ada aktifitas pengembangannya.
3. Target tahun 2015 ini telah tercapai yaitu semua Kabupaten kota telah difasilitasi pengembangan KKS, dan pada tahun ini yang mengusulkan untuk mendapatkan penghargaan SWASTI SABA adalah Kabupaten Sarolangun, Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan yang mendapatkan Penghargaan tersebut dalam tingkatan PADAPA adalah Kabupaten Sarolangun.

3) Pengawasan Kualitas Udara

Kegiatan pengawasan kualitas udara dalam rangka pemantauan kualitas udara di kota kabupaten sebanyak 11 Kabupaten Kota dan untuk mendukung data dasar pelaksanaan KKS. Instrumen/peralatan yang digunakan adalah

Tabel 4.69
Hasil Pemantauan kualitas udara

No	Kabupaten Kota	Waktu pengukuran	Para meter	Jml Sampel	Kriteria (Jml)					Koordinat
					Baik	Sedang	Tdk Sehat	Sgt Tdk sehat	Berba-haya	
1	Kota Jambi	15 Sept. 11 Okt 2014	PM ₁₀	12		2	9	1		S:-01.60309 ⁰ E:103.57732 ⁰
2	Kerinci	23-Sep-14	PM ₁₀	3	1	2				S:- 02.05908 ⁰ E:101.38948 ⁰
3	Sei Penuh	24-Sep-14	PM ₁₀	3	1	2				S:-02.09354 ⁰ E:101.41344 ⁰
4	Merangin	25-Sep-14	PM ₁₀	4		3	1			S:-02.05695 ⁰ E:102.27483 ⁰
5	Sarolangun	25-Sep-14	PM ₁₀	2			2			S:-02.30279 ⁰ E:102.72446 ⁰
6	Batang Hari	30-Sep-14	PM ₁₀	4			4			S:-01.71626 ⁰ E:103.26300 ⁰
7	Muara Jambi	01-Okt-14	PM ₁₀	4				4		S:-01.45087 ⁰ E:103.52130 ⁰
8	Tanjab Timur	02-Okt-14	PM ₁₀	5			3	2		S:-01.29035 ⁰ E:103.73520 ⁰
9	Tebo	06-Okt-14	PM ₁₀	3			3			S : - 01.45087 ⁰ E : 103.52130 ⁰
10	Bungo	07-Okt-14	PM ₁₀	4			4			S : -01.50881 ⁰ E : 102.11297 ⁰
11	Tanjab Barat	Tgl. 10 Sept 2014	TSP	7		3	1	3		
JUMLAH				51	2	12	27	10		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari hasil pengukuran yang tidak memenuhi syarat berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup No 45 tahun 1997, disebabkan pada waktu terjadinya Kabut Asap di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

4) Higiene Sanitasi Tempat Tempat Umum (HSTTU)

Tempat-Tempat Umum dimaksud adalah seperti tempat pelayanan kesehatan, pasar, sekolah, tempat ibadah, hotel dan lainnya.

Untuk Tahun ini tempat umum yang dilakukan pemeriksaan bidang Sanitasinya adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten kota. Hasil Pemeriksaan/Inspeksi Sanitasi di 10 Kabupaten Kota ternyata yang memenuhi syarat sanitasi (skor > 65%) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hanafie Kabupaten Bungo dengan skor 65.9%. Rata-rata yang menjadi permasalahan bidang sanitasi adalah pengelolaan limbah, Sanitasi pengelolaan makanan dan minuman dan laundry. Dengan hasil sbb :



Tabel 4.70

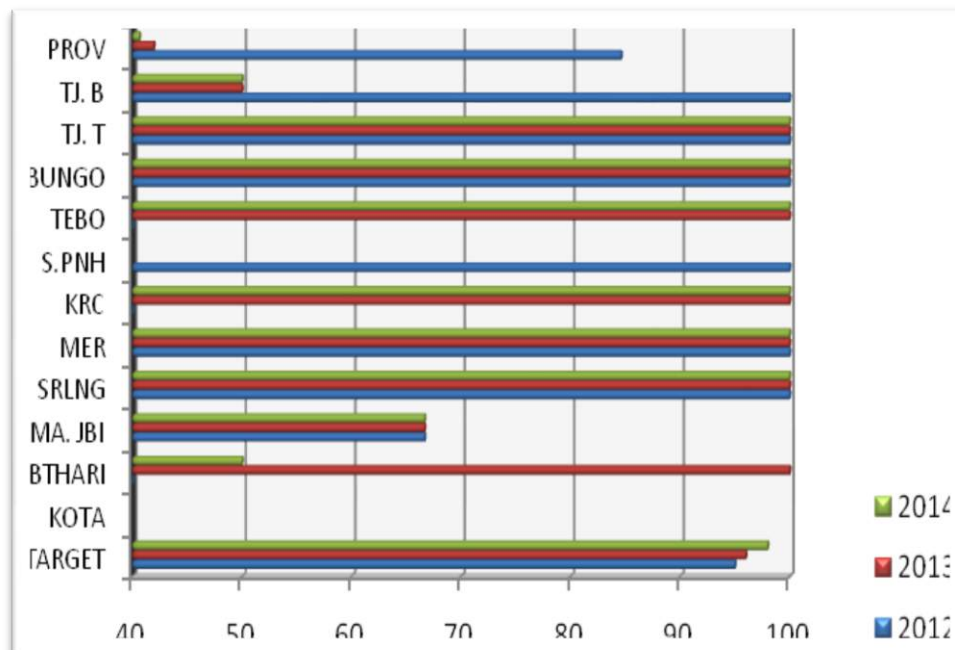
Rekapitulasi Penilaian Pemeriksaana Kesehatan Lingkungan
(Inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit Propinsi Jambi Tahun 2015

NO	NAMA RSUD	SKORE PENILAIAN	%	KETERANGAN
1	KH. DAUD ARIF	5200	52.0	Tidak MMS
2	NURDIN HAMZAH	5163	51.6	Tidak MMS
3	KOL. ABUNDJANI	5850	58.5	Tidak MMS
4	AHMAD RIFIN	5320	53.2	Tidak MMS
5	H. ABDOEL MADJID BATOE	5655	56.6	Tidak MMS
6	H. HANAFIE	6595	66.0	MMS
7	SULTAN THAHA	5300	53.0	Tidak MMS
8	PROF.DR.H.M.CHATIB QUZAIN	4705	47.1	Tidak MMS
9	MAYJEN H.A. THALIB	5170	51.7	Tidak MMS
10	ABDUL MANAP	6620	66.2	MMS
RERATA		5558	55.6	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

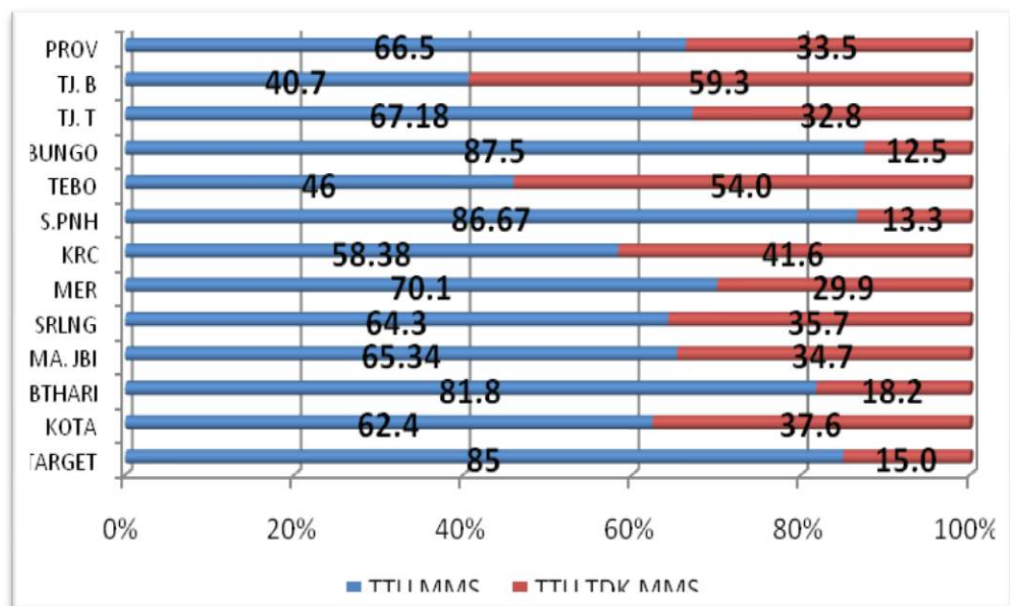


Dari Informasi sementara yang masuk sampai saat ini kabupaten kota yang telah melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis di sarana pelayanan kesehatan rumah sakit sebanyak 9 kabupaten kota (90%), sedangkan belum melaksanakan pembinaan ke rumah sakit adalah Kota Jambi, untuk Kota Sungai penuh karena tidak ada Rumah Sakit. Hasil capaian secara komulatif rerata se Provinsi jambi adalah sebesar 90%, tetapi belum seluruh rumah sakir yang ada diwilayah Kabupaten Kota. Hasil ini telah melampaui target yaitu sebesar 60%. Untuk lebih jelasnya seperti tabel berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.23 Hasil Capaian Kabupaten Dan Kota Yang Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis Di Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015

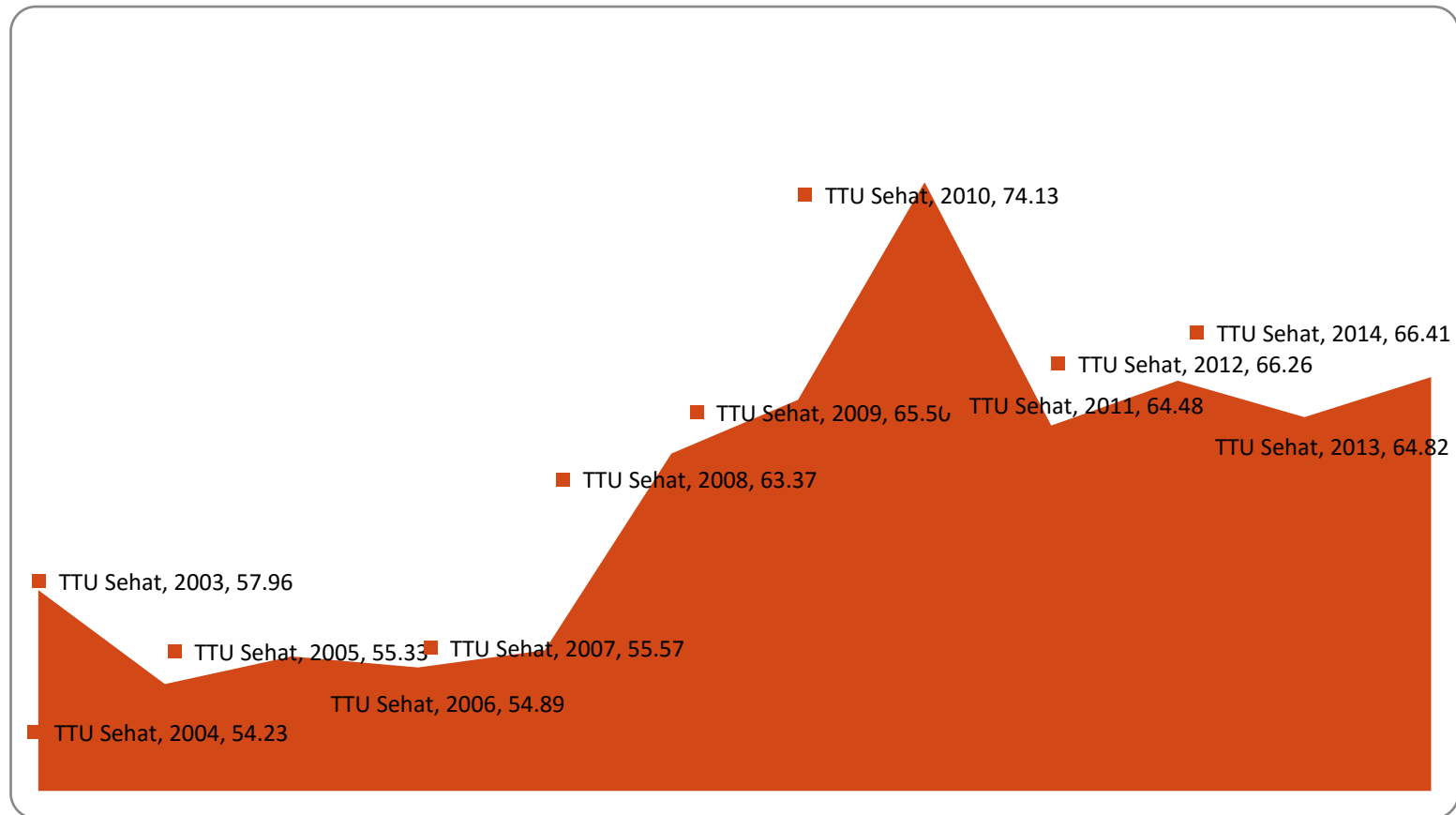


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.24 Hasil kegiatan HSTTU

Dari data diatas dapat terlihat bahwa capaian provinsi (66,5%) belum mencapai target (85%) untuk TTU yang memenuhi syarat, kabupaten kota yang telah mencapai target tertinggi adalah Bungo (87,5%) dan terendah Kabupaten Tebo (46%).

Peningkatan TTU yang memenuhi syarat dari tahun ke tahun juga terjadi peningkatan yang cukup significant, ini terlihat dari angka p value sebesar 0,008 dan korelasi sebesar 0,75. Sedangkan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,77%. Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan 1,59 %, untuk lebih jelasnya seperti dibawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

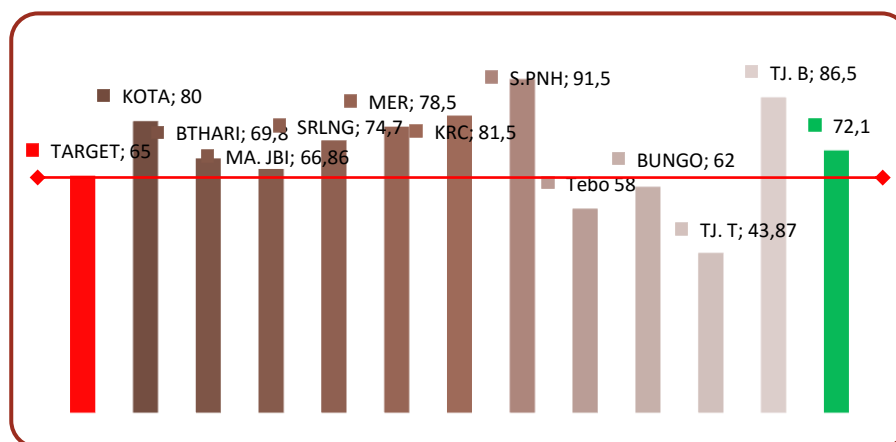
Gambar 4.25 Peningkatan TTU yang memenuhi syarat dari tahun ke tahun

Prioritas pengawasan dan pemeriksaan tempat-tempat umum tahun ini ditujukan pada tempat pelayanan pendidikan (sekolah dasar) dan tempat pelayanan kesehatan (Puskesmas=PKM).

Dari informasi Kabupaten/Kota diketahui bahwa dari jumlah Sekolah Dasar (SD) sederajat yaitu 2.918 SD yang di ineksi sanitasi sekolah ternyata yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan sebesar 64%, sisanya tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk kondisi kesehatan lingkungan Puskesmas, dari 183 PKM yang diinspeksi sanitasi puskesmas ternyata 73,8%) yang memenuhi syarat.

5) Sosialisasi Kebijakan Kesling (Kesinambungan Kegiatan ADB)

Kegiatan ini berbentuk kegiatan monitoring dan evaluasi di lokasi Pamsimas II di 4 kabupaten (Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin dan Bungo) dalam rangka mengevaluasi peningkatan akses pendudukterhadap air minumBerkualitas, dimana akses air minum yang berkualitas dari tahun ke tahun juga terjadi peningkatan yang tidak begitu significant namun demikian terjadi rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar kurang lebih 0,43%. Untuk tahun 2015 ini pencapaian sebesar 72,1% sudah melampaui target yaitu 67,5%, jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0,08%. Akan tetapi masih ada beberapa kabupaten kota yang masih dibawah target tahun ini yaitu : Kabupaten Tebo, Tanjab Timur, dan Bungo, sebagai berikut :



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Gambar 4.26 Hasil Capaian (%) Akses Air Minum yang berkualitas per Kabupaten/Kota Tahun 2014

6) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Program ini dimulai tahun 2010, dimana Kota Jambi yang pertama mengikuti program ini dan sekaligus sebagai pilot proyek untuk tingkat nasional, tahun 2012 diikuti kabupaten Merangin, Sarolangun dan Kota Sungai Penuh, tahun 2013 Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Batang Hari, Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Tahun 2014 diikuti Kabupaten Muara jambi. Kegiatan PPSP adalah sbb : sesuai sektor penanggung jawab :

1. Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) penanggung jawab sektor kesehatan.
2. Penyusunan Dokumen Buku Putih sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) oleh Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten
3. Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS), adalah dokumen kesepakatan antara pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan sektor swasta.
4. Implementasi fisik, didasari atas MPS tersebut, penanggung jawab sektor Pekerjaan Umum.
5. Monitoring dan Evaluasi, penanggung jawab sektor Lingkungan Hidup dan Kesehatan, tertama pasca implementasi.

Sesuai dengan target sampai dengan tahun 2015 Provinsi telah memfasilitasi keikutsertaan kabupaten Kota dalam program PPSP ini. Dan Semua Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi sudah terdaftar sebagai anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

Tabel 4.71
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Di Provinsi Jambi, s/d Tahun 2015

No	Kabupaten / Kota	KEGIATAN PPSP						KE T.
		EHRA	BPS	SSK	MPS	IMP	MONEV	
1	Kerinci							
2	Kota Sei Penuh							
3	Merangin							
4	Sarolangun							
5	Batanghari							
6	Muaro Jambi							
7	Tanjab Timur							
8	Tanjab barat							
9	Tebo							
10	Bungo							
11	Kota Jambi							

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

7) Penyerapan Anggaran

Pembiayaan kegiatan yang ada di seksi Penyehatan Lingkungan tahun 2014 yang bersumber dana APBD sebesar Rp. 366.600.000,- (Realisasi 99.3%) dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sbb :

Tabel 4.72
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Penyehatan Lingkungan

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		Kinerja Kegiatan		Kinerja Program
			Keuangan (%)	Fisik (%)	Out put	Out Come	Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	366,600,000	99.3	100			Persentase Kabupaten / Kota yang memenuhi kualitas Lingkungan Sehat
1	Kegiatan Upaya Penyehatan TTU / TPM	50,820,000	95.88	100	Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Tercapainya tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Menurunnya angka tidak masuk sekolah pada siswa SLTA
2	Monitoring Kualitas Udara	26,000,000	100	100	Persentase jumlah daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan	Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan	Adanya Kab Kota yang mendapatkan Anugerah Swasti Saba
3	Sosialisasi Kab/Kota Sehat	79,000,000	100	100	Persentase kabupaten yang memfasilitasi penyelenggaraan Kabupaten / kota sehat	Terbentuknya forum Kabupaten /kota sehat di Kabupaten /kota	Adanya Kab Kota yang mendapatkan Anugerah Swasti Saba
4	Pemberdayaan Desa LBS	102,000,000	100	100	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan penduduk yang menggunakan jamban keluarga	Meningkatnya akses sanitasi dan menurunnya penyakit yang berbasis lingkungan
5	Penguatan kelembagaan Program PPSP	40,000,000	99.05	100	Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan program Percepatan pembangunan Sanitasi Pemukiman	Tersusunnya buku memorandum program sanitasi (MPS) dan terimplementasi kegiatan fisik sanitasi	Meningkatnya akses sanitasi dan menurunnya penyakit yang berbasis lingkungan
6	Sosialisasi Kebijakan Kesling (Kesenambungan Keg ADB)	68,780,000	99.87	100	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	Meningkatnya kualitas sarana air minum dan Menurunnya penyakit berbasis air

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

8) Masalah/Hambatan Dalam Pelaksanaan

(a) Berdasarkan Sifat

- (1) Dimensi lintas batas (geografis, lintas disiplin dan lintas sektor) → tanggung jawab sektor tertentu. Dampak yang ditimbulkan tidak mengenal batas administrasi dan geografi, didalam penanggulangan dan penanganannya banyak merekrut disiplin ilmu, dan dalam pemerintahan tidak dapat di kerjakan hanya pada satu sektor melainkan harus lintas sector.
- (2) Dimensi variabilitas bersifat person, place and time (PPT).
- (3) Person (manusia) yang terkena dampak tidak mengenal golongan umur, jenis kelamin dan karakteristik lainnya, tempat (place) dan waktu (time) kejadian dampak sangat berbeda jenis akibatnya.
- (4) Dimensi Sumber Daya (Dana & Manusia)
- (5) Kegiatan apapun yang sudah direncanakan dengan baik jika tidak didukung dengan dana yang cukup dan memadai maka hasilnya tidak dapat optimal, begitu juga dengan sumberdaya manusia jika tidak didukung dengan pendidikan dan pengetahuan yang baik maka keberhasilan program penyehatan lingkungan kurang optimal.

(b) Faktor yang mempengaruhi

- (1) Pertumbuhan penduduk yang pesat dengan persebaran penduduk yang tidak merata (terkonsentrasi pada wilayah tertentu), maka sudah dapat dipastikan keadaan kesehatan lingkungan cenderung tidak kondusif.
- (2) Aktivitas pembangunan yang dari ketahun mengalami perkembangan pesat baik dari sektor industri maupun perumahan, akan tetapi tidak dibarengi dengan perizinan yang lebih ketat, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- (3) Mentalitas dan perilaku masyarakat yang masih kurang baik dalam pengelolaan sarana kesehatan lingkungan.
- (4) Kemampuan alam untuk pengendalian pencemaran akan membersihkan kejadian pencemaran semakin menipis

- (5) Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan secara lintas program/sektoral belum optimal
- (6) Pada era otonomi Daerah masih sering terjadi mutasi pegawai dengan frekuensi yang cepat dan masih banyak penanggung jawab kesehatan lingkungan di berbagai level tidak berdasar kompetensi, sehingga semua ini akan mempengaruhi pelaksanaan program kesehatan lingkungan.
- (c) Terobosan Yang Dilakukan
- (1) Pembangunan kesehatan menjadikan tanggung jawab setiap pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada, melalui kegiatan kelembagaan dari Provinsi sampai ke tingkat kecamatan, seperti pembentukan POKJA AMPL sampai dengan Form Kecamatan Sehat.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan diberbagai sektor hendaknya terpadu dan terintegrasi dan harus berdasarkan potensi wilayah yang ada, seperti tersusunnya memorandum Program Sanitasi di Setiap Kabupaten.
- (3) Mendorong aktifnya masyarakat dalam pembangunan :
- Setiap kegiatan pembangunan diharuskan mensinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari perencanaan sampai dengan monev, yang difasilitasi petugas sanitarian. Sehingga Terwujudnya keadaan yang kondusif untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya.
 - Adanya wadah atau forum masyarakat yang menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan. Seperti terbentuknya form kabupaten kota sehat sampai ke kelompok kerja di kelurahan atau desa
 - Memperkuat pembinaan kelembagaan. dengan mendorong peran serta masy dalam suatu wadah, misal Forum Kabupaten/kota sehat atau nama lain atau penghargaan yang diberikan oleh berbagai sektor.

- Mendorong pengembangan dan penerapan hukum, terutama Undang undang, PP, Standard di tingkat pusat dan Perda di Kabupaten/kota.
- Advokasi dengan menyediakan data evident based; Bina hubungan lintas sektor, program LSM dan masyarakat serta motivasi untuk menggerakkan kepedualian semua pihak.

(4) Penghargaan Yang Diperoleh

- Peringkat Pertama Nasional Desa Lingkungan Sehat (LBS)
- Penganugrahan Kabupaten Sehat (SWASTISABA) untuk Kabupaten Sarolangun pada Tingkat PADAPA

m. Program Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Jambi

1) Penerapan dan penyebarluasan informasi tentang Akreditasi Pelatihan

Sesuai dengan SK Menkes. No. 725/Menkes/SK/V/2003 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, bahwa setiap penyelenggaraan pelatihan dibidang kesehatan harus Terakreditasi.

Dalam rangka penerapan kebijakan Akreditasi Pelatihan, maka pada tahun anggaran 2014 ini Bapelkes telah melaksanakan sosialisasi kepada para pemegang program di lingkungan Diskes Provinsi Jambi tentang mekanisme dan tata cara pengajuan Akreditasi Pelatihan. Dan pada setiap tahun anggaran telah dibentuk Tim Akreditasi Pelatihan Kesehatan Provinsi Jambi yang keputusannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Dalam rangka penyebarluasan informasi kediklatan, maka Bapelkes telah melaksanakan kegiatan Pembinaan atau fasilitasi Diklat ke Diskes Kabupaten/kota se Provinsi Jambi, yang tujuannya adalah terbentuknya Tim Unit Diklat kesehatan di lingkungan Diskes kab/kota yang diharapkan dapat melaksanakan pelatihan dengan mengikuti kaedah ekreditasi Pelatihan bidang kesehatan sesuai kepmenkes 725 tahun 2003.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, maka Bapelkes jambi telah melaksanakan Fasilitasi/Pembinaan Unit Fungsional Diklat di Diskes kabupaten kota. Pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan fasilitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten

Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Adapun fasilitasi ini dilaksanakan secara berkesinambungan, yang dalam pelaksanaannya untuk masing masing kabupaten dilakukan sebanyak 3 kali yaitu periode persiapan di bulan April, penyelenggaraan tutorial di bulan Agustus dan pementapan di bulan Oktober 2014. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola yang hampir bersamaan di setiap kabupaten.

2) Peningkatan Kemampuan Sumber daya manusia Kesehatan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Bapelkes Jambi banyak yang berasal dari unit / satuan kerja Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, disamping kegiatan diklat yang merupakan kewenangan Bapelkes Jambi sebagaimana yang terdani melalui dana Dekonsentrasi dalam Program Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan diklat Bapelkes Jambi mampu menampung peserta pelatihan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan jumlah maksimal 120 orang.. Jika dibanding dengan tahun – tahun sebelumnya, jumlah peserta pelatihan yang memanfaatkan Bapelkes Jambi terus mengalami peningkatan. ini membuktikan bahwa Bapelkes Jambi telah mengemban tugas dan fungsinya dengan cukup baik dari segi pemanfaatan sarana dan prasarana serta SDM Bapelkes (widyaiswara).

Tabel 4.73

Jenis Dan Jumlah Peserta Diklat Bapelkes Jambi Tahun 2012 – 2014

No	Jenis Kegiatan	Jumlah			Peserta		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Pelatihan Menagemen	7	7	3	202	262	90
2	Pelatihan Fungsional	1	2	1	30	60	30
3	Pelatihan Teknis	33	32	19	925	739	493
4	Kegiatan Non Pelatihan	38	37	36	1337	1.651	1.347
Jumlah		79	78	59	2.494	2.712	1.940

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Sedangkan jenis dan jumlah peserta Diklat yang dilaksanakan oleh Bapelkes Jambi yang bersumber dana dari DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.74
Jenis Dan Jumlah Peserta Diklat Program Peningkatan Balai
Kesehatan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Nakes Tahun 2014

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PESERTA/ ORANG	KET.
1	DIKLAT	11	294	UFD KES 3 KAB/KOTA
2	NON DIKLAT	4	90	
JUMLAH		15	384	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

3) Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana pelayanan diklat.

Sebagai mana lazimnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana Diklat, maka yang dijadikan tolok ukur keberhasilan apabila dilihat dari segi utilitasnya adalah tingkat Pemakaian kelas (SOR) dan pemakaian tempat tidur (BOR).

Untuk perhitungan rumus SOR (Set Occupancy Rate), angka mutlak pada penyebutnya membedakan hari kalender, yaitu hari libur dan hari efektif. Hal ini karena jumlah hari libur dalam setahun tidak selalu sama antara tahun yang satu dengan tahun berikutnya, sehingga hari efektif yang digunakan dalam perhitungan SOR adalah selisih antara jumlah hari dalam setahun dengan jumlah hari libur, sehingga didapat angka penyebut didalam perhitungan SOR adalah 250 hari. Sedangkan penyebut dari rumus perhitungan BOR (Bad Occupancy Rate) dalam setahun adalah 365 hari.

Rumus Perhitungan SOR dan BOR

$$\text{SOR} = \frac{\text{Jumlah (Peserta latih x Hari)}}{250 \text{ Hari x Kapasitas kelas}} \times 100 \%$$

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah (Peserta Inap x Hari)}}{365 \text{ Hari x Kapasitas Asrama}} \times 100 \%$$

Tabel 4.75
Pemanfaatan Bapelkes Menurut Jenis Dan
Frekuensi Kegiatan Bapelkes Jambi Tahun
2012 - 2014

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan		
		2012	2013	2014
1	Diklat :	41	41	23
2	Non Diklat	38	37	36
	Jumlah	79	78	59

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Tabel 4.76
Sor – Bor Diklat & Sor – Bor Non Diklat Di Bapelkes Jambi
Tahun 2012 – 2014

No	Tahun	SOR Diklat	BOR Diklat	SOR Non Diklat	BOR Non Diklat
1	2012	24,3	16,46	13,66	9,37
2	2013	27,16	18,6	18,44	12,63
3	2014	17,57	12,03	16,19	11,09

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

1) Tingkat Keterlibatan Institusi Diklat

Perhitungan keterlibatan ini hanya menghitung kegiatan Diklat Depkes dan Non Depkes. Jenis keterlibatan kegiatan terdiri dari 5 kategori yaitu :

- a. Keterlibatan I. yaitu tempat pelatihan
- b. Keterlibatan II. Yaitu tempat dan panitia administrasi (OC)
- c. Keterlibatan III. Yaitu tempat OC dan Panitia Teknis (SC)
- d. Keterlibatan IV. Yaitu tempat OC, SC dan Pengajar
- e. Keterlibatan V, yaitu meliputi tempat OC, SC, Pengajar dan merancang pelatihan

Tabel 4.77
Keterlibatan Bapelkes Jambi Dalam Kegiatan Pelatihan Tahun 2012
– 2014

TH	Kategori Keterlibatan	Kategori Keterlibatan	Kategori Keterlibatan	Kategori Keterlibatan	Kategori Keterlibatan	Jml
	I	II	III	IV	V	
2012	-	10	18	6	7	41
2013	-	18	10	5	8	41
2014	-	6	2	5	10	23

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

2) Hambatan Dalam Pelaksanaan Tujuan.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya tenaga Widyaiswara bila dibandingkan dengan beban kerja yang ada di Bapelkes.
- b. Belum semua pemegang program di lingkungan Diskes Provinsi Jambi mengikuti kebijakan Akreditasi Pelatihan sesuai dengan Kepmenkes 725 tahun 2003.
- c. Kurangnya kesempatan Diklat penjenjangan ke Widyaiswaraan yang sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya yang dibutuhkan.
- d. Anggaran program Diklat di Bapelkes Jambi masih dirasakan kurang sehingga banyak pelatihan yang didasarkan kebutuhan belum terealisasi.
- e. Kurangnya frekuensi kegiatan pelatihan di tingkat kabupaten/kota sehingga kebijakan akreditasi pelatihan sering terlupakan atau tidak diikuti.

3) Terobosan Yang Dilakukan.

- a. Peningkatan Kapasitas SDA

Untuk meningkatkan SDM kesehatan Bapelkes, maka SDM kesehatan Bapelkes telah mengikuti, Pelatihan - pelatihan / Kursus - kursus / Seminar - seminar yang pelaksanaannya diadakan di tingkat Nasional dan Regional. Adapun kegiatan –

kegiatan yang diikuti antara lain Pertemuan / Rakon yang diikuti oleh pejabat struktural dan WI, Pelatihan Teknis, fungsional dan manajemen yang diikuti oleh struktural dan staf.

- b. Dalam rangka mendukung peningkatan kebijakan akreditasi Pelatihan, maka pada setiap awal tahun anggaran dilaksanakan Sosialisasi Akreditasi Institusi Bapelkes yang diikuti oleh seluruh staf Bapelkes dan para pemegang program di lingkungan Diskes Provinsi Jambi.
- c. Mengusulkan dan mengirimkan calon tenaga fungsional (Widyaiswara) untuk mengikuti Diklat dan seleksi Calon Widyaiswara Bapelkes ke Kementerian Kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Menjalin kemitraan dengan Pusdiklat Kemenkes RI dan Bapelkes Nasional agar berkenan menyelenggarakan diklat bagi SDM kesehatan Provinsi Jambi di Bapelkes Jambi.
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Guna meningkatkan mutu pelayanan Diklat Kesehatan di Provinsi Jambi, maka pada tahun 2014 Bapelkes Jambi telah meningkatkan/melengkapi sarana Diklat berupa, :

- 1. Rehap gedung Asrama
- 2. Pengadaan AC floor standing 2 unit.
- 3. Pengadaan Infocus/ LCD satu set.
- 4. Pengadaan Filing Kabinet 2 unit.

4) Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Bapelkes

Dalam pelaksanaannya kebijaksanaan akreditasi pelatihan di Provinsi Jambi , masih memerlukan perhatian, karena masih banyak pelatihan dari lingkungan kesehatan yang belum mengikuti ketentuan dimaksud, untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.78
Pelatihan Terkreditasi Di Bapelkes Jambi Tahun 2012 – 2014

Tempat Pelatihan	Jumlah Pelatihan			Mengajukan Akreditasi			Terakreditasi		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Bapelkes	41	41	23	14	16	10	14	16	10
Non Bapelkes	-			-	-		-	-	
Jumlah	41	41	23	14	16	10	14	16	10

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Kebijakan Akreditasi Pelatihan di bidang kesehatan merupakan program Kementerian Kesehatan RI yang harus ditindak lanjuti ditingkat Provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan output dari pelaksanaan kegiatan Diklat.

Demikian juga dengan kegiatan Pembinaan/fasilitasi diklat di kab/kota, pada tahun 2014 telah dapat kembangkan kembali pada 3 kabupaten yaitu kabupaten Tanjab Timur, Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan pada tahun 2015 direncanakan akan direplikasi pada 2 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi, sehingga pada akhir tahun 2015 terealisasi 100 %.

Kegiatan pembinaan/ fasilitasi Unit Diklat Kesehatan ditingkat Kabupaten/Kota adalah merupakan kegiatan yang mempersiapkan SDM Kesehatan Kab/Kota untuk menyelenggarakan pelatihan kesehatan dengan memenuhi standar Akreditasi pelatihan APBD kab/kota.

1. Pencapaian Kinerja Bapelkes

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014, maka tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dengan indikator :

- a) Jumlah Penyelenggaraan diklat yang terakreditasi sebagai mana diuraikan pada tabel 19 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2013 mencapai 39,02 %, sedangkan untuk tahun 2014

terjadi peningkatan menjadi 43,5 %, sehingga jumlah pelatihan yang terakreditasi sampai tahun 2014 sudah mendekati target renstra pada tahun 2015 sebesar 50 %.

- b) Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan Teknis, Fungsional dan Manajemen di Bidang kesehatan telah mencapai 1.089 orang pada akhir tahun 2014, keadaan ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil telah melebihi target penetapan indikator Kinerja, target renstra jumlah tenaga kesehatan yang dilatih sampai tahun 2015 sebanyak 1.250 orang.
- c) Pencapaian target tentang Kab/kota yang telah difasilitasi tentang Unit Fungsional Diklat pada tahun 2014 telah sesuai dengan rencana dimana telah terlaksana untuk 9 kabupaten/kota (81,8 %), dan pada tahun 2015 akan direplikasi untuk 2 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi, sehingga pada tahun 2015 seluruh kab/kota diharapkan telah memiliki Tim Diklat Kesehatan.

n. Program Laboratorium Kesehatan

1) Pencapai Tujuan dan Sasaran

Meningkatkan Pelayanan Laboratorium dan pendapatan Balai Laboratorium Kesehatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya adanya peningkatan baik itu target penerimaan (PAD) Rp. 394.987.000,- dan target penerimaan setelah perubahan Rp. 400.000.000,-. Jikalau dibandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan (2,3 %) , realisasi penerimaan retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 516.123.000,- (129,03 %)

(a) Pencapaian Kinerja

Terlaksananya pemeriksaan rutin laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat dalam bidang sebagai berikut :

(b) Bidang Kimia dan Patologi Klinik

Kimia Klinik	:	2.396	(18 Parameter)
Urinalisa	:	552	(12 Parameter)
Hematologi	:	1.619	(16 Parameter)
Cairan tubuh lainnya	:	5	(3 Parameter)
Immunologi	:	2.307	(20 Parameter)
Kimia Air dan Lingkungan	:	5.105	(13 Parameter).

(c) Mikrobiologi :

Bakteriologi Kultur	:	1.228	(13 Parameter)
Mikroskopis	:	64	(14 Parameter)

(d) Mikroskopis Lintas Program

Malaria	:	13	(sampel)
Mikrofilaria	:	2	(sampel)
Mikrobiologi air	:	11.006	(2 Parameter)
Makanan & Minuman	:	39	(59)
Parameter)Nosocomial	:	303	(sampel)

o. Kerjasama Lintas Program / Lintas sektoral ;

1) Rujukan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada bidang pemeriksaan Mikrobiologi dari sampel berasal dari :

- (a) Rumah Sakit Raden Mattaher tanggal 08-01-2015 - Difteri.
- f) Kabupaten Muara Jambi tanggal 16-03-2015 - Muntahan
- (b) Kabupaten Merangin tanggal 29-04-2015 - Feses.
- (c) Kabupaten Sungai Penuh tanggal 23-05-2015 - Sayur Jamur,air minum dan muntahan.
- (d) Kabupaten Batang Hari tanggal 11-05-2015 - Saos tomat (inti nikmak), sambal lombok mas.
- (e) Kabupaten Sarolangun tanggal 02-10-2015 - Feses.
- (f) Kabupaten Batang Hari tanggal 15-10-2015 - air isi ulang, air mentah depot, sambal tempe, nasi, ayam goreng sarapan pagi, ayam goreng makan siang dan sisa makan siang.
- (g) Kabupaten Batang Hari tanggal 30-11-2015 sampel SPMA Jambi Kec. Jembatan Mas, Feses, sambal masak, sambal tempe, nasi, susu.

- (h) Seksi Mikrobiologi dan Imunologi juga membantu menjadi tenaga pengajar / narasumber pada pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi maupun Dinas Kabupaten/Kota tentang TB Paru, HIV & AIDS, Hepatitis.
- (i) Membimbing praktikum dan praktek kerja lapangan pada mahasiswa Akademi Analis Kesehatan Jambi
- 2) Rujukan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada bidang Kesehatan Masyarakat dari :
- (a) Kabupaten Merangin tanggal 29-04-2015 - nasi dan ayam
- (b) Kabupaten Kerinci puskesmas kumun sampel sayur nanko, tetelan, sayur terong & kentang
- (c) Kabupaten Batang Hari tanggal 30-11-2015,- sampel air isi ulang, air mentah dapur, sambal tempe, nasi, ayam goreng, sisa makanan siang.
- (d) Membimbing pratikum dan praktek kerja lapangan Mahasiswa (AAK) Akademi Analis Kesehatan Jambi
- (e) Melaksanakan kegiatan PME bidang Kimia Kesehatan
- 3) Rujukan pemeriksaan Hepatitis Program P2L Dinas Kesehatan Provinsi pada tahun 2015 berjumlah 1.849.000. sampel, dengan hasil Negatif : 1.832.000 sampel, hasil positif : 17 orang.
- (a) Lintas Program bidang Imunologi :
- Pengambilan Spesimen darah untuk pemeriksaan HIV/AIDS pada LAPAS Jambi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- (1) Pemeriksaan didalam Penanggulangan HIV dan AIDS
- Tujuan :
Tersedianya pemeriksaaan serologi HIVdan pemeriksaan IO AIDS untuk membantu didalam penanggulangan program pengendalian HIV.
 - Dampak :
Tersedianya pemeriksaan laboratorium serologi HIV dan IO AIDS.

- Hasil Kegiatan :

VCT (Voluntari Counseling test) sebanyak :423 orang

Total keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai laboratorium Kesehatan Jambi sebanyak 423 orang dengan hasil yang positif 68 orang

Dari anggaran yang telah disediakan capaian kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan serologi dan IO AIDS yang berasal dari tim VCT Provinsi Jambi .Adapun kegiatan lain didalam penanggulangan HIV AIDS ini keterlibatan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi meliputi sero survei dan VCT mobile yang semua biaya operasional kegiatan di dana oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2015

(2) Pelaksanaan PME (Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium)

- Tujuan:

Terlaksananya pemantapan mutu untuk bidang Patologi Klinik dan Mikrobiologi, Kimia Kesehatan dan Imunologi adanya kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.

- Dampak :

Meningkatnya kompetensi tenaga laboratorium pada pemeriksaan patologi klinik, Mikrobiologi, Kimia Kesehatan dan Imunologi

(3) Peningkatan SDM Balai Laboratorium Kesehatan Jambi

- Tujuan :

Terlaksananya kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tenaga teknis dan non teknis Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi, berjumlah 34 peserta untuk Pelatihan Akreditasi ISO 15189 – 2012 dan ISO 17025-2008 dan penambahan ruang lingkup pemeriksaan baik

klินิก maupun kesehatan masyarakat re akreditasi tahun 2016.

- Dampak :

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis dan non tehknis Balai Laboratorium Kesehatan Jambi khususnya menghadapi re akreditasi ISO 15189 – 2012 dan ISO 17025 – 2008 dan penambahan ruang lingkup pemeriksaan kliniks dan kesehatan masyarakat.

(4) Kegiatan Akreditasi Balai Laboratorium Kesehatan Jambi

- Tujuan :

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM untuk tenaga teknis dan non teknis Balai Laboratorium Kesehatan Jambi Pelatihan Akreditasi ISO 15189 – 2012 dan ISO 17025 – 2008.

- Dampak :

Meningkatnya performen Balai Laboratorium Kesehatan Jambi sebagai laboratorium penguji sesuai ISO 17025 tahun 2005 dan yang telah terakreditasi pada tanggal 21 Juni 2012 yang meliputi ruang lingkup bidang Pemeriksaan Kimia dan Patologi, Immunologi, Bakteriologi, Parasitologi, Kimia air dan Lingkungan, penambahan ruang lingkup klinis ISO 15189 – 2012.

p. Program Evaluasi dan Pengendalian

1) Program Dan Kegiatan

Kegiatan Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Bidang Bina Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

(1) Pertemuan Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan.

(2) Workshop Item Review dan Item Analisis

(3) Pendidikan ke Jenjang D III Bidang Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin

2) Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Kegiatan bantuan pendidikan jurusan kebidanan/ keperawatan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu di daerah tertinggal, sulit serta bermasalah kesehatan merupakan kegiatan prioritas pada seksi pendayagunaan tenaga kesehatan. Kegiatan ini berupa pendidikan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi untuk percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dalam rangka percepatan capaian indikator MDG's ke 1, 4 dan 5.

Kegiatan pendidikan ini sudah berjalan sejak tahun ajaran 2013/2014 dan akan berakhir pada tahun ajaran 2015/2016. Sampai dengan semester V tahun 2015 proses pendidikan berjalan dengan lancar dan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan ini masing-masing jurusan kebidanan sebanyak 40 orang dan jurusan keperawatan berjumlah 37 orang. Pada akhir semester VI tahun 2016 mahasiswa akan mengikuti uji kompetensi sebagai bentuk akhir dari proses pendidikan baik pada jurusan kebidanan maupun jurusan keperawatan.

3) Permasalahan Dan Solusi

Pada pelaksanaan pendidikan ini tidak ditemui permasalahan yang terkait dengan dukungan proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

q. Program Akademik Analis Kesehatan Jambi

Akademi Analis Kesehatan (AAK) Provinsi Jambi yang berstatus perguruan tinggi negeri milik Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai layanan yang keseluruhannya tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan Visi: "AAK Tahun 2020, menjadi institusi pendidikan bidang kesehatan yang unggul, mandiri serta terdepan membantu menghantarkan masyarakat Jambi yang Ekonominya Maju, Adil, Aman dan Sejahtera sebagai bagian Masyarakat Indonesia"

1) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2015

Dalam penetapan program pelayanan pendidikan Diploma III Analis Kesehatan Pada Tahun 2015 sesuai dengan Rencana Program dan kegiatan Pendidikan Akademi Analis Kesehatan meliputi:

(a) Pelayanan Pendidikan Akademik

(1) Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan peserta Sipenmaru dengan indikator 250 calon mendaftar realisasi pelaksanaan sebanyak 176 orang (54 %), sementara realisasi keuangan sebesar 79,50 %

(2) Penyelenggaraan Orientasi dan Pengenalan Kampus (Ospek)

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan peserta Ospek dengan indikator 160 Mahasiswa Baru yang mengikuti Ospek realisasi pelaksanaan sebanyak 100 orang (62 %), sementara realisasi keuangan sebesar 93,23 %.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Teori dan Praktek

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 364 orang Mahasiswa mengikuti Pendidikan Teori dan Praktek realisasi pelaksanaan sebanyak 363 orang (99,7 %). Sementara realisasi keuangan 66,13 %

(4) Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS)

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 240 dan 363 Mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester realisasi pelaksanaan sebanyak 361 dan 233 orang (98,25 %).

(5) Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 95 orang Mahasiswa mengikuti PKL di 5 Kabupaten/Kota realisasi pelaksanaan sebanyak 116 orang (100 %).

(6) Penyelenggaraan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 116 orang Mahasiswa mengikuti KTI realisasi pelaksanaan sebanyak 116 orang (100 %).

(7) Penyelenggaraan Uji Akhir Program (UAP)

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 118 orang Mahasiswa mengikuti UAP realisasi pelaksanaan sebanyak 118 orang (100%).

(8) Penyelenggaraan Yudisium Lulusan

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 118 orang Mahasiswa mengikuti Yudisium realisasi pelaksanaan sebanyak 118 orang (100%).

(9) Penyelenggaraan Wisuda Lulusan

Berdasarkan indikator capaian program yang ditetapkan, indikator 118 orang Mahasiswa mengikuti Wisuda realisasi pelaksanaan sebanyak 118 orang (100 %).

(b) Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Profesi

(2) Program pelayanan pengabdian pada tahun 2015 telah dilaksanakan berupa pertemuan persiapan uji kompetensi bagi mahasiswa semester V.

(3) Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium dan Klinik Kesehatan

(4) Penyelenggaraan Kerja Sama Operasional dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)

(1) Kurangnya optimalnya informasi terhadap masyarakat dalam sosialisasi penerimaan mahasiswa baru pada Akademi Analis Kesehatan Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan belum optimalnya penggunaan media penyebaran informasi

(2) Kurangnya animo masyarakat luas untuk mendidik anaknya ke institusi pendidikan, karena terkait sedikitnya peluang pemanfaatan lulusan sebagai tenaga kesehatan

(c) Penyelenggaraan Pendidikan Teori dan Praktek.

Realisasi penyelenggaraan pendidikan teori dan praktek dapat dilaksanakan dengan presentasi 97%, meskipun ada beberapa mahasiswa sampai dengan ujian akhir masih ada yang tidak dapat menyelenggarakan ujian akhir program, kondisi ini disebabkan karena raw input beberapa mahasiswa diduga memiliki intelektual yang rendah.

(d) Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester

Hanya 98,25% capaian penyelenggaraan akhir semester, kondisi ini disebabkan karena beberapa mahasiswa belum dapat menyelesaikan KTI (Karya Tulis Ilmiah) tepat waktu, karena disamping raw input beberapa mahasiswa yang lemah, juga karena substansi penulisan KTI yang butuh waktu lama, namun manajemen pendidikan mengalokasikan waktu tambahan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester

(e) Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan.

Secara fisik penyelenggaraan Praktek Lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, namun secara keuangan realisasi keuangan juga terjadi efisiensi berdasarkan lokasi tempat praktek yang hanya dilaksanakan focus pada satu lokasi PKL, namun sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

(f) Penyelenggaraan Karya Tulis Ilmiah

Ada beberapa mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah, hal ini disebabkan karena mahasiswa dan topic penelitian yang membutuhkan waktu luas, namun kondisi tersebut dapat diatasi dengan penambahan waktu.

(g) Penyelenggaraan Yudisium Lulusan

Sesuai kalender pendidikan pelaksanaan yudisium dilakukan sebanyak 2 kali, pada yudisium I realisasi capaian berjumlah 53 orang (45 %), sementara yudisium ke 2 berjumlah 65 orang

(55%) %, kondisi ini karena Karya Tulis ilmiah belum dapat diselesaikan oleh mahasiswa.

(h) Pelayanan Pengembangan Usaha Koperasi

Program ini belum dapat dilaksanakan karena, belum tersedianya regulasi tatakelola keuangan (berupa tarif layanan)

(i) Permasalahan dan Solusi

- (1) Dalam upaya mendapatkan jumlah peserta didik sesuai dengan target calon penerimaan mahasiswa, telah dilakukan berbagai upaya yaitu melalui penyebaran leaflet, media koran serta mengunjungi beberapa sekolah Menengah Atas pada setiap kab/kota, serta membuat kerja sama (MOU) dengan Pemerintah Daerah terutama masyarakat yang tidak mampu dengan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah.
- (2) Memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi penyelenggara ospek, agar setiap calon akan merasa betah menjadi mahasiswa, sehingga pelaksanaan ospek akan sesuai dengan rencana (calon mahasiswa masuk).
- (3) Melakukan pengawasan mutu proses pembelajaran dikelas bagi para dosen, mahasiswa serta penunjang akademik dengan tetap memperketat tingkat absensi bagi dosen dan mahasiswa.
- (4) Melengkapi fasilitas proses pembelajaran (AVA), kenyamanan ruangan belajar, fasilitas laboratorium dan sarana penunjang proses pembelajaran (ATK).
- (5) Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dosen melalui pelatihan dan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan kejenjang pendidikan S2
- (6) Membuat kerjasama (MOU) pendidikan dengan pemerintah daerah dalam merekrut peserta didik
- (7) Membuat beberapa regulasi pendidikan, pengembangan masyarakat melalui kegiatan penelitian, serta pengembangan usaha.

(8) Menstimulasi bagi para dosen untuk selalu melakukan riset penelitian berupa penyediaan sarana dan prasarana penelitian sebagai fungsi Tridarma Perguruan Tinggi.

r. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program standarisasi pelayanan kesehatan mempunyai 3 kegiatan yang terdiri dari :

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Anggaran

Dalam upaya meningkatkan percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan kesinambungannya penyelenggaraan program pembangunan kesehatan maka perlu penyusunan perencanaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 – 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Penyusunan perencanaan dan anggaran diharapkan dapat tercipta sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian program serta kegiatan.

Untuk optimalisasi hasil perencanaan dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan maka diperlukan forum komunikasi dan informasi antara Provinsi dan Kab/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diselenggarakan pertemuan Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota.

(a) Tujuan Kegiatan

Terwujudnya kesepakatan dalam bentuk perencanaan kegiatan program yang terpadu mengarah pada MDGs (Millennium Development Goals) sesuai visi, misi dalam Renstra dan RPJMD.

(b) Kinerja Output

(1) Kinerja output

Adalah terlaksananya pembangunan kesehatan yang sistematis terarah dan terpadu secara umum baik di tingkat Provinsi maupun

Kab/Kota dan secara khusus tercapainya sasaran yang tercantum dalam MDGs.

(2) Indikator kinerja output

- Tersusunnya perencanaan pembangunan kesehatan yang terpadu antara Provinsi dan Kab/Kota.
- Terlaksananya pertemuan sinkronisasi program antara Provinsi dan Kab/Kota
- Adanya kesepakatan yang mendukung pelaksanaan MDGs
- Tersusunnya program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
- Adanya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

(3) Target Kinerja Output

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 4 dokumen tahun 2015

(4) Hasil Kegiatan

Telah tersusunnya 4 dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2015 (DPA, RKA, DIPA dan RKAKL)

- RKA TA.2015
 - a. Jumlah dana Rp. 24.612.222.000
 - b. Jumlah program 19 program
 - c. Jumlah kegiatan 84 kegiatan
- DIPA TA.2015 terdiri dari 6 Satker
 - a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya kementerian kesehatan (01)
 - b. Bina gizi dan kesehatan ibu dan anak (03)
 - c. Pembinaan upaya kesehatan (04)
 - d. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (05)
 - e. Kefarmasian dan alat kesehatan (07)
 - f. PPSDMK (012)

2) Kegiatan Penyusunan Komponen – Komponen Sakip Tahun 2015

(a) Penerapan Komponen – Komponen SAKIP Tahun 2015

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu komponen dasar untuk menetapkan kinerja. Penetapan kinerja merupakan tekad dari janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah dengan memberi amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

(b) Tujuan kegiatan

Tersediannya indikator capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2014 berdasarkan Renstra 2010 – 2015 dan draft indikator kinerja tahun 2015

(c) Kinerja output

(1) Kinerja Output

- Terlaksanannya penerapan komponen – komponen SAKIP tahun 2014
- Terdapat rencana kerja tahunan
- Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja
- Terdapat penetapan kinerja SKPD

(2) Indikator kinerja output

- Jumlah dokumen indikator sasaran 2014. RKT dalam penerapan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2014

(3) Target kinerja output

- Target capaian SAKIP adalah 100%

(4) Hasil Kegiatan

Telah tersusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 terdiri dari :

- Tapkin dan RKT Tahun 2015
- Sinkronisasi RPJMD dengan APBD
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015
-

3) Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)

Kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Jambi tidak terlepas dari perkembangan masalah kesehatan secara Regional, oleh sebab itu strategis dan kebijakan daerah dibidang kesehatan perlu memperhatikan kondisi dan kecenderungan adalah kesehatan secara nasional maupun regional dimasa yang akan datang.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen Internasional yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) dimana dalam MDGs tersebut sektor kesehatan tercantum indikator tujuan MDGs.

(a) Tujuan Kegiatan

Dihasilkannya komitmen bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota dalam meningkatkan derajat kesehatan dan capaian indikator MDGs.

(b) Kinerja Output

(1) Kinerja Output

Terlaksananya pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah tahun 2015 dengan baik dan lancar serta tepat waktu

(2) Indikator kinerja output

- Terciptanya kesamaan pandang dan tindakan dalam penyusunan rencana kegiatan program pembangunan kesehatan
- Terdapat informasi berbagai kebijakan dan strategis pembangunan kesehatan baik dari aspek program maupun penganggaran
- Terlaksananya kegiatan perencanaan yang berkesinambungan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

4) Hasil Kegiatan

Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Rakerkesda dengan rangkuman sebagai berikut :

(a) Pelaksanaan percepatan MDGs.

- (1) Optimalisasi penanganan kasus gizi kurang/buruk di setiap level pelayanan
 - (2) Meningkatkan konektivitas dan ke tata laksana PONED-PONEK
 - (3) Meningkatkan penjangkauan kasus HIV/AIDS dalam setiap level pelayanan serta memperkuat kelembagaan KPAD
 - (4) Pengendalian penyakit tidak menular dengan menjamin ketersediaan obat PTM melalui dana APBD
 - (5) Adanya komitmen untuk membuat PERDA tentang KTR
 - (6) Adanya komitmen pemenuhan tenaga gizi dan laboratorium di setiap level pelayanan kesehatan (FKTP, FKTL)
 - (b) Memperlemmentasikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
 - (c) Pemantapan Upaya Promotif dan Freventif
- s. Program Peningkatan Kemitraan pelayanan Kesehatan

Pada Tahun 2012 Melalui Kementerian Kesehatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan upaya pemerataan pelayanan kesehatan ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Jambi diantaranya pemenuhan kekurangan tenaga dokter umum dan dokter gigi yang bekerja di Puskesmas terpencil dan sangat terpencil, dan penempatan Bidan di Desa biasa, terpencil dan sangat terpencil. Pengadaan tenaga PTT Tahun 2013 terdapat perbedaan jumlah yang diangkat dengan yang diusulkan oleh Kab/Kota sehingga masih terdapat beberapa Puskesmas di Kab/Kota yang tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi, juga ada beberapa desa yang tidak memiliki bidan disana. Beberapa kendala dalam pengelolaan tenaga PTT di Kab/Kota yaitu Dinas Kesehatan Kab/Kota tidak mentaati jadwal pengiriman laporan keberadaan tenaga PNS dan PTT ke Provinsi, sehingga informasi tentang kebutuhan akan tenaga PTT terlambat diketahui oleh Pusat.

Koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pengelolaan kepegawaian khususnya tenaga PTT perlu dibina dengan baik, Kab/Kota sebagai pengguna tenaga perlu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan administrasi ketenagaan yang menjadi syarat utama dalam pengusulan kebutuhan tenaga seperti halnya, data keberadaan dokter umum, dokter

gigi dan Bidan PNS dan PTT yang bertugas di Puskesmas dan di Desa, sehingga wilayah yang benar-benar membutuhkan tenaga dapat tergambar dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan aplikasi SIMPEG di Kab/Kota membuat pengelolaan simpeg menjadi terganggu dan perlu perhatian pengambil kebijakan dalam mensukseskan aplikasi ini di Kab/Kota.

- 1) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penempatan dan Pengendalian Tenaga PTT dari Provinsi Jambi ke Kabupaten/kota/PuskesmasRp. 205.049.850,-

- a) Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Kepegawaian kegiatan penempatan dan pengembalian tenaga PTT di Provinsi Jambi ke Kabupaten/Kota Puskesmas TA. 2014 adalah telah terlaksananya penempatan tenaga dr/drg PTT sebanyak 30 orang dan Bidan sebanyak 17 orang di 10 Kabupaten/Kota/Puskesmas. Serta telah dilakukan pendampingan dan monitoring evaluasi kinerja tenaga PTT tersebut setiap triwulan. Keberadaan Tenaga Dokter/Dokter Gigi Bidan PTT aktif dalam Provinsi Jambi Keadaan Desember dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.79

Data Keberadaan Tenaga Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT Aktif Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Keadaan s.d. Desember 2014

NO	Kabupaten/ Kota	Kriteria Penempatan Bidan				Kriteria Penempatan Dokter				Kriteria Penempatan Dokter Gigi				Jumlah dr/drg/ bidan
		B	T	ST	Total	B	T	ST	Total	B	T	ST	Total	
1	KOTA JAMBI	24	0	0	24	1	0	0	1	7	0	0	7	32
2	MUARO JAMBI	0	174	35	209	0	11	9	20	0	7	1	8	237
3	BATANG HARI	40	35	9	84	4	6	6	12	0	7	3	10	106
4	SAROLANGUN	60	48	40	148	0	8	3	15	0	2	3	5	168
5	MERANGIN	74	84	42	200	0	14	14	28	0	9	0	9	237
6	TEBO	85	41	6	132	0	11	3	14	0	2	5	7	153
7	BUNGO	54	24	21	99	0	6	1	7	0	2	2	4	110
8	KERINCI	128	102	0	230	0	12	0	12	0	7	0	7	249
9	KOTA SUNGAI PENUH	1	7	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	9
10	TANJAB BARAT	2	50	45	97	0	5	4	9	0	2	0	2	108
11	TANJAB TIMUR	18	50	46	114	0	2	3	5	0	2	1	3	122
	J U M L A H	509	615	244	1578	5	75	43	123	7	32	15	54	1531

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Dari tabel data keberadaan tenaga dr/drg/bidan PTT aktif diatas dapat dilihat Jumlah dr/drg/bidan PTT di Kota Jambi sebanyak 32 orang, di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 237 orang, di Kabupaten Batanghari sebanyak 106 orang, Di Kabupaten Sarolangun sebanyak 168 orang, di Kabupaten Merangin sebanyak 237 orang, di Kabupaten Tebo sebanyak 153 orang, di Kabupaten Bungo sebanyak 110 orang, di Kabupaten Kerinci sebanyak 249 orang di Kota Sungai Penuh sebanyak 9 orang, di Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 108 orang dan di Kabupaten Tanjab Timur sebanyak 122 orang.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan :

- Adanya perbedaan jumlah pengadaan dokter/dokter gigi/bidan PTT pusat dengan yang diusulkan
- Kabupaten/Kota tidak mentaati jadwal pengiriman laporan keberadaan tenaga PNS/PTT ke Provinsi Jambi.

(2) Solusi

- Melakukan mapping keberadaan tenaga PTT di masing-masing Kab/Kota.
- Menyurati Kabupaten/Kota untuk mengirimkan laporan keberadaan tenaga PNS/PTT ke Provinsi Jambi.
- Membuat jadwal penyusunan anggaran selama satu tahun
- Melakukan Monitoring evaluasi kepada tenaga PTT per triwulan.

t. Program Akademik Farmasi Jambi

Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.00.06.1.3.02.05 tentang Izin Penyelenggaraan Akademi Farmasi (AKFAR) Pemda TK.I Provinsi Jambi Tanggal 7 Februari 2000

Izin diperpanjang melalui Keputusan Menkes. RI. No. HK. 03.01/II/4/0153 2011 Tanggal 28 Maret 2011.

Akademi Farmasi (AKFAR) Propinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Farmasi Propinsi Jambi, Terhitung Tanggal 27 Juli 2010 AKFAR Propinsi Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Propinsi Jambi yang mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan Program Pendidikan sesuai kurikulum dan kebutuhan daerah.
- 2) Pelaksanaan pembinaan kepribadian mahasiswa dalam rangka kehidupan kampus.
- 3) Pembinaan pengembangan staf. Akademi melalui program pendidikan yang berkelanjutan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan lulusan, melalui praktek laboratorium, diskusi dan lapangan.
- 5) Penyediaan sarana lingkungan untuk mendukung terjadinya proses perkuliahan dan pengembangan diri serta kerja sama peserta didik.
- 6) Pengembangan dan penelitian dan penelusuran tumbuhan obat asli daerah.
- 7) Pembinaan kerja sama dengan pihak yang erat kaitannya dengan bidang kesehatan dan terutama bidang kefarmasian.
- 8) Pelaksanaan kegiatan kurikulum berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- 10) Pelaksanaan tugas lain dibidang kefarmasian yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan No.354/E/0/2012 tentang alih bina penyelenggaraan program studi pada akademi farmasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari kementerian kesehatan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sekarang AKFAR dibawah pembinaan Pendidikan Tinggi (DIKTI).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 421.4/3168/sj tanggal 18 Juni 2013 tentang pengelolaan Institusi Pendidikan Kesehatan Milik Pemda agar pengelolaan keuangan menerapkan BLUD (Badan Layanan Umum

Daerah) dan sekarang Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi Sudah Selesai dan keluar Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 53 dan 54 Tahun 2015, tentang SPM dan Tata Kelola, sedangkan SK. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam proses perbaikan.

Sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi, tujuan penyelenggaraan pendidikan Akfar Provinsi Jambi adalah Meluluskan / Menjadikan tenaga Farmasi yang mampu / mempunyai kompetensi :

- 1) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
- 2) Melaksanakan pelayanan kefarmasian di unit-unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Mampu mengembangkan kegiatan kewirausahaan di bidang kefarmasian yang propesional.

4.1.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher

Program yang telah dilaksanakan oleh RSUD Raden Mattaher selama tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelayanan

1) Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan kebijakan pelayanan medis dan Administrasi di bidang sumber dengan bidang pelayanan medis serta pelayanan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelayanan yang terdiri dari Subbidang Mutu Pelayanan Medik dan Subbidang Sumber daya Pelayanan Medik.

2) Bidang Pelayanan Keperawatan

Bidang Pelayanan Keperawatan adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelayanan yang terdiri dari Subbidang Mutu Pelayanan Keperawatan dan Subbidang Sumber daya Pelayanan Keperawatan.

3) Bidang Rekam Medik (MR) dan Akreditasi & Promosi Kesehatan

Penyelenggaraan rekam medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medik di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, memberikan ketentuan umum, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan perawatan masyarakat, beberapa kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan perawatan pasien RSUD Raden Mattaher. Adapun pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher Jambi Yaitu : Pelayanan rawat jalan mencakup poliklinik spesialis antara lain poliklinik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit anak, bedah, (bedah orthopedi, saraf, digestive, bedah tumor), telinga hidung tenggorokan, penyakit mata, penyakit syaraf, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit kulit, dan kelamin, penyakit gigi, dan mulut (bedah mulut), penyakit jiwa, konsultasi gizi, pemeriksaan kesehatan. Poliklinik umum dan poliklinik lain sesuai perkembangan (VCT/ Voluntari Conseling dan Testing). Untuk pelayanan rawat inap terdiri perawatan terpadu (pavilin khusus, Nurdin Hamzah, Gapkindo, Teratai, Jamsostek), perawatan penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan anak, perinatologi, bedah dan bedah tulang, telinga hidung tenggorokan, penyakit mata, syaraf, jantung, penyakit paru. Pelayanan penunjang medik mencakup radiologi (CT-Scan, Rontgen, USG, Panoramik, DII), Patologi Klinik (laboratorium khusus), patologi anatomi (laboratorium

anatomi), farmasi.pelayanan penunjang diagnostik mencakup pelayanan operasi (Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency), gawat darurat, ICU/ICCU, Hemodialisa, Cardiopulmonary, Endoscopy, Treadmill. Pelayanan medik lainnya antara lain medical chek up, rehabilitas medik (fisioterapi), pemulasaran jenazah, konsultasi HIV serta pelayanan non medis antara lain gizi sterilisasi, Laundry dan Incenerator.

Pada pelaksanaan kegiatan di RSUD Raden Mattaher ada beberapa indikator yang di ukur dan di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.80
Indikator RSUD.Raden Mattaher Jambi Tahun 2011 S/D 2015

NO	INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015*)	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	119,6	111.504	99.643	81.417	61.356	Kunjungan
2	Rawat Inap	16,835	17.770	16.982	16.605	13.816	Orang
3	B.O.R	82,7	80,43	65,23	61.26	60.09	%
4	B.T.O	52,4	56,23	46,23	45.49	42.84	Kali
5	L.O.S	4,7	5,08	5,2	4.91	5.03	Hari
6	T.O.I	1,2	1,27	2,74	3.11	3.40	Hari
7	G.D.R	59,8	59,03	62,22	47.32	76.75	‰
8	N.D.R	31,4	31,74	37,33	28.46	47.71	‰
9	Kunjungan IGD	24.150	24,963	24	24,96	12.243	Kunjungan
10	Operasi Besar	2.200	2.408	2.194	2.446	2.408	Kali
11	Operasi Sedang	748	724	1.163	874	724	Kali
12	Operasi Kecil	9.002	6.066	4.300	1.681	6.066	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	15.811	16.720	15.826	15.819	16.720	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	483	485	420	314	310	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	541	564	630	472	340	Orang
16	Jumlah TT Tersedia	321	316	365	365	365	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Jambi*)Angka Sementara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara berturut-turut yaitu : kunjungan rawat jalan menurun dari 81.4171 pada tahun 2014 menjadi 61.356 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan

sistem rujukan di Provinsi Jambi, dimana pelayanan terhadap penyakit dimulai dari pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS)

Selanjutnya, kunjungan rawat inap, juga terjadi penurunan dari 16.605 orang menjadi 13.816 orang. Berdasarkan analisa, hal ini terjadi dikarenakan penambahan sistem rujukan yang mewajibkan pasien peserta BPJS harus mengikuti sistem rujukan yang di mulai dari PUSKESMAS

Khusus pelayanan BPJS dan Jamkesmasda dari bulan ke bulan selama tahun 2015 meningkat secara drastis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.81
Laporan Jumlah Kunjungan Poliklinik RSUD Raden Mattaher
Jambi Tahun 2011 S/D 2015

No.	POLIKLINIK	Tahun					Total
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penyakit Dalam	25684	21574	18360	14823	11528	91969
2	Bedah	15419	16509	15854	14289	10415	72486
3	Anak	7394	7052	4810	3479	2473	25208
4	Imunisasi	8609	1282	1310	955	1205	13361
5	Syaraf	1312	9085	8519	7408	4194	30518
6	Jiwa	7561	1075	2889	2705	2733	16963
7	THT	15056	7398	7381	4979	3606	38420
8	Mata	4845	12717	11014	8038	5088	41702
9	Kulit & Kelamin	14805	4555	4577	3345	2160	29442
10	Jantung	7334	11786	9460	8691	5482	42753
11	Paru	1422	5898	5361	4616	3809	21106
12	DOT	2454	1232	765	718	554	5723
13	Obstetri	5335	1359	1112	628	430	8864
14	Ginekologi	2367	2569	2627	1887	1265	10715
15	Gigi		4123	3549	2827	2526	13025
16	Gigi Tiruan		417	419	532	1171	2539
17	KIR		2873	2456	1869	1495	8693
18	PSIKOLOGI			39	86	469	594
19	VCT				323	753	1076
TOTAL		119597	111504	100502	82198	61356	475157

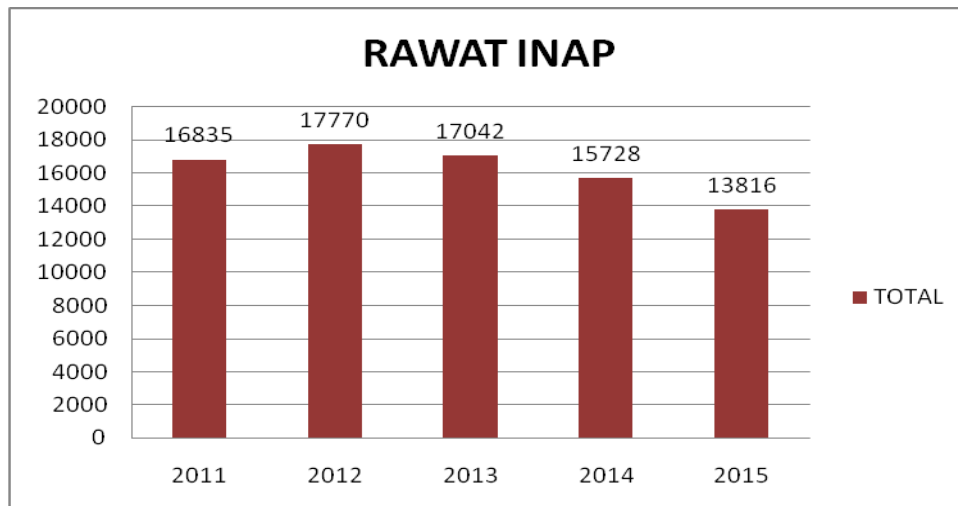
Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Jambi*) Angka Sementara

Tabel 4.82
Laporan Jumlah Pasien Rawat Inap Rsud Raden Mattaher Jambi
Tahun 2011 S/D 2015

No.	POLIKLINIK	Tahun					Total
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Penyakit Dalam	2339	2012	2055	2241	2245	10892
2	B e d a h	2209	1940	2199	2435	2104	10887
3	Kesehatan Anak	1727	1464	1279	1293	1024	6787
4	Obstetri	1539	2977	2577	1856	1151	10100
5	Ginekologi	958		368	353	242	1921
6	S a r a f	927	806	691	654	512	3590
7	THT	157	133	186	161	122	759
8	M a t a	697	709	571	562	325	2864
9	Kardiologi	706	757	645	671	443	3222
10	Paru-paru	609	566	493	558	479	2705
11	I C U	161	154	179	240	190	924
12	ICCU	19	42	43	71	98	273
13	PICU				77	86	163
14	HCU					54	54
15	Perinatologi	814	1117	1120	480	422	3953
16	Pinang Masak	961	1013	1101	888	902	4865
17	Mayang Mangurai	897	1081	1020	1022	851	4871
18	Teratai	322	428	474	437		1661
19	Nurdin Hamzah	622	658	656	479	272	2687
20	ODC		297	481	470	94	1342
21	Jamsostek	538	625	227			1390
22	Gapkindo	633	624	677	600		2534
23	KLB/Mawar		367				367
24	Kelas I				180	1003	1183
25	Kelas II				229	1197	1426
TOTAL		16835	17770	17042	15728	13816	81420

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Jambi*) Angka Sementara

Dari data diatas terlihat bahwa selama tahun 2015, dari total pelayanan rawat inap sebesar 13916 kunjungan terdiri dari kunjungan pasien Umum, BPJS, Jamkesda, PT.



Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaaher Jambi*) Angka Sementara

Gambar 4.27 Pelayanan Rawat Inap

4) Evaluasi Pengembangan SDM Bagian Diklat Dan Penelitian Tahun 2015 Sub Bagian Diklat

a) Kegiatan

(1) In House Training

Bagian diklat dan penelitian telah melakukan 20 kegiatan in house training yang melibatkan 680 peserta, yang membutuhkan dana sebesar Rp. 265.429.300 sebagaimana tabel terlampir.

(2) Pengiriman tenaga ke luar rumah sakit untuk mengikuti pelatihan, workshop, magang dan pembelajaran telah diikuti oleh 210 peserta dengan total pembiayaan sebesar Rp 840.963.500.00.

(3) Pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang melakukan praktik klinik di rumah sakit telah diikuti oleh beberapa institusi pendidikan mulai dari jenjang Diploma 3 sampai pendidikan ners. Jumlah mahasiswa yang telah dilayani berjumlah 3438 orang mahasiswa dengan penghasilan sebesar Rp 502.363.000 kegiatan ini belum termasuk mahasiswa kedokteran yang mengikuti kepaniteraan senior (ko-ass) di rumah sakit, karena tahun 2015 ini pengatur pelayanan kedokteran langsung ke

Bakordik tanpa koordinasi dengan Bagian Diklat dan Penelitian.
Rekap hasil kegiatan terlampir.

- (4) Penggunaan Aula dapat digunakan oleh pihak luar Rumah Sakit dengan membayar sewa aula sesuai peraturan yang berlaku. Tahun 2015 sewa aula sebesar Rp 13.950.000

(a) Sub Bagian Penelitian

Sub bagian penelitian telah melakukan 3 kegiatan penelitian yaitu 2 kegiatan penelitian yakni penelitian Analisis Kepuasan Kerja dan Hubungannya dengan Kinerja Pegawai di RSUD Raden Mattaher dan Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Disamping itu juga telah dilaksanakan survey indek kepuasan pasien (IKM). Survey ini juga memberikan penilaian baik terhadap rumah sakit dengan nilai 70 (Baik).

- (b) Pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang melakukan pengambilan data dan penelitian di rumah sakit. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai institusi pendidikan yang bekerja sama dengan rumah sakit sebanyak 777 orang mahasiswa dengan penghasilan sebesar Rp. 42.530.000.

b. Program dan Kegiatan tahun 2015

Untuk mendukung kebijakan diatas, maka dibagi kedalam beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan RS dalam pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Pergub No. 60 Tahun 2011 pola tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi

Sasaran : Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan

Kegiatan : Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Anggaran : Rp. 127.734.041.913

Realisasi : Rp. 85.762.286.333

Persentase : 67.14 %

Kendala : - Sistem rujukan nasional yang mengisyaratkan bahwa RSUD Raden Mattaher adalah rujukan tertinggi di Provinsi Jambi, sehingga pasien yang di rujuk ke RSUD Raden Mattaher sejarah dengan hal tersebut diatas maka kebutuhan Operasional BLUD menjadi meningkat.

- Perubahan Sistem Pelayanan dan Pembayaran BPJS menyebabkan penerimaan RSUD menurun, sehingga pelaksanaan kegiatan BLUD mengalami kendala, masih banyak piutang pada BPJS yang belum tertagih.

2) Program pelayanan administrasi perkantoran

Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Sasaran : Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Anggaran : Rp. 16.824.866.995

Realisasi : Rp. 10.000.456.725

Persentase : 59.44 %

Kendala : - Beberapa kegiatan Proses Lelang Lambat, Karena Penggantian Pejabat, termasuk Pokja

- Dalam penyediaan barang Elektronik E-Prosesing hanya terdapat Penyedia tunggal namun Bahan Peralatannya Tidak Ready Stock.
- Rekanan Tidak Mampu Untuk Melaksanakan
- Makan Pasien Mulai Kontrak Bulan Juni, sehingga penyemapihan Rendah
- Penambahan daya tidak terealisasi karena anggaran tidak mencukupi

3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- Pemeliharaan rutin/ berkala mobil operasional/ dinas
- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung kantor
- Pembangunan gedung /rehab (SANITASI)

Anggaran : Rp.2.071.912.000

Realisasi : Rp.1.559.305.230

Persentasi : 75.26 %

Kendala : - Penekanan Kendala pada Perinsipnya Sesuai dengan Kebutuhan Namun Pada pemeliharaan Peralatan Penganggaran Ganda, sehingga tidak dilaksanakan.

4) Program obat dan perbekalan kesehatan

Tujuan : Meningkatkan pelayanan farmasi rumah sakit

Sasaran : Meningkatkan pelayanan farmasi rumah sakit

Kegiatan : Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Anggaran : Rp. 17.772.292.041

Realisasi : Rp. 15.973.876.839
Persentasi : 89.88 %
Kendala : - Pada daftar E-katalog terdapat daftar obat dan Alkes yang dibatalkan namun tidak redy stock

5) Program peningkatan Kapasitas aparatur

Tujuan : Meningkatkan Kapsitas aparatur
Sasaran : Terselenggaranya kapasitas aparatur
Kegiatan : Kegiatan Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Anggaran : Rp. 332.370.000
Realisasi : Rp. 137.086.000
Persentasi : 38.24 %
Kendala :- Penundaan Survey sehubungan dengan bencana asap yang semestinya dilaksanakan 3 kali namun hanya terlaksana 1 kali.

6) Program peningkatan disiplin aparatur

Tujuan : Meningkatkan disiplin aparatur
Sasaran : Terselenggaranya kedisiplinan aparatur
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Anggaran : Rp. 388.800.000
Realisasi : Rp. 346.854.500
Persentasi : 89.88 %
Kendala : -

7) Program standarisasi pelayanan kesehatan

Tujuan : Meningkatkan standar pelayanan dan standar biaya rumah sakit
Sasaran : Meningkatnya standar pelayanan dan standar biaya RS

Kegiatan : penyusunan perencanaan program dan anggaran
 Anggaran : Rp. 413.431.000
 Realisasi : Rp. 228.122.240
 Persentasi : 55.18 %
 Kendala : Kegiatan sebagiannya di laksanakan pada akhir tahun, namun karena bencana asap, narasumber penyusunan Renstra terlambat sehingga penyusunan konsep Renstra tidak terlaksana.

8) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi)

Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan penduduk miskin
 Sasaran : Terselenggaranya fungsi sosial rumah sakit (Jamkesmasda)
 Kegiatan : Pengelolaan program Jamkesmasda
 Anggaran : Rp. 1.032.000.000
 Realisasi : Rp. 921.523.478
 Persentasi : 89.29 %
 Kendala : Khusus untuk Program HIV kebutuhan dengan TOR tidak sinkron sebagai tidak dilaksanakan.

9) Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/rumah sakit mata

Tujuan : Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana RS
 Sasaran : Meningkatnya jumlah konstruksi/ bangunan dan peralatan kesehatan sesuai standar
 Kegiatan :
 • Pembangunan rumah sakit
 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
 • Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Non-DAK)
 Anggaran : Rp. 50.027.647.964

Realisasi : Rp. 47.912.269.080
Persentasi : 95.77 %
Kendala : - Beberapa alat tidak cocok dengan penawaran
Sehingga di kembalikan.
- Khususnya dana DAK anggaran tidak pasti,
sehingga Satu paket di batalkan.

10) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/rumah sakit mata

Tujuan : Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
Sasaran : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
Anggaran : Rp. 1.710.875.000
Realisasi : Rp. 1.692.750.500
Persentasi : 98.94 %
Kendala : -

c. Capaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015

Realisasi Anggaran RSUD Raden Mattaher Jambi untuk tahun anggaran 2015 adalah dapat dilihat pada tabel berikut :

1) Aspek Penunjang

a) Sumber Daya Keuangan

(1) Perkembangan Pendapatan.

Pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi dibagi beberapa jenis, yaitu penerimaan Rawat Jalan, Rawat Inap, Kamar Operasi, IGD, ICU, Tindakan Medis dan penerimaan penunjang. Pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.83
Realisasi Pendapatan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011 S/D 2015

NO	URAIAN RINCIAN OBJEK	PENDAPATAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Konsul dokter	807.010.000	849.834.000,00	870,552,566.00	585.804.524,00	497.805.997,00
2	Tindakan/Operasi/HD/Endoscopi/Visum	4.027.926.390	4.226.429.380,33	3,987,459,399.50	2.208.730.399,00	1.801.858.309,00
3	Visit Dokter	772.611.716,50	-	4,010,900,772.50	-	-
4	Askep-	923.422.471,50	-	-	-	-
5	Rawat Jalan	440.060.641	374.693.399,50	394,021,327.00	299.523.077,00	302.384.436,00
6	Rawat Inap	2.641.500.217	3.511.886.229,00	3,202,290,721.00	1.382.534.298,00	2.470.351.961,00
7	Obat-obatan	643.797.235	1.976.140.655,96	953,492,192.00	607.100.083,00	478.837.482,00
8	PHB / Jamkesmasda		15.544.504.750,00	18,216,938,663.70	16.808.029.382,09	3.019.363.182,00
9	Askes/ BPJS JKN	13.628.739.800	6.602.282.030,00	14,246,224,500.00	72.556.503.513,00	49.460.407.481,00
10	PHB / Jamkesmas	13.748.373.216,99	14.638.963.889,00	12,994,822,626.05		
11	Laboratorium	1.495.237.033,50	1.444.681.279,00	1,575,302,395.00	1.183.634.931,00	979.247.082,00
12	Radiologi/Rontgent	583.915.579	652.017.298,00	714,197,532.00	532.640.884,00	437.569.509,00
13	Parkir	9.600.000	26.000.000,00	30,761,000.00	49.500.000,00	637.393.728,00
14	Diklat	873.583.550	821.101.000,00	1,025,073,418.00	736.754.356,00	627.181.000,00
15	Pendapatan Lainnya	952.994.582,38	890.069.479,59	1,407,827,560.61	2.650.148.352,12	1.363.325.925.06
JUMLAH PENERIMAN MURNI		41.548.772.433,37	51.558.603.390,38	63,629,864,673.36	99.600.903.799,21	62.075.726.092.06

Sumber : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Dari data di atas dapat dilihat penerimaan pendapatan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher khusus tahun 2015 hal ini disebabkan oleh sistem rujukan Nasional yang mengakibatkan penurunan Jumlah pasien yang berobat ke RSUD Raden Mattaher kemudian juga dikarenakan Sistem Claim kepada BPJS yang sulit dilaksanakan sehingga tahun 2015 Claim yang sdh dibayar BPJS baru sampai dengan bulan Juli 2015, untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 masih menjadi piutang RSUD Raden Mattaher.

- (2) Realisasi Anggaran RSUD Raden Mattaher Jambi untuk tahun anggaran 2015 adalah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.84
Kegiatan Belanja Langsung Apbd Rsud Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2015

No	SKPD/NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp
		JUMLAH TOTAL	REALISASI KEUANGAN		
		Rp	Rp	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		16,824,866,995.00	10,000,456,725.00	59.44	6,824,410,270.00
1	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,815,859,440.00	2,532,652,098.00	66.37	1,283,207,342.00
2	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	398,763,050.00	284,806,000.00	71.42	113,957,050.00
3	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	523,815,350.00	-	0.00	523,815,350.00
4	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	638,574,000.00	266,211,000.00	41.69	372,363,000.00
5	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	5,272,568,193.00	1,800,596,423.00	34.15	3,471,971,770.00
6	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,241,867,962.00	3,613,343,048.00	85.18	628,524,914.00
7	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	746,219,000.00	619,682,400.00	83.04	126,536,600.00
8	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,187,200,000.00	883,165,756.00	74.39	304,034,244.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur		2,071,912,000.00	1,559,305,230.00	75.26	512,606,770.00
1	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	532,112,000.00	308,761,180.00	58.03	223,350,820.00
2	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	514,800,000.00	512,931,600.00	99.64	1,868,400.00
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	225,000,000.00	-	0.00	225,000,000.00
4	Kegiatan Pembangunan /rehab (SANITASI)	800,000,000.00	737,612,450.00	92.20	62,387,550.00
Program peningkatan Kapasitas Aparatur		332,370,000.00	127,086,000.00	38.24	247,229,500.00
1	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	332,370,000.00	127,086,000.00	38.24	205,284,000.00
Program peningkatan disiplin Aparatur		388,800,000.00	346,854,500.00	89.21	247,229,500.00

No	SKPD/NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp
		JUMLAH TOTAL	REALISASI KEUANGAN		
		Rp	Rp	%	
2	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	388,800,000.00	346,854,500.00	89.21	41,945,500.00
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan		17,772,292,041.00	15,973,876,839.00	89.88	1,798,415,202.00
1	Kegiatan pengadaan Obat,Perbekalan Kesehatan,Obat anti Tuberculosis (AOT) Obat anti Retrovial (ART) Obat Perbekalan Gizi & Buffer Stok	17,772,292,041.00	15,973,876,839.00	89.88	1,798,415,202.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		413,431,000.00	228,122,240.00	55.18	185,308,760.00
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran	413,431,000.00	228,122,240.00	55.18	185,308,760.00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)		1,032,000,000.00	921,523,478.00	89.29	110,476,522.00
1	Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda	1,032,000,000.00	921,523,478.00	89.29	110,476,522.00
Program Pengadaan Peningkatan Sarana & Prasarana RS/RSJ/RS PARU/RS Mata		50,027,647,964.00	47,912,269,080.00	95.77	2,115,378,884.00
1	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit	31,572,080,000.00	31,401,879,107.00	99.46	170,200,893.00
2	Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit	1,676,048,000.00	1,207,250,640.00	72.03	468,797,360.00
3	Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (Dapur, ruangan pasien, laundry, ruangan tunggu dan lain-lain)	1,328,899,465.00	1,208,662,500.00	90.95	120,236,965.00
4	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non DAK)	15,450,620,499.00	14,094,476,833.00	91.22	1,356,143,666.00
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata		1,710,875,000.00	1,692,750,500.00	98.94	18,124,500.00
1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	1,710,875,000.00	1,692,750,500.00	98.94	18,124,500.00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		127,734,041,913.00	85,762,286,333.00	67.14	41,971,755,580.00
1	BLUD	127,734,041,913.00	85,762,286,333.00	67.14	41,971,755,580.00
JUMLAH		218,308,236,913.00	164,524,530,925.00	75.36	53,783,705,988.00

Sumber : RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Total anggaran belanja SKPD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp. 218.308.236.913,00- (Dua ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan realisasinya yang telah dicapai sampai dengan bulan Desember 2015 adalah Rp. 164.524.530.925,00- (seratus enam puluh empat milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau 75.36%.

b) Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan

Roda organisasi belum berjalan optimal karena masih dalam proses pembangunan yang masih belum selesai.

Jumlah SDM masih belum mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama jumlah perawat, dokter spesialis dan lain-lain.

Jumlah peralatan yang ada masih terbatas (belum sesuai standar Permenkes 56 tahun 2014)

c) Pemecahan

- (1) Terus dibangun pemahaman tentang organisasi Rumah Sakit
- (2) Mengupayakan (terutama untuk perawat) penerimaan melalui pekerja off sourcing
- (3) Secara bertahap terus diupayakan melalui usulan dana daerah dan pusat
- (4) Pada tahun 2015 akan dibangun gedung Graha Spesialis melalui dana APBD
- (5) Mencari dukungan ke pemda dan legislatif untuk mencari solusi dalam rangka peningkatan peralatan.

4.1.2.3 Rumah Sakit Jiwa Daerah

1. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Total APBD Provinsi Jambi yang di alokasikan untuk belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah Rp.

37.888.765.217,72,- yang dialokasi untuk belanja operasional 9 (sembilan) Program dalam 20 (dua puluh) kegiatan adapun uraiannya adalah sebagai berikut ;

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- f) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- h) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

b. Program Evaluasi dan Pengendalian Data Tenaga Kesehatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

c. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

e. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

- a) Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
- b) Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah sakit

f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rumah sakit
- b) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala perlengkapan Gedung kantor Rumah Sakit

g. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan

h. Program Perbaikan Gizi masyarakat

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a) Kegiatan Peningkatan Gizi masyarakat

i. Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

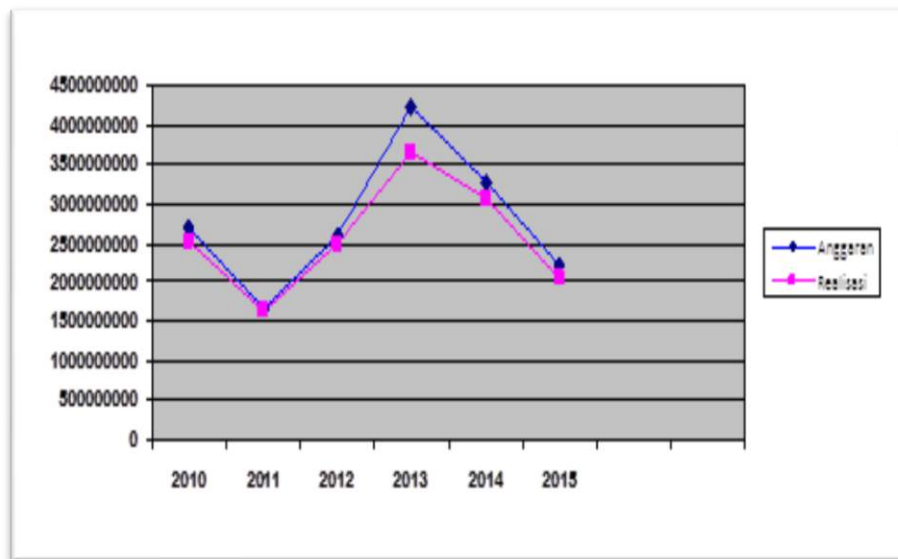
- a) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Arah kebijakan ini adalah guna terselenggaranya pelayanan administrasi yang baik.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.223.398.858,- anggaran tersebut dibelanjakan untuk membiayai 9 (sembilan) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp 2.058.288.829,- (92,57 %) dan realisasi fisik nya 100 % .



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

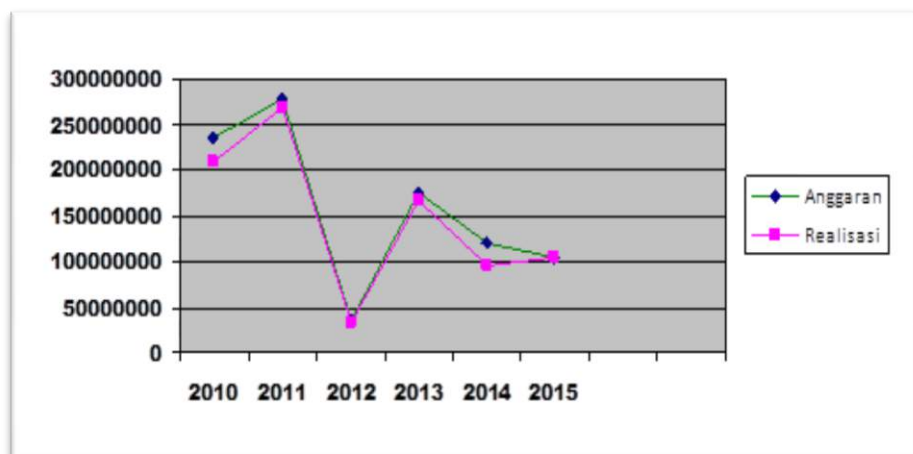
Gambar 4.28 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

Dari uraian diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp 165.110.028,-(7,43%) hal ini terjadi akibat adanya kelebihan anggaran biaya jasa pengiriman surat, pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik serta pembayaran jasa kebersihan /clening sevis (Khusus jasa kebersihan harga yang di tawarkan oleh pihak ke tiga lebih rendah dari yang di alokasikan).

b. Program Evaluasi dan Pengendalian Data Tenaga Kesehatan

Program ini bertujuan untuk menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Alokasi dana untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp.104.175.680,- dengan realisasi sebesar Rp. 103.755.000,- (99,60 %) dengan realisasi fisik 100 %.



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

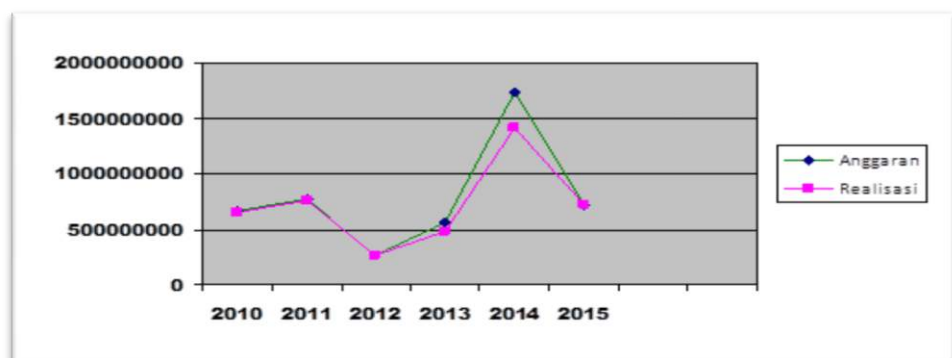
Gambar 4.29 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

Dari uraian diatas terdapat sisa anggaran sebesar Rp 420.680,- hal ini terjadi akibat adanya potongan harga (diskon) dalam pembiayaan diklat- diklat tersebut.

c. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia habis pakai sebagai salah satu penunjang pokok dalam upaya penyembuhan pasien.

Anggaran yang disediakan untuk penyediaan obat-obatan dan bahan kimia habis pakai ini adalah sebesar Rp. 716.661.173,- dengan realisasi sebesar Rp. 716.661.173,- (100 %), realisasi fisik 100 %



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Gambar 4.30 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

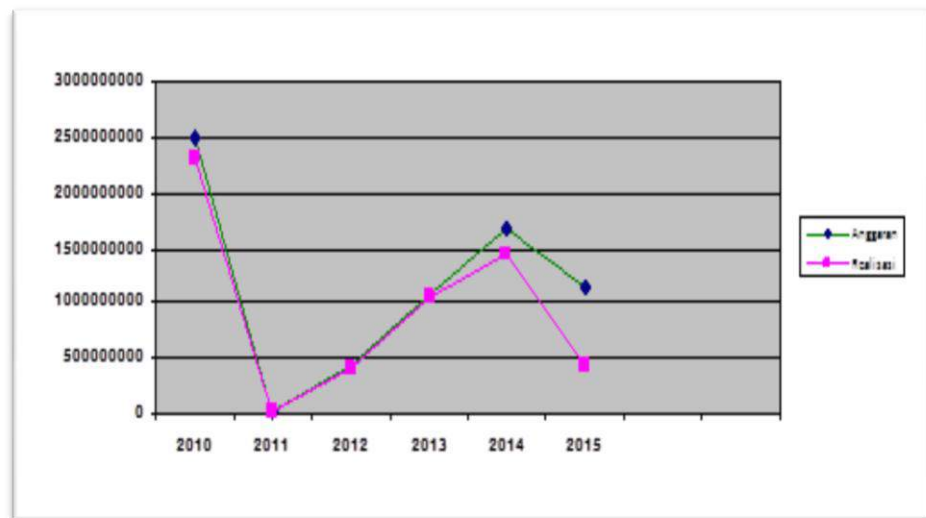
Dari uraian diatas semua dana terpakai sesuai dengan peruntukannya karena pembeliannya berdasarkan e-catalog.

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah upaya pelayanan kesehatan yang prima khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya cakupan upaya kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan penunjang.

Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp.1.149.638.800,- dengan realisasi sebesar Rp.439.139.600- (38,20 %) dengan realisasi fisik sebesar 71,83 % Kegiatan yang dilaksanakan mencakup : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya kegiatan penjarangan korban pasung, intergrasi kesehatan jiwa, dan dropping pasien ke keluarganya.



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Gambar 4.31 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

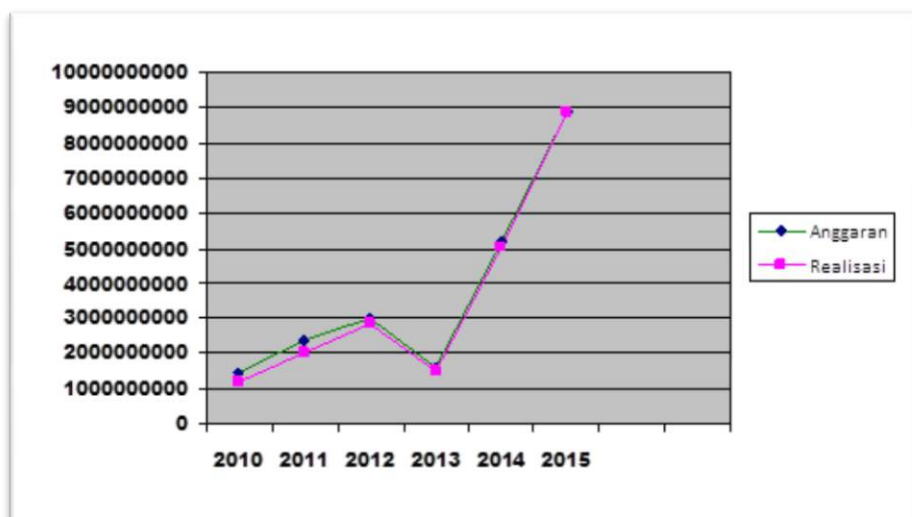
Dari uraian diatas terlihat anggaran yang terpakai untuk kegiatan ini hanya 38.20 % sedangkan anggaran yang tersisa 61,17 % sedangkan capaian fisik nya masih kurang 28,17 % . Hal ini di sebabkan oleh karena adanya jeda waktu sekitar 4 bulan tidak melaksanakan kegiatan yaitu pada bulan Januari dan february 2015 di saat APBD Provinsi masih dalam tahap

penyelesaian Adminitrasi, yang kedua pada pada bulan September dan Oktober 2015, disaat APBD- P mengalami keterlambatan persetujuannya oleh kemendagri.

e. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang upaya pelayanan kesehatan prima. Indikator Kinerja program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima.

Alokasi belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.847.040.666,- dengan realisasi sebesar Rp.8.459.780.000,- (95,62 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

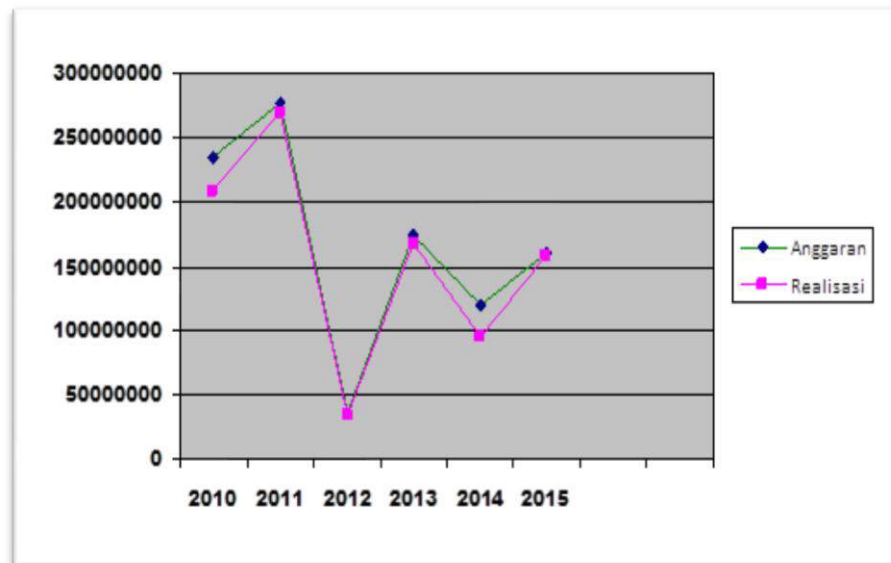
Gambar 4.32 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015 :

Dari uraian diatas semua anggaran yang terpakai sudah sesuai dengan peruntukannya, hanya saja masih ada dana tersisa sebesar Rp. 387.260.666.-, hal ini terjadi dikarenakan adanya penawaran yang lebih rendah oleh pihak ke tiga pada saat lelang .

f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit serta pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 160.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.157.849.459,- (98,53 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.



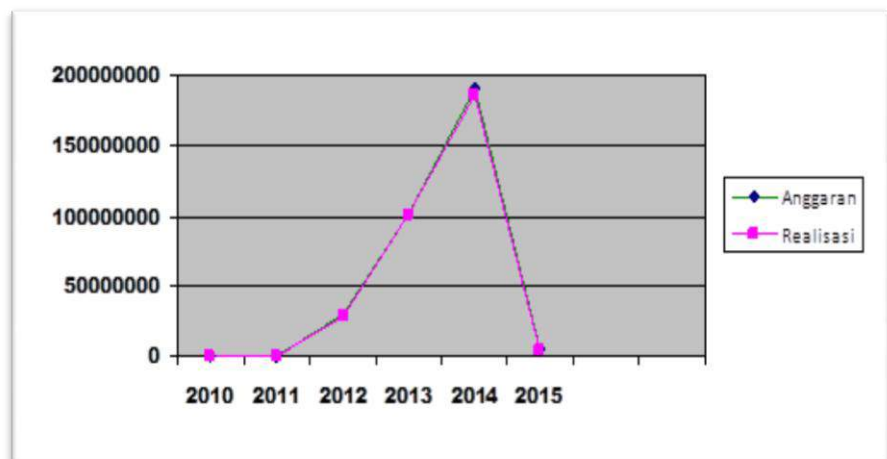
Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Gambar 4.33 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

Dari uraian data diatas, terlihat semua dana yang terpakai sudah sesuai dengan peruntukannya, hanya saja masih ada dana tersisa sebesar Rp 5.143.901,- (5,21%), hal ini terjadi dikarenakan adanya efisiensi / penghematan pemeliharaan pada penggunaan peralatan gedung kantor RS)

g. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan ini adalah terselenggaranya promosi dan sosialisasi program kesehatan jiwa. Dilakukan melalui media cetak dan elektronik, pembuatan pamflet dan pameran. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.940.640,- (98,81 %) dengan realisasi fisik 100 %.



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

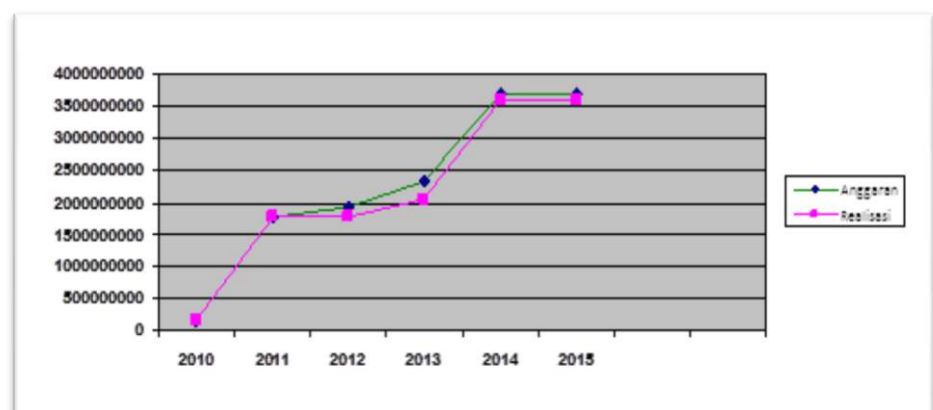
Gambar 4.34 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015 :

Dari uraian diatas semua anggaran yang terpakai sesuai dengan peruntukannya dan masih tersisa sebesar Rp 59.360,- (1,19 %).

h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Arah kebijakan ini adalah terselenggaranya kebutuhan makan dan minum pasien sesuai standar gizi.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.685.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.592.359.290,- (97,49 %) dengan realisasi fisik 100 %.



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

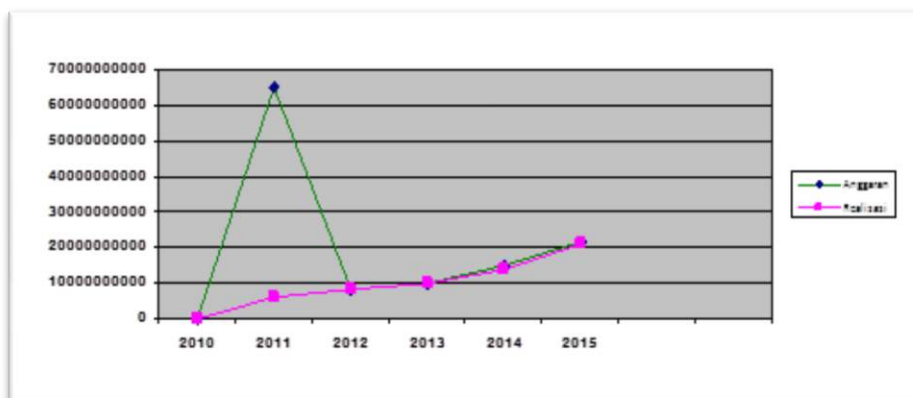
Gambar 4.35 Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

Dari uraian diatas, dapat disampaikan bahwa semua dana yang terpakai sudah sesuai dengan peruntukannya dan masih tersisa sebesar Rp 98. 306.710,- (2,17%). Hal ini di sebabkan oleh adanya penawaran yang lebih rendah dari nilai harga yang di lelangkan.

i. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Arah kebijakan ini adalah Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesarRp. 21.714.311.217,72,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.979.057.462,- (96,61 %).



Sumber : RSJ Provinsi Jambi

Gambar 4.36Perbandingan kinerja tahun 2010 – 2015

Dari uraian diatas ternyata semua dana yang disediakan sudah terpakai sesuai dengan peruntukannya dan tersisa sebesar Rp 735. 253.755.72,- (3,49 %) hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kegiatan dengan biaya lebih rendah dari yang di anggarkan.

3. Permasalahan dan solusi :

Program Upaya Kesehatan Masyarakat tidak tercapai,realisasi keuangan 38,2% dan Realisasi Fisik 71.83%. hal ini disebabkan oleh :

- a. Terdapat kesalahan dalam Entry DPA serta tidak ada lumpsum untuk petugas penjangiran dan pengembalian pasien

korban pasung. Upaya yang dilakukan adalah mengajukan revisi melalui APBD Perubahan Tahun 2015, supaya program tersebut bisa dilaksanakan.

- b. Disamping itu terdapat penambahan kegiatan (Kegiatan Integrasi dan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa kepada masyarakat) serta penambahan anggaran, awalnya Rp. 271.637.000. ditambah melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 878.000.800. totalnya menjadi Rp. 1.149.638.800.
- c. Pada rencana awal pengajuan penambahan kegiatan dan anggaran (Juli 2015) dijadwalkan untuk pelaksanaan selama 4 bulan (Agustus s/d November).
- d. Namun tidak bisa terlaksana secara maksimal karena keterbatasan waktu karena DPA Perubahan baru diterima Oktober 2015, sehingga kegiatan efektif dilaksanakan hanya 2 bulan.

Dengan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka untuk perbaikannya kami harap dapat dipercepat keluarnya DPA sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat dicapai dan terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih banyak pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, baik melalui program/kegiatan yang sama yang dilakukan secara berkesinambungan maupun program/kegiatan lain, dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Dalam proses pembenahan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

- a. Perlunya pengembangan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan suatu kegiatan
- b. Penyusunan perencanaan program/kegiatan yang dilakukan secara lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama
- c. Perlunya peningkatan komunikasi, koordinasi dan transparansi dari semua pihak, terutama para pejabat yang berwenang mengambil keputusan sehingga pelaksanaan program/kegiatan berlangsung dengan baik, dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat.
- d. Perlunya pengawasan yang berkesinambungan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal dan hasilnya dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan tindak lanjut.

4.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan khususnya di Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Saat ini, Infrastruktur adalah salah satu pengeluaran pembangunan terbesar di samping pendidikan dan kesehatan, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja pembangunan infrastruktur yang dilakukan diharapkan akan mampu mendorong tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu memberikan peluang-

peluang bagi peningkatan investasi serta ekspor yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015, menempatkan Infrastruktur ke-PU an sebagai salah satu prioritas dalam pengalokasian yang terbesar dengan yang menitikberatkan pada kewenangan Provinsi dalam pemenuhan akses jalan dan jembatan yang mendukung aktifitas perekonomian tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, juga meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, penataan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan seperti pembanngunan jaringan air bersih, drainase perkotaan dan persampahan. Selanjutnya untuk menganisipasi terhadap permasalahan yang sering terjadi saat ini seperti longsor dan banjir tentunya perlu dilakukan penanganan yang berfungsi sebagai upaya pengendalian daya rusak air pada sub-sub daerah aliran sungai melalui upaya pemulihan dan menormaslisasi sungai. Sementara itu, juga dilakukan untuk upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana utilitas dan pengurangan backlog perumahan di Provinsi Jambi. Sebagai penguatan Sumber Daya manusia trampil khususnya tenaga kerja di bidang konstruksi juga terus ditingkatkan dengan diberikan berbagai pelatihan dan peningkatan kemampuan tukang yang bersertifikat. Adapun pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jambi tahun 2015 sesuai dengan penanganannnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sekretariat

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum tentunya tdak terlepas dari peningkatan kualitas dan inerja aparatur. Melalui Sekretariat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengaturan tata laksana kerja dan operasional kantor telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan peningkatan SDM Aparatur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi memiliki Struktur Organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta

Karya, Bidang Perumahan, Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang, UPTD Balai Pengujian, UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPTD Jasa Konstruksi yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tanggal 19 Desember 2011.

Secara lengkap alokasi anggaran untuk lingkup kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.85
Program/Kegiatan Sekretariat dan Alokasi - Realisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Bagian Sekretariat	12.852.887.383	11.971.556.531	93,14
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>			
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.600.000	74.794.100	88,41
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.014.400.000	895.327.624	88,26
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	837.190.500	635.586.500	75,92
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	797.600.000	780.976.000	97,92
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.254.678	200.139.850	99,94
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.825.422	150.904.700	99,39
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	357.600.000	355.515.000	99,42
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	120.000.000	120.000.000	100
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	128.800.000	128.500.000	99,77
Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	862.160.000	860.244.595	99,78
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.463.912.475	1.399.298.475	95,59
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	631.964.508	585.950.000	92,72
Kegiatan Pengadaan Komputer	544.550.000	418.520.000	76,86
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.382.600.000	2.367.610.000	99,37
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	666.098.000	567.047.540	85,13
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	451.650.000	443.983.300	98,3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	40.000.000	39.925.000	99,81
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	266.000.000	190.810.000	71,73
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	655.600.000	615.518.127	93,89
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	222.600.000	221.495.400	99,5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.800.000	150.363.250	99,71
Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat	79.800.000	79.007.950	99,01

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi	206.081.800	190.257.200	92,32
Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan	460.400.000	428.790.620	93,13
Kegiatan Analisa Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	76.400.000	70.991.300	92,92

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

2. Binamarga

Bina Marga yang merupakan bidang yang bertanggung jawab terhadap implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang bertujuan meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pendistribusian kegiatannya berdasarkan pendekatan wilayah yang terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui program dan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan di Provinsi Jambi sepanjang 1.504,929 kilometer, serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan alokasi dana pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 409.287.999.100,00 dengan penyerapan sebesar Rp. 394.201.044.753,00 atau sebesar 96,31%. Secara lengkap alokasi anggaran bidang kebinamargaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.86
Program/Kegiatan Bidang Kebinamargaan dan Alokasi - Realisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Bidang Bina Marga	409.287.999.100	394.201.044.753	96,31
<i>Program pembangunan jalan dan jembatan</i>			
Kegiatan Pembangunan jalan di wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	12.286.169.000	11.683.311.000	95,09
Kegiatan Pembangunan Jalan di wilayah II (Kab. Tanjab Timur dan muara jambi)	41.541.684.000	39.592.437.600	95,31
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Bungo dan Tebo)	10.402.219.000	10.075.633.000	96,86
Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah I dan II (Kab. Tanjabbar, Tanjabtim,dan ma.jambi)	42.456.653.000	41.050.762.000	96,69
Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah IV	17.450.633.000	16.807.208.500	96,31
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Batanghari dan ma.Jambi)	28.943.388.000	27.591.733.000	95,33
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah V (Kab. merangin)	13.351.847.000	12.767.148.000	95,62
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. kerinci)	59.319.675.000	57.386.388.000	96,74
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. sarolangun)	42.966.277.000	41.780.191.000	97,24
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.)	15.723.278.000	14.926.645.103	94,93
Kegiatan Pembangunan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	30.919.528.000	29.936.199.000	96,82

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Ma. Jambi)	22.233.369.000	21.274.340.500	95,69
<i>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</i>			
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan jalan wilayah perkotaan	42.657.439.100	41.128.999.650	96,42
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah III (Kab. Bungo dan Tebo)	18.959.683.000	18.291.487.000	96,48
Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Provinsi Jambi	10.076.157.000	9.908.561.400	98,34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Program dan kegiatan sebagaimana diatas, bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan dalam kondisi jalan mantap dan pemenuhan kebutuhan dan kelayakan jembatan sebagai penghubung akses jalan di Provinsi Jambi. Tahun 2015, melalui Dinas Pekerjaan Umum telah dilaksanakan kegiatan - kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat) dengan capaian pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4.87
Pembangunan jalan di Wilayah I

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jln merlung – Lbk kambing – Simp.Niam	2.00	2.00	5.00	5.00
Jln.s.saren–T.nilau- senyerang-bts.Riau	1.50	1.50	5.00	5.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 2) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur) dengan capaian pelaksanaan kegiatan

Tabel 4.88
Pembangunan Jalan di Wilayah II

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jln.Sp.lagan-Sp.zona lima(sp.plabi)	1.50	1.50	10.00	0
Jln.Sp.Zona lima-Ma.sabak/dermaga	3.00	3.00	10.00	0
Jln.Ds.Rantau rasau-Ds.Simpang	4.60	2.55	0	0
Jln.batas Tanjabtim-Zona V (sp.plabi)	2.50	1.50	5.00	7.40
Jln.Ds.simpang-ujung jabung	1.70	1.70	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 3) Kegiatan Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Bungo dan Tebo) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.89
Pembangunan Jalan di Wilayah III

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jln.Ma.Bungo-Peninjauan-Junction-Rantau Bts.Sumbar	2.50	2.50	10.00	10.00
Jln.Peninjauan-Lbk.Mengkuang-TKA (bts.Sumbar)	2.50	2.50	10.00	10.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 4) Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah II,VI dan VII (Kab. Merangin, kerinci, dan Sarolangun) dengan capaian pelaksanaan kegiatan

Tabel 4.90
Pembangunan Jembatan di Wilayah II, VI, VII

Ruas Jembatan	PanjangJembatan Efektif (m')		PanjangJembatan fungsional (m')	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jembatan Sei.Keradak	40	40	0	0
Jembatan Tumbuk	15	15	0	0
Jembatan Samsuddin Uban (Lanjutan)	100	100	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 5) Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VIII dan IX (Kota Jambi, Kab.Batanghari dan Kab.Tanjabt看) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.91
Pembangunan Jembatan di Wilayah VIII dan IX

Ruas Jembatan	PanjangJembatan Efektif (m')		PanjangJembatan fungsional (m')	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jembatan Desa Alang-alang	45	45	0	0
Jembatan Lambur	50	50	0	0
Jembatan SK.10 Rantau Rasau	20	20	0	0
Jembatan Gantung Ds. Hajran-Paku Aji kec.Batin XXIV	175	175	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 6) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.92
Pembangunan Jalan Wilayah IV

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jln.Sei.Duren-Sei.Buluh	1.00	1.00	8.00	8.00
Jlinsimp.Penerokan-Sei.Bahar	1.50	1.50	8.00	8.00
Peningkatan struktur jalan Tempino-Ma.Bulian	2.50	2.50	10.00	10.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 7) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.93
Pembangunan Jalan di Wilayah VI

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penanganan longsor Jalan Sp.PI.Rengas-Ma.Siau-Dsn.Tuo-Jangkat	0	0	0	0
Jln.Sp.kodim-Sp.PI.Rengas Ulu	4.75	4.75	6.00	6.00
Jln.Sp.Margo/Sumber Agung-Ma.Delang	1.50	1.50	5.00	5.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 8) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Kerinci) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.94
Pembangunan Jalan di Wilayah VI

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Jalan Bts.Kerinci - Sanggaran Agung-S.Penuh (MYC)	38.00	38.00	35.95	35.95
Jln Sei.Penuh - Bts.Sumbar (Tappan)	3.50	3.50	0	0
Jln Sei.Penuh-Siulak Deras	5.00	5.00	5.00	5.00
Jln Siulak Deras-Bts.Sumbar/letter-W	2.00	2.00	5.00	5.00
Jalan keliling danau Kerinci (Sanggaran Agung-Jujun-Sei.Penuh Jujun-Lempur)	2.00	2.00	5.00	5.00
Pembangunan Jalan Kelok Sago-Lempur/Sangg.Agung	2.50	2.50	0	0
Penanganan longsor JI.Bangko-Bts.Kerinci-Sei.Penuh				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 9) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. Sarolangun) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.95
Pembangunan Jalan di Wilayah VII

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Sp.Pelawan-Sei.Salak	2.00	2.00	8.00	8.00
Jalan Sei.Salak-Pkn.Gedang/Btg.Asai	1.00	1.00	10.00	10.00
Penanganan longsor Jln.Sp.Pelawan-Sei.Salak-Ma.Talang	25	25	0	0
Pembukaan jalan Ma.Talang-Sei.Keradak-Beringin Tinggi-Jangkat	2.50	2.50	0	0
Jln. Pauh-Air Hitam-Bts.Kab.Sarolangun/ Kab.Merangin	1.00	1.00	5.00	5.00
Jln.Pauh-Lbk.Napal-Sipintun-Bts.Sumsel	1.30	1.30	5.00	5.00
Jalan Ds.Lantak Seribu-Ds.Bangun Jaya	1.25	1.25	0	0
Jalan Mandiangin-Butang Baru	3.00	3.00	5.00	5.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 10) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.96

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perencanaan Jalan Sp.Tlg.Duku-Ds.Kemingking-Ds.Rukam-Ds.Sogo-Suak Kandis (akses Ujung Jabung-DED)	68.00	68.00	0	0
Pembuatan Leger Jalan Sp.Pl.Rengas-Ma.Siau-Dsn.Tuo-Jangkat	144.48	144.48	0	0
Perenc.Jalan Ma.Tebo-Simp.Logpon (DED)	59.306	59.306	0	0
Perenc.Jalan Sp.Logpon-Tanjung (DED)	50.860	50.860	0	0
Perencanaan Jembatan Desa Baru	45	45	0	0
Perencanaan Jembatan Lubuk Raman	50	50	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 11) Kegiatan Pembangunan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.97

Pembangunan Jalan bersumber dana DAK

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Sei.Penuh-Bts.Sumbar/Tappan	7.50	7.50	0	0
Jalan Sp.Logpon-Tanjung	4.50	4.50	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 12) Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.98
Pembangunan jalan di Wilayah III

Ruas jalan	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan struktur Jalan Sp.Pudak-Suak Kandis	3.50	3.50	8.00	8.00
Jalan Ds.Danau Lamo-Bts.Tanjabt看	3.00	3.00	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Terhadap Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan bertujuan untuk memelihara kondisi jalan dalam kondisi jalan mantap. Melalui Program ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Wilayah Perkotaan dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.99
Rehab/Pemeliharaan jalan wilayah perkotaan

Ruas jalan dipelihara	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan akses bandara Sultan Thaha Jambi	0.45	0.45	0	0
Pening. jalan Sp.Tugu PKK-Jl.RB.Siagian - Jln.Kol.Pol.M.Thaher	0.45	0.45	0	0
Peningkatan Jalan Arif Rahman Hakim-Jln. A.Manaf (2 Jalur)	1.80	1.80	0	0
Jalan Bagan Pete	1.50	1.50	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 2) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi

Tabel 4.100
Rehab/Pemeiharaan jalan dan Jembatan di jalan Provinsi

Ruas jalan yang dipelihara	Panjang Jalan Effektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rutin Jalan Merlung-Lubuk Kambing-Sp.Niam (Tebas bayang)	0	0	72.881	72.881
Rutin jalan Sei.Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts.Riau (Tebas bayang)	0	0	38.491	38.491
Rutin jalan Sp.lagan-Sp.zona lima (sp.Pelabi) (Tebas Bayang)	0	0	33.251	33.251
Rutin jalan Sp.zona lima-Ma.Sabak/Dermaga (Tebas bayang)	0	0	30.141	30.141
Rutin jalan sp.Pudak-Suak kandis (Tebas bayang)	0	0	67.539	67.539
Rutin jalan Ma.Bungo-Peninjaun-Junction-Rantau ikil-Bts.Sumbar (Tebas bayang)	0	0	58.533	58.533
Rutin Jalan Tempino- M.Bulian (Tebas bayang)	0	0	32.549	32.549
Rutin jalan Sp. Penerokan – Sei.Bahar (Tebas bayang)	0	0	28.283	28.283
Rutin jalan Sei.Duren-Sei.Buluh (Tebas bayang)	0	0	31.497	31.497
Rutin Jalan Bangko-Bts.Kerinci (Tebas bayang)	0	0	66.799	66.799
Rutin jalan Sp.Pulau Rengas – Ma.Siau-Dsn.Tuo-Jangkat (Tebas bayang)	0	0	144.448	144.448
Rutin jalan keliling Danau Kerinci (sang.Agung-Jujun-Sei.Penuh, Jujun-Lempur) Tebas bayang	0	0	42.003	42.003
Rutin Jalan Sp.Pelawan-Sei.Salak (Tebas bayang)	0	0	61.288	61.288
Rutin jalan Sei.Salak-Pekan Gedang/batang asai-Ma.Talang (Tebas bayang)	0	0	30.845	30.845
Rutin jalan Ma.Tebo-Sp.Logpon (Tebas bayang)	0	0	59.306	59.306
Rutin jalan Sp.Logpon-Padang Iamo-Tanjung (Tebas bayang)	0	0	50.860	50.860
Rutin jalan sp.Sawmil-Sp.Logpon (Tebas bayang)	0	0	28.996	28.996
Rutin jalan wilayah perkotaan	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

- 3) Untuk rehabilitasi/pemeliharaan jembatan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.101
Rahabilitasi/Pemeliharaan Jembatan di Provinsi Jambi

Ruas Jembatan yang dipelihara	Panjang Jembatan		Panjang Jembatan	
	Efektif (m')		fungsional (m')	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rehab/Pemel Jembatan Jujun Kab.Kerinci	0	0	17.20	17.20
Rehab/Pemel Jembatan ruas jalan Sangg.Agung-Jujun-Lempur (Kab.Kerinci)	0	0	47	47
Rehab/Pemel Jembatan ruas Sei.Penuh-Siulak Deras (Kab.Kerinci)	0	0	35	35
Rehab/Pemel Jembatan ruas jalan Siulak Deras-Bts.Sumbar/ Letter W (Kab.Kerinci)	0	0	75	75
Rehab/Pemel Jembatan Gantung Pulau Sangkar-1 (Kab.Kerinci)	0	0	110	110
Rehab/Pemel Jembatan Gantung Pulau Sangkar-2 (kab. Kerinci)	0	0	105	105
Rehab/Pemel Jembatan Ruas jalan Sp.Lagan-Sp.Pelabi/Zona V (Kab.Tanjatim)	0	0	55	55
Rehab/Pemel Jembatan Ruas Jalan Sp.Pelabi/Zona V – Ma.Sabak (Kab.Tanjatim)	0	0	46	46
Rehab/Pemel Jembatan ruas jalan Sei.Manau-Bts.Kerinci (Kab.Merangin)	0	0	75	75
Rehab/Pemel Jembatan Zona V-2	0	0	20	20
Rehab/Pemel Jembatan Sei.Lubuk Napal (Kab.Sarolangun)	0	0	32.0	32.0
Rehab/Pemel Jembatan di jalan Provinsi Jambi (Swakelola)			130	
	0	0		130
Rehab/Pemel Jembatan Sei.Jelatang	0	0	120	120
Rehab/Pemel Jembatan Koto Boyo dan Turap/Bronjong	0	0	45	45
Rehab Jembatan Tempino kecil	0	0	20.5	20.5
Rehab/Pemel Expansion Join Jembatan Batanghari II	0	0	56	56

Sumber : Hasil LPPK Bidang Bina Marga, Des 2015

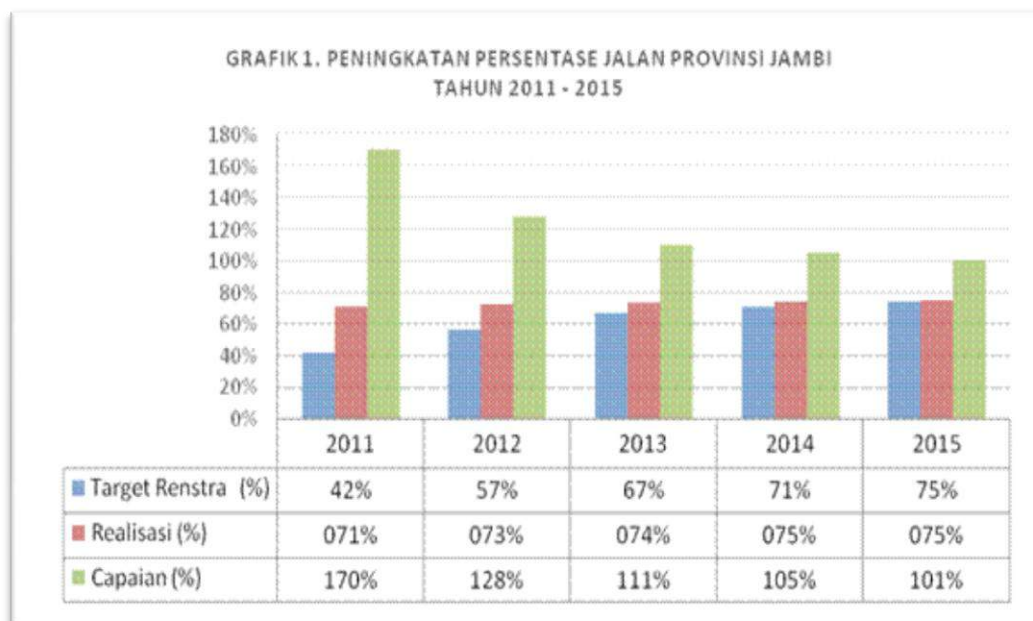
- 4) Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah III (Kab.Bungo dan Tebo) dengan capaian pelaksanaan kegiatannya

Tabel 4.102
Rehab/Pemeliharaan Jalan di wilayah III

Ruas jalan dipelihara	Panjang Jalan Efektif (km)		Panjang Jalan fungsional (km)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jln.Ma.Tebo-Sp.Logpon	1.50	1.50	5.00	5.00
Jln.Simp. Logpon - Padang Iamo -Tanjung	2.50	2.50	8.00	8.00
Jln. Sp.Sawmil-Sp.Logpon	3.00	3.00	10.00	10.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Dari keseluruhan penanganan jalan dan jembatan tersebut, dengan panjang jalan di Provinsi Jambi sepanjang 1.504,929 kilometer telah mampu mencapai kondisi mantap 75,40 % yang menunjukkan bahwa berdasarkan target RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 kondisi mantap 75 % telah terpenuhi dan manya terjadi peningkatan 40 %. Sedangkan untuk jembatan juga telah memberikan dampak positif dari panjang jembatan keseluruhan 6.269,15 meter, telah mampu ditangani hingga tahun 2015 yaitu pembangunan baru sebanyak 6 unit dengan panjang 175 meter. Sedangkan untuk jembatan yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan adalah seluruh jembatan yang ada di Provinsi Jambi.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Gambar 4.37 Peningkatan Persentase Jalan Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

Dalam proses perubahan status jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan usulan Provinsi Jambi sepanjang 774 Km yang merupakan jalan provinsi (statregis Nasional) dan jalan-jalan strategis lainnya telah disetujui menjadi jalan nasional berdasarkan SK. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional pada tanggal 25 Mei 2015, menjadi jalan Nasional sepanjang 375,03 Km sehingga jalan Provinsi dari 1.504,929 Km berubah menjadi 1.129,905 Km. Namun dalam penanganannya untuk ruas-ruas jalan yang telah berubah status tersebut masih dalam penanganan bersama yang nantinya akan ditangani secara keseluruhan melalui APBN pada tahun 2017. Khusus untuk jalan menuju ke rencana Pelabuhan Ujung Jabung, hingga saat ini telah dilakukan penanganan baik dari APBD Provinsi dengan pembebasan tanah dan peningkatan struktur. Sedangkan melalui APBN juga secara bertahap melaksanakan penanganan sambil menunggu selesainya pembebasan tanah.

Selain itu, dalam mendukung konektifitas struktur jaringan jalan Provinsi dan Jalan Nasional ke Jalan Kabupaten/Kota juga dilakukan penanganan yang antara lain pembangunan Jembatan Syamsudin Uban di Kabupaten Merangin, penanganan Jembatan Kotoboyo di Kabupaten Batanghari dan Pengananan Jalan Kabupaten yang sangat strategis mendukung akses distribusi dan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung salah satu akses publik skala nasional yaitu Bandara St. Thaha telah dilaksanakan pembebasan lahan dan peningkatan struktur pada jalan kewenangan Kota menuju ke Bandara. Memang dalam penanganan ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur untuk memperkuat konektifitas struktur ruang namun secara bertahap akan terus dilakukan.

3. Sumber Daya Air

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendung, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya untuk memberikan jaminan pelayanan terhadap lahan irigasi seluas 6.029 Ha (Permen PUPR No.04/PRT/M/2015 tanggal 18 maret 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi daerah irigasi, bendung dan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi serta pengawasan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan pada beberapa Kabupaten/Kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya pertanian secara luas.

Selain itu, masalah pengendalian daya rusak air juga merupakan prioritas dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program turap/talud/bronjong melalui kegiatan perencanaan survey, investigasi dan desain (SID), pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengawasan turap, penahan tebing, Checkdam, dan pelindung tebing. Target capaian pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengantisipasi

terjadinya banjir dan longsor dilakukan secara bertahap setiap tahun. Secara keseluruhan, target capaian dengan melakukan perencanaan survey, investigasi dan desain (turap/talud/bronjong) selama 5 (lima) tahun sepanjang 6.400 meter, sumur air dalam sebanyak 30 lokasi, sumber air baku sebanyak 2 unit dan normalisasi sungai sepanjang 21.100 m. Sedangkan dalam implementasinya baru mampu disusun rencana desain sepanjang 4.500 m (70,31%) yang meliputi pembangunan turap, penahan tebing sungai, pelindung tebing sungai dan lokasi sumur air dalam. Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku lebih diarahkan pada pembangunan sumur dalam pada wilayah-wilayah sulit air bersih seperti pembangunan sumur di wilayah timur Provinsi Jambi.

Dalam rangka pemenuhan target-target di atas, dalam tahun 2015 bidang Sumber Daya Air memperoleh serapan alokasi di kegiatan – kegiatan prioritas pendukung RPJMD tahap ke-2 tahun 2011 – 2015 ini, antara lain :

a. Untuk pembangunan turap/talud/bronjong di wilayah I (ulu Provinsi Jambi) penyerapan anggaran rata – rata 95% dan 100% terlaksana fisiknya dilapangan, antara lain pada pekerjaan:

- 1) Lanjutan pembangunan pelindung tebing di Dusun baru Kab.Sarolangun dan Desa Muara Kibul Kec.Tabir Barat Kab. Merangin.
- 2) Pembangunan pelindung tebing di Dusun Pelayang Kab.Sarolangun, Desa Sungai Keramat Kec.Cermin Nan Gadang Kab.Sarolangun, Desa Pulau Tebakar Kec.Tabir Barat Kab.Merangin, kec.Tabir ulu Kab.Merangin, Sungai Batang Semurup Kab.Kerinci, Sungai Betung Kuning/Hiang Kab.Kerinci, Pasar Siulak Gedang Kab.Kerinci, Kel.Sarolangun Kembang Kab.Sarolangun, Desa Sungai Manau Kab.Merangin, Desa Paniban Baru Kec.Batang Asai Kab.Sarolangun, Desa Pulau Lebar Kec.Tabir Barat Kab.Merangin, Desa Lubuk Bumbun Kec.Margo Tabir Kab.Merangin, Desa Sungai Ampar Kec.Tabir Barat Kab.Merangin, Desa Jangkat Kab.Merangin, Teluk Rendah Ilir Kab.Tebo, Sungai Batang Sangkir Tanah

Kampung Kota Sungai Penuh, dan Desa Timbolasi Batin lili Ulu Kab.Bungo.

- 3) Pembangunan penahan tebing di Tanjung Menanti Kab.Bungo, Lempur Gunung Raya Kab.Kerinci, Sanggaran Agung Danau Kerinci Kab.Kerinci, Sungai Batang Bungkal Kota Sungai Penuh, dan Desa Benik Danau Kerinci Kab.Kerinci.
- b. Sedang Untuk pembangunan turap/talud/bronjong di wilayah II (ilir Provinsi Jambi) penyerapan anggaran rata – rata 95,33% dan 100% terlaksana fisiknya dilapangan, antara lain pada pekerjaan :
- 1) Lanjutan pembangunan pelindung tebing di sijenjang dan danau sipin Kota Jambi.
 - 2) Lanjutan pembangunan penahan tebing di desa matagual dan desa kembang tanjung Kec.Mersam Kab.Batanghari.
 - 3) Pembangunan penahan tebing di kawasan pasar angso duo Kota Jambi, desa suangai puar Kab.Batanghari, desa kunangan taman rajo Kab.Muaro Jambi.
- c. Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi pada tahun 2015 ini lebih terfokus pada :
- 1) Rehab DI sungai tanduk Kab.Kerinci serapan 92% terlaksana fisik 100%.
 - 2) Rehab DI sungai koto teguh Kab.Merangin serapan 98% terlaksana fisik 100%.
 - 3) Rehab DI sungai suban Kab.Tanjab Barat serapan 96% terlaksana fisik 100%.
 - 4) Peningkatan jaringan irigasi di DI sungai batang uleh Kab.Bungo (DAK) serapan 92% terlaksana fisik 100%.
- d. Sedang untuk rehab jaringan irigasi rawa pada tahun 2015 ini lebih terfokus pada:
- 1) DI rawa Kota harapan Kab.Tanjab Timur serapan 97% terlaksana 100%.
 - 2) DI rawa teluk nilau Kab. Tanjab Barat serapan 96% terlaksana 100%.

- 3) DI rawa Nipah panjang I-II Kab. Tanjab Timur (DAK) serapan 95% dan terlaksana fisik 100%.
 - 4) DI rawa simbur naik Kab. Tanjab Timur serapan 96% terlaksana fisik 100%.
 - 5) DI rawa sungai ayam Kab.Tanjab Timur serapan 94% terlaksana fisik 100%.
 - 6) DI rawa pasar terusan muara bulian Kab.Batanghari serapan 97% terlaksana fisik 100%.
 - 7) DI rawa jambi kecil Muaro Jambi serapan 96% terlaksana fisik 100%.
 - 8) Desa alang-alang Kab. Tanjab Timur serapan 95% terlaksana fisik 100%.
- e. Untuk kegiatan pembangunan sumur-sumur air tanah/air dalam serapan $\geq 95\%$ dan terlaksana fisik 100% di Kab. Merangin, Kab.Bungo, Kab.Sarolangun, Kab.Muaro Jambi, Kab. Batanghari, dan Kab.Tebo.
 - f. Sedangkan untuk pembangunan embung 98% serapan 100% fisik terlaksana d desa teluk rendah Kab.Tebo dan 93% serapan 100% fisik terlaksana di kawasan bandara sultan thaha Kota Jambi.
 - g. Untuk kegiatan normalisasi sungai yang merupakan salah satu indikator kinerja utama pada Renstra Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, kegiatan yang terserap rata $\geq 95\%$ dan pelaksanaan fisiknya 100% pada pekerjaan :
 - 1) Lanjutan pembangunan normalisasi sungai di sungai kandang Kab.Muaro Jambi dan sungai sebapo Kab.Muaro Jambi.
 - 2) Lanjutan pengendalian banjir di palmerah dan sekitarnya.
 - 3) Normalisasi sungai lahan Kab.Tanjab Timur, sungai benit desa sungai buluh Kab.Bungo, sungai sako rimbo bujang Kab.Tebo, sungai tuan luak kec.keliling danau Kab.Kerinci, sungai duren kec.jambi luar Kota Kab.Muaro Jambi, sungai kenali besar Kota Jambi.

Dari alokasi anggaran bidang sumber daya air (SDA) sebesar Rp. 178.014.006.600 yang terserap atau Rp.169.529.868.220 (95,23%) dengan kondisi fisik 99,87%. Rincian persentase serapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

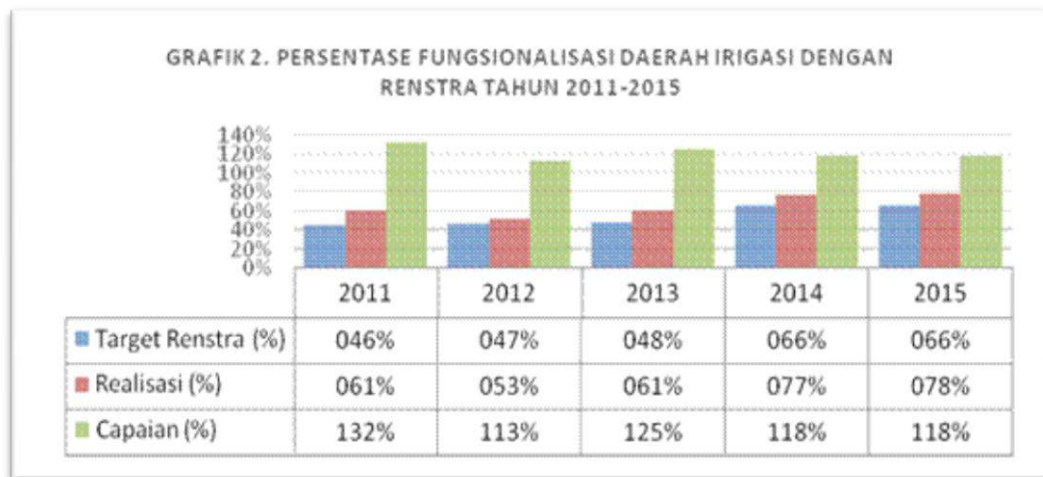
Tabel 4.103
Program/Kegiatan Bidang Sumber Daya Air serta alokasi anggaran dan
realisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Sumber Daya Air	178.014.006.600	169.529.868.220	95,23
Program pembangunan turap/talud/ bronjong			
Kegiatan Perencanaan turap/talud/ bronjong	8.734.642.500	8.296.449.309	94,98
Kegiatan Pembangunan turap/talud/ bronjong	45.673.762.500	43.741.053.300	95,76
Kegiatan Pembangunan turap/talud/ bronjong Wilayah II (ilir Provinsi Jambi)	27.373.106.500	26.095.289.500	95,33
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	3.768.584.700	3.597.124.323	95,45
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	26.301.862.700	24.733.964.600	94,03
Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	5.617.125.700	5.238.765.650	93,26
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan rawa	30.362.345.700	29.048.822.388	95,67
Kegiatan Pengelolaan sumber daya air	2.865.097.300	2.740.310.700	95,64
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			
Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air tanah	10.192.225.700	9.689.867.950	95,07
Kegiatan pembangunan/rehabilitasi danau/waduk/embung	6.632.189.600	6.318.454.800	95,26
Program Pengendalian Banjir			
Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	10.493.063.700	10.029.765.700	95,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan lahan pertanian. Bila

dibandingkan dengan target Persentase fungsionalisasi daerah irigasi yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 realisasi Persentase fungsionalisasi daerah irigasi pada tahun 2015 sebanyak 78,03 persen irigasi mengalami peningkatan sebanyak 0.64persen dari tahun sebelumnya. Persentase luas daerah irigasi fungsional dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi irigasi yang fungsional menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Persentase luas daerah irigasi yang fungsional tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tergambar pada tabel berikut ini.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Gambar 4.38 Persentase fungsionalisasi daerah irigasi dengan Renstra Tahun 2011-2015

Sampai dengan tahun 2015, capaian persentase luas daerah irigasi yang fungsional sudah mencapai sekitar 120,60 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2011-2015 sebanyak 272.93 persen.

Tabel 4.104
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Luas Daerah Irigasi yang
Fungsional dengan Target Renstra 2011-2015

No	Tahun	Persentase luas daerah irigasi fungsional		%
		Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	2011	45.96	60.62	131.90
2.	2012	46.64	52.50	112.56
3.	2013	48.46	60.62	125.09
4.	2014	65.52	77.39	118.12
5.	2015	66.35	78.03	117.60
Jumlah		272.93	329.16	120.60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa terjadi luas daerah irigasi yang fungsional mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015, hal ini disebabkan karena ditunjang oleh pemeliharaan irigasi. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama dengan Dinas Pertanian. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
- 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : realisasi 4704,84 Ha, dimana ada penambahan dari tahun sebelumnya pemeliharaan jaringan irigasi 39 ha di DI sungai Tanduk.

Tabel 4.105
Realisasi Fungsional penanganan DI Potensial Kewenangan
Provinsi Jambi Tahun 2015

No	DI Potensial kewenangan Provinsi (Permen PUPR No.04/PRT/M/2015)		Realisasi DI fungsional (ha)	Capaian
				%
	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)		
1.	Sungai Batang Uleh	2.043	1.800	88
2.	Sungai Tanduk	1.265	1.155	91
3.	Sungai Suban	1.121	1.103,84	98
4.	Sungai Limun Singkut	1.600	646	40
Jumlah		6.029	4.704,84	78,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

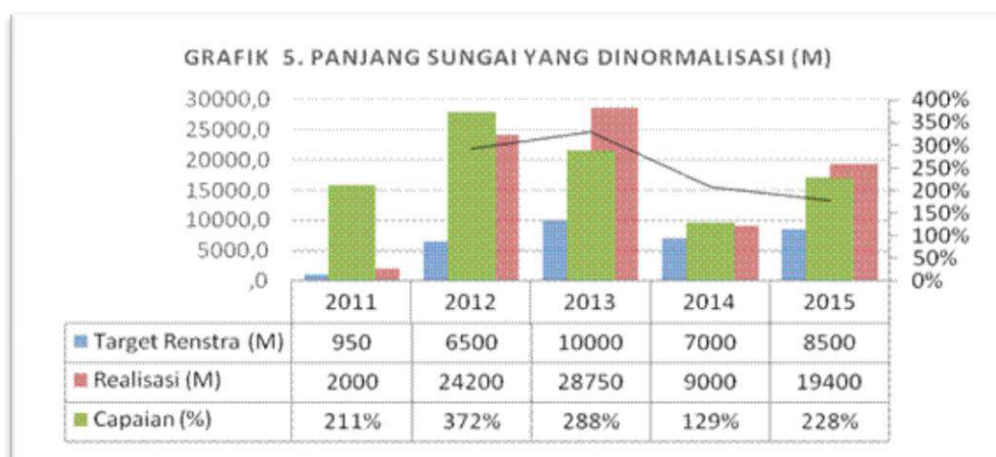
- 2) Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : realisasi 1155 Ha, dimana penggunaan DAK 2015 DI sungai Batang Uleh 560 ha, DI sungai Tanduk 420 ha, dan DI sungai Suban 175 ha.

Tabel 4.106
Realisasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi penanganan DI
Potensial Kewenangan Provinsi Jambi Tahun 2015

No	DI Potensial Kewenangan Provinsi		Realisasi DI di optimalisasi/ dipelihara (ha)
	(Permen PUPR No.04/PRT/M/2015)		
	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	
1.	Sungai Batang Uleh	2.043	560
2.	Sungai Tanduk	1.265	420
3.	Sungai Suban	1.121	175
4.	Sungai Limun Singkut	1.600	0
Jumlah		6.029	1.155

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Panjang sungai yang dinormalisasi (M) pengaruh yang sangat signifikan terhadap luasan wilayah terbebas dari banjir. Panjang sungai yang dinormalisasi (M) sama artinya dengan wilayah terbebas dari banjir. Bila dibandingkan dengan target Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi (M) yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2010- 2015 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 realisasi Panjang sungai yang dinormalisasi (M) pada tahun 2015 sebanyak 19.400 m. Panjang sungai yang dinormalisasi (M) dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi sungai yang dinormalisasi (M) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Panjang sungai yang dinormalisasi (M) tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Gambar 4.39 Panjang sungai yang dinormalisasi (M)

Sampai dengan tahun 2015, Panjang sungai yang dinormalisasi (M) bagi masyarakat sudah mencapai sekitar 253 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2011-2015 sebanyak 32.950 meter. Panjang sungai yang dinormalisasi (M) sampai dengan tahun 2015 akan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Tabel 4.107
Perbandingan Realisasi Kinerja Panjang sungai yang dinormalisasi
(M) di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2011-2015

No	Tahun	Panjang sungai yang dinormalisasi (m)		%
		Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	2011	950	2000	210.53
2.	2012	6500	24200	372.31
3.	2013	10000	28750	287.50
4.	2014	7000	9000	128.57
5.	2015	8500	19400	228
Jumlah		32950	83350	253

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa Panjang sungai yang dinormalisasi (M). Panjang sungai yang dinormalisasi (M) ditandai dengan meningkatnya luasan wilayah terbebas dari banjir. Adapun faktor yang mempengaruhi Panjang sungai yang dinormalisasi (M) yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah serta peranan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada Panjang sungai yang dinormalisasi (M).

4. Cipta Karya

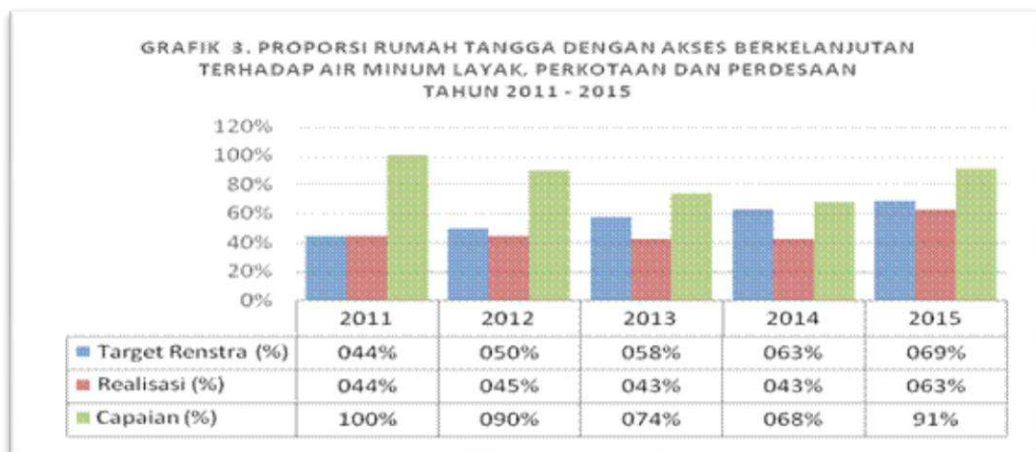
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, diperlukan upaya peningkatan, pengembangan dan penyediaan kebutuhan dasar (basic needs) wilayah. Kebutuhan dasar tersebut berupa infrastruktur yang memadai, sehingga secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan semakin memadainya sarana dan prasarana, diharapkan akan mampu bermanfaat luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2015, Bidang Cipta Karya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 96.779.266.000,- dengan serapan sebesar 90,70% . Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilibat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.108
Program/Kegiatan Bidang Cipta Karya dan alokasi anggaran – realisasi
Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Bidang Cipta Karya	96.779.266.000	87.774.122.972	90,7
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>			
Kegiatan pembangunan gedung kantor	13.391.538.000	11.927.896.000	89,07
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	682.500.000	668.920.000	98,01
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.376.580.000	2.105.587.500	88,6
<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong gorong</i>			
Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong gorong	27.919.263.000	24.557.515.000	87,96
<i>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</i>			
Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	10.946.570.000	9.901.298.768	90,45
<i>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</i>			
kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum	40.548.513.000	37.887.943.600	93,44
<i>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</i>			
kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	914.302.000	724.962.104	79,29

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Menurut data BPS Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 untuk kondisi baik menunjukan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dari tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Gambar 4.40 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Tahun 2011 – 2015

Sampai dengan tahun 2015, Capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sudah mencapai sekitar 84 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2011-2015 sebanyak 283.21 persen. Diperkirakan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan sampai dengan tahun 2015 akan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Tabel 4.109

Perbandingan Realisasi Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2011-2015

No	Tahun	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan		%
		Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	2011	44.32	44.32	100
2.	2012	49.62	44.62	89.92
3.	2013	57.50	42.72*	74.30
4.	2014	62.90	42.72*	67.92
5.	2015	68.87**	62.75*	91
Jumlah		283.21	237.13	84

*) Sumber data BPS, hasil pengolahandata susenas Tahun 2015

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa terjadi proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 meningkat. Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta dan kemiskinan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan yaitu aksesibilitas dan penduduk.

5. UPTD Alat dan Perbekalan

Sebagai salah satu unit kerja yang lebih mengarah pada logistik penanganan infrastruktur, yang antara lain lebih kepada fokus untuk menjaga kondisi jalan mantap dan mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan yang merupakan status jalan provinsi di Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya, UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan lebih kepada mempersiapkan peralatan dan logistik yang berifat penanganan parsial.

Dalam mendorong upaya pencapaian target RPJMD Provinsi Jambidan untuk mengantisipasi tingkat kerusakan jalan yang tinggi, UPTD Alat dan Perbekalan di tahun 2015 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimanabel dibawah ini.

Tabel 4.110
Program/Kegiatan Bidang UPTD Balai Peralatan dan Perbekalanserta
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah	Realisasi Keuangan	
	Anggaran	Keuangan	%
1	2	3	4
UPTD ALKAL	15.244.700.000	12.719.419.202	83,44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			
Kegiatan Pengadaan alat alat berat	4.940.985.000	3.995.042.900	80,86
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat alat berat	2.558.500.000	1.540.236.851	60,2
Kegiatan Optimalisasi Penggunaan alat alat berat	5.847.620.000	5.495.596.766	93,98
kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan optimalisasi penggunaan alat-alat berat	368.054.000	362.082.500	98,38
Kegiatan Pengelolaan logistik dan perbekalan	753.855.360	654.201.000	86,78
Kegiatan Ketatausahaan	775.685.640	672.259.185	86,67

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

UPTD balai peralatan dan perbekalan hingga tahun 2015 telah memiliki alat-alat berat sebanyak 30 unit dan alat-alat pendukung lainnya antara lain adalah Water tank (mobil tangki air). Alat-alat berat yang siap pakai meliputi: Bull Dozer D3 Komatsu sebanyak 1 unit ; Wheel Excavator Hyundai sebanyak 1 unit; Excavator on track PC 200 sebanyak 2 unit; Excavator on track PC 130 Sebanyak 2 Unit; Vibro Roller 10 Ton Sebanyak 3 Unit; Vibro Roller 8 ton sebanyak 1 unit; Wheel Loader Back Hoe sebanyak 4 unit; Vibrator Roller SV 502 D 4 Ton Sakai, Hamm sebanyak 2 unit; Dump Truck Ps 120 Mitsubishi, Hino sebanyak 10 unit; Tronton Hino sebanyak 3 unit; Motor Grader MG 300 Mitsubishi, XCMG, Komatshu sebanyak 4 unit; Finisher Maintenance (Aspalht Finisher) Sebanyak 1 Unit; Crane Kato 20 ton Tahun 1986 Sebanyak 1 Unit; Aspalht Recycling (Daur Aspal) sebanyak 2 unit. Dari kondisi alat berat yang dimiliki saat ini masih

ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan atas kerusakan ringan dan kerusakan berat, sementara kondisi alat tersebut masih layak pakai.

6. UPTD Jasa Konstruksi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang lainnya dalam mempermudah koordinasi dan informasi yang berdampak pada kemajuan, pelayanan publik dan pengawasan serta pengembangan SDM, UPTD Jasa Konstruksimempunyai tugas melaksanakan sebagian wewenang dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pengaturan, Pemberdayaan, Pengawasan dan pelatihan dalam rangka melayani masyarakat jasa konstruksi, menyebarluaskan informasi tentang jasa konstruksi, melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, diseminasi, uji kompetensi, pelatihan konstruksi, dan pelatihan penanggung jawab teknik badan usaha jasa konstruksi klasifikasi kecil dan besar. Sebagai upaya pencapaian target RPJMD Provinsi Jambi dalam meningkatkan kopetensi dan keahlian tenaga pekerja konstruksi tahun 2015 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana .tabel dibawah ini.

Tabel 4.111
Program/Kegiatan Bidang UPTD Jasa Konstruksi serta Alokasi Anggaran
dan Realisasi Tahun 2014

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
2	3	4	5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303.832.987	259.205.800	
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Konstruksi	303.832.987	259.205.800	85,3
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1.615.967.500	1.486.546.050	
Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	161.772.500	161.007.500	99,5
Kegiatan Pembinaan Aparatur dan SDM Jasa Konstruksi	281.772.500	277.189.900	98,4
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Jasa Konstruksi	675.396.000	608.310.800	90,1
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Jasa Konstruksi	151.772.500	150.224.100	99
Kegiatan Sosialisasi Kartu Pekerja Konstruksi (KPK)	183.481.500	130.056.250	70,9
Kegiatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Jambi	161.772.500	159.757.500	98,8
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1.479.989.700	1.379.571.509	
Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi	245.044.000	210.962.200	86,1
Kegiatan Forum Jasa Konstruksi Daerah	410.710.700	363.442.471	88,5
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa konstruksi	456.907.500	447.096.138	97,9
Kegiatan Pelatihan Asesor Tenaga Kerja Konstruksi	241.082.500	232.970.700	96,6
Studi Peningkatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Berbasis Teknologi Informasi	126.245.000	125.100.000	99,1
Program Pengawasan Jasa Konstruksi	3.194.212.705	2.947.328.805	
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota	627.484.500	576.166.518	91,8
Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Program Pembinaan Jasa Konstruksi	150.000.000	148.312.487	98,9
Kegiatan Pembekalan Pelatihan dan Fasilitasi Uji Kompetensi	1.700.662.305	1.662.386.700	97,8
Kegiatan Pelatihan Konstruksi Keliling	313.096.500	254.544.300	81,3
Kegiatan Perlombaan dan Penilaian Konstruksi	402.969.400	305.918.800	75,9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan meliputi :

- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi Daerah. Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah daerah sebagai stakeholder Daerah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independent dan mandiri, untuk membahas secara transparan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Pembinaan Jasa Konstruksi diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan bagi kemajuan dalam pengembangan Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di masa-masa mendatang.
- 2) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan informasi serta sebagai media penyampaian aspirasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah, dalam bentuk pertemuan tetap bersifat independen, netral, dan mandiri, yang diwakili oleh 7 (tujuh) kelompok unsur, untuk membahas secara transparan dan terbuka mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Adapun unsur yang dilibatkan sebagai peserta antara lain : asosiasi perusahaan jasa konstruksi; asosiasi profesi jasa konstruksi; asosiasi perusahaan barang/jasa mitra usaha konstruksi; Masyarakat intelektual; organisasi kemasyarakatan jasa konstruksi; dan pemerintah
- 3) Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para penyedia jasa tentang tertib penyelenggaraan IUJK, SMK3 dan Meningkatkan tertib pengadaan, penyelenggaraan konstruksi PJT Badan usaha dan Meningkatkan Pengadaan Barang secara elektronik melalui kegiatan E-procurement.
- 4) Kegiatan Sosialisasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, sebagai media untuk mengenalkan praktek asosiasi profesi dan memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi dalam meningkatkan SDM yang berkompeten dan profesional dalam bidang Jasa Konstruksi.

- 5) Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Jasa Konstruksi (pelatihan bagi fasilitator) untuk meningkatkan kemampuan untuk menjadi *“trainer/fasilitator”* yang handal
- 6) Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tukang / Instalatir dengan mempersiapkan tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan dan kompetensi
- 7) Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Operator Alat Berat dengan memberikan pembekalan uji teori assessment praktek lapangan bagi tenaga operator alat berat sebanyak 53 orang.
- 8) Kegiatan Pembuatan Data Base dan Validasi Profil Jasa Konstruksi untuk meningkatkan tertib jasa konstruksi dan trampil tenaga administrator SIPJAKI, serta pembuatan data profil jasa konstruksi
- 9) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota untuk menilai kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan memberikan gambaran atau laporan pada kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.

Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun berpengaruh yang sangat signifikan terhadap sumber daya manusia yang terampil. Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun sama artinya dengan meningkatkan kualitas pelaku jasa konstruksi. Bila dibandingkan dengan target Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2012-2015 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 realisasi Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun pada tahun 2015 sebanyak 1.290 orang, dimana untuk pencapaiannya berdasarkan kumulatif jumlah tenaga kerja yang dilatih tersebut 365 orang bersumber dari dana APBD dan 925 orang bersumber dari dana APBN. Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 untuk Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Jumlah tenaga kerja yang

dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Gambar 4.41 Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (org) Tahun 2012-2015)

Sampai dengan tahun 2015, capaian persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun sudah mencapai sekitar 139 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2012- 2015 sebanyak 1.775 orang. Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2015, hal ini disebabkan karena diadakannya pelatihan dan sertifikasi pada pelaku konstruksi terampil. Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun ditandai dengan meningkatnya tenaga terampil. Adapun faktor yang mempengaruhi Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun yaitu Meningkatnya kesadaran pelaku konstruksi dan Tersedianya lokakarya atau pelatihan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih oleh UPTD Jasa Konstruksi (orang) pertahun yaitu peranan para jasa

konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta.

7. UPTD Balai Pengujian

UPTD Balai Pengujian yang merupakan lembaga pengujian yang telah terakreditasi sebagai laboratorium penguji (LP-612-IDN) yang menerima dan melakukan pengujian terhadap material pekerjaan konstruksi berupa tanah, agregat/batuan, aspal dan beton baik di laboratorium maupun yang berasal dari pekerjaan lapangan, baik untuk pekerjaan pemerintah, swasta, maupun kepentingan akademis. Pengujian dilakukan oleh para teknisi terampil dengan menggunakan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi dan memenuhi standar SNI yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan mutu pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, yang meliputi pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung, Pengairan dan Bendungan sangat dibutuhkan adanya sarana prasarana pengujian yang lengkap. Salah satu program yang terus dipergunakan adalah uji profisiensi dimana hasilnya akan memberikan salah satu bentuk jaminan mutu hasil pengujian selain penggunaan bahan acuan bersertifikat, dan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai jaminan mutu (keakuratan hasil uji) bagi masing-masing laboratorium peserta yang ikut dalam kegiatan uji profisiensi ini. Selain itu juga sebagai bagian dari pembinaan laboratorium terkait pengorganisasian, kinerja dan evaluasi pengukuran atau pengujian terhadap proyek yang sama atau serupa oleh dua atau lebih laboratorium sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memantau unjuk kerja laboratorium pengujian dan menjamin keakuratan dan keabsahan data hasil pengujian.

Pada tahun 2015 untuk dalam program Uji Profisiensi untuk bidang pengujian aspal, campuran aspal, agregat, tanah dan beton yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum, UPTD Balai Pengujian Provinsi Jambi mendapatkan predikat sangat memuaskan. Guna menunjang peningkatan pelayanan laboratorium, UPTD Balai Pengujian memiliki program Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja hasil pemeriksaan/pengujian, baik dari jumlah

maupun kualitas hasil pengujian. Untuk tahun anggaran 205 capaian/progres fisik program dan kegiatan mencapai 100%, dan penyerapan keuangan mencapai 97,88% seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.112
Program/Kegiatan Bidang UPTD Balai Pengujian serta Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
UPTD BALAI PENGUJIAN	5.043.665.500	4.902.062.136	97,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			
Kegiatan Pengadaan alat alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	4.404.654.500	4.292.474.440	97,45
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat alat ukur dan bahan laboratorium	639.011.000	609.587.696	95,4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Untuk meningkatkan kinerja UPTD Balai Pengujian dan mutu pelaksanaan pembangunan fisik bidang jalan, jembatan, gedung, irigasi dan bendungan maka perlu sinergisitas antara bidang terkait kePUan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Provinsi Jambi sehingga perlu optimalisasi peralatan dan bahan dalam menunjang pengujian dan pemeliharaan alat-alat pengujian serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dengan mengikuti pelatihan atau training. Namun demikian saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam upaya mengoptimalkan kinerja dan mutu pelaksanaan pembangunan fisik bidang jalan, jembatan, gedung, irigasi dan bendungan karena masih belum optimalnya peralatan dan bahan untuk menunjang pengujian dan pemeliharaan terhadap alat-alat pengujian serta sumber daya manusia yang memadai. UPTD Balai Pengujian dalam upaya peningkatan kinerja capaian retribusi daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kedepan agar tercapainya peningkatan pelayanan pengujian yang maksimal serta pengendalian mutu pelaksanaan pembangunan di bidang fisik jalan, jembatan, gedung, irigasi & bendungan, UPTD Balai Pengujian berharap dukungan Pengadaan/Rehabilitasi Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium serta sumber daya manusia terus dapat ditingkatkan.

4.1.4 Penataan Ruang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Adapun kegiatan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033, sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang masih mengalami berbagai tantangan meski telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 pada bulan Juli 2013.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang cukup luas dalam penyelenggaraan penataan ruang. Adapun kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penataan ruang antara lain adalah:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
4. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Tabel 4.113
Program/Kegiatan Bidang Penataan Ruang serta alokasi anggaran
danrealisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang	7.778.800.000	7.625.987.685	98,04
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>			
Kegiatan sinkronisasi, Sosialisasi, workshop, dan Pelatihan infrastruktur ke-PU-an	3.007.932.400	2.916.714.071	96,97
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			
Kegiatan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan finalisasi kegiatan ke-PU-an di provinsi jambi	1.017.963.800	993.952.650	97,64
<i>Program Penataan Ruang</i>			
Peningkatan Manajemen Pengendalian, Pemanfaatan ruang Provinsi Jambi	3.752.903.800	3.715.320.964	99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Tabel 4.114
Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab/Kota hingga Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang	7.778.800.000	7.625.987.685	98,04
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>			
Kegiatan sinkronisasi, Sosialisasi, workshop, dan Pelatihan infrastruktur ke-PU-an	3.007.932.400	2.916.714.071	96,97
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			
Kegiatan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan finalisasi kegiatan ke-PU-an di provinsi jambi	1.017.963.800	993.952.650	97,64
<i>Program Penataan Ruang</i>			
Peningkatan Manajemen Pengendalian, Pemanfaatan ruang Provinsi Jambi	3.752.903.800	3.715.320.964	99

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, maka Pemerintah Provinsi Jambi harus menyusun peraturan daerah

tentang rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, Provinsi Jambi memiliki 7 (tujuh) Kawasan Strategis Provinsi, yaitu:

- 1) KSP Kota Jambi – Muara Bulian – Sengeti;
- 2) KSP Perkotaan Muaro Bungo – Muaro Tebo;
- 3) KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi;
- 4) KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh;
- 5) KSP Bangko – Sarolangun;
- 6) KSP sudut kepentingan sosial budaya Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi;
- 7) KSP sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi Kawasan Panas Bumi Kerinci – Merangin.

Pada Tahun 2015 ini, Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang telah menyelesaikan paket pekerjaan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pada program penataan ruang yaitu Kawasan Strategis Provinsi Perkotaan Muara Bungo – Muaro Tebo pada sector koridor ekonomi, dimana pencapaian target fisik dan keuangannya telah terserap 100% dan sesuai standarisasi parameter regulasi baru tercapai 75%. Selain itu juga, Provinsi Jambi masuk dalam Longlist (ring 10-15, menengah) atas Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PKPD) dari pusat bidang Penataan Ruang Kementerian PUPR RI. Ini merupakan salah satu prestasi yang cukup memuaskan untuk bias masuk pada tahap ring menengah pada penilaian tersebut.

Pada pembinaan teknik dan penelitian di tahun 2015 ini ada beberapa paket pekerjaan penelitian yang telah terlaksana, antara lain :

- a. Jasa kerja penyusunan kelayakan typical konstruksi bidang ke-PU-an terealisasi anggaran 97,46% dan 100% fisik terlaksana, meliputi;
 - 1) Penyusunan kelayakan typical konstruksi bidang Sumber Daya Air.
 - 2) Penyusunan kelayakan typical konstruksi bidang Bina Marga.
 - 3) Penyusunan kelayakan typical konstruksi bidang Cipta Karya dan Perumahan.

- b. Study Rekayasa lalu lintas dalam Provinsi Jambi terealisasi anggaran 97,68% dan 100% fisik terlaksana, meliputi;
 - 1) Study rekayasa lalu lintas wilayah barat di Provinsi Jambi.
 - 2) Study rekayasa lalu lintas wilayah timur di Provinsi Jambi.
- c. Kegiatan Inventaris kondisi karakteristik wilayah infrastruktur bidang ke-PU-an dalam Provinsi Jambi terealisasi anggaran 99,04% dan 100% fisik terlaksana, meliputi;
 - 1) Inventarisasi kondisi karakteristik wilayah infrastruktur bidang ke-PU-an di Kab.Bungo dan Kab.Tebo.
 - 2) Inventarisasi kondisi karakteristik wilayah infrastruktur bidang ke-PU-an di Kota Jambi.
- d. Digitalisasi informasi infrastruktur ke-PU-an terealisasi anggaran dan fisiknya 100%, meliputi;
 - 1) Digitalisasi informasi infrastruktur ke-PU-an Sumber Daya Air.
 - 2) Digitalisasi informasi infrastruktur ke-PU-an Bina Marga.
 - 3) Digitalisasi informasi infrastruktur ke-PU-an Cipta Karya dan Perumahan.

Target dan capaian yang telah terlaksana pada seluruh kegiatan seksi pembinaan teknik dan penelitian adalah:

- a. Telah terlaksana kegiatan study rakayasa lalu lintas dalam Provinsi Jambi adalah mengkaji alternative-alternatif permasalahan tentang sarana transportasi dalam lintas sector infrastruktur dalam Provinsi Jambi.
- b. Telah dibuatnya rekomendasi untuk peningkatan kinerja layanan jalan pada sektor atau pihak terkait.
- c. Telah tersusunnya informasi yang menunjang database jaringan jalan Provinsi di Wilayah Barat dan Wilayah Timur.
- d. Telah dibuat tahap Kajian alternative permasalahan study rakayasa lalu lintas ini mencakup antara lain analisis alternatif kemacetan dan analisis sistem transportasi dan alternatif konstruksi seperti under road, fly road, MRT, monorell, dll.
- e. Pada seksi pembinaan teknik dan penelitian untuk Kegiatan Typical Konstruksi yaitu telah memunculkan standar typical konstruksi berdasarkan karakteristik diwilayah Kabupaten/Kota. Dalam Provinsi Jambi terbagi atas

- 3 standarisasi; daerah berbukit, daerah datar, dan daerah rendah/rawa/sungai. Untuk mencapai 100% membutuhkan supporting dana kurang lebih 30 Milyar.
- f. Sudah tersusunnya inventarisasi kondisi karakteristik wilayah infrastruktur bidang ke Pu-an dalam Provinsi khususnya di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
 - g. Telah dibuat kebijakan menjadi bahan masukan dan penetapan prioritas kegiatan fisik/rehabilitasi Infrastruktur Bidang Ke PU-an Provinsi Jambi.
 - h. Sudah tersusunnya informasi yang mendukung terwujudnya sistem informasi data Infrastruktur bidang ke PU-an yang terintegrasi dan terpadu.
 - i. Telah dilakukan penajaman dalam hal data digitalisasi peta infrastruktur bidang ke PU-an dan seluruh database informasi kebutuhan pendukung kegiatan.

Berdasarkan proses penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jambi pada tahun 2015, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam kelembagaan BKPRD Provinsi Jambi khususnya, dan bagi Pemerintah Provinsi Jambi pada umumnya, mengingat keterlibatan dan komitmen para pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor yang mendukung berjalannya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 4.115

Fakta Dan Permasalahan Penataan Ruang Di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	FAKTA dan PERMASALAHAN	WILAYAH GEOGRAFI S	KET
I.	PERENCANAAN TATA RUANG		
	Perubahan Regulasi Sektoral	Wilayah Provinsi	
	Perubahan SK MenHut 727 Tahun 2012 menjadi SK Nomor 863 Tahun 2014		
	Deliniasi Kawasan Strategis		Wewenang Pusat
	Belum adanya Pedoman Penyusunan Kawasan Strategis Provinsi	Provinsi	
	Belum Efektifnya Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Pemberian Persetujuan Substansi Raperda tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Provinsi, Kabupaten/ Kota	Kepmen PU Nomor: 224/KPTS/M/2014 Tanggal 6 Mei 2014
	Terbatasnya SDM bidang penataan ruang (<i>spatial planning</i>)	Kabupaten/ Kota	
	Belum ada Mekanisme SOP dalam Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan arahan dan bersifat normatif	Kabupaten/ Kota	
	Kejelasan status PPNS bidang Penataan Ruang di daerah		Pusat
II.	PEMANFAATAN RUANG		
	Masalah Perizinan dalam Kawasan Budidaya	Kabupaten/ Kota	
	Mitigasi Bencana	Kabupaten/ Kota	
	Sektor Pertambangan: Illegal Mining (PETI)	Kabupaten/ Kota	
	Belum efektifnya penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang	Kabupaten/ Kota	
III.	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
	Efektifitas Kelembagaan		
	Belum adanya Peraturan Zonasi	Kabupaten/ Kota	

Sumber: Hasil Review, 2015

Secara umum, persepsi dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap definisi dan proses penataan ruang dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas stakeholders mengenai penataan ruang masih perlu

ditingkatkan, khususnya peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah daerah sebagai penampung aspirasi dan peramu kebijakan yang akan dituangkan dalam rencana tata ruang, sekaligus sebagai bagian dari pelaku atau pelaksana rencana. Peningkatan kapasitas ini diharapkan pula dapat mewujudkan kesamaan visi, persepsi dan pemahaman para pihak, sehingga tercipta koordinasi dan integrasi para pihak tanpa memandang aspek personal maupun sektoral.

4.1.5 Perumahan

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetik dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan, salah satunya dengan perencanaan dan pembangunan rumah susun serta bedah rumah.

Program dan kegiatan di Bidang Perumahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

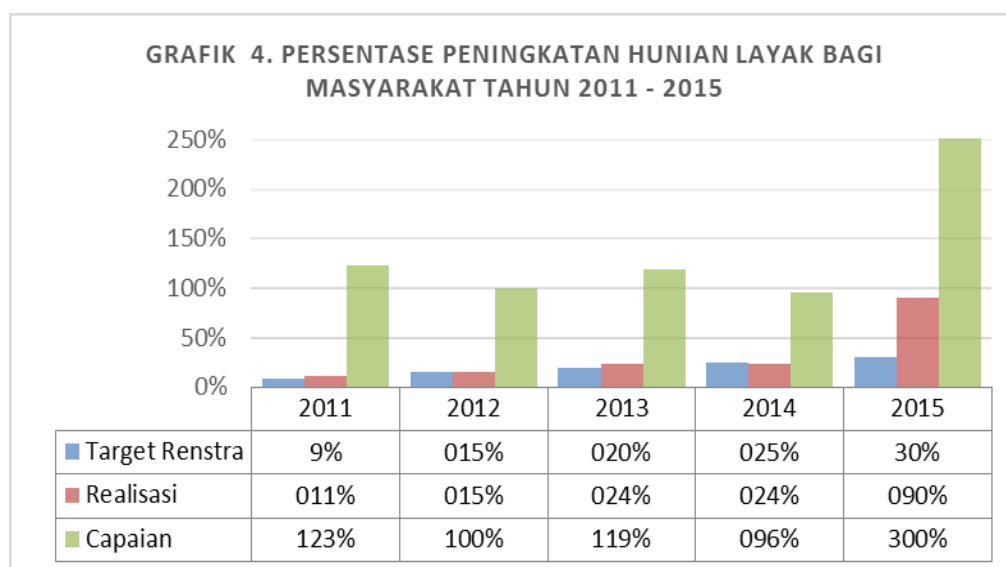
Tabel 4.116
Program/Kegiatan Bidang Perumahan serta alokasi anggaran dan
realisasi Tahun 2015

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Bidang Perumahan	28.925.002.000	27.386.475.300	94,68
Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)			
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ke PU an Bidang Perumahan	1.083.813.500	906.296.750	83,62
Kegiatan sosialisasi bidang perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	286.450.000	276.513.500	96,53
Program Pengembangan Perumahan			
Kegiatan Pembangunan Rumah Susun	9.055.057.000	8.669.349.400	95,74
Kegiatan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	1.775.370.000	1.696.063.750	95,53
Kegiatan stimulan PSU rumah khusus	1.944.020.000	1.836.325.250	94,46
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
Kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) wilayah barat (kab.tebo, bungo, sarolangun, merangin, kerinci, dan kota sungai penuh)	4.912.087.000	4.625.654.900	94,17
Kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) wilayah timur (kota jambi, kab.muara jambi, batanghari, tanjabbar, dan tanjabtim)	9.868.204.500	9.376.271.750	95,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup hunian masyarakat. Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat sama artinya dengan kesejahteraan masyarakat. Bila dibandingkan dengan target Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dan Penetapan/Perjanjian Kinerja 2015 realisasi Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 90 persen rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 60 persen. Karena kurangnya bantuan CSR dari pihak swasta untuk kegiatan peningkatan kualitas bedah rumah. Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat dari Tahun 2011 sampai dengan

Tahun 2015 untuk kondisi hunian layak menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Adapun capaian Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Gambar 4.42 Persentase Peningkatan Hunian Layak bagi Masyarakat Tahun 2011 – 2015

Sampai dengan tahun 2015, capaian persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat sudah mencapai sekitar 91 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi tahun 2011-2015 sebanyak 98.41 persen, dimana hampir seluruh unit yang targetkan 25.376 unit di 138 kecamatan kegiatan money bidang perumahan (bedah rumah) terealisasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 22.934 unit.

Tabel 4.117
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Hunian layak
bagi masyarakat di Provinsi Jambi dengan Target Renstra 2011-2015

No	Tahun	Persentase Peningkatan Hunian Layak bagi Masyarakat		%
		Target Renstra	Realisasi	Capaian
1.	2011	9	11.04	122.69
2.	2012	14.86	14.81	99.69
3.	2013	19.80	23.64	119.42
4.	2014	24.75	23.84	96.33
5.	2015	30	90	300
Jumlah		98.41	90	91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut diatas, terlihat bahwa Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 meningkat. Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor yang mempengaruhi Persentase peningkatan hunian layak bagi masyarakat yaitu :

1. Dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta
2. Tingkat kemiskinan
3. Pertumbuhan ekonomi

Langkah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan hunian layak bagi masyarakat yaitu ketersediaan prasarana umum hingga ke pelosok daerah, koordinasi antara pemerintah dan swasta {CSR), dan perlu adanya peraturan daerah terhadap kegiatan cooperate social responsibility (CSR) di Provinsi Jambi. Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan hunian

layak bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

a. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke-PU-an Bidang Perumahan Capaian pelaksanaan kegiatan monitoring bersama dengan instansi terkait (Bappeda) maka realisasi 22.934 unit rumah.

4.1.6 Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam mempersiapkan dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

Pada tahun anggaran 2015 untuk urusan perencanaan melalui Bappeda Provinsi Jambi telah dianggarkan dana sebesar Rp16.535.000.000, yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan mempersiapkan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2016, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.118
Program/Kegiatan Bidang Pendanaan dan Evaluasi Bappeda Provinsi
Jambi Tahun 2015

No	Uraian	Pagu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		3.400.000.000
1.	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Monev Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.045.255.000
2.	Koordinasi Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.354.745.000

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi

Dari alokasi anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.866.498.103,- atau setara dengan 84,31%. Persentase pelaksanaan rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) terhadap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Dari evaluasi yang telah dilakukan, bahwa berdasarkan 5 (lima) program prioritas yang ditetapkan pada awal Periode RPJMD Provinsi Jambi, pada akhir tahun 2015 telah terealisasi sebesar 85,66%, hal ini masuk dalam Kategori Tinggi.

Dalam pelaksanaan kedua kegiatan diatas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Masih sering terlambatnya pelaksanaan musrenbang sektor maupun Kabupaten/ Kota sehingga Provinsi harus menunggu hasil Musrenbang tersebut.
- 2) Evaluasi hasil terhadap capaian kinerja sedikit mengalami kesulitan akibat inkonsistensi indikator setiap tahunnya dan atau ketidakjelasan indikator.
- 3) Proses perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah:

- 1) menyinergikan jadwal pelaksanaan musrenbang Sektor dan Kabupaten/Kota dengan mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten.

- 2) Mempertajam indikator output dan outcome pada program/ kegiatan SKPD.
- 3) Mendorong pengembangan aplikasi perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis web.

b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi secara makro, guna menghasilkan sinergitas antar sektor dan antar pelaku ekonomi. Dalam rangka mencapai program tersebut pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.810.000.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.790.582.900,- atau setara dengan 98,93% yang tersebar pada beberapa kegiatan, diantaranya: 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi 2) Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Adapun output dari program ini adalah Terlaksananya Penyusunan dokumen Analisa Capaian Tabel Input Output Provinsi Jambi, Indeks Pembangunan Regional, Analisis Typologi Kawasan, Buku Pintar Ekonomi, Analisis Hilirisasi Produk Petani, Perlindungan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Ekosistem Gambut, Kajian Pengembangan Lembaga Keuangan Pedesaan serta Penyusunan PEP RAD GRK Tahun 2015. Disamping output berupa dokumen tersebut, keluaran dari program ini juga berupa terkoodinirnya program dan kegiatan lingkup bidang ekonomi dalam rangka pencapaian target RPJMD 2010-2015.

c. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan sosial budaya melalui beberapa kegiatan antara lain; 1).Perencanaan dan koordinasi Bidang SDM dan Pemerintahan; 2).Perencanaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan serta 3).Perencanaan dan Koordinasi Program Sosial Budaya. Pada tahun 2015 program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.

1.964.674.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1,929.841.512,- atau setara dengan 98.23%.

Adapun output dari program ini adalah terkoodinirnya program dan kegiatan lingkup bidang Sumberdaya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam rangka pencapaian target RPJMD 2010-2015 dan tersusunya dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kedepan antara lain : Strategi Daerah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, RAD Pembangunan Pasca MDGs Tahun 2015-2020, Analisis Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2014, Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Wilayah Provinsi Jambi, Analisis Total Factor Productivity Tenaga Kerja Provinsi Jambi, RAD Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Jambi, serta Analisis Pencapaian Program Nasional Pemberdayaan Provinsi Jambi.

Pada Program ini ini juga telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD-SKPD yang berada dalam lingkup Bidang SDM, Pemerintahan dan Sosial Budaya.

d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur wilayah melalui Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah melalui kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. Dalam rangka mencapai program tersebut, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.1.810.900.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.1.803.263.300,- atau setara dengan 99,58%.

Melalui program ini diharapkan akan terkoordinirnya perencanaan infrastruktur wilayah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota secara lebih baik, sebagai upaya pencapaian peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam pelayanan umum di Provinsi Jambi.

Kegiatan koordinasi, fasilitasi, supervisi dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan tata ruang wilayah tahun 2015 ini telah

menghasilkankeluaran (output) berupa dokumen Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi Jambi (4 Kawasan Strategis Provinsi Jambi, Perkotaan, Sarolangun-Bangko, Kerinci-Sungai Penuh dan Geothermal sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang), Kajian Simpul Jaringan Berbasis Kewilayahan dan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Jambi.

e. Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah. Pada tahun 2015 program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.804.616.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp804.246.550,- atau setara dengan 99,95%. Melalui kegiatan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah dan dunia usaha, dengan output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Analisis Kinerja Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung RPJMD 2010-2015 dan Analisis Kerjasama antar Kabupaten/ Kota sesuai dengan RTRW di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020.

f. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan menyebarluaskan informasi kepada stakeholders dan untuk keperluan perencanaan program Pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut pada tahun 2015 dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi serta kegiatan Pengembangan Sistem Pemusatan Data Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran Rp914.558.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp854.184.850,- atau setara dengan 94,40%.

Kegiatan Palayanan data dan Publikasi, merupakan upaya untuk memberikan pelayanan dan menyampaikan informasi dan publikasi pembangunan daerah, berupa mengikuti Pelaksanaan Pameran Pembangunan baik dalam daerah maupun luar daerah, pembuatan Film Profil Daerah Povinsi Jambi dan Film Dokumenter Program SAMISAKE

serta mengikuti karnaval kendaraan hias pada Pawai Pembangunan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

Kegiatan pengembangan sistem pemusatan data pembangunan Daerah, bertujuan mendesain sebuah sistem pemusatan data secara terstruktur dengan cara mengkoordinasikan data yang berada pada SKPD dan instansi vertikal, data-data yang dapat menunjang perencanaan dikembangkan dan kemudian dirancang sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam pembuatan laporan yang sesuai dengan kebutuhan, pada kegiatan pengembangan sistem pemusatan data pembangunan Daerah dilaksanakan beberapa sub kegiatan:

- 1) Pemeliharaan website, video wall dan kios data Bappeda Provinsi Jambi merupakan salah satu upaya pengembangan data dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media online, adapun informasi yang di input kedalam media tersebut adalah informasi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Perencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya website dan media informasi Bappeda lainnya diharapkan semua informasi yang ada pada Bappeda dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat yang memerlukannya. Pemeliharaan sarana tersebut perlu dilaksanakan agar informasi yang disampaikan tetap update dan menarik untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- 2) Pengembangan aplikasi pemusatan yang dirancang dengan data base berbasis web bertujuan untuk mempermudah dalam pengisian data yang telah terkoneksi langsung ke internet sehingga SKPD terkait dapat melakukan EntryData langsung ditempat masing-masing. Adapun aplikasi yang telah dikembangkan adalah aplikasi kemiskinan dan aplikasi pemusatan data pembangunan Daerah, kedua aplikasi ini berisikan informasi tentang data kemiskinan dan data pembangunan yang berada pada SKPD di Provinsi Jambi dan Kabupaten /Kota.
- 3) Pemeliharaan server bertujuan untuk meningkatkan fungsi server secara maksimal, beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah memperbaiki jaringan server simda yang mengalami kerusakan, menambah access

point untuk memperkuat jangkauan internet, menanamkan software anti virus untuk keamanan aplikasi yang ada pada server.

Selanjutnya output yang telah dilaksanakan dari Program Pengembangan Data dan Informasi Tahun 2015 yaitu :

- 1) Mengikuti Pameran Pembangunan pada Telanaipura Expo Tahun 2015 HUT Provinsi Jambi, dan mengikuti Pameran Pekan Raya Jakarta serta Jambi Expo 2016 di Jakarta.
- 2) Pembuatan Film Profil Daerah Provinsi Jambi dan Film Dokumenter Program SAMISAKE.
- 3) Mengikuti Karnaval Kendaraan hias pada Pawai Pembangunan HUT Kemerdekaan RI tahun 2015, mendapat nomor 1 katagori mobil hias.
- 4) Tersedianya aplikasi kemiskinan dan aplikasi pengolahan data pembangunan.
- 5) Terpeliharanya jaringan server yang dapat memudahkan setiap bidang dalam mengakses dan memanfaatkan internet dan intranet.
- 6) Tersediannya website Bappeda yang dapat menampung semua informasi dari Bappeda yang dapat di publikasikan kepada masyarakat.

g. Program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE)

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp663.992.000,-dengan tingkat realisasi sebesar Rp619.025.400,- atau setara dengan 93,23%. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Samisake Tahun 2015 dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun 2015, dalam bentuk penyusunan Pedum Program SAMISAKE Tahun 2015, Rapat koordinasi, Publikasi SAMISAKE dan Monitoring dan Evaluasi Program SAMISAKE, Sasaran program SAMISAKE Tahun 2015 adalah 138 Kecamatan di Semua Kabupaten/Kota.

Selanjutnya out put yang telah dilaksanakan dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun 2015 yaitu :

- 1) Terbitnya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Tahun 2015.
- 2) Publikasi Program SAMIKAKE ke Masyarakat melalui media Elektronik dan Cetak.
- 3) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program SAMISAKE antar SKPD teknis dan Bappeda Kabupaten/Kota, se Provinsi Jambi.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten /Kota se Provinsi Jambi.

4.1.7 Perhubungan

Pembangunan urusan Perhubungan dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tahun sebelumnya, bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka memperlancar akseselerasi peningkatan perekonomian daerah. Isu yang saat ini sudah menjadi salah satu permasalahan nasional adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi dari standar kemampuan jalan di Provinsi Jambi.

Oleh karena itu, arah pembangunan urusan Perhubungan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2015 lebih diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan barang. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan perhubungan tersebut maka dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan dan fasilitas perhubungan. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, maka penanganan dititikberatkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Provinsi Jambi.

a. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015, melalui Dinas Perhubungan Provinsi yang menangani urusan perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 33.506.207.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.914.642.550- atau

sebesar 92,27 %. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.119
Realisasi Program dan Kegiatan

NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			KEUANGAN	%
Program pelayanan Administrasi Perkantoran		2.462.451.500	2.073.974.608	84,22
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	8.775.000	8.738.500	99,58
2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	372.976.000	205.701.404	55,15
3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	369.494.000	227.465.453	61,56
4	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	550.536.300	539.322.000	97,96
5	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	151.132.000	126.245.000	83,53
6	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	156.798.200	146.063.800	93,15
7	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	122.146.000	115.078.505	94,21
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.020.000	13.955.000	99,54
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.123.000	30.600.000	92,38
10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	14.570.000	41,63
11	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	648.451.000	646.243.946	99,66
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.561.415.900	1.507.673.265	96,56
12	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	431.327.000	401.687.000	93,13
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	305.772.000	302.412.000	98,9
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	387.132.000	369.118.265	95,35
15	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	437.184.900	434.456.000	99,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		127.116.000	126.181.000	99,26
16	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	127.116.000	126.181.000	99,26
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000	11.625.000	11,63

NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			KEUANGAN	%
17	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	100,000,000	11.625.000	11,63
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		7.283.911.800	6.889.961.600	94,59
18	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3.718.911.000	3.637.126.732	97,8
19	Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	181.250.000	105.150.150	58,01
20	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang	3.078.750.000	2.930.312.150	95,18
21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	305.000.800	217.372.568	71,27
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		1.632.212.000	1.586.767.300	97,22
22	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang			
23	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan	216.732.000	209.282.000	96,56
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		3.214.249.000	2.336.449.491	72,69
24	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	805.844.000	621.623.200	77,14
25	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	715.886.000	645.889.116	90,22
26	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	244.132.000	237.569.975	97,31
27	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	379.845.000	372.167.200	97,98
28	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	411.944.000	296.402.050	71,95
29	Pengendalian Pengawasan Kegiatan Kelayakan Sertifikat Kapal Sungai	656.598.000	162.797.950	24,79
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan		2.015.076.850	1.833.801.717	91
30	Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal VIP Room Bandara	1.026.220.000	953.571.500	92,92
31	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Gedung Terminal VIP Room dan Koordinasi Bandara Perintis Provinsi Jambi	988.856.850	880.230.217	89,01
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		13.343.709.450	13.161.899.000	98,64

NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			KEUANGAN	%
32	Kegiatan pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	11.940.069.000	11.775.892.200	98,62
33	Kegiatan keselamatan transportasi Darat	1.403.640.450	1.386.006.800	98.74
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		1.766.065.000	1.386.309.569	78,5
34	Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	1.766.065.000	1.386.309.569	78,5
TOTAL JUMLAH		33.506.207.500	30.914.642.550	92,27

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi serta untuk optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp. 7.283.911.800,- untuk kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan; pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan hingga akhir tahun 2015 telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6.889.961.600,- atau 94,59%.

Kegiatan – kegiatan dalam program ini lebih banyak merupakan kegiatan non fisik untuk pengembangan kapasitas fungsi lembaga dan penunjang keberhasilan program. Hanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang yang merupakan kegiatan fisik. Melalui kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan telah dilaksanakan penyusunan masterplan jaringan rel kereta api Provinsi Jambi, penyusunan SID/DED Intelegent Transportation System (ITC) / Area Traffic Control System (ATCS),

penyusunan kajian pola pergerakan transportasi di Provinsi Jambi, serta penyusunan SID pengembangan kawasan pelabuhan Ujung Jabung/SID penanganan kawasan pantai pelabuhan Ujung Jabung.

Sedangkan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang telah dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengawasan online di Jembatan Timbang, Pembangunan Fasilitas Penunjang Jembatan Timbang, Peningkatan jalan keluar/masuk di JTKB Ma. Tembesi dan JTKB Bukit Baling. Hingga Tahun 2015 jumlah JTKB di Provinsi Jambi yang aktif adalah sebanyak 4 Unit yang terletak di Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun dan Kota Sungai Penuh. Data Statistik perhubungan memperlihatkan bahwa keempat unit JTKB tersebut melayani angkutan yang cukup banyak. Berdasarkan laporan JTKB tahun 2015, sampai dengan bulan September 2015 arus angkutan yang tertinggi terlihat pada JTKB Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebanyak 116.049 kendaraan dan JTKB Sarolangun sebanyak 106.964 kendaraan. Apabila melihat kecenderungan jumlah kendaraan angkutan yang terus meningkat setiap tahunnya maka kapasitas sarana dan prasarana yang ada harus terus ditingkatkan dan dilengkapi agar pelayanan dapat optimal. Berikut kapasitas jembatan timbang sampai dengan tahun 2015.

Tabel 4.120
Jumlah Jembatan timbang, kapasitas dan tahun pembuatan

Nama JKTB	Muaro Tembesi	sarolangun	Sungai Penuh	Muaro Jambi
Tahun Pembuatan	2010	2005	1973	2009
Kapasitas	80 ton	80 ton	20 ton	80 ton
Bangunan Atap Platform	Ada 1 unit	Ada 2 unit	ada	Ada 2 unit
Gedung Operasional	ada	ada	Ada	ada
Area Parkir Kendaraan	ada	ada	Tidak ada	Ada
Fasilitas jalan (in & out)/ permukaan jalan	baik	baik	baik	baik
Gedung penyimpanan	ada	ada	Tidak ada	ada
Mess Petugas	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
Mess Kepala JT/ Tamu	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
Musholla/ fasilitas Olahraga	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
Bangunan genset	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada
Lapangan penumpukan barang	ada	ada	Tidak ada	ada
Pagar	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

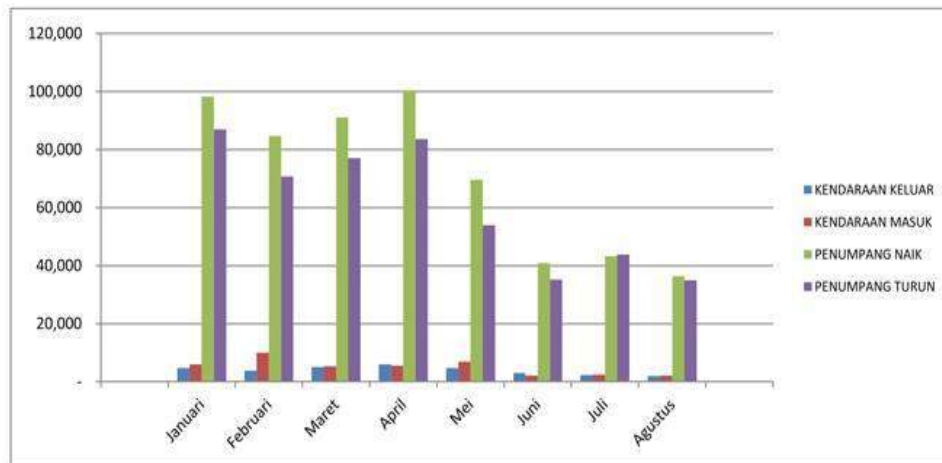
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada tahun 2015 telah dianggarkan dana sebesar Rp.1.632.212.000,- dan telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.586.767.300,- atau 97,22%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan dengan output terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berfungsinya peralatan penimbangan dalam mendukung kegiatan operasional.

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya program ini adalah peningkatan penyelenggaraan pelayanan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada tahun 2015 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 3.214.249.000,- dan telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.33.449.491,- atau 72,69%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

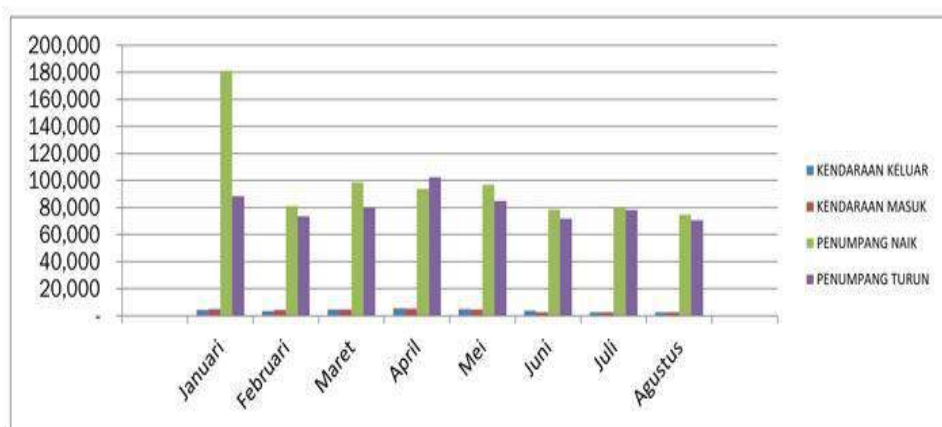
- a) kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan,
- b) kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah,
- c) kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan,
- d) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
- e) kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
- f) kegiatan pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai

Program ini dinilai cukup strategis, mengingat kuantitas kendaraan angkutan umum yang keluar masuk kota – kota di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahunnya dan peningkatan penggunaan sarana transportasi umum baik darat, laut dan udara harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang juga meningkat. Khusus untuk Peningkatan operasional angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Gambar 4.43 Operasional Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Jambi Tahun 2015



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Gambar 4.44 Operasional Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Jambi Tahun 2015

Peningkatan operasional AKAP dan AKDP sebagaimana yang diperlihatkan oleh dua gambar di atas menggambarkan peningkatan mobilitas orang dan barang keluar masuk Provinsi Jambi yang dapat diasumsikan bahwa tingkat perekonomian yang semakin meningkat. Disamping itu, hal ini juga memperlihatkan bahwa jasa transportasi darat merupakan salah satu moda perhubungan antar wilayah yang penting untuk memacu pertumbuhan perekonomian secara merata di wilayah Provinsi Jambi.

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah terciptanya kenyamanan dan keselamatan penumpang di area khusus bandara serta terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pembangunan gedung terminal VIP Room Bandara serta kegiatan Pembangunan Fasilitas Gedung terminal VIP Room dan Koordinasi Bandara Perintis Provinsi Jambi dengan total anggaran Rp. 2.015.076.850,-. Kegiatan tersebut telah terealisasi 100% secara fisik dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.833.801.717,- atau 91,00%. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas pendukung terminal penumpang bandara, dan outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kenyamanan dan keselamatan penumpang terminal bandara.

Melalui kegiatan pembangunan gedung terminal VIP Room bandara telah dilaksanakan pembangunan pagar gedung VIP Room, serta pengadaan dan pemasangan prasarana penunjang gedung. Melalui kegiatan pembangunan fasilitas gedung terminal VIP Room dan koordinasi bandara perintis Provinsi Jambi telah dilaksanakan pekerjaan landscape VIP Room bandara dan drainase, overlay lapangan parkir gedung VIP Room baru (633 M) serta pembuatan jalan keluar masuk gedung VIP Room ke jalan GSE bandara.

5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dan kapabilitas sumber daya manusia dengan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 adalah pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman jalan. Untuk mencapai tujuan di atas maka dianggarkan dana sebesar Rp. 13.343.709.450,- dan telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 13.161.899.000,- atau 98,64%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan dana sebesar Rp. 11.940.069.000,- dan telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 11.775.892.200,- atau 98,62% yang meliputi :

(1) Pengadaan dan Pemasangan Rambu di Jalan Provinsi (6 paket)

- Kab. Sarolangun (365 unit)
- Kab. Bungo (140 unit)
- Kab. Kerinci (400 unit)
- Kota Sungai Penuh (140 unit)
- Kab. Batang Hari (140 unit)

(2) Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Provinsi (5 paket)

- Kota Jambi (10.000 M)
- Kab. Batang Hari (6.000 M)
- Kab. Tebo (10.000 M)
- Kab. Bungo (10.000 M)

(3) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (3 paket)

- Kota Sungai Penuh (660 M)
- Kab. Kerinci (660 M)

(4) Pengadaan dan Pemasangan Warning Ligth (5 paket)

- Kab. Sarolangun (3 unit)
- Kab. Merangin (3 unit)
- Kab. Tanjab Barat (3 unit)
- Kota Jambi (3 unit)

(5) Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan (5 paket)

- Bangko batas Kab. Kerinci (500 buah)
- Kab Bungo (500 buah)
- Kab. Tebo (450 buah)
- Kab. Tanjab Barat (500 buah)

(6) Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan (5 paket)

- Kab. Sarolangun (30 unit)

- Kota Jambi (30 unit)
- Kab. Tanjab Timur (30 unit)
- Kab. Kerinci (30 unit)

(7) Pengadaan dan Pemasangan Delineator (7 paket)

- Kab. Sarolangun (350 unit)
- Kab. Tebo (250 unit)
- Kab. Kerinci (600 unit)
- Kab. Ma. Jambi (250 unit)
- Kab. Tanjab Timur (250 unit)
- Kab. Merangin (350 unit)

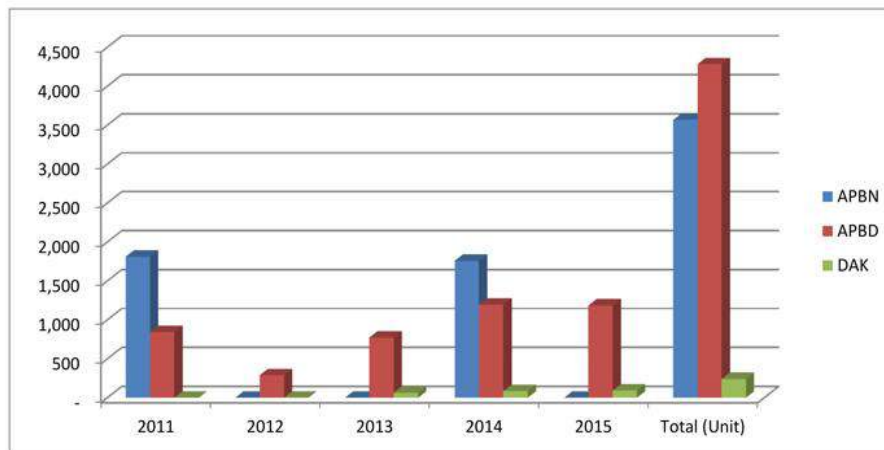
(8) Rekayasa Lalu Lintas (1 paket)

Pengadaan dan pemasangan rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) (15 unit)

- b) Kegiatan keselamatan transportasi Darat dengan dana sebesar Rp. 1.403.640.450,- dan telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.386.006.800,- atau 98,74% yang meliputi :

(1) Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi darat

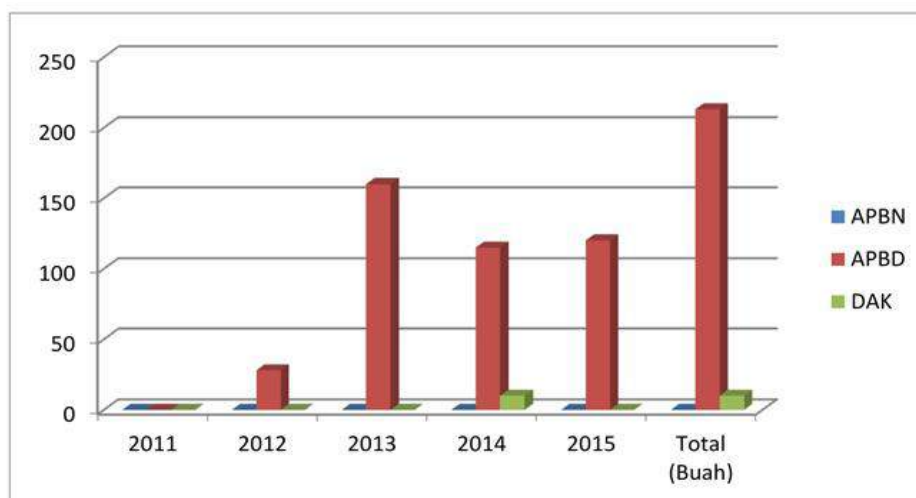
Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran, ketertiban dan keselamatan angkutan jalan dengan benefit terwujudnya lalu lintas yang selamat, aman, nyaman dan lancar. Perkembangan jumlah prasarana angkutan jalan yang dipasang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan APBD Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	Total (Unit)
APBN	1,810	-	-	1,757	*	3,567
APBD	842	288	772	1,195	1,185	4,282
DAK	-	-	62	85	93	240

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

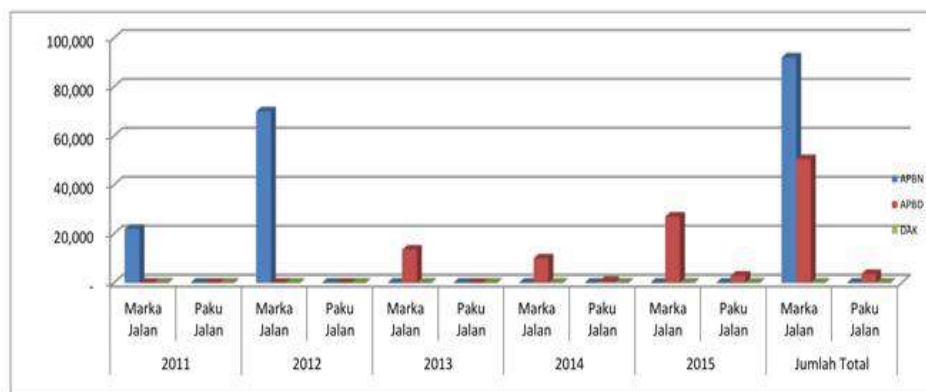
Gambar 4.45 Jumlah rambu jalan yang dipasang pada tahun 2011-2015



Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	Total (Buah)
APBN	0	*	*	*	*	-
APBD	0	28	160	115	120	213
DAK	-	-	-	10	-	10

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

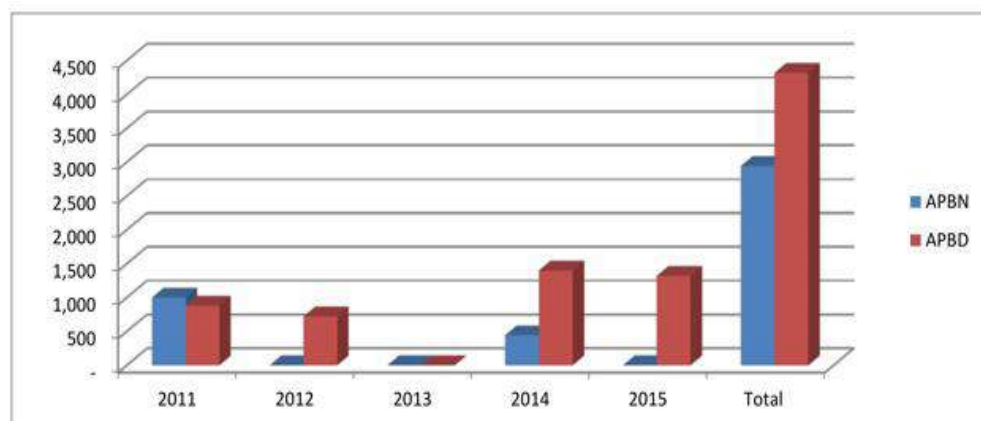
Gambar 4.46Jumlah cermin tikungan yang dipasang pada tahun 2011-2015



Tahun	2011		2012		2013		2014		2015		Jumlah Total	
	Marka Jalan	Paku Jalan	Marka Jalan	Paku Jalan	Marka Jalan	Paku Jalan	Marka Jalan	Paku Jalan	Marka Jalan	Paku Jalan	Marka Jalan	Paku Jalan
APBN	70000 M	-	-	-	-	-	-	7784 buah	-	-	92000 M	7784 buah
APBD	-	-	13530 M	4000 buah	40000 M	4000 buah	32379 M	2900 buah	36000 M	1950 buah	121909 M	12850 buah
DAK	-	-	-	-	-	2272 buah	5379 M	500 buah	6000 M	700 buah	11379 M	3472 buah

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

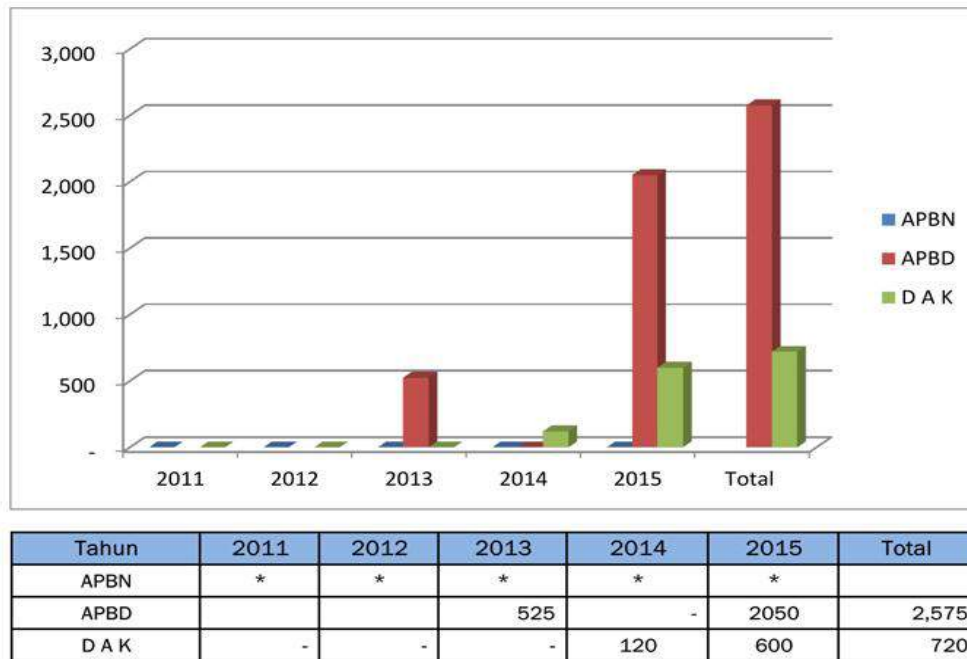
Gambar 4.47 Jumlah marka jalan dan paku jalan yang dipasang pada tahun 2011-2015



Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	Total
APBN	1,000	-	-	444	*	2,944
APBD	880	720	-	1400	1320	4,320

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Gambar 4.48 Jumlah Pagar pengaman jalan (guardrail) yang dipasang pada tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Gambar 4.49 Jumlah Delineator yang dipasang pada tahun 2011-2015

6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah peningkatan akuntabilitas kelembagaan dan kapabilitas sumberdaya manusia dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. Untuk pelaksanaan kegiatan ini telah dianggarkan dana sebesar Rp. 1.766.065.000,- dan selama satu tahun telah terserap sebesar Rp. 1.386.309.559,- atau 78,50%. Output kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan dan pengendalian muatan dengan outcome meningkatnya kinerja pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

4.1.8 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Program pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi merupakan prioritas pembangunan ke 4 (empat) dalam RPJMD Provinsi Jambi yakni “Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan”. Pada tahun 2015 program dan kegiatan dibiayai melalui

sumber dana APBD murni Provinsi Jambi sebesar Rp. 7.514.026.000,- kemudian terjadi penambahan sebesar Rp. 190.000.000,- pada APBD- Perubahan sehingga jumlah setelah APBD- Perubahan menjadi Rp. 7.704.026.000,-. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terbagi dari program rutin yang terdiri dari 5 (lima) program dan 20 (dua puluh kegiatan) dan program wajib yang terdiri dari 6 (enam) program dengan 16 (enam belas) kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

a. Program Rutin

Program Rutin terdiri dari 5 program dengan 20 kegiatan yang didukung oleh 5 sasaran strategis, yaitu:

1) Sasaran 1 : Tercapainya peningkatan sarana administrasi perkantoran

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 97,52 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui 11 kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Komunikasi Sumber Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2) Sasaran 2 : Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 98,80 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui 6 kegiatan, yaitu:

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Sasaran 3 : Tercapainya peningkatan disiplin kerja aparatur

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4) Sasaran 4 : Tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 66,67 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pendidikan dan pelatihan formal

5) Sasaran 5 : Tercapainya peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 93,50 % sehingga masuk dalam kategori berhasil, yang diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu:

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

b. Program Wajib

Program Wajib terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan yang didukung oleh 6 sasaran strategis, yaitu:

1) Sasaran 1 : Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur

Sasaran ini diimplementasikan melalui 2 kegiatan, yaitu:

a) Koordinasi Penyusunan AMDAL

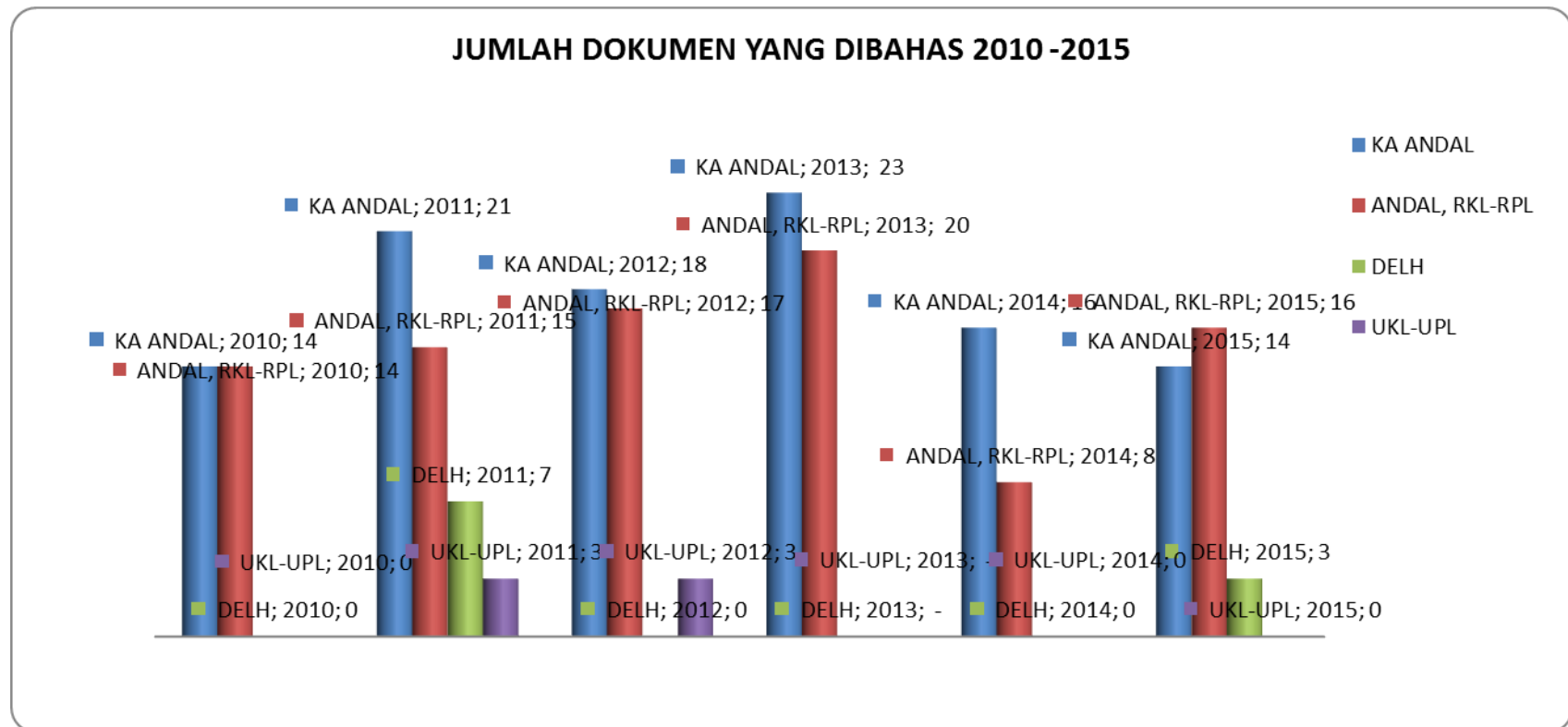
Kegiatan pengeksplorasian dan pengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang bertujuan untuk mendukung perekonomian sedikit banyak berdampak pada perubahan negatif terhadap kualitas lingkungan, berupa kerusakan dan atau pencemaran, untuk itu perlu adanya suatu tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui suatu kajian mengenai dampak lingkungan. Pada tahun 2015 penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian KA pada 14 perusahaan, penilaian dokumen Andal dan RKL –RPL sebanyak 16 perusahaan dan 1 perusahaan penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL dan 3 kali penilaian DELH.

Penerbitan surat keputusan terkait penilaian dokumen AMDAL adalah sebagai berikut :

- Surat Keputusan persetujuan Kerangka Acuan sebanyak 14 SK
- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 SK
- Izin Lingkungan sebanyak 6 izin

Dalam hal penerbitan surat keputusan terkait AMDAL, BLHD Provinsi Jambi mempunyai kewenangan hanya menerbitkan surat keputusan persetujuan kerangka acuan, sedangkan untuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur Jambi melalui BPMD dan PPT Provinsi Jambi, dan Bupati /walikota sesuai kewenangannya.

Sampai dengan akhir tahun 2015, BLHD Provinsi Jambi telah melakukan penilaian terhadap 106 dokumen KA-ANDAL, 90 dokumen ANDAL dan RKL – RPL, 10 dokumen DELH dan 6 Dokumen UKL – UPL dengan rincian pertahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.50 Penilaian Dokumen KA-ANDAL, ANDAL dan RKL – RPL, DELH dan UKL – UPL

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100 % sehingga masuk dalam kategori berhasil. Rincian pencapaian kinerja pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL terdiri dari 6 (enam) output kegiatan yaitu :

(1) Tersusunnya Dokumen Lingkungan Kantor BLHD Provinsi Jambi.

Pelaksanaan dari kegiatan ini adalah penyusunan Dokumen Lingkungan Kantor BLHD Provinsi Jambi berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), surat Rekomendasi DPLH dan Izin Lingkungan. Rekomendasi DPLH dari Kepala BLHD Kota Jambi diterbitkan pada tanggal 23 November 2015 (Nomor 660/44.A/AMDAL/BLH) dan Izin Lingkungan diterbitkan pada tanggal 23 November 2015 (nomor 147 tahun 2015). DPLH tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pemantauan kondisi rencana usaha/kegiatan atau uji tahap proyek dari target 10 rencana usaha/kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 21 rencana usaha/kegiatan.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam proses penilaian dokumen Amdal (Uji tahap proyek) tujuan dari kegiatan adalah untuk memastikan bahwa suatu rencana atau kegiatan masih dalam tahapan perencanaan dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan seperti konstruksi, operasi dan pasca operasi di lokasi kegiatan.

Dari hasil pemantauan pada 21 rencana usaha yang mengajukan pembahasan dokumen KA – ANDAL, 20 rencana usaha /kegiatan masih tahap perencanaan, sesuai dengan tata ruang dan tidak masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Sehingga terhadap 20 rencana usaha tersebut dapat diproses lebih lanjut penilaian dokumen KA – ANDALnya. Sedangkan 1 (satu) rencana usaha yaitu Pembangunan LIPPO PLAZA oleh PT. Damarindo Perkasa berada pada tahap konstruksi (80 %) sehingga dokumen AMDAL dari rencana usaha /kegiatan

tidak dapat dibahas dan proses selanjutnya di serahkan pada BLHD Kota Jambi, sedangkan PT. Damarindo Perkasa selaku Pemrakarsa Pembangunan Lippo Plaza dikenakan sanksi administratif berupa penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemantauan implementasi kelayakan lingkungan hidup dari target 30 perusahaan telah dilakukan sebanyak 39 perusahaan.

Tabel 4.121

Hasil evaluasi pembinaan dan pemantauan RKL-RPL Tahun 2105

No	Komponen yang dipantau	Hasil Evaluasi Pasif dan Aktif	
		Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai Ketentuan
1	Sistematika pelaporan (Sesuai KepmenLH Nomor 45 Tahun 2005)	6 Perusahaan (15,38%)	33 Perusahaan (84,61%)
2	Penyusunan laporan	16 Perusahaan (41,02%)	23 Perusahaan (58,97%)
3	Penyampaian laporan	1 Perusahaan (2,56%)	38 Perusahaan (97,36%)
4	Implementasi RKL-RPL	0	0
5	Keberadaan dokumen lingkungan di lokasi kegiatan	24 Perusahaan (61,54%)	15 Perusahaan (38,46%)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan tersebut BLHD Provinsi Jambi telah melakukan pembinaan dengan memberikan informasi mengenai implementasi RKL-RPL, sistematika laporan, arahan, masukan dan saran terkait kepada seluruh perusahaan tersebut dalam rapat koordinasi teknis evaluasi kewajiban izin lingkungan pada tanggal 15 – 16 Desember 2015, dengan harapan, kedepan pihak perusahaan dapat mengimplementasikan dokumen RKL-RPL –nya secara utuh/komplit, bertanggung jawab dan penuh kesadaran untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dampak kegiatan

/usahanya demi mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam rangka menurunkan beban pencemaran dan mencegah timbulnya kerusakan pada lingkungan hidup.

- (4) Pembinaan pemantauan dan pengawasan terhadap komisi penilai AMDAL Kabupaten /kota yang memiliki komisi penilai AMDAL yaitu kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemeriksaan UKL-UPL dilakukan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Hasil evaluasi komisi penilai AMDAL adalah sebagai berikut :

(a) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Sarolangun :

- Mendapat rekomendasi lisensi dari Kepala BLHD Provinsi Jambi Nomor S-15/BLHD-2.1/I/2014 tanggal 9 Januari 2014
- Mendapat Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Bupati sarolangun Nomor 660/15/BLHD/2014 tanggal 15 Januari 2014 .
- Sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 telah menilai 23 dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL-RPL sampai penerbitan SKKL)

(b) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

- Mendapat rekomendasi lisensi dari Kepala BLHD Provinsi Jambi Nomor S-668/BLHD-2/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013
- Mendapat Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 660.4/2301/BLHD/2013 tanggal 28 Oktober 2013 .
- Sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 telah menilai 8 dokumen AMDAL (KA, ANDAL)

Pada tahun 2015, terdapat 2 (dua) permohonan rekomendasi lisensi yang diajukan oleh kabupaten Batanghari dan Kota Jambi, dari hasil verifikasi terhadap permohonan tersebut, baru KPA Kota Jambi yang telah memenuhi persyaratan lisensi dan dapat diberikan rekomendasi.

(c) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) AMDAL se Provinsi Jambi telah dilaksanakan sebanyak 1 kali

Pertemuan teknis ditujukan bagi personil instansi lingkungan hidup yang membidangi AMDAL dan perusahaan yang telah dilakukan pemantauan pada Tahun 2015, tujuan dari kegiatan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia institusi lingkungan hidup dalam melakukan evaluasi aktif dan pasif terhadap pelaksanaan implementasi RKL dan RPL perusahaan, berupa pemberian pengetahuan /pembekalan tentang teknik dan metode pemantauan implementasi RKL-RPL dan peraturan di bidang AMDAL dan perusahaan yang membidangi pengelolaan lingkungan.

(d) Penaatan Hukum Lingkungan

Kegiatan Penaatan hukum lingkungan yang merupakan bagian dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana dalam pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pihak dunia usaha terhadap ketaatan peraturan perundangan lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan perusahaannya.

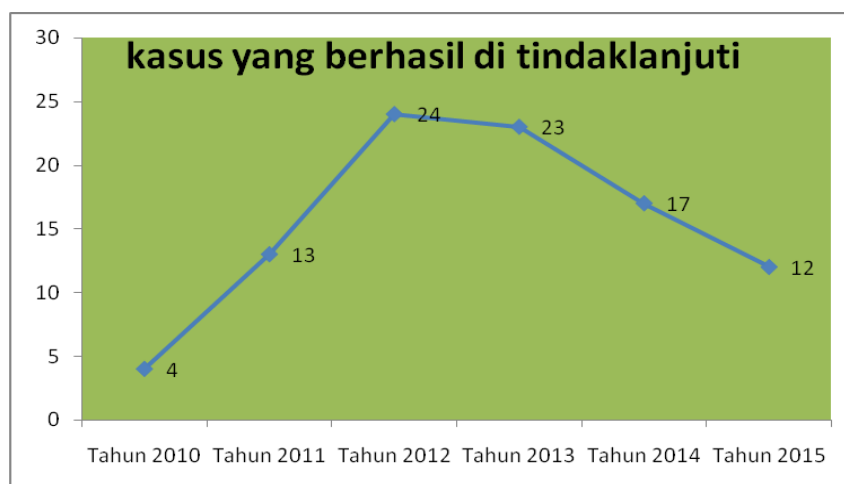
Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 95,81% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*. Pencapaian kinerja pada sub kegiatan “Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan” Rincian pencapaian kinerja pada sub kegiatan Penaatan Hukum Lingkungan terdiri dari 4 (empat) output kegiatan yaitu :

a) Persentase Penyelesaian pengaduan kasus lingkungan

Pelaksanaan kegiatan penanganan kasus pengaduan lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Negara LH Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim penanganan pengaduan BLHD provinsi Jambi terhadap pengaduan yang disampaikan melalui POS PENGADUAN Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, pada tahun 2015 telah terselesaikan 100 perses pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 12 kasus lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

- Sektor Industri Pulp in Paper sebanyak 1 kasus
- Sektor Pertambangan Batu Bara sebanyak 4 kasus
- Sektor Pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 1 kasus
- Sektor MIGAS sebanyak 2 kasus
- Sektor kegiatan Lain-lain sebanyak 4 kasus

Progres kegiatan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaporkan ke POS pengaduan BLHD Provinsi Jambi dalam Periode 2010 – 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

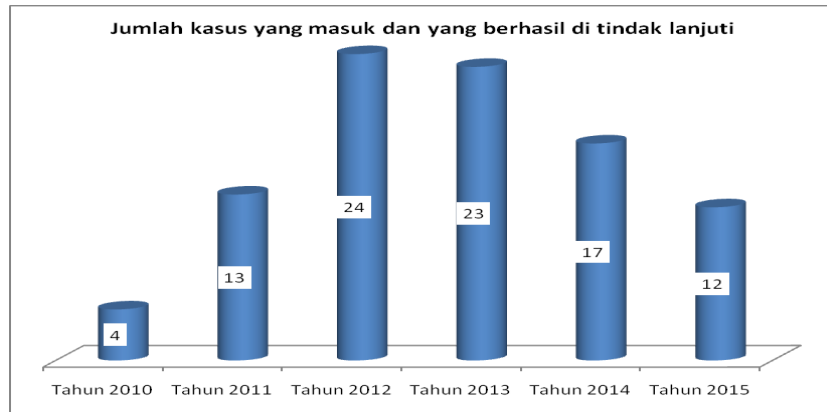
Gambar 4.51 Jumlah kasus yang diadukan dan yang berhasil ditindaklanjuti BLHD Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015

- b) Pembinaan dan pengawasan ketaatan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pada 32 perusahaan dengan rincian :
- Sektor Pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 24 perusahaan
 - Sektor MIGAS sebanyak 2 perusahaan
 - Sektor Pertambangan Batu Bara sebanyak 2 perusahaan
 - Sektor kegiatan Lain-lain sebanyak 4 perusahaan
- c) Melaksanakan Forum Diskusi Group (FGD) penanganan kasus lingkungan kabupaten/kota se provinsi jambi sebanyak 1 kali, diikuti oleh 11 (sebelas) instansi lingkungan lingkup provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan dilaksanakan di Aula BLHD Provinsi Jambi dengan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, BLHD Provinsi Jambi dan BLH Kota Jambi.
- d) Melakukan inventarisasi data penanganan pengaduan kasus lingkungan di kabupaten/kota dalam provinsi jambi.

Hasil dari kegiatan inventarisasi data penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup yang di tangani oleh instansi lingkungan hidup kabupaten kota adalah sebagai berikut :

- Kota Jambi sebanyak 17 kasus
- Kota sungai penuh sebanyak 4 kasus
- Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 4 kasus
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 kasus
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 1 kasus
- Kabupaten Batanghari sebanyak 4 kasus
- Kabupaten Bungo sebanyak 1 kasus
- Kabupaten Merangin sebanyak 1 kasus
- Kabupaten Sarolangun sebanyak 1 kasus
- Kabupaten Kerinci sebanyak 3 kasus
- Kabupaten Tebo tidak ada kasus

Progres kegiatan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilaporkan ke POS pengaduan BLHD Provinsi Jambi dalam Periode 2010 – 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.52 Jumlah kasus yang diajukan dan yang berhasil ditindaklanjuti BLHD Provinsi Jambi tahun 2010 – 2014

- 2) Sasaran 2 dan 3 : Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlaksananya peningkatan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

Dalam rangka mencapai sasaran 2 dan 3 sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a) Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Tidak akan ada yang dapat mengetahui apakah pendugaan dampak benar terjadi dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi khususnya kualitas air sungai lintas Kabupaten/Kota dan kualitas udara ambien di Wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 4.122
Data Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi TA 2015

No	Kabupaten	Nama Sungai	Jumlah Titik Sampling	Lokasi	Status Mutu Air
1	Kabupaten Batanghari	Batang Tembesi	1	Desa Suka Ramai Kec. Ma Tembesi	Cemar Ringan
2	Kabupaten Tebo	Batang Tebo	1	Kelurahan Ma Tebo, Tebo Tengah	Cemar Sedang
3	Kabupaten Bungo	Batang Tebo	4	Kelurahan Manggis, Kec. Bathin III	Cemar Ringan
		Batang Bungo		Kelurahan Tanjung Gedang Kec. Ps. Muaro Bungo	Cemar Sedang
		Batang Tebo		Desa Teluk Pandak, Kec. Tanah sepenggal	Memenuhi Baku Mutu
		Batang Bungo		Desa Tanjung Agung, Kec. Muko-muko Bathin VII	Cemar Ringan
4	Kabupaten Sarolangun	Batang Tembesi	3	Desa Pauh , Kec Pauh	Memenuhi Baku Mutu
		Batang Merangin		Desa Kasang Melintang, Kec Pauh	Memenuhi Baku Mutu
		Batang Tembesi		Desa Batu Kucing Kec Pauh	Memenuhi Baku Mutu
5	Kabupaten Merangin	Batang Tabir	3	Kelurahan Mampun, Kec Tabir	Memenuhi Baku Mutu

No	Kabupaten	Nama Sungai	Jumlah Titik Sampling	Lokasi	Status Mutu Air
		Batang Tabir		Desa Kota Baru, Kec Tabir	Cemar Ringan
		Batang Merangin		Kel. Pasar Bangko, Kec. Bangko	Cemar Ringan
6	Kabupaten Kerinci	Outlet Danau Kerinci ke Batang Merangin	2	Desa Sanggaran Agung, Kec. Keliling Danau	Cemar Ringan
		Batang Merangin		Desa Muara Hemat, Kec. Batang Merangin	Cemar Ringan
7	Kota Sungai Penuh	Batang Merao	2	Desa Simpang Tigo Rawang	Memenuhi Baku Mutu
		Batang Merao		Desa Baru Debai, Kec.Tanah Kampung	Cemar Ringan

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel hasil pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten/kota di 16 titik sampling diatas menunjukkan bahwa kualitas air sungai lintas kabupaten kota dalam provinsi Jambi masih memenuhi baku mutu air kelas II.

Tabel 4.123
Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten /Kota
dalam Provinsi Jambi TA 2015

No	Kabupaten	Hasil (µg/Nm ³)
1	Kota Jambi	38,13 (Status Baik)
2	Muaro Jambi	47,31 (Status Baik)
3	Batang Hari	49,43 (Status Baik)
4	Tanjung Jabung Barat	45,19 (Status Baik)
5	Tanjung Jabung Timur	37,42 (Status Baik)
6	Tebo	48,01 (Status Baik)
7	Bungo	52,25 (Status Baik)
8	Merangin	53,66 (Status Baik)
9	Sarolangun	55,08 (Status Baik)
10	Kerinci	35,30 (Status Baik)
11	Sungai Penuh	30,48 (Status Baik)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan kualitas udara yang terpantau di sejumlah wilayah tersebut maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki kualitas udara yang masih baik dan aktivitas yang ada belum mencemari udara. Namun demikian upaya preventif pengadaan Ruang Terbuka Hijau disekitar area tersebut tetap dibutuhkan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain melakukan pemantauan kualitas lingkungan, BLHD Provinsi Jambi juga menyelenggarakan diseminasi hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2014 kepada para pemangku kepentingan terkait seperti pejabat/petugas pemantau kualitas air dari badan /kantor LH kabupaten/kota dalam provinsi Jambi, pejabat yang menangani lingkungan hidup dari Bappeda se -Provinsi Jambi.

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori berhasil.

b) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 serta meningkatkan ketaatan dunia usaha dalam melakukan pengelolaan limbah B3.dengan output sebagai berikut :

1) Melaksanakan pengawasan dalam rangka pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap 52 Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- Sektor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 34 perusahaan
- Sektor MIGAS sebanyak 4 perusahaan
- Sektor Industri pulp sebanyak 1 perusahaan
- Sektor pertambangan batu bara sebanyak 11 perusahaan
- Sektor perkebunan HTI sebanyak 7 perusahaan
- Sektor crumrubber sebanyak 4 perusahaan
- Sektor lain-lain sebanyak 2 perusahaan

Dari 52 perusahaan yang diawasi , hanya 44 atau sekitar 86,2 % perusahaan yang sudah menindaklanjuti /memperbaiki pelanggaran.

2) Melaksanakan Inventarisasi perizinan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten /kota di Provinsi Jambi .

Hasil dari kegiatan inventarisasi adalah tersedianya data perizinan pengelolaan limbah B3 di kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :

- Kota Jambi sebanya 42 izin TPS LB3
- Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 38 izin TPS LB3
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 25 izin TPS LB3
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 3 izin TPS LB3
- Kabupaten Batanghari sebanyak 13 izin TPS LB3
- Kabupaten Merangin sebanyak 5 izin TPS LB3
- Kabupaten Sarolangun sebanyak 17 izin TPS LB3
- Kabupaten Kerinci sebanyak 1 izin TPS LB3
- Kabupaten Tebo sebanyak 11 izin TPS LB3
- Kabupaten Bungo sebanyak 15 izin TPS LB3

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 100% sehingga masuk dalam kategori berhasil

3) Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah

Selain menjalankan fungsinya sebagai badan pengendali dampak lingkungan dari kerusakan dan pencemaran, BLHD Provinsi Jambi juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan dan Pos Pengaduan lingkungan Hidup. UPTB Laboratorium Lingkungan daerah BLHD memberikan pelayanan kepada masyarakat luas terhadap pemantauan kualitas lingkungan air, udara dan tanah dengan jumlah tanah yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, UPTB Laboratorium Lingkungan daerah Telah teregistrasi kompetensi oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI nomor 00056/LPJ/LABLING -1/LRK/KLH. Selama periode tahun 2009 – 2013, UPTB Laboratorium Daerah hanya mampu melakukan pengukuran terhadap 16 parameter, namun untuk periode tahun 2013 – 2015 UPTB Laboratorium Daerah telah mampu mengakreditasi 70 parameter yang terdiri dari 32 parameter untuk pengukuran air permukaan dan 3 parameter untuk pengukuran udara ambien.

- Jumlah pemeriksaan sampel tahun 2015
- Jumlah sampel Air 3.634 sampel
- Jumlah Sampel Udara 351 sampel

UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Provinsi Jambi telah berhasil memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi dengan capaian pendapatan yang selalu melampaui target setiap tahunnya. Dasar penarikan retribusi jasa usaha daerah adalah PERDA No 01 Tahun 2012 dan sejak tanggal 16 september 2015 berlaku PERDA Nomor 06 tahun 2015. Jumlah PAD bersumber dari Pelayanan UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.124
Pencapaian Kinerja

No	Tahun	Target	Realiasi
1	2009	200.000.000,-	255.189.500,-
2	2010	250.000.000,-	338.355.800,-
3	2011	400.000.000,-	494.439.800,-
4	2012	500.000.000,-	649.148.650,-
5	2013	600.000.000,-	831.591.800,-
6	2014	900.000.000,-	981.846.950,-
7	2015	1.074.296.000,-	2.590.827.900,-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 96,33% sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

4) Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Pemerintah Pusat dan Daerah serta penanggung jawab usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 memiliki kewenangan, peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian polusi sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menjalankan rencana strategis yang berimbang dengan kemajuan teknologi agar tetap terjaga tatanan lingkungan. dengan output sebagai berikut :

- (a) Melaksakanan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi dalam pengendalian polusi dan pencemaran udara. Salah satu upaya pengendalian polusi dan pencemaran udara oleh pelaku usaha/kegiatan dengan melakukan pemantauan kualitas emisi dari sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak agar tetap memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. BLHD Provinsi Jambi tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan monitoring dan penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran sebagai implementasi dari kordinasi operasional pengendalian pencemaran udara. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dipusatkan di Kota

Jambi pada bulan Mei 2015, dengan peserta berasal dari asosiasi angkutan darat, pelaku industry, hotel, rumah sakit, serta pimpinan dealer mobil yang ada di provinsi Jambi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah agar dimasa mendatang pemangku kepentingan di kabupaten/kota dapat menjalankan wewenang, peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan pengendalian polusi dan pencemaran serta mendorong pelaku usaha agar melaksanakan tanggung jawab terkait pengendalian polusi dan pencemaran.

(b) Melakukan Inventarisasi dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha /kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada 6 perusahaan dengan hasil sebagai berikut :

- (1) PT.BNP (Agro Industri) : telah melakukan pemeriksaan kualitas udara emisi tidak bergerak pada tiap genset dan boiler setiap dua tahun sekali namun untuk sumber emisi bergerak belum pernah dilakukan.
- (2) PT Pelita (Agro Industri) : Pada tahun 2014 dan 2015 telah melakukan pemantauan kualitas emisi untuk semua sumber tidak bergerak dua tahun sekali, sedangkan untuk sumber yang bergerak belum dilakukan pemantauan.
- (3) PT KSO Pertamina EP – BWP Meruap (PEM) : Pada tahun 2014 dan 2015 telah melakukan pemantauan kualitas emisi untuk semua sumber tidak bergerak dan sumber yang bergerak dua tahun sekali.
- (4) PT WKS (HTI) : telah melakukan pemantauan kualitas emisi untuk semua sumber tidak bergerak pada 10 unit genset dengan hasil dibawah baku mutu, dan sebanyak 32 unit mobil kendaraan operasional juga telah dilakukan pemantauan oleh dinas perhubungan kota jambi dengan hasil lulus uji
- (5) PT Petrochina (PEM) : telah melakukan pemantauan kualitas emisi untuk semua sumber tidak bergerak dua tahun sekali, sedangkan untuk sumber yang bergerak belum dilakukan pemantauan.

(6) PT TPIL (Agro Industri) : Belum pernah melakukan pemantauan kualitas emisi dari sumber tidak bergerak dan bergerak

(7) PT KMP (Agro Industri) : Belum pernah melakukan pemantauan kualitas emisi dari sumber tidak bergerak dan bergerak

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 87,53% sehingga masuk dalam kategori *cukup berhasil*.

- 3) Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar

Sasaran ini diimplementasikan melalui 3 kegiatan, yaitu:

a) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Provinsi Jambi dengan bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, rendah serta lahan gambut, dengan kondisi ini memiliki potensi sebagai penyimpan Karbon (Stok Karbon) maupun sebagai penghasil Karbon (Emitter Karbon). Aktivitas perekonomian masyarakat Jambi juga menjadi peluang sebagai sumber emisi Karbon, dominasi sektor perkebunan, pertanian dapat mempengaruhi alih fungsi lahan hutan menjadi sub sektor tersebut, tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan menjadi penyebab utama emisi karbon di Negara-negaraberkembang. Aktivitas pemukiman, sektor industry menghasilkan limbah cair, padat, maupun gas. Semua limbah tersebut berpotensi sebagai penghasil emisi Karbon. Penghitungan semua aktivitas perekonomian pada setiap sektor yang menghasilkan emisi Karbon akan menentukan perhitungan mitigasi yang akan diambil. Kegiatan mitigasi ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi. Pada tahun 2015 melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim maka diadakan kegiatan untuk menunjang implementasi RAD GRK di Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan mitigasi, dan penghitungan besaran emisi khusus untuk sektor limbah. Sub output dari kegiatan ini adalah

(1) Koordinasi Pembentukan Kelembagaan/ Sekretariat RAD GRK

Koordinasi pembentukan kelembagaan/sekretariat RAD GRK dilakukan di 11 kabupaten/kota. Kegiatan ini dimulai dengan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jambi. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan Pokja RAD GRK Provinsi Jambi, yakni Pokja Limbah yang dikoordinir oleh BLHD, Pokja Berbasis Lahan yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan dan terdiri dari anggota Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian, serta Pokja Energi yang terdiri dari Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan. Setiap pokja membuat perhitungan sendiri dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait dengan kabupaten/kota. Melalui peningkatan koordinasi sekretariat ini dapat dilakukan perbaikan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD GRK Provinsi Jambi.

Tabel 4.125
Kelembagaan/Sekretariat RAD GRK

No	Kabupaten /Kota	Status Pembentukan Sekretariat RAD GRK		
		SK.Bupati/walikota	Pokja RAD GRK	Dok.RAD GRK
1.	Kerinci	Proses	-	-
2.	Sungai penuh	Proses	Ada	Proses
3.	Bungo	Ada	ada	Ada
4.	Tebo	Ada	ada	Ada
5.	Merangin	SK 108/Bappeda/2015 tentang Tim Koordinasi dan Pokja Penyusunan RAD GRK	SK no 151/Bappeda/2015 tentang pembentukan tim pelaksanaan penyusunan RAD GRK	-
6.	Sarolangun	-	-	-
7.	Batanghari	-	-	-
8.	Muaro Jambi	Ada	Ada	Ada
9.	Tanjabtim	-	-	-
10.	Tanjabbar	-	-	-
11.	Kota Jambi	-	-	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

(2) Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Sosialisasi / Aksi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dilakukan pada :

- Sekolah Dasar di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Materi sosialisasi adalah emisi gas rumah kaca dan bahan perusak ozon serta dampak terhadap lingkungan
- Sosialisasi kepada dunia usaha terutama industri Crude Palm Oil (CPO) yang menimbulkan emisi GRK dilaksanakan di PT.Dasa Anugrah Sejahtera (DAS). Alasan memilih industri CPO karena limbah cair CPO merupakan sumber emisi gas methan yang cukup besar di Provinsi Jambi dibanding industri lainnya. Besaran emisi gas methan dari industri CPO adalah 182 juta tonmethan M3 atau 4,3 milyar CO2. Antisipasi yang dapat dilakukan oleh dunia usaha adalah melakukan penangkapan gas methan (methan capture) dan mengubahnya menjadi energi listrik sebesar 547.459 MW. Untuk menunjang pembiayaan penangkapan gas methan maka Millenium Compact Account for Indonesai (MCAI) diundang sebagai narasumber untuk mendanai pembangunan pembangkit tenaga listrik dari gas methan. MCAI adalah sumber pembiayaan dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan hijau (Green Prosperity) bagi negara –negara berkembang.

(3) Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Inventarisasi GRK dengan Aplikasi SIGNSMART di Provinsi Jambi

Total Emisi GRK Provinsi Jambi dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi SIGNSmart Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.126
Total Emisi GRK di Provinsi Jambi

Tahun	Sektor	Total Emisi (Ton CO2)
2013	Limbah	470.719
	Pertanian	623.993
	Lahan	52.475.802
Jumlah		584.414
2014	Limbah	461.406
	Pertanian	227.011
Jumlah		688.417

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

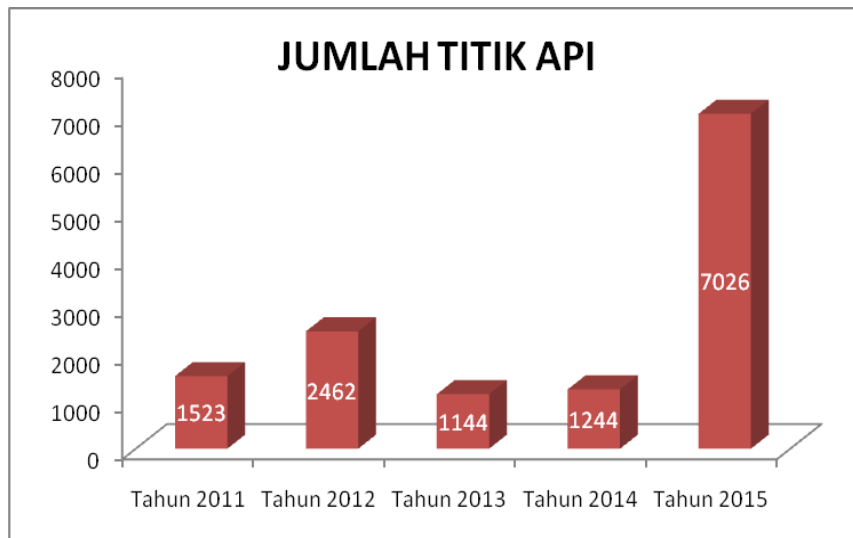
Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 99,98 % sehingga masuk dalam kategori berhasil.

a. Kegiatan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan mengambil lokasi kegiatan di Kabupaten Bungo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan lokasi kegiatan adalah Kabupaten batanghari dan Kabupaten Tebo.

Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Tujuan lain dari kegiatan Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan adalah tersedianya data hotspot provinsi Jambi. Dari kegiatan ini juga dilakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota menuju Indonesia Hijau.



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.53 Jumlah Titik Api di Provinsi Jambi

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 97,56 % sehingga masuk dalam kategori berhasil.

- 4) Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran ini diimplementasikan melalui 2 kegiatan, yaitu:

a) Batang Hari Bersih

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh BLHD Provinsi Jambi dari tahun 2010 – 2014 ternyata Sungai batanghari yang paling berada dalam kondisi tercemar berat oleh Bakteri *E.coli*. Tercemarnya sungai Batanghari dimungkinkan karena tingginya aktifitas domestik penduduk dibantaran sungai. Atas Inisiatif Gubernur jambi Hasan basri Agus, dicanangkanlah kegiatan batanghari Bersih yang dimulai sejak tahun 2012 dengan jumlah WC dan sarana air bersih yang dibangun sebanyak 313 unit. Kegiatan telah dapat mencegah masuknya 86,8 trilyun bakteri *E.coli* kedalam sungai Batanghari. pada tahun 2015 kembali di bangun 100 unit WC dan sarana air bersih pada dua lokasi yaitu kabupaten muaro Jambi dan Kota Jambi. secara keseluruhan

jumlah WC dan sarana air bersih yang dibangun dalam rangka gerakan Batanghari bersih sebanyak 413 unit. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas air sungai Batanghari sehingga bisa dijadikan sebagai modal atau sumber daya air yang berfungsi untuk menunjang pembangunan dan memberikan penyediaan air bersih bagi masyarakat di sekitar sungai Batanghari.

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 91,93 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasaran kegiatan ini adalah untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.meliputi out put kegiatan yaitu :

- (1) Terbinanya dan terpilihnya pemenang kota bersih, adipura,kalpataru dan adiwiyata,
- (2) Terpilihnya juara lomba dalam rangka hari LH sedunia tk.provinsi Jambi,
- (3) Terlaksananya peringatan hari LH sedunia Tk. Provinsi Jambi,
- (4) Tersosialisasinya kegiatan Batanghari bersih pada masyarakat sekitar sungai Batanghari,
- (5) Terbinanya kelompok masyarakat peduli sungai Batanghari.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pemilihan pemenang kota bersih,Adipura,Kalpataru,dan Adiwiyata pada 11 kab/kota di wilayah Provinsi Jambi, hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Tahun 2010

Pemerintah Provinsi Jambi menerima 2 Penghargaan yaitu:

- (a) Kota Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sebagai penerima Tropi Adipura Untuk Kategori Kota sedang/kecil

- (b) Kota Bangko kabupaten Merangin sebagai penerima Tropi Adipura untuk kota sedang/kecil

(2) Tahun 2011

Pemerinta Provinsi Jambi menerima 2 penghargaan yaitu :

- (a) Kota Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sebagai penerima Tropi Adipura Untuk Kategori Kota sedang/kecil
- (b) Kota Bangko kabupaten Merangin sebagai penerima Tropi Adipura untuk kota sedang/kecil

(3) Tahun 2012

Pemerintah Provinsi Jambi menerima 7 penghargaan yaitu :

- (a) Penerima Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2012 untuk Kabupaten Kerinci penerima Sertifikat harapan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2012
- (b) Penerima penghargaan Adipura Tahun 2012
- (c) Kota Sarolangun Kabupaten sarolangun sebagai penerima tropi Adipura untuk kategori Kota sedang/kecil.
- (d) Kota Bangko Kabupaten Merangin Tropi Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
- (e) Kota Jambi sebagai penerima sertifikat Adipura untuk kategori Kota sedang
- (f) Kota Muaro Bungo Kabupaten Bungo sebagai penerima plakat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
- (g) Penerima Penghargaan Kalpataru Rahmad Arifin untuk kategori pengabdian Lingkungan.
- (h) Penerima Penghargaan sekolah Adiwiyata sebanyak 1 sekolah

(4) Tahun 2013

Pemerintah Provinsi Jambi menerima 9 penghargaan yaitu :

- (a) Penerima penghargaan Penyusunan Stasus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2013 sebagai Provinsi Terbaik penerima

Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan hidup Daerah Tahun 2012

- (b) Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2013
- (c) Kota Jambi sebagai penerima Tropi Adipura untuk kategori kota sedang
- (d) Kota Sarolangun Kabupaten sarolangun sebagai penerima Tropi Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
- (e) Penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 4 Sekolah
- (f) Penerima sertifikat kampung Iklim untuk Kelurahan Mudung Laut dan Kelurahan Eka jaya Kota Jambi.

(5) Tahun 2014

Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan 17 (tujuhbelas) penghargaan pengelolaan lingkungan tingkat nasional yang terdiri dari :

- (b) Penerima Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2013
- (c) Provinsi Jambi sebagai Provinsi terbaik Penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah Tahun 2013
- (d) Kota sungai Penuh sebagai Kabupaten/kota Terbaik penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2013
- (e) Kabupaten Sarolangun sebagai Kabupaten/kota Terbaik Penerima Plakat Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2013
- (f) Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2014
 - H. Hasan Basri Agus untuk Nominasi kategori Pembina lingkungan
 - Rahmat Hidayat untuk kategori Perintis Lingkungan
 - Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Desa Guguk Kecamatan renah Pembarap Kabupaten Merangin untuk Kategori Penyelamat Lingkungan

- (g) Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2014

- Kota Jambi sebagai penerima Tropi Adipura untuk Kategori Kota Sedang
- Kota Muaro Bungo Kabupaten Muaro Bungo sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
- Taman Remaja Kota Jambi sebagai Penerima Plakat untuk Kategori Taman Kota Terbaik

(h) Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 7 sekolah :

- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri 49/IV Jambi Timur, Kota Jambi
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SMP Negeri 41, Kabupaten Muaro Jambi
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri 02/VII Pasar Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SMP Negeri 1 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri No. 131/II SKB, Bathun III, Kabupaten Bungo
- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SMA Negeri 1 Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo

(i) Penerima Penghargaan Kampung Iklim.

- Penghargaan Sertifikat Kampung Iklim Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk Gabungan Kelompok Tani SEJAHTERA Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.
- Penghargaan Sertifikat Kampung Iklim Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) NDENDANG HULU SAKO BATANG BUAT Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo.

(6) Tahun 2015

Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan 11 (sebelas) penghargaan pengelolaan lingkungan tingkat nasional yang terdiri dari :

(a) Penerima Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2014

- Provinsi Jambi sebagai Provinsi terbaik Penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014
- Kota sungai Penuh sebagai Kabupaten/kota Terbaik Harapan Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2014
- Kabupaten Sarolangun sebagai Kabupaten/kota Terbaik Harapan Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2014
- Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten/kota Terbaik Harapan Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Tahun 2014

(b) Penerima Penghargaan Pembina Lingkungan Tahun 2015

- Ketua LA Lekuk 50 Tumbi De Lempur Kabupaten Kerinci memperoleh penghargaan kategori Pembina Lingkungan
- Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2015
 - Kota Jambi sebagai penerima Piala Adipura untuk Kategori Kota Sedang
 - Kota Bangko Kabupaten Merangin sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
 - Kota Sungai Penuh sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
 - Kota Muaro Bulian Kabupaten Batanghari sebagai Penerima sertifikat Adipura untuk kategori kota sedang/kecil
- Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional sebanyak 1 sekolah Penghargaan SekolahAdiwiyata Mandiri Tingkat Nasional Tahun 2014 untuk SD Negeri 64 Kabupaten Sarolangun

- Penghargaan Setya Lencana (Kegiatan 5 Tahun)
- SAD Air Hitam Bukit Dua Belas Kategori Penyelamat Lingkungan

Pencapaian kinerja untuk pemenuhan sasaran ini adalah 60,49% sehingga masuk dalam kategori belum berhasil.

- 5) Sasaran 6 : Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran dari program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah : 1). Pembuatan leaflet dengan lokasi penyebaran pada masyarakat dalam provinsi Jambi, 2) kegiatan penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kesehatan terhadap para ibu dan anak melalui pengoperasian mobil hijau bantuan SIKIB lokasi kegiatan pada kota-kota ibukota kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 3) kegiatan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah lokasi kegiatan di kota Jambi, 4) Sedangkan untuk kegiatan pameran yang bertema lingkungan hidup lokasi kegiatan di Kota Jambi dan kota-kota lain di luar Wilayah Provinsi Jambi

Sasaran ini diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu: Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan. Pencapaian kinerja ini adalah 64,44 % sehingga masuk dalam kategori *berhasil*.

Hasil Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup pada BLHD Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.127

Target Pencapaian dan realisasi SPM Pelayanan informasi status mutu air

No	Jenis Pelayanan	Tahun	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Keterangan
			(%)	(%)	(%)	
1	Informasi Status Mutu Air	2009	20	77,8	77,8	57,8
2		2010	40	77,8	77,8	37,8
3		2011	60	80	66,67	16,67
4		2012	80	80	88,89	18,89
5		2013	100	100	100	-
6		2014	100	100	100	-
7		2015	100	100	100	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Tabel 4.128

Target Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

No	Jenis Pelayanan	Tahun	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Keterangan
			(%)	(%)	(%)	
1	Informasi Status Mutu Udara	2009	20	-	-	-20
2		2010	40	100	100	60
3		2011	60	100	100	40
4		2012	80	100	100	20
5		2013	100	100	100	-
6		2014	100	100	100	-
7		2015	100	100	100	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

Tabel 4.129

Target Pencapaian dan realisasi SPM Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan/Atau Perusakan Lingkungan

No	Jenis Pelayanan	Tahun	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	Keterangan
			(%)	(%)	(%)	
1	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan/Atau Perusakan Lingkungan	2009	20	-	-	-20
2		2010	40	100	100	60
3		2011	60	100	100	40
4		2012	80	100	100	20
5		2013	100	100	100	-
6		2014	100	100	100	-
7		2015	100	100	100	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi

a) Kendala Dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2010 – 2014 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi mengalami hambatan-hambatan , antara lain:

- (1) Masih kurangnya SDM di BLHD Provinsi Jambi terutama untuk jabatan Fungsional, saat BLHD Provinsi Jambi memiliki tenaga fungsional PPNS 3 orang, PPLHD 4 orang dan fungsional Pedal sebanyak 9 Orang.
- (2) Masih rendahnya Kesadaran dari masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kualitas sungai terutama masalah pertambangan tanpa izin (PETI), masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan masih banyaknya MCK di Sepanjang sungai terutama sungai batanghari.
- (3) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan pengawasan serta pengelolaan terhadap dampak lingkungan antara lain, kebakaran lahan dan hutan serta pencemaran sungai batanghari akibat kegiatan PETI, industri, limbah domestik dsb.
- (4) Belum tersedianya alat untuk melakukan pemeriksaan kualitas udara (ISPU) secara kontiyu.

Solusi yang bisa diambil dari kedua solusi diatas adalah : meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan. Dalam menangani mitigasi kebakaran hutan dan lahan maka akan diambil langkah koordinatif dalam pencegahan kebakaran.

4.1.9 Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Untuk mencapai arah dan kebijakan Penanaman Modal di Provinsi Jambi, program dan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi harus searah dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dalam upaya mendorong peningkatan investasi di Provinsi Jambi, maka dilakukan promosi investasi yang efektif dan berkualitas oleh Badan

Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi. Selama tahun 2015, melalui program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan peningkatan kerjasama strategis (Kemitraan) untuk pengembangan investasi.
 - 2) Kegiatan fasilitasi koordinasi kerjasama dibidang penanaman modal
 - 3) Kegiatan peningkatan Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal
 - 4) Kegiatan pameran dan temu usaha luar negeri
 - 5) Kegiatan Koordinasi Tim Promosi Investasi Terpadu
 - 6) Forum Komunikasi Rencana Umum Penanaman Modal (FKRUPM) Provinsi Jambi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah Kegiatan koordinasi Pembinaan perizinan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Jambi, dan Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen.
- c. Program Penyiapan Potensi, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
- Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu Pembuatan buku Profil investasi Provinsi Jambi.
- d. Program peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- Kegiatan penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.

Adapun gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut di atas oleh BPMD dan PPT Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Penanaman Modal

Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) adalah untuk pengembangan investasi di provinsi jambi tahun 2015 adalah untuk memfasilitasi pertemuan melalui kegiatan temu usah kemitraan antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar didalam provinsi jambi. Untuk menginventarisir mitra usaha potensial di provinsi jambi, dalam rangka menarik investor potensial ke daerah serta menciptakan

sutau pertemuan yang dapat mendorong dan mendukung iklim investasi sehingga terbentuknya kemitraan usaha baru antara penanaman modal dengan pemerintah, melalui pelaksanaan temu usaha kemitraan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada 2-5 Juni 2015, bekerjasama dengan dinas/instansi terkait, BPMD-PPT Provinsi Jambi memfasilitasi/mempertemukan 250 Pelaku UMKM, UKM dengan pelaku usaha besar melalui program sosialisasi, edukasi dan kemitraan.

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal yaitu terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah (RKPPMD), dengan SKPD terkait lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Kegiatan Pembuatan Buku Profil Peluang Investasi Provinsi Jambi, dengan output 1000 buah buku profile mengenai peluang investasi di Provinsi Jambi, yang berisikan potensi investasi seluas-luasnya mengenai sumber daya alam dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maupun potensi investasi per sektor yang dibuat dalam 2(dua) bahasa Indonesia-Inggris. Sehingga informasi potensi dan peluang investasi yang tersebar di kabupaten/kota yang dimiliki oleh provinsi jambi bisa berkompilasi dan dikemas secara apik untuk bisa didistribusikan secara luas kepada para pihak yang membutuhkan selaku pengguna informasi dalam rangka realisasi dan pengembangan penanaman modal guna menarik minat investor sebanyak-banyaknya untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

B. Bidang Promosi Penanaman Modal

Dalam rangka menarik para investor untuk berinvestasi di indonesia khususnya di provinsi jambi kegiatan temu usaha di luar negeri pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi berpedoman pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005. Tujuan kegiatan temu usaha luar negeri adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya promosi potensi investasi provinsi jambi pada sektor unggulan.
2. Terlaksananya temu usaha dalam rangka promosi investasi
3. Meningkatkan jumlah investasi di provinsi Jambi

Realisasi pelaksanaannya adalah telah dilakukan promosi investasi melalui pameran dan temu usaha di dalam negeri, sebanyak 7x dengan event dan lokasi yang berbeda, termasuk juga mengikuti gelar potensi investasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementrian dan/atau Lembaga, dan mengikuti pameran investasi dan temu usaha di luar negeri, antara lain di Beijing, China dan Hanoi (Vietnam), pada acara *Indonesia Trade Fair and Business Forum 2015*.

Selain dari itu juga dalam kaitan promosi, untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Provinsi Jambi BPMD-PPT juga telah menyediakan data dan informasi mengenai peluang investasi di Provinsi Jambi, baik melalui leaflet, buku maupun video, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Kegiatan Koordinasi Tim Promosi Investasi Terpadu, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terkoordinasinya dengan baik kegiatan temu usaha/pameran promosi potensi investasi provinsi Jambi.
2. Terlaksananya kegiatan temu usaha/pameran potensi investasi yang terkonsep dengan baik sesuai dengan tema.
3. Terlaksananya kegiatan promosi investasi yang efisien, efektif, tepat guna dan sasaran.
4. Terkumpulnya data potensi unggulan di tiap kabupaten/kota di provinsi Jambi.

C. Bidang pelayanan penanaman modal.

Kegiatan Bidang Pelayanan Penanaman Modal BPMD dan PPT Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Pembinaan Perizinan Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Jambi.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau calon investor dalam mengurus perizinan dan non perizinan di Provinsi Jambi. Adapun tujuan kegiatan koordinasi pembinaan perizinan penanaman modal sebagai berikut :

- a) Terlaksananya sharing informasi antar PTSP dalam pelayanan perizinan yang sederhana, cepat dan transparan.

- b) Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan pada media elektronik (TVRI) dan media massa.
- c) Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Jambi.
- d) Meningkatkan koordinasi/konsultasi dengan PTSP di Provinsi Jambi dan BPMD dan PPT dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Konsumen

Kegiatan tersebut bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan PTSP Survei dilaksanakan pada 90 perusahaan di dalam provinsi Jambi diharapkan kedepannya BPMD dan PPT Provinsi Jambi dapat memberikan pelajaran yang terbaik kepada masyarakat sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam hal ini pada investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.

3. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur pelayanan Perizinan Penanaman Modal.

Kegiatan Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau calon investor dalam mengurus perizinan dan non perizinan di Provinsi Jambi.

Tujuan dari kegiatan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal sebagai berikut :

- a) Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana cepat dan transparan.
- b) Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan pada media elektronik (TVRI) dan media massa
- c) Tersedianya blanko, banner, leaflet tentang jenis dan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMD dan PPT di Provinsi Jambi.
- d) Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Jambi.
- e) Meningkatkan koordinasi / konsultasi dengan PTSP di Provinsi Jambi dan BKPM dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sepanjang tahun 2015 (1 Januari s/d 31 Desember 2015) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi, telah menerbitkan 304 (tiga ratus empat) perizinan dan non perizinan, yang terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) Perizinan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Non Perizinan, secara lengkap tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.130

Rekapitulasi Per-Sektor Perizinan Dan Non Perizinan Yang Telah Di Terbitkan Dari Januari 2015 S/D Desember 2015

NO	BIDANG	YANG DITERBITKAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	Penanaman Modal	25	9
2	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	-	-
3	Pekerjaan Umum	6	-
4	Sosial dan Ketenagakerjaan	-	47
5	Koperasi dan UKM	-	-
6	Pertanian	-	-
7	Perkebunan	1	24
8	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-
9	Kesehatan	9	22
10	Perikanan dan Kelautan	3	-
11	Perindustrian dan Perdagangan	-	6
12	Energi dan Sumber Daya Mineral	26	34
13	Kehutanan	23	8
14	Lingkungan Hidup	8	6
15	Peternakan	-	-
16	Perhubungan	26	21
	Jumlah	127	177

Sumber : BPMD dan PPT Provinsi Jambi, 2015

Disamping itu, jumlah Izin Penanaman Modal yang tercatat di BPMD-PPT Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 untuk PMDN sebanyak 24 (dua puluh empat) Perusahaan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.229.975.249.642,- (lima trilyun dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus

empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang, dan secara lengkap terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.131
Rekapitulasi Perizinan Penanaman Modal Yang Telah Di Terbitkan Dari
Januari 2015 S/D Desember 2015

No	Uraian	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal.	18	1.641.334.937.995.-	1.730
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.	3	1.212.500.000.000.-	1.425
3.	Izin Usaha Penanaman Modal.	1	134.307.018.500.-	226
4.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.	1	2.241.833.293.147.-	576
5.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.	1	-	-
	Jumlah	24	5.229.975.249.642.-	3.975

Sumber : BPMD dan PPT Provinsi Jambi, 2015

4. Bidang Pengendalian Dan Pembinaan Bpmd Dan Ppt Provinsi Jambi

Adapun maksud dan tujuan Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal adalah untuk :

1. Mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal;
2. Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sebagai bahan masalah untuk :
 - a) Pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan dan perizinan;
 - b) Penyusunan kebijaksanaan penanaman modal;
 - c) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Sejalan dengan hal di atas, BPMD-PPT Provinsi Jambi dalam upaya melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi, telah melakukan pengawasan langsung ke lapangan, sejumlah 163 proyek yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten / kota se - Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan dalam upaya pencapaian target dan

realisasi penanaman modal, baik PMDN maupun PMA di Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, sebagai berikut :

Tabel 4.132
Target Penanaman Modal Tahun 2010-2015

Uraian	Satuan	Target Penanaman Modal Tahunan					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
PMDN	Rp Juta	11.196.132	12.315.943	13.670.696	15.174.472	16.521.765	18.265.420
PMA	US\$ Ribuan	741.439,75	793.446	872.790	945.231	1.001.231	1.161.353

Sumber : BPMD dan PPT Provinsi Jambi, 2015

Realisasi investasi sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar Rp.4.509.135.000.000,- (4,5 Trilyun) yang terdiri dari PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.202.510.000.000,- dan PMA dengan nilai investasi sebesar US\$. 104.530,000,- atau Rp. 1.306.625.000.000,- (Kurs 1 US\$ = Rp. 12.500,-). Capaian tersebut telah mendekati capaian realisasi investasi tahun 2014 sebesar Rp. 5,1 Trilyun. Secara jelas dapat kita lihat perbandingannya dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana tabel realisasi bawah ini :

Tabel 4.133
Capaian Penanaman Modal Tahun 2010-TW III 2015

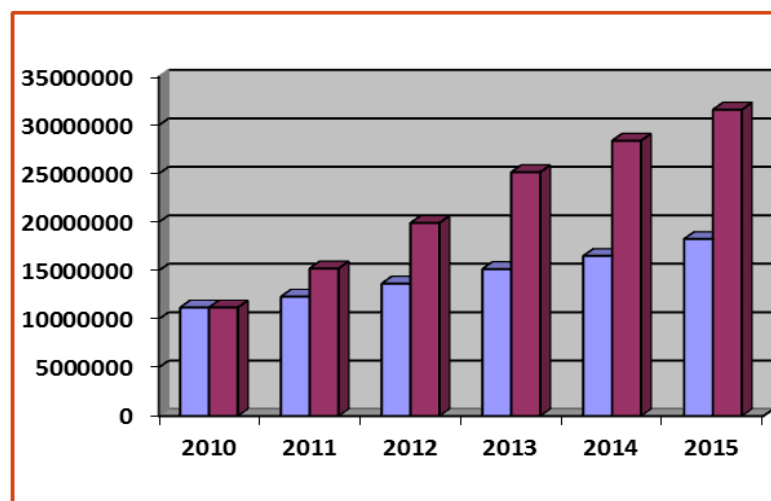
Uraian	Tahun													
	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp Juta	US\$ Ribuan	Rp Juta	US\$ Ribuan	Rp Juta	US\$ Ribuan	Rp Juta	US\$ Ribuan	Rp Juta	US\$ Ribuan	Rp Juta	US\$ Ribuan	Rp Juta	US\$ Ribuan
PMDN	9.052.117,33	1.005.790,81	11.196.319,12	1.244.035,46	15.232.450,90	1.692.494,54	19.933.675,83	2.214.852,87	25.170.266,59	2.706.480,29	28.418.185,16	2.706.493,82	31.620.695,16	2.529.655,61
Persentase	2,42%		23,69%		36,05%		30,86%		26,27%		12,90%		11,27%	
PMA	2.399.412,54	266.601,39	4.035.720,94	448.413,44	5.592.372,62	621.374,74	7.450.686,74	827.854,08	9.155.386,30	984.450,14	11.150.447,39	1.061.947,37	14.352.957,39	1.166.477,37
Persentase	10,65%		68,19%		38,57%		33,23%		18,92%		7,87%		9,84%	

Sumber : BPMD dan PPT Provinsi Jambi, 2015

Realisasi investasi tahun 2015 tersebut di atas merupakan realisasi periode berjalan diluar investasi sektor Minyak dan gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, sewa Guna Usaha, Investasi Porto Folio (Pasar modal) dan Investasi Rumah Tangga.

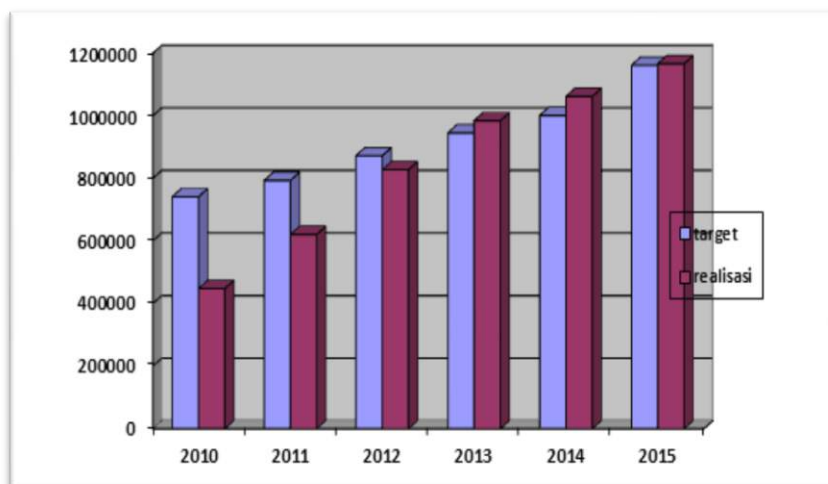
Disamping itu realisasi investasi ini merupakan data realisasi investasi perusahaan penanaman modal baik domestik maupun asing berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal ditambah dengan hasil pendataan aktif yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) Provinsi Jambi terhadap perusahaan berbadan hukum yang sudah beroperasi tetapi tidak wajib menyampaikan LKPM.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan realisasi penanaman modal di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika dilihat dari data yang di sajikan diatas, realisasi baik PMDN maupun PMA melebihi target yang di tetapkan. Perbandingan tersebut dapat terlihat jelas pada gambar berikut:



Sumber : BPMD dan PPT Provinsi Jambi, 2015

Gambar 4.54 Target dan Capaian Realisasi PMDN



Sumber : BPMD dan PPT Provinsi Jambi, 2015

Gambar 4.55 Target dan realisasi PMA (dalam US\$)

Dari gambar diatas capaian realisasi investasi triwulan III ini telah melampaui target yang ditentukan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, terciptanya situasi yang kondusif terhadap iklim investasi di Provinsi Jambi dapat dilihat pada capaian sebagai berikut :

1. Komitmen kuat dari pemerintah yang bertujuan agar tercapainya proses perizinan dan non perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi yang memudahkan para investor dalam merealisasikan kegiatan investasinya dan ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Pelayan Perizinan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
2. Upaya pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi, yang dikuatkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
3. Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jambi 2015-2025, yang akan segera ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Jambi;

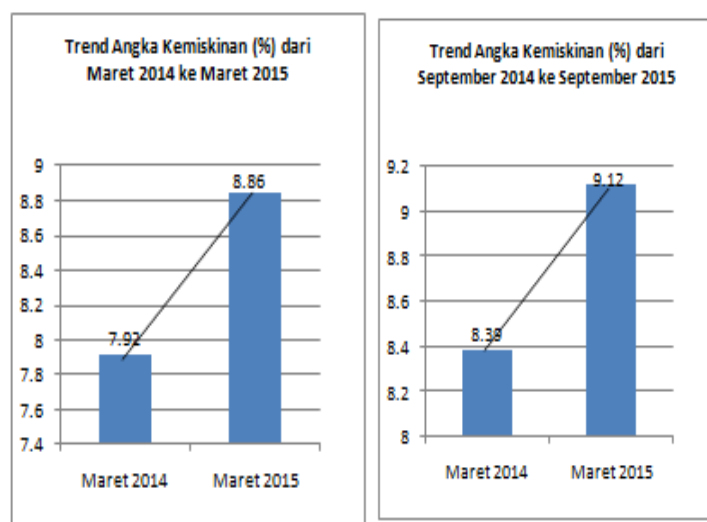
Sebagai salah satu bentuk komitmen atas dukungan kebijakan Pemerintah, BPMD-PPT Provinsi Jambi selama tahun 2015 melaksanakan program kerjasama dalam rangka peningkatan investasi di daerah, antara lain:

- a) Membuat kesepakatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel tentang Kerjasama Peningkatan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada 29 Januari 2015.
 - b) Kerjasama dengan Lembaga Kajian Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi, dalam bidang pendidikan, kajian ilmiah, pengabdian masyarakat serta diseminasi dan aplikasi hasil kajian skala produktif dan bisnis, pada 16 Februari 2015.
 - c) Selanjutnya dalam hal kerja sama daerah BPMD-PPT Provinsi Jambi, melalui MOU telah menyepakati pihak swasta untuk melakukan pengembangan tenaga kelistrikan/ energi di Provinsi Jambi.
5. Permasalahan Dan Solusi
- a) Permasalahan
 - 1) Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi;
 - 2) Anggaran yang tidak proporsional, hal ini mengingat beban tugas yang semakin meningkat, terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka masih dirasakan perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.
 - 3) Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada perizinan terpadu investasi dan pembinaan / pengawasan tidak memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius.
 - 4) Masih terkendalanya koordinasi vertikal dan horizontal, utamanya pusat dan daerah.
 - b) Solusi
 - 1) Mendorong percepatan pembentukan instansi penanaman modal di kabupaten/kota yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- 2) Anggaran yang proporsional sesuai dengan beban tugas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja pegawai serta kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Tersedianya sarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi, antara lain penyediaan infrastruktur Pelayanan Perizinan terpadu berbasis teknologi digital.
- 4) Meningkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal.

4.1.10 Sosial

Berdasarkan Berita Resmi statistik BPS Provinsi Jambi 5/01/15/Th.IX, 2 Januari 2015 No. 54/09/15/Th.IX, 15 September 2015, No. 05/01/15/Th X, 4 Januari 2016 diketahui bahwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi dari bulan Maret 2014 ke bulan Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,94% (36,91 ribu jiwa), yaitu dari 7,92% (263,80 ribu jiwa) pada Maret 2014 menjadi 8,86% (300,71 ribu jiwa) pada Maret 2015. Sedangkan untuk periode September 2014 ke bulan September 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 0,73% (29,81 ribu jiwa) dari 8,39% (281,75 ribu jiwa) pada September 2014 menjadi 9,12% (311,56 ribu jiwa) pada September 2015. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Dinas Sosnakertrans

Gambar 4.56 Trend Angka Kemiskinan dari Maret 2014 ke Maret 2015 dan dari September 2014 ke September 2015

Dari gambar di atas, terlihat terjadi kenaikan angka kemiskinan baik di periode Maret 2014 ke Maret 2015, maupun di periode September 2014 ke September 2015. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai permasalahan di sepanjang tahun 2015 baik kebijakan nasional maupun situasi internasional diantaranya yaitu pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat, rendahnya harga komoditas khusus karet dan sawit, naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD), kenaikan tarif dasar listrik, yang memicu terjadinya kenaikan tarif angkutan dan tarif PDAM yang ke semuanya itu berdampak pada meningkatnya laju inflasi, dan puncak kekeringan yang terjadi pada bulan juli s/d oktober dengan defisit curah hujan 0-30% dari normalnya, sehingga mengakibatkan kebakaran dan kabut asap. Kabut asap ini mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat mulai dari tidak beraktivitasnya Bandara Sultan Thaha selama 3 bulan sampai dengan lahan pertanian yang kekeringan ringan hingga gagal panen.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, adalah kewenangan dan keuangan yang terbatas. Untuk itu perlu adanya sinergi program dan anggaran antara Provinsi dan kabupaten/kota serta desa perlu dioptimalkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Untuk membantu mengatasi permasalahan sosial Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2015 mengalokasi Rp.8.456.155.000,- dengan realisasi Rp. 7.604.829.150 (89,93%) dengan realisasi fisik 100%, untuk mendanai enam program terkait ketenagakerjaan yaitu:

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta. Selain itu, memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat bersama pemerintah memupuk rasa kesetiakawanan sosial dengan moto BERSATU UNTUK BERSAMA, Kegiatan lain adalah Peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jambi dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelaksanaan koordinasi Organisasi oleh BKKKS serta kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dengan tujuan

pemberdayaan Karang Taruna. Selain itu program ini didukung juga dengan kegiatan KSN, yaitu untuk meningkatkan kesetiakawanan sosial secara nasional melalui kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, donor darah dan *Home care*.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 758.063.000,00- untuk membiayai keenam kegiatan tersebut dengan realisasi keuangan sebesar Rp 735.314.800,00- (97,00%) dengan realisasi fisik 100%.

- 1) Kegiatan Peringatan HKSN dengan dana Rp. 125.000.000,00- dengan realisasi Rp. 120.773.500,00- (96,62%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) adalah terwujudnya rasa kesetiakawanan sosial yang lebih nyata antara lain melalui partisipasi dalam kegiatan donor darah, sunatan massal, pameran pembangunan dan bakti sosial.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi dengan dana Rp 82.500.000,00- dengan realisasi Rp 79.094.200,00- (95,87%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan lembaga sosial yang lebih efektif.
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dengan dana Rp 82.500.000,00- dengan realisasi keuangan Rp 80.566.400,00- (97,66%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan karang taruna yang mandiri.
- 4) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesos dengan dana Rp. 71.500.000,00- dengan realisasi Rp. 68.222.500,- (95,42%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan keluarga yang mandiri.
- 5) Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan dana Rp.286.563.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 280.067.600,- (97,73%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai yang ditetapkan.
- 6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial dengan dana Rp.110.000.000,- dengan realisasi Rp.

106.509.600,- (96,90%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terbangunnya partisipasi lembaga sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi (pendampingan) manajemen usaha bagi keluarga miskin dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS ini, melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.866.600.000,00- untuk membiayai kedua kegiatan tersebut di atas, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.731.639.950,00- (92,77%) dengan realisasi fisik 100%. Penjelasan kedua kegiatan tersebut, yaitu:

- 1) Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pendamping) dengan dana Rp 825.000.000,00- dengan realisasi 739.731.950,00- (89,66%) dan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi manajemen bagi keluarga miskin sebanyak 1 kali dengan peserta 1.000 KK. Kegiatan ini bersifat pendampingan yaitu memberikan pelatihan manajemen usaha keluarga/kelompok bagi kube yang dibantu oleh Kementerian Sosial baik Fasilitasi Manajemen Desa maupun Fasilitasi Manajemen Kota. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
- 2) Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina dengan dana Rp 1.041.600.000,00- dengan realisasi Rp 991.908.000,00- (95,23%) dan realisasi fisik 100%. Melalui kegiatan ini diberikan bantuan bahan/bibit tanaman sebanyak 100 Paket ditanah Garo, kegiatan bantuan bibit karet sebanyak 61 Paket di Punt Kayu desa Bukit Suban, bantuan bibit karet sebanyak 51 Paket di lokasi ujung kota Desa Mentawak dan Bantuan jaminan hidup sebanyak 240 Paket di Desa Kejasung,

masing-masing bantuan jaminan hidup (sembako) diberikan sebanyak 120 paket kepada warga kas lokasi Sei. Kelukup Kampung Pasir Putih Desa Dwi Karya, Bantuan Jaminan Hidup (Sembako) sebanyak 86 paket kepada warga Kas Lokasi Kungkai Seberang Kabupaten Merangin. Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemberdayaan bagi penduduk KAT di lokasi purna bina.

c. Program Pembinaan Anak Terlantar

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Terwujudnya penanggulangan bencana alam pada tanggap darurat dan pemulangan orang terlantar. Kegiatan yang dilaksanakan agar *outcome* dari program ini dapat terwujud adalah; *Pertama*, Kegiatan Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, *Kedua*, Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana dan Orang Terlantar, *Ketiga*, Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak.

Program Pembinaan Anak Terlantar melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.924.279.000,00- untuk membiayai kedua kegiatan tersebut dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.814.991.700,00- (94,32%) dengan realisasi fisik 100%. Lebih lengkap penjelasan tiga kegiatan tersebut, yaitu:

- 1) Kegiatan Pelatihan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar dengan dana Rp1.066.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.037.169.000,00- (97,30%) dengan realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendidikan dan Latihan Keterampilan bagi anak terlantar selama 1 tahun dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini Terwujudnya peningkatan keterampilan kerja anak terlantar.
- 2) Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana dan Orang Terlantar dengan dana Rp464.265.000,00- dengan realisasi mencapai Rp462.008.000,00 (99,51%) dengan realisasi fisik 100%. Output utama kegiatan ini adalah terlaksananya kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana dengan mengerahkan anggota sukarela dari masyarakat (TAGANA). Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana alam dan orang terlantar.

- 3) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dengan dana Rp.394.014.000,- dengan realisasi mencapai Rp.315.814.700,- (80,15%) dan realisasi fisik 100%. Output utama kegiatan ini adalah terlaksananya perlindungan khusus pemulangan dan pengiriman ke Panti luar daerah dan Jumlah anak yang mengikuti kongres Anak dengan Target 300 orang anak. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya rasa percaya diri anak dengan kebutuhan khusus untuk menjalankan fungsi sosialnya.

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Outcome dari program ini adalah meningkatnya kesadaran dan motivasi penyandang cacat dan trauma untuk kembali melaksanakan fungsi sosial. Kegiatan yang dilaksanakan agar *outcome* dari program ini dapat terwujud adalah melalui kegiatan pemberdayaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat anak dan Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat, Kegiatan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan (ODK) melalui LKS ODK dan Kegiatan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan (ODK) berat.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp1.185.823.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.093.587.800,00 (92,22%) dan realisasi fisik 100% untuk membiayai ketiga kegiatan tersebut:

- 1) Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat, Anak dan Orang Dengan Kecacatan (ODK) Berat dengan dana sebesar Rp. 295.958.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.229.849.800,- (77,66%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Tersedianya data PACA dan Penyakit Kejiwaan di Provinsi Jambi.
- 2) Kegiatan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui LKS ODK dengan dana sebesar Rp. 225.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.208.600.400,- (92,51%) dan realisasi fisik 100%. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terwujudnya rasa percaya diri ODK untuk menjalankan fungsi sosialnya ke masyarakat.
- 3) Kegiatan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) berat dengan dana sebesar Rp. 664.365.000,- realisasi keuangan sebesar

Rp.655.137.600,- (98,61%) dan realisasi fisik 100%. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terwujudnya rasa percaya diri ODK untuk menjalankan fungsi sosialnya ke masyarakat.

e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Outcome dari program ini adalah meningkatkannya pelayanan pemerintah dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pembinaan dan pelayanan panti, baik melalui pelayanan panti milik pemerintah maupun pelayanan lanjut usia di luar panti yang memerlukan perhatian pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan agar *outcome* dari program ini dapat terwujud adalah melalui kegiatan pelayanan kebutuhan panti/panti jompo, dan kegiatan pelayanan lanjut usia di luar panti sebanyak 300 orang lansia.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo melalui dana APBD Provinsi Jambi pada tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp1.471.459.000,00 dengan realisasi keuangan Rp1.451.388.900 (98,64%) dan realisasi fisik 100% untuk membiayai kegiatan:

- 1) Pelayanan Kebutuhan Panti Jompo dengan anggaran sebesar Rp1.143.304.000,00 dengan realisasi keuangan Rp 1.125.940.000,00 (98,48%) dan realisasi fisik 100%. Adapun Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Pelayanan Pemerintah melalui pembinaan dan pelayanan panti jompo
- 2) Pelayanan Lanjut Usia di Luar Panti, dengan anggaran sebesar Rp328.155.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp325.448.000,00 (99,18%) dengan realisasi fisik 100%. Melalui kegiatan ini dilaksanakan pemberian bantuan berupa bahan kebutuhan (sembako) kepada sebanyak 300 orang lanjut usia terlantar yang berada di luar panti dalam 6 kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Adapun Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan hidup bagi lanjut usia yang dilayani melalui panti Sosial Tresna Wedha “Budi Luhur” Jambi selama tahun 2015 sebanyak 70 orang lanjut usia terlantar dan pemberian pelayanan kepada 300 orang lanjut usia terlantar di luar panti.

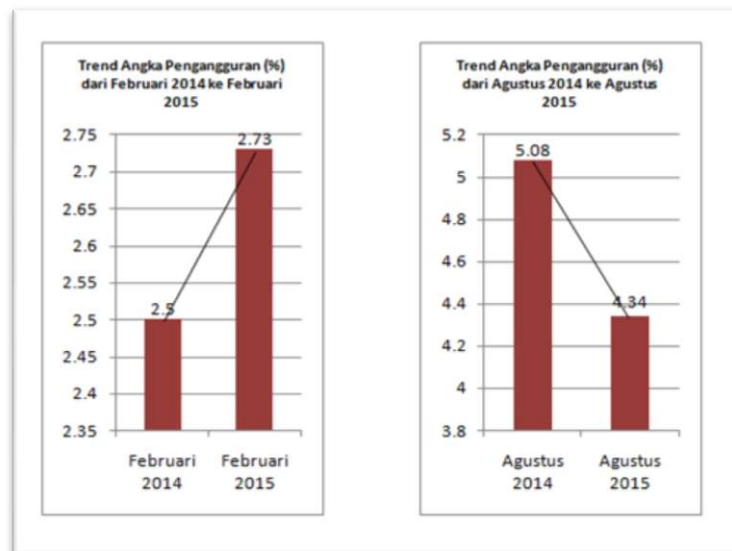
f. Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial, PSK dan Narkoba)

Outcome dari program ini adalah terwujudnya peningkatan motivasi dan rasa percaya diri eks penyandang cacat sosial untuk kembali ke masyarakat. Pada Tahun 2015 program ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp1.249.931.000,00 untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Eks penyandang cacat sosial antara lain Eks Napi, Tuna Sosial, PSK dan Korban Narkoba, dengan tujuan agar para penyandang eks penyakit sosial tersebut di tingkatkan fungsi sosialnya melalui keterampilan berusaha. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial sebanyak 40 orang, dengan anggaran sebesar Rp593.931.000,00 melalui kegiatan ini diberikan bimbingan pelatihan keterampilan kerja antara lain keterampilan dalam usaha salon, menjahit, dan keterampilan dalam Panti Sosial Bina Remaja-Wanita (PSBRW) lokasi Talang Bakung Kota Jambi. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp411.041.300,00 (69,21%), dengan realisasi fisik sebesar 69,21%. Target kegiatan tidak bisa mencapai 100%, dikarenakan jumlah Eks PSK yang terjaring dalam razia selama tahun 2015 tidak mencapai target 40 orang. *Outcome* dari kegiatan ini terwujudnya perilaku positif bagi eks penyandang penyakit sosial (khususnya PSK) agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat, serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
- 2) Penyuluhan Sosial Bahaya Narkoba, HIV-AIDS dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 656.000.000,- untuk memberikan pelayanan kepada 2.000 orang Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial. *Outcome* dari kegiatan ini Terwujudnya kesadaran penyandang penyakit sosial (korban narkoba/napza, HIV/AIDs dan Tuna Sosial lainnya) untuk kembali melaksanakan fungsi sosialnya ke masyarakat. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 366.864.700,- (55,92%), dengan realisasi fisik sebesar 55,92%, hal ini disebabkan terdapat beberapa kegiatan ada di DPA yang tidak terealisasi karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel seperti Bimbingan teknis, rapat-rapat dan pertemuan lainnya.

4.1.11 Ketenagakerjaan

Berdasarkan Berita Resmi statistik BPS Provinsi Jambi No. 29/05/14/Th.VIII, 5 Mei 2014, No. 67/11/14/Th.VIII, 5 November 2014 dan No.31/05/15/Th.IX, 5 Mei 2015, No.67/11/15/Th.VIII, 5 November 2014 diketahui bahwaJumlah angka pengangguran dari bulan Februari 2014 ke bulan Februari 2015mengalami peningkatan sebesar 0,23% (6,93 ribu jiwa) dari 2,50% (39,27 ribu jiwa dari 1.570,33ribu jiwa angkatan kerja) pada Februari 2014 menjadi 2,73% (46,2 ribu jiwa dari 1.692,4 ribu jiwa angkatan kerja) pada Februari 2015. Sedangkan untuk periode Agustus 2014 ke bulan Agustus 2015 mengalami penurunan sebesar 0,74% (9,50 ribu jiwa) dari 5,08% (79,8 ribu jiwa dari 1.570,33 ribu jiwa angkatan kerja) pada Agustus 2014 menjadi 4,34% (70,3 ribu jiwa dari 1.550,4 ribu jiwa angkatan kerja) pada Agustus 2015. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Dinas Sosnakertrans

Gambar 4.57Trend Angka Pengangguran (%) dari Februari 2014 ke Februari 2015 dan dari Agustus 2014 ke Agustus 2015

Bertambahnya angka pengangguran dari Februari 2014 ke Februari 2015 disebabkan karena jumlah penduduk bekerja bertambah cukup banyak, namun pertambahannya tidak setajam pertambahan angkatan kerjanya,

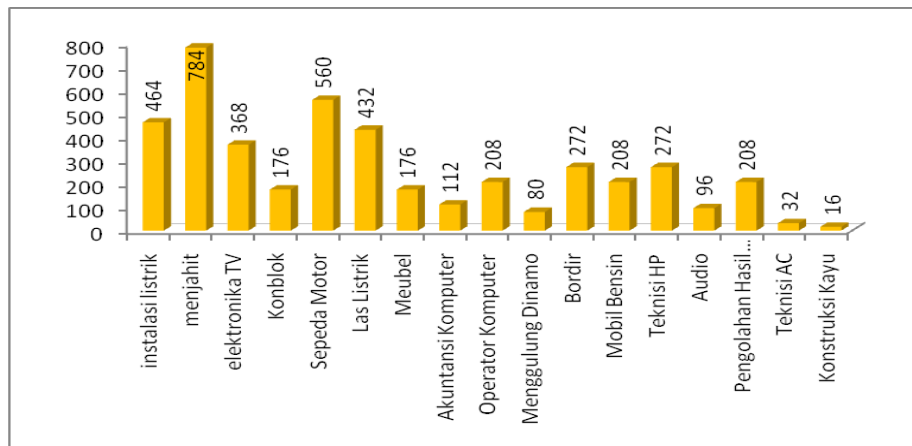
sehingga jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2014 melalui dana APBD Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebesar Rp5.438.864.900,00 dengan realisasi Rp5.291.593.941,00 (97,29%) dengan realisasi fisik 100%, untuk mendanai 3 program yaitu: 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2) Program peningkatan kesempatan Kerja dan 3) program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Outcome dari program ini adalah Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebesar Rp3.049.849.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.008.538.763,00 (98,65%) dan realisasi fisik 100%. Untuk mewujudkan sasaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan melalui 6 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja dengan total anggaran Rp1.019.617.000 dengan realisasi sebesar Rp1.013.871.430,00 (99,44%) dan realisasi fisik 100%. *Output* dari kegiatan ini antara lain terlatihnya 256 orang peserta. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil dalam meningkatkan pendapatannya. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : Dinas Sosnakertrans

Gambar 4.58 Jumlah Peserta yang telah di latih di Balai Pelatihan tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

- 2) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif dengan dana sebesar Rp604.920.000,00 dengan realisasi Rp597.478.683,00 (98,77%) dan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan produktif bagi 240 orang masing-masing di Kabupaten Batang Hari, Tanjab Barat, Muaro Jambi, Kota Jambi, Sarolangun, Tebo, Kerinci dan Merangin. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya wirausaha yang lebih produktif.
- 3) Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dengan total dana Rp375.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp373.752.000,- (99,67%) dan realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan melalui kerjasama pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerjasama Swasta (LPKS) Target 96 org. Sedangkan Sasaran (outcome) yang ingin dicapai adalah Terwujudnya kerjasama pelatihan antara lembaga pelatihan pemerintah dan swasta.
- 4) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dengan dana sebesar Rp385.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp376.141.500,00 (97,70%) dan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini yaitu terlatihnya peserta sebanyak 200 orang tentang peningkatan produktivitas. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dalam meningkatkan pendapatannya.

- 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis masyarakat dan seleksi program pemagangan dalam dan luar negeri dengan dana sebesar Rp665.312.000 dengan realisasi Rp647.295.150 (97,29%) dan realisasi fisik 100%, dengan output terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat bagi tenaga kerja sebagai dukungan anggaran daerah dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis masyarakat yang meliputi magang ke Jepang dengan target 650 orang. Sedangkan sasaran (*outcome*) nya adalah Terwujudnya fasilitas yang memadai dalam pelayanan pelatihan yang dibutuhkan.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Outcome (sasaran) yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, program ini didukung oleh 11 kegiatan dengan total dana sebesar Rp1.680.652.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.591.667.682 (94,71%) dan realisasi fisik 100%. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB) dengan total dana sebesar Rp.265.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 264.712.000,- (99,89%) dan realisasi fisik 100 %. Melalui kegiatan ini diberikan bantuan barang kepada kelompok usaha bersama (WUB) sebanyak 50 orang masing-masing digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan wirousahanya agar mampu berkembang dengan baik, dengan *outcome* dari kegiatan ini Terwujudnya wirausaha baru informal yang produktif.
- 2) Kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar negeri, penyuluhan penempatan CTKI/TKI ke Luar Negeri, Monitoring dan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor informal, Pendataan dan Monitoring pengendalian pengguna Tenaga Kerja Asing dengan total dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 171.942.930,- (85,97%) dan realisasi fisik 100 %. Melalui kegiatan ini

dilaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL,AKAD,TKI sebanyak 2.250 orang, penyuluhan penempatan calon TKI keluar negeri dan pengendalian penggunaan TKA. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

- 3) Kegiatan Penyuluhan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri dengan total dana sebesar Rp.112.348.000,- dengan realisasi dana Rp. 110.947.300,- (98,75%) dan realisasi fisik 100 %. *Output* dari kegiatan ini yaitu Jumlah CTKI yang memperoleh penyuluhan penempatan tenaga kerja ke luar negeri ke Jepang (Mahasiswa Tingkat Akhir Akper 300 org, 6 Akper di 3 Kab/Kota). Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.
- 4) Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran dengan total dana sebesar Rp.89.622.000,- dengan realisasi dana Rp. 88.719.500,- (98,99%) dan realisasi fisik 100 %. *Output* dari kegiatan ini yaitu Jumlah peluang kesempatan kerja sektoral yang termonitor dalam menanggulangi pengangguran. Melalui kegiatan ini dapat dicapai Sasaran (*outcome*) berupa tersedianya dokumen dan informasi yang dibutuhkan dalam menanggulangi pengangguran.
- 5) Pendataan, Sosialisasi dan Rakor Serta Monitoring Pengendalian Tenaga Kerja Asing Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan total dana sebesar Rp.114.891.000,- dengan realisasi dana Rp. 108.352.050,- (94,31%) dan realisasi fisik 100 %. *Output* kegiatan ini yaitu Jumlah data TKA yang Akurat dalam memenuhi penerimaan daerah (PAD). Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi penerimaan daerah (PAD).
- 6) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan dana Rp.52.000.800,- dengan realisasi Rp. 48.829.100,- (93,90%), realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk sosialisasi peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan jumlah peserta 50

perusahaan dengan narasumber dari Direktorat PTA Kementerian Nakertrans RI. Peserta berasal dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi serta dari Dinas Kabupaten/Kota, dengan output tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dibidang penempatan kepada 60 perusahaan dan Petugas Kab/Kota pada tahun 2015. Sasara (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pengetahuan bagi tenaga kerja dalam penempatan ketenagakerjaan.

- 7) Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI ke Luar Negeri dan Koordinasi Penempatan TK ke Luar Negeri dengan total dana sebesar Rp.185.000.600,- dengan realisasi dana Rp. 163.741.702,- (88,51%) dan realisasi fisik 100 %. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.
- 8) Kegiatan Pengembangan Masyarakat melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan dana sebesar Rp.334.290.000,- realisasi Rp. 329.070.200,- (98,44%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pelatihan melalui penerapan TTG dengan output terlatihnya masyarakat pencari kerja tentang Teknologi Tepat Guna sebanyak 100 orang dan dilaksanakan di Kab. Bungo dan Kota Jambi sebanyak 2 paket. Setelah pelatihan peserta 60 orang diberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini Terwujudnya pemanfaatan teknologi dalam mendorong produktivitas usaha bagi masyarakat.
- 9) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) dengan dana Rp.90.000.000,-dengan realisasi Rp. 84.336.200,- (93,71%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pembayaran honorarium pengelola data, analisa data, pengolah IPK Kabupaten/Kota dengan output tersedianya data IPK untuk 12 bulan. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini Tersedianya dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
- 10)Kegiatan Analisa Keberhasilan Penempatan Ketenagakerjaan Sektor Informal dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dengan dana

Rp.120.000.000,- dengan realisasi Rp. 118.969.200,- (99,14%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini Tersedianya dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

- 11)Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)dengan dana Rp.117.500.000,- dengan realisasi Rp. 102.047.500,- (86,85%) dengan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini Tersedianya dokumen dan informasi yang dibutuhkan dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatanPembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP dan Bimtek Survey KHL dan Pengupahan (UMP); Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit; Pelaksanaan Program PBTA dalam rangka Implementasi RAD PBTA;Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2015 dan Pengujian Lingkungan Tenaga Kerja.*Outcome* yang diharapkan dari program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ini adalah Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha.

Untuk melaksanakan program ini telah dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar Rp708.363.500,00 dengan realisasi sebesar Rp691.387.497,00 (97,60%)dan realisasi fisik 100%. Secara rinci, kegiatan yang dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2015 dan pengujian lingkungan kerjadengan dana Rp. 125.000.000,- dengan realisasi Rp. 119.883.400,- (95,91%) dan realisasi fisik 100%. Sedangkan *output* utama dari kegiatan ini adalah Jumlah paket kegiatan bulan K3 dan perusahaan yang diberi penghargaan. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penerapan K3 bagi perusahaan dan tenaga kerja.

- 2) Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengujian Lingkungan Kerja dengan dana Rp.115.700.000,- dengan realisasi Rp.112.363.160,- (97,12%) dengan realisasi fisik 100 %. Output terlaksananya perusahaan dan lingkungan kerja yang dilakukan pengawasan dan pengujian Target 80 perusahaan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penerapan K3 bagi perusahaan dan tenaga kerja.
- 3) Kegiatan Pembahasan dan survey kebutuhan layak (KHL) serta UMP & Bimtek survey KHL dan pengupahan UMP dengan dana Rp.225.000.000,- dengan realisasi Rp.220.781.212,- (98,12%) dengan realisasi fisik 100 %. Output terlaksananya pembahasan dan survey KHL dan UMP serta terlaksananya Bimtek survey KHL dan pengupahan UMP sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 24 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penerapan UMP tahun 2014 oleh perusahaan sesuai yang ditetapkan.
- 4) Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit dengan dana Rp.127.500.000,- dengan realisasi Rp.125.228.000,- (98,22%) dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya mekanisme lembaga kerjasama tripartit yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terselesaikannya penanganan kasus tenaga kerja melalui mekanisme lembaga tripartit.
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) dalam rangka Implementasi RAD PBPTA, Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan dana Rp. 115.163.500,- dengan realisasi Rp. 113.131.725,- (98,24%) dengan realisasi fisik 100%. Output utama dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelaksanaan Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) dalam rangka Implementasi RAD PBPTA, Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan target 40 orang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penurunan jumlah anak yang bekerja pada PBPTA.

4.1.12 Koperasi dan UMKM

a. Program Penciptaan Iklim Usaha, UMKM yang Kondusif

Tujuan dari program penciptaan iklim usaha, UMKM yang kondusif adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya iklim usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMKM. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM, dengan *output dari program/kegiatan ini yaitu terlaksananya pelatihan peningkatan mutu dan SDM UMKM*. Teridentifikasi bahwa pemberdayaan KUMKM di Provinsi Jambi dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan yang sangat krusial yaitu : 1). Internal dan 2). Eksternal Yaitu :

1) Internal

Masih rendahnya kualitas SDM KUMKM yang berdampak kepada :

- a) Lemahnya KUMKM dalam meningkatkan akses kepada berbagai sumber dan mengembangkan pangsa pasar;
- b) Lemahnya Struktur Permodalan dan Terbatasnya akses KUMKM terhadap sumber permodalan;
- c) Terbatasnya kemampuan KUMKM dalam penguasaan teknologi informasi;
- d) Lemahnya organisasi dalam manajemen KUMKM;
- e) Terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya.

2) Eksternal.

- a) Iklim usaha kurang kondusif;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- c) Pembinaan KUMKM yang kurang terpadu.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan dihadapi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM, baik terhadap

permasalahan Internal maupun terhadap permasalahan Eksternal dilakukan berbagai strategi, yang meliputi :

- a) Perkuatan permodalan bagi usaha KUMKM;
 - b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUMKM;
 - c) Perbaikan manajemen KUMKM;
 - d) Perluasan jaringan pemasaran usaha KUMKM melalui kemitraan antara usaha besar , BUMN/BUMD dengan UMKM.
 - e) Menyatupadukan UMKM yang ada dalam wadah Koperasi.
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan daya saing UMKM. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu:

- 1) Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan di Provinsi Jambi
- 2) Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Teknologi
- 3) Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD
- 4) Sosialisasi HKI dan Label Halal Bagi UMKM Se-Provinsi Jambi
- 5) Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan di Provinsi Jambi

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu :

- 1) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pendekatan OVOP
- 2) Terlaksananya kegiatan peningkatan teknologi melalui sharing informasi, magang dan pelatihan SDM UMKM
- 3) Terlaksananya bintek perkoperasian bagi pengurus koperasi / pengelola koperasi
- 4) Terlaksananya bintek manajemen perkoperasian bagi gerakan koperasi
- 5) Terlaksananya bintek akutansi koperasi bagi pengurus/ pengelola koperasi

- 6) Terlaksananya bintek pengawas koperasi
- 7) Terlaksananya bintek pelaksanaan RAT koperasi
- 8) Meningkatkan pemahaman UMKM tentang HKI
- 9) Terlaksananya kegiatan workshop program kemitraan

Capaian dari program ini yaitu terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi secara dinamis dan berkelanjutan. Hal tersebut digambar dari peningkatan jumlah koperasi dari 3.659 unit di tahun 2014 menjadi 3.685 pada tahun 2015 atau naik sebesar 0.007 %, sedangkan Target RPJMD tahun 2015 sebanyak 4.204 unit koperasi. Meski peningkatan kuantitas UMKM yang ada belum diimbangi oleh peningkatan kualitas UMKM yang memadai, masalah yang ada adalah masih rendahnya produktivitas sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan: (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya rata-rata kompetensi kewirausahaan; dan (c) terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sehingga senantiasa dibutuhkan upaya-upaya untuk kemajuan UMKM yang sangat mendukung upaya mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antardaerah, termasuk penanggulangan kemiskinan.

Agar sasaran program dapat tercapai secara optimal maka upaya yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikulum lokal dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar;
- 2) Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan KUKM berbasis teknologi termasuk wirausaha

baru berbasis teknologi, utamanya UMKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal;

- 3) Pembangunan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan;
- 4) Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat;
- 5) Pengembangan kemitraan investasi antar UMKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar;
- 6) Pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara KUMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha;
- 7) Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan perkoperasian bagi anggota, calon anggota dan pengelola koperasi, termasuk pemasyarakatan koperasi sukses yang sesuai dengan jatidiri dan nilai/prinsip koperasi; serta
- 8) Peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah (PKM), termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pembinaan terhadap koperasi antara lain :

- 1) Rapat koordinasi baik dengan Dinas Kabupaten / Kota maupun instansi terkait.
- 2) Sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dalam rangka revitalisasi koperasi.
- 3) Pembinaan melalui berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan usaha koperasi.

Tabel 4.134
Perkembangan KSP/USP- Koperasi tahun 2010 s.d 2015

U R A I A N	SATU AN	CAPAIAN TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Perkembangan KSP/USP Koperasi</i>							
Jumlah KSP	Unit	56	56	74	74	71	99
Jumlah USP Koperasi	Unit	1.151	1.151	2.980	2.980	2.980	1.639
Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kop	Unit	201	190	121	201	134	268
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	1000	550	900	790	600	600

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2015

Berdasarkan tabel perkembangan KSP/USP-koperasi dari tahun 2010 s.d 2015 dapat dilihat, jumlah KSP mengalami peningkatan sebesar 26,78 %, perkembangan jumlah USP Koperasi mengalami peningkatan sebesar 158,90 %, perkembangan penilaian kesehatan KSP/USP-Kop mengalami Penurunan sebesar 33,33 %, perkembangan sertifikasi hak atas tanah UKM mengalami perubahan setiap tahunnya hal ini di sebabkan oleh perkembangan target yang di berikan oleh pusat.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.

Tujuan program ini adalah untuk mempermudah dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan setiap peluang dan potensi sumber daya lokal yang ada secara optimal sesuai tuntutan pasar.

- 1) Pemberdayaan UMKM melalui One Village One Product (OVOP), outputnya adalah Terlaksananya pemberdayaan UMKM melalui pendekatan OVOP dengan 11 produk unggulan Kab/Kota;
- 2) Pengembangan promosi produk UMKM tingkat nasional, regional dan luar negeri, outputnya adalah Terlaksananya Kegiatan

Pameran dan Promosi Produk UMKM. (4 kali dalam provinsi, 5 kali luar provinsi);

- 3) Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal, outputnya adalah : a) Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan mutu produk di Kec. Lembah Masurai, Kec. Sungai Gelam, Kec. Kumpeh, Kec. Tango Rajo dan Kec. Jangkat (75 Orang, 3 Kecamatan , 3 kali Kegiatan); b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan identifikasi PKL (100 Orang 1 Kali Kegiatan).
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi dan UMKM, outputnya adalah :
 - a) Terlaksananya rapat pengawasan KUMKM 11 kab/Kota;
 - b) Terlaksananya Laporan Pengawasan KUMKM 11 Kab/Kota;
 - c) Terhimpunnya data koperasi dan UMKM 11 Kab/Kota;
 - d) Terhimpunnya data UMKM penerima samisake per kecamatan 11 Kab/Kota.
- 5) Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Kop Penerima Dana Bergulir, outputnya adalah : a)Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan KSP/USP koperasi, bintek satuan tugas pengawasan KSP 11 Kab/Kota; b) Terwujudnya pengawasan SDM tim penilaian kesehatan simpan pinjam 11 Kab/Kota.
- 6) Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Bagi PMK, outputnya adalah : a) Terlaksananya rapat koordinasi, evaluasi program sertifikat hak katas tanah 600 sertifikat; b) Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi program sertifikasi hak atas tanah 10 Kab/Kota.
- 7) Pemberdayaan KSP/USP Kop dan LKM berwawasan Gender penerima dana bergulir, outputnya adalah Terlaksananya pemberdayaan KSP/USP-Koperasi yang berwawasan gender di Kab/Kota (72 KSP/USP-Kop).
- 8) Peningkatan keterampilan bagi pengelola KSP/USP-Koperasi, outputnya adalah : a) Terampilnya pengelola KSP/USP-Koperasi Penerima Dana Bergulir (11 KSP/USP-Kop); b) Terwujudnya peningkatan keterampilan bagi pengelola KSP/USP koperasi penerima dana bergulir (11 KSP/USP-Kop).

9) Sosialisasi, Fasilitas dan Evaluasi Pemanfaatan Dana KUR dan LPDB di Provinsi Jambi, outputnya adalah sebagai berikut :

- a) Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan dana KUR dan LPDB (99 KUMKM / 3 Kali);
- b) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi antar lintas kab/kota pemanfaatan dan KUR, LPDB dan bansos (11 Kab/Kota);
- c) Terlaksananya konsultasi dalam pemanfaatan dana KUR, LPDB dan Bansos (100 %).

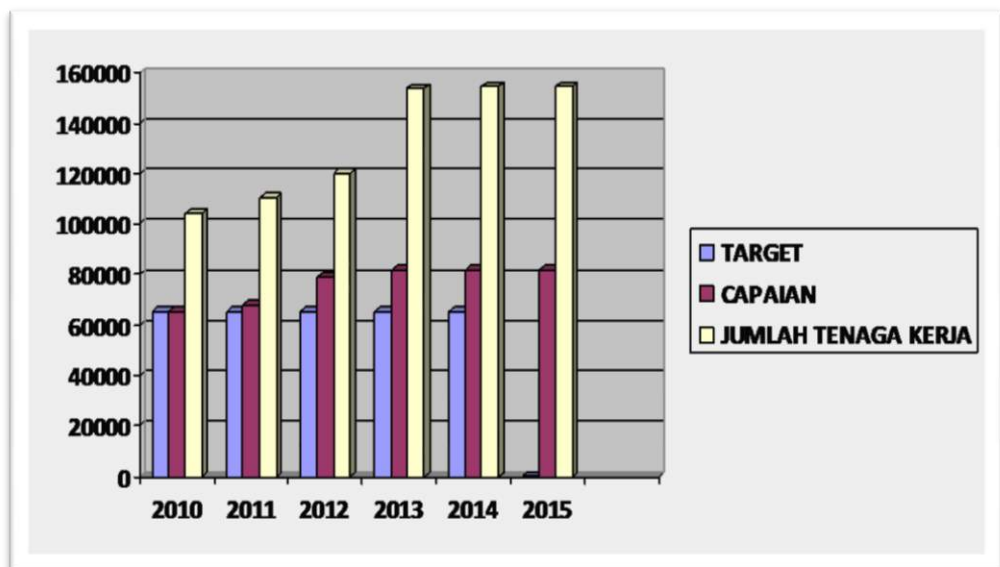
Capaian dari program ini yaitu tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif dan meningkatnya kesadaran berwirausaha sebagai budaya serta mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.

Tabel 4.135
Perkembangan UMKM tahun 2010 s/d Juli 2015

No	Perkembangan UMKM	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Usaha Mikro	Unit	65.240	64.240	75.454	77.454	77.993	77.993
2	Jumlah Usaha Kecil	Unit	-	3.099	3.377	3.590	3.456	3.456
3	Jumlah Usaha Menengah	Unit	-	486	508	508	510	510
5	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Org	104.042	110.538	119.932	153.761	154.529	154.529
6	Jumlah UMKM	Unit	65.240	67.825	79.119	81.552	81.959	81.959

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2015

Berdasarkan table perkembangan UMKM Tahun 2010 s.d 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi sampai bulan Juli 2015 perkembangan UMKM di Provinsi Jambi belum mengalami perkembangan yaitu sebesar 81.959 UMKM (posisi Juni 2015). Hal ini di sebabkan pendataan UMKM di kabupaten / kota masih dalam proses.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2015

Gambar 4.59 Perkembangan UMKM

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2010 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.240 UMKM dengan capaian 65.240 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 104.042 orang, tahun 2011 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.250 UMKM dengan capaian 67.852 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 110.538 orang, tahun 2012 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.300 UMKM dengan capaian 79.119 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 119.932 orang, tahun 2013 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.350 UMKM dengan capaian 81.552 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 153.761 orang, tahun 2014 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.400 UMKM dengan capaian 81.595 UMKM serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 154.929 orang. tahun 2015 target perkembangan UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 65.500 UMKM dengan capaian 81.595 UMKM (posisi Juli 2015) serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 154.929 orang.

Selain itu keberhasilan program ini juga bisa dilihat dari peningkatan pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

Tabel 4.136
Realisasi Perkuatan Permodalan Tahun 2010 s.d 2015

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Perkembangan Perkuatan Permodalan							
TPKU	Rp.	1.000.000.000	4.650.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	5.150.000.000	5.350.000.000
Bantuan Perkuatan Dana Bergulir	Rp.	-	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000	28.848.530.000
Pasar Tradisional	Rp.	1.850.000.000	2.650.000.000	3.450.000.000	8.850.000.000	10.650.000.000	13.350.000.000
Penataan PKL	Rp.	350.000.000	350.000.000	1.475.000.000	2.225.000.000	2.600.000.000	3.350.000.000
Bansos Wanita / Pemuda	Rp.	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	-	-	-
Pembiayaan LPDB	Rp.	-	4.345.000.000	13.890.000.000	3.350.000.000	950.000.000	36.050.000.000
Bansos Perkotaan dan Pedesaan	Rp.	2.550.000.000	650.000.000	650.000.000	1.150.000.000	1.350.000.000	1.150.000.000
Tele Center	Rp.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Bantuan Sarana Pemasaran	Rp.	-	86.080.000	86.080.000	86.080.000	86.080.000	86.080.000
Bantuan Penataan Toko & Ritel Moderen	Rp.	-	260.000.000	390.000.000	1.040.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
Bantuan Kantin Sekolah	Rp.	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Bansos Modal Usaha Budi Daya Kentang	Rp.			125.000.000	125.000.000	125.000.000	60.000.000
Budi Daya Taman Karet	Rp.	-	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Bansos RMU (One Pas)	Rp.	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Bansos Peralatan Ferniture	Rp.	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas terdapat 15 bantuan yang di alokasikan dari Dana Dekonsentrasi Kementrian UKM RI sehingga dari tabel di atas dapat menunjukan jumlah perkembangan bantuan permodalan dari tahun 2010 s.d 2015 yang di alokasikan pada Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi.

Agar tercapainya sasaran program secara optimal dibutuhkan berbagai upaya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan fasilitas untuk mengurangi hambatan akses KUMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam;
- 2) Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya;
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/USP antara lain melalui perlindungan status badan hukum, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;
- 4) Perluasan sumber pembiayaan KUMKM, khususnya skim kredit investasi KUKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit UKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya;
- 5) Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN;
- 6) Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit dalam pendanaan UMKM (kesenjangan skala, formalisasi dan informasi);

- 7) Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan;
- 8) Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha KUMKM;
- 9) Penataan dan perkuatan organisasi dan modernisasi manajemen koperasi yang menjadi wadah kepentingan bersama UMKM untuk memperoleh efisien kolektif; serta
- 10) Penguatan jaringan pasar produk KUMKM, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.

Tantangan ke depan UMKM untuk mampu bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama, lingkungan internal UKM harus diperbaiki, yang mencakup aspek kualitas SDM, terutama kewirausahaan (entrepreneurship), penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Secara nasional, pilihan strategi dan kebijakan untuk memberdayakan UKM dalam memasuki era pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan UKM sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.

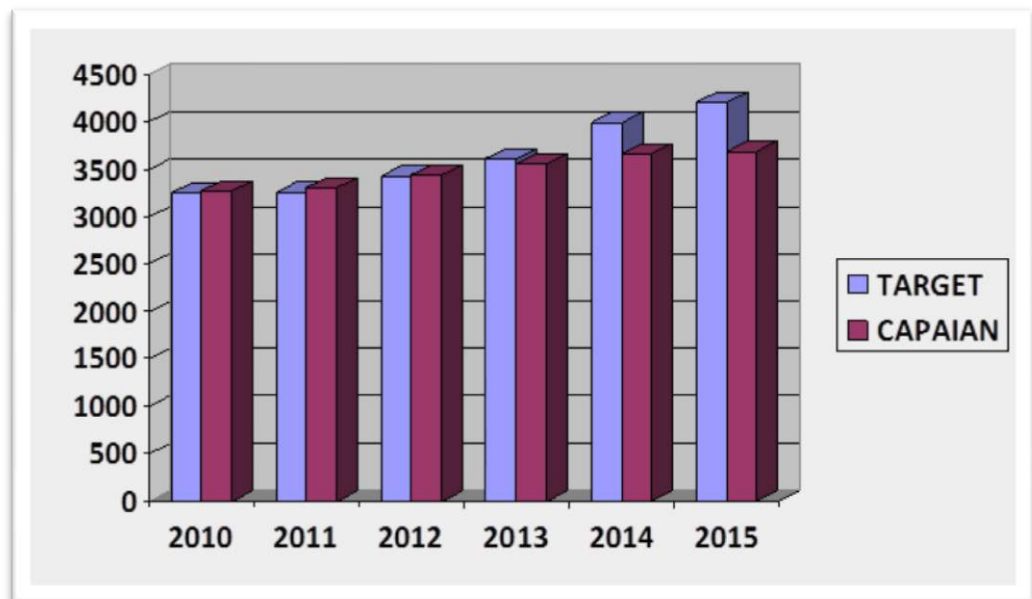
d. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Secara organisasi usaha, diharapkan memiliki daya saing ekonomi sebanding dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

- 1) Output Pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi :
 - a) Terlaksananya workshop perkoperasian bagi Pembina dan pengurus koperasi (50 Org / 1 kali kegiatan).
 - b) Terlaksananya bimbingan dan penyuluh perkoperasian bagi kepala desa , lurah / gerakan koperasi dan pembina (50 Org / 1 kali kegiatan).
 - c) Terlaksananya honorarium peningkatan kualitas kelembagaanb koperasi bagi koperasi berkualitas (12 koperasi, 1 kali kegiatan)
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.
 - a) Terlaksananya peningkatan kualitas pengurus / pengelola usaha koperasi dibidang akutansi koperasi (30 orang , 3 Kab/Kota).
 - b) Terlaksananya peningkatan kualitas manajemen usaha koperasi bagi para pengurus / pengelola koperasi (30 orang , 3 Kab/Kota).
 - c) Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemberdayaan usaha koperasi konsumen, produsen dan jasa(40 Koperasi, 3 kali kegiatan)

d) Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemberdayaan usaha koperasi perkebunan (40 orang , 1 Kali).

Capaian dari program ini terbangunnya jaringan kemitraan usaha koperasi, terwujudnya kader koperasi yang handal, yang dapat memberikan pengalamannya dalam mengelola koperasi. Indikator keberhasilan dari program ini yaitu:



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2015

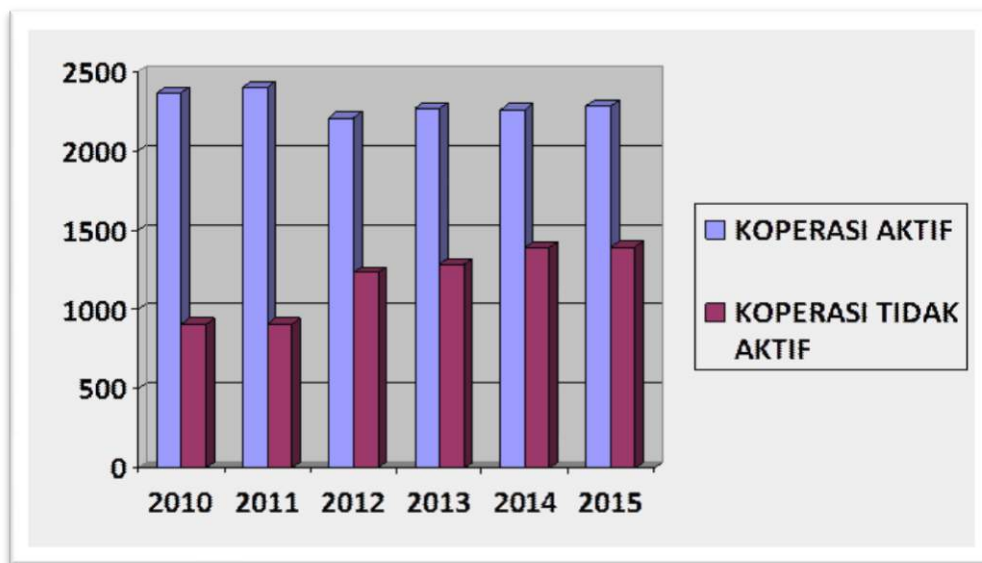
Gambar 4.60 Jumlah Koperasi

Berdasarkan grafik jumlah koperasi tahun 2010 s.d 2015 di atas dapat di lihat pada tahun 2010 dengan target 3.251 koperasi dengan capaian 3.275 koperasi, tahun 2011 dengan target 3.260 koperasi dengan capaian 3.306 koperasi, tahun 2012 dengan target 3.430 koperasi dengan capaian 3.444 koperasi tahun 2013 dengan target 3.609 koperasi dengan capaian 3.566 koperasi, tahun 2014 dengan target 3.995 koperasi dengan capaian 3.659 koperasi, tahun 2015 dengan target 4.204 koperasi dengan capaian 3.685 koperasi.

Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perkembangan koperasi di Indonesia antara lain :

- 1) Image koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.
- 2) Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down),artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Di Indonesia, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.
- 3) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikanya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus.
- 4) Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

- 5) Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuanya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi "manja" dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan nya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraanya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal Kesadaran ini adalah pondasi utama bagi pendirian koperasi sebagai motivasi.
- 7) Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi. Itulah penyebab-penyebab kenapa perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal. Tetapi analisis masalah tadi bukan lah yang utama, justru yang utama jika ingin koperasi maju adalah sebagai generasi penerus bangsa di masa depan tentunya kita harus berperan aktif dalam pengembangan koperasi di negeri ini. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam koperasi, mempelajari dan mengetahui tentang perkoperasian secara lebih mendalam.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2015

Gambar 4.61 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

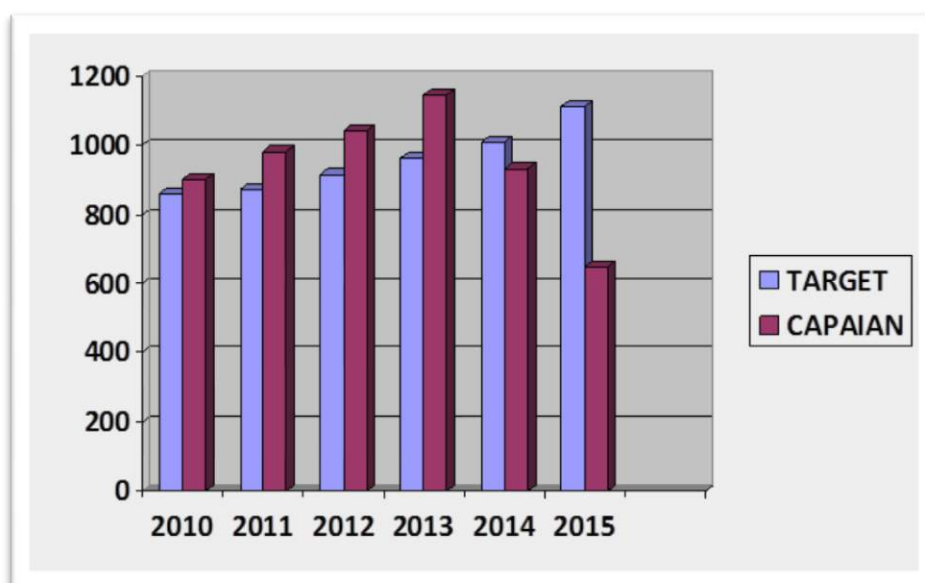
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 2.368 Unit dan koperasi tidak aktif 907 unit, tahun 2011 sebanyak 2.401 Unit dan koperasi tidak aktif 905 unit, tahun 2012 sebanyak 2.211 Unit dan koperasi tidak aktif 1.232 unit, tahun 2013 sebanyak 2.272 Unit dan koperasi tidak aktif 1.287 unit, tahun 2014 sebanyak 2.265 Unit dan koperasi tidak aktif 1.394 unit, tahun 2015 sebanyak 2.288 Unit dan koperasi tidak aktif 1.397 unit.

Perkembangan koperasi tidak aktif disebabkan oleh :

- 1) Kurang berkembangnya koperasi aktif juga berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan structural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan factor produksi.
- 2) Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini

maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.

- 3) Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, Tahun 2014

Gambar 4.62 Perkembangan RAT

Berdasarkan grafik RAT tahun 2010 s.d 2015 di atas dapat di lihat pada tahun 2010 dengan target 861 koperasi dengan capaian 902 koperasi, tahun 2011 dengan target 873 koperasi dengan capaian 905 koperasi, tahun 2012 dengan target 917 koperasi dengan capaian 1.043 koperasi tahun 2013 dengan target 963 koperasi dengan capaian 1.152 koperasi, tahun 2014 dengan target 1.011 koperasi dengan capaian 933 koperasi, tahun 2015 dengan target 1.115 koperasi dengan capaian 651 koperasi, tidak tercapainya target koperasi aktif dan jumlah koperasi disebabkan :

- 1) Terbatasnya jumlah aparat pembina koperasi di kabupaten/kota yang memahami tentang perkoperasian.
- 2) Rendahnya motivasi pengurus dan partisipasi aktif anggota koperasi.
- 3) Tidak berkembangnya usaha koperasi.
- 4) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan.

Tabel 4.137
Perkembangan Kelembagaan Koperasi 2010 s.d 2015

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Perkembangan Koperasi							
Jumlah Koperasi	Unit	3.275	3.306	3.443	3.559	3.659	3.685
Koperasi Aktif	Unit	2.368	2.401	2.211	2.272	2.265	2.288
Koperasi Tidak Aktif	Unit	907	905	1.232	1.287	1.394	1.397
Jumlah Anggota	Orang	353.028	353.758	357.893	361.265	367.962	367.962
Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	902	983	1.043	1.146	933	651
Jumlah Manajer	Orang	510	510	605	605	577	585
Modal Sendiri	Rp.	258.703.358.000	262.918.598.000	377.986.269.000	378.688.380.000	411.310.785.000	441.310.785.000
Modal Luar	Rp.	256.608.385.000	233.417.442.000	396.625.500.000	312.447.704.000	367.899.807.000	367.899.807.000
Volume Usaha	Rp.	1.167.622.089.000	1.172.517.960.000	1.772.174.220.000	2.764.950.194.000	1.636.743.613.000	1.636.743.613.000
SHU	Rp.	48.638.159.000	62.688.546.000	54.225.221.000	51.204.505.000	104.710.282.000	104.710.282.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2015

Berdasarkan perkembangan kelembagaan koperasi dari tahun 2010 s.d 2015 dapat diketahui jumlah perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 12,51 %, perkembangan koperasi aktif dan koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami perubahan setiap tahunnya hal ini di sebabkan oleh : (Terbatasnya jumlah aparat pembina koperasi di kabupaten/kota yang memahami tentang perkoperasian, Rendahnya motivasi pengurus dan partisipasi aktif anggota koperasi, Tidak berkembangnya usaha koperasi, Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan). perkembangan jumlah koperasi tidak aktif pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 54,02 %, perkembangan jumlah anggota pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,23 %, perkembangan jumlah manejer pada tahun 2010 s.d 2015 sebanyak 585 orang. Perkembangan jumlah modal sendiri pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 70,58 %, perkembangan jumlah modal luar pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 43,37 %, perkembangan jumlah volume usaha pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 40,17 %, perkembangan jumlah SHU pada tahun 2010 s.d 2015 mengalami peningkatan sebesar 115 %.

Adapun indikator keberhasilan lainnya yaitu dengan terpilihnya beberapa Koperasi di Provinsi Jambi, yang mendapat prestasi di tingkat nasional, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.138
Perkembangan Prestasi Koperasi Tingkat Nasional Tahun 2015

No	NAMA KOPERASI	PRESTASI	KELOMPOK USAHA	KAB/ KOTA	TAHUN
1	KUD Mukti Tama	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Muaro Jambi	2010
2	KUD Sumber Makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Merangin	2010
3	KUD Suka Makmur	Tingkat Nasional	Pemasaran	Tanjab Barat	2010
4	KPN Kosup	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Jambi	2011
5	KUD Sawit Kita	Tingkat Nasional	Konsumen	Tanjab Barat	2011
6	KUD Budi Sari	Tingkat Nasional	Jasa	Batang Hari	2011
7	Koperasi Artha Mukti	Tingkat Nasional	Simpan Pinjam	Tebo	2012
8	KUD Karya Jaya	Tingkat Nasional	Konsumen	Tanjab Barat	2012
9	KUD karya Usaha	Tingkat Nasional	Jasa	Sarolangun	2012
10	KUD Karya Mukti	Tingkat Nasional	Konsumen	Bungo	2013
11	KUD Suka Makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Tanjab Barat	2013

No	NAMA KOPERASI	PRESTASI	KELOMPOK USAHA	KAB/ KOTA	TAHUN
12	KUD Karya Mandiri	Tingkat Nasional	Produsen	Muaro Jambi	2013
13	Koperasi Benteng Kurung	Tingkat Nasional	Jasa	Tebo	2013
14	Primer Koperasi Dara Jingga	Tingkat Nasional	Konsumen	Jambi	2014
15	Kopkar Putra sumber Utama Timber	Tingkat Nasional	Konsumen	Muaro Jambi	2014
16	Koperasi Maju Bersama	Tingkat Nasional	Jasa	Muaro Jambi	2014
17	Primer Karti Alam Sakti	Tingkat Nasional	Konsumen	Sungai Penuh	2014
18	Primkoptama Sakinah	Tingkat Nasional	Konsumen	Sungai Penuh	2015
19	KPN Sehati	Tingkat Nasional	Konsumen	Sungai Penuh	2015
20	KUD Selikur makmur	Tingkat Nasional	Produsen	Muaro Jambi	2015

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2015

Tabel 4.139

Daftar nama-nama yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional tahun 2010 s/d 2015

No	NAMA	JABATAN	PENGHARGAAN	TAHUN	KAB/KOTA
1.	SUWARYO	Ketua KUD Sido Mukti Kab. Tebo	Bhakti Koperasi	2010	Tebo
2.	Dr. H.R. BAMBANG PRIYANTO	Walikota Jambi	Bhakti Koperasi	2011	Jambi
3.	Drs. H.M. DIANTO, M.Si	Kepala Dinas Koperasi, UMKM	Bhakti Koperasi	2011	Jambi
4.	Drs. H. CEK HENDRA	Bupati Kabupaten Sarolangun	Bhakti Koperasi	2013	sarolangun
5.	Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si	Kepala Dinas Koperasi, UMKM	Bhakti Koperasi	2013	Jambi
6.	H. SUDIRMAN ZAINI, SH,MH	Bupati Bungo	Bintang Jasa	2014	Bungo
7.	H. SYARIF FASHA, ME	Walikota Jambi	Bhakti Koperasi	2015	Jambi
8.	H. AL HARIS, S.SOS, MH	Bupati Merangin	Bhakti Koperasi	2015	Merangin

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2015

e. Permasalahan dan Langkah-langkah Antisipatif

1) Permasalahan

Dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi selama ini, dihadapkan pada beberapa permasalahan yang sangat krusial antara lain adalah :

a) Aspek Umum

- (1) Masih terbatasnya dana pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM baik yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD I dan APBD II.
- (2) Kurang optimalnya koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta.
- (3) Rendahnya citra / image dan rasa memiliki masyarakat terhadap Koperasi

b) Aspek Kelembagaan dan SDM Koperasi dan UMKM

- (1) Terbatasnya kualitas dan minimnya SDM aparat pembina yang menguasai aspek perkoperasian dan jiwa entrepreneurship dalam mengembangkan UMKM.
- (2) Masih rendahnya SDM Pengurus/pengelola Koperasi yang mampu mengelola Koperasi secara optimal, antara lain disebabkan karena pergantian pengurus yang tidak diimbangi dengan kesiapan proses alih manajemen.
- (3) Rendahnya tingkat kesadaran pengurus Koperasi untuk melaksanakan eksternal audit oleh Akuntan Publik.

Rendahnya tingkat pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) oleh Koperasi.

- (4) Jumlah Koperasi tidak aktif di Provinsi Jambi relatif besar yaitu sekitar 38,09 % dari total jumlah Koperasi.

Masih rendahnya minat kelompok-kelompok ekonomi produktif yang ada di tengah masyarakat (seperti : KUBE (Kelompok usaha bersama), Kelompok Tani, UPPKS, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), majelis taklim dsbnya) berintegrasi ke dalam wadah Koperasi atau membentuk wadah Koperasi.

- (5) Belum tertatanya administrasi pembukuan dana bantuan perkuatan (bankuat) dari Kementerian Koperasi dan UKM secara baik.

c) Aspek Usaha Koperasi dan UMKM

- (1) Terbatasnya kemampuan daya inovasi dan kreativitas aparat pembina dan gerakan Koperasi dalam bidang perkoperasian dan entrepreneurship.
- (2) Kurang efektif dan fokusnya usaha yang dilakukan oleh Koperasi yang bersifat banyak usaha (multi porfose),
- (3) Rendahnya kemampuan Koperasi dalam menggali potensi pasar baik lokal, regional, nasional dan International.
- (4) Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memenuhi permintaan pasar (baik kapasitas, kualitas, kontinuitas dan harga yang mampu bersaing).
- (5) Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam menggunakan dan memanfaatkan IT.
- (6) Rendahnya kompetensi wirausaha Koperasi dan UMKM.
- (7) Terbatasnya akses sumberdaya produktif Koperasi dan UMKM.
- (8) Kurang kondusifnya iklim usaha Koperasi dan UMKM.

2) Langkah-langkah Antisipatif dan Pemecahan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, telah diambil beberapa upaya, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintah Provinsi antara lain adalah :

a) Aspek Umum

- (1) Perlu adanya forum Rapat Koordinasi antar stake holder tentang pemahaman dan kepedulian serta adanya komitmen Dinas/Instansi dan lembaga terkait terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi.
- (2) Perlu dibentuknya suatu forum komunikasi yang intensif yang mengakar dari bawah sehingga diharapkan dapat merubah citra / image dan rasa memiliki masyarakat terhadap Koperasi semakin tinggi.

b) Aspek Kelembagaan dan SDM Koperasi dan UMKM :

- (1) Perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan merekrut kembali pegawai yang berasal dari eks

Kanwil/Kandep Koperasi, serta mengikutsertakan pegawai baru dalam setiap kegiatan pelatihan di Provinsi maupun di Pusat.

- (2) Perlu adanya pelatihan yang terpadu didalam menunjang kualitas SDM Gerakan Koperasi dan UMKM Kab/Kota.
- (3) Perlu meningkatkan SDM Pengurus koperasi melalui pelatihan dan meningkatkan kesadaran pengurus bahwa lembaga koperasi merupakan milik bersama dari anggota untuk anggota dan oleh anggota koperasi.
- (4) Perlu adanya sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada Pengurus Koperasi tentang artinya pelaksanaan audit eksternal dan menganggarkan biaya untuk audit eksternal.
- (5) Perlu adanya sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada anggota Koperasi tentang artinya pelaksanaan RAT pada hakekatnya RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi guna mengevaluasi, merencanakan dan mengimplementasikan hasil RAT.
- (6) Perlu meningkatkan pembinaan dengan mengembangkan usaha produktif anggota yang nantinya dapat dipasarkan melalui koperasi.
- (7) Perlu meningkatkan koordinasi antar instansi agar kelompok – kelompok binaannya terwadah dalam lembaga koperasi dan bersama – sama untuk mengembangkan usaha.
- (8) Perlu ada pelatihan administrasi pembukuan sehingga format laporan setiap koperasi itu sama.

c) Aspek Usaha Koperasi dan UMKM :

- (1) Perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengikutsertakan study banding/magang kepada aparat pembina dan pengurus koperasi ke koperasi yang lebih baik.
- (2) Perlu memberi pemahaman kepada pengurus koperasi agar menentukan skala prioritas usaha terutama untuk kepentingan anggota.
- (3) Perlu adanya tenaga pendampingan yang profesional dalam mengakses pemasaran hasil produk Koperasi dan UMKM atau membentuk suatu wadah atau tempat sebagai pusat promosi hasil produk Koperasi dan UMKM yang sumber pendanaannya diharapkan dapat dialokasikan melalui dana dekon dan APBD I.

- (4) Perlu meningkatkan pengetahuan pengurus terhadap kemajuan teknologi sehingga informasi dalam memenuhi kebutuhan pasar dapat diketahui secara dini.

4.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka implementasi pembangunan JAMBI EMAS, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi (BPMPP), menetapkan visi “Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat Yang Didasarkan Atas Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menuju Jambi Emas 2015”. Untuk mencapai Visi tersebut telah ditetapkan Lima Misi yang diemban oleh BPMPP Provinsi Jambi yaitu : (1) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa; (2) Meningkatkan dan mengembangkan serta memperkuat ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotong royongan masyarakat, serta pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat di dalam masyarakat; (3) Meningkatkan dan mengembangkan peran aktif masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan; (4) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender; dan (5) Meningkatkan dan mengembangkan usaha kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama dalam pemenuhan dan pemeliharaan hak-hak anak. Pengejawantahan

visi dan misi BPMPP tersebut dijalankan selama lima tahun yakni dari tahun 2010-2015.

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan visi dan misi BPMPP periode 2010-2015, oleh karena itu pencapaian target-target dalam Renstra BPMPP merupakan prioritas program/kegiatan yang dijalankan, yang difokuskan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Beberapa kendala dan tantangan yang di temui dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat teratasi dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2010-2015.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi melaksanakan 2 (dua) urusan wajib, dengan 9 (Sembilan) program yang dijalankan, yaitu :

- a. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di laksanakan oleh 3 (tiga) Bidang , yaitu Bidang Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa/kelurahan dan Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Alam.

Melaksanakan urusan ini, pada tahun 2015 telah disusun 6 (enam) program yaitu (1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat, (2) Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa, (3) Program peningkatan keberdayaan masyarakat, (4) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, (5) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dan (6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2015 telah di alokasikan anggaran sebesar Rp .4.969.525.000.- dan telah terealisasi sebesar Rp.4.556.406.510,- atau mencapai 91.00 %.

Tabel 4.140
Realisasi capaian anggaran setiap program

No	Program	Alokasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	628.000.000.-	624.958.400.-
2.	Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	800.000.000,-	704.663.000,-
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	322.000.000.-	297.077.600.-
4.	Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan	271.135.400.-	245.661.100.-
5.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1.035.530.000,-	938.644.641,-
6.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	1.912.860.000,-	1.745.401.769,-
Jumlah		4.969.525.000,-	4.556.406.510,-

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

- b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah serta mengoptimalkan perlindungan anak guna menjamin tumbuh kembang anak secara alamiah; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban bersama-sama menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada 3 (tiga) program yang dijalankan melaksanakan urusan ini, yaitu : (1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, (2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, (3) Program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dan pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2015 telah di alokasikan anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,-. dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp 1.931.540.503 ,- atau mencapai 95.00 %.

Tabel 4.141
Program dan alokasi anggaran

No	Program	Alokasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
1.	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.249.581.000,-	1.205.544.872,-
2.	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	420.419.000,-	388.554.381.-
3.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan pembangunan	350.000.000.-	337.441.250.-
	Jumlah total	2.020.000.000,-	1.931.540.503

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, dari alokasi anggaran yang dikelola BPMPP pada tahun 2015 sebesar Rp.6.989.525.000,- telah terealisasi sebesar Rp.6.487.947.013,- atau mencapai 92,82 %. Adapun gambaran capaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui TTG.

Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat pedesaan dalam mengelola sumberdaya yang ada di pedesaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan, meliputi :

a) Kegiatan Posyantek dan gelar TTG.

Teknologi Tepat Guna (TTG) dapat dikembangkan di masyarakat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai tambah dan efisien. Tujuan Pelaksanaan TTG adalah untuk memperkenalkan berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) dan produksinya secara visual kepada masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menetapkan pilihan, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang perkembangan dan kemajuan teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan mutu dan kuantitas produksi di berbagai sector usaha. Penyelenggaraan pameran pembangunan dan potensi daerah Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVII Tahun 2015 adalah satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemerintah Provinsi Jambi dengan peserta adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota yang terdiri dari BPMPD Kab/Kota se-Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia. Dari Hasil

kesepakatan pada lokakarya TTG XVII Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan TTG XVIII Tahun 2016 akan dilaksanakan di Provinsi NTB.

Tabel 4.142
Provinsi Berprestasi pada Pelaksanaan TTG XVIII

No	Desa/Kelurahan	Juara
1	Provinsi DKI Jakarta	I
2	Provinsi Banten	II
3	Provinsi Maluku	III
4	Provinsi Kepulauan Riau	Harapan I
5	Provinsi Gorontalo	Harapan II
6	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Harapan III

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Tabel 4.143
Hasil Penilaian Terhadap Stan Terbaik pada TTG XVII Tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Juara
1	Provinsi Aceh	I
2	Provinsi DKI Jakarta	II
3	Provinsi Maluku	III
4	Provinsi Jawa Barat	Harapan I
5	Provinsi Riau	Harapan II
6	Provinsi Kalimantan Utara	Harapan III

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Tabel 4.144
Juara Lomba Terbaik Pos Pelayanan Teknologi TepatGunaTingkat Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Juara
1	Bajubang	Batanghari	Juara I
2	Bram Itam	Tanjung Jabung Barat	Juara II
3	Sumay	Tebo	Juara III

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Realisasi kegiatan 99.59 % (Rp.268.900.000.-) dari pagu anggaran sebesar Rp.270.000.000.-

- b) Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Gotong Royongan dan Adat Daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- (1) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII Dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-43 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Sebagai suatu system nilai social budaya yang berharga dan telah lama menyatu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita yang patut dijaga dan dilestarikan. Sasaran acara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 43 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 di kota Jambi adalah masyarakat desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan dengan hasil yang diharapkan untuk meningkatkan partisipasi, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan melalui pelibatan Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan melalui Tim Penggerak PKK (TP-PKK) untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

- (2) Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat berbasis adat dan kearifan lokal dengan jumlah peserta 30 orang . Tujuan Kegiatan Penguatan kelembagaan (adat) di kabupaten maupun desa, menggali dan menghimpun tentang potensi dan kearifan lokal yang ada , mendorong peran aktif SKPD untuk mengambil peran dalam pelestarian adat. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Hasil yang di capai .terlaksananya BBGRM di tingkat provinsi di kota Jambi dan tingkat Nasional di Manado(Sulawesi Utara) melakukan workshop pemberdayaan berbasis adat dan kearifan loka denga peserta 45 orang. Melaksanakan Pelatihan SI ABN kab/kota dengan peserta 25 orang, melakukan sosialisasi adat dengan peserta 30 orang konsultasi dan koordinasi ke Kemendes. Realisasi kegiatan ini 99.52 % (Rp.256.749.400.-) Pagu anggaran Rp. 258.000.000,-.
- c) Kegiatan Pembinaan dan revitalisasi pokjanal posyandu. Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi posyandu melaksanakan rakor Posyandi di Kab/kota sebanyak 45 orang. Pelatihan SI Posyandu Kab/kota peserta 25 orang. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Posyandu peserta 30

orang. Sosialisasi SI Posyandu peserta 30 orang, Rapat Pengurus Pokjanal Posyandu Provinsi, peserta 24 orang dan konsultasi dan koordinasi kemendes.Melaksanakan kegiatan hari lanjut usia Nasional (HLUN) memberikan Penghargaan kepada masyarakat , melakukan penilaian lansia potensial dan mandiri.melakukan rekreasi para lansia di kampung Raja, senam bersama dan pengobatan masal. Realisasi kegiatan ini 99.31 % (Rp.99.309.000.-) Pagu anggaran Rp. 100.000.000.-.

Tabel 4.145
Penghargaan Anugerah Amal Bhakti Lansia
Tahun 2015 kepada Lansia Potensial dan Mandiri

No	Penghargaan
1	Anugerah Amal Bhakti Lansia Utama
2	Anugerah Amal Bhakti Lansia Madya
3	Anugerah Amal Bhakti Lansia Pratama

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Melalui program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam mengorganisir masyarakat dan kelembagaan desa serta mengelola sumberdaya yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mendukung pencapaian tujuan tersebut, diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan PNPM Mandiri Pedesaan.

Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan 138 Kecamatan, 1.399 Desa, 163 Kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 3.406.178 jiwa. Lokasi PNPM MPd tahun 2014 berlokasi di 83 kecamatan dan Tahun Anggaran 2015 adalah dalam rangka pengakhiran dan penyelesaian kegiatan PNPM MPd. Berkas hasil kegiatan PNPM MPd harus diserahkan kepada desa (asset desa) hal ini agar kegiatan dapat dipelihara dengan baik dan berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memandatkan bahwa desa berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Fasilitasi pelaksanaan

pengakhiran dan penyelesaian PNPM MPd serta Implementasi UU desa meliputi : 1) Progres Pelaksanaan MAD Sosialisasi, MAD Sosialisasi tahapan pengakhiran kegiatan dengan Out Put terselenggaranya MAD sos dan tertuang dalam berita acara MAD Sos pengakhiran untuk provinsi Jambi dengan target 9 Kabupaten pada 83 Kecamatan telah terealisasi seluruhnya 100%. Realisasi kegiatan ini 88.19 % (Rp. 705.493.000.-) Pagu anggaran Rp. 800.000.000,-

3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pencapaian tujuan program ini dijalankan melalui 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Melalui program ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi serta membangun jaringan kemitraan dalam pembangunan pedesaan. Adapun gambaran pelaksanaan program ini sebagai berikut :

a) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian P2WKSS.

Program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) merupakan wadah aktivitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga maupun program-program lainnya yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan dengan 11 (sebelas) lokasi diKabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Realisasi pelaksanaan penilaian lomba P2WKSS dengan adanya rapat tim , pendampingan pemenang lomba ke jakarta, dengan menetapkan desa atas prestasi yang di capai .

Tabel 4.146
Juara Lomba Pelaksanaan Terbaik Program Terpadu
Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Juara
1	Desa Rangkiling Kab. Sarolangun	I
2	Desa Sungai Gembar Kab. Tanjab Barat	II
3	Desa Rantau Rasau Dua Kab. Tanjab Timur	III
4	Desa Talang Kemuning Kab. Kerinci	Harapan I
5	Desa Talang Tembago Kab. Merangin	Harapan II
6	Desa Batu Kerbau Kab. Bungo	Harapan III

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Realisasi kegiatan ini 99.95 % (Rp. 183.901.000.-) Pagu anggaran Rp. 183.995.400,-

- b) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Perdesaan.

Melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan keberdayaan masyarakat. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Tahun Anggaran 2015 diarahkan pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pengurus lembaga dan organisasi pedesaan yang dilaksanakan di 6 Kabupaten dalam Provinsi Jambi pada tanggal 21 Oktober s/d 31 Oktober 2015 dengan peserta 300 orang per kab/kota sebanyak 30 orang yang terdiri dari unsur kades/aparatur, unsur BPD, LPM, Karang Taruna, unsur PKK, lembaga adat, BUMD, KPMD, Kel. Tani/orang keagamaan, BKMT. Realisasi kegiatan ini 75.68 % (Rp.75.677.600.-) Pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.

Dalam Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi masyarakat terlaksananya Rakor penguatan Kelembagaan KPA kab/kota, peserta 45 orang, Rapat rutin pokja PMTS Provinsi dengan peserta 24 orang, monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan HIV AIDS. Melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di ikuti oleh 3 kabupaten dengan peserta 30 orang, hasil yang di capai terjalin kerjasama antara pemuda, BPMPP, BNN dan komponen masyarakat untuk membantu dan mendukung program P4GN Realisasi kegiatan ini 100 % (Rp.100.000.000.-) Pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

- d) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat. Terbentuknya Tim Seleksi dengan sosialisasi KSP yang mengikut sertakan 61 orang dari PMD kab/Kota, Penguruan Tinggi, LPM Provinsi, Bapedda provinsi, LSM , Puskud, komisi lanjut usia, PKK KOW dan Aparatur BPMPP Provinsi Jambi. Realisasi kegiatan ini 56.10 % (Rp. 79.096.500.-) Pagu anggaran Rp. 141.000.000,-

4) Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perekonomian yang ada di pedesaan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya aktifitas perekonomian yang membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program ini dijalankan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa. Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan kegiatan ini, antara lain :

- a) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Se Provinsi Jambi Tahun 2015. Pelaksanaan Bintek Pengelolaan Pasar Desa untuk meningkatkan kapasitas aparat dan pengelola pasar desa. Mewujudkan peran dan fungsi pasar desa dalam meningkatkan pendapatan pemerintahan desa yang di laksanakan di Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dengan peserta 36 (tiga puluh enam) orang dari 9 Kabupaten berasal dari aparat pemerintah dan Pengelola pasar Desa.dengan dilaksanakan Bintek pengelolaan pasar Desa di harapkan terdatanya pasar desa masing masing wilayah dengan melakukan inventarisasi/pendataan yang menyeluruh, terkoordinasi dan terintegrasi dari tingkat desa,kecamatan,kabupaten dan Provinsi.

Bimbingan Teknis dan Supervisi Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jambi Tahun 2015. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jambi Tahun 2015 bertempat di Hotel Shang Ratu Jambi dengan peserta sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang terdiri dari BPMD Kabupaten/Kota, BPD Kabupaten/Kota, Pengurus BUMDes/UED-SP dan Kepala Desa kabupaten/Kota. Tujuan Bimbingan Teknis dan Supervisi Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah untuk mendorong Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Desa yang dikoordinasikan Pemerintah Provinsi Jambi bersama - sama dengan Pemerintah Desa yang sepakat bekerjasama melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha ekonomi desa dengan hasil yang diharapkan diperolehnya penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga/institusi terkait di Kabupaten/Kota dapat optimal dalam kerangka koordinasi kebijakan dan Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, dan terwujudnya koordinasi antara lembaga/institusi terkait di Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa. Pagu Rp.87.140.000,- realisasi Rp. 61.760.100,- (70.87%).

- b) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan manajemen Bumdes untuk meningkatkan pemahaman tata cara pembukuan keuangan/manajemen BUMDesa. Dan untuk meningkatkan keahlian aparatur desa dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pendirian serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDesa. Pelatihan dilakukan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dalam Provinsi jambi. Selama bulan November hingga Desember 2015. Diharapkan pendirian lembaga ini dapat mengurangi peran tengkulak yang seringkali menyebabkan biaya transaksi antara harga produk dan produsen ke konsumen akhir. Sasaran dari Pelatihan Bumdes adalah Kasi PMD kecamatan , Kepala Desa, BPD ,LPM dan Kaur Desa. Hasil yang di harapkan dengan adanya pelatihan keterampilan manajemen Bumdes agar peserta memahami tata cara pendirian Bumdes, Arah kebijakan dan pengembangan kelembagaan Bumdes. Pembukuan Bumdes. Peran Serta Dinas Koperasi dalam Pengembangan Bumdes. Serta arah kebijakan DPRD dalam mendukung Program Pengembangan Usaha Ekonomi Desa. Pagu Rp. 183.995.400,- Realisasi anggaran RP. 183.901.000,- (99.95%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Untuk mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan semangat otonomi desa, perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu

- a) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengelola keuangan desa pada tahun 2015 ditujukan kepada 80 orang Kepala Desa yang ada di 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh di Gedung LPMP pada minggu kedua tanggal 8 s/d 10 April 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, mengoptimalkan pelaku pembangunan desa dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparat pemerintah desa dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan perencanaan anggaran pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik. Hasil yang diharapkan dengan adanya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi jambi diharapkan para Kepala Desa memahami tentang pengelolaan keuangan desa yang berasaskan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Realisasi kegiatan ini 84.41 % (Rp. 367.615.100.-) Pagu anggaran Rp. 435.530.000,-
- b) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintah desa. Telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang yang terdiri dari para kepala desa dari kabupaten/kota seprovinsi Jambi. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang fasilitasi penguatan kelembagaan BPD di 10 kabupaten/kota yang dilaksanakan di masing masing BPMPD kabupaten /kota dengan peserta 22 orang. Realisasi kegiatan ini 99.75% (Rp. 327.787.100.-) Pagu anggaran Rp. 328.604.000,-

- c) Kegiatan Bintel Penyusunan Profil Desa. Bintel Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dilaksanakan di Aula masing – masing BPMPD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dari tanggal 9 Februari s/d 3 Maret 2015 dengan peserta dari unsur Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Operator Profil Desa dan Kelurahan dengan jumlah peserta masing – masing Kabupaten/Kota 30 (tigapuluh) orang. Adapun maksud dan tujuan Bintel Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan adalah memberikan Bimbingan Teknis penyusunan data profil desa dan kelurahan kepada daerah dalam upaya percepatan penyediaan data profil desa dan kelurahan sehingga diharapkan seluruh peserta memahami tugas dan fungsi Pokja Desa/Kelurahan, tersedianya data potensi desa dan tingkat perkembangan sebagai gambaran menyeluruh terhadap potensi dan perkembangan desa/kelurahan di masing – masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan, membantu dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, membantu dalam penyusunan dan Perencanaan Pembangunan di daerah dan juga pihak swasta untuk berpartisipasi dalam rangka pembangunan, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam dalam penentuan Daerah prioritas pembangunan serta salah satu potensi kekuatan politik, bahan dalam mengatur pemekaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa dan Kelurahan dan Regrouping Desa dan Kelurahan. Realisasi kegiatan ini 89.14 % (Rp. 178.276.725.-) Pagu anggaran Rp. 200.000.000,-
- d) Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Desa/kelurahan. Kegiatan Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat Lonjakan perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2(dua) tahun terakhir. Sasaran Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan rincian 10 desa dan 11 kelurahan. Untuk melakukan Penilaian pada Desa dan Kelurahan Juara I (pertama) di Tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan sistem penilaian : Penilaian Administrasi dan Ekspose Kepala Desa dan Lurah dan Penilaian

Kondisi/Verifikasi Lapangan. Pelaksanaan Penilaian Kondisi lapangan Desa dan Lurah untuk menentukan unggulan I sampai IV Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Mei 2015 bertempat di Golden Harvest Hotel Kota Jambi. Berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jambi tanggal 8 Juni 2015 di Ruang Rapat Kepala Badan PMPP Provinsi Jambi diperoleh hasil sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 4.147
Juara Perlombaan DesaTingkat Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kab/kota	Kec	Desa
1	Kerinci	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting
2	Muaro Jambi	Bahar Utara	Mulya Jaya
3	Sungai Penuh	Sungai Bungkal	Talang Lindung
4	Tanjab Barat	Renah Mendalu	Lampisi
5	Merangin	Tabir Selatan	Bungo Tanjung
6	Bungo	Jujuhan Ilir	Bukit sari

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Tabel 4.148
Juara Perlombaan KelurahanTingkat Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Juara
1	Sarolangun	Sarolangun	Dusun Sarolangun	I
2	Tanjab Barat	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	II
3	Muaro Jambi	Jambi Luar Kota	Pijoan	III
4	Jambi	Kota Baru	Kenali Besar	Harapan I
5	Kerinci	Gunung Kerinci	Siulak	Harapan II
6	Batanghari	Tembesi	Pasar Ma. Tembesi	Harapan III

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

- e) Penghargaan yang diberikan kepada para pemenang lomba adalah Piala, Uang Tunai dan Piagam Penghargaan serta bagi Juara I diberikan kesempatan untuk mengikuti rangkaian Upacara Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI Ke-70 Tahun 2015 di Jakarta. Realisasi kegiatan ini 98.19 % (Rp.392.752.816.-) Pagu anggaran Rp. 400.000.000,-
- 6) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program pemberdayaan masyarakat pedesaan bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan perekonomian pedesaan. Program ini dijalankan melalui 2 kegiatan, yaitu

a) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga .

Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi telah membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010. Untuk melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK telah membagi tugas kepada pengurus PKK di kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan baik itu terjadwal maupun secara sporadik diinventarisir dalam buku kegiatan TP PKK. Memanfaatkan teknologi informasi dengan pembuatan email dan blog TP PKK untuk penyebaran informasi kegiatan. Melalui Rakor PKK Tahun 2015 Kita Tingkatkan Kemauan Pengetahuan dan Kemampuan Penanggung jawab Gerakan PKK untuk mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Menuju Jambi Emas 2015 " yang di laksanakan bertempat Auditorium rumah dinas Gubernur. Melalui rakor diharapkan kader dapat menghayati bahwa PKK merupakan sebuah gerakan pembangunan masyarakat dari bawah," yang pengelolaannya dari organisasi wanita untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan," .kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja, pelaksanaan serta prioritas program sebagai bentuk operasional dari 10 program Pokok PKK." Realisasi kegiatan ini 95.47% (Rp. 1.718.436.761.-) Pagu anggaran Rp.1.800.000.000.-

b) Kegiatan Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif .

Usaha ekonomi produktif sebagai pendukung program penyediaan lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pengembangan dan penguatan aktifitas ekonomi dan produktif . Dengan pelatihan perempuan dalam usaha ekonomi tahun 2015 di tujukan kepada perempuan di desa KTM (Kota Terpadu Mandiri) di 2 (dua) kabupaten, Sarolangun di desa butang Baru Kecamatan

Mandiingin membuat kue kering , kue basah dan Kabupaten Muaro Bungo Desa Lubuk Beringin Kecamatan Batin III Ulu membuat aneka makanan dari ikan .peserta sebanyak 20 orang tiap kabupaten yang berasal dari Ibu Rumah tangga dan Kader PKK ,Hasil yang ingin di capai meningkatkan kemampuan dan pengalaman peserta dalam usaha ekonomi produktif , mengurangi kemiskinan melalui peningkatan peranan usaha ekonomi produktif yang berbasis keluarga, mendukung program penyediaan lapangan kerja dan mengembangkan kemampuan dan peningkatan pendapatan kesejahteraan rumah tangga miskin.

Realisasi kegiatan ini 99.86 % (Rp.112.704.000) Pagu anggaran Rp. 112.860..000-

7) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Program ini dijalankan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan meningkatkan proporsi keterwakilan perempuan dalam lembaga public. Pada tahun 2015, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melaksanakan 8 (delapan) kegiatan.

a) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- (1)Kunjungan rumah (*home visit*), salah satu bagian kegiatan perlindungan anak yang peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, yang ada di lingkungan masyarakat, di luar SLB, ada yang belum mengalami pendidikan, dan ada yang sudah mengalami pendidikan, umumnya anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ini adalah, pernikahan orang tua yang masih ada hubungan saudara.
- (2)Memberikan paket bantuan kepada keluarga yang di kunjungan yang ada Anak Berkebutuhan Khusus, setiap Kabupaten dua kepala keluarga.
- (3)Umumnya anak-anak yang lumpuh, dan anak yang mengalami takut pada orang lain.
- (4)Melaksanakan monitoring kegiatan perlindungan anak di kabupaten/kota.
- (5)Rapat-rapat anggota pokja setiap triwulan, yang di bahas adalah masalah penanganan perlindungan anak, termasuk anak yang

berhadapan dengan hukum, dan anak yang konflik hukum, juga termasuk anak Anak berkebutuhan khusus.

(6)Adapun jumlah kasus yang di tangani oleh anggota pokja januari sampai Desember berjumlah 12 kasus. Realisasi kegiatan ini 99.05 % (Rp.98.671.900.-) Pagu anggaran Rp99.621.000,-

- b) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2). Keberadaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan di maksud untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari pada prilaku yang mengarah pada kekerasan berbasis gender (KBG) melalui pendampingan dan penyelesaian kasus kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Fasilitasi kegiatan lembaga di wujudkan dengan kegiatan pelatihan, pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan berbasis gender, pelatihan penanganan korban bagi para relawan, monitoring korban kekerasan berbasis gender Kegiatan Fasilitasi penguatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) melalui rakor pusat pelayanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) se provinsi Jambi di ruang pola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi yang di laksanakan dengan peserta 33 orang yang berasal dari kabupaten/kota .Adapun data para kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada lembaga ini tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 4.149
Data Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak Tahun 2015

NO	Jenis Kekerasan	Perempuan	Anak
1	Fisik	11	2
2	Psikis	20	15
3	Penelantaran	13	3
4	Seksual	3	9

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Tabel 4.150
Data Status Perkara Kelayan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2015

NO	Jenis Status Perkara	Perempuan	Anak
1	Hukum	3	7
2	Pengunduran Diri	-	-
3	Pengunduran Diri tanpa pemberitahuan	-	-
4	Kasus masih dalam proses hokum	2	4
5	Kasus selesai	-	3
6	Dirujuk kerumah aman	13	12

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

Realisasi kegiatan ini 96.30 % (Rp. 225.449.900.-) Pagu anggaran Rp.234.112.000,-

- c) Kegiatan Pengembangan sistem Informasi gender dan anak. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan melalui Sosialisasi Akta Kelahiran Bebas Biaya dalam rencana aksi dan ditindak lanjuti melalui fasilitasi, dan advokasi dan dapat terkoordinasi, dan sinkronisasi dalam penanganan akta kelahiran bebas biaya dapat digunakan untuk memberikan dukungan percepatan kepemilikan akta kelahiran bebas biaya dalam rangka perlindungan anak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi peserta sosialisasi serta seluruh unsur terkait tentang pentingnya akta kelahiran bebas biaya, memberikan dukungan kepada instansi teknis dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengurusan akta kelahiran bebas biaya serta tersedianya kebijakan, sumber daya manusia dan sarana pendukung yang mempercepat pelayanan akta kelahiran. Kegiatan Sosialisasi Akta Kelahiran Bebas biaya Se – Provinsi Jambi dilaksanakan pada Triwulan ke II tanggal 21 Mei 2015 di Aula BPMPP Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 45 orang terdiri dari Dinas – Dinas terkait. Materi yang disampaikan di dalam Sosialisasi Akta Kelahiran Bebas biaya Se – Provinsi Jambi antara lain kebijakan pemerintah terhadap akta kelahiran Bebas Biaya Dalam Rangka Perlindungan Anak, Kebijakan provinsi dalam Pelaksanaan Akta Kelahiran Bebas Biaya, serta Implementasi Pelaksanaan Akta Kelahiran Bebas Biaya Di Kabupaten Batanghari

dengan hasil yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi Peserta memahami Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Bebas Biaya Dalam Rangka Perlindungan Anak Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012, peserta dapat memahami implementasi Pelaksanaan Akta Kelahiran Bebas Biaya dan hal – hal berkaitan dalam membantu memfasilitasi dan dapat ditangani secara cepat, dan koordinasi dengan instansi terkait. Realisasi kegiatan ini 98.86 % (Rp. 101.053.547.-) Pagu anggaran Rp102.216.000,-

- d) Kegiatan Penguatan kelembangaan pengerusatamaan gender dan anak. berupa pelaksanaan Forum Anak Daerah dan Temu Pengurus Forum Anak Daerah yng di laksanakan selama 3 hari di Hotel Ratu Jambi dengan peserta 40 orang yang berasal dari siswa SLTA sebanyak 14 orang mengikuti Forum Anak nasional (FAN) 2015 dengan kegiatan Capacity Building Dalam rangka hari anak Nasional (HAN) 2015 di Bogor Provinsi Jawa Barat.. Realisasi kegiatan ini 99.52 % (Rp.378.182.800.-) Pagu anggaran Rp.380.000.000,-
- e) Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai perlindungan anak. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai perlindungan anak dilaksanakan melalui Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 35 orang yang terdiri dari : BPMPD/KBPP/PPKB bagi Pejabat Eselon IV Kab/Kota seprovinsi jambi sebanyak 11 orang, TP-PKK, Dharma Wanita, BKOW, BKMT, Pokja Perlindungan Anak dan BPMPP Provinsi sebanyak 24 orang yang dilaksanakan pada triwulan pertama tanggal 19 Maret 2015 di Aula BPMPP Provinsi Jambi. Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat guna mengantisipasi serta pencegahan terhadap bahaya kejahatan seksual terhadap anak, cepat dan tepat dalam penanganan permasalahan kejahatan seksual terhadap anak dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan terkait masalah anak, mengkonseling anak yang mengalami kekerasan seksual serta anak yang berhadapan dengan hukum serta memahami permasalahan anak secara umum, serta koordinasinya dengan instansi terkait. Dengan harapan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi GN-AKSA peserta dapat

memahami cara dan teknik penanganan permasalahan akibat kejahatan seksual terhadap anak secara umum, dapat memahami hal – hal yang harus ditangani secara cepat, tepat dan koordinasi dengan instansi terkait serta peserta dapat memahami setiap permasalahan terhadap perlindungan anak sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2014, tentang GN-AKSA. Realisasi kegiatan ini 98.92 % (Rp. 97.104.600.-) Pagu anggaran Rp.98.163.000,-.

- f) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender sehingga berbagai ketimpangan akibat dari masalah struktural dan nilai nilai sosial budaya dapat diatasi melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG di provinsi yaitu memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan , program dan kegiatan pembangunan di daerah yang menjadi sasaran kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG di tujukan bagi SKPD di provinsi Jambi khususnya bagian Perencanaan dengan tujuan kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG adalah meningkatkan kebijakan hukum yang responsif gender dan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, akuntabel dan berkeadilan. Mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di seluruh bidang pembangunan dan memperkecil gender gap yang terdapat di seluruh pembangunan. Realisasi kegiatan ini 88.51 % (Rp.176.128.400.-) Pagu anggaran Rp.199.000.000,-
- g) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak.kegiatan ini di laksanakan untuk dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kebersamaan , kepedulian terhadap permasalahan anak,melaksanakan jambore anak, melaksanakan outbond, melaksanakan Forum Anak Daerah,untuk meningkatkan Kualitas kepengurusan FAD agar adanya komunikasi dan menyebarkan informasi, melaksanakan rapat Gugus tugas Kota Layak Anak. Melakukan Desiminasi pemetaan potensi daerah rawan tumbuh kembang anak 2 kabupaten Bungo dan Tebo dengan jumlah peserta 70 orang peserta TP.PKK Kab. Realisasi kegiatan ini 94.82 % (Rp.85.340.225.-) Pagu anggaran Rp.90.000.000,-

h) Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. Bintek ketahanan keluarga di laksanakan pada tanggal 16 s.d 18 Februari 2015 dengan peserta 33 orang yang terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan , PKK , pengurus GOW kab/kota. Hasil dari pada Bintek Ketahanan Keluarga dapat meningkatkan kualitas keluarga dan pengetahuan/wawasan , aspek yang harus di miliki dalam ketahanan keluarga : 1. Memiliki Kemandirian nilai keluarga Muslim berarti memiliki nilai-nilai Islam yang menjadi landasan berkeluarga dan arah kehidupannya..2. Memiliki Kemandirian Ekonomi 3. Tahan menghadapi goncangan keluarga. 4. Keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial. 5. Mampu menyelesaikan problema yang di hadapi. Hasil yang di harapkan setelah dapat meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Mewujudkan kelaurga yang berkualitas yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat , maju, mandiri memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan bertanggung jawab , harmonis dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa. Realisasi kegiatan Rp.92.342.400.- dengan pagu anggaran Rp.105.569.000,-(87.47%).

8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menjalankan program pengarusutamaan gender di daerah sehingga mampu memfasilitasi dan mengadvokasi kelembagaan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memprioritaskan pengarusutamaan gender. Program ini dijalankan melalui 7 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT. Untuk penyelesaian kasus-kasus KDRT,P2TP2A dilengkapi dengan pendamping sebagai tenaga mediator yang akan berperan aktif dan memberikan pelayanan terbaik bagi korban KDRT dengan pelatihan bagi pelatih (TOT) yang di laksanakan pada tanggal 10 s.d 12 February 2015 di SMKN 4 Jambi dengan peserta 33 orang tenaga Konselor/mediator kabupaten kota dengan capaian mediator yang telah dapat mengembangkan ilmu dengan melatih mediator di daerah dalam melaksanakan praktek mediasi Hasil yang di

- harapkan agar tenaga mediator yang ada dapat menghadapi masalah dan membantu korban . Realisasi kegiatan ini 100 % (Rp. 98.268.000,-)
 Pagu anggaran Rp.98.268.000,-
- b) Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT di 5 Kabupaten/kota di laksanakan di kabupaten Kerinci, Kota sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Tebo dan kota Jambi dengan jumlah peserta kegiatan sosialisasi sebanyak 30 Orang yang berasal dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, RSUD , Polres, P2TP2A. Dengan harapan di laksanakannya sosialisasi sistem Pencatatan dan pelaporan KKDRT tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berjenjang dari setiap unit pelayanan terpadu tingkat kabupaten/kota sehingga dapat memahami tata cara administrasi dan pelaporan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan adanya keseragaman pelaporan di 11 kabupaten kota se provinsi jambi. Realisasi kegiatan ini .100 % (Rp. 97.500.000.-) Pagu anggaran Rp.97.500.000.-
- c) Kegiatan Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan, sejalan dengan peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana kerja pemerintah Tahun 2010 dan Intruksi Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI akan melakukan evaluasi guna melihat perkembangan kemajuan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di masing-masing provinsi dan kabupaten /kota. Dari hasil evaluasi kegiatan di masing –msing kabupaten/kota dalam provinsi Jambi dilakukan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi data data kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diolah dalam bentuk penyusunan buku profil perlindungan perempuan Realisasi kegiatan ini 98.54 % (Rp.95.086.400.-) Pagu anggaran Rp.96.500.000,-.
- d) Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta masyarakat umumnya bagi korban kasus-kasus kekerasan serta dalam mencari solusi dan pemecahannya yang di bantu

pendamping yang profesi psikolog, pengacara dan pekerja sosial pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak- anak (P2TP2A) Provinsi Jambi memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender . Pelayanan yang dilakukan P2TP2A diantaranya penanganan secara konseling psikis, pemulihan dan shelter atau rumah aman, pelayanan kesehatan, konseling hukum , pendampingan di kepolisian , home visit, menggalang dukungan semua pihak untuk memberi efek jera bagi pelaku. Realisasi kegiatan ini 66.83 % (Rp.111.602.535.-) Pagu anggaran Rp.167.000.000,-

- e) Kegiatan pembinaan dan penilaian perusahaan terbaik tenaga kerja perempuan. Kegiatan Penilaian Perusahaan Terbaik Yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Perempuan. Badan pemberdayaan perempuan Provinsi Jambi menjalin koordinasi dan kerjasama untuk melakukan pembinaan bagi perusahaan perusahaan dalam memperkerjakan tenaga perempuan guna meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja perempuan, memperjuangkan hak – hak tenaga kerja perempuan, serta menghapuskan diskriminasi tenaga kerja perempuan karena pembinaan dan penilaian Tenaga Kerja perempuan melalui perbaikan kesejahteraan, kondisi kesehatan, keselamatan dan perlindungan norma kerja dan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya serta peningkatan keterampilan lainnya terbukti memberikan dampak positif kepada upaya peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja perempuan. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Perusahaan, Pembina terbaik Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Jambi Tahun 2015 ditujukan bagi perusahaan swasta kabupaten/kota se-provinsi Jambi dengan kriteria sebagai berikut : 1) Memperkerjakan lebih dari 50 (limapuluh) orang tenaga kerja perempuan dengan status tenaga kerja tetap dan tidak tetap, 2) Belum pernah menerima penghargaan dalam program ini selama 3 (tiga) tahun terakhir, 3) Selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah tersangkut perkara hukum di Pengadilan, diutamakan yang telah mengikuti program peningkatan produktivitas kerja tenaga kerja secara terpadu. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pembinaan dan Penilaian Perusahaan, Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan di Provinsi Jambi Tahun 2015, yaitu adanya pembinaan dan penilaian yang maksimal bagi perusahaan Pembina terbaik yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan, terpilihnya 3 (tiga)

perusahaan terbaik dari 11 Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Serta data rekapitulasi pembinaan dan penilaian Pembina terbaik tenaga kerja perempuan se- provinsi Jambi ini dapat dijadikan dasar dalam pemantauan dan evaluasi perkembangan dan kemajuan pemberdayaan perempuan. Peserta kegiatan pembinaan dan penilaian perusahaan, Pembina terbaik tenaga kerja perempuan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang diberikan kriteria penilaian yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan penilaian, 3 (tiga) buah Piala untuk Juara I, II, dan III, kegiatan pembinaan dan penilaian perusahaan, Pembina terbaik tenaga kerja perempuan.

Tabel 4.151
Juara Penilaian Perusahaan Terbaik Yang Mempekerjakan
Tenaga Kerja Perempuan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015

No.	Nama Perusahaan	Juara
1	PT.PLN Persero Area Muara Bungo	Juara I
	Kabupaten Bungo	
2	PT.Inti Indo Sawit Kabupaten Batanghari	Juara II
3	PT.Sinar Sentosa Primatama Kota Jambi	Juara III

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

- f) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Tujuan dari Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera melalui Penilaian Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah 1) Memberikan semangat dan kesempatan peran aktif kaum perempuan untuk memelopori berperilaku yang berwawasan lingkungan 2) Mendorong kaum perempuan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan serta memahami pengendalian/ pencegahan pencemaran dan merusak lingkungan, 3) menumbuhkan kepeloporan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara nyata untuk mengurangi terjadinya pemanasan global 4) Meningkatkan cara dan/atau pola hidup yang sehat, bersih dan alami. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera melalui Penilaian Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2015, dilaksanakan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Tabel 4.152
Juara Penilaian Lomba Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan
Hidup Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015

No.	Nama Perusahaan	Juara
1	Kelompok Teratai Indah Kelurahan Teratai	Juara I
	Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari	
2	Kelompok Melati Indah Desa Gapura Suci	Juara II
	Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo	
3	Kelompok Cherry Kelurahan Penyengat Rendah	Juara III
	Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi	

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

- g) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Melalui Kegiatan Penilaian Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Hidup. Sasaran Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera melalui Kegiatan Penilaian Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi Tahun 2015, ditujukan bagi kelompok perempuan peduli lingkungan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan tujuan memberikan semangat dan kesempatan peran aktif kaum perempuan untuk memelopori berperilaku yang berwawasan lingkungan, mendorong kaum perempuan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan serta memahami pengendalian/pencegahan pencemaran dan perusak lingkungan. Realisasi kegiatan ini 96.47 % (Rp. 270.750.000.-) Pagu anggaran Rp.280.650.000,-

- 9) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dan Pembangunan.

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan yang dijalankan. Untuk dapat memainkan perannya dalam proses pembangunan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas perempuan, kapasitas kelembagaan dan membangun jejaring bagi perempuan sehingga akses, control, partisipasi dan manfaat yang diperoleh perempuan semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, program ini dijalankan melalui 3 (tiga) kegiatan meliputi :

- a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. Kegiatan Seminar Sehari Perempuan dan Kemiskinan. Maksud dan tujuan dari Seminar Sehari Perempuan dan Kemiskinan adalah meningkatkan kemandirian organisasi perempuan dalam menangani persoalan perempuan dan kemiskinan karena kemiskinan perempuan bias membuat perempuan terjerumus ke dalam berbagai kasus memilukan seperti kekerasan seksual, prostitusi, buruh migrant, trafficking, KDRT serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang sangat merugikan perempuan, keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di Gedung Wanita (BKOW) Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh orang) yang terdiri dari Pimpinan Organisasi Perempuan dan paguyuban Provinsi Jambi dan Pengurus BKOW Provinsi Jambi. Hasil yang diharapkan dengan adanya Kegiatan Seminar Sehari Perempuan dan Kemiskinan diharapkan hasil – hasil sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas Organisasi Perempuan di Provinsi Jambi dalam Menyikapi berbagai Persoalan yang dihadapi oleh perempuan; 2) Meningkatnya kepedulian Organisasi Perempuan di Provinsi Jambi untuk mengentaskan kemiskinan.
- b) Kegiatan Workshop Kepribadian Wanita Bagi DWP Unsur Pelaksana Di Lingkup DWP Provinsi Jambi. Melalui kegiatan pemberdayaan perempuan provinsi Jambi. Dengan adanya pembinaan organisasi perempuan dengan melaksanakan workshop kepribadian wanita yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015 di Aula dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi dengan jumlah peserta 85 orang yang terdiri dari ketua dan anggota dharma wanita Persatuan unsur pelaksana lingkup dharma wanita persatuan Provinsi Jambi. Maksud kegiatan ini dilaksanakan agar dapat mendukung karier suami sebagai istri Aparatur sipil negara, meningkatkan kepercayaan diri anggota dan berperilaku /etika dan meningkatkan wawasan anggota dharma wanita persatuan.
- c) Kegiatan Pelatihan Tata Rias Wajah Bagi DWP Unsur Pelaksana Di Lingkup DWP Provinsi Jambi . Melaksanakan pelatihan tata rias wajah dharma wanita persatuan provinsi Jambi di aula dharma wanita persatuan pada tanggal 12 s/d 14 November 2015 yang di ikuti sebanyak 40 orang peserta utusan dari ketua dan anggota DWP. Realisasi kegiatan ini 96.41 % (Rp. 337.441.250.-) Pagu anggaran Rp.350.000.000,

Sebagai institusi yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta perlindungan

perempuan dan anak, BPMPP tentu menghadapi permasalahan, tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Dari hasil inventarisasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015, secara umum semua program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja program dan penyerapan anggaran.

Secara khusus, beberapa program/kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya :

- a) Permasalahan yang terjadi pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes di 10 (sepuluh) Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2015 antara lain : (1) Jauhnya jarak antara desa dengan kabupaten, sehingga peserta datang ke lokasi kegiatan pelatihan terlambat; (2) Uang transport untuk peserta ternyata tidak sesuai dengan jarak tempuh dari desa ke Kabupaten.
- b) Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam usaha ekonomi produktif tahun 2015 antara lain: (1) Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif; (2) Kurangnya penyuluhan dan pembinaan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif di kabupaten; (3) Rendahnya pengetahuan /keterampilan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif; (4) Kurangnya informasi usaha ekonomi produktif terhadap perempuan.
- c) Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi masyarakat desa , masih kurangnya instansi terkait dalam penanganan dan penganggaran HIV/AIDS. Solusinya melakukan koordinasi dengan KPA Provinsi dan LSM yang menangani HIV/AIDS.

Selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta perlindungan perempuan dan anak; beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pedesaan baik secara perorangan, kelompok maupun institusi. Pada tahun 2015, beberapa penghargaan yang diterima diantaranya :

Tabel 4.153
Prestasi dan Penghargaan yang diterima Selama Tahun 2015

No	Penerima Penghargaan	Prestasi	Uraian
1	Gubernur Jambi	Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Pendamping Lokal (PL) Lokasi Normal Tahun 2014	Piagam
			SK
2	Bupati Muaro Jambi	Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Pendamping Lokal (PL) Lokasi Normal Tahun 2014	Piagam
			SK
3	Sdr. Nur Irawati Kec. Sei Bahar	Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Pendamping Lokal (PL) Lokasi Normal Tahun 2014	Piagam
			SK
4	Gubernur Jambi	Penghargaan APE Tahun 2014 Kategori Madya	Piagam
			SK
5	Walikota Jambi	Penghargaan APE Tahun 2014 Kategori Madya	Piagam
			SK
6	Bupati Merangin	Penghargaan APE Tahun 2014 Kategori Pratama	Piagam
			SK
7	Bupati Batanghari	Penghargaan APE Tahun 2014 Kategori Pratama	Piagam
			SK

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi

4.1.14 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia, karena menyangkut dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Terkait dengan urusan wajib kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai budaya, seni dan film yang dapat memberikan makna pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan masyarakat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Selain itu juga guna meningkatkan apresiasi masyarakat terutama kalangan pendidikan terhadap nilai sejarah dan budaya daerah Jambi.

Pada tahun 2015 program ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 3.332.950.500,- dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yaitu:

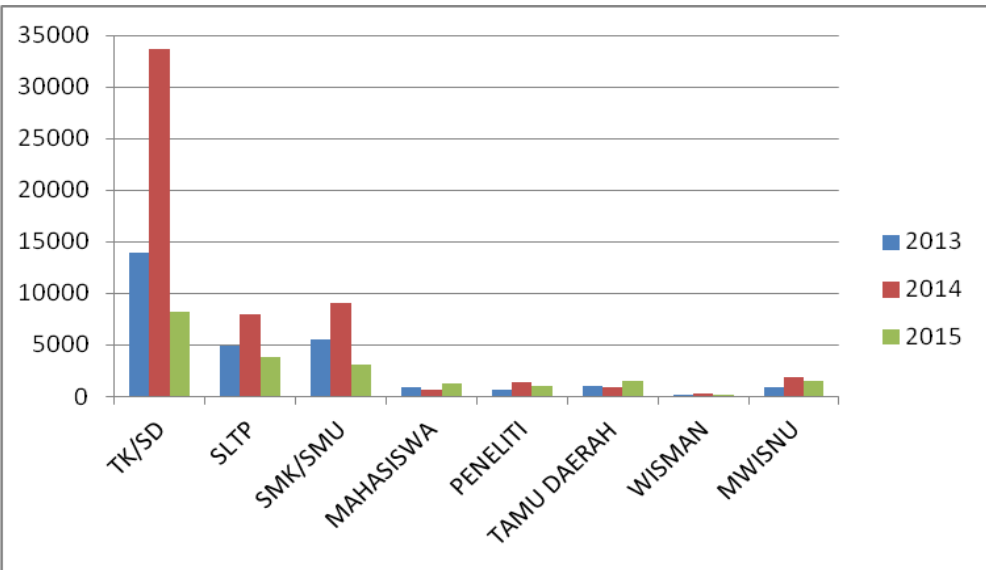
- 1) Peningkatan Fungsi Museum Negeri Jambi.
- 2) Peningkatan Fungsi Taman Budaya Jambi,
- 3) Peningkatan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi,
- 4) Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah,

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(1) Peningkatan Fungsi Museum Negeri Jambi.

Telah dilakukan survey rencana pengadaan koleksi, survey pengumpulan data dan dokumentasi koleksi dan pendataan koleksi bernuansa sejarah dan budaya Islam di Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Sabak Timur. Terpeliharanya koleksi etnografi bahan tekstil sebanyak 43 lembar, koleksi bahan logam sebanyak 99 buah, koleksiseni rupa ukiran sebanyak 7 buah, koleksi seni rupa lukisan sebanyak 3 buah, koleksi filologi naskah sebanyak 85 buah, koleksi historika sebanyak 5 buah dan koleksi teknologika sebanyak 3 buah. Terwujudnya pengadaan koleksi sebanyak 62 buah/pasang/unit/ set. Terlaksananya Workshop Sahabat Museum sebanyak 1 kali di Museum Siginjei. Terselenggaranya pameran dalam provinsi/pameran khusus sebanyak 3 kali. Terlaksananya Pameran keliling dalam rangka MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo dan dalam rangka Education Expo di Kota Jambi dan pada Batanghari Festival 2015 di Taman Tanggo Rajo.

Sedangkan untuk pameran luar provinsi diantaranya: Terlaksananya pameran Bersama Museum se-Indonesia “Jejak Budaya Maritim Indonesia” dalam rangka HUT Taman Mini Indonesia Indah. Terlaksananya Pameran Bersama Museum Negeri se-Indonesia “Ragam Pesona Kain Tradisional Nusantara” di Museum Adityawarman, Sumatera Barat dan “Keragaman Alat Musik Tradisional Nusantara” di Papua. Terlaksananya Pameran Religi dan Kesenian Nusantara “Teruntuk Sang Maha Indah” di Museum Nasional Jakarta. Terlaksananya Pameran Bersama Museum Negeri se-Sumatera “Senjata Tradisional Sumatera Dalam Konstruksi dan Produksi Budaya” di Palembang



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Gambar 4.63 Perkembangan jumlah pengunjung museum Negeri Jambi.

(2) Peningkatan Fungsi Taman Budaya Jambi,

Terlaksananya Malam Keagungan Melayu 4 pada tanggal 6 Januari 2015. Event ini merupakan adalah satu bentuk perwujudan pengakuan dan penghargaan kepada para pencetus, penggagas, pelaku seni yang telah lama mendharmabaktikan tenaga dan pikirannya terhadap perkembangan serta pelestarian seni budaya daerah serta mengembangkan wacana berkesenian sebagai peningkatan kesadaran berapresiasi. Sasaran event ini adalah praktisi seni tradisi, seniman/pelaku seni, apresian dan karya/potensi seni tradisi. Terekamannya 10 Lagu Anak Daerah Jambi pada bulan Juni 2015 dengan sasaran praktisi musik dan pelaku seni muda, karya dan potensi seni tradisi. Terlaksananya Eksperimentasi dan Pengolahan Karya Seni pada triwulan 2 dan ke 3 2015. Hasil dari pengolahan/eksperimentasi seni merupakan bahan yang akan digelar untuk PPSS ataupun Temu Karya Taman Budaya se Indonesia. Terlaksananya Apresiasi Seni pada triwulan 2 dan 3 dengan sasaran lokal genius dengan kemasan kekinian dan kelompok/sanggar seni serta perorangan. Event yang diikuti adalah Tabur Ramadhan, Festival Danau Kerinci, Festival Biduk Aro Merangin, HUT Kemerdekaan RI dan Pergelaran untuk Kapsul Waktu Kemensesneg RI. Terlaksananya partisipasi pada Pameran dan Pergelaran Se-Sumatera pada tanggal 9-11 November 2015 di Bengkulu dengan menampilkan seni hasil pengolahan dan eksperimentasi seni. Terselenggaranya partisipasi pada Temu Karya se-Indonesia pada tanggal 8-12 September 2015 sebagai ajang kreativitas seni bagi

seniman dan pelaku seni. Terbitnya 3 edisi Buletin Informasi dengan sasaran instansi terkait, organisasi seni, seniman dan pakar seni, tenaga didik, guru dan masyarakat. Terselenggaranya pelatihan Gendang Redab diikuti 30 remaja/pelajar Jambi dengan tujuan mempertahankan dan melestarikan gendang Redap yang merupakan gendang tradisi Jambi dimana saat ini keberadaannya hampir punah dan tidak ada lagi yang bisa memainkan gendang redap tersebut. Terselenggaranya Konser Gendang Redab diikuti 60 remaja/pelajar Jambi pada tanggal 25 November 2015 pada Festival Batanghari dengan konsep dan bentuk kekinian.

Pada tahun 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 8 (delapan) budaya takbenda Jambi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2015 yaitu, Tari Anggut, Tari Piring Tujuh, Upacara Besale, Tari Besayak, Kompangan/Hadrah, Kuaw, Tupai Jenjang dan Tari Pisang.

(3) Peningkatan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi.

Telah dilaksanakan kegiatan penelusuran benda bersejarah di 2 kecamatan dalam Kabupaten Tebo pada tanggal 9 s.d. 10 Maret 2015 untuk melengkapi data koleksi dan mengumpulkan materi sejarah perjuangan rakyat Tebo pada masa perang kemerdekaan. Terselenggaranya Pameran Bersama Museum se-Indonesia di Ballroom Hotel Atria Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 26 s.d. 28 Mei 2015. Jumlah pengunjung sekitar 1.500 orang. Terlaksananya pameran pada Sarolangun Expo dari tanggal 10 s.d. 17 Oktober 2015. Jumlah pengunjung ke stand MPRJ adalah sekitar 930 orang. Terselenggaranya pameran dalam rangka MTQ ke-45 Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo dari tanggal 12 s.d.16 Oktober 2015. Jumlah pengunjung ke stand MPRJ sekitar 1.540 orang. Terlaksananya Pameran Temporer dengan tema “Sejarah Perjuangan Rakyat Jambi” pada tanggal 23 s.d.27 November 2015 dalam rangka mengenalkan koleksi-koleksi terbaru. Terselenggaranya Pekan Kejuangan Rakyat Jambi yang dikemas dalam bentuk lomba kreatifitas siswa (mewarnai, menyanyi lagu perjuangan, melukis perjuangan, musikalisasi puisi perjuangan, pidato perjuangan) pada tanggal 24 s.d 26 November 2015. Terlaksananya pameran pada Batanghari Festival 2015 dengan tema “Batanghari Tempo Dulu” pada tanggal 25 s.d 28 November 2015. Jumlah pengunjung sekitar 1.200 orang. Terwujudnya penulisan katalog koleksi sejarah pada bulan November 2015 dengan judul katalog Pemerintahan Jepang di Jambi. Terlaksananya koleksi

berupa benda bersejarah peninggalan panglima pasukan selempang merah. Jumlah pengadaan sebanyak 17 buah/set. Juga telah diselesaikan pembuatan replika koleksi pedang (kiewang) dan keris Majapahit masing-masing sebanyak 1 buah.

(4) Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah

Terdatanya nama asal usul tempat (toponim) di 3 kabupaten. Kegiatan dilaksanakan mulai Maret sampai dengan Juni 2015. Di Kabupaten Merangin, terdata asal usul nama Desa Guguk dan Desa Air Batu. Di Kabupaten Tebo, terdata toponim Desa Samabu, Desa Mangun Jayo dan Desa Tuo Ilir. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdata sejarah dan asal usul peradaban Merlung-Tungkal Ulu. Terlaksananya Workshop Pemandu Museum pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2015 dengannarasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Museum Nasional. Workshop diikuti 50 orang dari kabupaten/kota. Terlaksananya Focus Group Discussion I dan II Geopark Nasional Merangin Jambi Menuju GGN-UNESCO di Kabupaten Merangin dan Kota Jambi pada tanggal 27 dan 28 November 2015 masing-masing diikuti 40 peserta. Terdatanya dan terdaftarnya Benda Cagar Budaya di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. Pendataan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2015. Di Bungo, terdapat 11 rumah di Dusun Tanah Periuk yang diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun yang berdiri pada zaman Raja Sri Mangkubumi, makam keramat, mesjid, naskah tua, dan ikat pinggang berukuran 300 cm. di Tanjung Timur terdapat tungku masak, gerabah lokal, keramik asing, koin. Di Tebo masih banyak benda bersejarah yang belum terpelihara. Benda yang didaftarkan adalah tongkat kutbah dari Tebo Tengah.

Khusus untuk Geopark Merangin Jambi, berdasarkan hasil evaluasi tim pra-assessment UNESCO, Geopark Merangin Jambi masih perlu melakukan pembenahan dalam pengelolaan kelembagaan dan penyiapan atraksi budaya sebagai daya tarik wisata.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah adalah sulitnya memperoleh informasi yang akurat dari narasumber di daerah terkait dengan usia dan minimnya jumlah tokoh sejarah. Jumlah museum yang ada tidak berimbang dengan jumlah SDM seperti pemandu dan petugas perawatan benda koleksi yang memiliki keahlian khusus. SDM pendaftaran benda

cagar budaya membutuhkan peralatan GPS dan tambahan pengetahuan pengoperasian alat tersebut..

Adapun upaya terhadap, permasalahan tersebut antara lain yaitu; memberi peluang kepada investor untuk ikut melaksanakan pembangunan dibidang kebudayaan dan pariwisata, mengikutsertakan Kabupaten/Kota dalam berbagai event dalam dan luar negeri, mengkoordinasikan dan mendukung setiap program Kabupaten/Kota bidang Budpar serta melaksanakan program dengan mengikutsertakan dinas/instansi terkait dan stakeholders bidang kebudayaan dan pariwisata.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran program ini adalah: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah Jambi melalui kegiatan festival dan seni. Adanya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya Jambi yang memiliki keunikan dan kekhasan Melayu Jambi. Tersedianya kualitas dan kreatifitas karya seni budaya daerah sebagai produk unggulan Jambi di dibidang seni dan budaya melalui kegiatan Pawai Budaya Nusantara. Terciptanya event kebudayaan sebagai ikon ekonomi kreatif di bidang seni dan budaya. Terciptanya kreatifitas dan produktifitas karya seni yang berakar pada nilai-nilai tradisi daerah Jambi. Program ini didukung dana sebesar Rp. 3.015.075.000,- dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 2) Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(1) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Telah terlaksana seleksi dan pengiriman 4 peserta Gita Bahana Nusantara. Seleksi diadakan pada tanggal 13 s.d. 14 Mei 2015. Pemenang dikirim ke Jakarta pada bulan Agustus untuk bergabung dengan paduan suara GBN. Partisipasi pada Pawai Pembangunan memperingati HUT RI tanggal 18 Agustus 2015 dan pada Karnaval Khatulistiwa di Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2015 didukung pemusik dan 25 penari. Terinventarisirnya Seni Budaya Daerah mulai bulan Februari sampai dengan November 2015 di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Materi yang didata terdiri dari jenis kesenian, organisasi seni/sanggar dan tokoh seni.

Terfasilitasinya pendaftaran karya seni ke HAKI terdiri dari 10 lagu daerah dan 3 naskah drama. Terlaksananya Festival Film Jambi pada tanggal 26 dan 27 November 2015

(2) Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

Terlaksananya event Batanghari Festival 2015 dengan mengadakan festival tari I tanggal 25 s.d 28 yang diikuti 9 kabupaten/kota, lomba lagu daerah yang diikuti sekitar 30 orang tiap kabupaten/kota, lomba lagu populer yang diikuti 70 peserta, festival band diikuti 33 grup dan pemilihan Bujang Gadis Jambi diikuti 95 peserta. Terlaksananya tampilan Tim Kesenian dalam daerah sebanyak 61 kali dan luar daerah sebanyak 4 kali yaitu pada event Jambi Expo di Jakarta tanggal 30 Mei 2015, HUT Dekranasda tanggal 1 Agustus 2015, Karnaval Khatulistiwa di Pontianak tanggal 22 Agustus 2015 dan Senggigi Beach Festival di Lombok tanggal 2 Desember 2015.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi yaitu Perubahan jadwal event Batanghari Festival baik karena bencana asap maupun untuk kepentingan lainnya mempengaruhi jumlah partisipasi dari kabupaten/kota dan kurang maksimalnya tampilan-tampilan kesenian para peserta festival dan lomba serta tampilan tamu luar Provinsi Jambi. Penetapan tempat kegiatan Pawai Budaya Nusantara di luar Provinsi Jambi mengakibatkan ada beberapa poin yang tidak teranggarkan. Kabupaten/kota belum proaktif mensosialisasikan kegiatan fasilitasi pendaftaran karya seni ke HAKI yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sehingga minimnya karya seni yang didaftarkan. Minimnya informasi seni budaya dalam kegiatan inventarisasi seni budaya yang diperoleh karena tokoh seni di kabupaten/kota sebagian besar telah berusia lanjut dan banyak yang telah meninggal dunia. Sedikitnya SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki keahlian pengelolaan kebudayaan atau latar belakang pendidikan kebudayaan juga mempengaruhi kinerja. Masih rendahnya minat masyarakat khususnya pemuda terhadap kelestarian kebudayaan tradisi daerah Jambi, dan secara bersamaan budaya luar semakin tidak terbendung masuk dan bersaing dengan budaya lokal.

Adapun solusinya yaitu perlu mempertimbangkan waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu yang baik adalah bukan pada musim hujan. Selain itu lokasi event agar mempertimbangkan akses masuk dan tempat

parkir. Jadwal agar tidak berubah sehingga promosi bisa dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan kunjungan wisatawan dan jumlah partisipasi peserta. Program kegiatan event pariwisata yang mendapat bantuan dana APBN agar dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait untuk menghindari kesalahan penganggaran. Mengingat keterbatasan anggaran dan SDM pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kabupaten/kota agar juga melaksanakan inventarisasi dan seleksi karya seni yang layak didaftarkan ke HAKI sehingga karya seni yang didaftarkan lebih banyak. Perlu regenerasi tokoh seni dan tradisi di kabupaten/kota melalui workshop seni budaya untuk seniman-seniman muda. Penerimaan dan penempatan pegawai negeri sipil untuk pengelolaan kebudayaan agar memperhatikan kompetensi dan latar belakang pendidikan

4.1.15 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pembina kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam Provinsi Jambi, pada tahun 2015 Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 12 Program dan 40 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 22.156.614.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2015 penyerapan anggaran mencapai Rp.20.134.410.035,00 atau sebesar 90,87% . Gambaran pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan memberikan dan menyediakan kelengkapan administrasi dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Mendukung program ini, pada tahun anggaran 2015 disediakan dana sebesar Rp.2.863.647.500,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 telah terealisasi sebesar Rp.2.634.555.018,00 atau 92,00%. Untuk mencapai sasaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- 6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
- 7) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- 8) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- 9) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 10) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
- 11) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan program ini. Penyediaan kelengkapan administrasi perkantoran berjalan baik dan mampu mendukung kelancaran dan kebutuhan institusi sehari-hari.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi secara optimal. Mendukung pelaksanaan program ini, pada tahun anggaran 2015 disediakan dana sebesar Rp.2.391.029.600,00 dan sampai akhir tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.2.306.855.379,00 atau mencapai 96,48 %.

Penyediaan sarana dan prasarana bagi institusi merupakan prasarat lancarnya pelaksanaan tugas mencapai tujuan organisasi, sehingga mobilitas dari setiap bidang dapat berjalan optimal. Untuk mencapai sasaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- 2) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
- 3) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 4) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan disiplin PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, melalui ketersediaan pakaian dinas kerja. Untuk mencapai sasaran program peningkatan disiplin aparatur didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Sasaran program ini adalah terwujudnya PNS yang taat dan patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.56.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.56.146.200,00 atau mencapai 99,55 %.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis sumberdaya manusia (SDM) aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional dan terampil sesuai tuntutan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan tersebut disediakan dana sebesar Rp.23.500.000,00 dan sampai akhir tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.23.455.000,00 atau mencapai 99,81 %.

e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran program dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan laporan dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.23.650.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.23.650.000,00,00 atau mencapai 100,00%.

f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemuda dalam berorganisasi, serta membangun jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda sehingga para pemuda dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Untuk mendukung program ini pada tahun 2015 dianggarkan dana sebesar Rp.3.001.988.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 realisasi penyerapan anggaran pada program ini mencapai Rp.2.545.032.650,00 atau sebesar 84,78% dari anggaran yang disediakan.

Dari alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Seleksi dan Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Nasional. Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada tanggal 17 Agustus 2015 lingkup Provinsi Jambi dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 4 s.d 7 Mei 2015, bertempat di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang siswa-siswi SMA/SMK/MAN hasil seleksi dari kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dari seleksi tersebut terpilih sebanyak 56 peserta terdiri dari 2 orang peserta untuk tingkat Nasional (1 putra dan 1 putri) dan 54 peserta untuk tingkat Provinsi (26 putra dan 28 putri). Peserta Paskibraka Nasional dilatih dan dibina dari tanggal 28 Juli s.d 31 Agustus 2015, bertempat di Gedung PP-PON Jalan Raya Jambor Cibubur Jakarta Timur. Peserta Paskibraka

Provinsi Jambi dilatih dan dibina dari tanggal 29 Juli s.d 18 Agustus 2015, bertempat di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jambi dan Lapangan Kantor Gubernur Jambi. Mendukung kegiatan tersebut , disediakan dana sebesar Rp.1.590.243.000,00.

2) Kegiatan Bulan Bakti Pemuda. Mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.1.411.745.000,00 untuk penyelenggaraan5 (lima) kegiatan, yaitu :

a) Kegiatan Pemuda Pelopor. Kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat Provinsi Jambi tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 14 Agustus 2015. Peserta seleksi sebanyak 5 orang yang berasal dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Dari hasil penilaian tim seleksi, Provinsi Jambi hanya mengirimkan 1 orang perwakilan/peserta seleksi tingkat Nasional, yaitu atas nama Asrofin dari Kabupaten Bungo. Penetapan Asrofin sebagai perwakilan Provinsi Jambi karena peran Asrofin (kepeloporannya) yang mampu menggerakkan para pemuda dan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan dipandang telah memberikan pengaruh positif sesuai dengan kriteria pemilihan pemuda pelopor.

b) Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 21 Mei 2015, bertempat di Kabupaten Kerinci. Pelaksanaan napak tilas jejak pahlawan dimulai dengan titik awal /start perjalanan berawal dari Desa Siulak Gadang – Siulak Deras – Bedeng VIII – dan berakhir di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kayu Aro.

c) Kegiatan Pengembangan Kreativitas Pemuda (Kontes Asah Batu Akik) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015. Kegiatan ini diikuti pemuda – pemuda berumur 16 s.d 40 tahun yang mempunyai kemampuan mengasah batu akik (berusaha pengolahan batu akik). Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 40 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2015 bertempat di Citra Land Mayang. Selain kontes batu akik, diadakan pula pameran batu akik yang diikuti oleh berbagai usaha dan toko batu akik di Provinsi Jambi. Adapun pemenang dalam kegiatan ini sebagai berikut :

Pemenang I : Ade Indra (Alejandro Gems)

Pemenang II : Dody Fauzan (Kak Zoel Gems)

Pemenang III : Ade Kurniawan (Ade Micin)

Pemenang Harapan I : Sayuti

d) Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dispora Provinsi Jambi bekerjasama dengan Biro Kesramas Provinsi Jambi mengadakan upacara Peringatan

Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 bertempat di GOR Kota Baru Jambi. Pelaksanaan upacara ini melibatkan beberapa SKPD/Unit Kerja, seperti Biro Humas dan Protokoler sebagai pembawa acara, Satpol PP sebagai tim korsik, Dinas Pendidikan sebagai tim paduan suara, dan perwakilan berbagai OKP di Provinsi Jambi untuk menghadiri sekaligus menjadi petugas upacara. Yang bertindak sebagai Inspektur upacara yaitu Pejabat Gubernur Jambi Dr. H.Irman, M.Si,

- e) Lomba Gerak Jalan antar Pelajar SMA/Sederajat Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 November 2015 yang bekerjasama dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK). Acara pembukaan bertempat di Asrama Haji Provinsi Jambi dan acara Penutupan bertempat di GOR Kota Baru Jambi. Peserta lomba berasal dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yaitu :

Kota Jambi	: Putra 33 orang, Putri 33 orang
Kabupaten Batanghari	: Putra 33 orang, Putri 33 orang
Kabupaten Tanjabtim	: Putra 33 orang, Putri 33 orang
Kabupaten Tanjabbar	: Putra 33 orang, Putri 33 orang
Kabupaten Tebo	: Putra 33 orang
Kabupaten Merangin	: Putra 33 orang, Putri 33 orang
Kabupaten Sarolangun	: Putra 33 orang, Putri 33 orang
Kabupaten Kerinci	: Putra 33 orang

Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh tidak mengirimkan peserta. Jumlah peserta seluruhnya yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 462 orang.

Adapun hasil perlombaan, sebagai berikut :

Pemenang I Putra	: Kota Jambi
Pemenang II Putra	: Kab. Tanjabtim
Pemenang III Putra	: Kab. Sarolangun
Pemenang Hrp I Putra	: Kab. Kerinci
Pemenang Hrp II Putra	: Kab. Batanghari
Pemenang I Putri	: Kota Jambi
Pemenang II Putri	: Kab. Tanjabbar
Pemenang III Putri	: Kab. Sarolangun

Pemenang Hrp I Putri : Kab. Tanjabtim

Pemenang Hrp II Putri : Kab. Merangin

g. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan memberikan keterampilan teknis dan manajerial kepada para pemuda agar mereka dapat meningkatkan produktifitas kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha bagi usahawan baru, mengembangkan aktifitas ekonomi, mengurangi ketergantungan pada orang lain serta mampu bersaing dalam dunia pasar kerja. Untuk mendukung program ini, pada tahun 2015 disediakan dana sebesar Rp.5.192.278.700,00 yang dipergunakan untuk membiayai 5 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran dari program ini mencapai Rp.4.892.383.730,00 atau sebesar 94,50%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 18 April 2015 bertempat di Taman Budaya Jambi (GOS) Sungai Kambang Kota Jambi. Jumlah pemuda peserta pelatihan yang dibina adalah sebanyak 40 orang yang berasal dari dalam Kota Jambi, yang telah melalui proses seleksi. Peserta pelatihan diberi pengetahuan dasar tentang dunia usaha. Setelah peserta mengikuti kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, mereka akan mengikuti kegiatan magang sesuai dengan keterampilan yang diminati antara lain : Keterampilan Resam, Keterampilan Menjahit, Keterampilan Florist, Keterampilan Salon dan Keterampilan Tata Boga. Kegiatan magang dilaksanakan dari tanggal 05 Mei s.d 06 Juli 2015. Diharapkan kepada peserta pelatihan kewirausahaan ini, dapat menumbuhkembangkan usaha dengan memanfaatkan potensi dan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi dan peluang usaha yang ada di Provinsi Jambi, sehingga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat Provinsi Jambi. Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.152.310.000,00.
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Provinsi Jambi. Program ini bertujuan memberdayakan para sarjana untuk terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa melalui fasilitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di desa. Selain melakukan pendampingan pelaksanaan pembangunan desa, tenaga SP-3 juga melakukan pendampingan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Program

Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE). Tenaga SP-3 sebanyak 138 orang yang ditempatkan di setiap Kecamatan dalam 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Sarjana tersebut akan bertugas mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2015.

Dalam rangka memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas SP-3 melakukan pendampingan, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk POKJA SP-3 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang beranggotakan dari berbagai unsur SKPD yang terkait baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Evaluasi SP-3 Pendamping Program SAMISAKE Provinsi Jambi dilaksanakan dalam setiap semester, semester I dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Mei 2015 di Hotel Ratu Residence Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 138 orang. Kegiatan evaluasi pada semester II dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2015 bertempat di Hotel Ratu Residence Kota Jambi dengan peserta sebanyak 138 orang. adapun hasil dari evaluasi tersebut peserta merekomendasikan agar kegiatan ini diharapkan berlanjut atau diteruskan pada masa-masa yang akan datang karena dampak dan manfaatnya sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Mendukung kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.4.388.132.800,00.

- 3) Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan JENESYS (*Japan East Network Of Exchange For Student and Youth*).

Pada tahun 2015, kegiatan seleksi peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan kegiatan Jenesys ditiadakan. Ditiadakannya kedua kegiatan tersebut merupakan kebijakan nasional dengan alasan keterbatasan pembiayaan untuk kedua program tersebut.

Kegiatan Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Indonesia-Malaysia (PPIM), Indonesia-Australia (PPIA), Indonesia-Tiongkok (PPIT), Indonesia-Korea Selatan (PPIKor) dan Indonesia-Jepang (SSEAYP); dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 27 s.d 28 Mei 2015 bertempat di Gedung Olah Seni (GOS) Sungai Kambang Kota Jambi. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi PPAN sebanyak 78 orang yang berasal dari utusan Kabupaten/Kota dan Universitas dalam Provinsi Jambi. Dari seleksi yang dilakukan, terpilih sebanyak 5 orang peserta yang terdiri dari 3 orang putra dan 2 orang putri, mewakili Provinsi Jambi ke

Negara Tujuanyaitu Malaysia (1 orang putra), Australia (1 orang putri), Tiongkok (1 orang putri), Korea Selatan (1 orang putri), dan Jepang (1 orang putra). Calon peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti tes kesehatan dan diberikan pembekalan.

Seleksi KPN (Kapal Pemuda Nusantara) Sail Tomoni dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 s.d 26 Mei 2015 di Gedung Olah Seni (GOS) Sungai Kambang Kota Jambi dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 13 orang, namun yang hadir mengikuti seleksi sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 orang putra dan 4 orang putrid. Dari seleksi yang dilaksanakan telah terjaring/dinyatakan lulus seleksi sebanyak 5 orang, terdiri 2 putra dan 3 putri. Adapun rute kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) tahun 2015 yaitu : Jakarta – Kota Baru – Siau – Sulawesi Utara – Pulau Tahuna – Merampit – Ternate – Parigi – Pulau Muna – Jakarta. Mendukung kegiatan PPAN dan KPN Sail Tomoni ini, disediakan dana sebesar Rp.265.541.900,00.

- 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (KWP). Mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.175.000.000,00. Realisasi kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu :

- a) Tahap Persiapan. Agar pelaksanaan program dana pengembangan usaha bagi KWP berjalan dengan lancar dan tepat sasaran maka dilakukan persiapan antara lain : (a) Melakukan sosialisasi tentang program dana bantuan pengembangan usaha melalui media massa dan surat edaran ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi; (b) Membuat jadwal pelaksanaan program mulai dari sosialisasi sampai dengan penetapan dan penandatanganan akad kerjasama terhadap penerima bantuan pengembangan usaha.
- b) Tahap Penerimaan Proposal. Berdasarkan proposal yang disampaikan dari Kelompok Pemuda lainnya ke Dinas Pemuda dan Olahraga melalui dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang telah lulus seleksi di Kabupaten/Kota, telah diterima proposal sebanyak 27, yang telah lulus seleksi di Kabupaten/Kota.
- c) Tahap Seleksi Penilaian Proposal. Dari hasil penilaian, adapun KWP yang dinyatakan lulus dan berhak ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana pengembangan usaha, sebanyak 9 KWP, sebagai berikut :

- Kota Jambi : 1 KWP
- Kab. Sarolangun : 1 KWP

- Kota Sungai Penuh : 3 KWP
- Kab. Tanjab Timur : 1 KWP
- Kab. Muaro Jambi : 2 KWP
- Kab. Kerinci : 1 KWP

d) Tahap Penetapan dan Akad Kerjasama. Bagi calon penerima bantuan dana pengembangan usaha bagi KWP yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Dispora Provinsi Jambi dengan masing-masing KWP.

e) Tahap Penerimaan dana bantuan pengembangan usaha. Bagi KWP yang telah ditetapkan dan telah menandatangani akad kerjasama diberikan bantuan dana langsung kepada masing-masing KWP sebesar Rp.10.000.000,00

5) Kegiatan Pengembangan Wirausaha dan Pembangunan Karakter Pemuda. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda dengan jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang wirausahawan muda yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2015 dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 28 November 2015, bertempat di Hotel Ratu Residence Kota Jambi. Mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.211.294.000,00.

h. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

Melalui program ini diharapkan terbangun sinergi pengelolaan olahraga antar pelaku baik pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota sehingga prestasi olahraga semakin meningkat. Implementasi program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan manajemen pengelola olahraga. Tujuan dari kegiatan ini yaitu adanya kesamaan pandangan terhadap fungsi organisasi keolahragaan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan terbangunnya koordinasi dan sinergisitas manajemen dan pembinaan diharapkan mampu meningkatkan prestasi atlet baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 April 2015 di Ratu Residence Hotel Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Kegiatan ini diikuti pelaku olahraga khususnya guru olah raga yang aktif pada cabang olahraga dari kab/kota di Provinsi Jambi. Kegiatan ini didanai dengan anggaran sebesar Rp.211.715.000,00 dan telah teralisasi sebesar Rp.203.798.400,00 atau mencapai 96,26%.

i. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan manusia secara individu maupun kelompok masyarakat. Mengoptimalkan program ini, disosialisasikan semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pada tahun anggaran 2015, disediakan dana untuk program ini sebesar Rp.4.049.799.500,00 dan telah teralisasi sebesar Rp.3.429.695.250,00 atau mencapai 84,69%.

Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Daerah.

Sebagai wadah untuk menghimpun atlit dengan minat olahraga yang tinggi dan mempunyai bakat untuk dikembangkan, sehingga calon atlit yang masuk dan diterima sebagai atlit pelajar di PPLP betul-betul dihasilkan dari kompetisi yang ketat. Tujuan dari PPLP adalah membina atlit berbakat disetiap daerah sesuai dengan olahraga prioritas (unggulan) guna menyokong prestasi olahraga nasional. Semua atlit PPLP berasal dari siswa-siswi (SMP/SMA/Sederajat) yang berbakat dan memiliki minat terhadap prestasi berolahraga. Selain itu juga sebagai alternatif untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahragawan pelajar potensial, berbakat dengan minat yang tinggi dibidang olahraga. Dengan potensi yang dimiliki dan prospektif untuk dikembangkan guna mencapai prestasi optimal, baik sebagai olahragawan regional mewakili daerah maupun menjadi salah satu tumpuan andalan olahraga nasional untuk mewakili bangsa dan negara dalam even olahraga internasional. Di Provinsi Jambi kegiatan PPLP diselenggarakan di 2 tempat yaitu di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

Pada tahun 2015, kegiatan PPLP/asrama PPLP menampung atlit pelajar sebanyak 45 orang dengan 6 cabang olahraga

Angkat Besi	: 9 Orang terdiri dari 3 Putra 6 Putri
Tinju	: 6 Orang terdiri dari 4 Putra 2 Putri
Judo	: 7 Orang terdiri dari 5 Putra 2 Putri
Karate	: 6 Orang terdiri dari 2 Putra 4 Putri
Pencak Silat	: 6 Orang terdiri dari 3 Putra 3 Putri
Senam Ritmik	: 3 Orang terdiri dari 3 Putri
Senam Artistik	: 8 Orang terdiri dari 4 Putra 4 Putri

Daftar prestasi atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Daerah mengikuti beberapa kejurnas antar PPLP tahun 2015 (*terlampir*). Kegiatan ini didanai dengan anggaran sebesar Rp.3.452.358.000,00.

- 2) Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional (POPCANAS) / Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) VII.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 9 s.d 15 Juni 2015. Kontingen Provinsi Jambi berjumlah 40 orang, terdiri dari 25 orang atlet, 10 orang pelatih dan 5 orang official. Provinsi Jambi mengikuti 5 (lima) cabang olahraga yaitu : atletik, renang, tenis meja, badminton dan catur. Provinsi Jambi menduduki urutan ke-8 dari 34 Provinsi dengan memperoleh 4 medali emas, 4 perak dan 7 perunggu. Mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.344.000.500,00.

- 3) Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga Pelajar.

Kegiatan ini berupa pembentukan dan pembinaan klub pelajar dibawah binaan Dispora Provinsi Jambi. Cabang olahraga binaan meliputi klub Bulutangkis Dispora Provinsi Jambi dengan pelatih Amirullah dan Ryan Permadi serta enam orang atlet yaitu Radhian AF, Dimas Pranata, Kurniadi Fadri, M.Syarif Hidayatullah, Yogi Ardiansyah dan Nurani Ratu Azzahra. Adapun pertandingan yang diikuti oleh Klub Bulutangkis Dispora Provinsi Jambi yaitu di Kejuaraan Sirkuit Nasional Jateng Open Tahun 2015 pada tanggal 24 s.d 29 Oktober 2015, dan di Kejuaraan Li-Ning Banda Baru Open Badminton Championship di Batam Provinsi Kepulauan Riau 2015 pada tanggal 30 November s.d 04 Desember 2015. Adapun prestasi prestasi yang dicapainya yaitu atas nama Radhian AF, Juara I (Ganda Taruna Putra) dan 8 Besar (Tunggal Taruna Putra). Kegiatan ini didanai dengan anggaran sebesar Rp.253.441.000,00.

- j. Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat Dan Berprestasi Dengan Lembaga/Instansi Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku olahraga dan menumbuhkembangkan budaya olahraga serta meningkatkan prestasi. Pada tahun anggaran 2015, disediakan dana untuk program ini sebesar Rp.2.556.638.700,00 dan telah teralisasi sebesar Rp.2.352.563.158,00 atau mencapai 92,02%. Untuk mencapai sasaran program kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lain didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA).

Kegiatan POSPEDA tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015, merupakan ajang pembinaan para santri yang tergabung dalam Pondok Pesantren. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jambi pada tanggal 28 s.d 31 Oktober 2015, peserta berasal dari 9 Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan, diantaranya :

Tabel 4.154
Cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan

No	Cabang Olahraga	Putra	Putri	Jumlah Nomor
1.	Atlitik	100 M	100 M	12
		200 M	200 M	
		400 M	400 M	
		800 M	800 M	
		Tolak Peluru	Tolak Peluru	
		Lompat Jauh	Lompat Jauh	
2.	Bulutangkis	Tunggal	Tunggal	4
		Ganda	Ganda	
3.	Tenis Meja	Tunggal	Tunggal	4
		Ganda	Ganda	
4.	Senam Santri 2010 (Versi Lomba)	Beregu	Beregu	2
5.	Sepak Takraw	Beregu	-	1
6.	Hadang	Beregu	Beregu	2
7.	Pencak Silat	Kelas A 39 s.d 42 Kg	Kelas A 39 s.d 42 Kg	13
		Kelas B 43 s.d 45 Kg	Kelas B 43 s.d 45 Kg	
		Kelas C 46 s.d 48 Kg	Kelas C 46 s.d 48 Kg	
		Kelas D 49 s.d 51 Kg	Kelas D 49 s.d 51 Kg	
		Kelas E 52 s.d 54 Kg	Kelas E 52 s.d 54 Kg	
		Kelas F 55 s.d 57 Kg	Tunggal Putri	
		Tunggal Putra		

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Tabel 4.155
Perolehan Mendali pada Kegiatan POSPEDA Tahun 2015

No	Kab/Kota	Total Mendali			Peringkat
		Emas	Perak	Perunggu	
1.	Kota Jambi	1	10	17	VI
2.	Muaro Jambi	18	10	6	I
3.	TanJabTim	9	5	5	II
4.	Tebo	2	0	1	V
5.	Bungo	3	7	3	IV
6.	Merangin	1	1	0	VII
7.	Sarolangun	4	1	8	III
8.	Kerinci	0	3	5	VIII
9.	Kota Sei. Penuh	0	1	3	IX

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.370.876.000,00.

2) Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memasyarakatkan kembali olahraga tradisional dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya/tradisi olahraga daerah. Kegiatan invitasi olahraga tradisional tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 diikuti oleh 120 orang yang berasal dari 8 Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 12 Mei 2015 di Kabupaten Sarolangun. Kegiatan ini melombakan olahraga tradisional Dagongan dan Terompah Panjang.

Adapun hasil perlombaan sebagai berikut :

(a) Cabang Olahraga Tradisional Dagongan:

Juara I Kab. Tanjung Jabung Timur

Juara II Kab. Tebo

Juara III Kab. Merangin

(b) Cabang Olahraga Tradisional Terompah Panjang :

Juara I Kab. Tanjung Jabung Timur

Juara II Kab. Batang Hari

Juara III Kota Sungai Penuh

Selain kegiatan diatas terdapat kegiatan pendamping dalam kegiatan invitasi olahraga tradisional yaitu:

- (a) Kegiatan perlombaan lari 10 K (HAORNAS) XXXII Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 November 2015 bertempat di Kota Sungai Penuh dengan jumlah peserta sebanyak 160 orang yang berasal dari 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi. Peserta yang mengikuti kegiatan ini pada umumnya adalah pelajar, TNI, POLRI, dan Masyarakat Umum. Adapun hasil perlombaan sebagai berikut :

(1) Putra :

- Juara I, atas nama Nila Pasha asal Kota Jambi
- Juara II, atas nama Samsudin asal Kota Jambi
- Juara III, atas nama Jengsen asal Kab. Tebo

(2) Putri :

- Juara I, atas nama Dwi Tiansi asal Kab. Tebo
- Juara II, atas nama Mega Pratiwi asal Kota Jambi
- Juara III, atas nama Rensi Giona A. asal Kota Jambi

- (b) Kegiatan Penataran Instruktur Senam Bugar Lansia Indonesia (SBLI) Provinsi Jambi tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Mei 2015

di GOS Sungai Kambang dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari :

- (1) Tim PKK Kab/Kota masing-masing 1 orang : 9 orang
- (2) Disporada Kab/Kota masing-masing 1 orang : 10 orang
- (3) TP PKK Provinsi Jambi : 4 orang
- (4) Dispora Provinsi Jambi : 7 orang

Jumlah : 30 orang

(c) Kegiatan Festival Lomba Senam Tingkat Provinsi Jambi (Dewasa) dan Tingkat SD Se-Kota Jambi, (Senam Kebugaran Jasmani / SKJ 2012) dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Mei 2015 di GOR Kota Baru Jambi dengan jumlah peserta untuk tingkat dewasa sebanyak 8 regu atau sekitar 72 orang dan tingkat SD sebanyak 21 regu atau sebanyak 168 orang. Adapun hasil perlombaan sebagai berikut :

- (1) Kategori SKJ 2012 Tingkat SD :
- Juara I SDN 031/IV Kota Jambi
 - Juara II SD Pertiwi (A) Kota Jambi
 - Juara III SDN 178/IV Kota Jambi
- (2) Kategori SKJ 2012 Tingkat Dewasa :
- Juara I Kabupaten Batang Hari
 - Juara II Kabupaten Kerinci
 - Juara III Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(d) Kegiatan Lomba Perahu Tradisional dan Perahu Naga. Lomba perahutradisional dan perahu naga dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2015 di Sungai Batanghari Kota Jambi dengan peserta pendayung dari Kab/Kota se-Provinsi Jambi.

Tabel 4.156
Hasil Lomba Perahu Tradisional Type A

No	Jenis Perahu Tradisional	Juara	Nama Perahu	Daerah Asal/Sponsor
1	Type A	I	Primadona	Dispora Prov. Jambi
2	Type A	II	Desa Niaso	Pemdes Niaso
3	Type A	III	PPM Jajaran	Masyarakat Danau Sipin

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Tabel 4.157
Hasil Lomba Perahu Tradisional Type B

No	Jenis Perahu Tradisional	Juara	Nama Perahu	Daerah Asal/Sponsor
1	Type B	I	Kab. Muaro Jambi	Kab. Muaro Jambi
2	Type B	II	M. Ridwan Ansori	Satria
3	Type B	III	PT. Sarasan Group	PT. Sarasan Group

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Tabel 4.158
Hasil lomba Perahu Naga

No	Jenis Perahu Tradisional	Juara	Asal Daerah
1	Perahu Naga	I	Kabupaten Batanghari
2	Perahu Naga	II	Kabupaten Merangin
3	Perahu Naga	III	Kabupaten Sarolangun

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Mendukung kegiatan Invitasi olahraga tradisional ini disediakan anggaran sebesar Rp.587.948.000,00.

3) Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII.

Kegiatan POPNAS XIII tahun 2015 dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 08 s.d 19 September 2015 merupakan kegiatan multi event pelajar dua tahunan. Kegiatan ini menjadi barometer hasil pembinaan prestasi pelajar di daerah dan sebagai salah satu media untuk melakukan evaluasi pembinaan olahraga pelajar secara nasional. Kegiatan ini merupakan suatu awal bagaimana menjaring bibit atlit dari usia sekolah untuk dibina melalui sistem yang tertata dengan baik. Pembibitan melalui POPNAS merupakan suatu bentuk untuk menggelorakan terus semangat berolahraga dan olahraga berprestasi, khususnya di kalangan pelajar agar mereka nantinya menjadi bibit unggul di cabang olahraga yang mereka geluti. Melalui POPNAS inilah diharapkan menjadi ajang untuk mengikuti kejuaraan pelajar tingkat ASEAN dan ASIA. Selain itu POPNAS juga bisa menjadi tolak ukur pembinaan atlit tingkat daerah serta mampu membuktikan bagaimana organisasi keolahragan berperan di suatu daerah.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII/2015 ini adalah :

- (a) Mengukur pencapaian pembinaan prestasi olahraga atlet pelajar nasional;
- (b) Ajang seleksi pembentukan tim nasional pelajar yang akan dipersiapkan pada multi event olahraga pelajar di tingkat regional dan internasional;
- (c) Mencetak dan melahirkan calon-calon atlet terbaik di kalangan pelajar yang dimasa depan dan menjadi atlet andalan Indonesia;
- (d) Momentum peningkatan gairah dan motivasi pelajar untuk berlatih dan berprestasi di ajang olahraga
- (e) Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

POPNAS XIII memperlombakan dan mempertandingkan 20 cabang olahraga. Kontingen Pelajar Provinsi Jambi mengikuti 16 cabang olahraga yang berjumlah 135 orang, Pelatih 35 orang, Official 10 orang dengan total keseluruhan 180 orang. Adapun hasil – hasil pertandingan sebagai berikut :

- (1) Dari 16 cabang olahraga yang diikuti, 8 cabang berhasil meraih medali, yaitu :
 - Angkat besi Putra – Putri (3 perak)
 - 2. Gulat Putra - Putri (2 emas, 1 perak, 4 perunggu)
 - 3. Panahan Putra – Putri (1 perak)
 - 4. Senam Putra – Putri (2 emas, 2 perak, 3 perunggu)
 - 5. Atletik Putra - Putri (1 perunggu)
 - 6. Pencak Silat Putra - Putri (1 emas)
 - 7. Dayung Putra - Putri (1 perak, 1 perunggu)
 - 8. Taekwondo Putra - Putri (1 perak)
- (2) Cabang olahraga yang tidak dapat medali adalah Judo, Karate, Bola Basket, Renang, Sepak Takraw, Tinju, Voli Indoor dan Voli Pasir
- (3) Pada POPNAS XIII Tahun 2015 Kontingen Provinsi Jambi mendapat peringkat ke-14 dengan perolehan medali sebanyak 5 Emas, 9 Perak dan 9 Perunggu.

Mendukung kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII ini disediakan anggaran sebesar Rp.1.597.814.700,00.

k. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Mendukung program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.164.781.000,00 yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan prasarana dan sarana pembinaan atlet Provinsi Jambi. Sampai dengan akhir tahun anggaran, program ini telah terealisasi sebesar Rp.1.141.597.000,00 atau sebesar 98,01%. Untuk

mencapai sasaran program peningkatan sarana dan prasarana didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga yaitu :

- (a) Pengadaan lampu sorot untuk kolam renang;
- (b) Pengadaan peralatan Cabor PERBAKIN;
- (c) Pengadaan peralatan Cabor PERSANI;

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.679.980.000,00.

2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yaitu :

- (a) Perencanaan Pembangunan Rumah pengelola PPLP di Stadion Mini;
- (b) Perencanaan Pembangunan Mushollah di Stadion Mini;
- (c) Perencanaan Pembangunan Gudang Kaporit Kolam Renang;

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.89.503.000,00.

3) Kegiatan Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga yaitu :

- (a) Rehab Fasilitas kolam renang Telago Ratu;
- (b) Rehab pintu gerbang GOR Kota Baru;
- (c) Perencanaan rehab fasilitas kolam bermain dan pengecatan;
- (d) Perencanaan rehab wc dan pengecatan PPLP di area kolam renang;
- (e) Perencanaan rehab pagar gedung PERSANI;
- (f) Perencanaan rehab pagar pintu gerbang dan drainase stadion mini;
- (g) Perencanaan rehab pendopo lapangan tembak;
- (h) Perencanaan rehab lapangan tembak 50 meter;
- (i) Perencanaan rehab lapangan tembak reaksi;
- (j) Perencanaan rehab lapangan tembak 25 meter;
- (k) Perencanaan rehab lapangan tembak 10 meter untuk latihan;
- (l) Perencanaan rehab fasilitas kolam bermain;

Mendukung kegiatan ini disediakan dana dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp.395.298.000,00.

I. Program Kebijakan Dan Pengembangan Kepemudaan Dan Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk mensinergikan program provinsi dengan program kabupaten/kota bidang pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, sehingga program pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan dapat selaras dan berkesinambungan. Melalui sinergi pola pembinaan akan lebih mengefektifkan dan menghindari terjadinya duplikasi dan tumpang tindih

program/kegiatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Pelaksanaan program di setiap kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah masing-masing, yang menyentuh kebutuhan dunia kepemudaan dan keolahragaan daerah Jambi. Mendukung terlaksananya program ini, pada tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp.621.186.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 realisasi dana mencapai Rp.524.678.250,00 atau sebesar 84,86% dari pagu anggaran yang disediakan.

Untuk mencapai sasaran, program kebijakan dan keolahragaan didukung oleh 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) Program Kepemudaan dan Keolahragaan yang diikuti semua instansi yang membina kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.
- 2) Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Kepemudaan dan Keolahragaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan Dispora Provinsi Jambi maupun kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota di 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi.
- 3) Kegiatan Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan. Implementasi kegiatan dilakukan dalam bentuk menghimpun data dibidang pemuda, olahraga dan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga baik fisik maupun non fisik.
- 4) Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2015.
- 5) Kegiatan Rapat Evaluasi. Bentuk kegiatan ini berupa rapat untuk mengevaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 yang diikuti oleh seluruh kepala bidang dan sekretaris di lingkungan Dispora Provinsi Jambi.

4.1.16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4.1.16.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban memuat berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015, untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015. Kendala dan tantangan yang

ditemui dalam perjalanan pelaksanaan program/kegiatan, dapat teratasi Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang yang membidangi Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dengan mengacu pada program-program berkelanjutan melalui Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 dengan rincian program dan kegiatan urusan wajib yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan.

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- a) Penyediaan jasa surat-menyurat.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c) Penyediaan penyediaan jasa administrasi keuangan.
- d) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor.
- e) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
- f) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- h) Kegiatan penyediaan makan dan minum rapat
- i) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- a) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / Operasional
- b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- e) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional
- g) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3) Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal.

5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan serta Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- a) Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b) Kegiatan Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- d) Kegiatan Pelatihan Korsik
- e) Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan
- f) Kegiatan Up-grading Polisi Pamong Praja

7) Pemeliharaan Kamtrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- a) Kegiatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- b) Kegiatan Kerjasama dalam pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
- c) Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah
- d) Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah
- e) Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa
- f) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan kebijakan daerah lainnya
- g) Kegiatan Pelatihan Bela Diri
- h) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

8) Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Perlindungan dan Penegakan HAM

9) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- a) Kegiatan Pembentukan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
- b) Kegiatan Sosialisasi Terhadap Satuan Linmas dalam memelihara dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

10)Kelembagaan dan Koordinasi

- a) Kegiatan Rakor satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan strategik Renstra Tahun 2010-2015 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya Melalui Program :

1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang diukur melalui:

- a) Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan berhasil mencapai target 129 orang PTT dengan total anggaran tahun 2015 Rp. 2.447.158.000,- (Dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) direalisasikan sebesar Rp. 2.378.912.600,- dan realisasi fisik 97.21%.
- b) Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan diimplementasikan dengan pelatihan bela diri praktis dengan Kepolisian, Management Training, Psikologi Massa dan Pengendalian Massa. Total anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 111.002.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 107.148.800,- atau 96.53%.
- c) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan menyangkut laporan tingkat keberhasilan dan manfaat program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dan Satpol PP Kab/Kota. Laporan tersebut memuat tentang sinkronisasi kegiatan Kabupaten Kota, data-data personil Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota, Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti serta Sarana dan Prasarana yang dimiliki masing-masing instansi. Total anggaran untuk kegiatan ini adalah 148.046.500,- direalisasikan sebesar Rp 138.674.700,- atau 93.67% .

- d) Pelaksanaan latihan korps musik sebanyak 6 (enam) kali latihan kepada 40 orang peserta korps musik Satpol PP untuk menunjang kegiatan upacara hari-hari besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Total anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp 193.020.000,-. Pelatihan korsi dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali latihan kepada 40 orang peserta dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 192.703.000,- atau 99.84% dan tidak tercapai 100%.
 - e) Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan Satpol PP yang Berkerja sama dengan Kepolisian untuk peningkatan kreatifitas , Mental dan Fisik agar disiplin dalam melaksanakan Tugas Operasional total Anggaran untuk Kegiatan ini Rp 150.240.000,- terealisasi kegiatan sebesar Rp 106.967.300,- atau 71.20%.
 - f) Kegiatan Upgrading Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan guna meningkatkan SDM Aparat satpol PP yang berkerja sama dengan TNI dan diikuti Oleh Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jambi yang mendapat Anggaran dari APBD sebesar Rp 345.208.000,- terealisasi Rp 256.394.000,- atau 74.27%.
- 2) Pemeliharaan Kantitrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a) Kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan dalam operasi gabungan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan ini Satpol PP Provinsi Jambi mendapat anggaran dari APBD sebesar Rp.82.041.000,- terealisasi sebesar Rp.78.486.500,- atau 95.67%.
 - b) Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan yang diikuti oleh aparat Satpol PP agar menjadi aparat yang profesional dalam pemeliharaan keamanan dan pencegahan tindak kriminal yang mendapat anggaran sebesar Rp.270.210.400,- terealisasi sebesar Rp.216.479.100,- atau 80.12%.
 - c) Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa agar terciptanya lingkungan yang kondusif maka diadakan peningkatan kapasitas aparat Satpol PP. anggaran yang tersedia sebesar Rp.105.370.000,- realisasi Rp 101.630.400,- atau 96.45%
 - d) Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah Mendapat Anggaran Sebesar Rp 302.308.000,- terealisasi Rp. 288.498.150,- atau 95.43%.
 - e) Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa agar Pengamanan dapat Berjalan Kondusif Mendapat Anggaran Dari APBD sebesar Rp 116.354.000 teralisasi Rp. 100.889.500,- atau 86.71%.

- f) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan daerah lainnya adalah untuk pengawasan dan penertiban dari kebijakan yang telah disahkan mendapat anggaran sebesar Rp. 102.892.000,- Terealisasi Rp. 102.452.000,- atau 99.57%.
 - g) Kegiatan Pelatihan Bela Diri yang diikuti oleh seluruh aparat satuan polisi pamong praja adalah untuk peningkatan ketangkasan anggota dalam menjalankan tugas mendapat anggaran sebesar Rp. 104.376.000,- terealisasi 98.170.000 atau 94.05%.
 - h) Pengawasan dan pengendalian kegiatan satuan polisi pamong praja Kabupaten /Kota se- Provinsi Jambi mendapat Anggaran Sebesar Rp. 60.996.000,- terealisasi Rp. 60.828.000,- atau 99.72%.
- 3) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- a) Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penegakan HAM Mendapat Anggaran Sebesar Rp. 113.650.000,- terealisasi Rp. 105.626.400,- atau 92.94%.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman
- a) Kegiatan Pembentukan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di masyarakat adalah kegiatan yang bekerja sama dengan seluruh satuan linmas Kabupaten/Kota mendapat anggaran sebesar Rp. 52.941.200,- terealisasi Rp. 50.949.200,- atau 96.24%.
 - b) Kegiatan Sosialisasi terhadap Satuan Linmas dalam memelihara dan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mendapat anggaran sebesar Rp. 124.900.000,- terealisasi Rp. 119.028.900,- atau 95.30%.
- 5) Kelembagaan dan Koordinasi
- a) Kegiatan Rakor Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan sebagai Koordinasi dengan seluruh satpol PP se Provinsi Jambi dan juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Mendapat anggaran sebesar Rp. 129.482.000,- terealisasi sebesar Rp. 101.966.500,- atau 78.75%.

4.1.16.2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Sebagai SKPD, tugas pokok Badan Kesbangpol adalah mendukung terwujudnya Provinsi Jambi yang ekonominya maju, aman, adil dan sejahtera melalui terwujudnya persatuan dan kesatuan, stabilitas politik dalam negeri, dan keamanan dan ketertiban di daerah.

Mendukung terwujudnya tugas pokoknya, Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah menetapkan Visi yaitu “Terwujudnya Kesatuan Bangsa dan Politik yang

kondusif, harmonis, komunikatif dan Dinamis dalam rangka menuju Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (Jambi Emas)". Untuk terwujudnya visi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Misi :

Peningkatan sistem politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya secara efektif kelembagaan dan partisipasi politik yang dilandasi oleh menguatnya etika moral bidang politik.

Peningkatan upaya menumbuhkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang didukung oleh semakin mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa.

Peningkatan kesadaran, kemampuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Peningkatan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengendalian situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, telah ditetapkan bahwa tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015, telah disusun Rencana Strategis yang akan dijalankan selama 5 tahun (2010-2015). Implementasi dari Renstra tersebut telah disusun 12 Program yang menjadi prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri. Kendala dan tantangan yang ditemui dalam perjalanan pelaksanaan program/kegiatan, dapat teratasi dengan mengacu pada program-program berkelanjutan melalui Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program /

kegiatan strategik Renstra Tahun 2010-2015 Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya. Adapun gambaran kinerja program dari 12 program yang dijalankan pada tahun 2015 dapat diuraikan berikut ini :

Tabel 4.159
Gambaran Kinerja Program Badan Kesbangpol Tahun 2015

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.365.710.450,-	1.328.786.192,-	97,94%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	558.800.000,-	539.195.376,-	96,49%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	28.000.000,-	25.200.000,-	90,00%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	40.000.000,-	39.950.000,-	99,88%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	345.477.400,-	320.489.180,-	92,77%
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	639.871.000,-	622.981.300,-	97,36%
7.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	894.821.000,-	795.996.749,-	88,96%
8.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	343.697.150,-	305.955.350,-	89,02%
9.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	818.457.000,-	804.823.171,-	98,33%
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	305.707.200,-	280.784.300,-	91,85%
11.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	803.635.700,-	781.566.750,-	97,25%
12.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.	665.194.100,-	639.085.200,-	96,07%

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Jambi

Adapun gambaran capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2015, dapat diuraikan berikut ini :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini bertujuan memberikan dan menyediakan kelengkapan dan fasilitas administratif yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan jasa surat-menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 4) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- 6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
- 7) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 8) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- 9) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 10) Kegiatan penyediaan makan dan minum rapat
- 11) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Tujuan program ini adalah menyediakan sarana dan prasarana, mobiltas serta fasilitas yang memadai untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi secara optimal. Pengejawantahan program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / Operasional
- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 4) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional
- 6) Kegiatan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan disiplin pegawai PNS dan Non PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melalui disiplin penggunaan pakaian kerja yang telah ditetapkan. Mendukung program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan teknis maupun seminar yang diselenggarakan instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang kredibel. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Serta Capaian Kinerja Dan Keuangan

Untuk terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sehingga mampu mempertahankan terwujudnya opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan serta Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Provinsi Jambi.

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Melalui pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi kenyamanan dan keamanan lingkungan melalui pengendalian kegiatan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi Tahun 2015. Pembentukan Tim ini mempedomani Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Pada tahun 2015, program ini mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 639.871.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2015, kinerja kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 622.981.300- atau mencapai 97,36 %.

Terkait perubahan pemerintahan di tingkat pusat, mempengaruhi kinerja tim ditingkat pusat dan daerah, sehingga efektifitas waktu kerja tim turut terpengaruh pula. Oleh karena itu, periode pelaporan berubah dari periode B.03, B.06, B.09 dan B.12 menjadi periode B.04, B.08 dan B.12. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Timdu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Pusat (Kementerian Dalam Negeri RI) terhadap realisasi pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2015 Provinsi Jambi, Timdu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi pada periode pelaporan B.04 dan B.08 mendapat peringkat I se-Sumatera dan Kalimantan, sedangkan untuk tingkat nasional mendapat peringkat II nasional, evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 16 – 18 Nopember

2015 bertempat di Gran Senyur Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur, sedangkan untuk periode pelaporan B.12 penilaiannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada minggu ke dua bulan Januari 2016.

Adapun gambaran kinerja dari program ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penanganan Gangguan Keamanan di Provinsi Jambi. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; kepada Pemerintah Daerah diperintahkan untuk meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan keamanan di daerah. Upaya mewujudkan keamanan di daerah tersebut, dengan menitikberatkan pelaksanaan koordinasi Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme, Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme, Pemulihan Pasca Konflik dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2015 dan Pelaporan Kasus Konflik Sosial.

Untuk tahun 2015, Rencana Aksi Provinsi Jambi terdiri dari 18 (delapan belas) Aksi yang meliputi Aspek Pencegahan Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebanyak 9 (sembilan) Rencana Aksi, Sara sebanyak 1 (satu) Rencana Aksi, Politik/Batas Daerah Administrasi sebanyak 1 (satu) Rencana Aksi, Ekonomi/Industrial sebanyak 2 (dua) Rencana Aksi, Lahan/Sumber Daya Alam 4 (empat) Rencana Aksi, Pemantapan Pencegahan Aksi Terorisme sebanyak 1 (satu) Rencana Aksi, Penghentian Konflik/Terrorisme sebanyak 1 (satu) Rencana Aksi, Penyelesaian Konflik sebanyak 5 (lima) Rencana Aksi, Percepatan Penegakan Hukum sebanyak 4 (empat) Rencana Aksi, Pemulihan Pasca Konflik sebanyak 1 (satu) Rencana Aksi, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) Rencana Aksi. Sedangkan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Aksi masing-masing 24 Rencana Aksi sesuai dengan Pedoman Dari Kemenko Polhukam Republik Indonesia Tahun 2015. Pelaporan realisasi rencana aksi tingkat Provinsi pada tahun 2015 dilaporkan melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dalam 3 (tiga) periode pelaporan yaitu periode B.04, B.08 dan B.12.

- 2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015. Melalui terbentuknya tim ini, mampu meningkatkan hubungan yang harmonis antar unsur-unsur Instansi/SKPD penanggung jawab Rencana Aksi, aparat pemerintah dan masyarakat. Sedangkan outputnya dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme, Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme, Pemulihan Pasca Konflik dan Evaluasi/Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2015. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2015 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: Raker Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing dengan jumlah peserta 60 (empat puluh) orang, Raker bersama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kab/Kota se-Provinsi Jambi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
- 3) Sosialisasi Bahaya Terorisme – Radikalisme di Kalangan Pelajar, Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali terdiri dari: Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :
- a) Kegiatan di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015, dengan jumlah peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang, nara sumber adalah sebagai berikut : Kapolda Jambi dengan judul materi: “Bahaya Terorisme – Radikalisme Di Kalangan Pelajar, Pemuda, Mahasiswa Dan Tokoh Masyarakat”, Kajati Jambi dengan judul materi: “Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme”, Kabinda Jambi dengan judul materi: “Potensi Terorisme dan Radikalisme di Provinsi Jambi”, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”, Kabinda Jambi dengan judul materi: “Potensi Terorisme Dan Radikalisme Di Provinsi Jambi”, Kabid Penanganan Konflik dengan judul materi: “Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial”.
- b) Kegiatan di Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 dengan jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang, nara sumber adalah

sebagai berikut :Kapolda Jambi dengan judul materi: “Bahaya Terorisme – Radikalisme Di Kalangan Pelajar, Pemuda, Mahasiswa Dan Tokoh Masyarakat”, Kajati Jambi dengan judul materi: “Kajati dengan judul: “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Faham Radikal di Indonesia Termasuk ISIS”, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”, Kabinda Jambi dengan judul materi: “Potensi Kelompok-Kelompok Terorisme dan Radikalisme Di Provinsi Jambi”, Kabid Penanganan Konflik dengan judul materi: “Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial”.

- c) Kegiatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang, nara sumber adalah sebagai berikut : Kapolda Jambi dengan judul materi: “Bahaya Terorisme – Radikalisme Di Kalangan Pelajar, Pemuda, Mahasiswa Dan Tokoh Masyarakat”, Kajati Jambi dengan judul materi: “Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Termasuk ISIS”, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”, Ketua FKPT Provinsi Jambi dengan judul materi: “Potensi Terorisme Dan Radikalisme Di Provinsi Jambi”, Kabid Penanganan Konflik dengan judul materi: “Implementasi PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial”.

g. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan ketenteraman dan keteriban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal didalam masyarakat. Untuk Program ini mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp.894.821.000,-.Berdasarkan indikator Output, kinerja kegiatan ini telah tercapai sebesar 88,96 % dengan realisasi keuangan Rp. 795.996.749,- dengan melaksanakan Kegiatan :

- 1) Sosialisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pemulihan Pasca Konflik Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan Sosialisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pemulihan Pasca Konflik Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di Kabupaten Kerinci pada tanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang, nara sumber adalah sebagai berikut :Kapolda Jambi dengan judul materi: “Pencegahan dan Penghentian Konflik Sosial”, Kajati Jambi dengan judul materi: “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Konflik Sosial dan Terorisme”, Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”, Kaban Kesbangpol Kabupaten Kerinci dengan judul materi: “Kebijakan Pemkab Kerinci Dalam Penyelesaian Konflik Sosial”, Kabid Penanganan Konflik: “Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemulihan Pasca Konflik Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jambi”.

Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dengan outcome berkurangnya konflik di wilayah Provinsi Jambi, dengan realisasi kegiatan 85,17 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.149.929.999,-.

Adapun output kegiatan ini adalah koordinasi dengan Kesbangpol dan Kab/kota dalam Provinsi Jambi dan Instansi terkait di daerah sehingga masyarakat dapat bekerjasama menjaga kebersamaan kehidupan bermasyarakat dan menjaga kebersamaan kehidupan masyarakat untuk pencegahan , pemantauan dan penyelesaian konflik serta penciptaan situasi kantramtibmas yang kondusif di 11 kabupaten /kota se Provinsi Jambi. Konflik yang terjadi di Provinsi Jambi selama ini selalu bersumber dari Poleksosbud,sara’, batas wilayah dan sumber daya alam.

Pada Tahun 2015 berdasarkan data yang di dapat dari Kesbangpol Kabupaten Kota Se – Provinsi Jambi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah menghimpun terdapat 188 (seratus delapan puluh delapan)Jenis Potensi Konflik di Provinsi Jambi, dibanding dengan data pada tahun 2014 terdapat 72 (tujuh puluh dua) Potensi Konflik di Provinsi Jambi. Adapun Potensi Konflik Sosial tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.160
Daerah Potensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi

NO	Lokasi Potensi Konflik Kab/Kota	Jenis Potensi Konflik	Jumlah potensi konflik	Ket
1	2	3	4	5
1.	Tanjab Timur	Sumber daya Alam	6	-
		Batas Wilayah	3	
2	Muaro Jambi	Sumber daya Alam	23	-
		Sara'	5	
3.	Sarolangun	Sumber daya Alam	7	-
4	Batang Hari	Sumber daya Alam	10	-
		Batas Wilayah	1	-
5.	Kota Jambi	Sumber daya Alam	4	-
		Sara'	4	-
		Politik	2	
6	Tebo	Sumber daya Alam	17	-
		Politik	5	-
		Batas Wilayah	5	-
		Sara'	12	
7.	Bungo	Sumber daya Alam	21	-
		Batas Wilayah	3	-
		Sara'	4	
8.	Kerinci	Sumber daya Alam	6	-
		Sara	5	-
		Politik	12	
9.	Tanjab Barat	Sumber daya Alam	1	-
		Poleksosbud	7	-
		Sara'	1	-
10.	Merangin	Sumber daya Alam	8	-
		Politik	1	-
		Sara'	5	-
11.	Kota Sungai Penuh	Sumber Daya Alam	1	
		Politik	8	
		Sara'	1	
Jumlah Potensi Konflik			188	-

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Jambi

2) Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM dan Lembaga Asing.

Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM asing dan lembaga asing dengan output pemantauan kegiatan orang asing, TKA , peneliti asing, kunjungan / lalu lintas orang asing di daerah, outcome berupa Rakor, konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi dan kab/kota dan Rakornas pemantauan orang asing, impact lalu lintas dan adanya pemantauan situasi keamanan dan ketentraman kegiatan orang asing di 11 kab/kota dalam

Provinsi Jambi serta melaksanakan rakor pemantauan orang asing , LSM asing dan Lembaga asing dengan jumlah peserta 60 orang Tim Provinsi Kabupaten/kota. Yang terdiri dari Kaban/kakan kesbangpol dan linmas , Kasi intel kejar Kab.Kota , Kasat Intel Polres Kab/kota , Kadis sosnake-trans kab/kota, kakan imigrasi kuala tungkal, kepala Balai TNKS Sungai penuh, Kakan imigrasi Jambi, instansi tingkat Provinsi Jambi.Tema yang di usung dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Orang Asing, LSM Asing dan lembaga Asing se-Provinsi Jambi Tahun yaitu : Kaban Kesbang dan Politik Provinsi Jambi, Kakan Imigrasi Jambi dan Kapolda Jambi.Tujuan dilaksanakan nya Rapat Koordinasi Tim pemantauan Orang Asing, LSM Asing dan Lembaga Asing adalah : Mengefektifkan Tim Koordinasi yang telah dibentuk baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota sebagai wadah tukar menukar informasi antar tim koordinasi Provinsi Jambi dengan Tim Koordinasi Kab/Kota dalam rangka : M menginventarisasi daftar dan masalah hasil pemantauan dan pengawasan keberadaan dan aktifitas orang asing di daerah. Merumuskan solusi pemecahan masalah sebagai bahan untuk direkomendasikan kepada gubernur Jambi dalam pengambilan kebijakan/keputusan dalam hal penanganan orang Asing. Diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan apihak terkait diantaranya Dinas Sosial dan tenaga Kerja dan TIM PORA (Tim Pemantauan Orang Asing) berdasarkan SK Gubernur Jambi No.338/Kepgub/Bakesbangpol.5.2/2014 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing.

Kegiatan Pembinaan orang asing, masyarakat asing dan tenaga kerja asing Tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 45 dan 50 Tahun 2012 tentang pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh yang diikuti oleh anggota Tim pemantau orang asing di Kab/Kota yang telah ditunjuk perusahaan yang memperkerjakan orang asing dan pengusaha hotel.

Setelah diadakan Sosialisasi Permendagri diharapkan dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang melaporkan tenaga kerja asing kepada Gubernur Jambi Cq. Bangkesbangpol Provinsi Jambi. Pendataan jumlah tenaga kerja asing/orang asing mengalami peningkatan dari Tahun keTahun. Pada Tahun 2013 terdata 381 Tenaga Kerja Asing/Orang Asing dan pada Tahun 2014 pada semester I terdata 484 Orang Asing/Tenaga Kerja Asing. Sedangkan pada Tahun 2015 terdata 387 Orang Asing/Tenaga Kerja Asing,134 Orang

Mahasiswa Asing Kuliah di Perguruan Tinggi Jambi terdiri dari 109 orang yang berasal dari Malaysia dan 25 orang yang berasal dari Thailand.

Adapun realisasi kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing 93,83 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.227.813.500,-.

- 3) Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat.

Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan output terbina dan terkembangkannya FKUB yang berkelanjutan di Provinsi Jambi, Outcome adalah terimplementasikannya ; a) Insentif wanhat/pengurus FKUB; b) Rapat internal wanhat dan pengurus FKUB; c) Rakorda FKUB se-Prov. Jambi; d) Dialog interatif permasalahan FKUB di Prov. Jambi. Terlaksananya rapat internal kepengurusan FKUB, melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang permasalahan FKUB ke Dirjen KesbangPol pusat. Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dilaksanakan setiap tahun 4 (empat) kali guna menjalin silaturahmi antar sesama dan memantau perkembangan di FKUB. Meningkatkan Pengurus FKUB berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan pengurus dewan penasehat FKUB berjumlah 26 (dua puluh enam) orang tujuan dilaksanakan pertemuan supaya tidak adanya perselisihan antar`agama. Rapat koordinasi FKUB Se-Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 20 19 Desember 2015 di Aula Bakesbangpol Provinsi Jambi yang terdiri dari pengurus FKUB , Dewan Penasehat FKUB dan Pengurus FKUB Kabupaten/kota Kesbangpol Provinsi Jambi. Pada tahun 2015 terealisasi sebesar 85,77 % dengan realisasi keuangan sebesar RP.233.896.550,-.

- 4) Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi

Kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi dengan out comenya meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika tahun 2014. Dimana Kegiatan ini baru dapat terlaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi pada tahun 2015, dikarenakan dengan dukungan dana. Semakin meningkatnya angka penyalahgunaan Narkoba dan maraknya peredaran Narkotika di Provinsi Jambi dan salah satunya

merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan di Provinsi Jambi yang tentunya perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Hal inilah yang menjadi salah satu pendukung dan dipandang perlu untuk dilaksanakannya kegiatan ini.

Ditahun pertama ini pada tahun 2015 Kegiatan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi ini dilaksanakan pada 2 (dua) Kabupaten yaitu : Kabupaten Bungo pada Tanggal 26 Mei 2015 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo dan Kota Jambi pada tanggal 13 Oktober 2015 bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi. Kegiatan dimaksud masing – masing diikuti 80 (delapan puluh) orang peserta yang berasal dari pelajar, mahasiswa, pemuda dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 - 2015 dan dengan Target Tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD Tahun 2010-2015, RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja.

Sedangkan anggaran untuk kegiatan program yang didanai dengan menggunakan anggaran belanja pembangunan Tahun 2014 dianggarkan sebesarRp. 8.681.001.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.430.452.010,- berkisar 97,11 %. Selanjutnya anggaran untuk kegiatan program yang didanai dengan menggunakan anggaran belanja pembangunan Tahun 2015 dianggarkan sebesarRp. 6.809.371.000,- dengan realisasi anggaranRp. 6.484.813.568,- berkisar 95,36 %. Didalam anggaran Tahun 2016 anggaran belanja pembangunan tersedia anggaran sebesarRp. 9.809.371.000,-. Secara rinci yang dapat dilihat dalam beberapa tabel berikut :

Dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan ketenteraman dan keteriban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal didalam masyarakat. Untuk Program ini mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp.894.821.000,-.Berdasarkan indikator Output, kinerja kegiatan ini telah tercapai sebesar 88,96 % dengan realisasi keuangan Rp. 795.996.749,- dengan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pemulihan Pasca Konflik Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di Kabupaten Kerinci pada tanggal 18 Desember 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang, nara sumber adalah sebagai berikut :Kapolda Jambi dengan judul materi: “Pencegahan dan Penghentian Konflik Sosial”, Kajati Jambi dengan judul

materi: “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Konflik Sosial dan Terorisme”, Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”, Kaban Kesbangpol Kabupaten Kerinci dengan judul materi: “Kebijakan Pemkab Kerinci Dalam Penyelesaian Konflik Sosial”, Kabid Penanganan Konflik: “Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemulihan Pasca Konflik Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jambi”

h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan adanya hubungan kemitraan dan fasilitasi antara pelajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dimana dalam hubungan kemitraan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam target indikator kinerja. Dana yang menunjang program ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 343.697.150,-. Berdasarkan indikator *Output*, kinerja kegiatan ini telah tercapai 89,02 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 305.955.350,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Adapun landasan hukum pelaksanaan kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Permendagri No.71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.504/Kepgub/Bakesbangpol/2013 tentang pembentukan kelompok kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Jambi. Kegiatan Pusat Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang dibuka oleh Gubernur Jambi diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kailani SH, MH. Kegiatan ini terdiri dari 110 (seratus sepuluh) orang peserta yang berasal dari Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Tim Pokja, Guru SMP/SMA Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun Nara Sumber pada pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari Lemhanas RI (Drs.H.Radjab Semendawai, SH, MH, M.Si), Akademisi (H. Syarif Gamal, SH, MH), Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kepala Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi, pola pikir dan sikap terhadap upaya pelestarian dan peningkatan Wawasan Kebangsaan,

dimana pada saat ini nilai – nilai kebangsaan yang semakin meluntur. Pemahaman terhadap nilai – nilai kebangsaan sangatlah penting, agar nilai – nilai kebangsaan tidak memudar, karena disadari atau tidak struktur sosial politik dan demokrasi mempunyai efek pada tingkat nasional maupun daerah, dengan realisasi kegiatan sebesar 87,95 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.150.760.350,-.

2) Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat (FPK).

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang diadakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jambi sebagai salah satu wadah untuk menumbuh kembangkan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jambi. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini dibuka oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Bapak Fauzi Syam. Melalui Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat mengangkat Peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam merekat persatuan dan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jambi. Dengan jumlah penduduk yang terdiri dari beraneka suku dan ras dapat saling membaur secara harmonis dan bekerja sama meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan adanya forum Pembauran Kebangsaan akan dapat mengatasi konflik – konflik yang timbul sehingga mudah diatasi dan tercipta kehidupan yang aman ,tentram dan kondusif serta dapat mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.

a) Peserta

70 (tujuh puluh) orang yang terdiri Kaban/ Kakan Kesbangpol, Kabid/ Kasubid yang membidangi FPK dan Pengurus FPK Kabupaten/Kota.

b) Keluaran

Rekomendasi hasil rapat FKP tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani Ketua FPK Provinsi Jambi yang mana dalam pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa rumusan strategi sebagai pedoman dan pegangan bagi pengurus dan para stackholder dalam rangka menyusun usaha dan langkah-langkah ke depan demi kemajuan organisasi sesuai dengan pedoman organisasi melalui PERMENDAGRI No.34 Tahun 2006 yakni turut serta menjaga stabilitas nasional melalui FPK, dengan realisasi kegiatan 90,08 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.155.195.000,00

i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan Wasbang dan Bela Negara, diperolehnya pemahaman masyarakat tentang metode analisis data dan pemanfaatan data indeks Demokrasi Indonesia, Membentuk individu yang memahami karakter jati diri bangsa dengan tetap berpedoman pada Pancasila sebagai dasar Negara provinsi Jambi. Dana yang menunjang kegiatan ini berasal dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp. 818.457.000,- berdasarkan indikator output kinerja kegiatan ini telah mencapai 98,33 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara bagi generasi muda sehingga tumbuh rasa cinta tanah air dan patriotisme . kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bungo pada tanggal 04 Februari 2015 dan Kabupaten Tebo pada tanggal 5 Februari 2015 dengan masing masing diikuti peserta sebanyak 55 (lima puluh lima) orang terdiri dari Pelajar dan Mahasiswa.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara, dengan realisasi kegiatan sebesar 93,25% atau realisasi keuangan sebesar Rp.87.145.571,-.

- 2) Kegiatan Sosialisasi TMMD ke- 94 dan ke-95, Wasbang dan Bela Negara. Pelaksanaan kegiatan TMMD Ke-94 TA 2015 dibuka secara resmi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2015 bertempat di Kota Sungai Penuh yang dibuka langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh H. Asafri Jaya Bakri. Acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh Danrem 042/Garuda Putih Kolonel Infantri Harianto, Kodim 0417 Kerinci Letkol Inf Yudi Ruskandar, Ketua DPRD, Forkompinda dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya mengatakan bahwa Program TMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian, Lembaga pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Daerah dan segenap lapisan masyarakat. Melalui program ini diharapkan dapat mewadhi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan.

a) Kegiatan TMMD, Waktu dan tempat

Kegiatan TNI manunggal membangun Desa (TMMD) Ke-94 TA 2015 dilaksanakan di Kota Sungai Penuh dengan sasaran 2 Desa yaitu Desa Koto dan desa Bento adalah Pembangunan disegala bidang baik fisik maupun non fisik.

Adapun sasaran Fisik yang dilakukan dalam TMMD ke-94 ini adalah pembangunan infrastruktur ,sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.Melalui TMMD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sedangkan sasaran non fisik diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat desa. Selain itu kegiatan tersebut diisi dengan Pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu,pemberian bibit kelapa sawit,pemberian bibit gaharu,pengobatan dan pelayanan KB gratis,sunat masal serta pemberian Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang dilaksanakan oleh Korem 042/Gapu bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan POLitik Provinsi Jambi. Upacara penutupan TMMD ke-94 tahun 2015 di Kota Sungai Penuh ini ditutup pada tanggal 27 Mei 2015 yang dihadiri Oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Danrem 042/Gapu Jambi, Dandim 0417/Kerinci, Forkompinda,Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh,Perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Jambi serta para undangan lainnya. Kegiatan Sosialisasi TMMD ke-94 dan ke-95, Wasbang dan Bela Negara dengan realisasi kegiatan 98,76 % atau realisasi keuangan sebesar Rp 479.002.600,-.

b) Kegiatan Peningkatan Jati diri Bangsa/ Nation Character Building

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa/Nation Character Building bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan penghayatan terhadap wawasan kebangsaan, bela negara serta meningkatkan jati diri dan disiplin kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi.

c) Waktu dan tempat pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa/Nation Character Building bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan dari tanggal 26 s.d 28 Agustus 2015 bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka Sungai Gelam Kabuapten Muaro Jambi untuk kegiatan pembekalan materi dan kegiatan outbond.

Pelaksanaan Kegiatan di koordinir oleh Pembina NCB yang terdiri dari Perwira TNI dari Korem 042/Gapu dan Panitia dari Badan Kesbangpol Prov.Jambi. Kegiatan NCB III TA. 2015 dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Jambi Bapak H.Ridham Priskap ,SH,MH,MM dilanjutkan dengan kegiatan Fisik dan non fisik maupun indoor dan outdoor.

d) Peserta.

Peserta kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa/Nation Character Building bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 berjumlah 120 (Seratus dua puluh) orang yang berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan mengikuti ini diharapkan akan tercipta aparatur yang sehat jasmani dan rohani karena telah ditempa dengan mengikuti berbagai aktivitas olah raga, olah hati, olah pikir, dan olah rasa/karsa sehingga dapat menimbulkan sifat bersih, disiplin, jujur, bertanggung jawab, rela berkorban, pantang menyerah, ulet, peduli, ramah, suka menolong, mengutamakan kepentingan umum, beretos kerja dan tidak egois.

Kegiatan peningkatan Jati Diri Bangsa (Nation Character Building) ini dengan realisasi kegiatan 99,45 % atau realisasi keuangan sebesar Rp 238.675.000,-.

j. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yaitu terlaksananya Pembinaan dan Pemanatapan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana dalam Provinsi Jambi yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2006 dengan dana yang berasal dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 305.707.200,-.

Berdasarkan indikator Output, kinerja kegiatan ini telah tercapai 91,85 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 280.784.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Memelihara Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Permendagri Nomor 12 Tahun 2006) dengan realisasi kegiatan 91,07 %. Adapun output dari kegiatan ini adalah deteksi dini, cegah dini, tangkal dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia sehingga tercipta rasa aman dan tenteram dilingkungan masyarakat sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Pedoman Kerja tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sarolangun dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang terdiri dari: Aparatur Kesbangpol Kab/Kota, Pengurus FKDM Kab/Kota, Camat, Pengurus FKDM Kecamatan dan Timdu Kab/Kota, sedangkan narasumber terdiri dari: Ketua FKDM Provinsi Jambi dengan judul materi “Pedoman Kerja tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini secara Terpadu”, Dir. Intelkam Polda Jambi dengan judul materi “Simulasi Jaringan Komnikasi Intelijen”, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi “Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial” dan Kabid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial” dalam rangka mengantisipasi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui jaringan komunikasi intelijen dengan mengimplementasikan Pedoman Kerja tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tengah-tengah masyarakat dalam mendeteksi timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).
- b) Sosialisasi Pedoman Kerja tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Merangin dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang terdiri dari: Aparatur Kesbangpol Kab/Kota, Pengurus FKDM Kab/Kota, Camat, Pengurus FKDM Kecamatan dan Timdu Kab/Kota, sedangkan narasumber terdiri dari: Kabinda Jambi dengan judul materi “Teknik Pembentukan Jaringan Intelijen”, Kapolda Jambi (Dir. Intelkam) dengan judul materi “Membangun Sistem Peringatan Dini”, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi “Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial” dan Kabid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dengan judul materi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial” dalam rangka mengantisipasi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui jaringan komunikasi intelijen dengan mengimplementasikan Pedoman Kerja tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini secara Terpadu

Penanganan Konflik Sosial di tengah-tengah masyarakat dalam mendeteksi timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).

- c) Rapat Internal FKDM. Kegiatan Rapat Internal FKDM Provinsi Jambi dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun yang membahas langkah-langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan informasi dari masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman serta mengkoordinasikan dengan Instansi terkait di daerah, Kominda, FKUB dan FPK sebagai mitra kerja FKDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

Tabel 4.161
 Rekapitulasi Pembentukan FKDM Kab/Kota, Kecamatan dan
 Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	TK. KAB/KOTA		TK. KECAMATAN		
		SDH	BLM	JML KEC	SDH	BLM
1	KOTA JAMBI	SDH		8	2	6
2	KAB. BATANGHARI	SDH		8	8	-
3	KAB. MUARO JAMBI	SDH		11	11	-
4	KAB. BUNGO *)	SDH		17	17	
5	KAB. TEBO	SDH		12	4	8
6	KAB. MERANGIN *)	SDH		24	24	
7	KAB. SAROLANGUN	SDH		10	10	
8	KAB. KERINCI	SDH		16	-	16
9	KAB. SUNGAI PENUH	SDH		8	-	8
10	KAB. TANJAB BARAT	SDH		13	13	-
11	KAB. TANJAB TIMUR	SDH		11	11	
	catatan : *) Kab.Bungo dan Merangin telah terbentuk sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan					

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Jambi

- d) Kegiatan Penerbitan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Rekomendasi Penelitian.

Kegiatan Penerbitan/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 48.699.800,- . Pada tahun 2015 telah terbit sebanyak 471 rekomendasi penelitian dengan realisasi kegiatan sebesar 95,53 % atau realisasi keuangan Rp.46.719.800 ,-.

k. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan perpolitikan dalam rangka membangun kondisi perpolitikan yang kondusif dalam hal ini diaplikasikan dalam kegiatan koordinasi forum diskusi politik, Kegiatan monitoring dan evaluasi eksistensi Parpol, Ormas , OKP, dan Lembaga Keagamaan/perwakilan di Daerah, dan kegiatan pembinaan Fasilitas organisasi masyarakat, LSM, OKP, dan BEM Provinsi Jambi. Program ini memiliki dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 803.635.700,-.

Berdasarkan indikator Output, kinerja kegiatan ini telah tercapai yaitu 97,25 % dengan realisasi keuangan Rp. 781.566.750,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik.

Pelaksanaan forum diskusi politik yang outcomemnya tokoh masyarakat, parpol, LSM dan masyarakat sedangkan outputnya peningkatan kapasitas masyarakat, LSM, Parpol dan Aparatur tentang politik dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi undang undang dibidang Politik sebagai berikut :

- a) Sosialisasi UU Politik bagi Kalangan Perempuan (Gender) pada Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten Kota yaitu : tanggal 19 maret 2015 dilaksanakan di Kabupaten Bungo bertempat Ruang Pola Kantor Bupati Bungo sedangkan untuk pelaksanaan di Kabupaten Batanghari pada Tanggal 7 Oktober 2015 bertempat di Aula Balai Pendidikan Luar Sekolah (BPLS) Muara Bulian masing – masing diikuti sebanyak 80 (delapan puluh) orang Peserta. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut berasal dari Organisasi Perempuan, Partai Politik, Ormas, OKP, LSM, Perguruan Tinggi, Darma Wanita dan PKK (Gender).
- b) Kegiatan Sosialisasi Etika dan Budaya Politik bagi pemilih pemula pada Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan 4 (empat) Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi, yaitu :
 - (1) Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh yang diikuti sebanyak 80 (delapan puluh) orang peserta yang terdiri dari Mahasiswa/Mahasiswi perguruan Tinggi. Adapun Materi yang disampaikan pada Kegiatan tersebut antara lain : Perkembangan Politik dalam Wilayah Provinsi Jambi, Peran Pemda dalam memfasilitasi Pendidikan Politik di Kota Sungai Penuh, serta Peran KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

- (2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 bertempat di Gedung PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diikuti sebanyak 80 (delapan puluh) orang peserta yang terdiri dari Siswa/Siswi SMU (SMK). Adapun Materi yang disampaikan pada Kegiatan tersebut antara lain : Perkembangan Politik dalam Wilayah Provinsi Jambi, Peran Pemda dalam pelaksanaan pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu pada Serentak Tahun 2015.
- (3) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 bertempat di Gedung PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diikuti sebanyak 80 (delapan puluh) orang peserta yang terdiri dari Mahasiswa/Mahasiswi, Siswa/Siswi SMU (SMK). Adapun Materi yang disampaikan pada Kegiatan tersebut antara lain : Pilkada serentak sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila, Peran Etika dan Budaya dalam membentuk karakter Pemilih Pemula, Persiapan Pelaksanaan Pilkada Bupati Tanjung Jabung Barat .
- (4) Kota Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2015 bertempat Aula Rektorat Lantai 3 Universitas Negeri Jambi yang diikuti sebanyak 80 (delapan puluh) orang peserta yang terdiri dari Mahasiswa/Mahasiswi. Adapun Materi yang disampaikan pada Kegiatan tersebut antara lain : Optimalisasi dalam Mencerdaskan Pemilih Pemula, Etika dan Budaya politik dalam mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dan Peran KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015.

Dengan realisasi anggaran 97,03 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.347.909.350,-.

- c) Kegiatan monitoring dan evaluasi keberadaan / eksistensi Orpol, Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan.

Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan / eksistensi Orpol, Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan, Dengan output terpantaunya dan terevaluasi kelembagaan dan eksistensi parpol, Ormas, OKP/LSM di provinsi Jambi, outcomenya tersusunnya laporan data ormas setiap tahunnya, benefit atau dampaknya adalah terakuratkannya data dalam pembaharuan buku direktori dengan Kegiatan monitoring dan evaluasi keberadaan / eksistensi Orpol, Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan.

Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan / eksistensi Orpol,

Organisasi Kemasyarakatan, Dengan output terpantaunya dan terevaluasi kelembagaan dan eksistensi parpol, Ormas di provinsi Jambi, outcomenya tersusunnya data parpol Kabupaten/kota dan laporan database ormas setiap tahunnya, benefit dengan berdampak pada terakuratkannya data dalam pembaharuan buku direktori dengan manfaat/impact terakselerasikan pembaharuan data secara menyeluruh. Kegiatan monitoring dan evaluasi keberadaan/eksistensi Parpol di laksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun kegiatan yang bertempat di Aula Kesbang Pol Provinsi Jambi dalam rangka rakor kemitraan, Ormas dan SKPD terkait di provinsi Jambi sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang. Adanya pemantauan ke daerah untuk mengevaluasi hasil kerjasama dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah sesuai aturan (Peraturan Pemerintah/peraturan Menteri),-

Untuk mensosialisasikan Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan setelah direvisi dalam putusan MK maupun belum sebagai pedoman, untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah, menteri kepada Organisasi Kemasyarakatan dan SKPD Provinsi Jambi seperti. Adanya sosialisasi persamaan persepsi atas peraturan menteri dalam negeri no. 39 tahun 2012 atas perubahan 32 Tahun 2011 dan permendagri no. 20 Tahun 2012 tentang kerjasam dengan pemerintah di Provinsi Jambi.

- d) Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Ormasy, LSM,OKP dan BEM Provinsi Jambi.

Kegiatan pembinaan fasilitasi Ormas. LSM. OKP dan BEM Provinsi jambi dengan output Meningkatnya peran Pemprov Jambi dalam mendorong dan meningkat pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk lebih berperan aktif dalam menjuang program pemerintah serta mengantisipasi keberadaan/eksistensi serta penyelesaian permasalahan Organisasi Kemaysrakatan di provinsi Jambi.

Melalui Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dalam menjuang program pemerintah menghadapi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Tahun 2015. Dimana Ormas yang terdaftar di Provinsi Jambi lebih kurang 1.365 Ormas, Dengan kegiatan tersebut peran Ormas dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menghadapi pemilihan

Kepala Daerah akan terlaksana. Sehingga kegiatan tersebut temanya dipilih, "Meningkatkan Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menciptakan Kondisi yang Kondusif Menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Secara serentak Tahun 2015 di Provinsi Jambi"

Kemudian Berdasarkan indikator Output, kinerja kegiatan ini telah tercapai yaitu 96,46 % reasiasi keuangan lebih kurang sebesar Rp. 265.272.550,-.

Berkenaan tempat pelaksanaan untuk kegiatan pembinaan tersebut pada tahun 2015 dapat dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diantara lain :

- (1) Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan pada hari kamis 21 Mei 2015 bertempat di "Aula kantor Bupati Kerinci" yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, OKP dan BEM) yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dimana di Kabupaten Kerinci jumlah ormas yang terdaftar lebih kurang 30 Ormas. dengan Narasumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Banwaslu Provinsi Jambi, Polres Kerinci dan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan peningkatan sumber daya pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci serta memberi informasi aturan – aturan sehingga menjadi bekal dalam meningkatkan pemilih dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi pada Tahun 2015 dan Kabupaten Kerinci yang akan datang.
- (2) Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan pada hari kamis 21 Mei 2015 bertempat di "Auditorium Akper Bina Insani Kota sungai Penuh" yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, OKP dan BEM) yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Kota Sungai Penuh dimana di Kota Sungai Penuh jumlah ormas yang terdaftar lebih kurang 22 Ormas. dengan Narasumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Banwaslu Provinsi Jambi, Polres Kerinci dan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan peningkatan sumber daya pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kota sungai Penuh serta memberi informasi aturan – aturan sehingga menjadi bekal dalam meningkatkan

pemilih dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi pada Tahun 2015. Khususnya Walikota Sungai Penuh.

- (3) Kota Jambi yang dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2015 bertempat di "Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jambi" yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, OKP dan BEM) yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dimana di Provinsi Jambi jumlah Ormas yang terdaftar lebih kurang 471 Ormas sedangkan yang aktif lebih kurang 174 Ormas dengan Narasumber : Polda Jambi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Banwaslu Provinsi Jambi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan peningkatan sumber daya pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi serta memberi informasi aturan – aturan mengingat Ormas yang terdaftar di Provinsi Jambi pada Umumnya Ormas dengan kepengurusannya Tingkat Pusat, Daerah/wilayah yang mempunyai cabang di Kabupaten/kota sebagai binaanya dan nantinya menjadi bekal dalam meningkatkan pemilih dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi pada Tahun 2015.
- (4) Kabupaten Tebo yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Nopember 2015 bertempat di "Aula Kantor Camat Tebo Tengah Kabupaten Tebo" yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, OKP dan BEM) yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Tebo dimana di Kabupaten Tebo jumlah ormas yang terdaftar lebih kurang 49 Ormas. dengan Narasumber : Polres Kab Tebo, Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang diwakili KPU Kabupaten Tebo, Banwaslu Provinsi Jambi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan peningkatan sumber daya pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kab Tebo serta memberi informasi aturan – aturan sehingga menjadi bekal dalam meningkatkan pemilih dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi pada Tahun 2015 dan menghadapi pilkada di Kabupaten Tebo yang akan datang.
- (5) Kabupaten Merangin yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 Nopember 2015 bertempat di "Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Merangin" yang

diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, OKP dan BEM) yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kab Merangin untuk sementara Ormas yang terdaftar di Kabupaten Merangin berjumlah 183 Ormas dengan Narasumber : Polres Merangin, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Banwaslu Provinsi Jambi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan peningkatan sumber daya pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kab Tebo serta memberi informasi aturan – aturan sehingga menjadi bekal dalam meningkatkan pemilih dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi pada Tahun 2015 dan Kabupaten Merangin yang akan datang.

I. Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu membangun kondisi politik yang demokratis dan kondusif sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan fasilitasi pemilu dan pilkada serta pengembangan partisipasi politik daerah, kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga parpol. Program ini memiliki dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 665.194.100,-.

Berdasarkan indikator Output, kinerja kegiatan ini telah tercapai yaitu 96,07 % reasiasi keuangan sebesar Rp. 639.085.200,-

Program demokrasi yang makin kokoh dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah.

Kegiatan Monitoring dan Evalausi Perkembangan Politik Daerah dengan output dan outcome dengan tema kegiatan yang di laksanakan untuk menunjang persiapan pemilu sebagai berikut :

(a) Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 di Provinsi Jambi dilaksanakan di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi pada tanggal 29 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Bapak Kailani,SH, M. Hum dengan jumlah 100 (seratus) orang peserta yang terdiri dari unsur KPU ,Bawaslu,Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten kota se-Provinsi Jambi,Unsur Keamanan serta Unsur Parpol Peserta Pemilu. Adapun

Tema pada Rapat Koordinasi ini adalah "Melalui Rakor Persiapan Pilkada serentak Tahun 2015 kita ciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersih dan berkualitas ".Dilaksanakannya Kegiatan ini dengan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember Tahun 2015 dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan Kepala Daerah di Provinsi Jambi.

- (b) Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pemantau,Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah se- Provinsi Jambi Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2015 , bertempat di Aula Bakesbangpol Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 55 (lima puluh lima) orang peserta. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai salah satu bahan untuk mengadakan perubahan yang lebih baik terhadap sisitim koordinasi pemantauan perkembangan politik daerah lintas sektor dan lintas pelaku, sehingga terjadi peningkatan sinergi dan penyatuan gerak masing – masing instansi secara lebih efektif dan efisien dalam upaya pemantauan perkembangan politik di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ,H.Ridham Priskap.Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Jambi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan Pemantauan dan Pelaporan Perkembangan Politik jelang pelaksanaan Pilkada, beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya tugas Desk Pilkada yang telah dibentuk berpusat di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi,yaitu melakukan Sosialisasi dan Pemantauan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi,kemudian menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada, serta memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan Pilkada,melaporkan perkembangan pemutakhiran data situasi politik dan keamanan,memantau netralitas maupun penyelenggaraan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), selanjutnya melaporkannya pula ke Kemendagri.

Dengan realisasi kegiatan sebesar 95,26 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.501.599.600,-.

- 2) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Lembaga Parpol

Peningkatan dan pengembangan Kualitas politik bagi kader dan lembaga Parpol dengan Outcome persiapan dan kesiapan bagi kader dan lembaga politik dengan mengadakan rapat internal verifikasi yang berkaitan dengan kelancaran proses dan pertanggung jawabab (SPJ) bantuan Parpol. Kegiatan Parpol di laksanakan 2 (dua)kali dalam setahun, diadakan rapat pertemuan guna memantau kegiatan parpol dan pembuatan SPJ mengenai bantuan keuangan yang telah diberikan supaya untuk dipertanggung jawabkan untuk menghindar masalah di kemudian hari. Cara pembuatan SPJ dan segala laporan kegiatan parpol yang menggunakan keuangan bantuan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan . kegiatan rapat diadakan 2 (dua)kali yang dilaksanakan di Aula Bakesbangpol yang dihadiri sejumlah partai politik dan kesbangpol provinsi /Kabupaten dan kota. Terdiri dari sebelas partai politik dan dinas instansi terkait yaitu Depatemen hukum dan Ham provinsi Jambi, KPU, Inspektorat Provinsi Jambi, Biro keuangan , Biro hukum dan staf Bakesbangpol Provinsi Jambi. Untuk peserta rapat koordinasi /verifikasi partai politik masing-masing partai mengirim utusan 3 orang peserta terdiri dari ketua , sekretaris dan bendahara partai sebanyak 30 (tiga puluh) orang . Dengan realisasi anggaran sebesar 99,16 % atau realisasi keuangan sebesar Rp.137.485.600,-

m. Hambatan dan solusi Kegiatan Tahun 2015.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membina kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Provinsi Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa permasalahan dan kendala selama tahun 2015 dan langkah-langkah penyelesaiannya, diantaranya :

- 1) Pada Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Ormasy,LSM,OKP dan BEM Provinsi Jambi ,untuk aplikasi Ormasy dan LSM sudah tersedia jaringan internet,hanya saja tidak bisa di akses dengan baik dikarenakan jaringan yang ada tidak mampu untuk mengakses data yang ada.Sehingga laporan Ormasy,LSM ke Pusat tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dengan solusi ke depan diharapkan adanya jaringan khusus berkenaan dengan masalah tersebut.
- 2) Pembinaan dan pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing :
 - (a) Belum seluruh perusahaan pengguna tenaga kerja asing melaporkan pekerja/Karyawannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Jambi, dengan solusi akan melakukan Sosialisasi kepada Instansi/Lembaga/Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/ yang bermitra dengan peneliti asing untuk mempresentasikan rencana kegiatannya kepada Tim Pemantau Orang Asing Provinsi Jambi.

- (b) Para peneliti asing belum melaporkan hasil penelitiannya baik berupa laporan berkala maupun laporan akhir penelitian kepada Gubernur Jambi C.q. Bakesbangpol Provinsi Jambi.
 - (c) Belum adanya kendaraan dinas operasional untuk memantau keberadaan peneliti asing, tenaga kerja asing yang wilayah kerjanya dilokasi terpencil (kawasan yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Dengan solusi kedepan agar dapat tersedia sarana pendukung untuk Pemantauan Kegiatan Orang Asing tersebut berupa mobil Double Gardan.
 - (d) Belum maksimalnya Pelaporan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) oleh Kabupaten/kota secara periodik kepada Gubernur C.Q Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan solusi kedepan pelaporan dari masing – masing Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporannya dengan tepat waktu.
 - (e) Keterbatasan kemampuan personalia aparatur Kesbangpol yang menangani penelitian tenaga kerja asing, lembaga asing dalam berbahasa asing/Inggris. Solusi kedepan untuk dapat menambah personil pemantau kelapangan yang mampu berbahasa asing/Inggris.
- 3) Untuk kegiatan Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum terpenuhinya sarana meubelir serta sarana pendukung lainnya. Dengan solusi diharapkan pada tahun yang akan datang dianggarkan biaya pengadaan sarana meubelir dan sarana pendukung lainnya sehingga dapat bekerja lebih maksimal.
- 4) Untuk kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Rakor Perkembangan Politik Daerah masih terdapatnya perbedaan persepsi antar stake holder dalam menjabarkan suatu aturan dan adanya perbedaan momenklatur pada tiap – tiap Kesbangpol maupun Kota dalam Provinsi Jambi dengan solusi agar adanya koordinasi yang sinergis antar Kesbangpol dan Stake Holder terkait.
- 5) Kegiatan Peningkatan dan pengembangan Kualitas politik bagi lembaga parpol banyak diantaranya masih ditemukan laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari beberapa parpol yang belum lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan / eksistensi Orpol, Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan. Secara khusus terdapat beberapa hal

berkaitan dengan pendataan data base secara menyeluruh terutama atas keberadaan dan eksistensi parpol, Ormas, OKP di Provinsi Jambi terutama dalam memfasilitasi tujuan dan sasaran dari masing-masing Orpol/Ormas, OKP se Provinsi Jambi. Dengan solusi diupayakan peningkatan langkah-langkah efektivitas dan efisiensi program/kegiatan yang bersinergi antar pemerintah dengan Ormasy, LSM, OKP se provinsi Jambi. Tidak ada pemberitahuan perpindahan sekretariat OKP, Ormas, LSM dan lembaga keagamaan sehingga sulit untuk berkoordinasi dan bekerjasama. Dengan Solusi melakukan koordinasi dengan kesbangpol Kab/Kota dan memberikan himbauan lewat media massa agar OKP, Ormas, LSM dan Lembaga untuk segera registrasi ulang bagi yang sudah habis masa berlaku SKTnya.

- 7) Pelaksanaan forum diskusi politik masih mengalami kendala karena masih ada kabupaten/kota yang belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik masyarakat, karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia. Untuk itu diharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Sosialisasi di Kabupaten /Kota sebagai bahan koordinasinya.
- 8) Belum Optimalnya pelaksanaan Pendidikan Politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Belum Optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang undang-undang politik, etika dan budaya politik sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu masih kurang. Solusi yang dibuat perlunya peningkatan kegiatan Sosialisasi undang-undang, Etika dan budaya politik di kalangan masyarakat khususnya di tingkat kabupaten terutama di masyarakat di perbatasan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan menambah jumlah peserta dari kalangan pemilih pemula dan perempuan (gender)
- 9) Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat :
 - (a) Belum adanya kendaraan operasional bagi pengurus FKDM untuk melakukan pembinaan FKDM Kab/Kota se-Provinsi Jambi Dengan solusi kedepan dapat tersedia sarana pendukung/kendaraan operasional.
 - (b) Adanya peraturan yang mengatur bahwa tidak bolehnya untuk melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dihotel, sementara peserta yang diundang berasal dari Kabupaten/Kota sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

- (c) Belum maksimalnya Pelaporan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) oleh Kabupaten/kota secara periodik kepada Gubernur C.Q Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan solusi kedepan pelaporan dari masing – masing Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporannya dengan tepat waktu.
- (d) Belum semua Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan operasional FKDM Kab/Kota,Kecamatan,Desa/Kelurahan.
- (e) Dengan Solusi Kedepan agar dapat tersedia dana untuk kegiatan dimaksud pada masing – masing FKDM Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi.

10)Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi:

- (a) Kurangnya personil untuk melakukan penyelidikan,pemantau dan mediasi konflik.
- (b) Kurangnya personil yang telah mengikuti latihan mediasi konflik.
- (c) Kurangnya aparatur yang menguasai ITI untuk membuat Peta Rawan Konflik.Dengan Solusi kedepan dapat bertambahnya pegawai yang bisa memahami ITI tentang pembuatan Peta Rawan Konflik .
- (d) Belum maksimalnya Pelaporan Kegiatan Pemantauan Konflik,Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota secara periodik kepada Gubernur C.Q Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Dengan solusi kedepan pelaporan dari masing – masing Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporannya dengan tepat waktu.
- (e) Belum disampaikannya Peta Konflik secara terperinci oleh Kesbangpol Kabupaten/Kota kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

4.1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

4.1.17.1 Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, telah didistribusikan beberapa program dan kegiatan pada masing-masing Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Uraian secara rinci pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut, antara lain;

4.1.17.1.1 Biro Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan pada Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi. Alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.17.182.850.291,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15.801.613.479,- atau (91,96%). Uraian secara rinci program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama

Tujuan pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama adalah terpelihara dan termanfaatnya rumah ibadah; kenyamanan para jamaah dalam beribadah; terciptanya hubungan silaturahmi antar umat beragama dan antar umat seagama; serta terwujud dan terciptanya SDM yang islami dan berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.276.911.000,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.13.836.510.281,- atau (96,91%). Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain;

a) Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan STQ Nasional Tahun 2015

MTQ Provinsi Jambi dilaksanakan di Kota Jambi yang diikuti oleh 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terpilihnya pemenang yang selanjutnya dikirim pada ajang STQN. Output: Terpilihnya pemenang MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang akan dikirim pada ajang STQ Tingkat Nasional. Outcome : peserta MTQ/STQ di Tingkat Nasional.

b) Kegiatan Pondok Pesantren Mandiri dan Pendidikan Luar Sekolah

Pembinaan pondok pesantren mandiri dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, selain itu dalam rangka pembentukan Pontren Mandiri dilakukan pelatihan yang diikuti oleh utusan dari pondok pesantren yang akan dibina menuju mandiri. Hasil dari pelatihan tersebut dievaluasi dan dibuat rekomendasi untuk selanjutnya dibahas dengan instansi terkait. Output dari kegiatan ini yaitu Terlaksananya pembinaan pontren mandiri di Provinsi Jambi, sedangkan Outcomenya yaitu Jumlah pondok pesantren mandiri yang dibina dan pendidikan luar sekolah.

- c) Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Pengelolaan Masjid Agung Al Falah Jambi

Output dari kegiatan ini antarlain terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan/ pengajian rutin lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, adapun Outcomenya adalah Jumlah peserta kegiatan pembinaan keagamaan Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi.

- d) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Haji Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini antarlain Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengiriman TPHD, sedangkan Outcome yaitu banyak Peserta TPHD/TKHD yang dikirim 5 (lima) Orang dan 10.307 jamaah, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelola Pondok Karya Pembangunan (PKP) Provinsi Jambi.

- e) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Persidangan Persekutuan Gereja-Gereja

Koordinasi dan fasilitasi kegiatan perdidangan persekutuan gereja-gereja menghasilkan Output terlaksananya kegiatan rapat-rapat majelis, sedangkan Outcomenya dari hasil rapat tersebut mendapat 1 (satu) rumusan.

2. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

Tujuan dan sasaran Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat adalah: Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera; Meningkatnya wawasan nasionalisme masyarakat sebagai warga NKRI; Tersusunnya program kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat, alokasi anggaran dalam program ini sebesar Rp.2.905.939.291,- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.677.508.788,- atau (92,14%). Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat, maka pada tahun 2015 ditetapkan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Masyarakat

Output pada kegiatan ini adalah Terlaksananya peringatan hari hari besar Nasional di Provinsi Jambi sebanyak 30(tiga puluh) Kali, Outcome : Persentase kehadiran SKPD yang diundang pada peringatan Hari Besar Nasional (100%)

b) Koordinasi dan Fasilitasi Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit.

Output pada kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, Outcome : Tersedianya paket rumusan kebijakan ketenagakerjaan per tahun (1 buku rumusan).

c) Koordinasi Pembinaan Perempuan

Output yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah Terlaksananya Rakor bidang perempuan dan KB, Outcome : Jumlah paket rumusan hasil koordinasi pembinaan perempuan dan KB yang dibuat antara SKPD Provinsi Jambi dengan Kabupaten Kota.

d) Koordinasi Rapat Teknis dan Penyusunan Program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi

Output dalam kegiatan ini Terlaksananya Rapat Teknis dan Penyusunan Program Bidang Kesramas dalam Provinsi Jambi, Outcome : tersusunnya rumusan Rapat Teknis Bidang Kesramas (1 buku rumusan).

e) Koordinasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat, Jambore UKS dan Pembinaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah

Output dari kegiatan ini Terpilihnya pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tk. Provinsi Jambi yang mewakili Provinsi Jambi pada tingkat Nasional, Outcome : Jumlah sekolah yang masuk 6 (enam) besar pada LSS tingkat nasional (1 sekolah).

f) Pendidikan, Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Peningkatan Kesegaran Jasmani

Output pada kegiatan ini Terlaksananya senam kesegaran jasmani bagi aparatur sebanyak 125 kali sedangkan Outcomenya Persentase SKPD yang mengikuti senam kesegaran jasmani aparatur (100%)

g) Pelayanan Kesehatan Poliklinik Kantor Gubernur Jambi

Pelayanan kesehatan pada Poliklinik Kantor Gubernur Jambi dilaksanakan melalui penyediaan obat-obatan serta pengadaan alat kesehatan. Kegiatan ini tidak memiliki Output dan Outcome.

h) Koordinasi dan Pembinaan KB di Provinsi Jambi

Adanya Output pada kegiatan ini Terlaksananya koordinasi KB di Provinsi Jambi, Outcome : Jumlah paket hasil rumusan KB yang dibuat antara Biro Kesramas dengan SKPD terkait Kabupaten/ kota (1 buku rumusan).

- i) Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penanggulangan Permasalahan Sosial Masyarakat Kepada Pengurus LSM, ORSOS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dan lain lain

Adapun Output pada kegiatan ini Terlaksananya rakor penanggulangan permasalahan sosial masyarakat kepada Pengurus LSm, ORMAS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Gurudan Pembinaan di Provinsi Jambi sedangkan tersusunya 1 rumusan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat.

- j) Kunjungan Kerja Legiun Veteran Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini Terlaksananya kunjungan kerja dan koordinasi legiun veteran Provinsi Jambi, Outcome : Tersedianya paket rumusan kebijakan legiun veteran per tahun (1 buku rumusan)

- k) Koordinasi Komda Lansia dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi.

Adapun Output dari kegiatan ini Terlaksananya koordinasi Komda Lansia di Provinsi Jambi sedangkan Outcomenya Tersedianya paket rumusan kebijakan koordinasi Komda Lansia pertahun (1 buku rumusan).

- l) Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini terlaksananya 16 kali Penyuluhan P4GN dan Rakor di Provinsi Jambi dengan Outcome tersusunya 1 rumusan penyuluhan p4gn.

- m) Koordinasi dan Pemantauan Ke Transmigrasi di 9 Kabupaten dalam Provinsi Jambi

AdanyaOutput dari kegiatan ini Terlaksananya pemantauan ke masyarakat dan desa Provinsi Jambi dengan Outcome : Jumlah masyarakat transmigrasi yang dibina (750 orang).

3. Hambatan dan Solusi

Dalam menjalankan program dan kegiatan, Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi menghadapi berbagai macam persoalan yang harus diatasi. Sejumlah hambatan dan kendala beserta dengan langkah yang bisa diambil, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Haji Provinsi Jambi

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Haji Provinsi Jambi terkendala dengan belum terlaksananya Embarkasi Haji Antara dikarenakan belum mendapat surat keputusan dari Kementerian Agama RI.

2) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Persidangan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Provinsi Jambi

Kendala yang dihadapi adalah terdapat belanja modal yang tidak terealisasi. Adapun Solusinya bahwa pengadaan Barang yang akan diserahkan ke Pihak ketiga sebaiknya tidak dimasukkan kedalam belanja modal melainkan kedalam barang pakai habis.

3) Kegiatan Peningkatan Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Masyarakat

Kendala yang dihadapi adanya keterbatasan waktu dan terdapat dualisme kepemimpinan yang terjadi di pusat sehingga menyulitkan untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial masyarakat.

4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Kantor Gubernur Jambi

Kegiatan tersebut terkendala dengan tidak diadakan Obat-obatan tahun 2015 dan tidak terdapat lagi pelayanan kesehatan terhitung mulai bulan Juli 2014 dikarenakan tim medis poliklinik kantor Gubernur Jambi pindah tugas/mutasi ke Rumah Sakit Umum sehingga Poliklinik Kantor Gubernur Jambi ditutup.

5) Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketrasmigrasian dalam Provinsi Jambi.

Kegiatan koordinasi dan pemantauan ketrasmigrasian terkendala dengan waktu. Berdasarkan kendala dan hambatan tersebut maka perlu ditingkatkan koordinasi intensif serta adanya evaluasi terkait dengan hasil rumusan atau keputusan rapat.

4.1.17.1.2 Biro Hukum

Pada tahun 2015, Biro Hukum Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.186.364.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp. 3.002.363.758,- atau 98,63% yang diarahkan, untuk melaksanakan 5 (lima) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Secara umum program ini bertujuan untuk mendisain, mengelola barang dan mengembangkan sistem administrasi umum yang terdiri atas persuratan, pelaporan dan pengarsipan di lingkungan Biro Hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2015 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp.285.000.000,- telah terealisasi sebesar (99,55%) dan terserap sebesar Rp.283.727.950,-.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu dari bagian yang berfungsi dalam mengelola Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. pada prinsipnya program ini bertujuan menata, mengkaji, mengevaluasi dan mensinkronisasikan peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur Jambi terhadap penerapan peraturan tersebut dan mengkaji keberlakuan peraturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pun yang baru.

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan dalam hal pelaksanaan Kegiatan ini telah terserap anggaran sebesar Rp.177.601.900,- dan sisa pagu anggaran Rp.22.398.100,- dengan persentase 88,80 %. Untuk mewujudkan tujuan dari program ini maka dibuatlah dalam 2 bentuk kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi, Kegiatan ini memiliki pagu anggaran Rp.100.000.000,- pada kegiatan ini telah mengevaluasi (8) Peraturan Daerah Provinsi Jambi bersama dinas instansi terkait dengan terget Evaluasi (8) Perda, dan dalam hal pelaksanaan Kegiatan ini telah terserap anggran sebesar Rp.92.391.400,- dengan persentase (92,39%).
- 2) Kegiatan Evaluasi/Pengendalian pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi, kegiatan ini memiliki dana Rp.100.000.000,- kegiatan ini telah mengevaluasi (8) Peraturan Gubernur Provinsi Jambi bersama dinas instansi terkait dengan terget Evaluasi(8) Pergub, Kegiatan ini telah menyerap anggaran sebesar Rp.85.210.500,- dan sisa pagu anggaran Rp.14.789.500,- dengan persentase (85,21 %).

3. Program Perencanaan Hukum

Program Perencanaan Hukum secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang akan dibentuk melalui perencanaan yang tepat dan akurat, untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2015 Rp.185.232.050,- dan sisa pagu anggaran Rp.66.413.750,- dengan persentase (82,82%) dalam 6 Kegiatan dengan output :

- 1) Tersusunnya 1 Dokumen Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemantapan Prolegda.
- 2) Terevaluasinya 8 Pergub dalam Kegiatan Penyelenggaraan Forum Diskusi Publik Dan Konsultasi Publik Penyusunan Ranperda Provinsi.
- 3) Tersusunnya 8 Perda dalam Kegiatan Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur.
- 4) Terealisasinya 530 SK dalam Kegiatan Penelitian/Pengkajian terhadap Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur Jambi.
- 5) Telah Diklarifikasi 45 Perda Kab/Kota.
- 6) Tersusunnya 67 Ranperda/Perda Kab/kota Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Evaluasi dan inventarisasi Ranperda/Perda Kab/kota Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.

4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum

Program Peningkatan Hukum Dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum secara umum bertujuan untuk peningkatan kesadaran hukum aparatur pemerintah dan masyarakat dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi akibat pelaksanaan tugas pemerintahan dan memberi akses sebesar besarnya kepada kepada aparatur pemerintah masyarakat dalam mendapatkata informasi hukum dan produk hukum daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.569.845.000,- yang terealisasi sebesar Rp.1.504.513.350,- atau (95,84%) dalam 6 Kegiatan dengan output :

- 1) Penyelenggaran Lokakarya/workshop RANHAM 1 kali kegitan dan Lomba Kadarkum Kab/Kota 1 Kali.
- 2) Memberikan kuasa hukum terhadap penanganan perkara 9 kasus Hukum Kegiatan ini juga melakukan pengkajian sengketa hukum dan koreksi terhadap perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama.
- 3) Melaksanakan penyuluhan hukum/pembinaan masyarakat taat hukum di Kabupaten dalam provinsi jambi dengan nara sumber dan materi yang disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri, Perguruan Tinggi Universitas Jambi (UNJA), Kepolisian, Kejaksaan Tinggi.
- 4) Melaksanakan RAKOR kabupaten/Kota dalam Provinsi jambi sebanyak 1 kali.

- 5) Melakukan Sosialisasi Produk Hukum melalui media cetak sebanyak 6 kali.
- 6) Menghimpun dan menyebarluaskan produk hukum Provinsi Jambi dalam bentuk buku himpunan ke.33 Provinsi di Indonesia, Pemerintah Kab/Kota, SKPD Provinsi, Instansi Vertikal dan Masyarakat serta terdokumentasinya produk hukum Provinsi Jambi Tahun 2015 dalam bentuk cetak himpuna sebagai berikut :
 - a) Perda Provinsi Jambi :
 - b) 50 buah buku himpunan Peraturan Daerah.
 - c) Peraturan Gubernur Jambi.
 - d) 50 buah buku himpunan Peraturan Gubernur.
 - e) Keputusan Gubernur Jambi.
 - f) 50 buah buku himpunan Keputusan Gubernur

5. Program Pengkajian Kasus HAM

Program Pengkajian Kasus HAM secara umum bertujuan untuk menginfentarisir, mengkaji dan mengadvokasi beberapa kasus HAM yang terjadi dalam Provinsi Jambi.

Untuk mencapai tujuan tersebut anggaran yang dialokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp.78.900.200,- atau (98,63%) dalam 1 Kegiatan dengan inventarisasi kasus pelanggaran HAM pada 10 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi ada satu kasus yang teridentifikasi adanya pelanggaran HAM yaitu kasus meninggalnya 12 orang SAD (Suku Anak Dalam) akibat pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktifitas perusahaan yang beroperasi di kabupaten Batang Hari.

4.1.17.1.3 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

Pada tahun 2015, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000.000,- dengan penyerapan dana sebesar Rp. 2.776.857.450,- atau tingkat realisasi sebesar 99,17%. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 19 kegiatan pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2015 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 350.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 339.315.000,- (96,95%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Administrasi Biro.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mendisain, mengelola barang dan mengembangkan sistem administrasi umum yang terdiri atas persuratan, pelaporan dan pengarsipan di lingkungan Biro.

2) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Pegawai

Pada dasarnya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil yang ada pada biro agar terciptanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan kantor demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

Tujuan dari program ini ialah untuk memfasilitasi dan mendukung pembangunan di bidang penanaman modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan. Untuk mencapai tujuan maka dilaksanakanlah beberapa kegiatan, alokasi dana untuk kegiatan ini ialah sebesar Rp.796.857.450,-, untuk mendukung tercapainya tujuan program tersebut dilakukan beberapa kegiatan anantara lain :

1) Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Koperindag.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya laporan pelaksanaan kegiatan dengan Outcomenya tersedianya data dalam betuk buku laporan dan Bahan rumusan selama 1 (satu) tahun sebanyak 11 (sebelas) eksemplar.

2) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang BUMD/BUMN.

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dan Monitoring Kupem ke Kab/Kota se-Provinsi Jambi dengan *Outcome* adanya buku laporan Perekonomian tahun 2015, dalam rangka peningkatan dan pengembangan BUMN/BUMND

3) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring di Bidang Penanaman Modal.

Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya data penanaman modal baik PMA maupun PMDN di Provinsi Jambi dan tersusunnya data Penanaman Modal, Baik PMDN Maupun PMA.

4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring di Bidang Pendapatan dan Keuangan

Output kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan *outcome* Tersedianya bahan laporan untuk keperluan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendapatan keuangan di Provinsi Jambi.

5) Kegiatan Operasionalisasi Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Output dari kegiatan ini yaitu Tersusunnya Buku Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2015 sedangkan Outcomenya berupa Laporan operasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan ini tidak dapat terealisasi dikarenakan kurangnya koordinasi antara SKPD/Bidang Tehnis yang terkait dalam hal penyampaian data sehingga Sub. Bagian tidak dapat memutuskan kebijakan secara tepat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah masih kurangnya fasilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan. Dimana sebagai Biro yang baru terbentuk masih perlu dilengkapi dengan ruang kerja dan peralatan kerja yang memadai. Untuk menghadapi itu, solusi yang diambil ialah mengoptimalkan ruangan yang ada dan mengusulkan perbaikan untuk tahun berikutnya.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Tujuan dari program ini ialah untuk meningkatkan promosi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi peningkatan PDRB dan akan menstimulasi masuknya investasi-investasi dari luar ke dalam wilayah Provinsi Jambi. Adapun sasaran program ini ialah terlaksananya partisipasi Provinsi Jambi dalam ajang promosi tingkat nasional (Pekan Raya Jakarta) serta terpantaunya kemajuan pembangunan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

- 1) Fasilitasi koordinasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata, dengan alokasi dana sebesar Rp.130.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.126.581.500,- (97,37%).
- 2) Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi pada Pekan Raya Jakarta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.473.250.000,- (94,65%). Jika digabungkan, maka tingkat realisasi rata-

rata Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata ialah sebesar 95 %.

Output yang diperoleh melalui dua kegiatan tersebut antara lain terlaksananya keikutsertaan Provinsi Jambi pada ajang promosi nasional PRJ dan terlaksananya koordinasi pembangunan di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan *outcome* yang diperoleh antara lain meningkatnya promosi daerah dan tersedianya data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang tersebut. Di sisi lain *benefit* dari terlaksananya kegiatan ini ialah terkoordinirnya pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatnya arus pariwisata ke Provinsi Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah masih belum memadainya dukungan anggaran bagi pelaksanaan program tersebut. Untuk memecahkan persoalan tersebut, solusi yang telah dilakukan ialah bahwa kami telah mengusulkan tambahan anggaran biaya bagi pelaksanaan program tersebut untuk tahun anggaran 2015. Untuk meningkatkan pelayanan kami juga telah bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Jambi dan Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah.

4. Program Koordinasi dan Pembinaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam

Tujuan dari Program ini ialah untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup. Sasaran program ini ialah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap pembangunan sektor tersebut di Provinsi Jambi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan Program tersebut antara lain:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi.
- 2) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang ESDM.
- 3) Kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi.
- 4) Kegiatan koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- 5) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

- 6) Kegiatan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Penurunan Emisi Karbon/REDD+ di Provinsi Jambi.
- 7) Kegiatan koordinasi dan pembinaan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan.
- 8) Kegiatan koordinasi pembinaan pembangunan bidang pertanian.

Output pelaksanaan Program ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya, antara lain :

- 1) Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, ketahanan pangan, penyuluhan, peternakan, kelautan dan perikanan.
- 2) Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi.
- 3) Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Sumber Daya Alam, ESDM, kehutanan, perkebunan dan Lingkungan Hidup
- 4) Terkoordinirnya program CSR terutama pada perusahaan SDA di Provinsi Jambi
- 5) Terlaksananya partisipasi dalam pembinaan bidang pembangunan pertanian tahun 2015.
- 6) Terpantaunya kegiatan terkait penurunan emisi karbon/ REDD+ di Provinsi Jambi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut antara lain keterbatasan data dan informasi dari sumber data dan masih kurangnya pemahaman aparat terhadap aturan kehutanan setempat. Agar kendala tersebut dapat teratasi dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang maka perlu ditingkatkan langkah-langkah koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif antar pihak-pihak terkait (*stakeholders*), serta perlu sosialisasi kembali mengenai peraturan-peraturan kehutanan untuk mencegah konflik lahan dan sebagainya.

5. Program pembinaan dan fasilitas pembangunan di bidang PKPLH

Output dari kegiatan ini yaitu berupa Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi, dengan outcomenya yaitu rumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Lingkungan Hidup.

4.1.17.1.4 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama

Total anggaran untuk Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015 pada APBD murni adalah sebesar Rp.2.800.000.000,- dan pada APBD Perubahan mengalami penambahan sebanyak Rp.177.280.000,- menjadi Rp.2.977.280.000,- dengan realisasi serapan dana Biro Administrasi

Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 2.801.168.735,- atau (95,36%) dari total anggaran yang tersedia, yang terdiri dari 3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan, dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan

Tujuan utama dari program ini secara garis besar Terpantaunya tahapan Progress pengendalian fisik APBD di lapangan di tahun 2015, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.863.080.000,- dari anggaran tersebut, telah tercapai realisasi sebesar Rp.1.225.242.500,- atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 65,76%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dalam Program tersebut antara lain:

- 1) Koordinasi Penyusunan dan pengendalian Program Pembangunan di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi

Ouput dari kegiatan ini tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang berupa: Renja Kegiatan Biro APKS, Buku Program/Kegiatan 2014, Laporan Akhir Tahun 2014, LPPD Biro Laporan 6 Januari Biro APKS, LPPD Biro APKS dengan Outcome Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan secara optimal sesuai rencana yang telah diprogramkan.

- 2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan

Output dari kegiatan ini terhimpunnya data laporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan program APBD berupa Buku Laporan Pengendalian dengan outcome Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan secara keseluruhan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- 3) Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini terlaksananya Pendataan beberapa kegiatan baik dari segi Pembangunan, Pendidikan, Keagamaan, kemasyarakatan dan lain-lain di Wilayah Provinsi Jambi, dengan Outcome pembinaan dan pengawasan pada kegiatan-kegiatan APBN yang dilaksanakan di Wilayah Provinsi Jambi.

- 4) Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini terlaksananya Fasilitasi Kesekretariatan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi berupa tertib administrasi Outcome Terpantaunya tahapan progress pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi

- 5) Fasilitasi Administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama berupa buku Laporan dengan Outcome terwujudnya tertib Administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama.

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pengadaan Barang/Jasa

Capaian Program terkoordinirnya rencana pengembangan infrastruktur jalan dan pengairan, terpantaunya pengelolaan tata ruang dan pemukiman serta pelaksanaan JAKON, terpantaunya penyelenggaraan sektor perhubungan dan jasa transportasi serta terpantaunya pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan anggaran sebesar Rp.1.086.900.000,- dari anggaran tersebut, telah tercapai realisasi sebesar Rp.1.041.605.000,- atau tingkat penyerapan anggaran sebesar (95,83%).

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dalam Program tersebut antara lain:

- 1) Koordinasi Pembangunan bidang Pekerjaan Umum Bina Marga di Provinsi Jambi.

Output dari kegiatan ini terkoordinasinya penyelenggaraan dan pengelolaan bidang Bina Marga dan tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga bidang pekerjaan umum lainnya Buku Laporan sedangkan Outcomenya yaitu terwujudnya pengelolaan bidang pekerjaan umum yang sinergis di Provinsi Jambi serta pembinaan jasa konstruksi yang berkesinambungan.

- 2) Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang perhubungan

Output dari kegiatan ini terpenuhinya data/informasi perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan, berupa Buku laporan dengan Outcome terciptanya koordinasi antara Dinas/Instansi terkait dalam upaya meningkatkan tertib penyelenggaraan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

3) Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Output dari Kegiatan ini terpantaunya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku dengan Outcome terciptanya proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan terciptanay administrasi yang tertata, teratur dan akurat.

4) Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya di Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini terkoordinasinya penyelenggaraan dan pengelolaan bidang Cipta Karya dan tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan sedangkan Outcomenya yaitu terwujudnya pengelolaan bidang pekerjaan umum yang sinergis di Provinsi Jambi serta pembinaan jasa konstruksi yang berkesinambungan.

5) Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Pengairan dan Pemukiman di Provinsi Jambi

Output dari kegiatan ini terpenuhinya data/informasi Pengairan dan Pemukiman berupa Buku laporan dengan Outcome terciptanya koordinasi antara Dinas/Instansi terkait dalam upaya meningkatkan tertib penyelenggaraan sektor Pengairan dan Pemukiman di Provinsi Jambi.

3. Permasalahan dan Solusi

a) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Renja Biro, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.
- 2) Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam menunjang intensitas kerja.
- 3) Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

- 4) Belum adanya standar pelayanan minimal dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
- 5) Masih sering terlambatnya penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) dari masing- masing SKPD sebagai bahan evaluasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Meningkatkan kemampuan SDM yang tersedia dengan mengikuti diklat dan Bimtek di dalam maupun luar Provinsi Jambi.
 - 3) Melaksanakan Rapat Teknis Bidang Administrasi Pembangunan Kab/Kota lingkup Provinsi Jambi, sebagai forum dalam menyampaikan informasi yang menunjang akselerasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.
 - 4) Perlu dibuat suatu standar minimum dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD.
 - 5) Perlu adanya koordinasi/tindak lanjut dalam pelaksanaan penyampaian bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).
- b) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang PU dan Perhubungan

Secara umum, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan kab/kota, belum optimal disebabkan kab/kota belum membentuk Tim Pembinaan Jasa Konstruksi.
- 2) Belum terakomodirnya Pembinaan dan Fasilitasi Bidang infrastruktur jalan yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, karena terbatasnya personil dan anggaran.
- 3) Masih banyaknya masalah dalam Pembinaan Sektor Perhubungan dan Jasa Transportasi.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja program ini pada masa yang akan datang adalah :

- 1) Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kab/Kota.

2) Menjadwalkan secara periodik Rapat Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota.

3) Mengkoordinir dan mensinergikan program dan kegiatan dinas/instansi untuk kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang.

c) Program Pembinaan Pembangunan di Bidang Kerjasama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja yang baik, harmonis, efektif dan efisien serta persentase terpantaunya pelaksanaan kerjasama pembangunan dalam kegiatan pembangunan di Wilayah Pemerintah Provinsi Jambi, dengan anggaran sebesar Rp.615.400.000,- dari anggaran tersebut, telah tercapai realisasi sebesar Rp.534.321.235,- atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 86,83%. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dalam Program tersebut antara lain:

1) Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swasta

Output dari kegiatan ini terlaksananya rapat koordinasi teknis yang menunjang terbentuknya suatu komitmen dalam melaksanakan pekerjaan dan terhimpunnya pendataan pekerjaan pembangunan dengan Outcome tersusunnya bahan rumusan kebijakan di bidang kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam bentuk Buku Laporan pertriwulan.

2) Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama dalam Negeri

Output dari kegiatan ini terlaksananya rapat koordinasi teknis yang menunjang terbentuknya suatu komitmen dalam melaksanakan pekerjaan dan terhimpunnya pendataan pekerjaan pembangunan dengan pihak Luar Daerah Provinsi Jambi dengan Outcome tersusunnya Program/Kegiatan kerjasama seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi dalam bentuk Buku Laporan.

3) Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama Luar Negeri

Output dari kegiatan ini terlaksananya ajang promosi daerah serta terlaksananya rapat koordinasi teknis yang menunjang terbentuknya suatu komitmen dalam melaksanakan pekerjaan dan terhimpunnya pendataan pekerjaan pembangunan dengan pihak Luar Negeri sedangkan Outcomenya tersusunnya bahan rumusan kebijakan bidang kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Buku Laporan.

4.1.17.1.5 Biro Humas

Biro Humas dan Protokol dalam tahun 2015 mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat, penyaringan publikasi dan dokumentasi, pelayanan media centre, media cetak dan elektronik serta keprotokolan, sandi dan pertelekomunikasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan dari 4 program dan 11 kegiatan yang ada pada Biro Humas dan Protokol telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembinaan media lokal, sehingga output dari program ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan alokasi anggaran Rp. 2.025.214.000,- realisasi serapan anggaran mencapai Rp. 2.015.543.995,- (99,52%). Adapun kegiatan utamanya bahan bacaan bagi aparatur Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015 dan Outcome program adalah Meningkatnya pengetahuan dan kinerja Aparatur.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Secara umum tujuan dari program ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas Instansi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dari tugas keprotokolan. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.194.800.800 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar mencapai Rp.1.046.806.247 (87,61%), adapun output dari program ini adalah terlaksananya penerimaan dan pelayanan tamu pada tahun 2015 di Provinsi Jambi dengan baik, lancar dan aman, terlaksananya kegiatan acara dan keprotokolan sesuai aturan. Outcome Program adalah Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Pemerintah Daerah dan Pelayanan Acara Keprotokolan.

3. Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pembangunan di Provinsi Jambi, melalui penyediaan sarana publikasi dan informasi masyarakat untuk itu dialokasikan dengan sebesar Rp.13,906,880,700,- dengan

tingkat realisasi serapan anggaran mencapai Rp.13,632,804,560 (98,03%) dari hasil pelaksanaan program ini diperoleh hasil :

- 1) Ouput kegiatan : Tersedianya bahan berita pada tahun 2015 bagi Media Cetak, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi pada tahun 2015 terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat dan terselenggaranya Peringatan Hari Pers Nasional di Provinsi Jambi pada tahun 2015
- 2) Outcome program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang program Pemerintah.

4. Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkata Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi serta penerimaan, pengiriman dan penyampaian berita sandi dan berita biasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.604.500,- dengan tingkat capaian serapan anggaran sebesar Rp.329.597.400,- (66,77%), output yang diperoleh adalah tercapainya penyampaian berita dengan cepat dan tepat dan outcomenya berupa meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

4.1.17.1.6 Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian, pada Tahun 2015 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3,240,000,000.- dalam pelaksanaan telah terealisasi Rp.2,973,672,000.- (91,78%), anggaran pada Tahun 2015 ini di distribusikan untuk mendukung 4 (empat) program dan 18 Kegiatan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 1) Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Kegiatan Rapat Kerja APPSI pada Tahun 2015 mendapat alokasi anggaran Rp.153.861.300,- dengan realisasi anggaran sejumlah Rp.110.826.294,- atau (72,03%) dan dengan realisasi fisik 100%. Ouput pada kegiatan ini terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Raker APPSI di Provinsi

Jambi dengan Outcome terkoordinasi dan terkendalinya lintas sektor dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Permasalahan terjadi karena adanya ketidak selarasan antara jadwal Raker yang disusun oleh Biro Pemerintahan dengan Jadwal Raker APPSI yang disusun oleh Sekretariat APPSI di Jakarta sehingga Penyelenggaraan Raker APPSI di Provinsi Jambi belum dapat dilaksanakan. Solusi kedepan yang akan dilaksanakan antara lain mengusulkan kepada Sekretariat APPSI tentang Perlunya disusun jadwal Raker APPSI yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Raker APPSI dalam waktu satu tahun.

2. Program Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan untuk melakukan beberapa kegiatan, antarlain:

1) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama Rupabumi dan mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi, baik untuk kepentingan pembangunan regional maupun nasional. Besar anggaran dari kegiatan ini yaitu Rp.130.162.000.- untuk kegiatan Pembinaan dan Bimtek Pembakuan Nama Rupabumi terealisasi anggaran sejumlah Rp. 129.969.600,- atau dengan (99,85 %) dan realisasi fisik 100%.

Tidak terdapat permasalahan pada kegiatan ini dan pada Tahun 2015, Provinsi Jambi meraih Pembina Terbaik II dalam Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi unsur alami tingkat Provinsi Jambi.

2) Kegiatan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga

Tujuan dari kegiatan penataan batas antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga adalah untuk mencegah terjadinya konflik, tertatanya wilayah administrasi pemerintahan guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum. Pada Tahun 2015 alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 333.810.000.- denganrealisasi anggaran kegiatan sejumlah Rp. 332.209.200,- atau dengan (99,52 %) dengan realisasi fisik 100%.

3) Kegiatan Fasilitas penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Tujuan dari kegiatan fasilitas penyelesaian Batas antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi adalah untuk mencegah terjadinya konflik, tertatanya

wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/kota guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum, alokasi anggaran Rp.318.047.450.- realisasi anggaran kegiatan sejumlah Rp.316.446.900,- atau dengan (99,50%) dengan realisasi fisik 100%.

Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah yang dipegang oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi dilaksanakan 3 x (kali) yaitu pada tanggal 16 September 2015, 18 s.d 20 Oktober 2015 dan tanggal 21 s.d 23 Oktober 2015.

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan Otda di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

Tujuan program ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menanamkan semangat kebangsaan, keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.198.611.250 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.1.978.842.934,- atau dengan realisasi anggaran (90%).

Anggaran pada Tahun 2015 pada program ini di distribusikan untuk mendukung 11 Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib.
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
- 3) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Provinsi Jambi.
- 4) Kegiatan Penyusunan/penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Bintek LPPD.
- 5) Kegiatan Administrasi di Bidang Pemerintahan.
- 6) Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu dalam Provinsi Jambi.
- 7) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah
- 8) Kegiatan Konsultasi dan Fasilitasi Pelayanan Urusan Kedinasan
- 9) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 11) Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan.

Pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut diperoleh output sebagai berikut :

- 1) Terciptanya kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur serta terciptanya stabilitas daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Meningkatnya pemahaman aparat penyelenggara administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- 3) Meningkatnya optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan SIAK di Kab/kota sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan.
- 4) Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di provinsi Jambi.

Secara umum masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

- 1) Dalam kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, banyak SKPD yang tidak memberikan data secara lengkap terutama dalam hal pengisian IKK (Indikator Kinerja Kunci).

Untuk menindak lanjuti masalah tersebut maka diperlukan bimbingan teknis bagi SKPD dalam pengisian IKK dan perlu diadakan sosialisasi tentang prioritas penyusunan LPPD bagi seluruh SKPD. Oleh karena itu kegiatan bintek dan sosialisasi pengisian IKK dalam penyusunan LPPD perlu dianggarkan pada tahun anggaran 2015.

- 2) Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

KTP Elektronik (KTP-el) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

4. Permasalahan

Dalam penerapan KTP Elektronik masih mendapatkan kendala diantaranya sering terjadi kerusakan peralatan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) seperti Server AFIS (Server perekaman KTP-el), peralatan jaringan dan koneksi jaringan pada kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk konsolidasi data pencetakan KTP Elektronik.

5. Solusi

Dikarenakan belum adanya tenaga teknis di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mampu memperbaiki kerusakan peralatan SIAK maka untuk memperbaiki peralatan KTP-el tersebut baik untuk software maupun hardware dikirim ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI.

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2015 program ini mendapat dana sebesar Rp.56.665.600.- dengan realisasi sebesar Rp. 12.299.200.- atau 21,70 %, dengan realisasi fisik 50 % yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.

Permasalahan, realisasi fisik hanya dapat tercapai 50% dikarenakan pada Tahun anggaran 2015 kegiatan Rapat Koordinasi Kependudukan dan catatan sipil dipergunakan untuk persiapan DP4 Pemilihan Gubernur sampai menjadi DPT berhubung Pemilihan Gubernur di tunda pelaksanaannya maka kegiatan Rapat Koordinasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

4.1.17.1.7 Biro Organisasi

Pada umumnya tugas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja aparatur serta melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian Setda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2015, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran APBD dan APBD-P sebesar Rp 2.975.000.000,- yang diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) program dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian dan langkah penataan administrasi tatausaha yang lebih efektif dan efisien serta sistematis dalam rangka terpenuhinya kebutuhan administrasi dan peralatan kepegawaian setda. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 430.000.000,- dan realisasi sebesar 100%. Selain itu, adapun outcome dari program ini adalah terlayannya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100 persen yang didukung oleh output kegiatan yang di dihasilkan adalah terinventarisirnya data PNS di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi baik kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat fungsional teknis, kenaikan gaji berkala, pensiun, izin belajar/tugas belajar, mutasi pegawai, kepengurusan KARIS/KARSU, dan Karpeg. Realisasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.162
Realisasi Kegiatan

Indikator kinerja	Target	Realisasi
Jumlah PNS Naik pangkat	110 org	160 org
Naik pangkat jabatan fungsional	4 org	5 org
Gaji berkala		
Pensiun	220 org	229 org
Izin belajar/tugas belajar	10 org	10 org
Mutasi pegawai	20 org	21 org
KARIS/ KARSU	15 org	15 org
KARPEG	50 org	66 org
CPNS ke PNS	50 org	66 org

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

Selain itu, program ini juga memberikan output terpenuhinya kebutuhanadministrasi dan peralatan kepegawaian setda melalui pembelian ATK (1 paket), belanja cetak (7 paket), belanja modal (8 paket), perjalanan dinas dalam 2 kegiatan.

Secara keseluruhan, program ini tidak mendapat halangan yang berarti, karena hanya merupakan kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan administrasi pelayanan aparatur baik lingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi maupun aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi aparatur lingkup setda terkait dengan kepengurusan administrasi kepegawaian, untuk tahun mendatang perlu difasilitasi dengan penggunaan sistem berbasis IT. Sehingga seluruh proses administrasi kepegawaian dapat terdata dengan baik.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan wawasan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan dana APBD sebesar Rp 95.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 98,05%. Adapun permasalahan yang dihadapi, masih kurangnya dana yang dianggarkan pada program ini, sedangkan aparatur yang mengajukan permohonan bantuan untuk mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, dan bintek relatif cukup banyak. Pada tahun 2015 program ini telah terlaksana dengan maksimal dengan tingkat capaian fisik 98,05%, dengan indikator capaian yakni jumlah PNS yang diberikan bantuan kontribusi mencapai target sebanyak 59 (empat puluh lima) orang dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Pada tahun 2015, program ini mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp 385.000.000,- dengan realisasi sebesar 98,68 %. Program ini dituangkan dalam kegiatan pengkajian/rekomendasi staf ahli bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran staf ahli dalam pemberian kajian dan rekomendasi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dapat dijadikan bahan pendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Adapun output yang diharapkan melalui program ini adalah pelaksanaan *focus group discussion* dari masing-masing staf ahli gubernur Jambi serta pelaksanaan rakor staf ahli se-provinsi Jambi yang pada akhirnya akan melahirkan kajian/rekomendasi staf ahli sebagai bahan pendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, program ini belum dapat berjalan maksimal dikarenakan terjadinya pengurangan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya, sehingga FGD staf ahli belum dapat terlaksana dan hanya mencapai 1 (satu) kajian/rekomendasi staf ahli.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur secara umum bertujuan untuk mendukung penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, melalui program ini hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja satudiharapkan dapat dimanfaatkan dalam penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pada tahun 2015, telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 505.000.000,- dengan realisasi sebesar 99,89%. Adapun output yang diharapkan melalui program ini adalah tersusunnya peraturan gubernur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tersusunnya peraturan gubernur tentang jabatan fungsional teknis, serta terlaksananya Bimtek Standar Kompetensi Jabatan.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah berhasil menyelesaikan target yang telah diberikan dengan terbitnya 7 Peraturan Gubernur Jambi tentang Analisis Jabatan (Dinas Perhubungan, Disbudpar, Disperindag, Diskominfo Badan Ketahanan Pangan, Dsihut, dan Balitbangda) Peraturan Gubernur Jambi tentang Jabatan Fungsional Teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian analisis jabatan dan analisis beban

kerja adalah masih kurangnya SDM yang mampu menyusun analisis beban kerja dan analisis beban kerja, serta panjangnya tahapan dalam penyusunan instrumen anjab ini menyebabkan proses penyusunan berjalan lambat. Untuk itu, sebagai solusinya, diperlukan pembekalan yang memadai terhadap SDM yang ada melalui bimtek/kursus analisis jabatan dan analisis beban kerja.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan, Peraturan Daerah;

Pada tahun 2015 ini, untuk mendukung program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah telah dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 375.000.000,- dengan realisasi sebesar 99,35 %. Adapun output yang diharapkan pada program ini antara lain : tersusunnya LAKIP Provinsi Jambi tahun 2015, LAKIP Setda, LAKIP Biro, terlaksananya pembinaan SAKIP ke kab/kota,; terevaluasinya OPD kab/kota; dan terlaksananya evaluasi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya program ini tidak mengalami kendala yang berarti, hampir seluruh target yang telah ditetapkan berhasil diselesaikan dengan baik. Tetapi terdapat satu kinerja kegiatan yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan RPP 41 tahun 2007 Hal ini disebabkan karena belum ada penetapan tentang RPP 41 tahun 2007 dari pemerintah pusat sehingga sosialisasi terhadap perubahan peraturan pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan.

6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

Pada tahun 2015 ini, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dialokasi anggaran APBD sebesar Rp 165.000.000,- dengan realisasi sebesar 98,33%. Program ini bertujuan mewujudkan tertib tatalaksana pemerintahan yang baik. Adapun output yang diharapkan adalah terlaksananya evaluasi terhadap UPTD/B lingkup Provinsi Jambi. Evaluasi terhadap UPTD/B lingkup Provinsi Jambi bertujuan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2015 Biro Organisasi telah melaksanakan evaluasi terhadap 11 UPTD/B di lingkup Provinsi Jambi yakni UPTD/B Dispenda pada Kota Jambi, Kabupaten Ma. Jambi, Tanjab Barat, Batanghari, Sarolangun, Merangin, dan Bungo, Tahura, Labkes, Balai Benih Ikan, serta Panti Tresna Werdha.

7. Program Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2015, program reformasi birokrasi mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp 814.000.000,- dengan realisasi sebesar 99,77%. Pelaksanaan program reformasi birokrasi bertujuan untuk mensinergikan program daerah

dengan program yang telah digulirkan oleh Bapak Presiden RI pada tahun 2009 - 2014. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik program ini karena sangat bersentuhan langsung dengan tugas pokok dan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dalam 9 program mikro yang terkandung di dalamnya. Untuk mendukung keberhasilan program ini, telah dilakukan berbagai upaya yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Adapun output dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya 1 kali workshop LHKPN, penandatanganan pakta integritas 100%, pembinaan AD-PPK 11 Kab/Kota, pelaksanaan monitoring, evaluasi reformasi birokrasi Provinsi Jambi 2013-2017, tersusunnya 1 Pergub pakaian dinas, 1 Pergub SOP Administrasi Pemerintahan, tersusunnya LAKIP Provinsi Jambi, LAKIP Biro Organisasi, , dan 1 kali sosialisasi Kepgub Budaya Kerja. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan program ini tidak menemukan kendala yang berarti.

Terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan survei IKM, kurun waktu 2015 ini telah dilakukan survei IKM terhadap seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dari hasil pengolahan data, diperoleh data rata-rata IKM Provinsi Jambi sebesar 75,90 dengan predikat B.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada tahun 2015, program peningkatan kualitas pelayanan publik mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp 206.000.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Melalui program ini, dilaksanakan pembinaan terhadap 2 (dua) unit pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi maupun Kab/Kota dengan total keseluruhan sebanyak 22 unit pelayanan publik. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik dengan tingkat realisasi capaian sebesar 100%.

Capaian keberhasilan program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi tahun 2015 dalam rangka menunjang terwujudnya Jambi EMAS 2015 diwujudkan dalam program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum dibidang kesadaran hukum kelembagaan dan peraturan daerah,

Diimplementasikan dalam berbagai upaya, yakni melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi, kegiatan ini dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jambi dengan melakukan evaluasi terhadap 12 Tupoksi SKPD serta dilakukan evaluasi 11 UPTD/B SKPD Provinsi Jambi.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan Jambi Emas 2015, pada tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi senantiasa melakukan pembinaan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota (11 Kab/Kota) sebagai upaya penyempurnaan OPD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dari sisi kelembagaan maupun tupoksi.

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi terhadap Raperda 3 (tiga) Pemerintah Kab/Kota yakni Raperda dari Kab.Bungo, Raperda Kota Jambi, dan Raperda Kab.Sarolangun.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Kegiatan Pembinaan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian PAN dan RB mengharapkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengikuti Kompetisi Inovasi pelayanan publik.

Kompetisi ini ditujukan untuk mendorong instansi pemerintah pusat maupun daerah agar dalam melakukan inovasi pelayanan publik lebih focus, terarah, mendalam dan berkesinambungan serta melakukan evaluasi sejauhmana upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.

Bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah dengan mendorong SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kab/Kota untuk menciptakan inovasi serta mengikuti kompetisi tersebut. Upaya Pemerintah Provinsi Jambi pun tidak sia-sia, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan apresiasi dan menyerahkan penghargaan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik pada saat Musrenbangnas tahun 2015.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Ruang Birawa Menara Bidakara Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan pada hari Rabu 29 April 2015. Dari Top 25 Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi pemenang tersebut, 2 inovasi merupakan inovasi yang lahir dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, yakni Taman Budaya Jambi (Provinsi Jambi) dan Klinik Lansia Puskesmas Putri Ayu (Kota Jambi). Penghargaan tersebut telah diterima langsung oleh Gubernur Jambi dan Walikota Jambi di Jakarta.

Oleh sebab itu, pada masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Jambi perlu mendorong SKPD lingkup Pemerintahnya serta Pemerintah Kab/Kota untuk menciptakan, mempertahankan, serta mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik yang menjadi unggulan agar lebih banyak lagi inovasi yang berkompetisi pada tahun 2016.

3) Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2013-2017

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Provinsi Jambi menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai cara terbaik. Program Reformasi Birokrasi dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Program reformasi birokrasi Provinsi Jambi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, yakni : (1) area perubahan kelembagaan ; (2) area perubahan Tatalaksana ; (3) area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ; (4) area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ; (5) area perubahan Penguatan Pengawasan ; (6) area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (7) area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) area perubahan Pola Pikir (*mindset*) dan Budaya Kerja Aparatur (*cultureset*).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, telah diterbitkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014.

Terdapat 91 program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2013-2017 yang akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada tanggal 8 Oktober telah dilakukan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara offline di kantor Kementerian PAN dan RB RI di Jakarta, dan diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi dengan nilai 59,27 dengan predikat CC / cukup memadai.

Dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2013-2017 juga dilakukan dengan menerbitkan :

- a) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- b) Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penerapan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan cara menyusun petunjuk teknis penerapan budaya kerja lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015.
- c) Peraturan Gubernur Jambi tentang Analisis Jabatan pada SKPD Provinsi Jambi yakni : Dinas Kehutanan, Balitbangda, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kominfo.

4) Implementasi Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Provinsi Jambi Tahun 2015.

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK jangka menengah tahun 2012-2014, pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan setiap tahun.

Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tanggal 13 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah tahun 2015.

Berdasarkan hasil verifikasi oleh Kementerian terkait sebagaimana dalam Aksi Daerah PPK sampai dengan Pelaporan AD-PPK Pemerintah Provinsi Jambi pada B.09 (Bulan September 2015), Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh 7 aksi (target antara) dengan kategori Hijau dengan predikat

memuaskan. Hal ini berarti target aksi sesuai atau mendekati target atau 76-100%). Dari 9 aksi daerah, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat 2 target aksi yang belum tercapai dengan memperoleh kategori kuning atau dengan predikat kurang memuaskan (atau dibawah target 51-75 %). Hal ini disebabkan belum di uploadnya Perda APBD-P tahun 2015 dan RKPD tahun 2016 pada laman Website resmi Pemerintah Provinsi Jambi.

Selain melaksanakan AD-PPK Pemerintah Provinsi Jambi, Tim Verifikasi AD-PPK Provinsi Jambi berkewajiban dalam membina dan memverifikasi AD-PPK Pemerintah Kab/Kota. Oleh sebab itu telah dilaksanakan verifikasi bagi seluruh AD-PPK Pemerintah Kab/Kota. Dari hasil verifikasi terhadap laporan atas realisasi pencapaian 88 aksi yang ditetapkan dalam AD-PPK pada 2 (dua) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten pada pelaporan bulan Agustus 2015 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) 5 Aksi (5,68%) memperoleh kategori Biru atau dengan predikat sangat memuaskan (melebihi target atau >100%).
- b) 34 Aksi (38,63%) memperoleh kategori Hijau atau dengan predikat memuaskan (sesuai atau mendekati target atau 76-100%).
- c) 18 Aksi (20,45%) memperoleh kategori Kuning atau dengan predikat kurang memuaskan (dibawah target atau 51-75%).
- d) 37 Aksi (42,05%) memperoleh kategori Merah atau dengan predikat mengecewakan (jauh dibawah target atau <50%)
- e) 3 Aksi (3,41%) tidak melaporkan target capaian.

AD-PPK Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Oleh karena itu, untuk merealisasikan target capaian yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Jambi perlu mendorong SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan AD-PPK baik yang ada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat merealisasikan pencapaian target sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

5) Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2015

Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2015 merupakan Hari Anti Korupsi Internasional yang disepakati oleh hampir seluruh negara di dunia yang tergabung dalam PBB sepakat untuk mengadakan sebuah Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) di Meksiko. Kesepakatan tersebut diadakan pada tanggal

9 Desember 2003 yang sekaligus di sepakati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia tiap tahunnya. Pada tahun ini, kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) Pembuatan Spanduk Anti Korupsi yang disampaikan kepada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
- b) Pembuatan dan penyebar stiker anti korupsi.
- c) Workshop pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan-Apratur Sipil Negara (LHK-ASN) yang disosialisasikan bagi Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

4.1.17.1.8 Biro Umum

Gambaran Umum Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi mengimplementasikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, Kecermatan dalam Pelaksanaan kegiatan serta Optimalisasi dalam Pengendalian dan Pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang oleh stakeholders. Oleh Karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh Kepala SKPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Pada Tahun 2015 Biro Umum Setda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.35.093.390.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar Rp.31.817.742.262,- atau setara dengan (90,67%) yang diarahkan untuk melaksanakan 4 Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dilingkup Setda Provinsi Jambi yang terdiri dari 12 Kegiatan, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.076.638.800,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.16.004.030.437,- atau terealisasi sebesar (93,72%). Adapun Output yang dihasilkan adalah terwujudnya fasilitas Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur dilingkup Setda Provinsi Jambi yang terdiri dari 7 Kegiatan, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.758.390.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.10.224.356.506,- atau terealisasi sebesar

(95,04%). Adapun Output yang dihasilkan adalah Tersedianya Fasilitas Sekretariat Daerah dan Pimpinan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan sistem pelaporan di Lingkup Setda Provinsi Jambi, capaian pelaporan kinerja dan keuangan, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.239.337.200,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.232.463.200,- atau terealisasi sebesar (97,13%). Adapun Output yang dihasilkan adalah tertata dan tersusunnya pelaporan dengan baik.

4. Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Program ini secara umum bertujuan untuk menunjang Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 4 Kegiatan, untuk mencapai tujuan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.019.024.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.5.356.892.119,- atau terealisasi sebesar (76,32%). Adapun Output yang dihasilkan adalah terwujudnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

5. Secara Umum permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bersikap disiplin atau mematuhi Ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagai upaya solusi pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengintensifkan pengawasan dan melaksanakan peraturan tentang disiplin PNS secara proporsional.

4.1.17.2 Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Institusi Kesekretariatan pemerintahan di Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, maka tugas Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat (1) adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
2. Administrasi Keuangan
3. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4. menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
5. Pelaksanaan tugas - tugas lain dalam rangka membantu kelancaran tugas DPRD

a. Program dan Kegiatan

Sesuai Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah memberikan pelayanan administrasi kepada anggota Dewan, sehingga kegiatan Sekretariat DPRD berkaitan erat dengan kegiatan DPRD. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi tersebut diperlukan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dengan mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2015 Sekretariat DPRD menerima alokasi anggaran sebesar Rp.42.621.825.500.- dengan program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan kapasitas Lembaga DPRD

b. Hasil capaian program dan kegiatan (Target, realisasi, permasalahan dan solusi)

Secara umum gambaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program peningkatan administrasi perkantoran

Tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara umum meningkatkan pelayanan Administasi perkantoran dilingkup sekretariat DPRD yang terdiri dari empat belas kegiatan untuk pelaksanaan tujuan dari kegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.463.017.900.-

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dilaksanakan secara umum dilaksanakan bertujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, alokasi anggaran untuk program ini di berikan sebesarRp. 5.761.464.870.-

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan Meningkatnya disiplin aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 408.200.00.-

4) Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Tujuan pelaksanaan program ini secara umum adalah unmtuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan ketrampilan tehnis aparatur Sekretariat DPRD, dalam pelaksanaan kegiatan diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 200.800.000.-

5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Pelaksanaan program ini di realisasikan melalui tujuh kegiatan dengan total pagu anggaran program sebesar Rp. 27.788.342.640.- , adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang berkualitas di daerah yang mengarah untuk kepentingan umum dan masyarakat. Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.291.482.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 83,56% dan fisik sebesar 112,50%. Permasalahan pada kegiatan ini adalah capaian realisasi fisik meningkat disebabkan karena bertambahnya jumlah Ranperda yang dibahas yaitu dari 8 Ranperda menjadi 9 Ranperda :

b) Kegiatan Reses

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan. Untuk Reses tahun 2015 anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp.

4.162.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 76,63% dan fisik sebesar 100%. Tidak ada permasalahan pada kegiatan ini.

c) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja Anggota DPRD Provinsi Jambi melalui fungsi pengawasan. Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.792.760.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 83,74% dan fisik sebesar 90%. Permasalahan pada kegiatan ini adalah beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan kegiatan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota.

d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam memfasilitasi kelancaran tugas-tugas DPRD sesuai Program dan Rencana Kinerja yang ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.111.103.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 68,52% dan fisik sebesar 100%. Permasalahan pada kegiatan ini adalah beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan kegiatan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota.

e) Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang berkualitas di daerah yang mengarah untuk kepentingan umum dan masyarakat yang berasal dari inisiatif DPRD. Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.422.868.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 26,05% dan fisik sebesar 50%. Permasalahan pada kegiatan ini adalah usulan dari Komisi kurang menyetuh pada kepentingan masyarakat secara langsung sehingga diambil alih oleh Bapemperda yang menerbitkan 1 (satu) Perda.

f) Kegiatan Publikasi Rapat-Rapat Paripurna DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kegiatan-kegiatan dan rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan oleh Dewan kepada masyarakat dengan seluas-luasnya melalui sarana media cetak dan elektronik. Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.007.479.140,- dengan realisasi keuangan sebesar 93,74% dan fisik sebesar 100%.

4.1.17.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam rangka mewujudkan capaian visi misi Jambi EMAS 2015, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, bahwa program & kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

Melalui pelaksanaan 10 (sepuluh) program prioritas yang dijabarkan dalam 56 (lima enam) kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program ini telah tercapai 99.69 Persen dengan indikator output sebagai berikut:

- 1) Tersedianya kelengkapan surat menyurat
- 2) Tersedianya penunjang komunikasi perkantoran
- 3) Kelancaran pejayanan adm keuangan
- 4) Tersedianya peralatan penunjang kebersihan kantor
- 5) Tersedianya ATK yang memadai
- 6) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan adm. Ktr
- 7) Tersedianya alat listrik, dan penerangan
- 8) Tersedianya bahan bacaan
- 9) Tersedianya kebutuhan makan minum
- 10) Terjaksananya koordinasi dan konsultasi

Pencapaian dalam program diatas berupa

- 1) Terselenggaranya fungsi pelayanan kesekretariatan BPKAD Provinsi Jambi.

Dalam program ini, kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik , kegiatan jasa kebersihan Kantor, Kegiatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tidak terealisasi dikarenakan gedung BPKAD masih menempati eks. Biro keuangan dan eks. Biro aset sehingga kegiatan ini masih dibebankan pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi. Terhadap hal ini BPKAD telah melakukan konsultasi dan melaporkan mengenai alokasi gedung Kantor BPKAD kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dan saat ini masih dalam proses penetapan Gedung Kantor BPKAD.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi baik yang telah rusak maupun yang masih layak pakai. Sehingga dapat menghasilkan outcome dengan indikasi terwujudnya Pemeliharaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Jambi baik berupa rumah dinas maupun gedung.

Pencapaian realisasi anggaran program ini dari tahun 2011 s.d. 2015 rata-rata sebesar 94,65 Persen.

1) Tahun 2011 rehab berat/ringan aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi

Realisasi keuangan tercapai sebesar 96,83 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :

- a) Rehab asrama mahasiswa jambi di bandung;
- b) Rehab rumah dinas eks dokter RSUD Raden Mattaher Jambi;
- c) Lanjutan rehab rumah kopel eks kehutanan simpang pulai jambi;
- d) Pembangunan gedung lomba sekolah sehat (TPUKS);
- e) Rehab gedung kantor BKMT Provinsi Jambi;
- f) Rehab asrama mahasiswa Jambi di Yogyakarta;
- g) Pengadaan gedung mess asrama mahasiswa di Mesir;
- h) Rehab gedung kantor Pertambangan Provinsi Jambi;
- i) Rehab gedung DLLAJ;
- j) Landscape sumur bor dan pos jaga;
- k) Rehab kantor cek fisik (dishub);
- l) Lanjutan rehab TK pertiwi II;
- m) Rehab rumah dinas eks desperindag;
- n) Rehab gedung dharma wanita pemwilda Provinsi Jambi;
- o) Rehab gedung eks Satpol PP (BNP).

2) Tahun 2012 rehab berat/ringan aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi

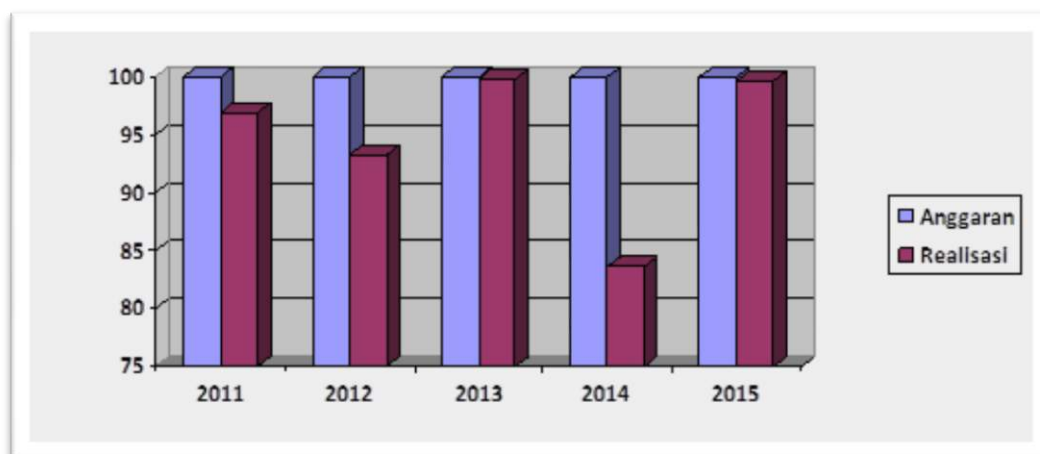
Realisasi keuangan tercapai sebesar 93,32 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :

- a) Rehab dapur/ruangan sekretariat Panti YKA Provinsi Jambi;
- b) Pemasangan konblok, rehab masjid, pemasangan pagar panti YKA;
- c) Rehab asrama putri/putra panti YKA;

- d) Pemasangan teralis, pintu, jendela, keramik, pagar asrama mahasiswa Jambi di Yogyakarta;
 - e) Rehab Gedung dharma wanita persatuan Provinsi Jambi;
 - f) Rehab gedung BKMT;
 - g) Renovasi kantor PMI;
 - h) Biaya perencanaan teknis;
 - i) Biaya perencanaan teknis ruko;
 - j) Biaya pengawasan.
- 3) Tahun 2013 rehab berat/ringan aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi
- Realisasi keuangan tercapai sebesar 99,76 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
- a) Rehab gedung tugu juang;
 - b) Rehab asrama mahasiswa Jambi di Bogor;
 - c) Rehab rumah dinas dokter RSUD Raden Mattaher Jambi;
 - d) Rehab rumah dinas kopel eks. Dinas kehutanan;
 - e) Pengadaan auning rumah dinas eks. Perindag;
 - f) Pengadaan Teralis untuk MUI;
 - g) Perencanaan Teknis;
 - h) Pengawasan.
- 4) Tahun 2014 rehab berat/ringan aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi
- Realisasi keuangan tercapai sebesar 83,65 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pemasangan konblok eks. Rumah dokter;
 - b) Pekerjaan rehab kantor PMI;
 - c) Pekerjaan gedung kantor dinas eks. KPPN
 - d) Pekerjaan Gedung guest house Sekda;
 - e) Pekerjaan gedung rumah dinas Pemprov Telanai
 - f) Pekerjaan gedung eks. Bepelkes;
 - g) Pekerjaan rehab rumah dinas Kepala Balitbangda;
 - h) Pekerjaan rehab gedung IPKOH;

- i) Pekerjaan rehab aseama Mahasiswa di Bandung;
 - j) Pekerjaan rehab gedung lembaga adat, Gazebo;
 - k) Pekerjaan jasa konsultan perencanaan
 - l) Belanja jasa konsultan pengawasan.
- 5) Tahun 2015 rehab berat/ringan aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi
- Realisasi keuangan tercapai sebesar 99,69 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
- a) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks Sosnakertrans);
 - b) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks Sosnakertrans);
 - c) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks Sosnakertrans);
 - d) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks Sosnakertrans);
 - e) Rehab asrama mahasiswa Jambi di Yogyakarta;
 - f) Rehab Kantor Komisi Informasi;
 - g) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks. Perindag);
 - h) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks. Perindag);
 - i) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks. KPPN);
 - j) Rehab Guest House Sekda;
 - k) Rehab Rumah Dinas Pemda (eks. Kehutanan);
 - l) Rehab Rumah Penjaga, Pemasangan konblok dan pembuatan taman bkow;
 - m) Rehab Rumah Dinas Pemda Telanai;
 - n) Rehab Rumah Dinas Pemda Jln. Depati Unus No.24 Komp. DPRD Telanaipura;
 - o) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek Transito No.47;
 - p) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek BLK Blok C No.04;
 - q) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek Transito No.51;
 - r) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek Transito No.55;
 - s) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek Transito No.68;
 - t) Rehab Rumah Dinas Pemda Jln. Empu Sendok No.07 Rt.17 (lrg. Suka Damai);

- u) Rehab Rumah Dinas Pemda Jln. Yulius Usman Lrg Golf III Rt.23 No.106 Telanaipura;
- v) Rehab Rumah Dinas Pemda Jl. Sumantri Brojonegoro No.61;
- w) Rehab Rumah Dinas Pemda A. Chatib Rt.14 Kel. Pematang Sulur;
- x) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek BLK block C;
- y) Rehab Rumah Dinas Pemda Komplek Transito No.27.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

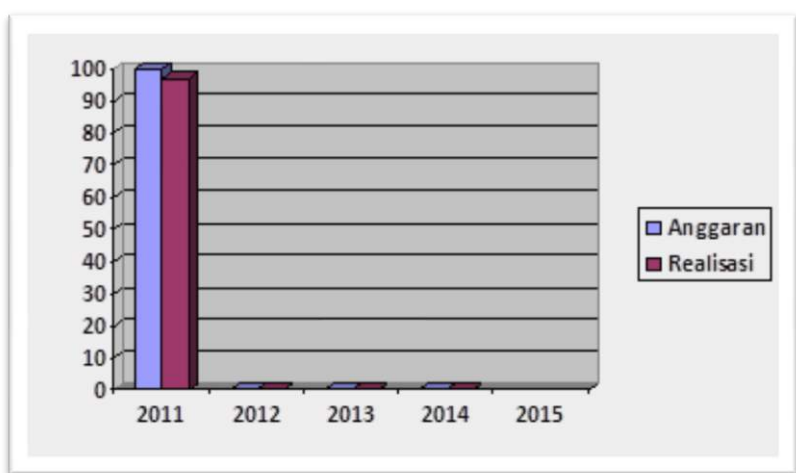
Gambar 4.64 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)

c. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake)

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur Jambi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi dan untuk mendukung program tersebut Biro Asset menganggarkan program samisake pada tahun 2011.

Adapun pencapaian realisasi anggaran program ini adalah sebesar 96,99 Persen dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

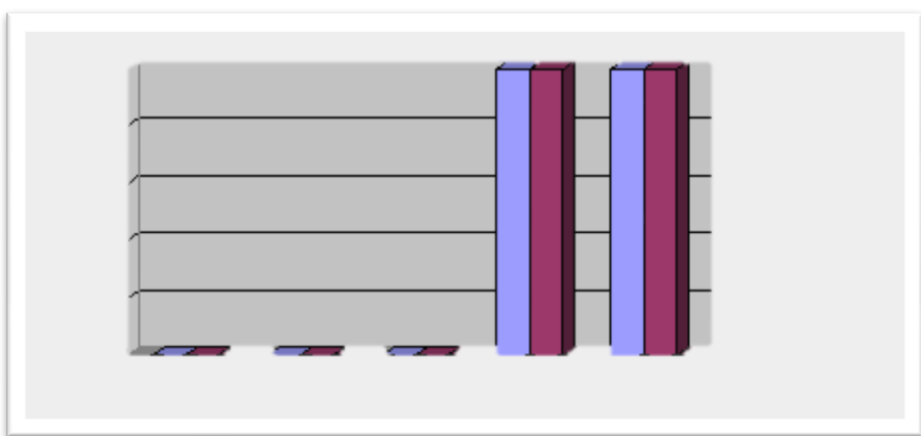
- 1) Kegiatan pengadaan dump truck roda 6 realisasi fisik 100 Persen sebanyak(8 Unit) realisasi Keuangan sebesar 98,25 Persen.
- 2) Kegiatan pengadaan kendaraan roda 3 realisasi fisik 100 Persen sebanyak(16 unit) realisasi keuangan sebesar 72,68 Persen.
- 3) Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional(unter samisake) realisasi anggaran sebesar 99,71 Persen.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
 Gambar 4.65 Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) (%)

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan ini telah tercapai 99,59%, berupa pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya untuk seluruh Karyawan di lingkup BPKAD Provinsi Jambi. Realisasi Fisik 100% untuk program peningkatan Disiplin Aparatur



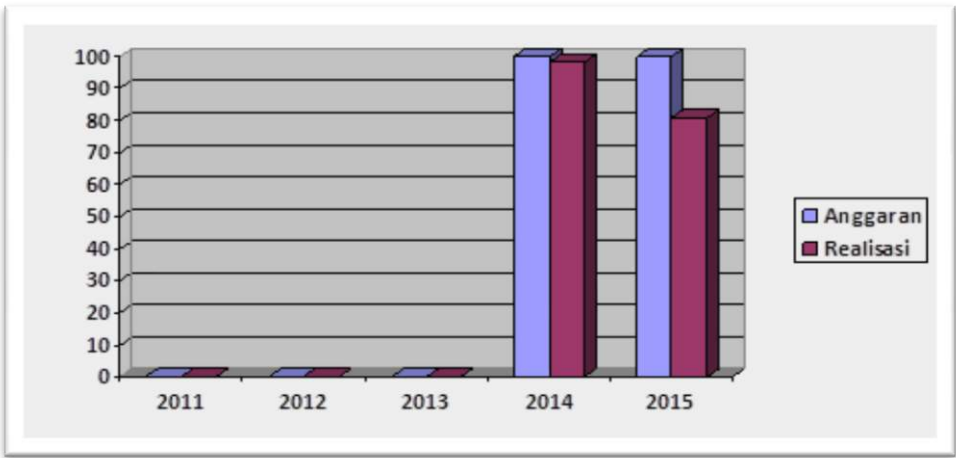
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
 Gambar 4.66 Program Peningkatan Disiplin Aparatur (%)

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini Tahun 2015 telah tercapai 80.87 Persen, dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur , PNS telah diikuti sertakan pada Diklat sebagai berikut :

- 1) Diklat Akuntansi berbasis Akrua;
- 2) Diklat Pengarsipan data;
- 3) Diklat Laporan Keuangan;
- 4) Diklat Penyusunan Lakip;
- 5) Diklat Penyusunan Renstra;
- 6) Diklat Penyusunan standar pelayanan minimal.

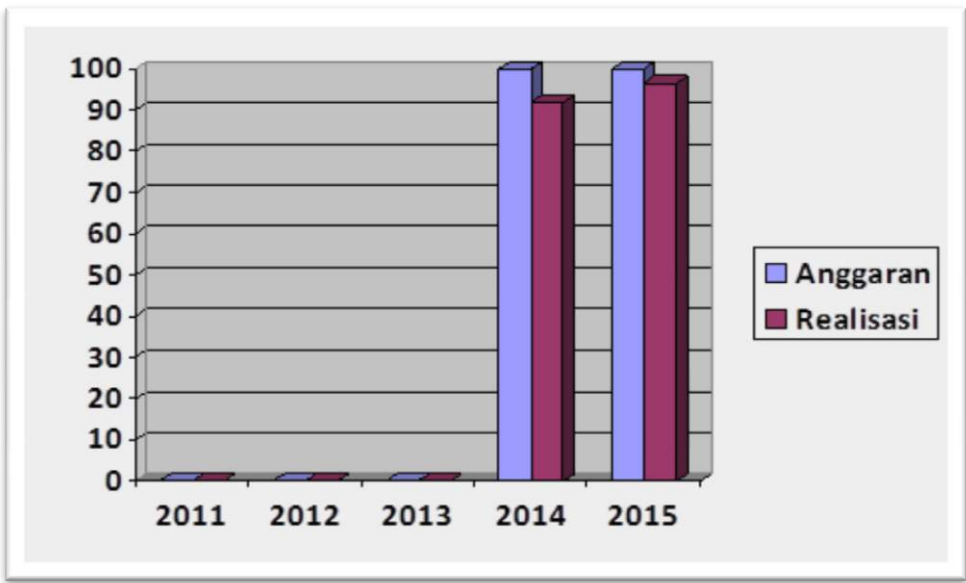
Diklat ini diselenggarakan di dalam daerah ataupun di luar daerah Provinsi Jambi.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
Gambar 4.67 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini tahun 2015 telah tercapai 96.37%, adapun indikator kegiatannya adalah Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Program ini telah tercapai 100% secara fisik.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
Gambar 4.68 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)

g. Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah.

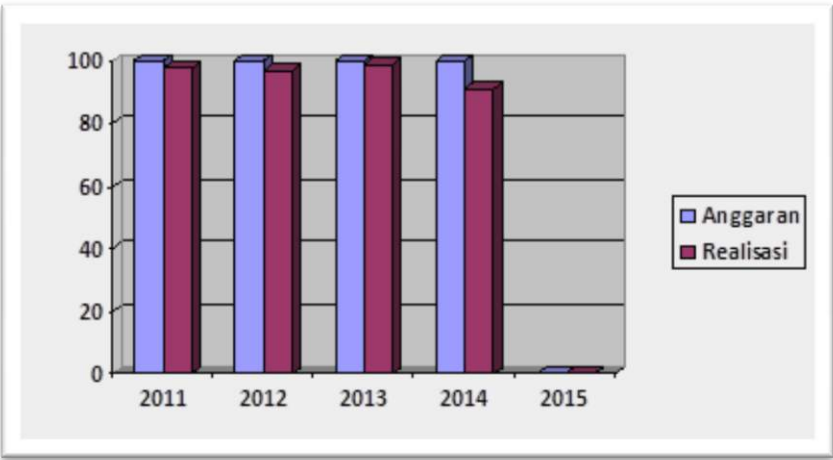
Program ini berjalan dari Tahun anggaran 2011 s/d Tahun anggaran 2014 yang mana dari tahun 2011 s/d 2013 Pelaksanaan pengelolaan Anggarannya berada di bawah Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi

baru pada Tahun Anggaran 2014 Pengelolaannya masuk dalam Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

Program ini secara umum bertujuan untuk mewujudkan Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun 2011 s.d. 2014 Melalui APBD Provinsi Jambi Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diberikan yang relatif memadai ralam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah di tetapkan. Outcome yang telah dicapai oleh Program ini adalah tersusunnya data Inventarisasi Aset yang baik dengan rata-rata 96,02 Persen terhitung dari tahun 2011 s.d. 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2011 Program ini terlaksana sebesar 97,58 Persen
- 2) Tahun 2012 Program ini terlaksana sebesar 96,68 Persen
- 3) Tahun 2013 Program ini terlaksana sebesar 98,72 Persen
- 4) Tahun 2014 Program ini terlaksana sebesar 91,11 Persen.

Untuk Tahun Anggaran 2015 Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah di hapuskan karena tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD), dan kegiatan tersebut dialihkan pada Program Pengelolaan Kekayaan Daerah yang termasuk dalam RPJMD Provinsi Jambi.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

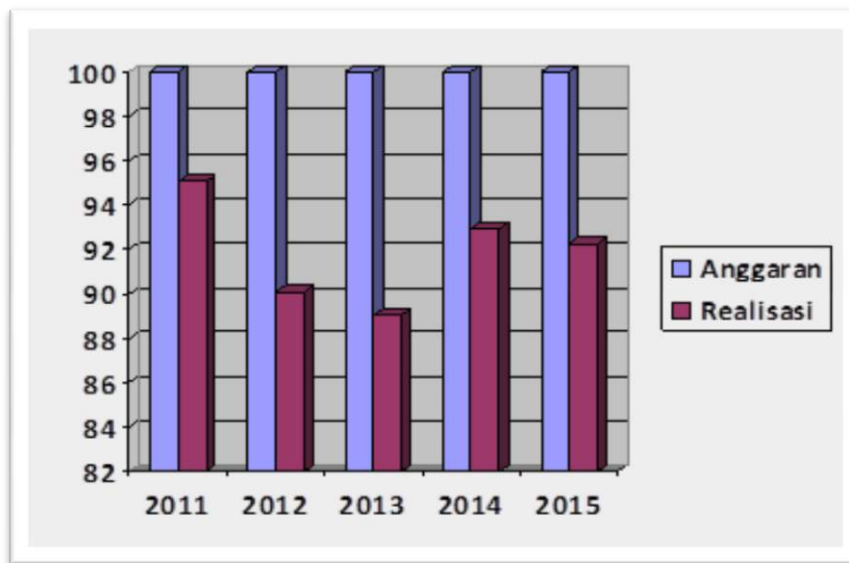
Gambar 4.69Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah (%)

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan agar tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan outcome terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel. Program ini terlaksana pada tahun 2010 s.d. tahun 2014 yang mana berada pada Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

dengan Pencapaian sebagai berikut

- 1) Tahun 2011 Program ini terlaksana sebesar 95,03 Persen.
- 2) Tahun 2012 Program ini terlaksana sebesar 90,10 Persen
- 3) Tahun 2013 Program ini terlaksana sebesar 89,06 Persen
- 4) Tahun 2014 Program ini terlaksana sebesar 92,92 Persen
- 5) Tahun 2015 Program ini terlaksana sebesar 92,26 Persen



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

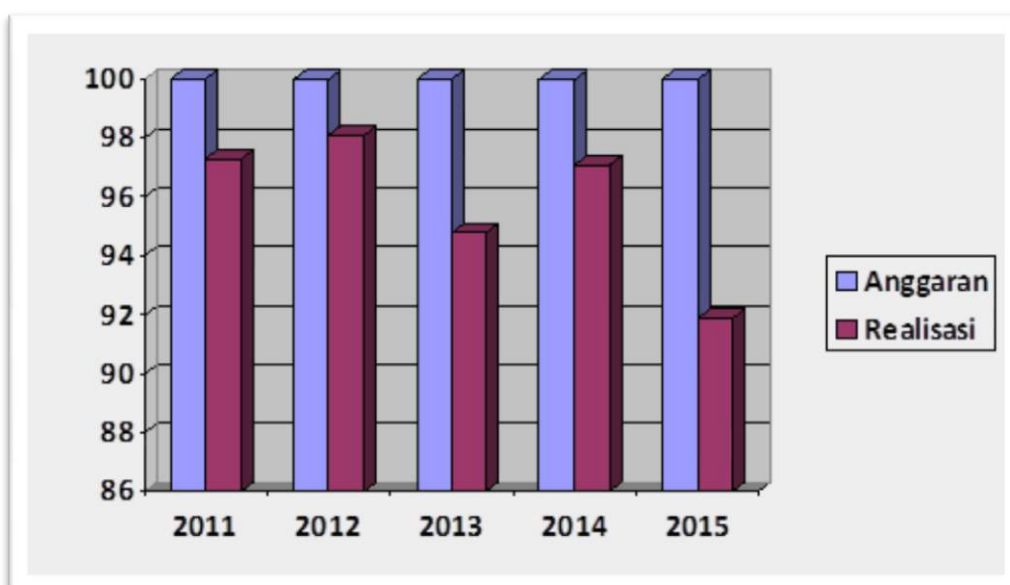
Gambar 4.70 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah (%)

i. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program ini secara garis besar bertujuan sebagai pembinaan dan Evaluasi Peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota sehingga tercapainya outcome meningkatnya tertib pengelolaan Keuangan di daerah.

Program ini berjalan pada tahun 2011 s.d. 2015 yang mana berada pada Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan pencapaian rata-rata sebesar 95,37 Persen dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2011 Program ini terlaksana sebesar 97,27 Persen
- 2) Tahun 2012 Program ini terlaksana sebesar 98,11 Persen.
- 3) Tahun 2013 Program ini terlaksana sebesar 94,79 Persen.
- 4) Tahun 2014 Program ini terlaksana sebesar 97,11 Persen.
- 5) Tahun 2015 Program ini terlaksana sebesar 91,90 Persen.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.71 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

j. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Program ini secara garis besar bertujuan untuk mendata seluruh aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi dan pembinaan tenaga pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dapat terwujudnya Inventarisasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Jambi yang tertata dengan baik dan Terwujudnya tenaga pengelolaan Barang Milik Daerah yang Profesional.

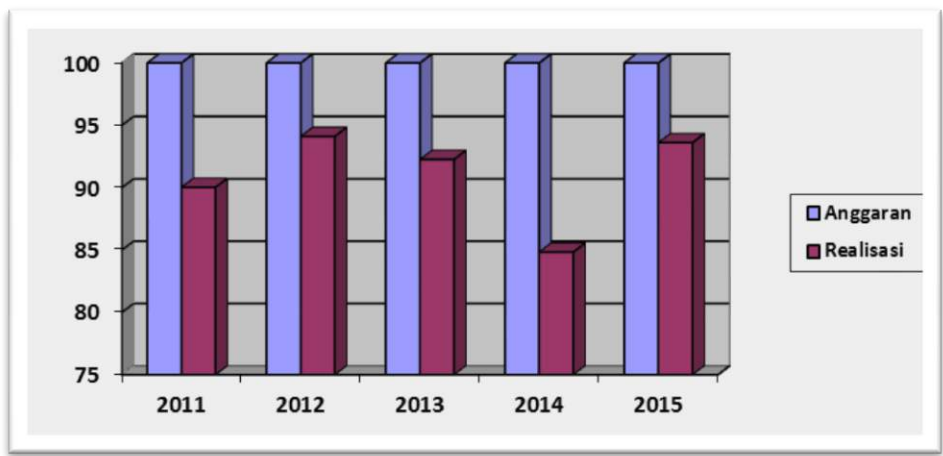
Program Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2015 bertambah kegiatan pelimpahan dari Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

Program ini berjalan dari tahun 2011 s.d. 2015 dengan pencapaian rata-rata sebesar 91,56 Persen dengan rincian pencapaian realisasi sebagai berikut :

- 1) Tahun 2011 realisasi keuangan tercapai sebesar 90,03 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Tanah Pemda Provinsi Jambi di Kairo Mesir;
 - b) Pengadaan Tanah pembangunan Tugu Jam disebelah Kota Jambi;
 - c) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Pesantren;
 - d) Pengadaan Tanah untuk MUI.
- 2) Tahun 2012 realisasi keuangan tercapai sebesar 94,11 Persen dan realisasifisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pemagaran kantor MUI Provinsi Jambi;
 - b) Pemagaran tanah pemda di belakang hotel cataleya;

- c) Pemagaran rumah sekda eks. Dinas PU Provinsi Jambi.
- 3) Tahun 2013 realisasi keuangan tercapai sebesar 92,26 Persen dan realisasifisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pemagaran sampingbelakang rumah sekda (eks. Dinas PU Prov. Jambi);
 - b) Pemagaran kantor Dharma Wanita Prov. Jambi depan RS Polisi;
 - c) Pemagaran gedung arsip Pemda;
 - d) Pemagaran rumah dinas kepala BKD;
 - e) Pemagaran asrama mahasiswa jambi di Bogor;
 - f) Konsultan perencanaan;
 - g) Konsultan pengawas.
- 4) tahun 2014 realisasi keuangan tercapai sebesar 84,83 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pemagaran Gedung BKOW/Gedung Wanita Prov. Jambi;
 - b) Pemagaran belakang kantor Dharma Wanita Prov. Jambi;
 - c) Pemagaran Rumah dinas perindustrian dan perdagangan Ir. Nusa indah;
 - d) Pemagaran rumah dinas kehutanan Lr. Laba-laba;
 - e) Pemagaran Tanah Milik Pemprov. Jambi eks. KPPN depan kantor camat Telanaipura;
 - f) Pemagaran TK Pertiwi Telanaipura;
 - g) Pemagaran rumah puri belakang Gubernur;
 - h) Pemagaran asrama mahasiswa Jambi di Jln. Tritayasa Bandung;
 - i) Pemagaran rumah dinas milik pemprov Jambi di jalan slamet riyadi kompleks kantor PMI;
 - j) Belanja konsultasi perencanaan pemagaran tanah milik Pemprov Jambi eks. KPPN, depan kantor camat telanaipura, pemagaran TK pertiwi Telanaipura, Pemagaran Rumah Puri belakang Gubernur;
 - k) Belanja konsultan perencanaan pemagaran Asrama Mahasiswa Jambi di Jln. Tirtayasa bandung, pemagaran rumah dinas milik Pemprov Jambi di Jln. Slamet Riyadi kompleks kantor PMI;
 - l) Belanja konsultan pengawasan pemagaran Tanah Milik Pemprov Jambi eks. KPPN, depan kantor camat telanaipura, pemagaran TK pertiwi Telanaipura, Pemagaran Rumah Puri belakang Gubernur;
 - m) Belanja konsultan pengawasan pemagaran Asrama Mahasiswa Jambi di Jln. Tirtayasa bandung, pemagaran rumah dinas milik Pemprov Jambi di Jln. Slamet Riyadi kompleks kantor PMI;

- n) Pemagaran rumah dinas eks. Depnaker di Jln. Yusuf singadekane;
 - o) Belanja Konsultasi Pemagaran rumah dinas eks. Depnaker di Jln. Yusuf singadekane;
 - p) Belanja Jasa Konsultan Pemagaran rumah dinas eks. Depnaker di Jln. Yusuf singadekane.
- 5) Tahun 2015 realisasi keuangan tercapai sebesar 93,61 Persen dan realisasi fisik mencapai 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pemagaran Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Jambi di belakang Bank Indonesia Kel. Telanaipura;
 - b) Pemagaran Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Jambi di belakang Bank Indonesia Kel. Telanaipura;
 - c) Pemagaran Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Jambi di Jalan Ade Irma Suryani Kel. Telanaipura;
 - d) Pemagaran Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Jambi di Jalan Ade Irma Suryani Kel. Telanaipura;
 - e) Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemagaran Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi;
 - f) Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemagaran Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi;
 - g) Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi;
 - h) Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi;
 - i) Pemagaran Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Jambi di kompleks Transito Jln. Pattimura Kota Jambi.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.72 Program Pengelolaan Kekayaan Daerah (%)

4.1.17.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Jambi dilaksanakan guna mengoptimalkan hasil kajian/penelitian dan pengembangan untuk perumusan dan kebijakan. Melalui Badan Penelitian dan pengembangan Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan terlaksananya :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah
2. Peningkatan pelaksanaan evaluasi program pembangunan profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan kerjasama dan koordinator dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan diseminasi hasil-hasil Litbang.

a. Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2015 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi memperoleh alokasi dana pembangunan melalui APBD sebesar Rp. 4.147.458.000,- yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah
- 6) Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerjasama
- 7) Program Penelitian dan Pengembangan

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Program Kajian dan penelitian Pengembangan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Kegiatan Pengembangan Pusat Teknologi Konservasi Lahan dan Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Jumlah Anggaran sebesar Rp. 211.805.000,- terealisasi sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.

a) Kegiatan Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi Konservasi lahan

Reaslisasi kegiatan adalah pelaksanaan Lokakarya Pusat Unggulan Iptek bekerja sama dengan Universitas Jambi, peserta lokakarya tersebut adalah Bappeda Kabupaten/Kota, SKPD terkait, Lembaga Penelitian, Perusahaan Tambang Batu Bara dan Migas, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi. Dari hasil lokakarya tersebut

dihasilkan kesepakatan kerjasama pengelolaan lahan bekas tambang untuk penelitian pengembangan pertanian, antar Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) dengan Perusahaan Batu Bara.

- b) Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Realisasi kegiatan adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi SIDa dan Pelatihan SIDa.

2) Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerjasama

Meliputi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi IPTEK, Evaluasi Pelaporan hasil kinerja litbang Tahunan, Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi, Pengembangan Kelembagaan Jaringan Penelitian di Provinsi Jambi, Kegiatan FKPPD dan FKKD, Kegiatan Rakornas dan Rakorlitbangda, Kegiatan Perlindungan Hukum Komoditas dan Produk Unggulan, Kegiatan Penerbitan Jurnal Litbang, Perpustakaan dan Sosialisasi. Jumlah anggaran sebesar Rp. 998.164.500,- terealisasi sebesar 96,84 % dan realisasi fisik 100%.

3) Program Penelitian dan Pengembangan

Dengan Jumlah AnggaranRp. 1.321.736.500,- terealisasi sebesar 98,71% dan realisasi fisik 100%. Telah dilaksanakan beberapa penelitian yaitu :

(a) Penelitian Model Kepuasan Pasien Rawat Inap Dari Perspektif Komunikasi Interpersonal dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam Provinsi Jambi

(1) Tujuan dari penelitian untuk menemukan jawaban atau bukti empiris tentang :

- Untuk mengetahui gambaran kondisi komunikasi interpersonal, mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien rawat inap pada rumah sakit di Provinsi Jambi
- Mengetahui apakah komunikasi interpersonal dapat meningkatkan kepuasan pasien
- Mengetahui apakah semakin membaiknya komunikasi interpersonal antara dokter dan pasien, perawat dan pasien maka mutu pelayanan kesehatan semakin baik pula
- Mengetahui apakah semakin meningkatnya mutu pelayanan kesehatan maka kepuasan pasien semakin meningkat
- Mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat inap berdasarkan kenyataan dan harapan pasien pada rumah sakit di Provinsi Jambi?
- Mengetahui strategi rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan?

(2) Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi rumah untuk memperbaiki manajemen rumah sakit agar lebih meningkat mutu pelayanan kesehatan dan lebih memperhatikan kepuasan pasien dari perspektif interaksi antara dokter, perawat terhadap pasien. Bagi Pemerintahan Provinsi Jambi sebagai dasar untuk menilai kinerja rumah sakit melalui perpektif pelanggan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan teknis dalam meningkatkan mutu pelayanan.

(3) Kesimpulan

- Komunikasi interpersonal berada pada kategori baik, namun terdapat indikator sangat buruk pada dimensi *Openness* yang menggambarkan komunikasi antara dokter dan pasien, dan kategori buruk komunikasi antar perawat dan pasien. Dimana dokter ketika melakukan pemeriksaan terhadap pasien tidak memperkenalkan namanya terlebih dahulu, begitu juga yang terjadi antar perawat dan pasien.
- Mutu pelayanan kesehatan berada pada kategori baik menyangkut kesiapan, kelayakan, efektivitas, kemanjuran dan keamanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien dari sisi kemampuan dokter, perawat dan sarana prasarana.
- Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima berada pada kategori puas, jika dibandingkan dengan harapan, maka pasien masih memiliki harapan yang lebih tinggi dari yang dirasakan
- **Komunikasi** interpersonal antara dokter dan pasien, perawat dan pasien yang baik terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien, artinya semakin dokter dan perawat menguasai tehnik berkomunikasi yang baik ketika berbicara dengan pasien, maka pasien memiliki tingkat kepuasan yang diinginkan. komunikasi perawat dan pasien lebih dominan mempengaruhi kepuasan pasien dibandingkan komunikasi dokter dan pasien
- Komunikasi interpersonal antara dokter dan pasien, perawat dan pasien yang baik terbukti dapat meningkatkan mutu pelayanan, artinya semakin dokter dan perawat menguasai tehnik berkomunikasi yang baik ketika berbicara dengan pasien, maka pasien merasakan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit. Komunikasi perawat dan pasien lebih dominan

mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan dibandingkan komunikasi dokter dan pasien

- Mutu pelayanan terbukti mampu meningkatkan kepuasan pasien, artinya semakin baik mutu pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit maka tingkat kepuasan pasien semakin meningkat.
- Melalui uji diagram kartesius ada beberapa tingkat kepuasan pasien masih dibawah harapan yang dirasakan pasien, dan menjadi strategi prioritas rumah sakit untuk segera melakukan perbaikan diantaranya jawaban dokter terhadap pertanyaan pasien, pertolongan yang diberikan oleh perawat terhadap kebutuhan dasar pasien, kelengkapan peralatan pemeriksaan penunjang, ketersediaan obat, kejelasan informasi tentang obat. Sementara itu, untuk indikator yang tidak boleh diabaikan oleh rumah sakit akan tetapi dijadikan sebagai indikator program promosi kesehatan di rumah sakit yaitu sikap petugas yang menerima, kebersihan peralatan yang digunakan di ruangan pasien, kebersihan kamar mandi, kebersihan ruangan serta kemudahan dan kecepatan proses pendaftaran.

(b) Penelitian Pengembangan Potensi Kawasan Jambi Kota Seberang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

(1) Tujuan Penelitian

- Memberikan gambaran Kondisi kekinian Jambi Kota Seberang.
- Mengidentifikasi dan menentukan potensi yang dapat di kembangkan di kawasan Jambi Kota Seberang.
- Menganalisis strategi dan kebijakan dapat digunakan oleh Pemerintah dalam mengembangkan kawasan Jambi Kota Seberang berbasis peningkatan perekonomian masyarakat.

(2) Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi yang ada di kawasan Jambi Kota Seberang dan strategi yang diperlukan pemerintah sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi pada umumnya dan Pemerintah Kota Jambi pada khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan perkotaan.

(3) Keluaran (*output*) Kegiatan

Sedangkan Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- Teridentifikasinya potensi dan pendukung pengembangan wilayah Jambi Kota Seberang dalam meningkatkan Perekonomian masyarakat
- Terumuskannya strategi dan implikasi kebijakan bagi pengembangan dan penguatan perekonomian masyarakat Jambi Kota Seberang.

(4) Kesimpulan

- Kondisi kekinian Jambi Kota Seberang sudah lebih baik walaupun masih memerlukan perbaikan dan penambahan infrastruktur untuk mendukung pembangunan wilayah Jambi Kota Seberang
- Potensi yang dapat dikembangkan di kawasan Jambi Kota Seberang adalah Industri Rumah Tangga dan Cagar Budaya. Dengan segala potensi yang dimiliki di kawasan tersebut tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Bagian Wilayah Kota Jambi yaitu sebagai Pusat Cagar Budaya dan Industri Rumah Tangga. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah sebagai Pusat Pendidikan Islam, Pusat Pertunjukan Seni Budaya Islam dan Pusat Wisata Sungai.
- Strategi dan kebijakan yang diperlukan Pemerintah untuk mengembangkan Potensi Jambi Kota Seberang adalah:
 - Strategi dan kebijakan yang diperlukan Pemerintah untuk mengembangkan Potensi Jambi Kota Seberang Sebagai *Pusat Cagar Budaya* adalah :
 - Wujudkan RTRW Pemrov dan Kota
 - Revitalisasi pusat-pusat peninggalan Sejarah
 - Membuat pusat studi dan riset budaya melayu Jambi di kawasan Seberang
 - Strategi dan kebijakan yang diperlukan Pemerintah untuk mengembangkan Potensi Jambi Kota Seberang Sebagai *Pusat Pendidikan Islam* adalah :
 - Tingkatkan kembali pengajian
 - Tingkatkan Jumlah Buku Perpustakaan
 - Inventarisir Tokoh agama/Pejuang
 - Memasukkan materi budaya melayu seberang ke dalam muatan lokal di sekolah
 - Mengalakkan kembali tradisi shalat berjama'ah di masjid dan langgar
 - Menggalakkan kembali pengajian subuh di rumah.

- Strategi dan kebijakan yang diperlukan Pemerintah untuk mengembangkan Potensi Jambi Kota SeberangSebagai *Pusat Pertunjukan Seni Budaya Islam* adalah :
 - Lestarikan Pakaian Busana Muslim
 - Inventarisir hasil penelitian sejarah dan Budaya
 - Pertahankan pertunjukan –pertunjukan tradisional
 - Aktifkan dan kembangkan kegiatan seni melayu islam
 - Peringatan Hari besar Islam dibarengi dengan perlombaan
 - Penyambutan hari tahun Baru Islam
 - Pemfokusan Even keagamaan Islam
- Strategi dan kebijakan yang diperlukan Pemerintah untuk mengembangkan Potensi Jambi Kota SeberangSebagai *Pusat Wisata Sungai* adalah :
 - Normalisasi Sungai dan Danau
 - Pembersihan Bantaran Sungai Batanghari
 - Festival Danau

(c) Kajian Science Park Provinsi Jambi

(1) Tujuan Penelitian

Mendorong Pemerintah Provinsi Jambi lebih siap mendirikan sains park, yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut :

- Mengetahui potensi dan kondisi eksisting Provinsi Jambi dalam pembentukan *science park*.
- Mengetahui Faktor-faktor pendukung dalam pembentukan *science park*.
- Mengetahui keterlibatan Akademisi, *Business* dan *Goverment* dalam pembentukan *science park*.

(2) Manfaat Penelitian

Memberikan arah dan kebijakan bagi pemerintah untuk membangun science Park di Provinsi Jambi (sebagai wahana pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi).

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

(3) Kesimpulan :

- Potensi unggulan ketahanan pangan (sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan dan hortikultura) mendukung terbentuknya *Science Park*
- Faktor Pendukung *Science Park* , dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, infra struktur dan anggaran mendukung untuk pembangunan *science park*.
- Adanya sinergisitas untuk melaksanakan pembangunan *Science Park* antara akademisi sebagai inovator, *business* sebagai pengguna hasil inovasi dan *government* sebagai fasilitator, motivator dan katalisator.

(d) Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Gender di Provinsi Jambi.

(1) Tujuan

- Mengetahui Kebijakan/regulasi apa saja yang telah dikeluarkan terkait dengan pengarusutamaan gender di Provinsi Jambi
- Mengidentifikasi isu gender yang ditemui di Provinsi Jambi
- Memetakan isu gender di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi menurut : Jumlah pegawai, Tingkat pendidikan, golongan dan eselonering
- Mengetahui implementasi regulasi pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi

(2) Manfaat

Manfaat yang nantinya dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi dan dasar pertimbangan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang akan diterapkan oleh kepala daerah dan instansi terkait dalam menjalankan program kesetaraan gender di daerah.

(3) Kesimpulan

- Kebijakan dan regulasi daerah tentang kesetaraan gender di Provinsi Jambi sudah ada, berupa Pergub, keputusan Bupati/walikota mengenai Pembentukan Tim Pokja dan Tata Cara Pelaksanaan PUG di lingkup Provinsi, Kabupaten/kota. Secara rinci yaitu regulasi di tingkat Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan yang belum memiliki regulasi tentang gender yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Bungo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

- Isu gender di Provinsi Jambi dilihat dari Jumlah Penduduk, Nilai IPM, nilai IPG, TPAK dan TPT menunjukkan masih adanya kesenjangan gender.
- Hasil Pemetaan Isu Gender di Lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi masih ditemui belum adanya kesetaraan gender baik dalam konteks jumlah pegawai, tingkat pendidikan, golongan dan eselonering.
- Implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi secara umum sudah berjalan tetapi pelaksanaannya belum optimal.

(e) Evaluasi Terhadap Regulasi Pelaksanaan Otonomi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi

(1) Tujuan

- Untuk melihat dan memberikan gambaran implementasi regulasi otonomi pemerintahan desa di Provinsi Jambi.
- Untuk menganalisis penguatan akuntabilitas pemerintahan desa melalui SDM dan Kelembagaannya.
- Untuk menganalisis respon masyarakat desa terhadap pelaksanaan otonomi pemerintahan desa di Provinsi Jambi.

(2) Manfaat

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan desa dalam penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.
- Sebagai dinamisasi sistim pemerintahan desa di Provinsi Jambi.

(3) Kesimpulan

- Implementasi regulasi Pemerintahan desa di Provinsi Jambi sudah berjalan namun belum optimal. Seperti ditunjukkan dengan belum adanya peraturan/ kebijakan khusus mengenai pemerintahan desa dan penyerahan kewenangan dari kabupaten ke desa.
- Upaya pemerintah dalam menguatkan akuntabilitas Pemerintahan desa sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum terbentuknya beberapa lembaga yang harus diisi oleh desa, namun karena keterbatasan SDM sehingga desa belum mampu membentuknya.
- Masyarakat berpendapat bahwa otonomi Pemerintahan Desa secara umum telah berjalan namun belum optimal. Hal ini

ditunjukkan dari beberapa aspek seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang.

(f) Penelitian Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Jambi

(1) Tujuan

- Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program inseminasi buatan ternak sapi potong di Provinsi Jambi
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sebuah SPIB di Provinsi Jambi
- Menyusun formula alternatif strategi untuk meningkatkan status tahapan SPIB di Provinsi Jambi.

(2) Kesimpulan

- Beberapa temuan penelitian yang telah dianalisis sebagai rujukan dalam merumuskan saran rekomendasi kebijakan antara lain :
- Secara umum pendataan sapi potong di Provinsi Jambi selama lima tahun terlihat belum konsisten (tahun 2010 = 177.710 ekor, 2011 turun menjadi 119.888 ekor, 2012 naik menjadi 139.534 ekor, tahun 2013 turun lagi menjadi 118,985 ekor dan pada tahun 214 naik lagi menjadi 136.638 ekor) serta sangat berfluktuasi, data yang bersumber dari hasil sensus cenderung lebih rendah yaitu (Hasil sensus BPS tahun 2011 dan 2013), sedang yang bersumber dari laporan Dinas PKH (2010, 2012 dan 2014)
- Perkembangan sapi dilihat dari jumlah kematian sekitar 29.987 ekor (konsumsi dan mati karena penyakit) cenderung lebih besar dari jumlah kelahiran sekitar 29.624 ekor (Data tahun 2014).
- Skala usaha peternak sapi potong sebagian besar masih dibawah skala usaha yang menguntungkan (74,77%).
- Tingkat keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan di Provinsi Jambi masih rendah terlihat dari S/C dengan nilai 2,18 atau masih diatas 2 sedangkan CR dengan nilai 50,07% atau masih dibawah 70%
- Kondisi induk sapi, deteksi birahi, keterampilan inseminator dan motivasi peternak berpengaruh negatif terhadap S/C dan berpengaruh positif terhadap CR. Artinya semakin baik kondisi induk sapi, deteksi birahi, keterampilan inseminator dan motivasi peternak maka semakin kecil nilai S/C dan sebaliknya nilai CR semakin besar.

- Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan pada wilayah kabupaten/kota belum memenuhi persyaratan untuk menjadi SP-IB Swadaya dengan jumlah akseptor dan kelahiran pertahun masih dibawah standar. (Standar minimal; jumlah akseptor 2.400 ekor/tahun dan jumlah kelahiran 1.920 ekor/tahun serta Sumber pembiayaan IB berasal dari peternak)

(g) Penelitian Manajemen Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Provinsi Jambi

(1) Maksud dan Tujuan

- Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan limbah medis padat sebagai indikator pengelolaan limbah medis padat sesuai dengan ketentuan Kepmenkes No. 1204/MENKES/SK/X/2004 dan Permen LH 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
- Mengetahui gambaran proses pengelolaan limbah medis padat pada rumah sakit di Provinsi Jambi.
- Mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis padat rumah sakit di Provinsi Jambi.
- Merekomendasikan rumah sakit untuk mewujudkan manajemen limbah medis padat yang ramah lingkungan.

(2) Manfaat

Hasil penelitian sebagai rujukan bagi rumah sakit untuk memperbaiki sistem manajemen pengelolaan limbah medis padat dan bagi pemerintah Provinsi Jambi sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan dalam mengawasi kestabilan lingkungan akibat dari pencemaran limbah medis padat.

(3) Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan limbah medis padat Rumah Sakit di Provinsi Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Manajemen pengelolaan limbah medis padat mulai dari proses pemilahan sampai dengan proses pengangkutan menuju tempat pemusnahan di rumah sakit pemerintah maupun swasta belum sesuai dengan Kepmenkes No. 1204 Tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Pada proses pemusnahan limbah medis padat berada pada kategori kurang baik pada rumah sakit di Provinsi Jambi, terutama menyangkut proses

pembakaran, kualifikasi operator insinerator, perlakuan terhadap abu sisa pembakaran yang bisa membahayakan kehidupan disekitarnya, bekerja tidak berdasarkan SOP dan masih minimnya penyediaan kelengkapan APD petugas insinerator.

- Secara umum rata-rata sarana dan prasarana rumah sakit di Provinsi Jambi belum mampu mendukung terciptanya pengelolaan limbah yang benar sesuai dengan Kepmenkes No. 1204 Tahun 2004, terkait dengan design dan spect insinerator yang belum sesuai dengan aturan, wadah , kantong plastik, kereta dorong dan penyediaan alat pelindung diri khususnya untuk operator insinerator dan *Cleaning Service*
- Belum terwujudnya Limbah rumah sakit yang ramah lingkungan di Provinsi Jambi karena kurang didukung oleh pihak manajemen rumah sakit terutama dari sisi ketersediaan dana, kualifikasi Suber Daya Manusia, prasarana berupa aturan dalam bentuk struktur dan SOP dan pengawasan serta regulasi dari pemerintah daerah

(h) Penelitian Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sungai Batanghari

(1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- Menggambarkan kondisi serta kualitas air di sungai Batanghari Provinsi Jambi.
- Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya Sungai Batanghari di Provinsi Jambi.
- Menganalisis Kebijakan Pemerintah dan peran serta masyarakat dalam usaha menjaga dan melestarikan Sungai Batanghari di Provinsi Jambi.
- Merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kelestarian Sungai Batanghari Provinsi Jambi.

(2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan:

- Memberikan gambaran kepada Pemerintah mengenai kondisi sungai batanghari di Provinsi Jambi pada saat ini.
- Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota serta pihak-pihak terkait, mengenai langkah-

langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kelestarian Sungai Batanghari Provinsi Jambi.

(3) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Kondisi serta kualitas air di sungai Batanghari Provinsi jambi saat ini berada pada kondisi yang tidak layak di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ini terlihat dari status mutu air pada beberapa wilayah yang masuk kategori buruk.
- Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya sungai batanghari pada umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan masyarakat seperti membuang limbah baik rumah tangga maupun industri dan tambang.
- Kebijakan Pemerintah dalam mengelola dan melestarikan sungai batanghari sudah terlihat melalui pembentukan beberapa kebijakan serta program-program kegiatan yang mengacu pada kelestarian sungai batanghari. Namu terkendala salah satunya pada peran serta Masyarakat dalam usaha melestarikan Sungai Batanghari di Provinsi Jambi masih lemah, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat untuk membuang limbah, sampah sampai dengan limbah hasil galian seperti pasir.
- Strategi dan Kebijakan yang dapat diterapkan untuk melestarikan sungai batanghari dapat dilakukan dengan seperti, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi baik internal maupun vertikal dalam mengelola sungai batanghari, melakukan pemantauan secara berkala sehingga pencegahan dapat segera dilakukan jika terjadi ancaman kerusakan dengan memperkuat penganggaran pemantauan, malakukan penindakan hukum secara tegas kepada pelaku perusak dan pencemar sungai seperti masyarakat swasta yang tidak atau kurang peduli dengan lingkungan, selanjutnya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengajak masyarakat secara kontiniu untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan memberikan reward dan punishmen kepada masyarakat yang terjaga wilayah kelestarian sungainya.

(i) Penelitian Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **Temuan Penelitian**

- Kondisi existing pariwisata yang menyangkut pengembangan destinasi wisata di Provinsi Jambi pada umumnya sudah cukup baik, namun perlu pengembangan sarana dan prasarana, dan infrastruktur pendukung lainnya.
- Dalam mengembangkan pariwisata di Provinsi Jambi, sangat didukung oleh sumber daya manusia dan kemampuan berkekrativitas.
- Destinasi pariwisata di Provinsi Jambi masih memerlukan promosi dan sarana promosi baik yang melekat di destinasi itu sendiri maupun secara audio visual seperti media internet dan sebagainya.
- Kontribusi ekonomi kreatif dalam mengembangkan pariwisata di Provinsi Jambi baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dan sudah dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah, walaupun secara spesifik belum mendukung destinasi pariwisata di Provinsi Jambi. seperti belum di bentuknya cluster industri kreatif pada destinasi wisata tertentu dan belum ada pengaturan/ tata kelola yang baik dari pemerintah.
- Pengembangan ekonomi kreatif dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal dan dapat meningkatkan produksi produk-produk lokal, tetapi masih dalam skala yang masih sedikit.
- Faktor yang menjadi kekuatan (strengthness) internal dalam mengembangkan destinasi wisata di Provinsi Jambi adalah : Kondisi Geografis (kemudahan mencapai objek wisata), Keindahan Objek Wisata, Keberagaman objek di destinasi wisata, Dukungan masyarakat sekitar objek wisata, Kepedulian masyarakat di sekitar objek wisata Kepedulian masyarakat di sekitar objek wisata Kepedulian masyarakat di sekitar objek wisata Kepedulian masyarakat di sekitar objek wisata Kepedulian masyarakat di sekitar objek wisata Kepedulian Pemda terhadap objek wisata, Peraturan Pemerintah Daerah terkait objek wisata. Dimana sektor-sektor tersebut sudah memiliki kekuatan yang tinggal di kembangkan saja.
- Faktor yang menjadi kelemahan (weakness) internal dalam mengembangkan destinasi pariwisata adalah : Promosi melalui paket wisata (website. Blog, brosur), Kerjasama kemitraan (pihak terkait dilingkungan objek wisata), Kontinuitas pergelaran festival/atraksi pada objek wisata, Pentas kesenian budaya, Hospitality (keramahtamahan pemandu/pramuwisata), Pengawasan terhadap

pengelolaan objek wisata, Ketersediaan gerai cinderamata, Fasilitas sarana objek wisata (aminities/kenyamanan), Fasilitas fundamental destinasi wisata (hotel, travel, restaurant, dll), Perawatan terhadap objek wisata, Akses informasi dan komunikasi, Ketersediaan dana internal (swadaya) untuk pengembangan objek wisata, Komunikasi dengan pihak Stakeholders, dimana sektor-sektor ini perlu di perhatikan agar dapat di tingkatkan kualitasnya.

- Faktor peluang yang dapat di kembangkan, sehingga mampu memberikan nilai lebih baik lagi adalah : faktor Harga jasa mengunjungi objek wisata, Keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, Wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi ke objek wisata, Iklim dan cuaca, Eksplorasi sejarah, budaya, aspek spiritual yang dilakukan oleh PEMDA, Ketersediaan penginapan/perhotelan, listrik, air bersih, komunikasi (the Basic infrastucture of utilities), Perlindungan terhadap keasrian lingkungan (isu pencemaran lingkungan), Peraturan otonomi daerah, Pendapatan masyarakat, Perubahan politik.
- Faktor yang menjadi ancaman (*threatness*) bagi pengembangan strategi pariwisata dalam meningkatkan daya dukung destinasi pariwisata adalah : Diversifikasi produk wisata, Minat wisatawan domestik dan manca negara, Kepuasan wisatawan setelah mengunjungi objek wisata, Insfrastruktur transportasi (ketersediaan layanan transportasi menuju lokasi objek wisata), Pelayanan kondisi darurat (emergency medical services) Pelayanan kondisi darurat (emergency medical services) Pelayanan kondisi darurat (emergency medical services), Image wisatawan domestik/manca negara terhadap lingkungan, Kepercayaan pemberi modal (investor), Kompetitif destinasi wisata (persaingan secara Provinsi), Kondisi perekonomian.
- Berdasarkan analisa SWOT memformulasikan Strategi Utama (*Grand Strategy*) yang sebaiknya dikembangkan untuk membangun kepariwisataan di Provinsi Jambi adalah strategi *turn around*. Strategi untuk mengembangkan pariwisata di Provinai Jambi adalah dengan melakukan strategi *turn arround* yaitu strategi memanfaatkan atau meningkatkan nilai peluang dengan meminimalkan kelemahan (*weakness-opportunity strategy*).
- Hasil analisa SWOT memformulasikan Strategi Utama (*Grand Strategy*) yang sebaiknya dikembangkan untuk membangun industri kreatif di Provinsi Jambi adalah strategi *turn around* (*sama dengan strategi untuk mengembangkan pariwisata*).

4) Permasalahan dan Solusi

Sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) seharusnya melengkapi personil dengan Pejabat Fungsional Peneliti yang idealnya 1 : 3 dari jabatan struktural dan sampai saat ini Balitbangda baru mempunyai 8 (delapan) orang fungsional peneliti yang terdiri dari 2 (dua) orang peneliti Bidang Pertanian, bidang ekonomi 5 (lima) orang, Bidang sosial politik 1 (satu) orang dan bidang hukum 1 (satu) orang. Hambatan yang dihadapi sulitnya merekrut pejabat fungsional peneliti disebabkan persyaratan yang ketat untuk menjadi peneliti dan masih kurangnya minat PNS untuk menjadi pejabat fungsional peneliti.

5) Rencana Tindak Lanjut

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan tersebut di atas :

- (a) Telah dibuat surat usulan kepada Gubernur Jambi tentang permintaan penambahan Tenaga Fungsional Peneliti
- (b) Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi agar pengangkatan PNS yang baru dapat dikursuskan menjadi peneliti dan langsung ditugaskan di Balitbangda Provinsi Jambi sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Balitbangda.
- (c) Pada Tahun 2015 mengirimkan 4 (empat) orang untuk mengikuti Diklat Peneliti Pertama pada LIPI.
- (d) Melakukan penelitian dan sosialisasi dengan cara kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi maupun dengan institusi kelitbangan lainnya baik pusat maupun daerah.
- (e) Kepala Balitbangda Provinsi Jambi membantu dan mendukung sepenuhnya para PNS yang mau dan berminat menjadi pejabat jabatan fungsional peneliti baik jabatan fungsional peneliti daerah maupun pejabat fungsional peneliti yang terakreditasi pada LIPI.
- (f) Pemberdayagunaan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD) dan Dewan Riset Daerah (DRD) untuk menunjang keberhasilan tugas yang diemban oleh Balitbangda Provinsi Jambi dalam meningkatkan koordinasi isu strategis penelitian.

4.1.17.5 Inspektorat Provinsi Jambi

Sejalan dengan visi Inspektorat Provinsi Jambi yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, efisien, efektif melalui pengawasan yang profesional, maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran belanja

langsung sebesar Rp.10.305.318.000 dengan 6 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, 5) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dan 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Selanjutnya dalam rangka mencapai misi dari Inspektorat Provinsi Jambi yaitu 1) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, 2) Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, 3) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, dan 4) menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi telah dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sebesar Rp.9.522.443.439 atau 92,40%. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.163
Capaian Program Inspektorat Tahun 2015

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.211.688.750	2.092.327.657	94,6
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	709.050.000	636.153.900	89,72
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	41.200.000	98,1
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	6.333.999.250	5.968.786.216	94,23
5.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	477.360.000	371.082.526	77.74
6.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	531.220.000	412.893.140	77,73
Jumlah		10.305.318.000	9.522.443.439	92,4

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Dari data tersebut terlihat semua programrealisasinya sudah cukup baik dan maksimal yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Guna pencapaian target dari program tersebut, Inspektorat Provinsi Jambi dalam hal peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeridan Inspektorat Kementerian Teknis lainnya. Peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur Inspektorat Provinsi Jambi sebagian besar telah terpenuhi dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis atas kerjasama tersebut, sehingga terjadi efisiensi dari program ini hingga 85,75%. Begitupula dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 77,73%, hal ini pun berdampak positif dengan adanya kerjasama dengan BPKP Provinsi Jambi, Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, dan Provinsi Lainnya dalam rangka penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Kegiatan utama Inspektorat Provinsi Jambi berupa pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan tujuan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut termasuk dalam program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.333.999.250 dan terealisasi sebesar Rp.5.968.786.216 atau sebesar 94,23%.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemeriksaan/pembinaan terhadap 158 Objek Pemeriksaan (Obrik) dengan 149 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 98,11% dari target yang telah rencanakan sebelumnya. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

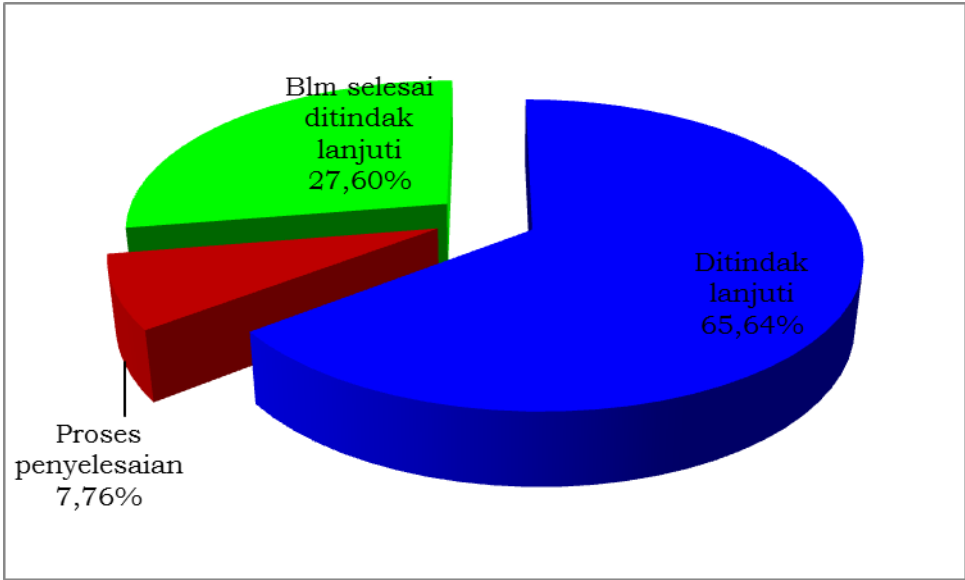
Tabel 4.164
Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2015

No.	U r a i a n	Pelaksanaan	Realisasi	
			Obrik	LHP
1.	Pemeriksaan Kas dan Stock Opname	Januari dan Desember	45	45
2.	Review Laporan Keuangan	Januari	1	1
3.	Monitoring Samisake	Desember	11	11
4.	Reguler SKPD Pemprov Jambi	Januari s.d Des	45	36
5.	Reguler Kab/Kota	Januari s.d Des	11	11
6.	Pemeriksaan Penilaian SKPD Provinsi Jambi	Desember	45	45
Jumlah			158	149

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Tindaklanjut hasil pemeriksaan sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus diupayakan penyelesaiannya.

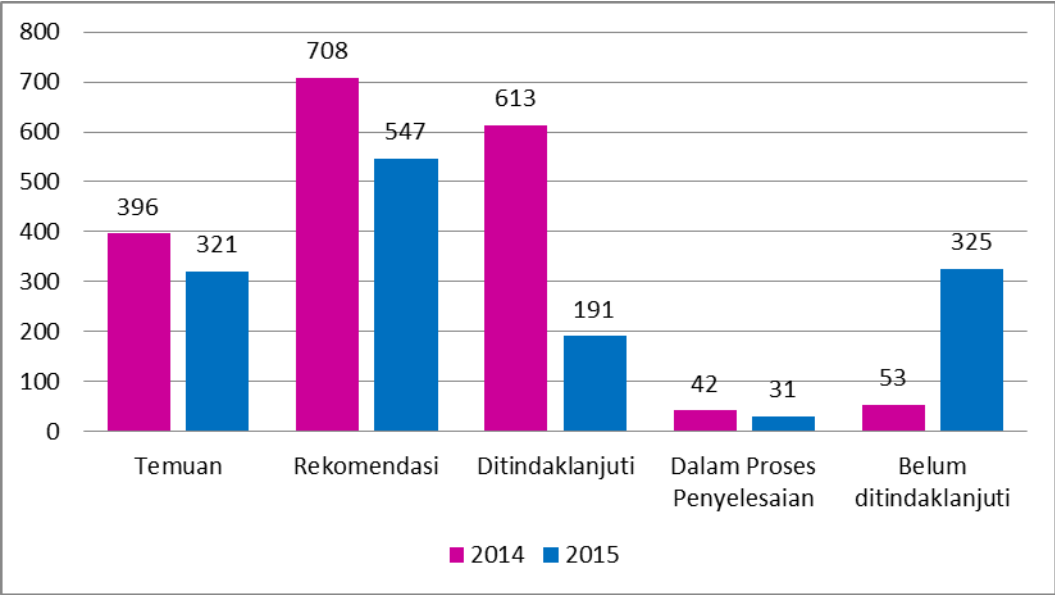
Adapun progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi dari tahun 2010 s.d. 2015 dapat dijelaskan bahwa jumlah temuan sebanyak 2.184 dengan 3.971 rekomendasi dari jumlah tersebut terdapat kerugian negara sebanyak Rp.10.683.461.543,53. Terhadap rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2.567 rekomendasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 308 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.096 rekomendasi.



Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Gambar 4.73 Persentase Rekomendasi Temuan Tahun 2010-2015

Pada Tahun 2014, Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan regular di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dapat dijelaskan bahwa terdapat temuan sebanyak 396 dengan 708 rekomendasi dari jumlah tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 613 rekomendasi atau 86,58 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 42 rekomendasi atau 5,93 persen dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 53 rekomendasi atau 7,49 persen. Sedangkan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian daerah sebesar Rp764.750.125,68 dan telah disetor sebesar Rp646.624.998,00 atau 84,55 persen, masih sisa sebesar Rp118.125.128,00 atau 15,45 persen.



Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Gambar 4.74 Hasil Pemeriksaan Regular tahun 2014 – 2015

Pada Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan regular di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijelaskan bahwa terdapat temuan sebanyak 321 dengan 547 rekomendasi dari jumlah tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 191 rekomendasi atau 34,92 persen, dalam proses penyelesaian sebanyak 31 rekomendasi atau 5,67 persen, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 325 rekomendasi atau 59,41 persen. Sedangkan temuan yang bersifat pengembalian atas kerugian daerah sebesar Rp4.132.862.827,49 dan telah disetor sebesar Rp57.379.521,00 atau 1,39 persen, masih sisa sebesar Rp4.075.483.306,49 atau 98,61 persen.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 72 temuan dengan 129 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 42 rekomendasi atau 36,20% sedangkan 74 rekomendasi atau 63,20% lainnya masih dalam proses.

Hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2002-2015 sebanyak 588 temuan dengan 1.312 rekomendasi terdiri dari Pemeriksaan LKPD, Pemeriksaan pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi, Pemeriksaan Bantuan Parpol, Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pemeriksaan atas dana perimbangan, Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi, Pemeriksaan Kinerja RSUD, Pemeriksaan Pendapatan, Pemeriksaa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas, Pemeriksaan Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi, Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort, Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi serta Pemeriksaan atas operasional PT. BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 dan Pemeriksaan atas Pengolahan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 serta Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Aktual TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III Tahun 2015).

Dari jumlah tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan percepatan Tahun 2015 penyelesaian tindak lanjut pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan hasil sebagai berikut :

1. Selesai ditindak lanjuti sejumlah 191 rekomendasi atau 34,92 persen,
2. Dalam proses penyelesaian tindaklanjut sebesar 31 rekomendasi atau 5,65 persen;
3. belum ditindaklanjuti sebanyak 325 rekomendasi atau 59,41 persen.

Secara rinci tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Inspektorat Provinsi Jambi dan BPK RI dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.165
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-
2015

No.	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahun 2006		30	59	58	1	0	0
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
Tahun 2007		43	109	106	3	0	0
3	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
4	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
5	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
6	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0
Tahun 2008		76	195	182	13	0	0
8	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
9	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
10	Pemeriksaan Kinerja RSUD Tahun Mattaheer TA 2008	19	70	59	11	0	0
11	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
Tahun 2009		43	101	99	2	0	0
12	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
13	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
14	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
Tahun 2010		55	127	93	34	0	0
15	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
16	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
17	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	5	2	0	0
18	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel dan Resort	3	5	3	2	0	0

No.	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
19	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	18	8	10	0	0
20	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	28	10	18	0	0
Tahun 2011		39	96	50	46	0	0
21	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	39	17	0	0
22	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	0	7	0	0
23	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	11	13	0	0
24	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi	6	9	0	9	0	0
Tahun 2012		40	81	52	29	0	0
25	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	27	14	0	0
26	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
27	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2012 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	16	13	0	0
Tahun 2013		46	131	38	38	55	0
28	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	38	38	6	0
29	Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	0	0	49	0
TOTAL		372	899	678	166	55	0

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Selain kegiatan yang bersifat rutinitas dan terjadwal, Inspektorat Provinsi Jambi juga melaksanakan tugas yang bersifat insidental berupa penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat. Pada tahun 2015 berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.166
Rekapitulasi Klasifikasi Pengaduan Masyarakat Posisi Tahun 2015

No.	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Klasifikasi Dumas									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MenPAN & RB	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kemendagri	5	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-
3	Gubernur Jambi	29	3	-	12	5	-	4	-	-	-	5
4	BKN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Setneg	9	-	2	3	-	4	-	-	-	-	-
6	Pengaduan Masy	49	2	3	25	5	3	2	-	-	-	9
	JUMLAH	92	5	6	40	12	9	6	0	0	0	14

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Keterangan :

1. : Penyalahgunaan Wewenang
2. : Pelayanan Masyarakat
3. : Korupsi/Pungutan Liar
4. : Kepegawaian/Ketenagakerjaan
5. : Pertanahan/Perumahan
6. : Hukum Peradilan
7. : Kewaspadaan Nasional
8. : Tata Laksana Pemerintahan
9. : Lingkungan Hidup
10. : Umum

Tabel 4.167
Rekapitulasi Tujuan Dumas Posisi Tahun 2015

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tujuan Surat			
			Gub	Bupati/	Inspektorat Provinsi	Lembaga Lain
				Walikota		
1	MenPAN dan RB	0	-	-	-	-
2	Kemendagri	5	2	1	2	-
3	Gubernur Jambi	29	12	-	17	-
4	BKN	0	-	-	-	-
5	Setneg	9	4	2	3	-
6	Pengaduan Masy	49	28	-	21	-
J u m l a h		92	46	3	43	0

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Dari data tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah menindaklanjuti atas 92 surat pengaduan tersebut berupa pemeriksaan, klarifikasi dan penegasan terhadap surat pengaduan dengan hasil; 34 surat pengaduan dilakukan pemeriksaan dan 6 surat dilakukan klarifikasi, 12 surat dilakukan penegasan, 40 surat tidak ditindaklanjuti.

Tabel 4.168
Rekapitulasi Tindak Lanjut Surat Dumas Tahun 2015

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Tindak Lanjut Surat				
			Diperiksa	Klarifikasi	Penegasan	Tidak Ditindak lanjuti	Belum Ditindak lanjuti
1	MenPAN & RB	0	-	-	-	-	-
2	Kemendagri	5	1	1	2	1	-
3	Gubernur Jambi	29	11	3	3	12	-
4	BKN	0	-	-	-	-	-
5	Setneg	9	1	2	2	4	-
6	Pengaduan Masy	49	21	-	5	23	-
Jumlah		92	34	6	12	40	0

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Tabel 4.169
Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Dumas Tahun 2015

No	Pelimpahan	Jumlah Dumas	Hasil Tindak Lanjut Surat					
			Diperiksa		Klarifikasi		Penegasan	
			Terbukti	Tidak Terbukti	TS	TTS	TS	TTS
1	MenPAN dan RB	0	-	-	-	-	-	-
2	Itjen Kemdagri	5	-	1	1	-	2	-
3	Gubernur Jambi	29	5	6	3	-	3	-
4	BKN	0	-	-	-	-	-	-
5	Setneg	9	1	-	2	-	2	-
6	Pengaduan Masy	49	13	8	-	-	5	-
Jumlah		92	19	15	6	-	12	-

Sumber : Inspektorat Provinsi Jambi

Keterangan :

TS : Tuntas.

TTS : Tidak Tuntas

Beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan selama melakukan program dan kegiatan prioritas Inspektorat Provinsi Jambi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
2. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.

4. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengupayakan penyelesaian Kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
2. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP
3. Menyarankan SKPD agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan lembaga pemeriksaan, baik APFP maupun BPK sehingga tindaklanjut dapat dilaksanakan dengan cepat
4. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

4.1.17.6 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi Di Jakarta

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi Jambi (Desentralisasi) dalam bidang penghubung yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang oleh Gubernur Jambi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas pembantuan (Desentralisasi) yang diberikan ditetapkan oleh Pemerintahan kepada Gubernur Jambi.

Program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan berupa kegiatan urusan rutin dan kegiatan urusan wajib dengan total anggaran sebesar Rp. 9.853.000.000,- yang terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan.

Adapun program pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta terdiri dari dua urusan yaitu urusan rutin dan urusan wajib, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Rutin

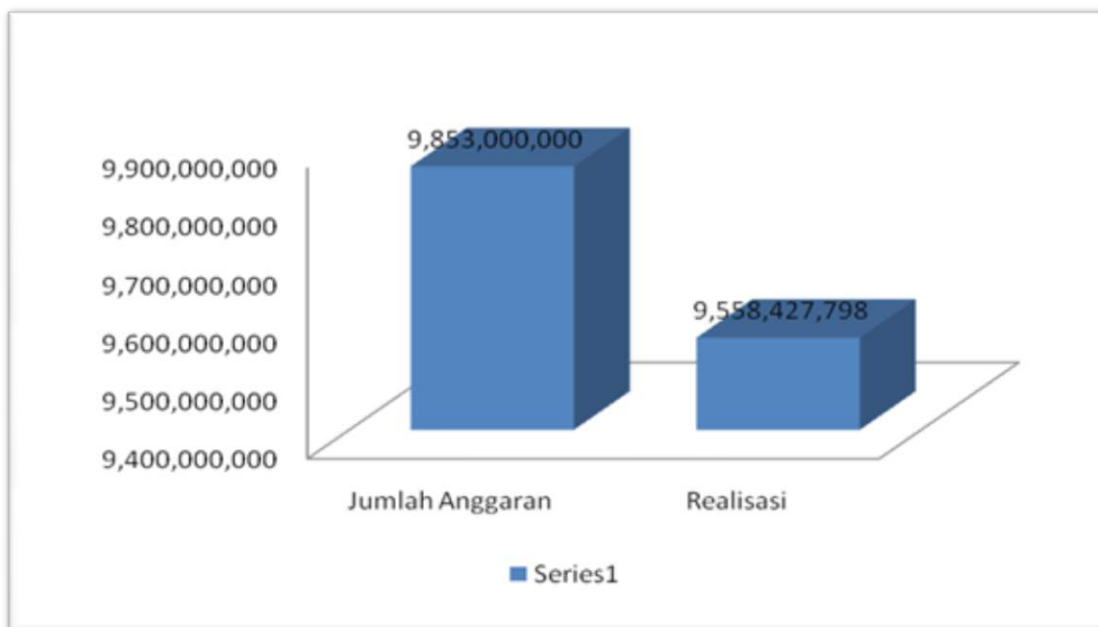
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (13 Kegiatan)
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik. Penerangan Bangunan Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Kegiatan rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
 - 13) Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum
- b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan)
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan)
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 Kegiatan)
 - 1) Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis.

2. Urusan Wajib

- a. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (1 Kegiatan)
 - 1) Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- b. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah (2 Kegiatan).
 - 1) Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi;
 - 2) Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

Pencapaian Program/Kegiatan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta Tahun Anggaran 2015, secara keseluruhan dinilai berhasil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.853.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.558.427.798,- atau sebesar 97,01 %.



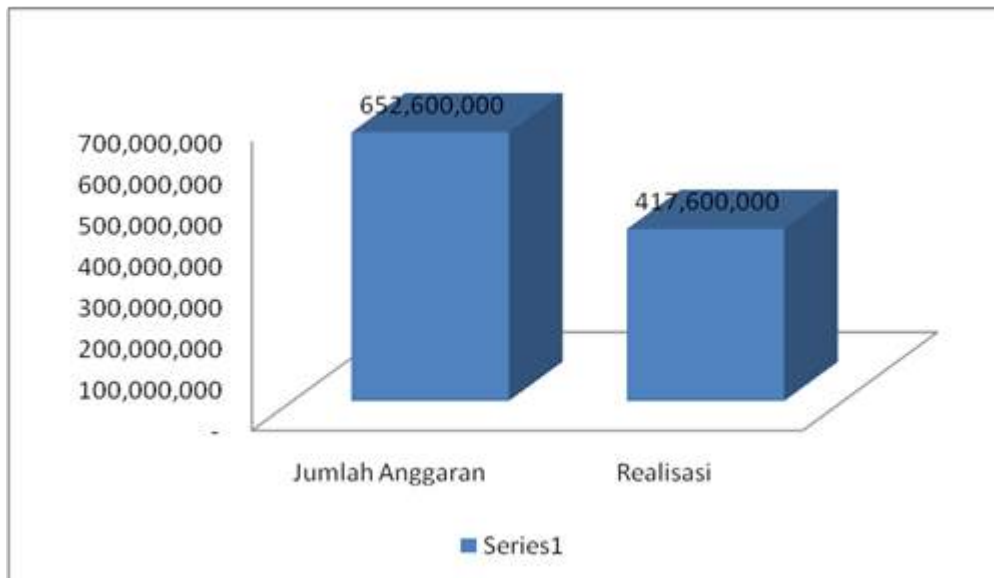
Sumber : Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Gambar 4.75 Jumlah Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta Tahun 2015

Adapun program/kegiatan pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta yang menjadi prioritas adalah kegiatan yang merupakan urusan wajib sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan prioritas Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Kegiatan ini bertujuan mendukung peningkatan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan Provinsi, Kab/Kota yang mandiri melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2015 Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 652.600.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 417.600.000,- (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) atau 92,83%, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan ini dinilai berhasil walaupun mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Pelaksanaan kegiatan ini mempunyai output terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan sinergi pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas.



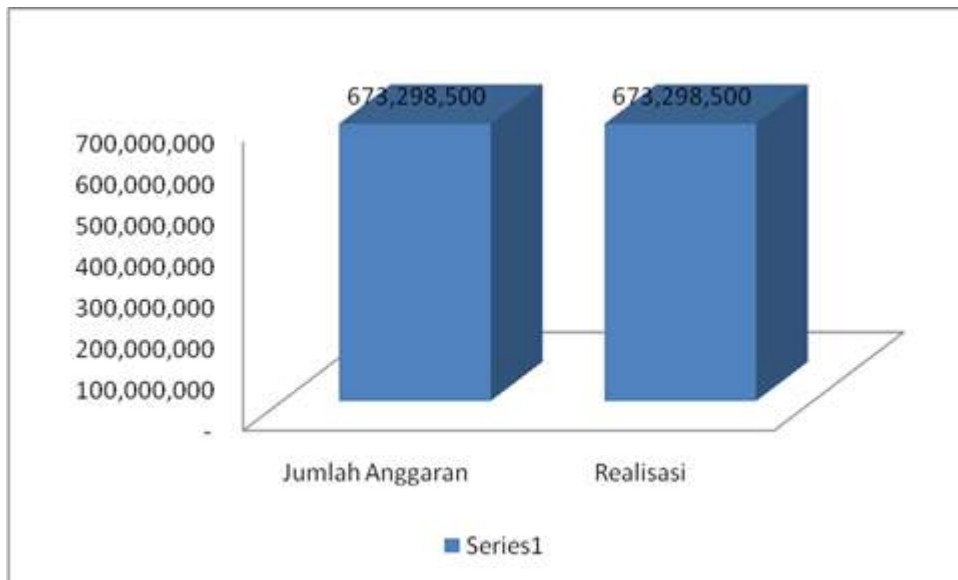
Sumber : Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi

Gambar 4.76Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2015

2. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan prioritas kegiatan :

a. Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kreatifitas seni dan budaya daerah promosi dan informasi. Pada Tahun 2015 Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 673.298.500 (Enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 673.298.500 (Enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 100,00% dengan realisasi fisik mencapai 100,00%. Kegiatan ini dinilai berhasil. Pelaksanaan kegiatan ini mempunyai output terlaksananya seni budaya daerah promosi dan promosi Daerah Provinsi Jambi.

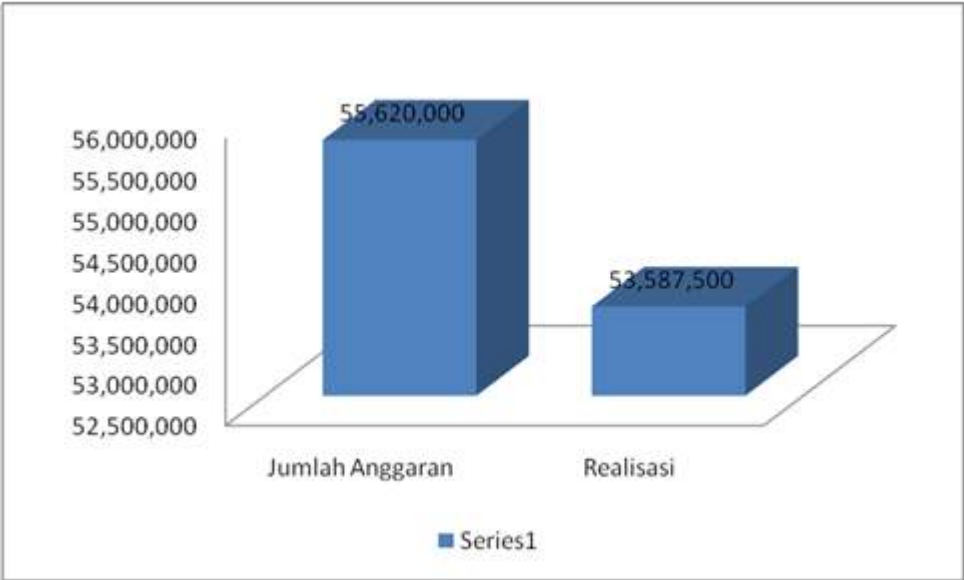


Sumber : Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi

Gambar 4.77 Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah pada Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi Tahun 2015

- b. Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pembangunan dan potensi ekonomi Provinsi Jambi dengan mengekspose hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pada Tahun 2015 Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 55.620.000 (Lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.587.500,- (Lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 96,35% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 2.032.500,- (Dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kegiatan ini dinilai berhasil. Pelaksanaan program kegiatan ini mempunyai output diperolehnya saran pendapat dari semua stakeholder dalam pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik.



Sumber : Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi

Gambar 4.78 Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah pada Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik Tahun 2015

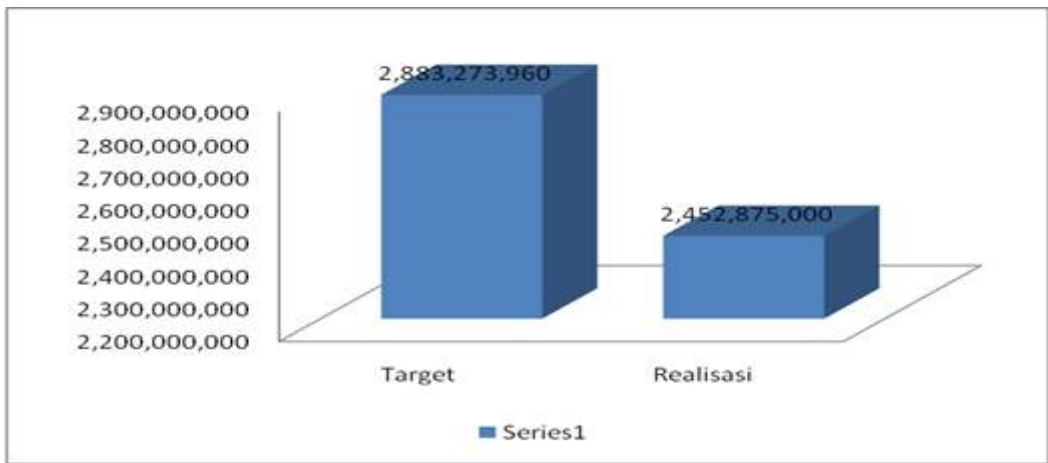
Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta dalam hal kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi sewa Mess Pemda Jambi setiap tahun menunjukkan peningkatan hasil dengan target yang terus meningkat. Adapun data Kontribusi Retribusi Sewa Mess Pemda Jambi Tahun 2011 -2015 sebagai berikut :

Tabel 4.170
Data Kontribusi Retribusi Sewa Mess Pemda. Jambi Tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2011	1.900.000.000,-	2.448.900.000,-	128,89
2012	2.008.000.000,-	2.442.700.000,-	121,65
2013	2.720.000.000,-	2.801.120.000,-	102,98
2014	2.888.650.000,-	2.510.300.000,-	86,9
2015	2.883.273.960,-	2.452.875.000,-	85,07

Sumber : Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi retribusi sewa Mess Pemda Jambi sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 setiap tahun semakin meningkat. Untuk Tahun 2015 Mess Pemda Jambi mempunyai target sebesar Rp. 2.883.273.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.452.875.000,- dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi

Gambar 4.79 Target dan Realisasi Retribusi Sewa Mess Pemda Jambi Tahun 2015

Adanya penurunan realisasi retribusi Mess Pemda Jambi dikarenakan target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan kenaikan tarif Mess Pemda Jambi, selain itu berlakunya *at cost* bagi perjalanan dinas Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, memberikan peluang bagi pegawai tersebut untuk menginap di tempat lain dengan menyesuaikan anggaran perjalanan dinas bagi pegawai yang bersangkutan.

Dengan melihat perkembangan selama Tahun 2011-2015 maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain perlu ditetapkannya Perda dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset terkait dengan Pengelolaan Asrama mahasiswa yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor dan Yogyakarta, sehingga anggaran pengelolaan atau pembiayaan operasional asrama-asrama tersebut menjadi jelas. Selain itu perlunya peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta yang selama ini masih bergabung dengan Mess Pemda Jambi, diharapkan kedepan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai gedung kantor sendiri demi kelancaran kegiatan pembangunan daerah dan untuk tertib administrasi perkantoran. Sehingga visi misi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta dapat terwujud dengan baik.

4.1.17.7 Dinas Pendapatan Daerah

a. Program dan Kegiatan

Keberhasilan sasaran strategis tersebut dapat dicapaimelalui pelaksanaan 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp.18.548.795.000,00,- yang realisasinya mencapai 88,52%, rincian realisasinya sebagai berikut

Tabel 4.171
Program Kegiatan Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.800.000,00	67.356.000,00	78,5
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber-daya Air dan Listrik	2.682.413.368,00	2.450.454.363,00	91,4
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	316.559.100,00	296.937.000,00	93,8
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	508.471.400,00	486.554.600,00	95,7
e.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	909.212.000,00	813.416.410,00	89,5
f.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.296.320.550,00	934.265.100,00	72,1
g.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	27.551.067,00	68,9
h.	Penyediaan Makanan dan Minuman	279.228.350,00	174.107.550,00	62,4
i.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.458.867.650,00	1.335.511.561,00	91,5
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			
a.	Pengadaan peralatan gedung kantor	970.100.000,00	956.704.000,00	98,6
b.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	1.415.000.000,00	929.663.587,00	65,7
c.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	574.434.582,00	506.723.660,00	88,2
d.	Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor	1.671.250.000,00	1.640.888.400,00	98,2
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	88.800.000,00	86.400.000,00	97,3
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
a.	Pendidikan dan pelatihan formal	180.000.000,00	142.558.075,00	79,2
5.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
a.	Monitoring, evaluasi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	396.554.000,00	377.552.600,00	95,2
b.	Intensifikasi, Ekstensifikasi peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan Ke-SAMSATAN dalam Provinsi Jambi	4.925.020.000,00	4.498.041.841,00	91,3
c.	Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah	350.104.000,00	334.774.700,00	95,6
d.	Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB dan Dana Bagi Hasil	400.660.000,00	360.280.571,00	89,9

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.576.872.418,- terealisasi sebesar Rp.6.586.153.651,-. atau 86,92 %. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan terciptanya pelayanan publik yang menuju kepada pelayanan prima. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 85.800.000,- terealisasi sebesar Rp.67.356.000,- atau 78,50 %.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.682.413.368,- terealisasi sebesar Rp.2.450.454.363,- atau 91,35 %.
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 316.559.100,- terealisasi sebesar Rp.296.937.000,- atau 93,80 %.
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 508.471.400,- terealisasi sebesar Rp.486.554.600,- atau 95,69 %.
- e) Penyediaan alat tulis kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.909.212.000,- terealisasi sebesar Rp.813.416.410,- atau 89,46 %.
- f) Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.296.320.550,- terealisasi sebesar Rp.934.265.100,- atau 72,07 %
- g) Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.000.000,- terealisasi Rp.27.551.067,- atau 68,88 %.
- h) Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp.279.228.350,- terealisasi sebesar Rp.174.107.550,- atau 62,35 %.
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.458.867.650,- terealisasi sebesar Rp.1.335.511.561,- atau 91,54 % .

Berdasarkan indikator output, kegiatan ini telah tercapai sebesar 100 % yaitu :

- a) Terpenuhinya belanja jasa surat menyurat.
- b) Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- c) Terpenuhinya jasa administrasi keuangan.
- d) Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan.
- e) Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor.
- f) Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g) Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- h) Tersedianya belanja makanan dan minuman.
- i) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Hasil (out comes) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a) Peningkatan pelayanan.
 - b) Peningkatan kesejahteraan pegawai.
 - c) Peningkatan kegiatan kantor.
 - d) Peningkatan wawasan.
 - e) Kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.630.784.582.000,- terealisasi sebesar Rp.4.003.979.647,- atau 87,11 %

Dengan dilaksanakannya program / kegiatan ini diharapkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja dapat lebih meningkat sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, rincian realisasinya adalah :

- a) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.970.100.000,- realisasisebesar Rp.956.704.000,- atau 98,62 %
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.415.000.000,- realisasi sebesar Rp.929.663.587,- atau 65,70 %
- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.574.434.582,- realisasi sebesar Rp.506.723.660,- atau 88,21 %.
- d) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.671.250.000,-realisasisebesar Rp.1.640.888.400,- atau 98,18 %

Hasil (out comes) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana
 - b) Kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c) Sarana dan prasarana gedung kantor yang baik
 - d) Tersedianya gedung kantor yang baik.
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Dengan adanya program ini diharapkan disiplin Aparatur Dipenda Provinsi Jambi akan semakin meningkat. Pagu anggaranprogram inisebesar Rp.88.800.000,-danterealisisebesar Rp.86.400.000,- atau 97,30%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya, pagu anggaran sebesar Rp.88.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.86.400.000,- atau 97,30%

Hasil (out come) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan disiplin aparatur Dipenda Provinsi Jambi.

4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Dengan program ini diharapkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Dipenda Provinsi Jambi akan semakin meningkat. pagu anggaran yang diperlukan dalam program ini adalah sebesar Rp.180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.142.558.075,- atau 79,20 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

Berdasarkan indikator output, kegiatan ini telah tercapai sebesar 100 %, yaitu : dengan mengirimkan aparat untuk mengikuti kursus/diklat yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

Hasil (out comes) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas dan wawasan aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.

5) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan program ini diharapkan penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi akan semakin terus meningkat. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp.6.072.338.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.570.619.712,- atau 91,75 %. Program ini mempunyai 4 (tiga) kegiatan dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- a) Monitoring, evaluasi Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan pagu sebesar Rp.396.554.000,- realisasinya sebesar Rp.377.552.600,- atau 95,21 %
- b) Intensifikasi, ekstensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan Kesamsatan dalam provinsi Jambi dengan pagu sebesar Rp.4.925.020.000,- terealisasi sebesar Rp.4.498.041.841,- atau 91,33 %
- c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dengan pagu sebesar Rp.350.104.000,- realisasinya sebesar Rp.334.744.700,- atau 95,61 %

- d) Optimalisasi Penerimaan PBB dan Dana Bagi Hasil dengan pagu sebesar Rp.400.660.000,- realisasinya sebesar Rp.360.280.571,- atau 89,92 %

Berdasarkan indikator output, kegiatan ini telah tercapai sebesar 100 %, yaitu :

- a) Tersedianya pelaporan monitoring kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang terkini..
- b) Tersedianya data potensi pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD.

Selanjutnyadaritotalbelanjalangsung,dialokasikanuntuk belanjalangsung urusan wajib sebesar Rp1.681.287.801.976.09 atau 92,11persenuntukbelanja langsung urusan pilihan sebesar Rp144.051.328.000 atausestaradengan 7,89 persen.Untuklebih jelasnyadapatdilihat padaTabeldi bawahini.

Tabel 4.172
Rincian Belanja Langsung Berdasarkan Urusan

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
1	Urusan Wajib	1.681.287.801.976,09	1.531.906.813.314,92	149.380.988.661,17	91,12
	Belanja Pegawai	126.958.806.382,31	102.585.320.056,00	24.373.486.326,31	
	Belanja Barang dan Jasa	754.216.061.949,78	665.324.008.682,08	88.892.053.267,70	
	Belanja Modal	800.112.933.644,00	763.997.484.576,84	36.115.449.067,16	
2	Urusan Pilihan	144.051.328.000,00	131.747.177.827,05	12.304.150.172,95	91,46
	Belanja Pegawai	8.575.963.400,00	8.317.247.900,00	258.715.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	105.562.103.632,00	94.666.407.513,00	10.895.696.119,00	
	Belanja Modal	29.913.260.968,00	28.763.522.414,05	1.149.738.553,95	
	Jumlah Belanja	1.825.339.129.976,09	1.663.653.991.141,97	161.685.138.834,12	91,14

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (data sementara)

Selanjutnyatabeldiatasjugamemperlihatkanbahwadaritotalbelanjalangsung urusan wajib tersebut,Rp126.958.806.382,31atau 6,95 persen dialokasikanuntukbelanjapegawai,Rp754.216.061.949,78 atau 41,31 persendialokasikanuntukbelanjabarangdanjasa,serta Rp800.112.933.644 atau 43,83persendialokasikanuntukbelanja modal.

Daritotalanggaranbelanjalangsungurusanwajibsebagaimanayang diperlihatkan padaTabel di atas,secaratotalrealisasianggaranurusanwajibterealisasi sebesar Rp1.531.906.813.314,92ataus e b e s a r 91,12 (data sementara).

Sementara untuk urusan pilihan dan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp144.051.328.000 terealisasi sebesar Rp131.747.177.827,05 atau sebesar 91,14 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.173
Realisasi Belanja Langsung per SKPD tahun 2015

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	247.386.566.435,00	229.218.719.383,00	18.167.847.052,00	92,66
	Belanja Pegawai	11.126.981.500,00	10.647.606.000,00	479.375.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	173.402.480.835,00	157.207.388.063,00	16.195.092.772,00	
	Belanja Modal	62.857.104.100,00	61.363.725.320,00	1.493.378.780,00	
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	25.819.022.536,00	22.954.287.677,33	2.864.734.858,67	88,90
	Belanja Pegawai	3.155.839.731,31	3.017.848.110,00	137.991.621,31	
	Belanja Barang dan Jasa	19.396.249.289,69	18.030.029.753,00	1.366.219.536,69	
	Belanja Modal	3.266.933.515,00	1.906.409.814,33	1.360.523.700,67	
3	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	218.308.236.912,37	165.534.119.881,00	52.774.117.031,37	75,83
	Belanja Pegawai	70.187.283.651,00	49.051.468.446,00	21.135.815.205,00	
	Belanja Barang dan Jasa	87.040.109.012,37	60.498.788.530,00	26.541.320.482,37	
	Belanja Modal	61.080.844.249,00	55.983.862.905,00	5.096.981.344,00	
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	37.888.765.217,72	35.133.962.998,07	2.754.802.219,65	92,73
	Belanja Pegawai	2.191.244.400,00	2.055.926.100,00	135.318.300,00	
	Belanja Barang dan Jasa	21.979.740.809,72	19.936.470.392,00	2.043.270.417,72	
	Belanja Modal	13.717.780.008,00	13.141.566.506,07	576.213.501,93	
5	Dinas Pekerjaan Umum	760.500.339.475,00	722.183.188.963,00	38.317.150.512,00	94,96
	Belanja Pegawai	4.942.503.000,00	4.565.313.000,00	377.190.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	147.068.369.489,00	135.589.013.055,00	11.479.356.434,00	
	Belanja Modal	608.489.466.986,00	582.028.862.908,00	26.460.604.078,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
6	BAPPEDA	16.535.000.000,00	15.631.905.402,50	903.094.597,50	94,54
	Belanja Pegawai	1.539.327.000,00	1.465.147.500,00	74.179.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	14.614.811.000,00	13.787.134.902,50	827.676.097,50	
	Belanja Modal	380.862.000,00	379.623.000,00	1.239.000,00	
7	Dinas Perhubungan	33.506.207.500,00	30.865.808.669,21	2.640.398.830,79	92,12
	Belanja Pegawai	1.558.365.000,00	1.222.154.500,00	336.210.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	13.695.641.750,00	11.794.691.050,00	1.900.950.700,00	
	Belanja Modal	18.252.200.750,00	17.848.963.119,21	403.237.630,79	
8	Badan Lingkungan Hidup	7.704.026.000,00	6.905.334.934,00	798.691.066,00	89,63
	Belanja Pegawai	389.335.000,00	356.789.500,00	32.545.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.337.844.868,00	5.643.979.834,00	693.865.034,00	
	Belanja Modal	976.846.132,00	904.565.600,00	72.280.532,00	
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan	8.450.176.400,00	7.870.471.461,00	579.704.939,00	93,14
	Belanja Pegawai	457.840.000,00	442.146.000,00	15.694.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.946.304.200,00	7.382.545.461,00	563.758.739,00	
	Belanja Modal	46.032.200,00	45.780.000,00	252.200,00	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.477.595.000,00	2.804.167.752,00	673.427.248,00	80,64
	Belanja Pegawai	579.939.000,00	481.194.000,00	98.745.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.732.656.000,00	2.159.173.752,00	573.482.248,00	
	Belanja Modal	165.000.000,00	163.800.000,00	1.200.000,00	
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.616.975.000,00	17.088.265.126,00	1.528.709.874,00	91,79
	Belanja Pegawai	1.574.063.900,00	1.550.121.900,00	23.942.000,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
	Belanja Barang dan Jasa	16.314.471.100,00	14.840.314.226,00	1.474.156.874,00	
	Belanja Modal	728.440.000,00	697.829.000,00	30.611.000,00	
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9.744.553.000,00	8.847.282.030,00	897.270.970,00	90,79
	Belanja Pegawai	335.618.000,00	324.818.000,00	10.800.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.458.684.300,00	6.727.315.030,00	731.369.270,00	
	Belanja Modal	1.950.250.700,00	1.795.149.000,00	155.101.700,00	
13	BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.236.275.000,00	4.018.657.845,00	217.617.155,00	94,86
	Belanja Pegawai	600.232.000,00	536.849.500,00	63.382.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	3.582.018.000,00	3.427.838.345,00	154.179.655,00	
	Belanja Modal	54.025.000,00	53.970.000,00	55.000,00	
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.074.754.000,00	16.589.109.631,00	1.485.644.369,00	91,78
	Belanja Pegawai	1.254.918.500,00	1.205.687.700,00	49.230.800,00	
	Belanja Barang dan Jasa	14.003.586.500,00	12.655.376.931,00	1.348.209.569,00	
	Belanja Modal	2.816.249.000,00	2.728.045.000,00	88.204.000,00	
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi	22.156.614.000,00	20.222.024.379,23	1.934.589.620,77	91,27
	Belanja Pegawai	3.034.774.900,00	2.966.599.400,00	68.175.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	16.159.958.500,00	14.382.528.453,00	1.777.430.047,00	
	Belanja Modal	2.961.880.600,00	2.872.896.526,23	88.984.073,77	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	7.654.932.000,00	7.167.399.087,00	487.532.913,00	93,63
	Belanja Pegawai	2.089.894.400,00	2.025.749.400,00	64.145.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.044.510.675,00	4.631.609.137,00	412.901.538,00	
	Belanja Modal	520.526.925,00	510.040.550,00	10.486.375,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
17	Badan Kesbangpol	6.800.371.000,00	6.481.397.568,00	318.973.432,00	95,31
	Belanja Pegawai	790.315.000,00	773.101.250,00	17.213.750,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.902.556.000,00	5.603.796.318,00	298.759.682,00	
	Belanja Modal	107.500.000,00	104.500.000,00	3.000.000,00	
18	Sekretariat Daerah	85.268.299.000,00	79.767.564.510,00	5.500.734.490,00	93,55
	Belanja Pegawai	8.433.078.500,00	7.883.904.900,00	549.173.600,00	
	Belanja Barang dan Jasa	73.659.413.500,00	68.789.052.610,00	4.870.360.890,00	
	Belanja Modal	3.175.807.000,00	3.094.607.000,00	81.200.000,00	
19	Sekretariat Dewan	42.621.825.500,00	33.518.345.129,58	9.103.480.370,42	78,64
	Belanja Pegawai	441.500.900,00	381.714.900,00	59.786.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	38.028.434.730,00	29.170.644.449,58	8.857.790.280,42	
	Belanja Modal	4.151.889.870,00	3.965.985.780,00	185.904.090,00	
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18.748.231.000,00	17.673.306.841,00	1.074.924.159,00	94,27
	Belanja Pegawai	2.598.455.380,00	2.493.646.500,00	104.808.880,00	
	Belanja Barang dan Jasa	10.350.175.731,00	9.481.229.314,00	868.946.417,00	
	Belanja Modal	5.799.599.889,00	5.698.431.027,00	101.168.862,00	
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.147.458.000,00	3.921.802.551,00	225.655.449,00	94,56
	Belanja Pegawai	809.858.000,00	786.390.500,00	23.467.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.922.435.000,00	2.730.159.551,00	192.275.449,00	
	Belanja Modal	415.165.000,00	405.252.500,00	9.912.500,00	
22	Inspektorat Provinsi	10.305.318.000,00	9.514.645.398,00	790.672.602,00	92,33
	Belanja Pegawai	439.862.400,00	382.875.400,00	56.987.000,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
	Belanja Barang dan Jasa	9.378.405.600,00	8.679.836.098,00	698.569.502,00	
	Belanja Modal	487.050.000,00	451.933.900,00	35.116.100,00	
23	Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi	9.853.000.000,00	9.558.427.798,00	294.572.202,00	97,01
	Belanja Pegawai	778.648.500,00	769.879.000,00	8.769.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.047.351.500,00	7.773.678.798,00	273.672.702,00	
	Belanja Modal	1.027.000.000,00	1.014.870.000,00	12.130.000,00	
24	Dinas Pendapatan Provinsi Jambi	18.548.795.000,00	16.419.935.135,00	2.128.859.865,00	88,52
	Belanja Pegawai	2.531.876.400,00	2.378.768.400,00	153.108.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	13.428.768.600,00	11.486.774.335,00	1.941.994.265,00	
	Belanja Modal	2.588.150.000,00	2.554.392.400,00	33.757.600,00	
25	Sekretariat KORPRI	3.045.373.000,00	2.857.603.733,00	187.769.267,00	93,83
	Belanja Pegawai	495.135.620,00	479.433.500,00	15.702.120,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.120.817.930,00	1.952.266.951,00	168.550.979,00	
	Belanja Modal	429.419.450,00	425.903.282,00	3.516.168,00	
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12.146.360.000,00	11.065.053.177,00	1.081.306.823,00	91,10
	Belanja Pegawai	472.868.700,00	398.841.400,00	74.027.300,00	
	Belanja Barang dan Jasa	10.314.962.300,00	9.317.280.469,00	997.681.831,00	
	Belanja Modal	1.358.529.000,00	1.348.931.308,00	9.597.692,00	
27	Badan Kepegawaian Daerah	4.907.567.000,00	4.281.692.858,00	625.874.142,00	87,25
	Belanja Pegawai	614.546.500,00	477.131.000,00	137.415.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.015.570.500,00	3.533.856.241,00	481.714.259,00	
	Belanja Modal	277.450.000,00	270.705.617,00	6.744.383,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
28	KPID	2.932.734.000,00	2.710.532.526,00	222.201.474,00	92,42
	Belanja Pegawai	601.884.000,00	594.924.000,00	6.960.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.180.018.750,00	1.703.386.435,00	476.632.315,00	
	Belanja Modal	150.831.250,00	412.222.091,00	(261.390.841,00)	
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.629.000.000,00	9.140.152.940,00	488.847.060,00	94,92
	Belanja Pegawai	965.810.000,00	941.945.000,00	23.865.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.870.690.000,00	7.454.237.940,00	416.452.060,00	
	Belanja Modal	792.500.000,00	743.970.000,00	48.530.000,00	
30	Badan Perpustakaan dan Arsip	7.131.252.000,00	6.857.422.186,00	273.829.814,00	96,16
	Belanja Pegawai	614.510.500,00	612.766.750,00	1.743.750,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.581.876.000,00	5.316.247.436,00	265.628.564,00	
	Belanja Modal	934.865.500,00	928.408.000,00	6.457.500,00	
31	Badan Ketahanan Pangan	4.581.279.000,00	4.372.551.399,00	208.727.601,00	95,44
	Belanja Pegawai	500.063.000,00	494.728.000,00	5.335.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.044.441.480,00	3.841.500.976,00	202.940.504,00	
	Belanja Modal	36.774.520,00	36.322.423,00	452.097,00	
32	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	5.095.473.000,00	4.730.189.181,00	365.283.819,00	92,83
	Belanja Pegawai	924.248.000,00	882.490.500,00	41.757.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	4.055.265.000,00	3.731.738.681,00	323.526.319,00	
	Belanja Modal	115.960.000,00	115.960.000,00	0,00	
33	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	23.038.510.500,00	21.840.682.454,00	1.197.828.046,00	94,80
	Belanja Pegawai	1.583.976.400,00	1.574.681.400,00	9.295.000,00	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
	Belanja Barang dan Jasa	14.474.162.401,00	13.600.680.054,00	873.482.347,00	
	Belanja Modal	6.980.371.699,00	6.665.321.000,00	315.050.699,00	
34	Dinas Perkebunan	33.125.893.000,00	29.798.606.084,00	3.327.286.916,00	89,96
	Belanja Pegawai	528.237.400,00	459.212.450,00	69.024.950,00	
	Belanja Barang dan Jasa	28.490.029.450,00	25.555.220.174,00	2.934.809.276,00	
	Belanja Modal	4.107.626.150,00	3.784.173.460,00	323.452.690,00	
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.865.933.000,00	22.437.119.862,99	1.428.813.137,01	94,01
	Belanja Pegawai	1.990.883.000,00	1.932.422.500,00	58.460.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	12.792.122.000,00	11.692.266.214,00	1.099.855.786,00	
	Belanja Modal	9.082.928.000,00	8.812.431.148,99	270.496.851,01	
36	Dinas Kehutanan	9.732.846.000,00	8.509.172.383,00	1.223.673.617,00	87,43
	Belanja Pegawai	690.390.400,00	654.224.900,00	36.165.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.490.401.600,00	7.319.954.483,00	1.170.447.117,00	
	Belanja Modal	552.054.000,00	534.993.000,00	17.061.000,00	
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.005.133.000,00	9.144.763.790,00	2.860.369.210,00	76,17
	Belanja Pegawai	449.992.400,00	416.117.850,00	33.874.550,00	
	Belanja Barang dan Jasa	11.231.110.600,00	8.411.789.500,00	2.819.321.100,00	
	Belanja Modal	324.030.000,00	316.856.440,00	7.173.560,00	
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.110.676.500,00	26.061.698.504,06	1.048.977.995,94	96,13
	Belanja Pegawai	2.596.674.400,00	2.554.154.400,00	42.520.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	17.621.720.231,00	16.752.090.739,00	869.629.492,00	
	Belanja Modal	6.892.281.869,00	6.755.453.365,06	136.828.503,94	

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	+ / (-)	(%)
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.637.764.000,00	9.956.619.914,00	681.144.086,00	93,60
	Belanja Pegawai	663.794.400,00	663.794.400,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000.350,00	7.398.531.514,00	601.468.836,00	
	Belanja Modal	1.973.969.250,00	1.894.294.000,00	79.675.250,00	
	Jumlah Belanja Langsung	1.825.339.129.976,09	1.663.653.991.141,97	161.685.138.834,12	91,14
	Belanja Pegawai	135.534.769.782,31	110.902.567.956,00	24.632.201.826,31	81,83
	Belanja Barang dan Jasa	859.778.165.581,78	759.990.416.195,08	99.787.749.386,70	88,39
	Belanja Modal	830.026.194.612,00	792.761.006.990,89	37.265.187.621,11	95,51

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (data sementara)

4.1.17.8 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi, yang merupakan bagian perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang berada dibawah Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan anggota KORPRI di lingkungan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DEWAN PENGURUS KORPRI Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan kerjasama.
2. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan pembinaan disiplin, jiwa korsa, wawasan kebangsaan serta perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota.
3. Penyelenggaraan kegiatan usaha, kesejahteraan dan bantuan sosial.
4. Penyelenggaraan pembinaan rohani, jasmani (olahraga) dan kesenian (sosial budaya).

5. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Capaian Program / Kegiatan Tahun 2015

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka pada Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.045.373.000,00 untuk pelaksanaan 5 (lima) program yang dijabarkan pada 28 kegiatan.

Dalam mencapai sasaran strategik untuk penuntasan visi dan misi serta berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2015 ini telah ditetapkan 5 (lima) program dan 28 kegiatan yang dituangkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 pada DPA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.045.373.000,-.. dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut, realisasi keuangan mencapai Rp 2.857.603.133,00 atau sebesar 93,83 % dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan operasional rutin pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang ada pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi. Peningkatan pelayanan administrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai visi dan misi organisasi SKPD Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi.

Untuk capaian sasaran program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp 686.998.130,00, sampai dengan 31 Desember 2015 capaian realisasi keuangan sebesar Rp 673.775.039,00 atau 98,08%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi di Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi, dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di SKPD Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi.

Untuk capaian sasaran program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur pada Tahun Anggaran 2015, dari alokasi anggaran sebesar Rp 635.578.570,00 sampai dengan akhir Desember 2015 Rp 588.744.936,00 atau 92,64%.

Rincian capaian kinerja pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu sebagai berikut:

Tabel.4.174

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Tingkat Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
1	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas / operasional	1 Unit	1 Unit	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	9 Unit	9 Unit	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	5 Unit	5 Unit	100%
4	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1 Unit	100%
5	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	15 Unit	15 Unit	100%

Sumber: Sekretariat KORPRI Provinsi Jambi

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur yang ada di lingkungan SKPD Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi, dengan meningkatnya kedisiplinan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi SKPD Sekretariat DP KORPRI Provinsi Jambi.

Untuk pencapaian sasaran program peningkatan disiplin aparatur pada Tahun Anggaran 2015, dari alokasi anggaran sebesar Rp 73.112.600,00 sampai dengan akhir Desember 2015 realisasi mencapai Rp 70.367.500,00 atau 96,25%.

Rincian capaian kinerja pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.175
Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Persentase aparatur yang disiplin baik dalam berpakaian maupun dalam melaksanakan tugas-tugas	100%	100%	100%
1	Terlaksanannya Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	40 Stel	40 Stel	100%
2	Terlaksnananya Kegiatan Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Kedisiplinan PNS/ Anggota KORPRI	12 Kali	12 Kali	100%

Sumber: Sekretariat KORPRI Provinsi Jambi

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta wawasan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur dan abdi masyarakat, dengan meningkatnya kemampuan, keterampilan dan wawasan ini diharapkan aparatur akan mampu meningkatkan produktifitas dan kinerja aparatur. Untuk pencapaian sasaran program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun anggaran 2015, dari alokasi anggaran sebesar Rp

857.657.400,00 sampai dengan akhir Desember 2015 Rp 828.885.400,00 96,65%.

Rincian capaian Kinerja pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini yaitu sebagai berikut:

Tabel.4.176
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya diklat fomal bagi pegawai	6 org	6 org	100%
2	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI se- Provinsi Jambi	1 Kali	1 Kali	100%
	- Dibentuknya dan dikukuhkan kepengurusan KORPRI di Kabupaten/ Kota.	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%
	- Program dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang sinergis dengan program dan kegiatan Dewan Pengurus Nasional dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota	5 Program Kerja	5 Program Kerja	100%
	- Jumlah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/ Kota yang difasilitasi menjadi SKPD	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota	33,33%
3	Terselenggaranya Kegiatan Pekan Olahraga KORPRI Tingkat Provinsi	1 kali	1 kali	100%
	- Jumlah Anggota KORPRI yang meningkat prestasinya di bidang olahraga	40 og	40 og	100%
4	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerukunan Hidup Beragama Bagi Anggota KORPRI	1 Kali	1 Kali	100%
5	Terselenggaranya Kegiatan MTQ KORPRI tingkat Provinsi Jambi	1 Kali	1 Kali	100%
	- Jumlah anggota KORPRI yang meningkat prestasinya di bidang keagamaan dan kerohanian	284 org	284 org	73.94%

Sumber: Sekretariat KORPRI Provinsi Jambi

5) Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah.

Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah ini ditujukan untuk pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di Bidang Kesadaran Hukum dan Kelembagaan dengan terlaksananya Kegiatan Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Jambi dan di Kabupaten/Kota untuk memberikan rasa aman bagi anggota KORPRI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Untuk pencapaian sasaran program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah pada tahun anggaran 2015, dari alokasi anggaran sebesar Rp 792.026.300,00 sampai dengan akhir Desember 2015 realisasi mencapai Rp 693.151.558,00 atau 87,52 %, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian capaian kinerja pada Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.177
Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Fasilitas Organisasi dan
Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan, Peratutaran
Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Bintel/Kursus singkat manajemen koperasi bagi pengurus koperasi unit KORPRI	50 Org	50 Org	100%
2.	Terselenggaranya Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi/Anggota KORPRI menjelang masa purna bhakti	100 Org	100 Org	100%
3	Terselenggaranya kegiatan pendampingan Konsultasi, bantuan hukum dan pengembangan LKBH KORPRI dan pembentukan di Kabupaten/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100
4.	Terselenggaranya sosialisasi LKBH KORPRI	75 Org	75 Org	100%

Sumber: Sekretariat KORPRI Provinsi Jambi

b. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 ini secara umum dapat berjalan dengan baik, namun masih ada permasalahan yang dihadapi yaitu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI belum memiliki gedung kantor sendiri yang refresentatif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hingga saat ini Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi masih menempati Gedung Kantor yang merupakan asset milik Pemerintah Kota Jambi dengan kondisi sudah tidak refresentatif dan letaknya tidak strategis.

Sebagai **solusi** dari permasalahan ini Sekretariat DP KORPRI telah mengajukan Nota Dinas kepada Gubernur Jambi untuk dapat memberikan gedung kantor yang refresentatif, yakni kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terletak di Jl.Slamet Riyadi, gedung kantor tersebut milik Pemerintah Provinsi Jambi yang di pinjam pakai oleh Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, secara keseluruhan pencapaian target realisasi program dan kegiatan SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi telah tercapai dengan baik. Capaian program dan kegiatan ini merupakan implementasi kinerja seluruh personil yang ada di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi bersama pihak terkait, baik instansi pemerintah, maupun mitra kerja lainnya. Diharapkan capaian program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi ini dapat menunjang pencapaian Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi.

4.1.18 Kepegawaian

4.1.18.1 Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi disebutkan bahwa BKD adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, BKD mempunyai fungsi:

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Dalam penyelenggaraan tugas pokok BKD mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian ;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan;
5. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pengurusan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Daerah lainnya;
7. Pembinaan di bidang kepegawaian terhadap seluruh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mewujudkan Misi 5 Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih 2011-2015 berupa Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesenjangan Gender tersebut maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dirumuskan untuk lima tahun kedepan (2011-2015) yaitu :

“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional, Berdisiplin Tinggi, Tangguh Dan Mandiri Berbasis Iktisad Dan Iptek Dalam Mensukseskan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan *Good Government*”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Bahwa Visi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi berisikan aparat yang memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan dan kecakapan yang memadai, kompeten serta memiliki kehandalan di bidangnya dalam mengelola atau mengurus pegawai mulai dari perencanaan pegawai,

mengorganisasikan, menggerakkan, mengontrol serta mengevaluasi pegawai agar dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada organisasi untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Jambi. Mempunyai makna bahwa Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi harus mampu membentuk sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, lembaga dan pimpinan, bekerja sesuai dengan sistem dan aturan/ ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien, ekonomis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, menjadi panutan di lingkungannya, berbudi pekerti luhur dan memiliki moral yang baik dan beriman kepada Allah SWT. *Daerah*

Dalam mencapai Visi organisasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi merumuskan Misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mempunyai misi sebagai berikut :

1. Peningkatan efesiensi kerja dan kualitas pelayanan aparatur
2. Peningkatan SDM Aparatur terampil dan profesional dan disiplin kerja yang tinggi
3. Peningkatan kesejahteraan PNS
4. Penegakan aturan-aturan kepegawaian dan disiplin kerja aparatur
5. Peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang semakin tertib

Maka dalam mewujudkannya pada tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi memperoleh dana sebesar Rp.4.907.567,00. dengan dijabarkan ke dalam 5 program dan 32 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, dari dana tersebut telah terealisasi sebesar Rp.4.289.166.537,00 atau mencapai 87,40%. Pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan di bawah ini.

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini adalah memberikan dan menyediakan dukungan dan fasilitas yang memadai dan cukup untuk pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Sasaran program ini adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian Provinsi Jambi, dengan dukungan dana sebesar Rp.938.939.185,00. Untuk mencapai tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, program ini telah terealisasi sebesar Rp.811.173.037,00 atau mencapai 86,39%, Dalam pelaksanaan program ini terdapat penghematan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di BKD Provinsi Jambi. Secara umum tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan program ini karena kegiatan yang bersifat fasilitasi terhadap daya dukung kelembagaan BKD Provinsi Jambi yang secara rutin merupakan pembiayaan operasional yang tiap bulan dilaksanakan.

c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan daya dukung pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian BKD Provinsi Jambi melalui ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan maupun mobilitas, dengan total anggaran sebesar Rp.529.700.000,00. Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan 6 (enam) kegiatan.

Program ini telah terealisasi sebesar Rp.489.285.854,00 atau mencapai 92,37%, Program ini bersifat dukungan teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini juga tidak menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang bersifat fasilitasi terhadap daya dukung kelembagaan BKD Provinsi Jambi yang secara rutin merupakan pembiayaan operasional, telah disediakan pendanaannya dan telah diprogramkan secara berkala.

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran program peningkatan disiplin aparatur adalah terwujudnya sosok PNS yang taat dan patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku. Untuk mencapai sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini, telah dianggarkan dana sebesar Rp.45.000.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebanyak 102 stel. Adapun realisasi program ini adalah sebesar Rp.40.698.000,00 atau mencapai 90,34% dan secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil guna mewujudkan pedoman kerja bagi seluruh aparatur. Untuk mencapai tujuan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dianggarkan dana sebesar Rp.375.840.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.330.528.940,00 atau 87,94%. Untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu: Kegiatan Seleksi Calon Pejabat Struktural dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.

Pelaksanaan program ini, sampai dengan akhir tahun masih berlangsung. Untuk kegiatan seleksi calon pejabat struktural masih berproses seiring dengan usulan dan atau konsultasi calon pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Proses BAPPERJAKAT dalam jabatan bagi PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi memiliki data proses seleksi calon pejabat struktural Tahun 2015 meliputi eselon II sebanyak 3 orang, eselon III sebanyak 24 orang, eselon IV sebanyak 24 orang. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebanyak 25 orang.

Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS, dipergunakan bagi PNS yang akan mengikuti diklat, bintek, dan diklatpim dengan pengiriman sesuai dengan kebutuhan Sedangkan peserta yang mengikuti Diklat, Bintek dan Pelatihan bagi PNS di lingkup Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 16 (enam belas) orang.

f. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Untuk mencapai sasaran program pembinaan dan pengembangan aparatur didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan dengan dana yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah sebesar Rp.3.018.037.815,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.2.617.480.706,00 atau 86.73%. Gambaran pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aparatur, dapat diuraikan berikut ini.

1) Kegiatan pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian daerah dengan data SAPK

Pada kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan Data SAPK, telah dibangun Sistem Informasi Kepegawaian dengan bentuk keluaran 1 (satu) laporan, yaitu DUK dan Pengembangan/Pembangunan aplikasi yang dapat menghasilkan berbagai laporan yang akan dipergunakan yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK). Sesuai amanah Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008, bahwa untuk proses pemberian Nomor Indentitas PNS (NIP), Pemberian Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS, Penetapan Keputusan Pensiun PNS dan Peremajaan Data Kepegawaian PNS dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Komputer yang terintegrasi antara BKN, Kantor Regional BKN dan Instansi Pemerintah Daerah (BKD). Diharapkan dengan perangkat pendukung SAPK dan dengan jaringan Speedy, akan dilanjutkan dengan validasi data PNS berdasarkan unit organisasi dan pangkat.

Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik, bahwa Kartu Pegawai Negeri Sipil (KPE) sebagai pengganti Karpeg yang berlaku sekarang, Tujuan diterbitkannya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) adalah untuk memudahkan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.

Pada Kegiatan ini juga dilaksanakan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS). Dengan berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015 (E-PUPNS 2015), mewajibkan semua CPNS dan PNS untuk memutakhirkan data secara online. E-PUPNS ini bertujuan untuk menata sistem informasi kepegawaian dan manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat mendukung ASN merealisasikan seluruh potensi baik sebagai pegawai pemerintah maupun sebagai bagian dari masyarakat. Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pendataan PNS dapat menghasilkan validasi data yang akurat, terpercaya, terintegrasi sebagai dasar pengembangan sistem informasi kepegawaian serta membangun kepemilikan (sense of awareness) PNS terhadap data kepegawaiannya.

Rekapitulasi KPE bagi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.178

Rekapitulasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS dan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS) I PNS Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	6.470 Kartu
2	Jumlah PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi	6.648 orang
3	Jumlah PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang mendaftar dalam e-PUPNS.	6.626 orang
4	Jumlah PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang belum mendaftar dalam e-PUPNS.	22 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

- 2) Kegiatan seleksi penerimaan calon PNS/pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Pada kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor : 800-632 Tahun 2011 dan Nomor : 141 PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Moratorium/Penundaan Penerimaan PNS dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan efisiensi anggaran. Penundaan Sementara Penetapan Tambahan Formasi untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Untuk tahun ini Kegiatan Penerimaan Seleksi Penerimaan CPNS/Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ini dipergunakan untuk penyelesaian Tenaga Honorer Kategori yang 1 (K1) masih dalam proses penyelesaiannya di Kantor Badan Kepegawaian Negara, dimana untuk dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tenaga Honorer K1 yang sudah masuk dalam Data Base sebanyak 238 orang, sedangkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BKN yang memenuhi kriteria berjumlah 207 Orang dan sampai sekarang yang sudah selesai diproses penetapan NIP-nya sebanyak 195 orang. Sedangkan untuk Tenaga Honorer Kategori II (K2) dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 16 (enam belas) orang dan telah mengikuti seleksi/tes untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 3 Nopember 2013.

3) Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kegiatan pemberian satyalancana karya satya sampai dengan akhir Tahun 2015 telah diusulkan sebanyak 958 orang, dengan perincian : untuk 10 tahun sebanyak 230 orang, 20 tahun sebanyak 375 orang, dan 30 tahun sebanyak 353 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti sebanyak 423 orang, dengan rincian cuti tahunan sebanyak 65 orang, cuti melaksanakan umroh / haji sebanyak 353 orang, dan cuti sakit sebanyak 5 orang.

Untuk kegiatan pembuatan Kartu Istri dan Kartu Suami (Karis/Karsu) untuk Karis sebanyak 971 orang dan Karsu sebanyak 955 orang, sedangkan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 143 orang.

Tabel 4.179

Rekapitulasi Pemberian Satyalancana Karya Satya,
Cuti, Karis/Karsu Dan Karpeg Bagi PNS Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	
		Tahun 2015	
1	Satyalancana karya satya:		
	10 Tahun	230	Orang
	20 Tahun	375	Orang
	30 Tahun	353	Orang
2	Cuti Tahunan	65	Orang
	Cuti Haji/Umroh	353	Orang
3	Kartu Istri	971	Orang
4	Kartu Suami	955	Orang
5	Kartu Pegawai	143	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

4) Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Proses terhadap penyelesaian kasus-kasus PNS, dapat dikategorikan 3 (tiga) jenis; antara lain hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat, keadaan sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 1 kasus untuk Hukuman Disiplin Sedarang, begitu juga dengan Hukuman Disiplin Berat, sedangkan untuk Hukuman Disiplin Ringan diserahkan dan menjadi tanggung jawab atasan langsung pegawai yang bersangkutan di setiap masing-masing SKPD.

5) Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Pada Tahun 2015, seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN melalui beberapa tahapan secara on line, dimana pendaftaran dan seleksi berkas administrasi sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015, yang lulus seleksi bahan administrasi sebanyak 295 orang, yang lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebanyak 40 orang, yang lulus Tes Kesehatan dan Kesamaptaaan sebanyak 32 orang, yang ikut Tes

Psikologi sebanyak 32 orang, dan yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti Pantukhir di Kampus IPDN Jatinangor Bandung sebanyak 21 orang.

Dari jumlah 21 orang tersebut, Calon Praja IPDN dari Provinsi Jambi yang dinyatakan LULUS PANTUKHIR dan mengikuti Pendidikan di Kampus IPDN sebanyak 20 orang.

6) Kegiatan koordinasi pembinaan dan pengembangan aparatur

Pada Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ini, yaitu kegiatan Ujian Dinas yang diikuti sebanyak 321 orang, dengan perincian Ujian Dinas Tingkat I diikuti oleh 196 orang dan peserta Ujian Dinas Tingkat II sebanyak 125 .

7) Kegiatan seleksi kenaikan pangkat dan proses seleksi pensiun bagi PNS

Pada periode 1 April 2015, jumlah PNS yang diusulkan kenaikan pangkat meliputi Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 921 orang. Sedangkan untuk periode 1 Oktober 2015, jumlah PNS yang diusulkan kenaikan pangkat meliputi Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 431 orang. Sedangkan untuk penyelesaian usul pensiun PNS dilakukan ke BKN Regional VII Palembang dan BKN Pusat dan Sekretariat Negara sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 117 orang.

8) Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS

Pada Kegiatan ini yaitu berupa pemberian beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar, dimana sampai bulan Desember 2015 yang telah dilaksanakan yaitu meliputi 1 orang untuk PNS tugas belajar S.1, 41 orang untuk PNS tugas belajar S.2 dan 3 orang untuk PNS tugas belajar S.3.

9) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini merupakan untuk pemenuhan tugas pokok dan fungsinya serta guna melakukan penguatan kelembagaan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jambi, yaitu untuk melakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

10)Kegiatan pengambilan sumpah janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Kegiatan Pengambilan sumpah janji PNS ini telah dilaksanakan, dengan prioritas PNS Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, adapun jumlah PNS yang diambil sumpah janjinya pada tahun 2015 berjumlah 578 orang.

11)Kegiatan sosialisasi PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian bagi PNS di lingkungan Provinsi Jambi

Kegiatan ini untuk mewujudkan PNS yang handal,professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan ini mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Bahwa kegiatan ini sampai bulan Desember Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak satu kali Sosialisasi dengan lokasi di Aula BKD Provinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang.

12)Kegiatan penyelenggaraan administrasi mutasi dan kenaikan gaji berkala PNS

Kegiatan ini adalah untuk Proses Administrasi Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS Pemerintah Provinsi Jambi. Baik itu untuk Proses pindah PNS dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jambi dan sebaliknya,dari Provinsi Lain ke Provinsi Jambi dan sebaliknya dan dari Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi Jambi begitu juga sebaliknya dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.180
Rekapitulasi Mutasi PNS di Provinsi

No	Uraian	Jumlah 2015	
1.	Dari provinsi lain ke Provinsi Jambi	15	orang
2.	Dari kabupaten/kota ke Provinsi Jambi	174	orang
3.	Antar instansi (SKPD) dalam Provinsi Jambi	54	orang
4.	Dari Provinsi Jambi ke provinsi lain	6	orang
5.	Dari Provinsi Jambi ke kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi	5	orang
6.	Antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi	232	orang
	J U M L A H	486	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

Sedangkan PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang mengusulkan kenaikan gaji berkala dan telah diproses pada tahun ini sebanyak 1.477 orang.

13) Kegiatan penyusunan formasi CPNS

Untuk kegiatan penyusunan formasi CPNS ini telah ditetapkan dasar perhitungan kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi pegawai negeri sipil melalui analisis beban kerja sehingga dapat menentukan jumlah pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengusulkan formasi CPNS.

g. Kendala Dan Hambatan

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

- 1) Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, dikarenakan pada Kegiatan ini adanya penghematan dalam pemakaian jasa fasilitas kantor dalam hal ini penggunaan listrik, telepon

dan air, walaupun pada kegiatan ini mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2015 ini.

- 2) Pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS/Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, bahwa pada tahun ini Pemerintah Provinsi Jambi tidak melaksanakan seleksi/penerimaan CPNS dari umum, masih menyelesaikan tenaga honorer yang masuk dalam data base, yang sampai sekarang masih diproses.
- 3) Pada Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN, pada kegiatan ini ada biaya yang dianggarkan untuk honorarium pengasuh bagi Praja IPDN yang berasal dari Provinsi Jambi tapi tidak bisa dipergunakan.

4.1.18.2 Badan Pendidikan dan Pelatihan daerah

Pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu agenda nasional dalam pendayagunaan aparatur pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang profesional diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan suatu proses penting dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur menuju kepada tingkat profesionalisme aparatur yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam manajemen, pengorganisasian pengelolaan proses pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat. Hal tersebut menjadi dasar atau landasan untuk berpijak ke arah pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan sumberdaya aparatur.

Keberadaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, paling tidak dapat memenuhi harapan tujuan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan tuntutan profesionalisme aparatur, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, diharapkan mampu menyiapkan aparatur yang berkompetensi.

Penyelenggaraan itu sendiri terdiri dari berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional, maupun kepemimpinan (Manajemen/Struktural) dan untuk tahun 2015, yaitu melaksanakan :

a. Program Dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015, tujuan yang hendak dicapai oleh Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam mendukung kebijakan Kepala Daerah.
- 2) Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kediklatan
- 3) Mengembangkan jenis kediklatan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 4) Mengembangkan kuantitas dan kualitas para pengajar/widyaiswara

Sejalan dengan Rencana tersebut, sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah “Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang berkompetensi, berkualitas, sejahtera dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan”

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2015 melaksanakan 5 program dan 34 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.181
Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
		Penyediaan makanan dan minuman
		Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Manajemen Internal)	Pelatihan dan pendidikan formal

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat
		Pelaksanaan rapat koordinasi kediklatan
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi PNS
		Pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

1) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2015 ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 12.146.360.000 (dua belas milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan selama Tahun 2015 adalah sebagaimana terurai pada tabel berikut :

Tabel 4.182
Realisasi Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi
Jambiper 31 Desember 2015

JENIS PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.912.466.600	2.755.396.069	94,61
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2.123.303.000	2.101.501.443	98,97
Peningkatan Disiplin Aparatur	44.500.000	44.500.000	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Manajemen Internal)	520.204.200	487.918.700	93,79
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.545.886.200	5.686.826.965.	86,88
J u m l a h	12.146.360.000	11.076.143.177	91,19

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Secara rinci realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program dapat terlihat pada lampiran.

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai Kinerja Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi, capaian pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.183

Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambiper 31 Desember 2015

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi Peserta	%
		Peserta	(Orang)	Capaian
		(Orang)		
1	2	3	4	5
I	BIDANG STRUKTURAL	540	540	100
II	BIDANG TEKNIS	520	484	93,07
III	BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN	150	150	100
IV	BIDANG FUNGSIONAL	240	240	100
	JUMLAH	1450	1414	97,51

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian target peserta secara keseluruhan tidak tercapai 100 % yaitu hanya tercapai sebanyak 97,51 % dari target total 1.450 orang, hal ini dapat terlihat karena pada Bidang Teknis hanya mencapai 93,07 % dari total target peserta sebanyak 520 orang.

Rincian realisasi capaian target peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) pada masing-masing Bidang untuk jenis kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.184
Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Struktural
per 31 Desember 2015

No	Jenis Kegiatan	Target Peserta (Orang)	Realisasi Peserta (Orang)	% Capaian
1	2	3	4	5
I	BIDANG STRUKTURAL	540	540	100
	Diklat Prajabatan CPNS	375	375	100
	Diklat Kepemimpinan (Pim IV dan Pim III)	165	165	100

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pada tabel tersebut, dapat terlihat capaian diklat pada Bidang Struktural bahwa dari total 540 orang target peserta Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2015 dapat terealisasi sebanyak 540 orang atau sama dengan 100 % . Ketercapaian target peserta didapat dari jenis Diklat Prajabatan Aparatur yang unsur pesertanya selain dari CPNS yang bertugas di SKPD Pemerintah Provinsi Jambi, juga yang berada/bertugas di Pemerintah Kabupaten dan Kota sejalan dengan Kebijakan Pemerintah mengadakan rekrutmen CPNS yang berasal dari tenaga honorer kategori I dan Kategori II. Sementara untuk Diklat Kepemimpinan (Tingkat IV dan Tingkat III) target yang direncanakan sebanyak 165 orang juga tercapai 100 %.

Tabel 4.185
Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknis per 31
Desember 2015

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi Peserta	%
		Peserta	(Orang)	Capaian
		(Orang)		
1	2	3	4	5
II	BIDANG TEKNIS	520	484	93
1	Diklat Teknis Penyusunan Renstra SKPD dan RENJA SKPD	30	30	100
2	Diklat Teknis Pengelola Asset	30	30	100
3	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Sekdes / Kaur Keu Pemdes	150	149	99
4	Diklat Kewirausahaan Jelang Pensiun bagi PNS	30	30	100
5	Kegiatan Penunjang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	80	80	100
6	Diklat Pengelolaan Barang dan Jasa bagi PNS Daerah	40	40	100
7	Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah bagi Aparatur Diklat	80	60	75
8	Bimtek Penyusunan RENSTRA 2016 -2021 bagi Aparatur Diklat	80	65	81

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Bidang Teknis Badan Diklat Provinsi Jambi menargetkan peserta Diklat untuk Tahun 2015 sebanyak 520 Aparatur tercapai hanya 484 orang atau sama dengan 93 % hal ini disebabkan pada kegiatan Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bintek Penyusunan Renstra jumlah peserta tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Penyebab ketidak tercapaian target peserta tersebut di indikasikan karena kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun, sementara peserta yang diharapkan adalah dari unsur pengelola keuangan dan perencanaan dari SKPD yang menangani Diklat di Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Badan Diklat Provinsi Jambi, yang pada masa itu kedua unsur peserta dimaksud pada umumnya disibukan dengan tugas-tugas pada unit kerjanya yang harus diselesaikan pada masa akhir tahun.

Pada Bidang Manajemen Pemerintahan, capaian target peserta diklat tercapai 100 % yaitu 150 Orang dari 5 (lima) jenis kegiatan Diklat. Ketercapaian target peserta ini antara lain dipengaruhi oleh status peserta yang didominasi berasal dari Aparatur yang bertugas di Kabupaten dan Kota, kecuali untuk kegiatan Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada umumnya berasal dari Aparatur yang bertugas pada SKPD Pemerintah Provinsi Jambi. Secara rinci jenis Diklat Bidang manajemen Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.186
Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen
Pemerintahanper 31 Desember 2015

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi Peserta	%
		Peserta	(Orang)	Capaian
		(Orang)		
1	2	3	4	5
III	BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN	150	150	100
1	Diklat Gladi Manajemen Kepala Desa	30	30	100
2	Diklat Peningkatan Kompetensi Manajemen Kecamatan	30	30	100
3	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	30	30	100
4	Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Kelurahan	30	30	100
5	Diklat Penataan Batas Wilayah	30	30	100

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tabel 4.187
Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Fungsional
per 31 Desember 2015

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi Peserta	%
		Peserta	(Orang)	Capaian
		(Orang)		
1	2	3	4	5
IV	BIDANG FUNGSIONAL	240	240	100
1	Diklat Dasar-Dasar Mengajar Bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	30	30	100
2	Diklat Manajemen Of Training (MOT) bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	30	30	100
3	Diklat Kehumasan bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	30	30	100
4	Diklat Penulisan karya ilmiah bagi guru, Kepala dan Pengawas Sekolah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	30	30	100
5	Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	30	30	100
6	Bimtek Analisis Kepegawaian bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	50	50	100
7	Bimtek Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi Aparatur (Guru SMP, SMA dan SMK) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	40	40	100

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pada tabel tersebut, dapat terlihat bahwa dari total 240 orang target peserta Diklat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2015 dengan menggunakan APBD Provinsi Jambi dapat terealisasi 100 % yaitu 240 orang.

2) Permasalahan dan Upaya Penanggulangan

a) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi yang cukup mendasar adalah :

- (1) Persoalan untuk menyusun dan menentukan jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang bisa meningkatkan kompetensi (teknis maupun fungsional) untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian rencana strategis baik yang ada pada SKPD tempat bertugas secara khusus dan ketercapaian rencana strategis pemerintah daerah secara umum
 - (2) Menentukan siapa saja Aparatur yang menjadi target pendidikan dan pelatihan (khususnya untuk jenis diklat kepemimpinan) ? Sehingga pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan benar-benar diikuti peserta yang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi aparatur yang bersentuhan langsung dengan pekerjaan peserta diklat, terutama terkait dengan kebutuhan peserta atas tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang diembannya sehingga pada akhirnya dapat menunjang tugas-tugas pemerintahan Provinsi Jambi.
 - (3) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang serta adanya ketentuan kediklatan yang diterima saat kegiatan mulai/sedang berjalan (setelah masa perencanaan), sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian.
 - (4) Rendahnya motivasi aparatur untuk mengikuti diklat sehubungan minimnya fasilitas yang disediakan Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi.
- b) Upaya Penanggulangan
- (1) Jenis Diklat yang dilaksanakan diupayakan jenis diklat yang erat hubungannya dengan tugas, pokok dan fungsi aparatur serta menela'ah/ menyesuaikan dengan issue strategis yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan.
 - (2) Meningkatkan hubungan koordinasi baik dengan SKPD terkait dalam jajaran Pemerintah Provinsi (BKD, BPKAD, Biro

Organisasi, BAPPEDA dst) maupun SKPD yang menangani kediklatan di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

- (3) Secara bertahap dan berkesinambungan melakukan pembenahan baik dalam penyediaan prasarana maupun dalam peningkatan kompetensi Tenaga Kediklatan.
- (4) Telah diusulkan untuk diadakan peninjauan kembali/perbaikan terhadap ketentuan/peraturan Gubernur yang berkenaan dengan insentif tenaga kediklatan (Honorarium Widyaiswara, Panitia/ Pengelola/ Penyelenggara) dan termasuk Biaya Transport, Uang Saku bagi peserta).

4.1.19 Komunikasi dan Informatika

4.1.19.1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dalam pelaksanaan sehari-harinya dibantu oleh Sekretariat KPID Provinsi Jambi, dimana Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi dan mempunyai fungsi menjembatani dan memfasilitasi tugas dan fungsi komisioner dengan fungsi penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama menyangkut kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan APBD Provinsi Jambi kedepan.

Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan antara lain menyangkut komitmen, kebersamaan, sinergitas, dan profesionalisme, semua elemen yang terlibat dalam mengupayakan pencapaian cita-cita sistem Penyiaran Daerah Provinsi Jambi.

Kemudian sesuai dengan Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya sistem penyiaran yang Berkeadilan, Bermartabat dan Bermanfaat guna mendukung Jambi yang Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015”

a. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan KPID Provinsi Jambi dalam mencapai program maupun kegiatan yang di amanatkan UU Nomor : 32 Tahun 2002 ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretariat KPID Provinsi Jambi dengan alokasi dana dalam APBD sebesar Rp. 2.937.734.000,-, dan setelah perubahan dikurangi Rp. 5.000.000,-.

Sampai Desember 2015 telah terealisasi sebesar Rp.2.450.070.156,- atau 83,40 %, yang terdiri dari 8 Program diantaranya Program rutin dan Prioritas yaitu :

1) Program Rutin :

- a) Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan disiplin Aparatur.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2) Program Prioritas.

- a) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
- b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- c) Program Pengkajian dan Penelitin Bidang Informasi dan Komunikasi.
- d) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

b. Realisasi Program Kegiatan.

1) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat dan bermartabat dan menciptakan serta hubungan lembaga penyiaran yang baik dan bermutu diperlukan dukungan semua pihak dan bertanggungjawab bersama tidak

semata-mata tanggungjawab KPID tanpa campur tangan lembaga pemerintah, masyarakat dan penyiar serta tidak dipungkiri lagi pada saat ini media televisi atau radio banyak diakses masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang Komunikasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Kerjasama Antar KPID dan Pengawasan Isi Siaran.

Dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.212.750.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 177.826.650 atau 83,58 %.

b) Kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Siaran.

Dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.333.540.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.318.000 atau 70,85 %.

2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Secara umum pelaksanaan Program ini dalam rangka menciptakan sistem penyiaran daerah dengan memberikan pelatihan terhadap pengkajian sistem informasi kepada lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi dan aparatur pemerintah daerah sehingga dapat memberikan informasi dan isi siaran yang bersifat mendidik dan bermutu serta dapat terselenggaranya pengawasan isi siaran yang didukung alat studio yang memadai.

Dalam Program ini dengan kegiatan :

a) Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum, dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasinya belum terealisasi sebab belum digunakan uangnya karena belum ada yang meminta bantuan konsultasi dan bantuan hukum.

3) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

Tujuan Program ini dalam rangka tertibnya dan teraturnya isi siaran dengan pembinaan lembaga penyiaran dan pemirsa dan pendengar radio dengan memberikan pelatihan.

Kemudian berdasarkan Peraturan KPI Nomor: 01/P/KPI/05/2009, Bidang Administrasi Perizinan Penyiaran KPID Provinsi Jambi, bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan Kegiatan KPID Provinsi Jambi yang berkaitan dengan:

- a) Perizinan penyiaran
- b) Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
- c) Pengaturan infrastruktur penyiaran; dan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang Administrasi Perizinan selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penataan dan Penanganan Perizinan Lembaga Penyiaran. Dengan anggaran sebesar Rp.279.219.000,- , realisasi anggaran sebesar Rp. 261.558.400,- atau 93,68 %.
 - b) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Dengan anggaran sebesar Rp.197.920,-, realisasi anggaran sebesar 162,629.150 atau 82,17 %.
- 4) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Undang – undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 8 ayat 2 berbunyi :

- a) Menetapkan standar program siaran
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

Standar Program Siaran adalah standar siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan pengaturan penyiaran serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan

oleh KPI. Yang diakronimkan dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

KPID Jambi merasa perlu mensosialisasikan dan pedoman P3SPS kepada masyarakat dan Lembaga Penyiaran, tujuannya agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Program Kerjasama Informasi Mass Media dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi, dengan anggaran sebesar Rp. 333.202.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 258.143.000,- atau 77,47 %.

4.1.19.2 Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi merupakan salah satu Instansi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Institusi tersebut merupakan pemekaran dari SKPD Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Provinsi Jambi, hal ini tertuang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut diatas pada Bagian Keempat A Pasal 14A bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya dukungan dana atau sarana penunjang dalam penyediaan data dan informasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai sarana pengolahan data secara maksimal dan harus didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

a. Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok Kantor Pengolahan Data dan Elektronik sebagai penyusunan data dan informasi secara sistematik, yang telah dimekarkan menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran tersedianya data dan sistem Teknologi Informasi (TIK) yang terintegrasi dan dapat dipergunakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan pengambilan kebijakan di daerah, dari Jumlah Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.9.629.000.000,- secara keseluruhan dengan estimasi realisasi anggaran sebesar Rp.9.142.110.690,- atau 94,94 % dan hingga saat ini seluruh Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Realisasi Program dan Kegiatan.

1) Program pelayanan Administrasi Perkantoran dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya kegiatan :

- a) Administrasi Perkantoran baik yang bersifat rutin dan Administrasi Keuangan, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), belanja barang cetakan dan belanja perjalanan dinas dapat berjalan dengan baik hal ini didukung dengan adanya dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.305.275.250,- dengan realisasi sebesar Rp.1.267.971.030,- atau 97,14 %
- b) Pada Tahun 2015 seluruh SKPD lingkup Provinsi Jambi telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan portal intranet Provinsi Jambi, untuk menjalankan jaringan internet dan intranet tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bekerja sama dengan PT.APLIKASINUSA LINTASARTA untuk pengadaan Bandwidth sebesar 120 Mbps, dialokasikan dana sebesar Rp.1.300.321.00,- atau 96,32 %.
- c) Dinas Komunikasi dan Informatika Jambi memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Telekomunikasi INDONESIA, Tbk untuk mengadakan Transponder dengan bandwidth 4 Mhz untuk mempromosikan kegiatan Gubernur Jambi dalam melaksanakan dan memajukan Provinsi Jambi sampai ke pelosok pedesaan baik dalam Negeri maupun Luar Negeri secara terkoneksi dan terintegrasi melalui penayangan siaran

TVRI Jambi dan dapat dipergunakan untuk siaran langsung setiap saat dari mana saja dengan hasil gambar dan suara yang baik dialokasikan dana sebesar Rp.2.872.000.000,- dengan reasalisasi sebesar Rp.260.000.000,- atau 93,31 %.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dalam upaya peningkatan kinerja, tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang ada serta kerjasama antar Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.314.755.750,- dengan realisasi sebesar Rp.1.262.107.400,- atau 95,99 %.

3) Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur dengan didukung kelengkapan peralatan aparatur di alokasikan dana untuk pengadaan Pakaian Dinas sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,- atau 100 %.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur di bidang informasi teknologi (IT) dan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan aparatur telah dilaksanakan beberapa Bimbingan Teknis (BINTEK) aplikasi LPSE bagi Anggota Tim LPSE, Panitia, PPTK serta Rekanan dengan dukungan dana sebesar Rp.68.257.000,- dengan realisasi sebesar Rp.68.125.000, atau 99,81%.

5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa pada Tahun 2015 mempunyai kegiatan yang terdiri dari:

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Guna meningkatkan penggunaan jaringan internet di seluruh SKPD untuk itu dialokasikan dan sebesar Rp.547.606.00,- dengan realisasi sebesar Rp.515.595.100,- atau 94,15 %.
- b) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan Webside yang telah dibangun telah dilaksanakan pemeliharaan dan Bimbingan Teknis

bagi operator pada masing-masing SKPD, dimana seluruh aplikasi dan Webside yang telah dibangun dapat diakses melalui jaringan intranet. dialokasikan dana sebesar Rp.450.594.000,- dengan realisasi sebesar Rp.447.575.800,- atau 99,33%.

- c) Kegiatan Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran telah melaksanakan sosialisasi internet sehat yang diperuntukan bagi siswa sekolah menengah atas dalam Kota Jambi, dialokasikan dana sebesar Rp.129.126.000,- dengan realisasi sebesar Rp.121.419.610,- atau 94,03%.
 - d) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi dialokasikan dana sebesar Rp.145.726.000,- dengan realisasi sebesar Rp.136.725.050,- atau 93,82%.
- 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pos telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pos, dialokasikan dana sebesar Rp.194.432.000,- dengan realisasi sebesar Rp.179.995.900,- atau 92,58%
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis Standarisasi Perangkat Telekomunikasi dialokasikan dana sebesar Rp.215.332.000,- dengan realisasi sebesar Rp.180.156.800,- atau 83,66%
 - c) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos dan Telekomunikasi dialokasikan dana sebesar Rp.210.252.000,- dengan realisasi sebesar Rp.201.181.050,- atau 95,69 %.
- 7) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. Tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dialokasikan dana sebesar Rp.155.457.000,- dengan realisasi sebesar Rp.115.768.100,- atau 74,47%.
 - b) Kegiatan Diseminasi Sistem Informasi dialokasikan dana sebesar Rp.127.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp.124.454.800,- atau 97,78%.

- c) Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa dialokasikan dana sebesar Rp.225.458.500,- dengan realisasi sebesar Rp.224.417.400,- atau 99,54%.
- d) Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Informasi Publik dialokasikan dana sebesar Rp.296.251.500,- dengan realisasi sebesar Rp.276.617.650,- atau 93,37%.

4.1.20 Kearsipan dan Perpustakaan

Pada tahun 2015, untuk mewujudkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang terdepan dalam penyajian informasi lptek dan kebudayaan serta sebagai lembaga yang profesional dan proporsional dalam tatanan pemerintah daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan, telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Adapun pogram dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, 4) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

4.1.20.1 Kearsipan

Dibidang Kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metode pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat dalam penemuan kembali, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan kearsipan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 3 (tiga) Program dan 6 (enam) Kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program ini bertujuan untuk memilih tenaga pengelola arsip berprestasi terbaik tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi. Untuk melaksanakan program ini pada tahun 2015, adalah dana sebesar Rp. 122.140.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.613.500,- dan realisasi fisik sebesar 98,75 %.

Untuk mendukung tujuan program, dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pemilihan Tenaga Pengelola Arsip Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi Jambi, dimana dengan melaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat tercapai perbaikan sistem administrasi berbasis pengelola arsip berprestasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi kepada tenaga pengelola arsip untuk meningkatkan pengetahuan cara mengelola dan menata arsip sesuai ketentuan serta memberika penghargaan kepada pemenang.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan memanfaatkan arsip in aktif secara optimal, menghimpun data-data tentang kondisi fisik arsip statis serta menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kajian sistem administrasi kearsipan berkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2005

Untuk melaksanakan program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp.347.146.600,- denga realisasi keuangan sebesar Rp.346.379.600,- dan realisasi fisik sebesar 99,78 %.

Dalam rangka mencapai tujuan program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah telah dilaksanakan kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip In-Aktif Provinsi Jambi, 2) Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan Penelusuran Arsip, 3) Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah,

Dengan terlaksananya program ini telah dicapai keluarannya yaitu bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip, Pemanfaatan arsip statis ini adalah untuk menunjang atau

mendukung kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan serta informasi kepada para pengguna merupakan wujud nyata dari lembaga kearsipan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal dan nasional.

c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi masa lampau yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan apresiasi dan pengetahuan masyarakat terhadap arsip sejarah Jambi serta mengetahui tentang pentingnya fungsi arsip.

Untuk melaksanakan program ini, telah dialokasi dana sebesar Rp.473.202.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.391.617.000,- dan realisasi fisik sebesar 82,76 %. Implementasi kegiatan ini berupa kegiatan-kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Arsip Masuk Desa, 2) Kegiatan Pengembangan Layanan Kearsipan dan Digitalisasi.

Capaian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal kearsipan dan mengenal khasanah arsip secara mendalam, disamping itu pula dapat meningkatkan pengetahuan dan pendidikan sejarah. Serta dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan manajerial kepada pengelola arsip yang sesuai kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan peran pengelola kearsipan dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4.1.20.2 Perpustakaan

Peran perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk bersaing perlu meningkatkan kualitas pustakawan dan layanan perpustakaan sehingga dapat mendorong masyarakat yang belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan serta meletakkan landasan pembentukan watak kepribadian, pengamalan nilai-nilai budaya dan pola kebangsaan melalui pemberdayaan informasi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung peningkatan kualitas perpustakaan, terdapat 1 (satu) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan SDM pengelola dan fungsional pustakawan, meningkatkan koleksi bahan pustaka yang variatif, meningkatkan pelayanan perpustakaan keliling, meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat Jambi serta meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, melestarikan informasi tentang kebudayaan daerah Jambi sebagai bagian dari kebudayaan nasional, melaksanakan pembinaan dan monitoring pendataan pelaporan perpustakaan, memelihara buku-buku perpustakaan.

Untuk melaksanakan program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp.2.656.716.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.591.628.800,- dan realisasi fisik sebesar 97,55 %.

Dalam rangka mewujudkan tujuan program ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, 2) Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca, 3) Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit dan Pelestarian Karya Cetak/ Karya Rekam Khasanah Budaya Rakyat Jambi, 4) Kegiatan BinteK Tenaga Pengelola Perpustakaan, 5) Kegiatan Pengembangan, Pengolahan Sistem Otomasi dan Koleksi Bahan Perpustakaan, 6) Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka, 7) Kegiatan Ajang Kreatifitas BPAD se-Provinsi Jambi, 8) Kegiatan Lomba Pemilihan Pengunjung Teladan, 9) Kegiatan Penyuluhan Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka.

Capaian dari program ini adalah meningkatnya Pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka, jumlah anggota perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah Koleksi bahan Pustaka, serta Minat Baca masyarakat.

Tabel 4.188
Perkembangan jumlah anggota perpustakaan dan
pengunjung perpustakaan

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah anggota perpustakaan	14.540	2523
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	85.310	65.611

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Dengan terlaksananya program ini serta terwujudnya perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan perpustakaan sehingga terwujudnya layanan kepada pemustaka. Meningkatnya budaya baca di kalangan masyarakat sehingga tercapainya tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca. Terlaksananya pengembangan koleksi deposit serta koordinasi sehingga terwujudnya jumlah koleksi deposit dan pendayagunaan. Terlaksananya seleksi buku perpustakaan, jumlah bahan perpustakaan dan pengolahan bahan perpustakaan dan penerbitan literatur sekunder sehingga tersedianya koleksi bahan perpustakaan yang variatif. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi perpustakaan sehingga terwujudnya masyarakat gemar membaca.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan, masih adanya persepsi masyarakat bahwa lembaga perpustakaan hanya tempat menyimpan buku. Belum lengkapnya koleksi bahan perpustakaan dan belum optimalnya jangkauan layanan serta rendahnya taraf pendidikan penduduk. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan. Masih rendahnya apresiasi terhadap pustakawan.

Rekomendasi terhadap permasalahan tersebut antara lain, peningkatan koleksi perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan, peningkatan fasilitas layanan perpustakaan dan pelestarian fisik bahan perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pameran perpustakaan, publikasi melalui media cetak dan elektronik, penyelenggaraan lomba di bidang perpustakaan, melakukan bimbingan dan menumbuhkan budaya baca dan menanamkan kecintaan anak sejak dini terhadap perpustakaan serta terus meningkatkan apresiasi terhadap pustakawan.

Tabel 4.189
Capaian bidang kearsipan dan perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah anggota perpustakaan	12.084 org	13.588 org	14.540 org	2523 org
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	145.707 org	96.756 org	85.310 org	65.611 org
3.	Jumlah koleksi buku	162.002 (eks)	163.353 (eks)	169.528 (eks)	28.011 judul
4.	Pengelola kearsipan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
		(bintek arsip)	(bintek arsip)	(bintek arsip)	(bintek arsip)
5.	Jumlah Pustakawan	22 orang	23 org	26 orang	26 org
6.	Jumlah buku yang telah diperbaiki	4.395 eks	4.202 eks	4.000 eks	2.654
					eks
7.	Fumigasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali
		6.500 eks bahan pustaka		bahan pustaka	bahan pustaka
		3.500 berkas/400 box arsip		1 kali Khasanah Arsip	1 kali Khasanah Arsip
8.	Penjilidan majalah dan koran	18 jilid	23 jilid	35 jilid	30 jilid
9.	Jumlah karya cetak yang dapat dikumpulkan	660 eks	530 eks	530 eks	553 eks
10.	Jumlah entry literatur skunder	600 judul	500 judul	500 judul	1.000 judul
11.	Jumlah buku yang dialih mediakan	100 judul	100 judul	50 judul	100 judul
12.	Pengadaan bahan pustaka	5.138 eks	9.882 eks	5.800 eks	14.121 eks
13.	Pengolahan bahan pustaka	5.138 eks	9.882 eks	5.800 eks	10.416 eks
14.	Input data bibliografi pada pangkalan data (otomasi)	2.440 eks	767 eks	5.800 eks	1.632 eks

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
15.	Penyusunan literatur skunder:				
	- Katalog induk daerah				
	- Daftar tambahan buku	714 entry	970 entry	800 entry	1.000 entry
	- Bibliografi khusus beranotasi	315 entry	615 entry	286 entry	
	- Abstrak laporan penelitian	222 entry	212 entry	135 entry	
		72 entry	0 entry	0 entry	
16.	Pemberkasan arsip in-aktif	950 berkas	5.237 usul musnah	15.000 dinilai kembali	49.549 arsip in-aktif
			7.231 dinilai lagi		26.790 arsip usul musnah
					58.806 arsip dinilai kembali
17.	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	648 photo	521 photo	200 photo	550 photo
		367 kartografi	729 lembar peta	250 peta	4.267 lembar peta
		883 buku/konvensional	257 arsip tekstual		1.262 arsip buku
					150 naskah dinas
18.	Telaksananya pameran kearsipan	4 kali	4 kali	2 kali	3 kali
19.	Jumlah perpustakaan :				
	- Perpustakaan umum	11 perpustakaan	11 perpustakaan	11 perpustakaan	11 perpustakaan
		24 perpustakaan			
	- Perpustakaan perguruan tinggi		24 perpustakaan	24 perpustakaan	24 perpustakaan

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
	Perpustakaan sekolah :	124 perpustakaan			
	- SMA/MA	294 perpustakaan			
		730 perpustakaan	150 perpustakaan	150 perpustakaan	150 perpustakaan
	- SMP/MTs	181 perpustakaan	369 perpustakaan		
		809 perpustakaan	1.396 perpustakaan	369 perpustakaan	369 perpustakaan
	SD/MI		211 perpustakaan		
			809 perpustakaan	1.396 perpustakaan	1.396 perpustakaan
	Perpustakaan khusus			211 perpustakaan	211 perpustakaan
	Perpustakaan lainnya/ desa			809 perpustakaan	809 perpustakaan

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

1) Kendala dan masalah

Adapun beberapa kendala dan permasalahan saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya tenaga yang memiliki kompetensi secara profesional
- b) Belum mantapnya jaringan nasional antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun dengan Perguruan Tinggi se Indonesia.
- c) Belum optimalnya sinergi dan kerjasama pengembangan perpustakaan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Kementrian / lembaga lainnya.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan.
- e) Sarana dan prasarana kurang memadai dalam mendukung layanan
- f) Rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan masih rendahnya taraf pendidikan penduduk.
- g) Masih kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap keberadaan Perpustakaan Umum maupun Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- h) Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka dan khasanah arsip.
- i) Masih terpisahnya gedung perpustakaan dan gedung arsip (+ 1 Km).
- j) Letak gedung BPAD yang tidak strategis dan tidak refresentatif.

2) Langkah-langkah antisipatif

- a) Langkah antisipatif dalam mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai target yang telah ditentukan antara lain:
- b) Peningkatan kompetensi SDM pengelola perpustakaan dan arsip secara lebih proporsional melalui pelatihan, pendidikan, magang dan penyuluhan
- c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang refresentatif sesuai standar

- d) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta
- e) Peningkatan kualitas rencana program dan pelaporan yang akuntabel dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
- f) Peningkatan jumlah arsip yang diolah secara Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
- g) Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
- h) Peningkatan kualitas perbaikan bahan perpustakaan dan arsip yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana berbasis teknologi
- i) Peningkatan kualitas jasa layanan perpustakaan dan kearsipan

4.1.21 Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Menjadi Institusi Yang Prima Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, merupakan visi utamanya .

Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah

1. Meningkatkan Kemampuan Aparat dan peranserta Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
2. Peningkatan Kualitas Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan.
3. Peningkatan Koordinasi dalam Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Ketahanan Pangan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Jambi, maka tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah melaksanakan koordinasi, pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan dalam upaya menjamin ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diuraikan tersebut maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beritik tolak pada tupoksi tersebut, maka selama Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibiayai melalui 2 (dua) sumber dana, yaitu ; APBD Provinsi Jambi dan Dana Dekonsentrasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program prioritas yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi hanya 1 (satu) program yakni Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 3.582.064.590.- Program ini selanjutnya dijabarkan dalam 16 kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.190
Alokasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan TA. 2015

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	%	%
1		2	3	4	5
Program Peningkatan Ketahanan Pangan		3.582.064.590	3.399.563.514	94,9	100
1	Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)	163.363.500	162.722.550	99,6	100
2	Pemantauan dan Analisis Akses pangan masyarakat	201.340.000	200.585.325	99,6	100
3	Peningkatan Mutu dan keamanan pangan	371.825.000	322.531.095	86,7	100
4	Pengembangan lumbung pangan Desa	287.050.000	284.710.000	99,2	99,3
5	Penys Data Base/Statistik Ketahanan Pangan	109.950.000	109.567.450	99,7	100
6	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	325.639.000	314.287.014	96,5	100
7	Pameran Ketahanan Pangan Tk. Nasional & Provinsi	263.000.000	214.999.125	92	100
8	Analisis Ketersediaan Pangan	129.025.000	129.002.400	100	100
9	Pengembangan & Pemantapan Desa Mandiri Pangan	219.835.000	219.396.700	99,8	100
10	Monitoring & Evaluasi Ketahanan Pangan	127.546.690	115.694.040	90,7	100
11	Koord Percn & Perumusan Prog Peningkatan KP	173.046.000	145.456.420	84,1	100
12	Stab Kepastian Harga komoditas Primer (P-LDPM)	323.720.000	307.992.460	95,1	100
13	Analisis Harga Pangan Strategis Provinsi Jambi	178.840.000	173.378.400	97	100
14	Pembrd Masy. Dalam percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	409.079.000	393.730.640	96,3	100
15	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan (lomba KP)	81.000.400	62.426.195	77,1	100
16	Sistem kewaspadaan pangan & gizi (SKPG)	217.805.000	216.083.700	99,2	99,9

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

Dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan, tidak terlepas dari 4 (empat) aspek ketahanan pangan yakni ; (1) Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; (2) Aspek distribusi dan harga pangan; (3) Aspek

Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan ; (4) Aspek Manajemen Ketahanan Pangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dari keempat aspek tersebut dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, hasil yang telah dicapai antara lain :
 - a. Ketersediaan Energi Tahun 2014 dan 2015.

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2014, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.204 Kkal/Kap/Hari, dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 78,51 hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari, sedangkan perkiraan ketersediaan energi Tahun 2015 sampai saat ini belum dapat ditampilkan dikarenakan data dari dinas lingkup pertanian belum tersedia. Adapun kondisi ketersediaan energi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.191

Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2014.

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari) 2014*	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi – Padian	1.470	1.200
2.	Umbi – Umbian	127	144
3.	Pangan Hewani	140	288
4.	Minyak Dan Lemak	836	240
5.	Buah Biji/Berminyak	242	72
6.	Kacang – Kacangan	107	120
7.	Gula	194	120
8.	Sayuran dan Buah	86	144
9.	Lain – Lain	-	72
Jumlah		3.204	2.400

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan Energi pada tahun 2014 sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula, sementara ketersediaan bahan pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

b. Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi.

Pengertian ketersediaan pangan dalam bahasan berikut ini adalah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat yang berasal dari produksi lokal yang merupakan selisih dari produksi daerah dikurangi dengan kebutuhan benih (khusus padi dan palawija), tercecer dan pakan. Ketersediaan pangan dari kemampuan produksi daerah, seperti yang ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.192

Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2014 (ATAP) dan Tahun 2015 (ARAM II) Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).

No	Komoditas	2014				2015*			
		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdsrkan PPH		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdsrkan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1	Padi	373.728	317.500	309.120	281.018	372.622	323.850	314.609	286.008
2	Jagung	22.696	230	721.44	655.86	25.235	234	737.99	670.90
3	Kedelai	2.170	16.562	30.072	27.339	9.246	16.983	30.606	27.824
4	Kacang Tanah	1.403	493	1.153	1.397	1.387	502	1.564	1.421
5	Kacang Hijau	244	1.084	3.088	2.807	294	1.046	3.134	2.857
6	Ubi Kayu	31.917	21.097	92.152	83.775	32.177	16.718	93.788	85.262
7	Ubi Jalar	60.005	6.145	15.754	13.322	55.876	6.286	16.034	14.577
8	Daging								
	Ruminansia	7.872	4.305	6.761	6.146	8.453	4.391	6.881	6.256
	Non Ruminansia	21.227	20.045	28.964	26.331	24.180	20.446	29.478	26.798
9	Telur	17.110	30.100	48.219	43.836	16.215	30.702	49.076	44.614
10	Ikan*	107.128	107.100	118.662	107.875	114.812	107.987	120.770	109.791

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2013 tersebut, untuk tahun 2013 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia di Badan Ketahanan Pangan sebesar 70 ton kerjasama dengan Perum Bulog, dan pada tahun 2014 telah dilaksanakan penambahan cadangan pangan sebanyak 20 ton, sehingga total cadangan pangan pemerintah Provinsi Jambi menjadi 90 ton, dan telah digunakan sebanyak 12,8 ton untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat sehingga stok cadangan pangan pemerintah per 31 Desember 2015 sebesar 77,2 ton.

Sementara jumlah Cadangan Pangan yang tersedia pada Perum Bulog Divre/sub Divre Jambi kondisi Januari s/d bulan November 2015 seperti disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.193
Kondisi Cadangan Pangan Beras (Stok yang dikuasai) PerumBulog Divre /Sub Divre se- Jambi
Bulan Januari s/d Desember 2015

No	Bulan	Stock Dikuasai
		(Kg)
1.	Januari	5.991.453,38
2.	Pebruari	3.717.190,38
3.	Maret	4.199.105,38
4.	April	4.696.440,38
5.	Mei	6.744.072,38
6.	Juni	6.646.145,00
7.	Juli	5.619.650,00
8.	Agustus	5.454.368,00
9	September	7.882.073,00
10	Oktober	8.669.725,00
11	November	6.087.645,00
12	Desember	

Sumber : Perum Bulog Provinsi Jambi

d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan.

Penanggulangan kerawanan pangan di Provinsi Jambi dilaksanakan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi telah dimulai pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012. Jumlah kelompok yang telah diberdayakan berjumlah 354 kelompok dengan jumlah KK miskin 8.111 KK di 87 Desa yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota, namun sejak Tahun 2013 tidak ada penambahan Desa Mandiri Pangan baru, sifat kegiatan hanya berupa pembinaan terhadap desa mandiri pangan yang telah ada. Untuk itu sangat diharapkan agar kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana untuk desa mandiri pangan baru dalam rangka penanganan daerah rawan pangan melalui dana APBD II.

Perkembangan pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.194
Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Dari Tahun 2006
Sampai Dengan Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Jml	Jml	KK Miskin		Bansos PMUK
		Desa	Klpk	Jumlah	Diberdayakan	(Rp.)
1.	Sungai Penuh	5	13	531	374	300.000.000
2.	Kerinci	7	26	986	316	600.000.000
3.	Merangin	7	20	793	509	850.000.000
4.	Sarolangun	9	32	922	490	850.000.000
5.	Bungo	7	33	1.182	530	850.000.000
6.	Tebo	7	15	569	341	850.000.000
7.	Batanghari	10	33	1.691	1.191	500.000.000
8.	Muara Jambi	7	35	1.473	763	850.000.000
9.	Tanjab Barat	8	81	2.493	1.699	750.000.000
10.	Tanjab Timur	12	33	2.638	810	600.000.000
11.	Kota Jambi	8	33	3.426	1.088	400.000.000
	Jumlah	87	354	16.704	8.111	7.400.000.000

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

Kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan di tingkat pusat sejak tahun 2013 tidak dianggarkan lagi untuk pembentukan desa baru, dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan untuk mendukung pembinaan Desa Mandiri Pangan yang lama.

Sejak tahun 2015 ini melalui dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, telah dialokasikan anggaran untuk pembentukan Kawasan Mandiri Pangan, dan Provinsi Jambi mendapat 2 (dua) Kawasan Mandiri Pangan yakni :

- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 (satu) kawasan, yaitu di Kecamatan Betara, terdiri atas 5 (lima) desa sebagai berikut :
 - a) Kelurahan Mekar Jaya.
 - b) Desa Mandala Jaya
 - c) Desa Makmur Jaya
 - d) Desa Bunga Tanjung
 - e) Desa Terjun Gajah

- 2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 (satu) kawasan, yaitu di Kecamatan Berbak, terdiri atas 5 (lima) desa sebagai berikut:
- a) Kelurahan Simpang
 - b) Desa Rantau Makmur
 - c) Desa Telago Limo
 - d) Desa Rawa Sari
- e. Pengembangan Lumbung Pangan.

Pada Tahun 2015 melalui Dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telah disalurkan Bansos Pengembangan Cadangan Pangan untuk 19 kelompok lumbung pangan, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per kelompok. Adapun kelompok Lumbung Pangan penerima Bansos Pengembangan Cadangan Pangan tahun 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.195

Daftar Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bansos Pengembangan Cadangan Pangan Tahun 2015.

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT
1	Jaya Bersama	Dinal ABRI	Desa Sungai Sampun Kec. Kayu Aro, Kabupaten Kerinci.
2	Guguk Indah II	Hamsinah	Desa Siulak Deras Mudik, Kec. Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci.
3	Sejati Sejahtera	Syafrinal	Desa Mukai Seberang Kec. Siulak Mukai Kabupaten Kerinci.
4	Kerjasama	Amir Yunus	Desa Hamparan Pugu Semurup Kec. Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.
5	Harapan Jaya	Wirna, SPd.I	Desa Air Hangat Kec. Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.
6	Usaha baru	M. Nursi	Desa Penawar Tinggi Kec. Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.
7	Rawit Putih	Yuslina	Desa Keluru Kec. Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
8	Damai	Anural Wadi	Desa Koto Majidin Mudik Kec. Air Hangat Kabupaten Kerinci..
9	Dewi Sri	Kadam	Dusun Bukit Sari Kec. Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo.

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	ALAMAT
10	Pasar Teluk	Taufik	Dusun Sungai Gambir Kec. Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo.
11	Selang Rengas	Suherman	Kelurahan Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
12	Rizki Bersama	Sofyan	Desa Rantau Kapas Tuo Kec. Muaro Tembesi Kabupaten Batang Hari.
13	Makmur	Samsuri	Desa Teluk Leban Kec. Maro Sebo Ulu kabupaten Batang Hari.
14	Terpadu	Azmi	Desa Mersam Kec. Mersam Kabupaten Batang Hari
15	Usaha Muda	Priadoni	Desa Pematang Lingkung, Kec. Batang Merangin Kabupaten Kerinci.
16	Maju Jaya	Mahyudin	Desa Balai Jaya Kec. Pelepat Kabupaten Bungo.
17	Mekar Jaya	Muklis	Kelurahan Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.
18	Sinar Pagi I	Helmi	Kelurahan Tuo Ilir Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
19	Tani Sei Samak II	Iwan Maryadi	Kelurahan Sei Bengkal Kec. Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

f. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

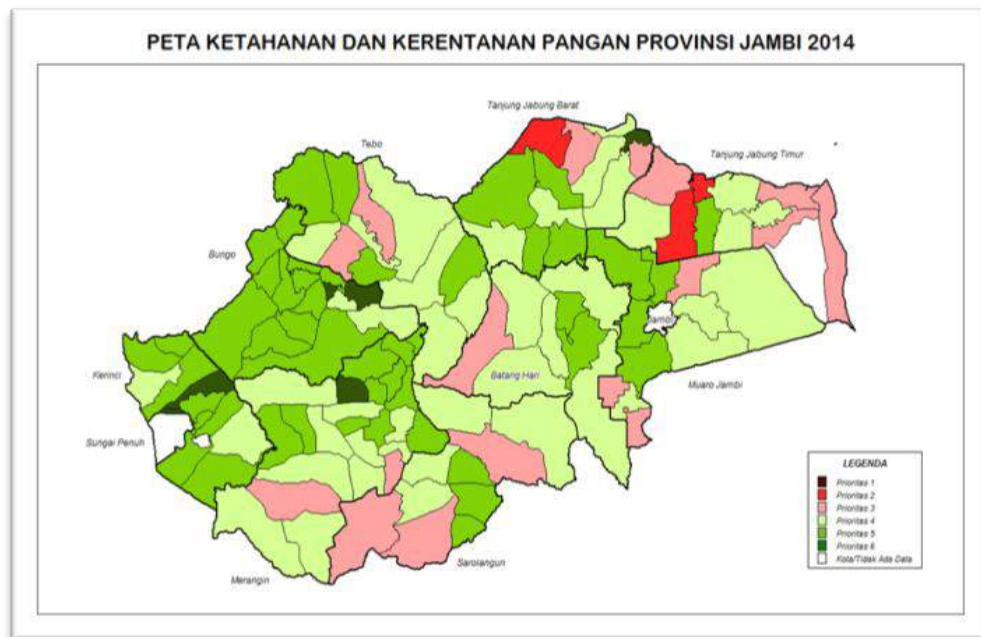
Bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit di tentukan berdasarkan 9 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit dibuat dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan Komposit, dengan menggabungkan indikator-indikator yang bobotnya ditetapkan melalui Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis)

Berdasarkan peta komposit dapat dijelaskan bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu kabupaten di sebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Kemudian,

dengan melihat seluruh peta individu maka dapat diidentifikasi penyebab utama kondisi kerawanan dan kerentanan pangan di suatu kabupaten. Dapat dipahami bahwa penyebab kerawanan dan kerentanan pangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya bervariasi, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Melalui peta dan laporan FSVA ini dapat membantu memahami perbedaan dan kesamaan dasar di antara kabupaten-kabupaten, dan dengan demikian akan membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu paling kritis yang relevan untuk daerah masing-masing.

Peta komposit menggambarkan kecamatan prioritas dalam kelompok gradasi warna merah yaitu merah tua (Prioritas 1), merah (Prioritas 2) dan merah muda (Prioritas 3). Kelompok warna merah tua menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapat prioritas khusus dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan kelompok gradasi warna hijau yaitu hijau muda (Prioritas 4), hijau (prioritas 5) dan hijau tua (prioritas 6). Kelompok warna hijau merupakan kecamatan dengan kategori Tahan Pangan.

Pemetaan ini menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya kerawanan pangan suatu kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dengan perkataan lain, kecamatan yang berwarna merah memiliki tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan kecamatan yang berwarna hijau sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, Prioritas 1 (warna merah tua) tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan. Sebaliknya juga pada kabupaten di Prioritas 6 (warna hijau tua) tidak berarti bahwa semua penduduknya tahan pangan. (Seperti terlihat pada Peta dibawah ini).



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Gambar 4.80 Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Fsva)
Provinsi Jambi Tahun 2015

Komponen Utama (*Principal Componen Analysis-PCA*) dan Analisis Kelompok (*Cluster Analysis*) pada 118 kecamatan di 9 kabupaten provinsi Jambi diketahui bahwa kecamatan yang termasuk pada klasifikasi prioritas 1,2,3 (kategori rentan terhadap kerawanan pangan) sebanyak 20 kecamatan (16,95%) dan prioritas 4,5,6 (kategori tahan pangan) sebanyak 98 kecamatan (83,5%). Berdasarkan komposit (gabungan) 9 (Sembilan) indikator diatas secara rinci klasifikasi masing-masing kecamatan menurut prioritas penanganan sebagaimana terlihat pada Tabel sbb :

Tabel 4.196
Peta FSVA Tingkat Kecamatan Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten	Kecamatan	Prioritas (P)						
			1	2	3	4	5	6	Jml
1.	Muara Jambi	11	0	0	3	4	4	0	11
2.	Batanghari	8	0	0	1	5	2	0	8
3.	Tebo	12	0	0	2	6	4	0	12
4.	Bungo	17	0	0	0	2	13	2	17
5.	Sarolangun	10	0	0	3	4	3	0	10
6.	Merangin	24	0	0	2	10	11	1	24
7.	Tanjab Barat	13	0	1	2	5	4	1	13
8.	Tanjab Timur	11	0	2	4	4	1	0	11
9.	Kerinci	12	0	0	0	2	8	2	12
Jumlah (9 Kab)		118	0	3	17	42	50	6	118
Persentase		100	0	3	14	36	42	5	100

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

2. Aspek distribusi dan harga pangan, hasil yang telah dicapai sebagai berikut ;

a. Stabilitas Kepastian Harga Primer (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat / PLDPM).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar harga pangan dapat stabil tidak terlalu bergejolak, sehingga diharapkan agar petani tidak dirugikan, terutama komoditi beras/gabah. Kegiatan yang telah dilakukan berupa pembinaan terhadap Gapoktan yang telah menerima bantuan sosial (bansos) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang telah berlangsung sejak tahun 2009.

Jumlah gapoktan penerima dana bansos P-LDPM sejak tahun 2009 hingga 2014 sebanyak 30 gapoktan, dan pada Tahun 2015 ada penambahan 3 gapoktan baru (tahap penumbuhan) penerima bansos P-LDPM, sehingga total gapoktan penerima bansos P-LDPM sampai dengan tahun 2015 menjadi 33 gapoktan. Adapun total gapoktan tersebut perkabupaten secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.197
Sebaran Gapoktan Penerima Dana Bansos Ketahanan
Pangan 2009-2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Gapoktan Penerima
1	Tanjung Jabung Barat	7
2	Tanjung Jabung Timur	7
3	Kerinci	7
4	Sungai Penuh	5
5	Merangin	2
6	Sarolangun	2
7	Batang Hari	2
8	Ma. Jambi	1
Jumlah		33

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap 33 gapoktan di atas pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana yang telah disalurkan pada Gapoktan tersebut sehingga gapoktan yang mendapatkan dana bansos memperoleh nilai tambah dari pengalokasian dana untuk pendistribusian pangan kepada anggota gapoktan. Ada beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung kegiatan Stabilitas Kepastian Harga Komoditas Primer (P-LDPM) antara lain :

1) Pertemuan Workshop P-LDPM Tahun 2015.

Telah dilaksanakan pertemuan workshop P-LDPM Tahun 2015 pada tanggal 25 – 26 Mei 2015 bertempat di Golden Harvest Hotel, Jl. Kapten Pattimura No. 65 – Simpang Rimbo Jambi, dengan jumlah peserta dan panitia sebanyak 112 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Gapoktan : 33 Orang
- b) Petugas Pendamping : 33 orang
- c) Panitia : 16 Orang
- d) Tim Teknis 8 Kabupaten/Kota : 16 orang
- e) Tim Pembina Provinsi : 14 Orang

Sedangkan materi yang disampaikan sebagai berikut :

- a) Kebijakan Program Ketahanan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
 - b) Pedoman P-LDPM Provinsi Jambi Tahun 2015 serta Pengembangan Usaha Gapoktan dan Pemberdayaan oleh Kabid Distribusi dan Harga.
 - c) Sistem Pengelolaan Cadangan Pangan (Kualitas Gabah/Beras Beras Berdasarkan HPP dan Gudang) oleh Divre Bulog Provinsi Jambi.
 - d) Pembukuan P-LDPM, Pelaporan P-LDPM dan Laporan Melalui SMS Center oleh Kasubbid System Distribusi dan Akses Pangan.
 - e) Gapoktan yang berhasil dari Kabupaten Kerinci yaitu Ketua Gapoktan Jaya Mandiri/Oriza Sativa.
- 2) Pertemuan Evaluasi Akhir P-LDPM.

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 November 2015 bertempat di Rumah Kito Resort Hotel, Komplek Puri Mayang Jl. Serma Ishak Akhmad Mayang Mangurai, Kota Baru – Jambi, 36126. Jumlah peserta dan panitia sebanyak 112 orang dengan rincian sebagai berikut :

a) Gapoktan	33 Orang
b) Petugas Pendamping	33 orang
c) Panitia	16 Orang
d) Tim Teknis 8 Kabupaten/Kota	16 orang
e) Tim Pembina Provinsi	14 Orang

Adapun materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut yaitu:

- a) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P-LDPM Tahun 2015 di Provinsi Jambi dan Rencana Kegiatan Tahun 2016 oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

- b) Kiat-Kiat Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Bansos Untuk Mempercepat Tahap Kemandirian Pada Kegiatan P-LDPM Kabid Distribusi dan Harga Pangan BKP Prov Jambi.
- c) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P-LDPM Tahun 2015 oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI.
- d) Rencana Kegiatan Tahun 2015 dan Toko Tani Indoensia (TTI) oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI.
- e) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan P-LDPM Tahun 2015 pada setiap Kab/Kota Se-Provinsi Jambi oleh Kabupaten/Kota.

b. Analisis Harga Pangan Strategis;

Perkembangan Harga Pangan Di Tingkat Konsumen dan Produsen Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

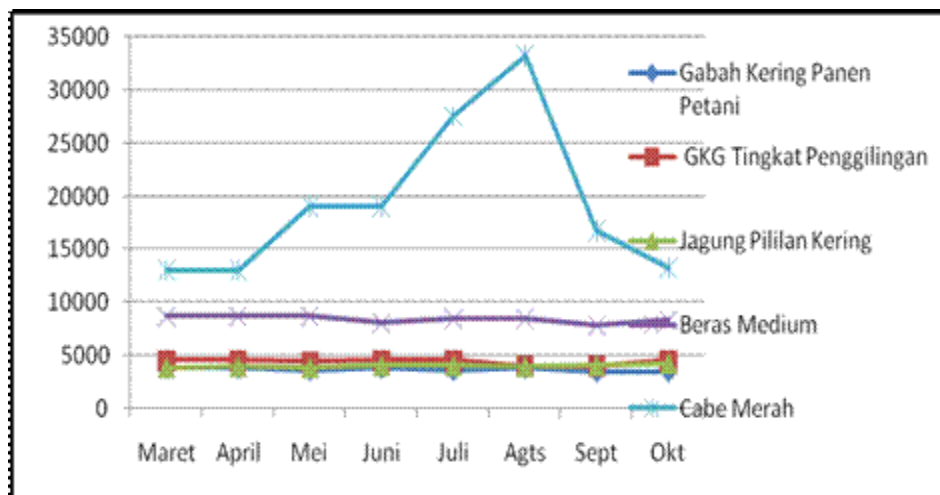
Tabel 4.198
Perkembangan Harga Gabah, Jagung, Beras dan Cabe di tingkat Produsen Tahun 2015.

No.	Komoditi	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Rata2	stdv	%cv
1	Gabah Kering Panen Petani	3800	3800	3600	3800	3600	3800	3500	3500	3675	139	3,8
2	GKG Tingkat Penggilingan	4500	4500	4450	4500	4525	4000	4000	4550	4378	235	5,4
3	Jagung Piliran Kering	3800	3900	3800	4000	4000	3900	4000	4200	3950	131	3,3
4	Beras Medium	8700	8700	8700	8100	8500	8400	7800	8300	8400	325	3,9
5	Cabe Merah	13000	13000	19000	19000	27500	33200	16800	13200	19338	7401	38,3

Sumber: Badan Ketahan Pangan Prov. Jambi, 2015

Pada periode Maret sampai dengan Oktober perkembangan harga (gabah, jagung dan beras di tingkat produsen cenderung stabil cv < 10 %, sedangkan untuk komoditi cabe merah berfluktuasi CV >25 %.

Harga beras di tingkat produsen masih diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp.7.300/kg.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Gambar 4.81 Perkembangan harga pangan di tingkat produsen Provinsi Jambi Tahun 2015

Tabel 4.199
Perkembangan Harga di Tingkat Konsumen (Pengecer) Tahun 2015

No.	Komoditi	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Rata2	stdv	%cv
1	Jagung Pipilan Kering	5.300	5.200	5.200	5.525	5.576	5.369	5.355	5.500	5378	144	2,7
2	Biji Kedelai Kering	8.000	8.100	8.000	8.800	8.900	8.800	9.100	8.700	8550	444	5,2
3	Beras Medium	9.700	9.500	9.600	10.300	10.200	10.200	10.350	10.300	10019	354	3,5
4	Beras Premium	10.000	10.500	10.500	11.000	11.200	11.200	11.500	11.500	10925	539	4,9
5	Beras Termurah	7.200	7.300	7.300	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500	8000	609	7,6
6	Bawang Merah	20.000	23.500	25.000	29.700	27.000	22.000	19.000	20.500	23338	3713	15,9
7	Cabe Merah Keriting	17.000	15.000	22.000	31.000	35.000	47.000	27.000	20.000	26750	10674	39,9
8	Gula Pasir Lokal	10.200	10.500	10.800	12.500	12.500	12.200	12.200	11.800	11588	940	8,1
9	Daging Ayam Ras	21.000	22.000	24.000	29.000	31.000	33.000	29.000	27.000	27000	4309	16,0
10	Telur Ayam Ras	16.500	17.000	17.000	21.500	22.200	21.600	22.300	21.500	20000	2603	13,0
11	Minyak Goreng	10.000	10.300	10.500	11.900	11.700	11.300	11.000	11.000	10963	667	6,1
12	Tepung Terigu	7.500	7.500	7.250	8.200	8.200	8.000	8.000	8.000	7831	361	4,6

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

Perkembangan harga pangan di tingkat pedagang pengecer periode Maret sampai dengan oktober 2015 relatif stabil CV <10 % kecuali bawang merah CV>10 %, daging ayam ras CV>10 % dan cabe merah >25 % ketiga komoditi ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan.

Dari pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, cabe merah masih merupakan penyumbang inflasi di Provinsi Jambi. Naik turunnya harga

cabe merah di pengaruhi oleh jumlah pasokan yang masuk ke Pasar-Pasar Tradisional, dimana apabila pasokan membludak maka harga akan turun dan sebaliknya, mengingat komoditi ini merupakan komoditi yang tidak tahan disimpan lama.

Sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung kegiatan Analis Harga Pangan Strategis diantaranya Pertemuan Workshop Analisis Harga Pangan Strategis yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Mei 2015 bertempat Golden Harvest Hotel, Jl. Kapten Pattimura No. 65 – Simpang Rimbo – Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Materi yang disampaikan diantaranya :

- 1) Kebijakan Distribusi dan Harga Pangan
- 2) Laporan dan Analisis Data Panel Harga
- 3) Diskusi Panel Harga

c. Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain;

- 1) Pertemuan Jaringan Distribusi Pangan ;

Dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Aula Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Jalan Samarinda Kota Baru Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 40 Orang (BKP Kab/Kota, Instansi terkait Provinsi dan BKP Provinsi Jambi).

- 2) Pertemuan Evaluasi Akses Pangan

Dilaksanakan pada tanggal 5 November 2015 bertempat di Aula Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Jalan Samarinda Kota Baru Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang (BKP Kab/Kota, Instansi terkait Provinsi dan BKP Provinsi Jambi).

3. Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan, hasil yang telah dicapai sebagai berikut ;

- a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kondisi konsumsi pangan penduduk provinsi Jambi selama beberapa tahun belakangan mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian), yaitu lebih dari 50 %.

Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan telah memperlihatkan hasilnya, walaupun belum optimal yang dicerminkan oleh kualitas konsumsi tersebut. Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan atas skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan skor PPH ini selalu berubah dari tahun ke tahun.

Adapun skor PPH Provinsi Jambi dari tahun 2009 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.200
Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jambi Tahun
2009 – 2015

No	Tahun	Skor PPH
1	2009	75,3
2	2010	86
3	2011	89,3
4	2012	89,7
5	2013	83,3
6	2014	83,4
6	2015	Data keluar pada tahun 2016

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa target skor PPH Tahun 2015 yakni 90% dari 95 (sesuai target SPM) = 90,25 kemungkinan besar sulit tercapai.

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam percepatan diversifikasi pangan antara lain :

- 1) Sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di 11 kabupaten/kota;
- 2) Apresiasi Kader Pangan;
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, dan;

Melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2015 juga telah dialokasikan dana bansos untuk kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan kepada kelompok wanita dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kelompok P2KP / KRPL tahap pengembangan (tahun 2014) sebanyak 52 kelompok, bansos yang diterima sebesar Rp. 3.000.000,- untuk kegiatan pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD).
- 2) Kelompok P2KP/KRPL baru / tahap penumbuhan (Tahun 2015) sebanyak 62 kelompok, bansos yang terima sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian untuk kegiatan ;
 - a) Kebun Bibit Desa : Rp. 5.000.000,-
 - b) Demplot : Rp. 2.000.000,-
 - c) Pekarangan : Rp. 8.000.000,-

Dana bansos tersebut telah digunakan sebagaimana seharusnya dan perkembangan terakhir fisik kegiatan di lapangan telah terlaksana dengan baik.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan, khususnya dalam kreasi cipta menu khas daerah. Untuk itu telah dilaksanakan kegiatan Lomba Cipta Menu baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Lomba Cipta Menu tingkat provinsi telah dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2015 di Kota Jambi, dari lomba tersebut telah diperoleh pemenang I yakni Tim Kota Jambi dan berhak untuk mewakili Provinsi Jambi untuk ikut Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional pada tahun 2016.

Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional dilaksanakan pada Bulan Oktober 2015 di Palembang Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi mendapat Juara Harapan III yang diwakili oleh Kabupaten Merangin.

d. Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Regional

Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni:

- 1) Pada event Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi yang ke-58 Tahun 2015 di Kota Jambi pada tanggal 6 – 10 Januari 2015.
- 2) Pada saat peringatan Hari Krida Pertanian Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan pameran ketahanan pangan tingkat nasional dilaksanakan di Palembang Sumatera Selatan pada Bulan Oktober 2015 bertepatan dengan peringatan Hari pangan Sedunia Tahun 2015.

e. Penanganan Keamanan Pangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menangani keamanan pangan khususnya pangan segar, dan telah dilakukan beberapa sub kegiatan diantaranya ;

- 1) Promosi Pangan Segar Aman Konsumsi.

Bentuk kegiatan yakni promosi tentang pangan segar yang aman dikonsumsi seperti buah dan sayuran yang telah diberi label Prima 3. Promosi dilakukan melalui media massa elektronik, leaflet dan mengikuti pameran pada event tertentu di tingkat provinsi.

- 2) Model Warung Sehat Sekolah;

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada kesalahan penempatan mata anggaran, karena bentuk kegiatannya berupa bantuan langsung untuk masyarakat.

- 3) Outlet Pangan Segar Aman Konsumsi Prima 3;

Kegiatan Outlet Pangan Segar Aman Konsumsi Prima 3 merupakan kegiatan lanjutan tahun-tahun sebelumnya. Ada 3 (tiga) outlet

Pangan Segar Aman Konsumsi Prima 3 yang telah dibentuk oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terletak di :

- a) Pasar Induk Angso Duo Jambi
- b) Pasar Modern Kebun Handil Kota Jambi
- c) Pasar Tradisional Villa Kenali.

Dana yang disalurkan digunakan untuk; sewa gedung/tempat, listrik, kebersihan dan keamanan selama 1 (satu) tahun.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Desember 2015 cukup baik dan berjalan lancar, petani / kelompok tani yang bersangkutan merasakan manfaat yang besar dari kegiatan outlet ini.

4. Aspek Manajemen Ketahanan Pangan, hasil yang telah dicapai antara lain ;

a. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan merupakan kegiatan yang cukup strategis karena merupakan salah satu media untuk berkoordinasi dengan segenap dinas/instansi lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain ; Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode I Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015 bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi yang diikuti oleh anggota dewan ketahanan pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dari rapat koordinasi ini telah diperoleh berupa rumusan hasil dan telah disampaikan ke masing-masing kabupaten/kota.

Sedangkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode II Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, dan telah diperoleh hasil berupa rumusan rapat, yang kemudian akan disampaikan ke kabupaten/kota.

Disamping rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, juga telah dilaksanakan kegiatan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2015 tingkat Provinsi Jambi.

Telah dilakukan berupa penilaian terhadap aparat dan kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pengembangan ketahanan pangan dan akan diberi penghargaan yang dikenal dengan sebutan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Kegiatan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara juga didukung oleh Dana Dekonsentrasi dari Badan Ketahanan Pangan kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penilaian ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari penilaian oleh kabupaten/kota, pemenang tingkat kabupaten/kota diusulkan ke tingkat provinsi. Tim penilaian/verifikasi provinsi kemudian melakukan verifikasi ke kabupaten/kota dan hasilnya akan diusulkan ke tingkat nasional.

Telah diperoleh pemenang penerima penghargaan adhikarya pangan nusantara tahun 2015 baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional sebagai berikut :

1) Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 Tingkat Provinsi Jambi.

a) Pelopor Ketahanan Pangan :

- Pemenang I : M.Yuhendi Buyung, PURI Organik Farm, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
- Pemenang II : H. Rd. Muchtar HS, Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.
- Pemenang III : Nuraina, Ketua KWT Maju Bersama, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

b) Pemangku Ketahanan Pangan :

- Pemenang I : A. Rahman, Ketua Gapoktan Timbul Jaya, Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak. Kabupaten Tanjab Timur.
- Pemenang II : Suherman, Ketua Gapoktan Pulau Pinang, Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- Pemenang III : Asriah, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

c) Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan :

Pelaku Produksi :

- Pemenang I : Kelompok Tani Rezki Tani, Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Pemenang II : Kelompok Tani Payo Dadap, Desa Senaning Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari.
- Pemenang III : KW. Suka Damai, Desa Bedeng VIII, Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.

Pelaku Pemberdayaan :

- Pemenang I : Rasyid, Ketua Gapoktan Mitra Tani, Kel. Bandara Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur.
- Pemenang II : Harso Miharjo, Ketua Gapoktan Sumber Rezeki, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- Pemenang III : Gapoktan Selincih, Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

Pelaku Pengolahan :

- Pemenang I : KWT Rahma Putri, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.
- Pemenang II : KWT Kasih Ibu, Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- Pemenang III : Kelompok Usaha Melati, Desa Ampelu Mudo Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari.

d) Pelayanan Ketahanan Pangan :

Penyuluh

- Pemenang I : Yetti Elpia, SP. Penyuluh Pertanian Desa.Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- Pemenang II : Helfi Zulfebri, S.PKP, PPL Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- Pemenang III : Suparman, PPL Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.

e) Pembina Ketahanan Pangan :

Kepala Desa :

- Pemenang I : Muhammad, Kepala Desa, Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.

2) Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 Tingkat Nasional.

Tabel 4.201
Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun
2015 Tingkat Nasional

NO.	ORANG /KELOMPOK	JABATAN/ ALAMAT	KATEGORI
1.	Suyono, Kelompok Tani Rezki Tani,	Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.	Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
			Pengembangan Produksi
2.	KWT Rahma Putri,	Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.	Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
			Pengembangan Pengolahan Pangan.

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2015

b. Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program Ketahanan Pangan.

Bertujuan untuk menyusun rencana dan merumuskan program ketahanan pangan untuk 1 (satu) tahun kedepannya, kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Ketahanan Pangan Tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Maret 2015 bertempat di Asrama Haji Provinsi Jambi.
- 2) Sinkronisasi Operasional Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2015, telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Maret 2015 bertempat di Asrama Haji Provinsi Jambi.

c. Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau/memonitor serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan selama tahun berjalan. Untuk itu telah dilaksanakan pemantauan dan pembinaan ke kabupaten/kota terkait pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, telah dilaksanakan pula pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan tahun 2015 pada tanggal 26 - 27 Oktober 2015 bertempat di Green House Hotel jln Yunus Sanis Kota Jambi.

d. Penyusunan Database / Statistik Ketahanan Pangan.

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan database / statistik ketahanan pangan tahun 2014, dengan rincian kegiatan antara lain; pengumpulan data sebanyak 2 (dua) kali, pemberian transport petugas statistik ketahanan pangan kabupaten/kota, penggandaan buku statistik ketahanan pangan tahun 2014.

4.1.22 Penyuluhan Pertanian

Urusan wajib penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi. Untuk mencapai berbagai sasaran sebagaimana tertuang dalam RJPMD Provinsi Jambi maka telah dilaksanakan beberapa program kegiatan pada tahun 2015, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian (petani dan nelayan) sasarannya adalah terlaksananya inventarisasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan di kabupaten / kota se Provinsi Jambi, terwujudnya kelompok tani, gapoktan dan lembaga lain dalam kerjasama organisasi. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Tani dengan dukungan dana sebesar Rp. 788.520.000,- bentuk kegiatan yaitu inventarisasi kelas kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) persektor, terlaksananya pendampingan poktan dalam menyusun RDK/RDKK. Realisasi keuangan sebesar 97,98 % dan realisasi fisik 100 %, implementasi dari program ini salah satunya dapat dilihat dari perkembangan kelembagaan petani yaitu kelompok tani (poktan) terbentuk 12.343 kelompok dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebanyak 1.407 kelompok dari 1.543 desa/kelurahan dan 138 kecamatan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain diantaranya pada saat pengumpulan data kelompok tani dan gapoktan belum dilaksanakan pemisahan kelompok tani subsektor seperti kelompok tani pertanian, perikanan, dan kehutanan dimana masih terdapat data penggabungan pada 3 subsektor dimaksud.

2. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan meliputi beberapa kegiatan antara lain; a) Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dengan dukungan dana sebesar Rp. 302.100.000,- sasarannya untuk peningkatan pengetahuan penyuluh dan petani melalui penyebaran teknologi tepat guna dan sasaran spesifik lokasi. Selain itu dilaksanakan pula kaji terap sebagai metode penyuluhan lapangan untuk meningkatkan kemampuan pelaku utama dalam memilih paket teknologi yang telah direkomendasikan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan ialah terselenggaranya kaji terap ikan di Kota Jambi dan percontohan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kabupaten Merangin. Realisasi keuangan 70,76 % karena percontohan budidaya lebah madu di Kabupaten Batanghari tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kemarau panjang dan kabut asap yang tebal; b) Kegiatan pemberdayaan kelembagaan Penyuluhan mendapat dukungan dana sebesar Rp. 966.463.600,- dengan sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan, meningkatnya kapasitas dan kemampuan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi Jambi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan ialah identifikasi kelembagaan penyuluhan di 11 kabupaten/Kota, Penilaian BP4K, Penyuluh, Petani, Poktan dan Gapoktan, Pertemuan Komisi Penyuluhan, Apresiasi/Workshop kepala BP3K, Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan terlaksananya pelatihan perangkat posluh serta pembayaran honorarium THL-TBPP selama 1 bulan; c) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan SDM Penyuluh, bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur daerah dibidang kelembagaan dan pengembangan SDM penyuluhan di Provinsi Jambi. Dengan dana sebesar Rp. 175.523.000,- terealisasi keuangansebesar 91,72% dan fisik 100%, ini diketahui dengan meningkatnya penyelenggaraan Sistim LAKU (Latihan dan Kunjungan) bagi penyuluh dalam membina petani dan kelompok tani, meningkatnya kemampuan adaptasi serta memotivasi kebersamaan penyuluh dan petani dalam berorganisasi, meningkatnya adopsi teknologi pertanian serta meningkatnya kompetensi penyuluh baru; d) Kegiatan Penyebaran Informasi dan Teknologi Penyuluhan berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan penyuluh dilapangan, kontak tani, penyuluh swadaya dan swakarsa adalah dengan menambah pengetahuan melalui penyediaan informasi yang memadai diperlukan bahan informasi penyuluhan sebagai alat bantu dalam melaksanakan fasilitasi pembelajaran, dilapangan. Bahan tersebut berupa banner/poster/leaflet ataupun brosur, penyebaran informasi melalui media televisi, radio, melalui stand pameran dan mobil hias pada 17 Agustus, Temu Aplikasi Teknologi serta KIM (Kampanye Indonesia Menanam) yang bekerjasama dengan melibatkan Pesantren Assidiqi di Kabupaten Batanghari maupun media cetak serta *cyberextension*, dengan dukungan dana APBD sebesar Rp.335.561.000,- dengan hasil yang diharapkan yaitu tersedianya teknologi yang tepat guna dan menguntungkan petani dalam berusaha tani. Kendala dilapangan masih adanya kesulitan dalam mencari materi penyuluhan/informasi teknologi sektor kehutanan terkini karena karena tidak adanya lembaga penelitian kehutanan/UPT di Provinsi Jambi, e) Kegiatan Pengembangan Programa Penyuluhan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 234.446.500,- dan telah dilaksanakan Penyusunan Programa Penyuluhan tahun 2016 sebagai acuan bagi penyuluh dan aparat penyelenggara penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha (petani, peternak, pekebun, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan), Bakorluh serta instansi terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan di provinsi Jambi, selain itu terselenggaranya pertemuan Temu Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan penilaian Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang bekerjasama dengan Pokja III PKK Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah kurangnya koordinasi ditingkat kabupaten antar SKPD/ instansi terkait dalam pemetaan lokasi program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan sehingga BP4K kabupaten Kota tidak/kurang lengkap dalam pendampingan dan masih sulitnya dalam pengumpulan data dari SKPD/ instansi terkait, f) Kegiatan Penyusunan Database Statistik Penyuluhan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 58.310.000,- telah dilaksanakan kegiatan Pengumpulan data terkait informasi penyuluhan pertanian guna menyusun buku Statistik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi

Jambi tahun 2015. Dari 133 BP3K yang ada di Provinsi Jambi terdapat 833 orang penyuluh pertanian yang PNS, 64 orang perikanan dan 27 orang kehutanan, THLTB sebanyak 326 orang, penyuluh swadaya 600 orang dan 958 pos penyuluh, g) Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Penyuluhan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 373.046.558,- berupa rapat Sinkronisasi Operasional Kegiatan SOK) dan Musrenbang Penyuluhan Tingkat Provinsi Jambi dengan mengikutsertakan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota se provinsi Jambi serta instansi terkait, agar diperolehnya rencana kegiatan program penyuluhan dan diperolehnya kesepakatan antar berbagai lembaga dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang terkoordinir dan sinergis. Realisasi keuangan sebesar 79,14 % karena kegiatan rapat –rapat (SOK dan Musrenbang) tidak diperkenankan di laksanakan di Hotel sehingga terdapat kelebihan anggaran yang harus dikembalikan. Kendala dalam pelaksanaan dilapangan banyaknya kegiatan-kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten maupun instansi terkait yang masih tumpang tindih sehingga masih perlu dilakukan pemantapan sistim koordinasi kegiatan penyuluhan kedepannya; h) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan bertujuan agar terpantaunya perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan dukungan dana Rp. 181.918.000,-. Dilaksanakan satu kali pertemuan MONEV dalam satu tahun dan dengan melaksanakan peninjauan ke kabupaten/kota. Terpantaunya program/kegiatan penyuluhan dan sejauhmana program perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terus dimonitoring dan dievaluasi untuk dilakukan tindak lanjut terhadap permasalahan dan kendalanya; i) Kegiatan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.157.731.500,- dengan sasaran kegiatan meningkatnya kemajuan wilayah binaan penyuluh berupa peningkatan perolehan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dilaksanakan oleh para penyuluh yang ada di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi.

4.2 Urusan Pilihan

4.2.1 Pertanian

4.2.1.1 Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan dan hortikultura yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir.

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura memiliki orientasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun masyarakat sekitarnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebagai SKPD yang melaksanakan sebagian dari fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pertanian pada tahun anggaran 2015 memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 23.038.510.500,00 yang dipergunakan untuk mendanai 8 program dengan 4 program utama, yaitu Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan. 4 Program lainnya merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin SKPD.

a. Program peningkatan kualitas SDM pertanian

Program peningkatan kualitas SDM pertanian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam rangka adopsi dan aplikasi penerapan teknologi yang sesuai dengan rekomendasi, sehingga nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan produksi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui APBD Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar Rp 867.891.737,00. pada Program peningkatan kualitas SDM pertanian dilaksanakan 3 kegiatan yaitu : a) Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan sebanyak 1 angkatan dengan melibatkan 25 orang petani yang

berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sebagai peserta; b) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani POS IPAHA sebanyak 1 angkatan yang melibatkan 25 orang Kelompok POS IPAHA yang telah ditingkatkan pengetahuan serta keterampilannya, dan c) Pelatihan Kompetensi Statistika Pertanian melatih petugas statistik (Mantri Tani) sebanyak 1 angkatan melibatkan 25 orang petugas pencatat data statistik pertanian (Mantri Tani), d) Bimbingan Lanjutan Kepada Petani dilakukan pada 11 Kabupaten/Kota yang melibatkan 1.100 orang petani yang telah ditingkatkan pengetahuan serta keterampilannya dan e) Melakukan Penilaian Lomba Keterampilan Petani di 11 Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan mempunyai tujuan antara lain : meningkatkan pengembangan pengolahan hasil pertanian serta meningkatkan promosi dan pelayanan informasi pasar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui APBD Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar Rp766.664.804,00 telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Promosi dalam Daerah, Promosi Luar Daerah, Pasar Tani, BinteK Temu Usaha, Rakor Pengendalian Inflasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, BinteK Petugas Pelayanan Informasi Pasar, Analisa Usaha Tani, BinteK Pengolahan Hasil dan Perbaikan Kemasan dan Pelabelan, Pemberian Penghargaan Bidang PPHP, BinteK Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil TPH.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : a) Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan secara 6 tepat, b) Meningkatkan pembinaan pengembangan aslin dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan operator UPJA, c) Meningkatkan kelompok P3A/GP3A berprestasi, d) Meningkatkan kelompok tani TAM berprestasi, e)

Meningkatkan ketersediaan SID cetak sawah, dan f) Meningkatkan produktivitas lahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2015 melalui dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 1.869.569.045,00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu : 1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilakukan di 10 kab/kota di Provinsi Jambi; 2) Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, dimana melalui kegiatan ini telah terlaksana pengadaan alat dan mesin pertanian seperti Power Thresher sebanyak 14 unit, Pompa Air sebanyak 10 unit, Alat Pemipil Jagung (Cornsheller) sebanyak 3 Unit, Merek Gudang Brigade Tanam sebanyak 1 unit, Compressor sebanyak 1 Unit, Tool Kit sebanyak 1 Paket, dan Mesin Las sebanyak 1 unit, Hand Traktor di UPTD BTPPH sebanyak 1 Unit, Hand Traktor Rotary di UPTD Perbenihan sebanyak 4 Unit, Hand Traktor Singkal di UPTD Perbenihan sebanyak 1 Unit, Mini Traktor Lokal Jambi di UPTD Perbenihan sebanyak 2 Unit, Cultivator di UPTD Perbenihan sebanyak 1 Unit, Power Thresher di UPTD Perbenihan sebanyak 4 Unit, Paddy Repair di UPTD Perbenihan sebanyak 2 Unit, Alat Pencacah Pupuk Organik di UPTD BTPPH sebanyak 10 Unit, Pengadaan Alat Pencacah pupuk Organik di UPTD Perbenihan sebanyak 2 Unit, Pembelajaran operator UPJA ke pabrikaan yaitu ke Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 orang dan penilaian kelompok UPJA berprestasi; dan 3) kegiatan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Tata Air Mikro (TAM), dimana melalui kegiatan ini telah terbina kelompok pengelola TAM di 2 Kabupaten melalui Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi dan Nasional sebanyak 1 kali, Rakor Pembinaan P3A sebanyak 1 kali, Penyusunan Data P3A/GP3A sebanyak 1 kali, Penyusunan Data Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 1 kali, Pertemuan Irigasi sebanyak 4 kali, dan Pembuatan Kincir Air di Kelompok Tani sebanyak 10 Unit 4) Pembinaan Lanjutan Perluasan Areal Tanaman Pangan di 10 Kabupaten/Kota, Pembinaan Kelompok Tani di Areal Cetak Sawah Baru seama 1 Tahun, Pengembangan SRI sebanyak 5 Unit, Pencanaan Tanaman Perdana 1 Kali.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan tujuan antara lain : 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai, 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sayuran organik, dan tanaman hias, 3) Meningkatkan pengembangan hortikultura, 4) Meningkatkan ketersediaan benih padi, benih sumber kedelai, jagung dan kacang tanah, benih sumber BPMT, kentang G1, G2 dan G3 di BBU, 5) Meningkatkan ketersediaan benih di penangkar, dan 6) Meningkatkan kelompok penangkar benih, dan meningkatnya ketersediaan benih padi gogo dan benih padi dataran tinggi hasil pemurnian.

Melalui Dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 sebesar Rp9.012.500.511,00, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan program ini melalui kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Akselerasi Peningkatan produksi Padi yang dilaksanakan di 11 kab/kota dan pengembangan Kawasan Pangan Terpadu seluas 1,325 Ha, 2) Pengembangan Sentra Jagung seluas 50 Ha yang tersebar di 11 kab/kota, 3) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi dengan melakukan Perbanyak Benih Padi Unggul Bermutu seluas 10 Ha, 4) Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura yaitu dengan melakukan kegiatan Pengembangan Sentra Sayuran di KPT (Cabe Merah, Bawang Merah) seluas 112 Ha, Pengembangan Sentra Sayuran di Ponpes (Cabe Merah) seluas 6 Ha dan Pengembangan Sentra Jahe seluas 2 Ha, 5) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura dengan melakukan Perbanyak Bibit Tanaman sebanyak 40 Batang, 6) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija dengan melakukan Perbanyak Benih Sumber Palawija seluas 12 Ha, 7) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro dengan melakukan Pengembangan BBI Kentang G0 sebanyak 7.500 Knol, Pengembangan BBI Kentang G1 sebanyak 20.000 Knol dan Pengembangan BBI Kentang G2 sebanyak 2.600 Kg, 8) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan dengan melakukan Sosialisasi Sertifikasi Benih sebanyak 5 Unit dan melakukan Pemurnian Varietas sebanyak 2 Unit, 9) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura dengan melakukan Registrasi Pohon Induk Buah-buahan Sumber Mata Entris sebanyak 20 Unit, Apresiasi Pengawas Benih sebanyak 1 Kali, Sosialisasi Sertifikasi Benih Kentang sebanyak 2 Unit, Pemeliharaan Pohon Induk Tunggal sebanyak 10 Unit dan Observasi Persiapan Pendaftaran Varietas sebanyak 1 Unit, 10) Pengembangan Teknologi PHT berbasis Agens Hayati, yang dilaksanakan di 3 Kabupaten, 11) Penguatan Kelembagaan POS IPA dengan melakukan Penguatan Kelembagaan Pos IPA sebanyak 5 POS IPA, 12) Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan melakukan Perbanyak Benih Padi di penangkar seluas 200 Ha, Perbanyak Benih Kedelai di penangkar seluas 25 Ha, Perbanyak Benih Kentang di penangkar seluas 5 Ha dan Pembinaan Penangkar di 11 Kabupaten/Kota, 13) Pengembangan Tanaman Hias dengan melakukan Pengembangan Taman Anggrek & Kultur Jaringan Jambi sebanyak 1 Paket, 14) Pembinaan Pengembangan Hortikultura dengan melakukan Pengadaan Bibit Untuk Pengembangan Kawasan Buah di Provinsi Jambi sebanyak 6.500 Batang, 15) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Jangkat dengan melakukan pengembangan benih kentang G0 1.000 Knol, pengembangan benih kentang G1 sebanyak 4.000 Knol dan Pengembangan Benih Kentang G2 sebanyak 2.000 Kg, 16) Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Hortikultura dengan melakukan Pengadaan Alat Pemberonsong Pisang sebanyak 200 Unit, Pengadaan Alat Penyisir Pisang sebanyak 200 Unit, Pengadaan Plastik Pemberonsong Pisang sebanyak 20 Bal, Partisipasi dalam Kegiatan ITF sebanyak 1 Kali dan Pengadaan Shading Net Sayuran Organik di Petani sebanyak 2 Unit, 17) Pengembangan Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian dengan melakukan Koordinasi Pengembangan kacang-kacangan dan umbi-umbian di 11 Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Percepatan Tanaman Kedelai seluas 50 Ha dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai sebanyak 1 Kali, dan 18) Penanganan

Pasca Panen Tanaman Pangan dengan melakukan Survei susut hasil Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kedelai) di 3 Kabupaten/Kota dan Pembinaan penanganan pasca panen Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kedelai) ke Kabupaten/Kota di 11 Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi pada tahun 2015 menargetkan PAD dari hasil retribusi jasa usaha berupa retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp415.140.000,00 (257,85%) dibanding target tahun 2014 yaitu sebesar Rp161.000.000,00. Realisasi tahun 2015 sebesar Rp165.056.000,00 (102,52%). Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dibandingkan 2014 seperti tertera pada tabel berikut;

Tabel 4.202
Target dan Realisasi PAD Tahun 2014 - 2015 Lingkup Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jambi

No	BBI/Taman Anggrek	Tahun 2014			Tahun 2015			% Realisasi 2015 : 2014
		Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	BBI Padi Sukajaya	56.000	50.036	89,35	76.000	50.036	100	360,82
2.	BBI Palawija Sebapo	45.000	47.370	105,3	61.000	47.370	105	162,5
3.	BBI Palawija Alai Ilir	-	-	-	-	-	-	-
4.	BBI Hortikultura Sungai Tiga	16.000	16.150	100,9	46.000	16.150	101	152
5.	BBI Kentang Kayu Aro	20.000	20.000	100	76.000	20.000	100	221,73
6.	BBU Kentang Jangkat	20.000	20.000	100	76.000	20.000	100	1.000,00
7.	Taman Anggrek	4.000	5.500	137,5	80.140	5.500	138	220
Jumlah		161.000	159.056	98,79	415.140	165.056	103	227,33

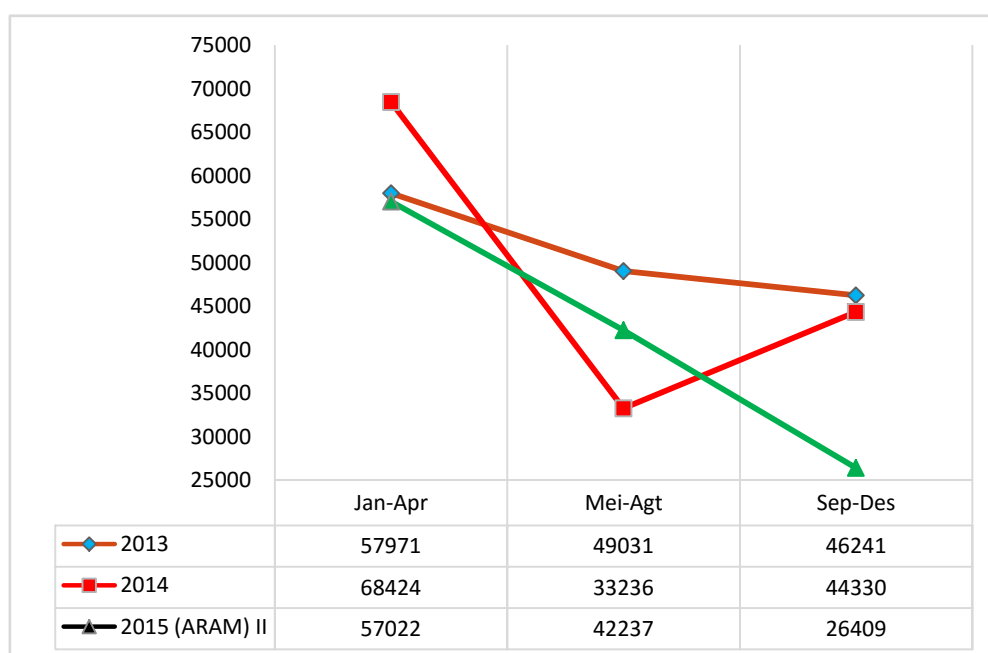
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2015

Dari hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dijabarkan perkembangan umum sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jambi sampai dengan akhir tahun 2015 sebagai berikut.

Angka Ramalan II (ARAM II) Provinsi Jambi pada tahun 2015 mengalami penurunan produksi padi sebesar 103.178 ton atau sebesar 15,52% jika

dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 664.721 ton GKG menjadi 561.542 ton GKG pada tahun 2015. Penurunan produksi padi ini terjadi karena adanya penurunan produktivitas sebesar 0,85 Kw/Ha (1,86%) dan penurunan pada luas panen sebesar 20.322 Ha (13,92%).

Penurunan produktivitas tersebut disebabkan karena terjadinya kemarau panjang dan kebakaran lahan sehingga para petani tidak dapat melakukan kegiatan bercocok tanam, walaupun kelompok tanitelah menggunakan teknologi budidaya tanaman padi dengan sistim jajar legowo baik dengan perbandingan 4:1, 3:1 dan 2:1 hal ini tidak dapat membantu banyak untuk peningkatan produksi karena pengurangan luas tanam dan panen yang begitu besar. Terlihat pada penurunan produktivitas tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penurunan luas panen yang begitu besar. Pada grafik pola penanaman di bawah dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pola penanaman dari yang biasa dilakukan oleh petani sesuai jadwal penanaman.



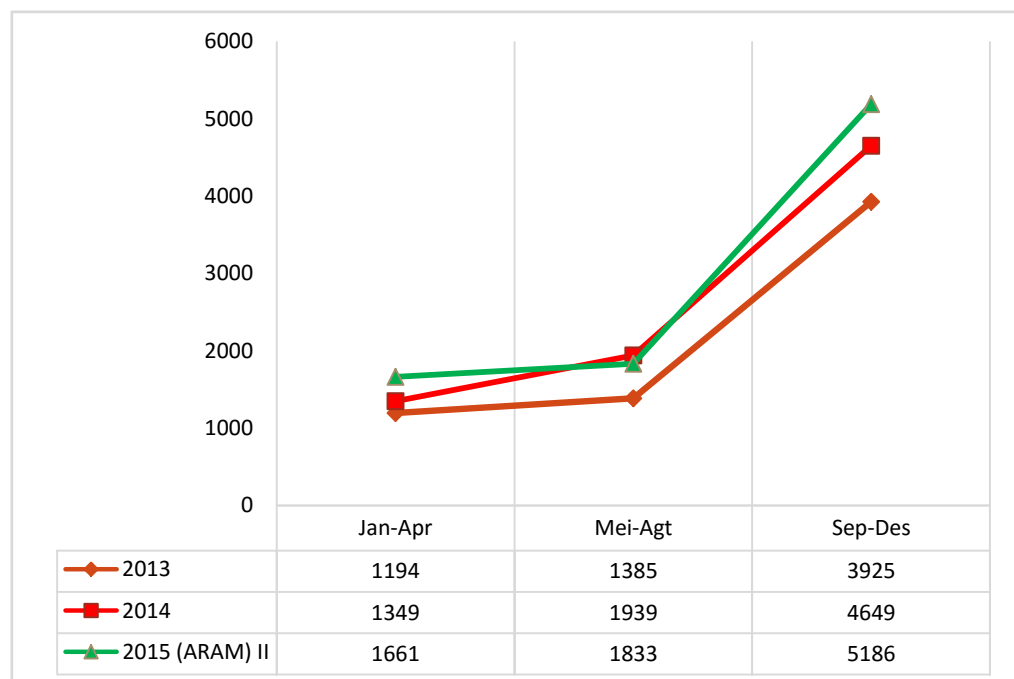
Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi

Gambar 4.82 Pola Panen Padi Provinsi Jambi Tahun 2013-2015
(Ha)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa paling tinggi jadwal penanaman padi dilakukan pada Bulan Jan-Apr, dimana pada Tahun 2015

terjadi penurunan pola penanaman pada Bulan Jan-Apr dan Sep-Des. Hal ini terjadi karena sebagian besar lahan di Provinsi terletak pada lahan rawa dan pasang surut sehingga apabila pada saat jadwal tanam tidak dapat dilakukan penanaman karena kekeringan maka akan berdampak pada menurunnya luas tanam dan panen yang berimbas pada penurunan produksi dan produktivitas.

Untuk komoditi jagung berdasarkan Angka Ramalan II 2015 (ARAM II), juga terjadi peningkatan baik dari luas panen maupun produksi jika dibandingkan dengan tahun 2014 dari luas panen 7.937 Ha menjadi 8.680 Ha dan dari produksi 43.617 ton menjadi 50.588 ton pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan luas panen sebesar 743 Ha (9,36%) dan produksi sebesar 6.972 Ton (15,98%). Peningkatan luas panen dan produksi jagung ini berdampak pada peningkatan produktivitas dari 54,95 Kw/Ha menjadi 58,28 Kw/Ha. Hal ini juga membuktikan bahwa dengan adanya penerapan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

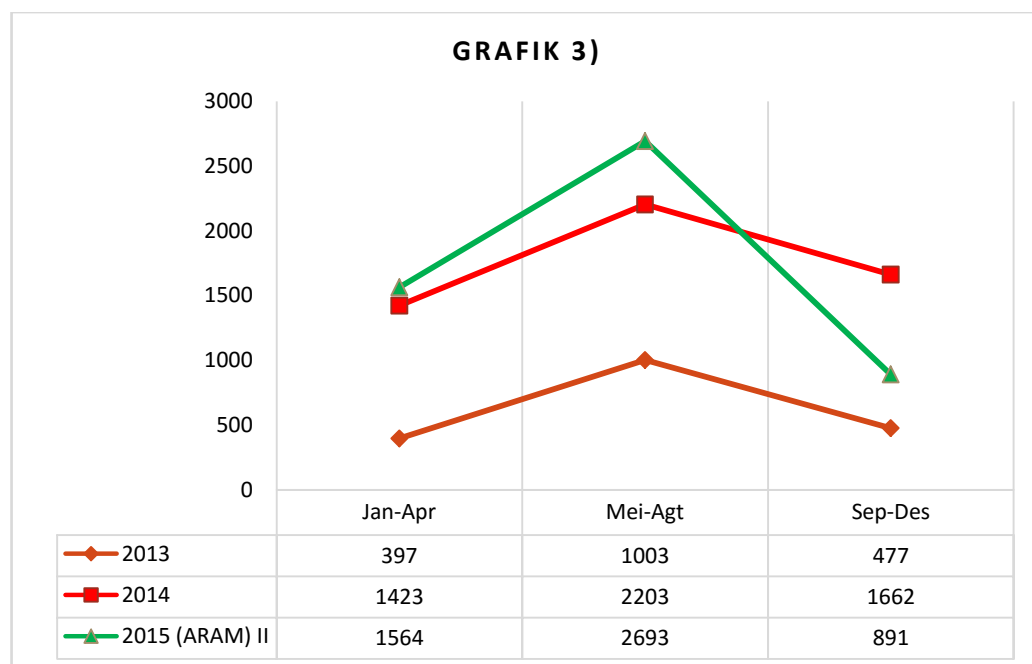


Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi

Gambar 4.83 Pola Panen Jagung Provinsi Jambi Tahun 2013-2015
(Ha)

Berdasarkan Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan pola panen jagung pada bulan Jan-Apr dan Sep-Des yang bisa disinyalir terjadinya perubahan komoditi penanaman yang dilakukan oleh petani dari komoditi padi menjadi komoditi jagung.

Komoditi Kedelai berdasarkan Angka Ramalan II 2015 (ARAM II), juga mengalami peningkatan produksi jika dibandingkan dengan tahun 2014 dari produksi 6.800 ton menjadi 7.105 ton pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan produksi sebesar 305 Ton (4,49%), tetapi terjadi penurunan luas panen dari 5.288 Ha menjadi 5.148 Ha atau mengalami penurunan luas panen sebesar 140 Ha (2,65%) yang berdampak pada peningkatan produktivitas kedelai yang sebesar 0,94 Kw/Ha (7,33%) dibanding tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi

Gambar 4.84 Pola Panen Kedelai Provinsi Jambi Tahun 2013-2015
(Ha)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan luas panen kedelai pada bulan Jan-Apr dan Mei-Agt tetapi terjadi penurunan yang

signifikan pada bulan Sep-Des. Secara keseluruhan perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Jambi dibandingkan Tahun 2014 (ATAP) dengan Tahun 2015 (ARAM II) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.203
Perkembangan Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Tanaman Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2014–2015

No	Uraian	2014 (ATAP)	Aram III 2015	Perkembangan 2015 Thdp 2014	
				(+/-)	(%)
1.	<u>LUAS PANEN (Ha)</u>				
a	Padi	145.990	125.668	-20.322	-13,92
	- Padi Sawah	121.722	105.566	-16.156	-13,27
	- Padi Ladang	24.268	20.102	-4.166	-17,17
b	Jagung	6.504	8.680	2.176	33,46
c	Kedelai	1.877	5.148	3.271	174,27
d	Kacang Tanah	1.203	1.193	-10	-0,83
e	Kacang Hijau	343	116	-227	-66,18
f	Ubi Kayu	2.744	2.082	-622	-24,13
g	Ubi Jalar	3.076	2.452	-624	-20,29
2.	<u>PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)</u>				
a	Padi	45,53	44,86	-0,67	-1,47
	- Padi Sawah	48,26	47,9	-0,36	-0,75
	- Padi Ladang	31,87	27,81	-4,06	-12,74
b	Jagung	39,5	58,28	18,78	47,54
c	Kedelai	12,64	13,8	1,16	9,18
d	Kacang Tanah	12,77	13,08	0,31	2,43
e	Kacang Hijau	11,12	11,55	0,43	3,87
f	Ubi Kayu	142,05	209,54	67,49	47,51
g	Ubi Jalar	260,26	309,35	49,09	18,86
3.	<u>PRODUKSI (Ton)</u>				
a	Padi	664.721	561.542	-103.179	-15,52
	- Padi Sawah	587.384	505.629	-81.755	-13,92
	- Padi Ladang	77.336	55.913	-21.423	27,7
b	Jagung	25.690	50.588	24.898	96,92
c	Kedelai	2.372	7.105	4.733	199,5
d	Kacang Tanah	1.536	1.193	-343	-22,33
e	Kacang Hijau	381	134	-247	-64,83
f	Ubi Kayu	38.978	43.626	4.648	11,92
g	Ubi Jalar	80.057	75.853	-4.204	-5,25

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015

1) Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani (NTP) rata-rata Bulan Januari hingga Desember 2015, Sub Sektor Tanaman Pangan adalah 96,03 dan NTP rata-rata Sub Sektor Hortikultura adalah 94,54. Perkembangan NTP tahun 2015 selengkapnya dapat dilihat ada tabel berikut ini

Tabel 4.204
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Selama Tahun 2015

No.	Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)	
		Sub sektor Tanaman Pangan	Subsektor Hortikultura
1.	Januari	97,93	93,21
2.	Februari	100,33	93,48
3.	Maret	101,72	92,76
4.	April	99,87	90,09
5.	Mei	97,95	91,23
6.	Juni	96,25	92,53
7.	Juli	96,45	94,51
8.	Agustus	96,12	95,86
9.	September	98,52	94,87
10.	Oktober	99,25	94,23
11.	November	100,88	94,86
12.	Desember	101,67	95,81
Rata-rata		98,91	93,62

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015

Menyikapi masih rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2015, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

- a) Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.

- b) Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
- c) Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprotan, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usahatani menikmati nilai tambah yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain : 1) Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll, 2) Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan, 3) Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar, 4) Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil pertanian yang mudah rusak, 5) Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan 6) Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

4.2.1.2 Perkebunan

Dinas Perkebunan Melalui anggaran APBD tahun 2015 sebesar **Rp. 30.815.164.000,-** telah digunakan untuk mendanai 8 program dengan 4 program utama dengan 48 kegiatan, untuk meningkatkan pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Jambi, yaitu :

a. Program Peningkatan kesejahteraan Petani

Kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan pemberdayaan petani, pengawalan revitalisasi perkebunan, kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan besar dan ISPO, Kegiatan pengembangan Asosiasi petani perkebunan, Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan pondok pesanteren dibidang perkebunan, Kegiatan pemberdayaan penangkar benih/bibit perkebunan.

Komoditi perkebunan merupakan komoditi yang diusahakan masyarakat jambi. Ada 5 komoditi utama yang dikembangkan yaitu : Karet, Kelapa sawit, Kelapa, Kopi dan casiavera. Pengembangan maupun peremajaan komoditi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, sereta daya saing produksi melalui peningkatan efisiensi usaha tani dan mutu hasil perkebunan.

Pada tahun 2015 ini Dinas perkebunan melaksanakan kegiatan pengembangan karet seluas 2.000 Ha. Pengembangan karet ini dialokasikan pada 8 kabupaten (Batanghari, Muaro jambi, Bungo, tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjabtim dan Tanjabbar) dengan paket bibit unggul, pupuk lengkap dan obat-obatan.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan antara lain: kegiatan Pengawasan Tata Niaga TBS, Kegiatan Promosi dan pengembangan Peluang Pasar dan Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB).

Melalui kegiatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan akan terjadi interaksi antara petani/Produsen, pedagang, eksportir dan konsumen. Untuk kegiatan promosi/pameran ini sebagai pilihan untuk membangun jaringan agribisnis yang kokoh dan berwawasan global dengan menampilkan produk-produk unggulan.

Dalam penentuan harga TBS sebagaimana tertuang dalam Permentan NO.395/Kpts/OT.140/11/2006, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan

implementasi dari kebijakan tersebut. Dalam kaitan tersebut telah dilakukan rapat koordinasi di wilayah Kalimantan dan Sumatra sebagai sentra produksi kelapa sawit. Kegiatan Penentuan harga TBS ini dilaksanakan setiap minggu di dinas Perkebunan provinsi Jambi.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Untuk Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dilakukan kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi/TAM dan Optimasi lahan perkebunan, kegiatan fasilitasi penyelesaian (GUP), Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan bencana alam, dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTB, Peningkatan Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Untuk program peningkatan produksi pertanian dilakukan kegiatan peningkatan pembinaan pengawasan peredaaan, penyimpanan pupuk dan pestisida, kegiatan pengembangan kopi seluas 228 Ha (seipenuh, kerinci dan merangin). Kegiatan pengembangan karet rakyat seluas 2.000 Ha (Batanghari, ma.jambi, Bungo, Tebo, merangin, Sarolangun, Tanjabtim dan Tanjabbar), Kegiatan Penyusunan program dan statistic perkebunan (145 buku), Kegiatan Pengembangan dan Diversifikasi usaha tani Tembakau (36 kelompok tani), Updating data base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan (1 Peta). Pengembangan Kopi dan Coklat di areal Kelapa dalam (20 Ha). Kegiatan Pembibitan Tanaman Perkebunan (100.000 kcb) di sungai tiga.

4.2.1.3 Peternakan

Pelaksanaan urusan pilihan Pertanian sub bidang peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Jambi Pada tahun anggaran 2015 mencakup 8 program dan 30 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung pada APBD Rp.23.865.933.000,00.Realisasi keuangan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 22.513.041.375,00 atau 94,33%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 97,28%. Secara rinci realisasi keuangan dan fisik tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.205
Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2015

PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	%	%
1		2	3	4	5
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.521.886.000	1.452.705.375	95,5	97,2
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.283.326.000	2.148.102.200	94,1	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur	74.000.000	70.000.000	94,6	100
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	73.000.000	72.570.000	99,4	100
5	Program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan	3.027.937.500	2.738.416.314	90,4	97,9
6	Program peningkatan produksi peternakan	10.331.248.000	9.513.774.985	92,1	94,9
7	Program pengembangan usaha peternakan	635.200.000	619.888.041	97,6	100
8	Program peningkatan kesmavet	5.919.335.500	5.897.584.460	99,6	99,8
JUMLAH		23.865.933.000	22.513.041.375	94,3	97,3

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi keuangan dan fisik pada Disnakkeswan Provinsi Jambi yaitu keuangan 94,33 % dan fisik 97,28% hal ini tentu lebih baik bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran dan realisasi fisik tahun anggaran 2014 (realisasi keuangan sebesar 83,30% dan realisasi fisik 85,52%).

Pada 4 program rutin kedinasan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Disnakkeswan Provinsi Jambi meliputi 1)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3)Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan 4)Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, telah terealisasi dengan dengan baik dengan capaian penyerapan anggaran diatas 94% dan realisasi fisik setiap kegiatan secara umum mencapai 100%. Keadaan ini menunjukkan tidak ada

permasalahan berarti yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran dari keempat program tersebut diatas.

Adapun Program dan kegiatan dari masing-masing bidang yang menjadi unggulan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun anggaran 2015 , dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan ternak dan mempertahankan zona bebas penyakit hewan menular. Adapun sasaran dari program ini yaitu meningkatnya derajat kesehatan hewan yang tercermin dari penurunan jumlah kasus penyakit hewan dan meningkatnya wilayah atau zona bebas penyakit hewan. Total dana yang tersedia untuk mendukung program ini adalah Rp. 3.027.937.500,- dengan 2 kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Pengembangan UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet dan 2) Kegiatan Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.

Output dari kegiatan pengembangan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet yaitu:

- 1) Terlaksananya pemeriksaan spesimen keswan dan kesmavet pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dari target 8.000 spesimen dan terealisasi sebanyak 7.279 spesimen atau 90,98%;
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung sebanyak 8 unit dan terealisasi 8 unit atau 100%;
- 3) Pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit untuk mendukung pelaksanaan operasional surveilans dan terealisasi 100%.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Jambi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.287.298.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.242.210.514,00 (96,50%) dan realisasi fisik sebesar 99,13%. UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Jambi telah melaksanakan beberapa pengujian sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Rabies, pengujian rabies yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode FAT dan RIAD, pemeriksaan rabies ini bertujuan :1) Untuk

meneguhkan diagnose rabies sehingga penanganan terhadap kasus gigitan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat; 2) Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan rabies dari hewan penggigit kepada manusia; 3) Untuk membantu korban gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, kera) dalam memilih pengobatan yang tepat dan ekonomis; 4) Untuk memberikan ketenangan batin dan rasa aman masyarakat korban gigitan HPR setelah mendapat penjelasan dari petugas Laboratorium.

- 2) Pemeriksaan sampel Brucellosis pada sapi, pengujian Brucellosis yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode Rose Bengal Precipitation Test (RBT), pemeriksaan Brucellosis ini bertujuan : Untuk mempertahankan wilayah Provinsi Jambi bebas dari Brucellosis (penyakit keluron menular yang secara ekonomis sangat merugikan peternak), mengamankan ternak rakyat dari Brucellosis, mensejahterakan petani.
- 3) Pemeriksaan parasit cacing lambung pada usus sapi, pengujian parasit cacing yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode natif dan uji endapan, pemeriksaan Parasit Cacing ini bertujuan :1)Untuk mengidentifikasi jenis parasit cacing lambung usus yang terdapat di peternakan rakyat dalam wilayah Provinsi Jambi, guna menentukan jenis obat yang harus digunakan untuk pemberantasan penyakit cacingan pada ternak; 2) Untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap obat akibat pemakaian yang tidak tepat; 3)Membantu meningkatkan kesehatan dan produktifitas ternak; 4) Mendukung program swasembada daging sapi kerbau.
- 4) Pemeriksaan parasit darah pada sapi, pengujian parasit darah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode pewarnaan Giemsa, pemeriksaan Parasit darah ini bertujuan : 1) Untuk mengidentifikasi jenis parasit darah pada sapi yang terdapat di peternakan rakyat dalam wilayah Provinsi Jambi, guna menentukan jenis obat yang harus digunakan untuk pemberantasan penyakit parasit darah pada ternak; 2)Untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap obat akibat pemakaian yang

- tidak tepat; 3) Membantu meningkatkan kesehatan dan produktifitas ternak; 4) Mendukung program swasembada daging sapi kerbau.
- 5) Pemeriksaan penyakit bakterial pada sapi, pengujian penyakit bacterial yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet adalah dengan menggunakan metode pewarnaan gram dan metode Isolasi dan Identifikasi (kultur), pemeriksaan Penyakit Bakteri ini bertujuan : 1) Untuk mengidentifikasi jenis bakteri penyebab penyakit pada hewan yang mati dengan tanda-tanda tidak spesifik maupun spesifik guna menentukan tindakan untuk pengendalian dan penanggulangannya dalam wilayah Provinsi jambi; 2) Untuk membantu meningkatkan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan; 3) Untuk menghindari terjadinya penularan dari hewan kepada manusia dan sebaliknya; 4) Membantu mencegah terjadinya wabah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- 6) Pemeriksaan Patologi Anatomi, pengujian Patologi Anatomi yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada organ dalam hewan; 2) Untuk mengetahui penyebab kematian hewan/ternak.
- 7) Pemeriksaan organoleptik pada bahan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH), pengujian organoleptik yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode Makroskopis dan uji fisik, pemeriksaan organoleptik ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui (secara makroskopis) tingkat kelayakan bahan produk asal hewan untuk dikonsumsi oleh manusia; 2) Merupakan bentuk pelayanan laboratorium kepada masyarakat.
- 8) Pemeriksaan identifikasi spesies, sebagai salah satu syarat jaminan kehalalan, pengujian identifikasi spesies yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode Enzym Linked Immunosorbent Assay (ELISA), pemeriksaan identifikasi spesies ini bertujuan: 1) Untuk memberikan jaminan terhadap pangan asal hewan dan non pangan asal hewan tidak tercampur unsur babi; 2) Merupakan salah satu bentuk pelayanan laboratorium kepada masyarakat; 3) Untuk memberikan ketenteraman batin masyarakat atas adanya jaminan mutu pangan asal hewan; 4)

Memberikan rekomendasi kepada penentu/penetap kebijakan dalam mewujudkan jaminan keamanan produk hewan.

- 9) Uji cemaran pada bahan Produk Asal Hewan, pengujian cemaran mikroba yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet adalah dengan menggunakan metode Total Plate Count (TPC), pemeriksaan cemaran mikroba ini bertujuan : 1) Untuk memperoleh data yang absah; 2) Memberikan rekomendasi teknis kepada penentu/penetap kebijakan dalam mewujudkan jaminan keamanan produk hewan.

Jasa pelayanan pemeriksaan yang dilaksanakan di Laboratorium Keswan dan Kesmavet juga menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi yang berkontribusi terhadap PAD. Total PAD Laboratorium Keswan dan Kesmavet tahun 2015 sebesar Rp. 12.468.500,- meningkat sebesar 1,06% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 11.817.000,-. Realisasi PAD pelayanan jasa Laboratorium Keswan dan Kesmavet dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.206
Realisasi PAD Pelayanan Jasa Laboratorium Keswan dan
Kesmavet

No	Bulan	Jumlah PAD (Rp)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4
1	Januari	150.000,-	189.000,-
2	Februari	2.599.000,-	78.000,-
3	Maret	125.000,-	1.837.500,-
4	April	306.000,-	2.000.000,-
5	Mei	125.000,-	1.288.000,-
6	Juni	2.1778.500,-	256.000,-
7	Juli	234.000,-	115.000,-
8	Agustus	75.000,-	1.087.000,-
9	September	215.000,-	160.000,-
10	Oktober	395.000,-	785.000,-
11	November	3.951.500,-	265.000,-
12	Desember	863.000,-	4.855.000,-
JUMLAH		11.817.000,-	12.468.500,-

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pelayanan jasa laboratorium pada UPTD laboratorium keswan dan kesmavet jauh melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium yang menunjang kegiatan pemeriksaan spesimen dan sampel pada UPTD laboratorium keswan dan kesmavet.

Pada kegiatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular output yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi SE sebanyak 15.000 dosis dengan realisasi 100%; vaksinasi rabies sebanyak 10.000 dosis dengan realisasi 100%; vaksinasi antraks sebanyak 1.000 dosis dengan realisasi 100%; penyemprotan desinfektan sebanyak 325 liter dengan realisasi 100%; eliminasi anjing sebanyak 250 ekor dengan realisasi 100% dan pelayanan NVS sebanyak 3.600 ekor dengan realisasi 100%.

Untuk mendukung penurunan angka kematian ternak juga dilakukan pelayanan kesehatan hewan sepanjang tahun 2015 data seperti pada tabel 4 di bawah ini. Dari tabel tersebut diperoleh data bahwa pelayanan kesehatan hewan pada ternak besar dan kecil sepanjang tahun 2015 sebanyak 26.350 ekor tersebar di kabupaten/kota dalam provinsi Jambi.

Tabel 4.207
Jumlah Pelayanan kesehatan hewan besar dan kecil Tahun 2015

KAB/KOTA	VAKSINASI RABIES	VAKSINASI SE	VAKSINASI ANTHRAX	JUMLAH
KOTA JAMBI	1.000	250	0	1.250
BATANG HARI	1.000	1.550	600	3.150
MUARO JAMBI	500	1.500	400	2.400
BUNGO	500	1.000	0	1.500
TEBO	1.000	1.200	0	2.200
MERANGIN	1.000	1.200	0	2.200
SAROLANGUN	1.000	1.650	0	2.650
KERINCI	1.000	1.750	0	2.750
KOTA SEI. PENUH	1.000	1.750	0	2.750
TANJAB BARAT	1.000	1.500	0	2.500
TANJAB TIMUR	1.000	1.650	0	2.650
KLINIK PROPINSI	0	0	0	350
JUMLAH	10.000	15.000	1.000	26.350
Persentase	99,99	100	100	100

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular adalah untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ternak di provinsi Jambi. Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.740.639.000,00 dengan serapan anggaran sebesar 1.496.205.800,00 (85,96%) dengan realisasi fisik sebesar 97%. Kegiatan terdiri dari penanganan gangguan reproduksi ternak, workshop Cold Chain, workshop sikhnas dan pengawasan lalu lintas ternak. Rincian pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut :

1) Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Menanggulangi penyakit gangguan reproduksi pada ternak sapi betina usia produktif
- b) Meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran

Target pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan reproduksi ternak pada tahun 2015 sebanyak 900 ekor dan terealisasi sebanyak 899 ekor. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.208
Target dan realisasi penanganan gangguan
reproduksi ternak Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	TARGET	REALISASI
1	KOTA JAMBI	20	0
2	BATANG HARI	80	56
3	MUARO JAMBI	70	32
4	BUNGO	70	70
5	TEBO	70	71
6	MERANGIN	70	90
7	SAROLANGUN	175	176
8	KERINCI	125	121
9	KOTA S. PENUH	70	100
10	TANJAB BARAT	70	73
11	TANJAB TIMUR	80	110
12	KLINIK PROPINSI		
JUMLAH		900	899

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi, 2015

Adapun jenis penyakit gangguan reproduksi yang terjadi selama tahun 2015 disajikan pada tabel berikut;

Tabel 4.209
Jenis penyakit gangguan reproduksi ternak Tahun 2015

No	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	PERSENTASE
1	HYPOFUNGSI OVARI	350	38,93
2	CLP	98	10,9
3	SILENT ESTRUS	87	9,67
4	DISTOKIA	69	7,67
5	RETENSI PLASENTA	53	5,89
6	INFEKSI SAL. REPRO	50	5,56
7	REPEAT BREEDING	47	5,22
8	ANESTRUS	45	5,05
9	PYOMETRA	27	3,03
10	ABORTUS	25	2,78
11	ATROFI OVARI	23	2,06
12	PROLAPS UTERI	14	1,55
13	CYSTA OVARI	7	0,77
14	NYMPHOMANIA	3	0,33
15	CACAT KONGENITAL SAL.REPRO	1	0,11
JUMLAH		899	100

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

2) Pelayanan Kesehatan Hewan

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dilakukan di puskesmas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. Setiap puskesmas akan melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan teknis keswan (pemberian vitamin dan obat cacing) dan pengambilan sampel (organ/autopsi).

Tabel 4.210
Kegiatan pelayanan kesehatan hewan tahun 2015

NO	KAB/KOTA	PUSKESWAN	TARGET PEL. TEKNIS	REALISASI PEL. TEKNIS	TARGET SAMPEL	REALISASI SAMPEL
1	KOTA JAMBI	TALANG BAKUNG	500	500	5	0
2	MUARO JAMBI	SEBAPO	500	500	5	0
3	MUARO JAMBI	SUNGAI BAHAR	500	500	5	0
4	BATANG HARI	SUNGAI RENGAS	500	500	5	0
5	BUNGO	MUARO BUNGO	500	500	5	0
6	BUNGO	KUAMANG KUNING	500	500	5	0
7	TEBO	SUNGAI BENGKAL	500	500	5	0
8	SAROLANGUN	AIR HITAM	500	500	5	0
9	SAROLANGUN	LIMUN	500	500	5	5
10	SAROLANGUN	SINGKUT	500	500	5	0
11	MERANGIN	PAMENANG	500	500	5	0
12	KERINCI	TANGKIL	500	500	5	0
13	KERINCI	SANGGARAN AGUNG	500	500	5	0
14	KOTA S. PENUH	KOTA SUNGAI PENUH	500	500	5	0
15	TANJAB BARAT	SUNGAI SAREN	500	500	5	0
16	TANJAB BARAT	PELABUHAN DAGANG	500	500	5	0
17	TANJAB TIMUR	GERAGAI	500	500	5	0
18	TANJAB TIMUR	RANTAU RASAU	500	500	5	0

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

3) Workshop Cold Chain

Tujuan dilaksanakannya Workshop Cold Chain adalah:

- a) Untuk meningkatkan pengetahuan petugas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan dan penanganan vaksin yang benar dengan memperkenalkan sistem manajemen rantai dingin (cold chain).
- b) Untuk mempersiapkan tenaga pengelola vaksin di semua jenjang pelayanan kesehatan hewan yang berkualitas.
- c) Untuk mempersiapkan petugas vaksinasi yang handal sehingga sasaran dari vaksinasi dapat tercapai tanpa menimbulkan efek negatif bagi petugas, masyarakat dan lingkungan.

Outcome kegiatan Workshop Cold Chain adalah dengan diperolehnya tenaga vaksinator yang handal maka hasil vaksinasi akan memperoleh kekebalan sesuai yang diharapkan.

Peserta Workshop Cold Chain sebanyak 26 orang yang merupakan utusan dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

4) Workshop SIKHNAS

Tujuan dilaksanakannya Workshop SIKHNAS adalah:

- a) Untuk memperkenalkan sistem pelaporan iSIKHNAS kepada petugas lapangan sehingga petugas lapangan dapat menggunakan, mengakses dan memanfaatkan iSIKHNAS
- b) Agar iSIKHNAS digunakan sebagai cara pelaporan petugas lapangan sehingga pelayanan kesehatan hewan di lapangan dapat diakses lebih cepat, tepat dan akurat

Outcome kegiatan Workshop SIKHNAS adalah memperoleh data cepat, tepat dan akurat yang dapat diakses sampai ke pusat secara online.

Peserta Workshop SIKHNAS sejumlah 90 orang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi telah selesai direplikasi untuk penggunaan iSIKHNAS.

1) Jumlah petugas SIKHNAS tahun 2015 = 136 orang

petugas Medis = 50 orang

petugas Paramedis = 86 orang

2) Dengan jumlah laporan selama tahun 2015 = 9.165 ID, dengan perkembangan kasus :

sembuh = 8.462 ekor

masih sakit = 437 ekor

mati = 266 ekor

5) Pengawasan Lalu Lintas Ternak

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak dari setiap Kabupaten/Kota ditunjuk 1 orang pengawas lalu lintas ternak sebagai perpanjangan Provinsi dalam mengawasi lalu lintas hewan di Provinsi Jambi Pengawasan Lalu Lintas Ternak bertujuan untuk mengawasi lalu lintas ternak yang akan masuk atau keluar sebagai upaya mencegah penularan penyakit hewan khususnya penyakit hewan menular strategis.

Selain itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi melalui Bidan Kesehatan Hewan juga melayani pembuatan Surat Kesehatan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Rekomendasi Pemasukan Ternak dan pelayanan kesehatan hewan di klinik kesehatan hewan yang ada di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

Tabel 4.211
Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
yang dikeluarkan pada Tahun 2015

NO	JENIS HEWAN	JML. SKKH	JML. HEWAN
1	Burung	130	701
2	Ayam	29	95
3	Sapi	11	119
4	Itik	1	720
5	Anjing	4	5
6	Kucing	1	1
JUMLAH		176	1.341

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Tabel 4.212
Surat Rekomendasi Pemasukan Ternak Tahun 2015

NO	JENIS HEWAN	JML. SURAT REKOMENDASI	JML. HEWAN/VAKSIN	DAERAH ASAL HEWAN
1	DOC Ayam Buras	52	177.900	Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta
2	DOD Itik	20	36.300	Jawa Timur
3	Burung	54	168	Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, Bali, NTB
4	Ayam	1	25	Yogyakarta
5	Anjing	3	4	Jawa Barat
6	Kucing	13	36	Jakarta, Yogyakarta, NTB
7	Sapi	4	1.700	Jawa Tengah, NTB
8	Caprivac AI-K	6	2.925 botol	Jawa Barat, Jakarta
	Vaksin ND AI-K	6	3.800 botol	
	Vaksimmune ND-AI	3	1.625 botol	
JUMLAH		151	207.109 ekor	
			8.350 botol	

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

6) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan adalah terbatasnya

jumlah tenaga medik dan paramedik veteriner di provinsi Jambi. Mengingat luasnya wilayah kerja masing-masing petugas.

Solusinya yaitu merekrut tenaga medik dan paramedik veteriner sesuai kebutuhan, memberikan bimtek/pelatihan/magang pada tenaga medik dan paramedik veteriner yang ada dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM.

b. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak. Sasaran program adalah tercapainya peningkatan populasi ternak. Anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program ini yaitu: Rp. 10.331.248.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 9.513.774.985,00 (92,09%) dengan realisasi fisik sebesar 94,88%.

Kegiatan yang mendukung program peningkatan produksi peternakan yaitu:

- 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- 2) Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan peternakan
- 3) Kegiatan pengembangan balai perbibitan ternak
- 4) Kegiatan pengembangan kawasan sentra produksi peternakan
- 5) Kegiatan pengembangan intergrasi peternakan
- 6) Kegiatan pengembangan ternak ruminansia dan non ruminansia

Pada tahun 2015 ketersediaan bibit ternak lokal bermutu ditargetkan sebesar 10% dari jumlah populasi. Ketersediaan bibit lokal bermutu adalah berasal dari jumlah populasi betina muda baik pada ternak sapi maupun ternak kerbau.

Tabel 4.213
Populasi Ternak Besar Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sapi Potong	177.710	119.888	193.534	118.985	136.638	140.185
2	Sapi Perah	0	81	66	64	64	72
3	Kerbau	76.143	45.605	53.685	41.155	43.624	44.531
	TOTAL	253.853	165.574	247.285	160.204	180.326	184.788

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi, 2015

Uraian kegiatan pendukung program peningkatan produksi peternakan adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Melalui Anggaran tahun 2015 dialokasi dana untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 413.121.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 408.914.600,00 (98,98%) serta realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Workshop pengelola data peternakan
- b) Pertemuan SPI
- c) Pertemuan Verifikasi dan Validasi Statistik Peternakan
- d) Pertemuan Monev Pembangunan Peternakan

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan

Melalui Anggaran tahun 2015 dialokasi dana untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbag Program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 224.068.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 222.521.600,00 (99,31%) serta realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Pertemuan SOK
- b) Pertemuan Musrenbang Peternakan
- c) Verifikasi dan Validasi Data Calon SPR Provinsi Jambi

3) Kegiatan Pengembangan Balai Perbibitan Ternak

Kegiatan Pengembangan Balai Perbibitan Ternak merupakan bagian dari program peningkatan produksi peternakan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Perbibitan Ternak memiliki tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan operasional perbibitan ternak dan pakan ternak serta jasa pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan bibit ternak dan pakan ternak yang dihasilkan, serta jasa pelayanan dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan peralatan Inseminasi Buatan bagi Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2015, UPTD Balai Perbibitan Ternak melaksanakan kegiatan Pengembangan Balai Perbibitan Ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.064.382.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.577.851.500,- atau 90,38% dengan realisasi fisik sebesar 93,10%. Pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

a) Kelahiran Sapi Hasil IB

Inseminasi Buatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu ternak lokal, mempercepat peningkatan populasi ternak, menghemat penggunaan pejantan, mencegah adanya penularan penyakit kelamin akibat perkawinan alam dan perkawinan silang antar berbagai bangsa/ras dapat dilakukan. Pada tahun 2015 target kelahiran sapi hasil IB adalah sebanyak 9.065 ekor dan telah terealisasi sebanyak 7.933 ekor.

Tabel 4.214
Daftar Jumlah Ternak Sapi Hasil IB Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Target (ekor)		Realisasi (ekor)	
		Akseptor	Kelahiran	Akseptor	Kelahiran
1	2	3	4	5	6
1	Kota Jambi	310	150	97	87
2	Batanghari	1.190	850	1.554	715
3	Muaro Jambi	1.450	800	491	682
4	Tebo	1.790	1.150	1.183	1.122
5	Bungo	2.140	1.000	2.370	998
6	Merangin	1.940	1.100	1.638	597
7	Sarolangun	900	650	800	368
8	Kerinci	1.900	950	1.399	469
9	Sungai Penuh	700	450	523	407
10	Tanjabtlim	1.900	950	1.807	889
11	Tanjabbar	1.690	990	1.408	873
12	UPTD Perbibitan	40	25	41	9
	Jumlah	15.950	9.065	13.311	7.933

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Data diatas menunjukkan bahwa target kelahiran sapi hasil IB tahun 2015 belum tercapai. Hal ini disebabkan terbatasnya petugas inseminator dan sarana pelayanan IB, tidak tercapainya penambahan ternak produktif, dan tingginya pemotongan ternak produktif oleh masyarakat sehingga populasi ternak produktif berkurang.

Berbagai cara yang perlu dilakukan untuk mencapai target kelahiran adalah :

- (2)** Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas inseminator
- (3)** Penerapan Perda tentang pelarangan pemotongan betina produktif serta pemberian sanksi terhadap pemotongan betina produktif.

b) Produksi Semen Beku

Salah satu tujuan didirikan UPTD Balai Perbibitan Ternak yaitu meningkatkan produksi semen beku baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun target produksi semen beku pada tahun 2015

adalah sebesar 5.000 dosis dan telah terealisasi sebanyak 5.000 dosis. Data ternak sapi hasil IB tertera pada tabel 15 berikut:

c) Pembangunan Infrastruktur UPTD Perbibitan Ternak

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembangunan berbagai di UPTD Perbibitan Ternak untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan meliputi :

- (5) Pembangunan gudang pakan BIBD Sungai Gelam
- (6) Pembangunan gudang mesin dan genset BIBD Sungai Gelam
- (7) Pembangunan gudang kompos BIBD Sungai Gelam
- (8) Pembentukan badan jalan BIBD Sungai Gelam
- (9) Pekerjaan box culvert BIBD Sungai Gelam
- (10) Perencanaan drainase jalan ke kandang UPTD Perbi
- (11) Pengadaan kendaraan roda empat operasional BIBD Sungai Gelam

d) Pemeliharaan ternak pada UPTD Perbibitan

Sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan juga pemeliharaan ternak meliputi pemberian pakan serta pemeliharaan kesehatan ternak-ternak yang dipelihara pada UPTD Perbibitan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi sebanyak 353 ekor meliputi Sapi Bull, Sapi Pembibitan, Sapi Perah, Kambing dan Itik.

e) Penanaman Hijauan pakan ternak

Sepanjang tahun 2015 juga telah dilaksanakan penanaman hijauan pakan ternak seluas 30 hektar untuk menjamin ketersediaan pakan ternak unggul pada UPTD Perbibitan Ternak.

4) Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan

Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Budidaya Ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.958.533.500,00 dengan serapan dana sebesar Rp. 3.643.928.300 (92,05%) dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 95,46%.

Kegiatan pengembangan kawasan sentra peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak. Salah satunya melalui pengadaan ternak yang disebar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Tabel 4.215
Pengadaan Ternak Tahun 2015

No	Jenis Pengadaan	Kabupaten	Kelompok Penerima	Lokasi	Jumlah Ternak (ekor)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Sapi Bibit	Tanjab Timur	Putra Berbak	Berbak, Berbak	33
		Batang Hari	Harapan Baru	Teluk, Pelayung	22
2	Pengadaan Sapi Penggemukan	Kota Jambi	Teratai	Talang Bakung	25
			Lenggang Karyo	Talang Bakung	8
			Sumber Waras II	Olak Kemang	10
			Kaligawe II	Olak Kemang	12
			Tunas Karya	Ulu Gedung	20
			KWT. Selasih	Mudung Laut	25
		Muaro Jambi	Lentera	Kasang Pudak	150
3	Penyebaran Ternak Kerbau	Muaro Jambi	Bangkit Bersama	Pudak, Kumpeh Ulu	22
		Tebo	Usaha Mandiri	Serai Serumpun	22
			Rantau Api Jaya	Tengah Ilir	11
4	Pengadaan Ternak Ayam KTM	Bungo	Karya Mukti	Bathin III Ulu	300
		Tanjab Timur	Manunggal Tani	Geragai	300
		Sarolangun	Amanah	Mandiingin	300

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Secara keseluruhan, pengadaan ternak dapat dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

5) Permasalahan dan Solusi

- a) Permasalahan yang dihadapi pada Program Peningkatan Produksi Ternak adalah:
- (1) Belum tercapainya target kelahiran ternak sapi hasil IB
 - (2) Terbatasnya petugas Inseminator

(3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan IB

(4) tidak tercapainya penambahan ternak produktif dan tingginya pemotongan ternak produktif oleh masyarakat sehingga populasi ternak produktif berkurang

6) Solusi yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas IB melalui pelatihan, magang dan pertemuan petugas.
- b) Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pelayanan IB dan perbibitan ternak.
- c) Sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan yang mengatur tentang pelarangan pemotongan ternak ruminansi (sapi betina produktif).

c. Program Pengembangan Usaha Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi usaha peternakan. Sedangkan sasarannya adalah peningkatan jumlah usaha peternakan. Adapun kegiatan yang mendukung program pengembangan usaha ternak yaitu :1) Kegiatan Penyuluhan dan Penguatan Kelembagaan Peternak dan 2) Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Alokasi anggaran pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Peternakan ini sebesar Rp. 635.200.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 619.888.041,00 (97,59%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun output dari kegiatan ini, 1) Terlaksananya pembinaan kelompok tani, 2) terlaksananya lomba agribisnis kelompok dan petugas, 3) terlaksananya pameran hasil produk peternakan 4) Terlaksananya pengadaan biogas dan chopper, 5) Pertemuan petugas dan kelompok binaan, 6) Terlaksananya pengadaan alat pengolah produk hasil peternakan.

Pengelola kegiatan ini adalah Bidang Usaha Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dengan output pelaksanaan diantaranya terlaksananya pembinaan kelompok tani.

Adapun capaian yang diharapkan dari program ini yaitu bertambahnya jumlah kelompok tani peternakan binaan. Pada tahun 2014 target kelompok

binaan sebanyak 150 kelompok dan terealisasi sebanyak 281 kelompok. Sedangkan pada tahun 2015 dari target kelompok binaan sebanyak 175 kelompok mampu terealisasi menjadi sebanyak 338 kelompok.

Tabel 4.216
Peningkatan Kelompok Tani Binaan Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Jumlah Kelompok Tani Binaan (tahun)						Realisasi Kegiatan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Kelompok							
	Target	50	75	100	125	150	175	175
	Realisasi	21	97	183	228	281	338	338
	% Realisasi	12	55,4	105	130	131	193	193,14

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jambi, 2015

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan jumlah kelompok tani binaan yang pada tahun 2015 telah berjumlah 338 kelompok dari kondisi awal pada tahun 2010 yang hanya berjumlah 50 kelompok tani binaan. Meningkatnya jumlah kelompok tani yang dibina diharapkan akan memberi dampak pada peningkatan kemampuan peternak secara umum dalam memanfaatkan hasil peternakannya untuk menunjang kesejahteraannya sendiri sehingga tingkat kesejahteraan peternak kita akan lebih baik secara keseluruhan. Adapun masalah yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak adalah sulitnya peternak dalam mengakses permodalan baik dari perbankan maupun dari CSR perusahaan swasta. Solusi yang diharapkan mampu mengatasi ini adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga perbankan dan perusahaan swasta yang mempunyai program pengembangan wilayah disekitar perusahaan untuk peternak.

Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Jambi melalui kegiatan Penyuluhan dan Kelembagaan juga menyalurkan bantuan kepada kelompok ternak. Kelompok penerima bantuan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.217

Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Penyuluhan dan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Kabupaten/ Kota	Kelompok Penerima	Ketua Kelompok
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Pengolahan Daging	Tebo	Kelp. Tani Mitra Usaha	Rosadi
			Jl. Serayu, Winareja – Rimbo Ulu	
2	Pengolahan Pakan Ternak	Sungai Penuh	Kelp. Tani Mekar Setia	Rosmaniar
			Ds. Tanjung Muda – Hamparan Rawang	
3	Pengolahan Lainnya	Tanjung Jabung Timur	Kelp. Suko Rahayu	Sukardi
			Ds. Rantau Rasau II – Rantau Rasau	
4	Fasilitas Pengolahan Limbah Ternak (Biogas)	Merangin	Kelp. Tani Melati Putih	Agus Sumarwan
			Ds. Muara Delang – Tabir Selatan	
		Tanjung Jabung Timur	Kelp. Tani Sopo Nyono	Rosyid
			Bandar Jaya – Kec. Rantau Rasau	
			Kelp. Tani Berkah Usaha	Ramto
			Bandar Jaya – Kec. Rantau Rasau	
		Tebo	Kep. Tani Maju Rahayu	Sugito
			Ds. Giri Purno, Kec. Rimbo Ilir	

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

1) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Permasalahan program pengembangan usaha ternak adalah:

- (1) Terbatasnya permodalan untuk penguatan kelembagaan kelompok
- (2) Terbatasnya SDM penyuluh bidang peternakan dibanding kelompok binaan

(3) Minimnya keberpihakan perusahaan Sawit dalam program integrasi sawit dan ternak

b) Solusi

(1) Mempermudah akses pemberian permodalan kepada kelompok peternak melalui kerja sama dengan perbankan dan perusahaan.

(2) Menambah jumlah dan kapasitas SDM penyuluh bidang peternakan

(3) Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan sawit untuk mengintensifkan kegiatan integrasi sawit dan ternak.

d. Program Peningkatan Kesmavet

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Adapun sasaran dari program ini yaitu terawasinya peredaran produk pangan asal hewan. Total anggaran yang tersedia untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 5.919.335.500,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.897.584.460,00 (99,63%) dan realisasi fisik 99,76%. Program ini meliputi 2 kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Pembinaan Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 2) Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo.

1) Kegiatan Pembinaan Fungsi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner

Kegiatan pembinaan fungsi kesmavet dilakukan melalui pemeriksaan sampel kesmavet dilakukan melalui monitoring, pengambilan serta pemeriksaan sampel (spesimen) di laboratorium keswan dan kesmavet. Sampel yang diperiksa berupa sampel aktif yang diambil melalui surveilans dan penyelidikan dan sampel pasif yang merupakan sampel kiriman dari masyarakat umum, instansi pemerintah ataupun pihak swasta berdasarkan lokasi pengambilan sampel.

Tabel 4.218
Pengambilan Sampel Aktif dan Pasif Kesmavet

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Sampel		Jumlah Sampel
		Aktif	Pasif	
1	2	3	4	5
1	Kota Jambi	343	192	535
2	Batang Hari	21	3	24
3	Muaro Jambi	0	1	1
4	Sarolangun	43	14	57
5	Merangin	43	43	86
6	Kerinci	0	0	0
7	Sungai Penuh	0	19	19
8	Bungo	28	90	118
9	Tebo	20	0	20
10	Tanjung Jabung Barat	0	1	1
11	Tanjung Jabung Timur	0	13	13
12	UPTD Perbibitan Ternak	0	0	0
13	UPTD Kebun Binatang	0	0	0
JUMLAH 2015		498	376	874

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Sampel yang diperoleh diperiksa di Laboratorium Keswan dan Kesmavet melalui pemeriksaan Elisa, Boraks, TPC dan Formalin (Tabel 15). Dari data yang ada diperoleh informasi bahwa, dari total sampel yang diperiksa diketahui bahwa ada sekitar 77 sampel yang tercemar (8,81%) dari keseluruhan sampel yang diperiksa. Dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sampel yang diperiksa dan penurunan persentase pemeriksaan yaitu sebesar 10,00 dari tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa, pangan asal hewan yang beredar di masyarakat sudah banyak higienis.

Tabel 4.219
Pemeriksaan Sampel Kesmavet

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan (Sampel)	Hasil			
			(+)	(-)	< BMCM	> BMCM
1	2	3	4	5	6	7
1	ELISA	242	1	241	0	0
2	BORAKS	166	1	165	0	0
3	TPC	77	0	0	48	29
4	FORMALIN	325	0	325	0	0
JUMLAH		810				

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Data cemaran produk pangan asal hewan yang beredar di Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.220
Cemaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH) tahun 2010 - 2015

No	Uraian	Cemaran Produk						Realisasi Kegiatan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cemaran Produk PAH							
	Target Penurunan (%)	8	7	6	5	4	4	10
	Target Sampel	150	200	250	300	350	400	1.900
	Realisasi Target	152	180	200	360	436	874	2.202
	Cemaran (Sampel)	90	60	80	90	81	77	478
	Persentase Cemaran (%)	59,2	33,3	40	25	18,6	8,81	21,71

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Masih terdapatnya produk pangan asal hewan yang tercemar (8,81%) disebabkan oleh banyaknya produk pangan asal hewan PAH dan HAPAH yang dipasarkan di pasar tradisional belum hygenis. Untuk menurunkan angka cemaran dilakukan dengan jalan melakukan

sosialisasi pengolahan pangan asal hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan yang ASUH kepada pelaku usaha produk peternakan.

2) Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo

Pada kegiatan pengembangan kebun binatang taman rimbo target tahun 2015 adalah jumlah pengunjung kebun binatang sebanyak 340.000 orang dan mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp. 2.202.664.000,00

Tabel 4.221
Jumlah Pengunjung dan PAD UPTD Kebun Binatang Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun Pelayanan						Realisasi Kegiatan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Pengunjung							
	Target (org)	250.000	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000	1.890.000
	Realisasi (org)	0	295.506	364.945	414.294	380.190	335.355	1.790.290
	% Realisasi Target	0	98,5	125,54	125.54	111.82	95,82	94,72
2	PAD							
	Target (Rp.000)	0	0	607.200	1.528.200	1.769.540	2.202.664	6.107.568
	Realisasi (Rp.)	0	1.236.892	1.549.862	1.741.340	1.793.566	2.215.080	8.536.741
	% Realisasi Target	0	10	255,25	113,95	101,36	100,56	138,23

Sumber: Dias Peternakan dan Keswan Prov. Jambi, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah pengunjung namun tidak begitu besar. Penurunan jumlah pengunjung ini kemungkinan disebabkan oleh terjadinya bencana kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 dimana masyarakat lebih memilih berada didalam rumah daripada melakukan aktifitas diluar rumah sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berkunjung ke Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi. Khusus pada tahun 2010, UPTD kebun binatang belum menghasilkan PAD karena pada saat itu belum ada peraturan daerah yang mengatur pungutan retribusi daerah di UPTD Kebun Binatang.

3) Permasalahan dan Solusi

Adapun masalah dari kegiatan ini adalah :

- a) Belum dimiliki izin LK untuk Kebun Binatang Jambi dari Kementerian Kehutanan, menyulitkan upaya menambah koleksi satwa terutama untuk satwa yang dilindungi. Permenhut No. P.31/2012 mensyaratkan untuk memperoleh izin LK, Kebun Binatang Jambi harus diubah kedalam bentuk BUMD.
- b) Kegiatan premanisme, mengganggu pada saat kunjungan meningkat, terutama terhadap kendaraan pengunjung. Karena pengunjung dipaksa oleh para petugas parkir liar untuk memarkir kendaraannya pada areal yang sudah mereka sediakan dengan tarif yang cukup mahal.
- c) Relatif masih tingginya angka tingkat cemaran produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil pangan asal hewan (HPAH)
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemotongan secara kesrawan.

Solusi Permasalahan

- a) Untuk meningkatkan jumlah pengunjung maka diupayakan penambahan koleksi satwa yang dimiliki
- b) Mengantisipasi premanisme, dilakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar Kebun Binatang dan pihak Kelurahan Talang

Bakung dengan melibatkan Pihak Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas Kelurahan talang bakung.

- c) Mengintensifkan sosialisasi PAH dan HPAH yang ASUH kepada pelaku usaha peternakan.

4.2.2 Kehutanan

Pada tahun anggaran 2015 bidang kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 21.598.019.615,- dengan rincian Belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.865.173.615,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.732.846.000,- untuk mendanai 8 Program dan 40 kegiatan, terdiri dari 4 program rutin terdiri dari 18 kegiatan dan 4 program bidang terdiri dari 22 kegiatan dengan realisasi Rp. 20.063.151.805,-. atau 92,89 %. Berikut ini adalah uraian program dan kegiatan setiap bidang yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2015 yang dibiayai oleh APBD :

- a. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Program pemberdayaan sumber daya hutan bertujuan agar mengoptimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.621.172.982,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015. Realisasi Rp. 1.375.035.829,- atau sebesar 84,82 % sedangkan realisasi fisik 100 %.

Dalam rangka mendukung program ini dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

- 1) Identifikasi konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan.
- 2) Evaluasi pinjam pakai kawasan hutan.
- 3) Identifikasi Lokasi HTR dan HTI di Provinsi Jambi.
- 4) Pendataan teristris dan risalah hutan lindung di Provinsi Jambi.
- 5) Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan, sosialisasi hasil tata batas kawasan hutan dan peraturan bidang planologi kehutanan
- 6) Monitoring tata batas izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

- 7) Tata batas partisipatif Hutan Desa (HD) dan orientasi calon lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
- 8) Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.

Indikator Keberhasilan dari program ini adalah :

- 1) Terpeliharanya batas kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha di Kabupaten Batanghari sepanjang 13 Km
 - 2) Tersosialisasinya Batas kawasan hutan di 4 Kecamatan.
 - 3) Termonitornya tata batas ijin Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan yang terdiri dari 3 (tiga) ijin pinjam pakai dan 2 (dua) ijin IUPHHK-HT.
 - 4) Terlaksananya penataan batas partisipatif di 4 (empat) Hutan Desa (HD) dan Orientasi sebanyak 6 (enam) Hutan Desa (HD) dan Pendampingan di 5 (lima) Lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
 - 5) Tercetaknya dokumen perencanaan 8 (delapan) dokumen.
- b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 3.095.894.000,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015, secara garis besar tujuan dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian Hutan dan pemanfaatannya secara maksimal sebagai fungsi hidrologis, ekosistem dan iklim. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.435.056.492,- atau sebesar 78,65 %, sedangkan fisik 90,00 %.Program ini dijabarkan dengan kegiatan:

- 1) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- 2) Penanaman Tanaman Unggulan Lokal (TUL) dan fasilitasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD).
- 3) Pengawasan dan monitoring Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
- 4) Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) sekitar Tanjung.
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan taman hutan kenali dan kebun raya bukit sari
- 6) Pengelolaan hutan lindung.

Indikator Keberhasilan dari program ini adalah :

- 1) Tersedianya Demplot tanaman kehutanan dalam rangka antisipasi pemanasan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan seluas 20 Ha di Kabupaten Batanghari.
 - 2) Terpeliharanya Tanaman Unggulan Lokal (TUL) seluas 22 Ha di Kabupaten Muarao Jambi, Tebo dan Kerinci.
 - 3) Termonitornya 13 Ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 1 Hutan Restorasi dalam bentuk dokumen pelaporan.
 - 4) Pemeliharaan tanaman tahun I dan II seluas 131 Ha di TAHURA Sekitar Tanjung Kabupaten Muaro Jambi.
 - 5) Terpeliharannya 445 Ha Kebun Raya Bukit Sari (KRBS) dan Taman Hutan Kenali (THK) serta pemasukan dari sektor retribusi sebesar Rp. 95.097.500, di Taman Hutan Kenali (THK).
 - 6) Penanaman di Hutan Lindung Bukit Limau seluas 10 Ha.
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.846.049.400,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015, secara garis besar tujuan dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian hutan dan penurunan jumlah titik api akibat kebakaran hutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terutama sekitar hutan akan fungsi dan manfaat hutan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.698.565.229,- atau sebesar 92,01 %. Sedangkan realisasi fisik 100 %.

Dalam rangka mendukung program ini telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1) Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Pengamanandan peredaran hasil Hutan.
- 3) Penyuluhan dan perundang - undangan kehutanan.
- 4) Pengembangan Anggrek Alam (Spesies) Jambi.
- 5) Pelayanan informasi sumber daya hutan
- 6) Pelayanan penyajian informasi kehutanan.

Adapun keberhasilan dari program ini adalah :

- 1) Penurunan jumlah titik api yang signifikan dari tahun ketahun di Provinsi Jambi.
 - 2) Terlaksananya operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan sebanyak 23 kali dan 18 kali koordinasi pengamanan di 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
 - 3) Terlaksananya pengawasan sebanyak 7 kali di PT. Emal dan PT. Bukit Kausar.
 - 4) Terlaksananya penyuluhan kehutanan sebanyak 18 desa di Provinsi Jambi.
 - 5) Terlaksananya 3 kali Pameran dan lomba Anggrek.
 - 6) Tersajinya informasi bidang kehutanan dalam bentuk website.
- d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan total dana Rp. 628.000.000,-, melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terwujudnya industri hasil hutan yang legal, efisien dan didukung oleh bahan baku yang berkelanjutan serta diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara dari sektor Kehutanan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 626.230.900,- atau sebesar 99,72 %.sedangkan realisasi fisik 100 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Retrukturisasi industri kehutanan.
- 2) Pengawasan dan peredaran hasil hutan.

Adapun keberhasilan dari program ini adalah :

- 1) Terlaksananya pemantauan bahan baku industri terhadap 40 Unit IUPHHK di 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
- 2) Terpantaunya peredaran dokumen hasil hutan sebanyak 13.648 set SKSKB.
- 3) Terlaksananya Pungutan PSDH-DR di 11 kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

- 4) Terciptanya tertib peredaran hasil hutan 1 kali dengan jumlah peserta 80 orang.

4.2.3 Energi Dan Sumber Daya Mineral

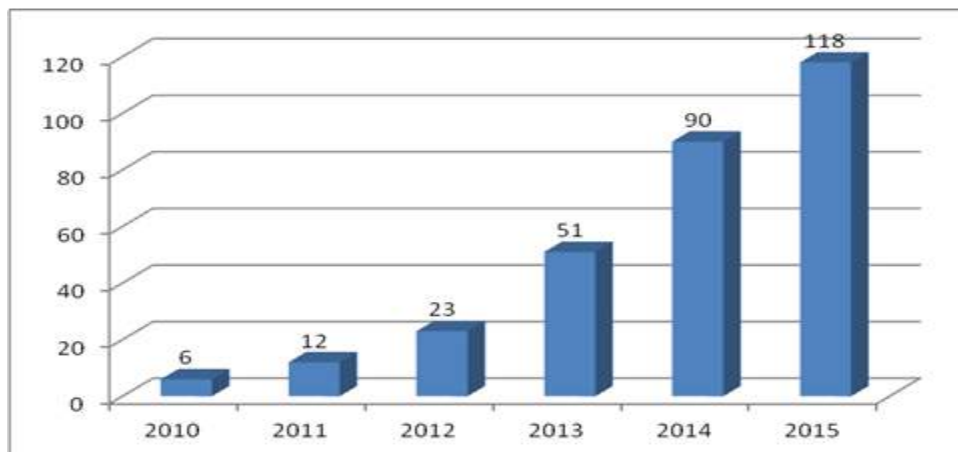
Pada Tahun Anggaran 2015 bidang energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi Sebesar Rp. 12.005.133.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp. 9.153.120.140,00 atau sebesar 76,24% yang diarahkan untuk 5 Program Pembangunan yaitu :

- a. Program Pengembangan Energi.

Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 7.294.260.930,00 secara fisik terealisasi sebesar 73,54% dan secara keuangan terealisasi sebesar 64,00%, dengan kegiatannya terdiri dari:

- 1) Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris.

Kegiatan Pembangunan Digester Biogas telah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Tahun 2015 Pembangunan Digester Biogas dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten dengan jumlah total sebanyak 28 unit, antara lain : Kab. Sarolangun (7 unit), Kab. Kerinci (7 unit), Kab. Tanjab Barat (7 unit), Kab. Tebo (7 unit). Adapun perkembangan pembangunan Digester Biogas di Provinsi Jambi sebagai berikut:

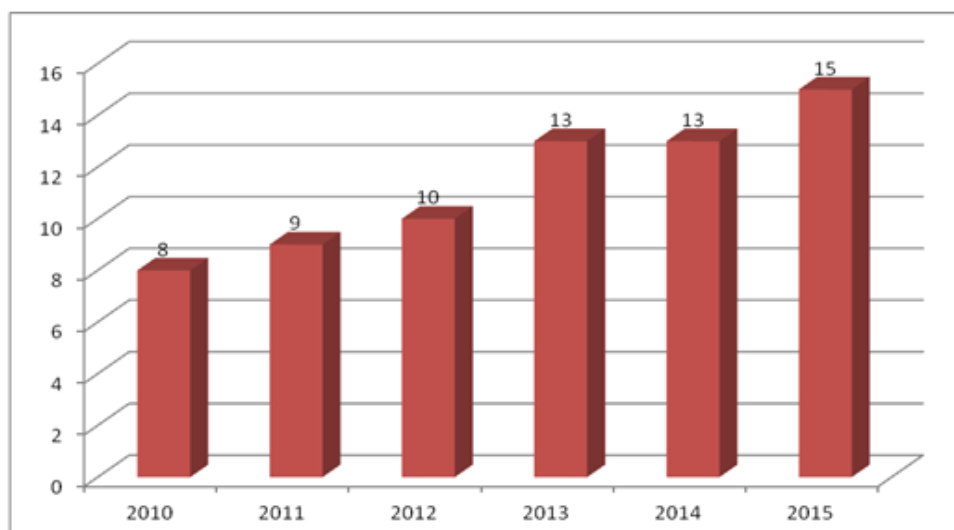


Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Gambar 4.85 Perkembangan jumlah Digester dari tahun 2010 s/d 2015

2) Pembangunan PLTMH

Untuk Kegiatan Pembangunan PLTMH dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) unit. Dua unit di Kabupaten Sarolangun dan 1 (satu) unit di Kabupaten Bungo, namun Pembangunan 1 (satu) PLTMH tidak dapat dilaksanakan karena suatu kendala. Adapun perkembangan pembangunan PLTMH di Provinsi Jambi sebagai berikut:

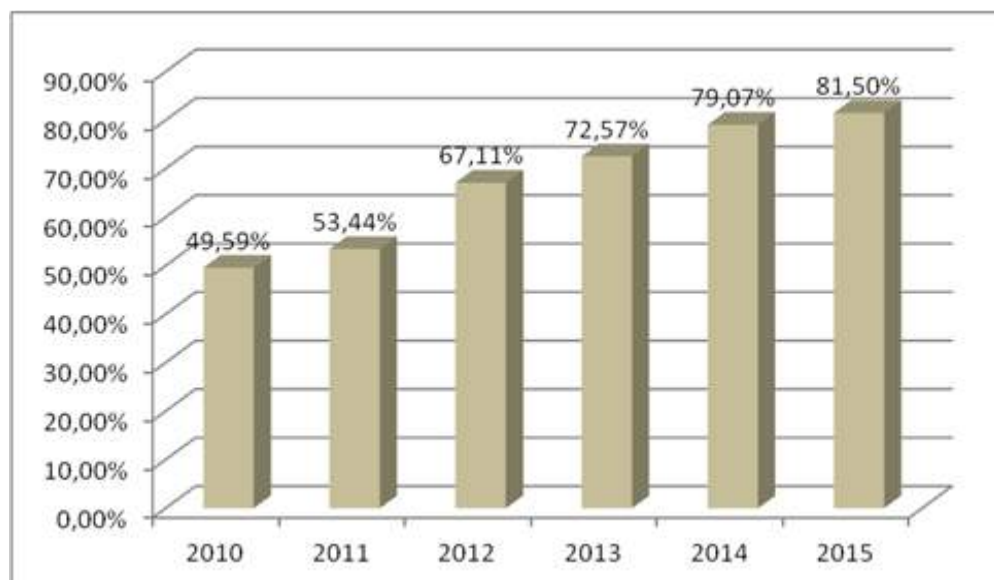


Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Gambar 4.86 Perkembangan pembangunan PLTMH di Prov Jambi

3) Inventarisasi Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jambi.

Kegiatan Inventarisasi Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jambi bertujuan untuk mencari dan mendata potensi-potensi energi baru terbarukan di dalam Provinsi Jambi, untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif untuk masa depan. Selain bertujuan untuk Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Desa dan Energi Baru Terbarukan, Program Pengembangan Energi juga mempunyai sasaran untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Jambi, adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Jambi dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



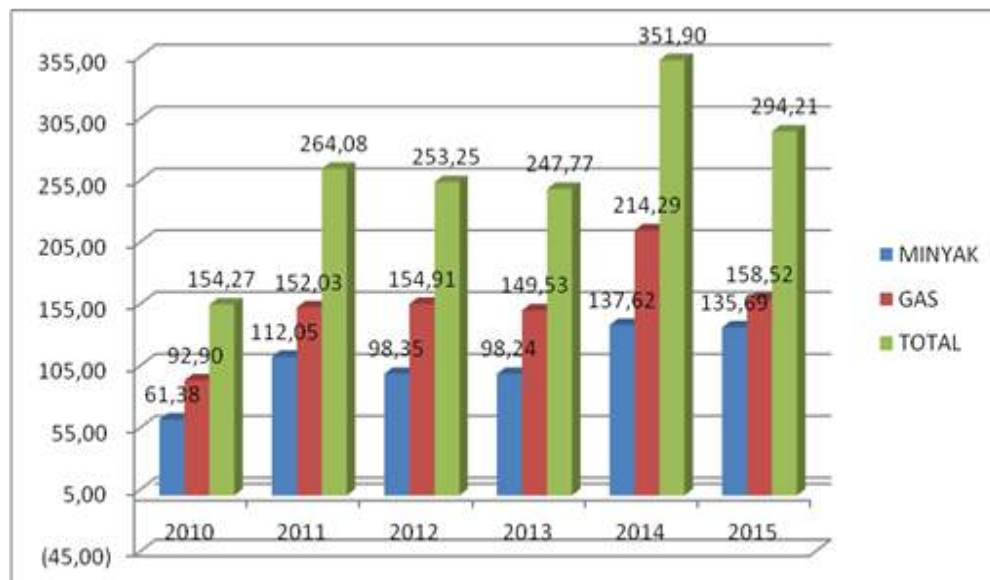
Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Gambar 4.87 Perkembangan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi

b. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa

Program ini terdiri dari 5 Kegiatan, antara lain: 1) Kegiatan Inventarisasi Perhitungan Lifting Migas dan DBH SDA Migas serta Realisasi Penyaluran DBH SDA Migas; 2) Sosialisasi Penggunaan LPG Tabung 3 Kg dan Kompor Gas; 3) Pengawasan Pengangkutan BBM Subsidi dan Non BBM (LPG) Subsidi serta Lindungan Lingkungan SPBU-SPPBE; 4) Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa

Penunjang Migas; 5) Kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirusahaan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Usaha Penunjang Migas Non Konstruksi.



Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Gambar 4.88 Realisasi DBH Migas di Provinsi Jambi (Dalam Milyar rupiah)

Saat ini tercatat sebanyak 22 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang ada di Provinsi Jambi. Dari 22 KKKS tersebut 12 KKKS masih dalam kegiatan Eksplorasi sedangkan 10 KKKS telah berproduksi.

Tabel 4.222
Lifting Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jambi

Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Jambi			
Tahun	Minyak Bumi (Barel)	Gas Bumi (BOE)	Total
2010	6.588.052	17.410.599	23.998.651
2011	6.403.411	16.001.213	22.404.624
2012	6.245.962	17.044.213	23.290.175
2013	5.705.833	16.731.991	22.437.824
2014	5.318.080	16.806.643	22.124.723
2015*	1.754.533	9.367.824	11.122.357

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Berdasarkan tabel di atas diketahui, bahwa data lifting minyak bumi maupun gas bumi, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan, sehingga tidak mengherankan bila dana bagi hasil migas yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi, juga mengalami penurunan.

c. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, antara lain: 1) Optimalisasi PNBP Kegiatan Pertambangan Minerba; 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara..Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 398.362.000,00 secara fisik terealisasi sebesar 100% dan secara keuangan terealisasi sebesar 97,09%.

Arah kebijakan dalam program ini adalah meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait di kab/kota dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) se Provinsi Jambi serta meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan (teknis, K3, lingkungan dan produksi) se Provinsi Jambi selain itu juga melaksanakan pengawasan terhadap jumlah setoran PNBP Pertambangan di Provinsi Jambi. Berdasarkan Hasil rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per Nopember 2015 IUP yang dinyatakan *Clean and Clear* sebanyak 159 IUP dari total 196 IUP.

Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Landrent dan royalti dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Perkembangan PPNB Bidang

Pertambangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 4.223
Perkembangan PPNB Provinsi Jambi dari tahun 2011s/d 2015

TAHUN	LANDRENT (Rp)	ROYALTI (Rp)	TOTAL (Rp)
2011	6.624.870.897	72.800.086.703	79.424.957.600
2012	13.911.967.978	75.904.540.173	89.816.508.151
2013	7.375.299.644	65.339.135.029	72.714.434.673
2014	10.262.610.504	50.761.328.971	61.023.939.475
2015*	6.263.802.833	71.853.123.566	78.116.926.399

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Kondisi bulan Oktober Tahun 2015 Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi sebanyak 80 dalam tahap Ekplorasi dan 116 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Produksi Batubara di Provinsi Jambi dihasilkan oleh Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi. Sedangkan untuk Bijih Besi di Provinsi Jambi di Produksi oleh PT. Sitasa Energi yang terletak di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Produksi Bijih Besi tahun 2013 mencapai 148.657 ton, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 30.003 ton.

d. Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang Berwawasan Lingkungan

Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 1.688.881.150,00 secara fisik terealisasi 100,00% dan secara keuangan terealisasi sebesar 92,90%. terdiri dari 12 Kegiatan, antara lain:1) Identifikasi Potensi Daerah Rawan Bencana Geologi; 2) Penyelidikan Pendahuluan Mineral Logam, Non Logam dan Batuan; 3) Kegiatan Inventarisasi Wilayah Kerja dan Pengembangan Sumur Produksi Minyak Bumi; 4) Kegiatan Rakornis ESDM se- Provinsi Jambi; 5) Penyusunan Buku dan Leaflet Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi; 6) Inventarisasi Aset; 7) Percepatan Geopark Nasional Merangin Jambi; 8) Pengembangan Sistem Informasi Geografis; 9) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca (RAD GRK) Sektor Energi; 10) Inventarisasi Potensi Air Tanah dan Geologi Lingkungan; 11) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ESDM; 12) Pembuatan Neraca Sumber Daya Alam.

Arah kebijakan dalam program ini adalah mengembangkan dan memanfaatkan kegeologian dan pemanfaatan data dalam rangka revitalisasi potensi-potensi bahan galian dan panas bumi, dan mendata daerah rawan bencana kegeologian. Program ini difokuskan untuk mengetahui informasi geodiversity, bencana geologi dan informasi air tanah galian industri, mineral batubara, panas bumi serta mendeteksi bencana alam geologi di Provinsi Jambi dengan menginventarisir data kondisi dan lokasi bencana geologi, kawasan sumber daya warisan geologi, informasi air tanah untuk pemanfaatan dan pengelolaan air tanah.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, antara lain: 1) Study Kelayakan dan DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro; 2) Inventarisasi Desa Belum Berlistrik. Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 401.203.050 secara fisik terealisasi sebesar 100% dan secara keuangan terealisasi sebesar 94,71%.

Arah kebijakan dalam program ini adalah melakukan konsultasi teknis lifting migas dan perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas), mensosialisasikan pemanfaatan tabung LPG 3kg ke masyarakat, pengawasan pengangkutan BBM subsidi, LPG subsidi serta meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan serta pembinaan perusahaan jasa penunjang migas di Provinsi Jambi. Adapun data DBH Migas dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

f. Permasalahan Dan Solusi

1) Program Pengembangan Energi

- a) Permasalahan : yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pengembangan Energi yaitu: a) rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan mendekati angka target rasio elektrifikasi nasional; b) Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME dan bijih jarak; c) Belum optimalnya pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) terutama untuk

pemanfaatan langsung, tenaga surya, angin dan potensi air terjun sebagai sumber energi.

- b) Adapun solusinya yaitu: a) terus meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi dengan memanfaatkan potensi-potensi energi yang ada di Provinsi Jambi untuk dikembangkan menjadi energi listrik , b) Terus memanfaatkan potensi energi alternatif di Provinsi Jambi

2) Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu: a) Belum akuratnya data lifting antara daerah penghasil migas dan KKKS, b) Penerimaan daerah dalam bentuk DBH SDA Migas tergantung dari realisasi lifting migas, ICP dan Kurs Rupiah, c) Penetapan daerah penghasil dimana prognosa lifting migas daerah belum dilibatkan, d) Belum akuratnya data dan pemetaan wilayah kerja migas antara daerah dengan pemerintah, e) Belum terdata dengan baik perkembangan jumlah sumur oleh Kabupaten/kota penghasil migas, f) Keterbatasan kewenangan pasca diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana seluruh kewenangan pengelolaan Migas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Adapun solusinya yaitu: a) Mengikuti rapat rekonsiliasi realisasi lifting migas per triwulan di Ditjen Migas, b) Memonitoring realisasi penyaluran melalui sistem informasi transfer daerah di Ditjen Perimbangan Keuangan, c) Menyalurkan aspirasi pada saat rapat rekonsiliasi realisasi lifting dan realisasi prognosa lifting migas di Ditjen Migas, d) Konsultasi teknis ke Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas atas WKP Migas, e) Koordinasi dengan Kabupaten/kota penghasil migas atas akurat dan updating data jumlah sumur, f) Perlu diteruskannya pembangunan city gas kota Jambi hingga menyentuh seluruh masyarakat

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu: a) Keterbatasan anggaran dan tenaga teknis di Pemerintah Provinsi untuk mengawasi dan membina IUP di Kab/kota. Pasca diundangkannya

undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pemerintah Kab/kota tidak lagi melaksanakan pembinaan dan Pengawasan IUP. Adapun solusinya yaitu: a) Memperkuat Dinas ESDM Provinsi Jambi, baik dari segi pendanaan maupun kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, b) Memperkuat kegiatan optimalisasi PNB

4) Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang Berwawasan Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu: a) Keterbatasan dana untuk kegiatan identifikasi bencana geologi, keterbatasan dana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan pendahuluan mineral logam, non logam dan batuan, b) kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan dimaksud. Adapun solusinya yaitu memberikan dukungan baik sarana prasarana

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu: Keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan pra perencanaan sumber-sumber energi yang akan dimanfaatkan untuk sumber tenaga listrik baru serta keterbatasan dana untuk menyusun data desa atau wilayah dalam Provinsi Jambi yang belum dialiri listrik, Sedangkan solusinya yaitu memberikan dukungan baik pendanaan maupun sarana dan prasarana

4.2.4 Pariwisata

Dalam melaksanakan urusan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan
 - b) Kegiatan Pengembangan Sosialisasi dan penerapan serta Standarisasi.
2. Program Pengembangan Kemitraan
 - a) Kegiatan Pengembangan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

- b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata.
- 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - a) Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri.
 - b) Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah).
- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program ini adalah meningkatnya apresiasi nasional dan internasional terhadap kepariwisataan daerah. Anggaran yang disediakan adalah Rp. 1.678.242.000,- Adapun Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan.

Pencapaian dari kegiatan ini yaitu: a) Terlaksananya Objek Daya Tarik Wisata Berkelanjutan pada tanggal 17 November 2015 di Kabupaten Merangin dan 20 November 2015 di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci.dengan sasaran masyarakat lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemandu wisata, pemerintah desa dan stakeholder pariwisata. Kegiatan dilaksanakan dengan pola focus group discussion. b) Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah provinsi Jambi Tahun 2015-2025. c) Terlaksananya Sosialisasi Destination Management Organization (DMO) di Kabupaten Merangin pada tanggal 4 s.d 5 Oktober 2015 di Kabupaten Merangin diikuti 30 peserta perwakilan dari destinasi di Merangin yaitu rumah Tuo Rantau Panjang, pegawai pariwisata Kabupaten Merangin, Desa Air Batu, Desa Guguk, Desa Bedeng Rejo, Goa Tiangko, Jangkat, komunitas Gemmpa dan Hampa. d) Terlaksananya Pembuatan Profil Destinasi Berbasis Audio Visual di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi pada triwulan 2 tahun 2015. Informasi yang disediakan mencakup antara lain objek daya tarik wisata, budaya, keadaan alam, kuliner, akomodasi dan aksesibilitas. e) Terlaksananya Sosialisasi Visit and Sail Karimata di Desa Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 s.d. 30 November 2015 dengan sasaran masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat, pemerintah desa dan stakeholder pariwisata. f) Terlaksananya city tour dalam rangka pendukung event Batanghari Festival 2015 pada

tanggal 26 November 2015 diikuti tamu dari luar Provinsi Jambi, karyawan hotel, mahasiswa/pelajar, dosen/guru dan stakeholder pariwisata. Destinasi yang dikunjungi adalah Candi Muara Jambi dan desa wisata, Museum Siginjei, sanggar batik, Seberang Kota Jambi, Museum Gentala Arasy dan jembatan Titian Arasy. g) Terlaksananya Studi Komparasi Kelompok Penggerak Pariwisata pada tanggal 18 s.d. 21 September 2015 ke Sumatera Barat diikuti perwakilan pemerintah daerah kabupaten, pengelola destinasi, pengelola homestay dan souvenir dan pemandu wisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepariwisata yaitu Adanya hambatan administrasi yang membatasi jangka waktu dalam pelaksanaan kegiatan serta kurangnya jumlah SDM yang mampu terjun langsung membina masyarakat. Adapun solusinya yaitu adanya kebijakan kepala dinas dalam pendampingan tenaga ahli dan narasumber. Personil bidang bersangkutan pada Disbudpar Provinsi Jambi turut membina/mendampingi masyarakat/stakeholder pariwisata di kawasan destinasi.

Tabel 4.224

Perkembangan Sektor Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2013- 2015

No	INDIKATOR	CAPAIAN PADA TAHUN				KET
		2013	2014	2015	%	
1	2	4	5	5	6	7
I	WISATAWAN	(orang)	(orang)	(orang)		
a.	Mancanegara	9.919	10.056	10.776	6,68	
	Terdiri dari :					
	1. Singapura	1.475	1.475	1.578	6,98	
	2. Malaysia	1.740	1.752	1.805	3,03	
	3. Thailand	11	11	25	127,3	
	4. Philipina	44	44	50	13,64	
	5. Brunei	-	-	-	-	
	6. China	2.935	2.954	2.998	1,49	
	7. Taiwan	1.108	1.128	1.178	4,43	
	8. Jepang	881	881	866	-1,7	
	9. India	681	681	690	1,32	
	10. U S A	627	630	730	15,87	
	11. Australia	25	28	30	7,14	
	12. Eropa	249	295	670	127,1	
	13. Arab Saudi	64	64	-	-	
	14. Iran	13	13	-	-	
	15. Turki	9	9	-	-	
	16. Denmark	10	36	43	19,44	
	17. Korea	20	20	27	35	
	18. Jerman	27	35	86	145,7	
b.	Nusantara	1.434.130	1.520.000	2.447.660	61,03	
II.	H O T E L					
	- Bintang	29	29	25	-13,8	
	- Melati	139	139	150	7,91	
III.	Restoran / Rumah Makan	710	738	750	1,63	
IV.	Biro Perjalanan Wisata	77	77	84	9,09	

Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas, kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Jambi mengalami peningkatan sebesar 6.68%, dimana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 10.056 wisatawan dan meningkat sebanyak 10.776 wisatawan pada tahun 2015. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebesar 61,03%, dimana pada tahun

2014 tercatat sebanyak 1.520.000 wisatawan dan pada tahun 2015 bergerak naik menjadi 2.458.436 wisatawan.

Untuk industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran/rumah makan, serta biro perjalanan wisata juga mengalami pergerakan positif pada setiap tahunnya. Hal ini dirasa cukup menggembirakan karena industri pariwisata dapat berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

b. Program Pengembangan Kemitraan

Sasaran program ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata. Anggaran yang digunakan adalah Rp. 884.520.000,-. Adapun realisasi pelaksanaan program yaitu:

1) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kepariwisata.

Pencapaian dari kegiatan ini yaitu : a) Terlaksananya Pekan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona. Sasaran kegiatan adalah pemerintah daerah, stakeholders pariwisata, masyarakat dan kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri pariwisata, pokdarwis, komunitas penggerak pariwisata. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015 dengan rangkaian kegiatan sarasehan dan sosialisasi sadar wisata dan aksi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di area museum Gentala Arasy. b) Terlaksananya Best Practice Pengelolaan Homestay di Kabupaten Malang dan Provinsi Bali pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2015 diikuti peserta dari pengelola homestay dan kelompok Sadar Wisata. Peserta mempelajari manajemen pengelolaan homestay, kebersihan, tata ruang, pelayanan, keramahtamahan, menu makanan, kegiatan yang dilaksanakan, peraturan dan norma adat yang diberlakukan dll.

2) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.

Adapun pencapaian dari kegiatan ini yaitu: a) Telah terlaksana Sosialisasi Standarisasi Hotel pada tanggal 24 Maret 2015 dengan diikuti 60 orang. Sasaran kegiatan adalah unit manajemen hotel yang ada di kabupaten/kota Jambi, PHRI Kabupaten /Kota se- prov Jambi

dan dinas yang membidangi pariwisata. b) Telah terlaksana Pelatihan Profesi Pelayanan Usaha Jasa Pariwisata pada tanggal 22 s.d. 23 April 2015 diikuti 50 peserta terdiri dari unit manajemen hotel kabupaten/kota, pengelola homestay di Kabupaten Kerinci, pengelola taxi, karaoke dan pengelola restoran di Kota Jambi. c) Terlaksananya Sosialisasi Fasilitas Mitra Siaga Pariwisata di DTW Rawan Bencana pada tanggal 30 Mei 2015 di Kota Sungai Penuh diikuti 50 peserta terdiri dari pramuwisata Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, pemandu wisata binaan TNKS, d) Terlaksananya Sosialisasi Standar Usaha Restoran dan Rumah Makan pada tanggal 8 Desember 2015 diikuti 60 peserta terdiri dari pemilik/pengelola hotel, restoran dan rumah makan di Kota Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu: a) Masyarakat sekitar destinasi wisata belum sepenuhnya Sadar wisata dan menerapkan sapta pesona untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif sehingga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan. b) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi apresiasi masyarakat yang akan mengembangkan pariwisata di daerahnya sehingga informasi pengembangan pariwisata yang sampai ke masyarakat sangat terbatas.

Sedangkan solusinya yaitu: a) Menyelenggarakan kampanye sadar wisata dan Sapta Pesona perlu dilakukan secara kontinu dengan menggunakan pendekatan persuasif dan konstruktif dan perlu peningkatan kerjasama yang intensif antara pemerintah daerah dan aparat setempat serta unsur desa agar sapta pesona dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, b) Aparat desa perlu diikutsertakan dalam kegiatan *best practice* sehingga dapat mengambil kebijakan pengembangan pariwisata. Pengembangan desa wisata agar juga difokuskan dengan menggiatkan homestay dan fasilitas serta faktor pendukungnya sehingga dampak pariwisata dapat langsung dirasakan masyarakat.

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran program ini adalah meningkatkan efektifitas pemasaran pariwisata dengan anggaran Rp. 1.756.857.000,- Adapun realisasi dari kegiatan ini :

1) Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu: a) Terlaksananya Bulan Promosi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. b) Terlaksananya Pameran Budaya dan Pariwisata dalam bentuk Direct Promotion di Yogyakarta dengan mengambil lokasi di Jalan Malioboro. c) Terkirimnya duta wisata sebanyak 7 kali.

2) Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah).

Parameter keberhasilan dari kegiatan ini yaitu: a) Terlaksananya Gelar Promosi Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi 2015 pada tanggal 6 s.d.11 Januari 2015 di areal kantor gubernur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pameran budaya dan pariwisata, lomba lagu daerah Jambi kepala SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi, apresiasi gelar budaya Jambi yang dimeriahkan oleh 15 sanggar seni yang ada di Kota Jambi dan panggung hiburan rakyat dengan mendatangkan artis ibukota, b) Terlaksananya Famtrip Geopark Merangin Jambi 2015 pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2015. Diikuti 50 peserta terdiri dari media cetak dan elektronik, maskapai penerbangan, BPD Himpunan Pramuwisata Indonesia, biro perjalanan, Padmasana Foundation, komunitas pariwisata dan pelajar SMA. Destinasi utama yang dikunjungi adalah Kabupaten Merangin yaitu, Rumah Tuo Rantau Panjang, Pusat Informasi Geopark, zona inti geopark di Desa Air Batu dan sentra kuliner gelamai Perentak, c) Terlaksananya partisipasi pameran pada event Jambi Emas Expo 2015 di arena ex MTQ pada tanggal 8 s.d. 13 Juni 2015. Konsep pameran adalah kawasan wisata jembatan dan menara gentala Arasy. d) Terlaksananya pembuatan materi promosi berupa tourism map Jambi Province, leaflet geopark, rolling banner, booklet wisata Jambi, dan goody bag, e) Terlaksananya pendudukan pada Batanghari Festival 2015 berupa pembuatan panggung dan penyediaan stand pameran, lomba fotografi, lomba stand terbaik dan lomba penulisan artikel pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu a) Substansi materi yang akan dipromosikan (terutama terhadap objek dan daya tarik wisata yang menjadi prioritas) belum dapat dilakukan secara lebih baik, mengingat hal-hal yang dilakukan baik itu pembinaan

kelembagaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan penyiapan daerah tersebut sebagai odtw belum fokus dilakukan. Hal ini menyebabkan materi pameran yang akan dipromosikan juga belum focus, b) Paket-paket wisata dan perjalanan yang dijual pada biro-biro perjalanan belum banyak dan sebagian ada yang belum layak jual.

Sedangkan solusinya yaitu: a) Perlu penguatan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat di odtw prioritas sehingga odtw siap menerima wisatawan dan dapat dikemas serta dipromosikan. Biro-biro perjalanan perlu didorong agar membuat paket-paket wisata yang berkualitas. b) Diperlukan penetapan jadwal event yang pasti dalam setiap tahunnya sehingga event-event promosi pariwisata daerah dapat masuk dalam kalender event Kementerian Pariwisata. Ketetapan jadwal pelaksanaan agar mempertimbangkan faktor pendukung seperti cuaca dll sehingga dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota atau provinsi lain untuk berpartisipasi. c) Perlu adanya lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan event pariwisata, baik dari segi anggaran maupun pendudukan kegiatan sesuai tugas pokok masing-masing SKPD/instansi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, juga diperlukan sektor swasta yang bergerak dibidang pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata untuk mempromosikan daerah kepada konsumennya. d) Peningkatan promosi baik dari segi materi dan cakupannya dengan tidak meninggalkan ciri khas daerah.

4.2.5 Kelautan Dan Perikanan

Sejalan dengan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yaitu : terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan yang mempunyai daya saing komparatif dan kompetitif, maka pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar : Rp. 28.170.749.000,- pada APBD murni dan terjadi pengurangan sebesar Rp. 1.060.072.500,- pada APBD Perubahan, sehingga jumlah total anggaran pada tahun 2015 yakni Rp. 27.110.676.500,- yang terdiri dari 12 Program dengan realisasi keuangan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 26.090.987.533,- dengan persentase 96,24 %. Secara rinci realisasi keuangan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.225
Realisasi keuangan berdasarkan program tahun anggaran 2015

PROGRAM		Anggaran	REALISASI		
			KEU	%	FISIK (%)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.652.762.460	1.562.902.498	94,6	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.426.845.331	2.366.318.765	97,51	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur	112.000.000	111.440.000	99,5	100
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	174.384.500	152.135.208	87,2	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.321.099.101	1.188.330.550	90	98,77
6	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1.237.243.000	1.219.956.000	98,6	100
7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	760.607.200	754.186.000	99,2	100
8	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	506.904.000	488.479.900	96,4	100
9	Pengembangan budidaya perikanan	11.101.901.708	10.730.168.785	96,7	97,89
10	Pengembangan perikanan tangkap	2.310.449.200	2.232.355.580	96,6	98,8
11	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	3.208.121.000	2.999.129.887	93,5	97,7
12	Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan	2.298.361.000	2.285.584.360	99,4	100
JUMLAH		27.110.676.500	26.090.987.533	96,2	98,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran berdasarkan program sudah baik dan maksimal dengan persentase realisasi keuangan 96,24 %.

Program dan kegiatan dari masing-masing bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2015, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program dalam Bidang Sekretariat:

Program dalam bidang sekretariat memiliki 5 program dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015 yakni :1) program pelayanan administrasi perkantoran, 2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3) program peningkatan disiplin aparatur, 4) program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur dan 5) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dana keseluruhan yang dibutuhkan dalam 5 program ini sebesar Rp. 5.687.089.392,-.

Dari 5 Program yang dimiliki dalam bidang sekretariat, baik itu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur hingga program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dapat dilihat bahwa persentase realisasi keuangannya terbilang baik yaitu 94,62 %.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam:

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan sumber daya alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Dana dalam pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini sebesar Rp.1.237.243.000,-. Kegiatan yang mendukung program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yaitu: 1) Kesehatan lingkungan dan pengendalian hama penyakit, 2) Perlindungan dan konservasi/rehabilitasi sumber daya alam.

Pencapaian dari program ini yaitu tercapainya kondisi lingkungan habitat ikan yang sehat yang disertai dengan terkendalinya hama dan penyakit ikan, partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, serta bertambahnya populasi ikan sebagai hasil dari pemacuan stok ikan. Capaian program ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lubuk larangan dan reservat di tahun 2014 sebanyak 201 lokasi.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Gambar 4.89 Jumlah Suaka Perikanan dan Lubuk Larangan *Angka sementara Tahun 2015

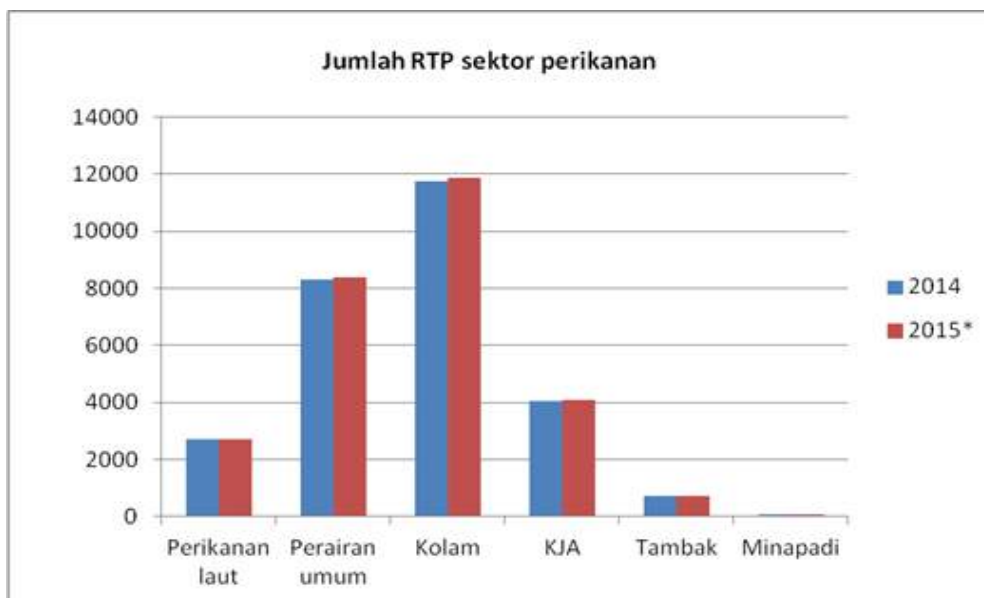
Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu semakin maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggungjawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi SDI, solusinya yaitu dengan meningkatkan upaya bersama dari pihak terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kelestarian alam.

c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir:

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sasaran dari program ini yaitu optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan di pesisir. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp. 760.607.200,-. Sedangkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yaitu: 1) Pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan 2) Pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT).

Output dari program/kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, melalui pertemuan penyempurnaan

penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan terlaksananya pelatihan masyarakat pesisir, tersedianya bantuan peralatan untuk peningkatan ekonomi produktif, serta pemilihan putra-putri bahari jambi. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Hal ini tergambar dengan bertambahnya prosentase masyarakat pesisir yang melakukan usaha budidaya ikan di tambak, dengan kenaikan mencapai 0,99 % dan nelayan perikanan laut dan perairan umum peningkatannya 1,00 %.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Gambar 4.90 Jumlah Sektor Perikanan *Angka sementara Tahun 2015

d. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut:

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Dana dalam pelaksanaan program ini Rp. 506.904.000,- dan kegiatan yang mendukung program peningkatan

kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan yaitu: Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan.

Pencapaian dari program ini yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati ikan melalui pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumber daya ikan, seperti penggunaan listrik, racun dan bahan peledak. Capaian dari program ini dapat dilihat dari jumlah pelanggaran (kasus) yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 30 kasus.

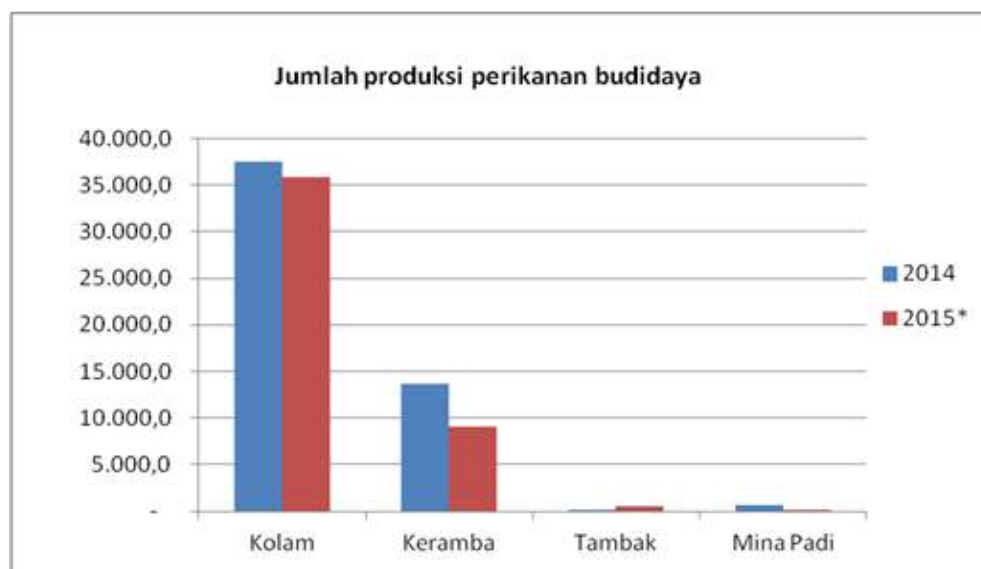
Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dari sektor budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menuju industrialisasi perikanan budidaya. Sasaran program ini yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup pembudidaya. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp. 11.101.901.708,-. Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu: 1) Pengembangan pembenihan ikan komersil, 2) Pengembangan ikan hias, 3) Pengembangan UPTD BBIS Kerinci, 4). Pengembangan proksimas semah, 5). Pengembangan budidaya air payau, 6) Pengembangan minapolitan perikanan budidaya, dan 7) Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi..

Output dari kegiatan ini yaitu: 1)Terlaksananya pengembangan pembenihan ikan komersil melalui pengembangan sarana dan prasarana di

instalasi perbenihan Provinsi Jambi, 2) Tersedianya calon induk ikan hias jambi dan calon induk arwana jambi serta terlaksananya temu teknis perbenihan ikan hias, 3) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di UPTD BBIS Kerinci melalui peningkatan sarana dan prasarana, Tersedianya bantuan benih, calon induk ikan mas dan nila untuk UPR, serta Terlaksananya forum koordinasi BBI dan workshop temu teknis perbenihan ikan air tawar, 4) Tersedianya bantuan benih/calon induk ikan lokal perairan umum (semah, medik, dll), terlaksananya workshop pengembangan semah, serta tersedianya rehab dan pembangunan sarana semah, 5) Terlaksananya pelatihan budidaya air payau dan tersedianya nener bandeng gelondongan, 6) Terlaksananya pengembangan minapolitan budidaya melalui bantuan pakan, benih, dan obat-obatan untuk kawasan minapolitan 3 kabupaten/kota dan pengembangan sarana prasarana minapolitan budidaya, dan 7) Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan di sentra-sentra produksi serta tersedianya bantuan kolam terpal, pakan, induk dan benih ikan untuk peningkatan produksi di sentra-sentra produksi.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Gambar 4.91 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya *Angka sementara Tahun 2015

Dari gambar tersebut terlihat bahwa kenaikan produksi tertinggi pada budidaya tambak sebesar 1.535,69%. Hal ini dikarenakan pada usaha

budidaya keramba telah selesai panen sebelum terjadinya kemarau panjang dan kabut asap di Provinsi Jambi. Sedangkan pada jenis usaha budidaya yang lain mengalami penurunan yang terlihat pada usaha budidaya mina padi sebesar 97,18%, disusul dengan produksi budidaya keramba sebesar 33,6%. Penurunan ini diakibatkan adanya kemarau panjang dan kabut asap yang melanda Provinsi Jambi, sehingga banyak lahan pembudidaya mengalami kekeringan dan kualitas air yang menurun.

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khusus kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA). Disamping itu besarnya pengaruh musim kemarau panjang dan kabut asap terhadap kualitas air. Solusinya adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi.

f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan khususnya dibidang penangkapan ikan. Sasarannya adalah meningkatnya nilai tambah hasil penangkapan serta pendapatan nelayan. Adapun kegiatan yang mendukung program pengembangan perikanan tangkap yaitu: 1) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), 2) Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap, 3) Pembangunan kapal perikanan tangkap >10GT dan 4) Optimalisasi Perikanan Tangkap. Dana pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu : Rp. 2.310.449.200,-.

Output dari program ini yaitu tercapainya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas/keperluan bagi nelayan untuk melaut. Hal ini tergambarkan peningkatan produksi perikanan tangkap, dimana jumlah keseluruhannya mengalami penurunan dari 55.233,2 ton pada tahun 2014 turun menjadi 45.435,6 ton pada tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 8,30 %. Penurunan ini dikarenakan kondisi cuaca, dimana terjadi kemarau panjang, kebakaran lahan dan kabut asap yang pekat, sehingga

mempengaruhi jarak pandang yang secara langsung mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan dilaut dan perairan umum.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Gambar 4.92 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap * Angka sementara Tahun 2015

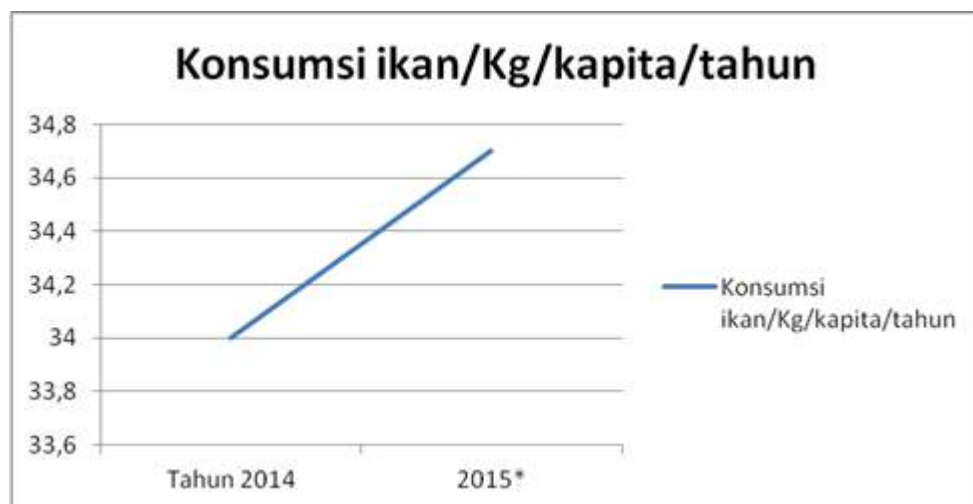
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Disamping itu besarnya pengaruh kabut asap terhadap aktivitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum karena mempengaruhi jarak pandang. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas.

g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan produk hasil perikanan sehingga mempunyai nilai jual serta meningkatkan dukungan pengembangan usaha pengolahan dalam aspek kualitas dan kuantitas dari unit-unit pengolahan dan pemasaran. Adapun sasaran dari program ini yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dari produksi yang berbasis lokal. Total dana yang dibutuhkan untuk mendukung program ini yaitu: Rp. 3.208.121.000,- dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Promosi dan Publikasi kegiatan sektor perikanan, 2) Bina mutu, usaha dan investasi hasil

perikanan, 3) Pengembangan sistem informasi pasar, 4) Pengembangan unit pengolahan ikan, dan 5) Industrialisasi patin.

Output dari Program ini yaitu: 1) Terpublikasikannya kegiatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pameran, kampanye GEMARIKAN, lomba masak dan bazaar ramadhan, 2) Terciptanya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan khususnya memonitor kesegaran ikan, residu, dan bahan berbahaya serta terciptanya peluang kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan usaha hasil perikanan, 3) Tersedianya data informasi pasar guna meningkatnya kelancaran distribusi pemasaran hasil perikanan, 4) Terlaksananya bimtek pengolahan hasil perikanan dan bantuan peralatan pengembangan produk olahan ikan, dan 5) terlaksananya pengembangan industrialisasi patin. Capaian program ini dapat dilihat dari perkembangan konsumsi ikan perkapita sebesar 34,70 kg/kap/tahun.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Gambar 4.93 Konsumsi Ikan/kg/Kapita/tahun * Angka sementara Tahun 2015

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta) dan masih kurangnya dukungan lintas sektor untuk pembangunan industri pengolahan terpadu sehingga menyulitkan bagi para pedagang, untuk memenuhi permintaan pasar. Solusinya yaitu menempuh upaya

penguatan akses permodalan melalui MoU dengan bank Indonesia, pembentukan LKM dan mendorong petani untuk menggunakan skim kredit, KUR dan KKPE.

h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Nelayan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha perikanan ditingkat pembudidaya ikan dan nelayan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sasaran program ini yaitu meningkatnya pendapatan pembudidaya dan nelayan skala kecil. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu: Rp. 2.298.361.000,-. Adapun Kegiatan yang mendukung program pengembangan kesejahteraan petani yaitu: 1) Pengembangan kolam pekarangan masyarakat / Pemberdayaan wanita tani, 2) Pemberdayaan desa mandiri pangan. 3) Restocking ikan di perairan umum.

Output dari Program ini yaitu: 1) Terlaksananya pelatihan wanita tani dan tersedianya paket bantuan untuk wanita tani dan pemuda kreatif (berupa bantuan kolam terpal, benih ikan, dan pakan ikan), 2) Terwujudnya bantuan benih dan pakan ikan di Desa Mandiri Pangan dan di Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan 3) Terlaksananya penebaran benih ikan untuk tujuan restocking (pengkayaan SDI) di beberapa kabupaten/kota dan kota terpadu mandiri (KTM). Sedangkan capaian dari Program ini yaitu bertambahnya pendapatan dari pelaku usaha perikanan.

4.2.6 Perindustrian dan Perdagangan

Pagu anggaran belanja langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 berjumlah sebesar Rp. Rp. 10.637.764.000,- dengan rincian Rp. 4.185.318.860,- untuk urusan rutin dan Rp. 6.452.445.140,- untuk urusan pilihan. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2014, pagu anggaran tahun 2015 turun sekitar 10,67 % atau Rp. 1.135.442.500,- dari alokasi dana sebesar Rp 11.773.216.500,-). Sedangkan sisa anggaran tahun 2015 sebesar Rp.652.111.336.000,- atau 6,13 %. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 baru mencapai sebesar Rp.9.985.652.664.,- atau 93,87 %.

Pada tahun 2015 ini program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 12 (dua belas) Program dan 60 (enam puluh) Kegiatan yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan rincian yaitu 5 (lima) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 7 (tujuh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi. Adapun program dan kegiatan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran. Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.1.180.832.740,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.139.554.780,- (96,50%) dan sisa anggaran sebesar Rp.41.277.960,- (3,50 %). Adapun hasil dari program ini adalah terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan/hak konsumen. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan telah mencapai 100 %.

Melalui Program ini dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan barang Beredar serta Jasa. Ruang lingkup kegiatan yang diawasi mencakup pengawasan pemenuhan standar mutu produk-produk barang beredar yang sudah diberlakukan SNI wajib terutama asal impor. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : telah dilaksanakan pengawasan terhadap 6 produk barang antara lain Barang ber SNI (mainan anak, pupuk tripel super phosphate, kabel), Bahan berbahaya, pupuk bersubsidi dan gula Kristal rafinasi (GKR).

- 2) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur lembaga laboratorium UPTD Kemetrolagian bertujuan agar terwujudnya kelembagaan UPTD Balai Pelayanan Kemetrolagian yang mempunyai dasar hukum yang formal dengan memenuhi NPSK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
- Telah dilaksanakan surveilient dari Subdit Kelembagaan dan Penilaian Direktorat Metrologi Ditjen SPK pada tanggal 2-4 Maret 2015 di UPTD Balai Pelayanan Kemetrolagian.
 - Sesuai target pengadaan alat Lab. UPTD Metrologi sebanyak 6 unit yaitu 2 unit termometer, 1 unit pompa rendam dan 3 unit kotak alat.
- 3) Kegiatan Dukungan dan fasilitasi Pasar Murah bertujuan untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan mengantisipasi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
- Kegiatan pasar murah ini telah dilaksanakan di 5 Kab dan 1 Kota sebanyak 10.257 paket dan ini telah melebihi target sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RENJA sebanyak 9.000 paket. Adapun rincian penjualan paket tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.226
Realisasi Pelaksanaan Pasar Murah Tahun 2015

No.	Lokasi Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Paket
1.	Kab. Sarolangun	22 – 23 Juni 2015	1.200
2.	Kota Jambi	29 – 30 Juni 2015 2, 4, 8 Juli 2015	4.257
3.	Kab. Tebo	2 – 3 Juli 2015	1.200
4.	Kab. Muaro Jambi	6 – 7 Juli 2015	1.200
5.	Kab. Tanjab Barat	9 – 10 Juli 2015	1.200
6.	Kab. Merangin	24 – 25 Juli 2015	1.200
	T O T A L		10.257

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

- b) Paket yang dijual yaitu berisikan minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg dengan harga 1 paket Rp. 24.700,- disubsidi Rp. 11.700,- sehingga harga jual hanya Rp. 13.000,-.
- 4) Kegiatan Kalibrasi dan verifikasi peralatan standar labor kemetrollogian bertujuan agar perawatan dan pemeliharaan standar ukuran, peralatan standar dan peralatan pendukung lainnya. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : telah dilaksanakan Kalibrasi dan Verifikasi di Lab. Kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran di Direktorat Metrologi Ditjen SPK pada tanggal 19 sd. 20 Nopember 2015.
- 5) Kegiatan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrollogian bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan bagi para pemilik alat ukur untuk menera ulang ukur, meningkatkan kualitas alat ukur milik masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan kebenaran ukuran dan perlindungan konsumen. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
- a) Telah dilaksanakan kegiatan tera ulang terhadap UTTP di 9 Kab dan Kota dengan hasil yaitu telah ditera ulang sebanyak 7.222 unit UTTP dari 1.993 pemilik dengan penerimaan retribusi tera hanya sebesar Rp. 308.260.000,- (84,92%) dari target sebesar Rp. 363.000.000,-
- b) Telah dilaksanak Survey indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan tera ulang UTTP dengan skor 73,66 (baik) katagori B dengan jumlah responden sebanyak 238 orang dari target semula sebanyak 150 orang.
- 6) Kegiatan pengawasan UTTP dan BDKT bertujuan untuk Memberikan pemahaman dan pengertian kepada pemilik/pemakai alat UTTP serta pelaku usaha BDKT akan tanggung jawab dan kewajibannya dan Memberikan sodk terapi melalui tindakan preventiv maupun represif terhadap pelaku tindak pinada pelanggaran UUML. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
- a) Telah dilaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT di 4 Kab dan 1 Kota, dengan objek Pasar Tradisional, Agen, Distributor dan pompa ukur BBM di SPBU;

- b) Telah dikontrol sebanyak 957 UTTP dari 907 wajib tera ulang dengan pelanggaran sebanyak 421 unit UTTP dari 376 pemilik, kepada pemilik diberi peringatan agar segera menera ulang alat UTTP nya.
- 7) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen bertujuan agar peserta sosialisasi dan bimtek mengetahui kebijakan kemetrolagian dan Perlindungan konsumen. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a) Telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan bertempat di Dekranasda Provinsi Jambi pada tanggal 11 Juni 2015 dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari Aparat Instansi Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, Pedagang Jasa (Hotel, Lising, Dealer), pedagang pengecer/retail/ distributor dan konsumen akhir..
 - b) Telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian bertempat di Ruang MeetingHotel Duta Pasar Kota Jambi pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari Guru dan siswa Tingkat SLTA (SMU dan SMA) Kota Jambi.

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor. Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.2.278.460.900,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.168.038.592,- (9515%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 110.422.308,- (4,85 %). Adapun hasil dari program ini adalah meningkatnya unit usaha, produk IKM dan meluasnya diversifikasi jenis produk. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah telah mencapai 100 %. Melalui Program ini dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan diantaranya yaitu:

Tabel 4.227

Rincian Kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

No	Nama Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan	Target	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perajin IK Makanan dalam mengolah pangan	3 kali	Kab. Tanjab Barat (Kec. Pengabuan)	19-22 Mei	25 peserta
				Kab. Merangin (Kec.Lembah Masurai)	20 – 23 Mei	25 peserta
				Kab, Sarolangun (Kec. Batang Asai)	19 -22 Agt	25 peserta
2.	Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi	Membantu perajin agar dapat memasarkan hasil Industri Kecil yang dibuat atau di produksi serta memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang hasil produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	11 kali	Telanaipura Expo	6 – 10 Januari	5 IKM
				Pameran IFFINA JKt	13 – 15 Maret	3 IKM
				Pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2015 Jakarta	8-12 April	2 IKM
				Malam Promosi Jambi 2015 TMII Jakarta	16 – 18 April	2 IKM
				BBGRM XI dan HKG PKK ke 43 Tingkat Nasional Manado	25-28 Mei	2 IKM
				Pekan Raya Jakarta	1 Juni – 1 Juli	5 IKM
				HUT Dekranas ke 35 Jakarta	2 – 5 Juni	
				Jambi Emas Expo Jambi	8 – 13 Juni	5 IKM
				MTQ Tingkat Provinsi Kab. Tebo	12 – 17 Okt	5 IKM
				MTQ Tingkat Kota Jambi	4 – 8 Nop	2 IKM
				INDOCRAFT 2015 Jakarta	19 – 22 Nop	4 IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Dari beberapa event/pameran yang telah diikuti sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berkerjasama dengan Dekranas Provinsi Jambi telah memperoleh penghargaan dalam Event Pameran HUT DEKRANAS ke 35 Tahun 2015 telah meraih Juara 1 Stand Terbaik Tingkat Nasional.

Tabel 4.228

Event yang telah diikuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No	Nama Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan	Target	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
3.	Pengembangan Rumah Tenun Jambi	meningkatkan pengetahuan dan mencetak perajin baru	2 kali	Provinsi Jambi	1 tahun	288 prajin
				Tasikmalaya	23 – 28 Okt	5 perajin
4.	Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di Kota Mandiri Terpadu	Peningkatan pengetahuan dan wawasan warga Kota Mandiri Terpadu	1 kali	Kab. Bungo (Kec. Dusun Rantau Pandan)	12 – 18 Okt	20 peserta
5	Pengembangan dan peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan pengetahuan dan wawasan	4 kali	Kab. Tanjabbar (Desa Purwodadi)	3 – 6 Maret	25 peserta
				Kab. Bungo	24 – 27 Maret	25 peserta
				Kab. Tanjabtim (Ds. Rantau Makmur)	1 – 4 Sept	25 peserta
				Kab. Merangin (Desa Baru)	2 – 5 Sept	25 peserta

No	Nama Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan	Target	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
6.	Pelatihan pengembangan desain batik tulis, pewarna batik dan pembuatan canting batik	Peningkatan pengetahuan SDM IK Batik	1kali	Provinsi Jambi (Rumah Tenun)	28 Juli – 1 Agt	25 peserta
7.	Pelatihan dan Bantuan Mesin Peralatan Pembuatan Spare Part Kendaraan Bermotor Roda Dua dari Karet	Menambah pengetahuan para calon perajin dan perajin jasa service kendaraan bermotor roda dua (bengkel motor) dalam hal pembuatan spare part (komponen) kendaraan roda dua yang berasal dari karet	1kali	Kab. Bungo	18 – 22 Maret	15 peserta
8.	Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon	Peningkatan terhadap penerapan SNI dan teknis produksi AMDK dan Kompon sehingga	11 kali	Lingga harapan (Citra) Kota Jambi	1 – 30 Juni	11 perusahaan

No	Nama Kegiatan	Tujuan Pelaksanaan	Target	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
		produksi yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan		Lingga Harapan (Arthes) Kota Jambi		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2015

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi negara. Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.344.270.000,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 324.820.000,- (94,35%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.450.000 (5,65 %). Adapun hasil dari program ini adalah terwujudnya ekspor non migas sehingga meningkatkan volume dan nilai ekspor. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor telah mencapai 100 %.

Melalui Program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah bertujuan meningkatkan kinerja ekspor daerah (non migas) dan mencari solusi terhadap permasalahan yang menyangkut ekspor terutama transportasi dan sarana pelabuhan. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu: telah dilaksanakan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah sebanyak 5 kali pada tanggal 16 Maret, 9 Juni, 2 September dan 19 September, 13 Oktober 2015 bertempat di Aula Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan peserta sebanyak masing-masing 75 orang yang berasal dari Instansi pemerintah terkait, perusahaan pelaku ekspor, Dinas Perindag Kab/Kota, Asosiasi dan KADIN.
- 2) Kegiatan Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat dibidang ekspor. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 1 kali di Hotel Golden Harvest pada tanggal 16 – 18 Desember 2015 dengan peserta 30 orang.

d. Program Penataan Struktur Industri

Program ini bertujuan mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu. Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.205.383.000,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 178.820.500,- (87,07 %) dan sisa anggaran sebesar Rp.26.562.500,- (12,97 %). Adapun hasil dari program ini adalah terciptanya dukungan peningkatan unilitas kapasitas produksi termasuk pemberdayaan sumberdaya industri dan perdagangan.Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari Program Penataan Struktur Industri telah mencapai 100 %.Melalui Program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan barang jadi dari lateks (bantal,busa, mainan anak-anak, souvenir). Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a) Telah diberikan bantuan mesin dan pembuatan lateks cair sebanyak 2 unit antara lain berupa peralatan pembuatan lateks cair dan alat cetak souvenir.
 - b) Telah dilaksanakan Pelatihan Barang Jadi Dari lateks di desa Muhajirin Kab. Muaro Jambi pada tanggal 22-24 Nop 2015 dengan jumlah peserta 15 orang.
- 2) Kegiatan Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut (bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengrajin industri sparepack kendaraan roda 2. Realisasi fisik sampai dengan 31 Desember 2015 telah mencapai 100%. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitutelah dilaksanakan pelatihan operator vulkanisir ban pada tanggal 23-27 September 2015 di kab. Sarolangun dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.

e. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi industri. Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.409.472.500,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 397.351.200,- (97,04 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.121.300,- (2,96 %). Adapun hasil dari

program ini adalah Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi IKMB. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari Program ini baru mencapai 100%. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : Pelatihan Teknis Pengembangan Barang Jadi dari karet dengan peserta sebanyak 15 orang yang berasal dari Kab. Muaro Jambi dan Sarolangun.

f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp.814.400.000,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 727.766.600,- (89,36 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 86.633.400,- (11,64 %). Adapun hasil dari program ini adalah stabilitas harga, memperpendek tata niaga karet, mengurangi biaya pemasaran serta promosi penggunaan produksi dalam negeri. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri telah mencapai 100 %. Melalui Program ini dilaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet bertujuan untuk mewujudkan stabilitas harga karet. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu
 - a) Telah diberikan bantuan Deorab kepada kelompok tani yang aktif di Pasar Lelang Karet di 6 Kab (Muaro Jambi, Sarolangun, Batanghari, Bungo, Tanjab Barat dan Merangin masing-masing 69 liter dan pemberian timbangan sertimal dengan uuran 500 kg sebanyak 4 unit.
 - b) Telah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan larutan pembeku karet (Deorub) pada petani di 6 Kab tersebut dengan peserta masing-masing 40 orang .
- 2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal bertujuan untuk meningkatkan usaha dagang kecil. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : telah dilaksanakannya Sosialisasi Kiat

Pengembangan Usaha sebanyak 4 kali yang diselenggarakan di Hotel Nusa Wijaya 2 kali dan di Dolen 2 kali dengan peserta sebanyak 200 orang (@ 50 orang setiap sosialisasi).

- 3) Kegiatan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu telah diikutinya event promosi antara lain :

Tabel 4.229
Pelaksanaan Even Tahun 2015

No.	Event/Pameran	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	IKM/Pelaku Usaha/UKM yang difasilitasi
1.	Pameran Jambi Emas Expo	1 s/d 5 Juni 2015	Lap. Menteng Jakarta	2 pelaku usaha
2.	Gebyar Griya dan Wisata Nusantara Expo 2015	3 s/d 6 Desember 2015	Galery Mall Yogyakarta	2 pelaku usaha

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

- 4) Kegiatan Inventarisasi / Pendataan Sarana Perdagangan bertujuan menginventarisasi dan mendata sarana perdagangan di 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :

Tabel 4.230
Data Pasar Tradisional di Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PASAR (UNIT)	JUMLAH PEDAGANG (ORANG)	JUMLAH KECAMATAN
1.	KOTA JAMBI	33	8.862	8
2.	KAB. BATANGHARI	38	8.784	7
3.	KAB. MUARO JAMBI	23	5.682	9
4.	KAB. TEBO	38	10.988	12
5.	KAB. BUNGO	46	5.849	17
6.	KAB. SAROLANGUN	27	14.237	12
7.	KAB. MERANGIN	49	6.983	12
8.	KAB. TANJAB BARAT	68	4.831	4
9.	KAB. TANJAB TIMUR	82	5.031	11
10.	KAB. KERINCI	36	10.841	13
11.	KOTA SUNGAI PENUH	72	3.015	1
	T O T A L	512	85.357	106

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2015

g. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masukan dari kegiatan ini adalah dana sebesar Rp. 1.219.626.000,-. Capaian realisasi penyerapan keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.075.632.300,- (88,19 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 143.993.700,- (11,91 %). Adapun hasil dari program ini adalah meningkatnya komoditas yang diuji dan penerimaan PAD. Sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi fisik dari Pengembangan Standarisasi

Nasional telah mencapai 100 %. Melalui Program ini dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi bertujuan untuk operasional kegiatan Laboratorium UPTD BPSMB. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a) Telah terkalibrasinya alat-alat standar lab sebanyak 20 unit PMB Jakarta.
 - b) Terpeliharanya peralatan lab sebanyak 5 unit.
- 2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran bertujuan untuk mengurangi peredaran barang non ber SNI di pasaran. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : telah dilaksanakan pengujian sampel produk di 8 Kab/Kota kecuali Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Batanghari. Adapun sampel yang diuji yaitu pupuk 5 jenis, minyak goreng, AMDK, garam beryodium.
- 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Ekspor dan Impor bertujuan untuk Peningkatan pelayanan pengujian Laboratorium UPTD BPSMB. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a) Telah dilakukan surveilen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada bulan Mei dan Agustus 2015.
 - b) Telah dilakukan uji profisiensi untuk komoditi CPO, pupuk dan garam beryodium.
- 4) Kegiatan Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah Terakreditasi bertujuan untuk Peningkatan akreditasi dan kepercayaan pelanggan dan peningkatan PAD. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - a) Telah dilaksanakan Sosialisasi Lab. Kalibrasi di 10 Kab/Kota kecuali Kota Sungai Penuh.
 - b) Telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat kepada pelanggan lab UPTD BPSMB sebanyak 53 responden.
- 5) Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium bertujuan agar tersedianya peralatan dan bahan penunjang yang sesuai dengan kebutuhan lab. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu :

- a) Telah dipenuhinya kebutuhan bahan-bahan kimia keperluan pengujian pada lab sebanyak 25 Unit.
 - b) Telah dipenuhinya kebutuhan penambahan peralatan untuk keperluan pengujian pada lab kalibrasi dan lab. Pengujian sebanyak 41 Unit.
 - c) Perawatan dan pemeliharaan alat lab sebanyak 12 unit.
- 6) Kegiatan Peningkatan SDM petugas kalibrasi BPSMB bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan SDM Lab kalibrasi dan penguji mutu barang BPSMB. Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu : Telah mengirimkan pegawai mengikuti diklat teknis dan manajemen pengelolaan lab. Sebanyak 10 orang.

4.2.6.1 Industri

Sampai Triwulan III Tahun 2015, sektor Industri Pengolahan berdasarkan harga berlaku merupakan penyumbang ke 3 terhadap perekonomian Provinsi Jambi (PDRB) yaitu sebesar Rp. 4.530,4,- atau 11,2 %, sedangkan penyumbang pertama yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 11.249,4,- atau 27,7 % diikuti sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 3.615.169,- atau 16,8 % dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 4.390,8,- atau 10,8 %. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.231
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku
dan Konstan Triwulan III Tahun 2015

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan
		Triw. III 2015	Triw. III 2015
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.249,40	8.485,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.836,40	7.704,00
3.	Industri Pengolahan	4.530,40	3.438,30
4.	Pengadaan Listrik dan gas	18,1	14,2
5.	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	62,7	43,1
6.	Konstruksi	2.976,90	2.284,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.390,80	3.073,10
8.	Penyediaan Transportasi dan Pergudangan	1.434,20	989,7
9.	Penyediaan Akomodasi dan makanan dan minuman	486,4	336,4
10.	Informasi dan Komunikasi	1.373,80	1.109,40
11.	Jasa-keuangan dan asuransi	1.012,50	709,6
12.	Real Estate	615	452,3
13.	Jasa perusahaan	457,4	328,2
14.	Administrasi pemerintah, pertahanan Jaminan sosial wajib	2.137,30	1.069,70
15.	Jasa pendidikan	.122,4	1.011,30
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	534,4	358,9
17.	Jasa lainnya	378,8	319,4
	PDRB	40.616,90	31.727,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2015

a. Industri Kecil

Program pembinaan terhadap industri dilakukan baik terhadap industri besar, menengah maupun kecil. Untuk program pembinaan industri besar Pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator karena industri besar telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Sedangkan program prioritas dari sektor industri adalah industri kecil kerajinan yang masih

memiliki kelemahan dan perlu dibina secara berkelanjutan. Pembinaan terhadap industri kecil difokuskan pada kegiatan keterampilan SDM, peningkatan produksi, pemanfaatan SDA, penerapan teknologi yang tepat guna, bantuan peralatan, permodalan, perbaikan kemasan, pengembangan potensi pasar dan pengembangan kewirausahaan.

Jumlah usaha Industri Kecil (IK), Penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK), Nilai Investasi dan nilai produksi yang terserap pada usaha Industri Kecil di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2015 diperkirakan hanya mengalami kenaikan sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.232
Perkembangan Industri Kecil di Provinsi Jambi, Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp. 000)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Produksi (Rp.000)
2010	17.800	54.967.075	48.400	192.865.650
2011	25.186	56.809.418	49.884	201.017.841
2012	25.930	59.676.000	52.977	206.902.000
2013	26.646	62.070.000	55.965	219.060.000
2014	27.165	65.467.000	59.098	246.985.000
2015	27.871	69.357.897	64.469	277.195.013

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

b. Perkembangan Industri Menengah dan Besar (IMB)

Jumlah usaha IMB, Penyerapan tenaga kerja usaha IMB dan Nilai Investasi yang terserap pada usaha IMB di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2011, namun untuk nilai produksi berdasarkan estimasi mengalami penurunan hal ini berkaitan dengan penurunan ekspor. Perkembangan Industri Menengah dan Besar di Provinsi Jambi Tahun dapat dilihat pada Tabel .

Tabel 4.233
Perkembangan Industri Menengah dan Besar di Provinsi Jambi,
Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp. 000)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Produksi (Rp.000)
2010	86	6.897.161.546	26.284	2.827.860.380
2011	110	7.330.365.857	37.598	3.110.655.218
2012	180	14.370.612.339	43.000	3.477.256.711
2013	187	14.990.700.000	45.958	3.652.000.000
2014	204	15.904.533.000	46.901	3.670.015.000
2015	204	15.904.533.000	46.901	3.670.015.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

4.2.6.2 Perdagangan

Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian Provinsi Jambi baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya peran sector perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sector perdagangan, hotel dan restoran.

Secara kualitas, semakin pentingnya sector perdagangan terlihat dari kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendorong sector industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dll. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kontribusi sektor perdagangan.

a. Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah unit usaha perdagangan di Provinsi Jambi pada akhir tahun 2015 sebanyak 85.357 unit usaha, jika dibandingkan pada tahun 2014 sejumlah 80.012 unit usaha, berarti mengalami kenaikan sejumlah 5.345 unit usaha atau 6,68 %. Perkembangan usaha perdagangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.234
Perkembangan Usaha Perdagangan di Provinsi Jambi, Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Pedagang Kecil (PK)	Pedagang Menengah (PM)	Pedagang Besar (PB)	Jumlah
1.	2010	21.817	3.927	1.328	25.650
2.	2011	26.489	4.572	1.488	32.549
3.	2012	45.403	6.452	1.987	53.842
4.	2013	47.641	7.781	2.093	57.012
5.	2014	69.510	8.121	2.381	80.012
6.	2015	73.875	8.895	2.587	85.357

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Sedangkan jumlah penerbitan SIUP pada akhir tahun 2015 sebanyak 8.630 buah, jika dibandingkan pada tahun 2014 sejumlah 8.182 buah, berarti mengalami kenaikan sejumlah 448 buah atau 5,48 %. Perkembangan usaha perdagangan berdasarkan penerbitan SIUP mengalami peningkatan . Adapun perkembangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Provinsi Jambi dimaksud sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.235
Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Provinsi Jambi

No.	Tahun	SIUP				Jumlah
		Pedagang Kecil (PK)	Mikro	Pedagang Menengah (PM)	Pedagang Besar (PB)	
1.	2010	2.996	163	652	229	4.040
2.	2011	4.672	482	645	160	5.959
3.	2012	5.488	87	750	163	6.488
4.	2013	6.325	204	776	134	7.439
5.	2014	7.056	148	771	267	8.182
6.	2015	7.437	288	735	170	8.630

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Demikian juga dengan perkembangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), jumlah penerbitan TDP pada akhir tahun 2015 adalah sebanyak 8.820 buah, jika dibandingkan pada tahun 2014 sejumlah 7.485

buah, berarti mengalami kenaikan sejumlah 1.335 buah atau 17,84 %. Kondisi perkembangan penerbitan TDP di Provinsi Jambi dapat juga dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.236
Perkembangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di
Provinsi Jambi Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)						Jumlah
		PT	Koperasi	CV	Firma	PO	BUL	
1.	2010	493	123	1.324	43	2.751	83	4.820
2.	2011	709	179	1.499	0	3.683	91	6.161
3.	2012	760	225	1.615	1	3.610	175	6.386
4.	2013	819	246	1.827	10	4.383	200	7.494
5.	2014	911	271	2.010	0	5.041	0	8.233
6.	2015	937	275	2.208	0	5.350	0	8.820

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Berikutnya yang menjadi perhatian adalah salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan secara berkala terhadap perdagangan dalam negeri adalah melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok, penting dan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi Ketersediaan stock dan harga Barang Pokok, penting dan strategis sampai dengan 31 Desember 2015 cukup terkendali, adapun hasil pemantauan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Beras

Harga rata-rata beras sampai dengan 31 Desember 2015 berkisar antara Rp. 9.000,- s.d Rp. 13.000 per 1 Kg. Naiknya harga beras ini disebabkan permintaan meningkat dari konsumen.

2) Gula

Sampai dengan 31 Desember 2015 harga gula relatif stabil yaitu berkisar Rp.12.000,- s.d Rp. 12.483/kg. Keadaan ini menggambarkan lancarnya pasokan gula ke Jambi dan stabilnya harga (stock yang cukup).

3) Minyak Goreng

Sampai dengan 31 Desember 2015 rata-rata harga minyak goreng berfluktuasi pada kisaran Rp.9.000,-/Kg - Rp.14.000,-/Kg. Harga tertinggi dicapai oleh minyak goreng bermerek (Bimoli Botol Spesial) Rp.14.000,-/Kg. Sedangkan harga minyak goreng curah yang umumnya dikonsumsi masyarakat menengah kebawah berada pada tingkat yang wajar yaitu kisaran Rp.9.000,-/Kg. Tidak ada fluktuasi harga karena diimbangi oleh produk lokal, khususnya minyak curah.

4) Daging dan telur

Sampai dengan 31 Desember 2015 harga Daging mengalami kenaikan mencapai Rp.120.000,-. Harga telur ayam Bruiler berfluktuasi kisaran Rp.1.100,-/butir – Rp.1.200,-/butir dan Rp. 1.800 s.d 2.000/butir untuk telur ayam kampung. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh menghadapi hari-hari besar, sehingga permintaan meningkat.

5) Tepung Terigu dan Susu

Sampai dengan 31 Desember 2015 harga terigu relatif stabil yang mana harga berkisar antara Rp.10.000 – Rp.11.000. Harga susu kental manis pada tahun 2015 relatif stabil sebesar Rp. 10.000 sedangkan susu bubuk berkisar antara Rp.38.300 – Rp.39.000.

6) Komoditi lainnya

Harga cabe dan bawang sampai dengan 31 Desember 2015 mengalami kenaikan masing-masing ; cabe merah besar berkisar antara Rp.35.000,- – Rp.43.800,-, cabe rawit berkisar Rp. 26.000,- Rp. 28.000,- ,Bawang merah berkisar Bawang Putih Rp.27.700,- – Rp.34.000,-. Kenaikan harga Cabe dan Bawang ini disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, sehingga mengganggu pola tanam petani, Oleh karena itu untuk mengantisipasi kebutuhan cabe dan bawang yang melonjak pada bulan puasa maka Dinas Pertanian tanaman Pangan Provinsi Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melakukan kerjasama dengan pengaturan

pola tanam cabe sehingga pada waktu bulan puasa dan lebaran tidak kekurangan stok yang mengakibatkan harga melonjak.

Sedangkan Kacang tanah dan komoditi lainnya situasi sampai dengan 31 Desember 2015 tidak mengalami fluktuasi, kecuali pada hari-hari besar tertentu seperti menghadapi lebaran, tahun baru, natal dan harga mengalami kenaikan secara berfluktuatif, namun demikian tingkat ketersediaan ataupun pasokan dipasar mencukupi. Untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal dalam ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan organisasi terkait telah melakukan operasi pasar murah, terutama memenuhi konsumsi masyarakat menghadapi lebaran.

b. Perdagangan Luar Negeri

Sampai dengan 31 Oktober 2015 realisasi ekspor Provinsi Jambi tercatat nilai ekspor baru mencapai US \$ 2.294.930.655. Namun masih lebih rendah bila dibandingkan tahun 2014. Dimana capaian ekspor Januari s/d oktober 2014 mencapai US\$ 3.340,57 juta. Penurunan yang terjadi sebesar 31,30 %.Perkembangan ekspor non migas Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.237
Perkembangan Ekspor di Provinsi Jambi, Tahun
2010 – 2015

No.	Tahun	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1.	2010	2.028.915.967	1.209.672.435
2.	2011	4.354.377.201	2.383.555.000
3.	2012	5.537.841.955	1.741.287.899
4.	2013	3.803.458.942	1.274.233.125
5.	2014	4.067.247.326	3.340.570.000
6.	2015 *	-	2.294.930.655

Keterangan : * data sampai dengan Oktober 2015

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2015

Komoditi ekspor Provinsi Jambi selama kurun waktu 2010-2015 tersebut di dominasi oleh komoditi Pinang, Karet, Minyak Nabati (CPO dll) Kayu Lapis, Kopi, Rempah, Pulp dan produk Tissue. Negara Tujuan ekspor Provinsi Jambi selama kurun waktu 2010-2015 mencapai 80 Negara, dengan 6 negara tujuan utama ekspor Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, China dan Amerika Serikat.

Sedangkan Nilai impor Provinsi Jambi sampai dengan Oktober 2015 sebesar US \$ 88,08 juta,. Perkembangan Impor Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.238
Perkembangan Impor di Provinsi Jambi, Tahun
2010-2015

No.	Tahun	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1.	2010	229.725.913	230.226.714
2.	2011	143.200.153	179.304.232
3.	2012	138.873.683	120.168.473
4.	2013	160.723.800	175.953.280
5	2014	145.038.501	190.851.465
6	2015 *	-	88.080.344

Keterangan : * data sampai dengan Oktober 2015

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2015

c. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber penerimaan (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kemetrollogian berupa jasa tera alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) berupa jasa pengujian mutu barang.

Sampai dengan Desember 2015, penerimaan PAD baik dari jasa pelayanan pengujian mutu barang UPTD BPSMB dan jasa pelayanan tera-tera ulang alat UTTP pada UPTD Metrologi sebesar Rp. 619.468.500,-. Jika dibandingkan tahun 2014, jumlah penerimaan sebesar Rp. 516.390.000,- berarti meningkat sebesar Rp. 103.078.500,- atau 19,96%.

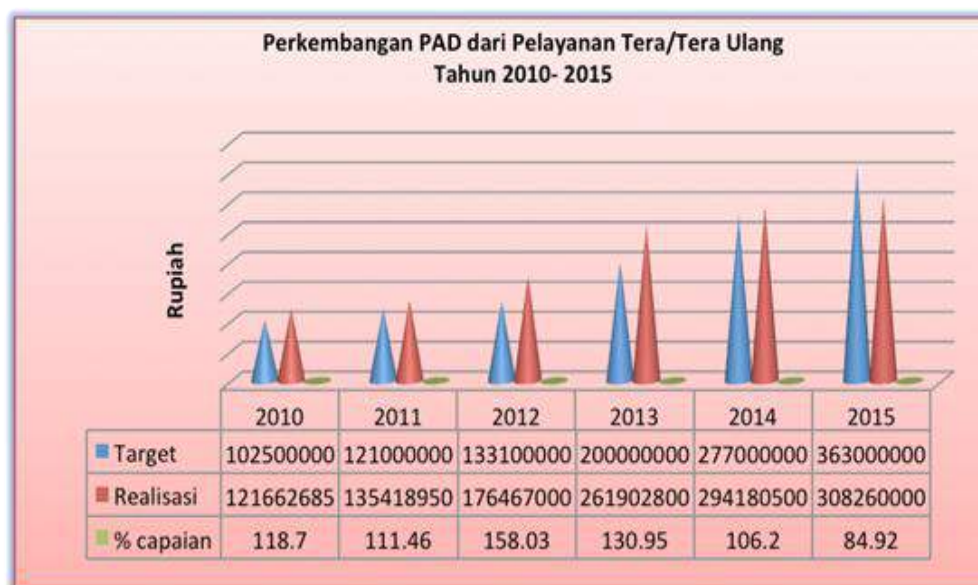
Untuk meningkatkan kinerja terhadap pelayanan tera alat UTTP kepada masyarakat maka telah dilaksanakan Survey indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan tera ulang UTTP dengan skor 73,66 (baik) katagori B dengan jumlah responden sebanyak 150 orang. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan atas pengujian dan sertifikasi mutu barang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pelanggan lab UPTD BPSMB sebanyak 70 responden . Terhadap kualitas 14 unsur pelayanan yang diukur diperoleh hasil skor IKM : 75,10 katagori B dengan Katagori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi IKM 62,51 – 81,25.

Perkembangan penerimaan PAD pada UPTD BPSMB dan UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.239
Perkembangan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang
UPTD BPSMB dan Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi

No.	Tahun	Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD BPSMB			Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Tera/Tera ulang alat UTTP pada UPTD Metrologi		
		Target (Rp)	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			(Rp)	Capaian		(Rp)	Capaian
1.	2010	160.000.000	192.685.850	120,58	102.500.000	121.662.685	118,7
2.	2011	170.000.000	172.692.500	101,58	121.500.000	135.418.950	111,46
3.	2012	180.000.000	181.280.000	100,71	133.100.000	210.341.000	158,03
4.	2013	190.000.000	211.236.750	111,18	200.000.000	244.761.800	122,38
5.	2014	220.000.000	222.209.500	101	277.000.000	294.180.500	106,2
6.	2015	250.000.000	311.208.500	124,48	363.000.000	308.260.000	84,92

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015



Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Gambar 4.94 Perkembangan PAD dari Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Tahun 2010 - 2015



Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tahun 2015

Gambar 4.95Perkembangan Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor, Tahun 2010-2015

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Masih kurangnya frekuensi kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan didukung pendanaan yang memadai.

- b) Masih kurangnya bantuan peralatan produksi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil industri.
- c) Masih kurangnya pengetahuan para pengusaha dalam mematuhi etika bisnis, serta kewajiban melaporkan jika terjadi penutupan usaha, perpindahan lokasi kegiatan usahanya diluar wilayah kerja.
- d) Jaminan ketersediaan Sembilan bahan pokok di pasaran belum maksimal.
- e) Masih kurangnya ketersediaan sarana perdagangan yang lebih representatif untuk kelancaran distribusi barang dan jasa.
- f) Tenaga Teknis penguji mutu barang (PMB) penguji dan kalibrasi dalam 3 tahun terakhir sudah banyak yang memasuki masa purna tugas/pension, sedangkan penggantian masih terbatas/sedikit sehingga tidak sesuai dengan beban tugas yang ada.
- g) Perkembangan jumlah UTTP semakin meningkat, sementara tenaga teknis penera yang memiliki kualifikasi sebagai ahli metrologi hanya 9 orang sehingga kurang memadai dibandingkan dengan jumlah UTTP yang harus ditangani dalam Provinsi Jambi.
- h) Belum terbentuknya unit Kerja Pengawasan Metrologi Legal pada unit Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jambi, sehingga tugas-tugas dibidang pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2) Solusi

- a) Perlunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta bimtek secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan dan inovasi bagi pelaku usaha industri.
- b) Adanya pengembangan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara industri dan lembaga keuangan perbankan dan non bank serta Pembangunan/pengembangan kawasan industri di ujung jabung perlu segera terwujud agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.
- c) Sosialisasi dan pelatihan kepada pengusaha dalam rangka tertib niaga.
- d) Penambahan frekuensi kegiatan operasi pasar dan pasar murah.

- e) Melakukan pembangunan/renovasi pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk menunjang kelancaran kegiatan perdagangan.
- f) Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BD) Provinsi Jambi dan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (PPMB) Kementerian Perdagangan telah mengusulkan penambahan SDM untuk tenaga pengujian dan lulusan sarjana teknik kimia, teknik mesin dan teknik elektro.
- g) Penambahan formasi PNS untuk diperlukan penambahan tenaga fungsional kemetrolagian, agar kinerja pembinaan dan pengawasan UTTP/BDKT lebih optimal dan merata dalam Provinsi Jambi.

4.2.7 Ketransmigrasian

Program transmigrasi bertujuan mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah/kawasan di Provinsi Jambi, meningkatkan keberdayaan masyarakat di lokasi transmigrasi dan masyarakat di kawasan terpadu mandiri (KTM) serta penyiapan areal transmigrasi yang potensial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program dan kegiatan di lokasi transmigrasi dan KTM diarahkan kepada penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi.

Pada tahun anggaran 2015, kegiatan ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui APBD Provinsi Jambi sebanyak 1 program dan 13 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.099.473.000,00. Dari anggaran yang disediakan untuk kegiatan ketransmigrasian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah terealisasi mencapai Rp879.315.797,00 (79,98%) dengan realisasi fisik sebesar 90,13%, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, telah dilaksanakan 14 kegiatan, yakni sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigrasi dan Peternakan dengan dana anggaran sebesar Rp81.310.750,00 dengan realisasi keuangan Rp80.025.000,00 (98,42%) dan realisasi fisik 100%.

Hal ini dikarenakan Bibit kopi pada lokasi Sungai Bermas tidak disediakan oleh penangkar yang bersertifikasi sesuai rekomendasi dan disbun Provinsi Jambi. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini bertujuan Terwujudnya masyarakat transmigrasi yang produktif.

- 2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di UPT dengan dana sebesar Rp. 53.229.800,- yang telah terealisasi sebesar Rp.52.921.500,- atau 99,42 % dan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
- 3) Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi kabupaten anggaran sebesar Rp38.141.500,00 yang telah terealisasi sebesar Rp37.935.000 atau 99,46% dan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lokasi transmigrasi melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan, dilaksanakan kegiatan pengendalian obat di gudang farmasi kabupaten. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat transmigran.
- 4) Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp50.245.862,00 (91,36%) dan realisasi fisik 100%. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya kondisi aman dan nyaman di wilayah transmigran. Pembinaan tersebut dengan melebur dan menghilangkan dikotomi kultur antara sesama warga transmigrasi maupun dengan masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi. Selain upaya preventif, upaya membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di lokasi transmigrasi seperti pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; hal tersebut merupakan sarana untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dengan melaksanakan pertemuan berkala semua pemangku kepentingan akan dapat mengeliminir timbulnya permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat dan damai.

- 5) Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan kerjasama antar Daerah dengan dana sebesar Rp 61.600.000,00 dengan realisasi kegiatan ini mencapai Rp 54.641.280,00 (88,70%) dan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk membiayai promosi potensi yang ada di wilayah transmigrasi melalui media massa dan mengikuti even-even promosi. Selain itu membangun jaringan kerjasama antar daerah pengelola transmigrasi dan daerah lain diharapkan mampu menarik minat investor dilokasi transmigrasi. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya perkembangan pemanfaatan potensi di wilayah transmigrasi.
- 6) Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT dengan dana sebesar Rp111.939.250,00, yang terealisasi sebesar Rp110.934.250,00 (99,10%) dan realisasi fisik 100%. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan transmigran.
- 7) Kegiatan Inventarisasi Pemenuhan Persyaratan Pengakhiran Status dan Sarana Prasarana di UPT. Dengan output Jumlah UPT yang diinventarisasi dalam pemenuhan persyaratan pengakhiran status di UPT dan sasaran (outcome) Terwujudnya perkembangan pemanfaatan potensi di wilayah transmigrasi. Mendukung kegiatan ini telah disediakan dana sebesar Rp. 13.924.000,- dan telah terealisasi realisasi keuangan dan fisik 100%.
- 8) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT dengan dana sebesar Rp145.850.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp142.850,00 (97,94%) dan realisasi fisik 100%. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat transmigran.
- 9) Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi dengan dana sebesar Rp213.750.000,00, dan realisasi sebesar Rp155.999.976,00 (72,98%) dengan realisasi fisik sebesar 72,98%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain Penetapan batas kawasan transmigrasi dan kawasan transmigrasi yang belum memiliki batas-batas yang

kongkrit. Sasaran (outcome) kegiatan ini adalah Terwujudnya perkembangan pemanfaatan potensi di wilayah transmigrasi.

- 10) Kegiatan Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS dengan dana sebesar Rp 55.550.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 48.539.179,00 (87,38%) dengan realisasi fisik sebesar 87,38%. Pos anggaran ini dilakukan untuk Kegiatan Monitoring secara berkala. Sasaran (outcome) adalah Terwujudnya peningkatan perkembangan pembangunan permukiman di wilayah STP.
- 11) Kegiatan Perencanaan Teknis Pemukiman dan Penempatan dengan anggaran sebesar Rp 137.500.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp 2.000.000 (1,45%) dengan realisasi fisik 1,45%, hal ini dikarenakan SK Pencadangan lahan dari Bupati Batanghari tidak keluar. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya kemudahan dalam perencanaan program ketransmigrasian
- 12) Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual, dengan anggaran sebesar Rp 45.150.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 44.959.750,00 (99,58%) dan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan kepada peserta transmigrasi secara menyeluruh, baik dari sisi usaha tani, keterampilan, penguasaan teknologi, pengorganisasian masyarakat, pembangunan jejaring kerja dan pembinaan mental dan spiritual. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pelayanan keagamaan yang dibutuhkan masyarakat transmigran.
- 13) Kegiatan Nakertrans EXPO dengan dana sebesar Rp 59.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp 57.827.100,00 (96,46%) dan realisasi fisik 100%. Keberhasilan pencapaian Program Pembangunan dalam bidang ketransmigrasian di Provinsi Jambi tidak terlepas dari upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan kabupaten, yang dimulai dari proses perencanaan, penempatan sampai dengan program-program Pembinaan dalam kawasan UPT maupun KTM. Oleh karenanya untuk menginformasikan kepada publik terhadap capaian-capaian keberhasilan program yang telah di laksanakan pada tahun

2015, di ekspose dalam bentuk promosi dan pameran yang dikemas melalui EXPO di tingkat nasional bersama seluruh provinsi seluruh Indonesia, salah satunya yang diikuti oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada Nakertrans EXPO Tahun 2015 bertempat Gedung Kantor Kementerian Nakertrans RI di Jakarta pada pertengahan Desember 2015, dan Provinsi Jambi meraih prestasi sebagai juara Harapan II Tingkat Nasional. Sasaran (*outcome*) dari kegiatan ini adalah Terbangunan informasi yang nyata perkembangan pembangunan dalam bidang nakertrans

14) Kegiatan Monitoring Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Sasaran (*outcome*) terwujudnya peningkatan perkembangan Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dialokasikan dana melalui APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 26.578.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 26.512.700,- atau 99,75 %, dengan realisasi fisik 100%.

